

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2026

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. neraca;
   c. laporan arus kas;
   d. laporan operasional;
   e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan sebesar Rp952.036.775.854,25 (sembilan ratus lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat koma dua puluh lima rupiah);
b. belanja sebesar Rp915.611.872.582,48 (sembilan ratus lima belas miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua koma empat puluh delapan rupiah);
c. surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp36.424.903.271,77 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh tujuh rupiah);
d. pembiayaan terdiri atas:
    1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp4.085.069.988,55 (empat miliar delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma lima puluh lima rupiah);
    2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
e. sisa lebih pembiayaan anggaran sebelum koreksi sebesar Rp39.009.973.260,32 (tiga puluh sembilan miliar sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh koma tiga puluh dua rupiah);
f. koreksi sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp(589.849.590,00) (minus lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
g. sisa lebih pembiayaan anggaran setelah koreksi sebesar Rp38.420.123.670,32 (tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh koma tiga puluh dua rupiah).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp14.702.552.079,21 (empat belas miliar tujuh ratus dua juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh sembilan koma dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp966.739.327.933,46 (sembilan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh enam rupiah);
    2. realisasi pendapatan sebesar Rp952.036.775.854,25 (sembilan ratus lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat koma dua puluh lima rupiah);
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp53.712.525.339,53 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp969.324.397.922,01 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua koma nol satu rupiah);

2. realisasi belanja sebesar Rp915.611.872.582,48 (sembilan ratus lima belas miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua koma empat puluh delapan rupiah);

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(39.009.973.260,32) (minus tiga puluh sembilan miliar sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh koma tiga puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp(2.585.069.988,55) (minus dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma lima puluh lima rupiah);
   2. realisasi surplus sebesar Rp36.424.903.271,77 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh tujuh rupiah);
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp4.085.069.988,55 (empat miliar delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma lima puluh lima rupiah);
   2. realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp4.085.069.988,55 (empat miliar delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma lima puluh lima rupiah);
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
   2. realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2025 terdiri atas:

a. jumlah aset sebesar Rp2.419.003.243.303,50 (dua triliun empat ratus sembilan belas miliar tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga koma lima rupiah);
b. jumlah kewajiban sebesar Rp30.691.796.791,88 (tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma delapan puluh delapan rupiah);
c. jumlah ekuitas Rp2.388.311.446.511,62 (dua triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus sebelas koma enam puluh dua rupiah).

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun 2025 yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp4.085.069.988,55 (empat miliar delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma lima puluh lima rupiah);
b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp81.790.323.280,07 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh koma nol tujuh rupiah);

c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp(45.365.420.008,30) (minus empat puluh lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu delapan koma tiga rupiah);
d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp(1.500.000.000,00) (minus satu miliar lima ratus juta rupiah);
e. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.420.123.670,32 (tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh koma tiga puluh dua rupiah).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. pendapatan sebesar Rp984.724.400.159,98 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu seratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah) terdiri dari:
    1. pendapatan asli daerah sebesar Rp143.768.253.221,62 (seratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu koma enam puluh dua rupiah);
    2. pendapatan transfer sebesar Rp780.316.025.936,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar tiga ratus enam belas juta dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
    3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp60.640.121.002,36 (enam puluh miliar enam ratus empat puluh juta seratus dua puluh satu ribu dua koma tiga puluh enam rupiah).
b. beban terdiri dari:
    1. beban operasi sebesar Rp1.015.989.467.964,08 (satu triliun lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat koma nol delapan rupiah);
    2. defisit operasi sebesar Rp(31.265.067.804,10) (minus tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat koma satu rupiah);
    3. surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp238.683.524,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
    4. pos luar biasa sebesar Rp(196.489.050,00) (minus seratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
c. defisit laporan operasional sebesar Rp(31.222.873.330,10) (minus tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh koma satu rupiah).

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp4.085.069.988,55 (empat miliar delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma lima puluh lima rupiah);

b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp4.085.069.988,55 (empat miliar delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma lima puluh lima rupiah);
c. subtotal (a-b) Rp 0,00 (nol rupiah);
d. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp38.420.123.670,32 (tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh koma tiga puluh dua rupiah);
e. subtotal (c+d) Rp38.420.123.670,32 (tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh koma tiga puluh dua rupiah);
f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
g. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp38.420.123.670,32 (tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh koma tiga puluh dua rupiah).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. ekuitas awal sebesar Rp2.421.166.191.465,57 (dua triliun empat ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah);
b. defisit laporan operasional Rp(31.222.873.330,10) (minus tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh koma satu rupiah);
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut :
    1. dampak kumulatif perubahan kebijakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
    2. dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp(1.631.871.623,85) (minus satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga koma delapan puluh lima rupiah);
d. ekuitas akhir sebesar Rp2.388.311.446.511,62 (dua triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus sebelas koma enam puluh dua rupiah).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran;
b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III memuat laporan operasional;
d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V memuat Neraca;
f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;

g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t. Lampiran XX memuat iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah terdiri atas; iktisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah; iktisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Agustus 2026

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026 NOMOR .!.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/36/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindaklanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR. 131

D A F T A R I S I

Kode REKENING	BIDANG, UNIT ORGANISASI	HAL
1	2	
LAMPIRAN I	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
LAMPIRAN I.1	RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN ORGANISASI	1
LAMPIRAN 1.2	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	16
LAMPIRAN 1.3	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	18
1.01.02.	KESEHATAN	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	28
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	33
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	38
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.0.00.0.00.01.0000	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	41
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	44
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
1.06.2.08.2.14.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	47
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
3.32.2.07.0.00.01.0000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.06.2.08.2.14.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	50
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
2.09.3.25.0.00.01.0000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	52
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	55
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	56
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	59
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	62
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.06.2.08.2.14.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	65
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	68

Kode REKENING	BIDANG, UNIT ORGANISASI	HAL
1	2	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	74
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	77
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2.22.3.26.2.19.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	79
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	81
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	82
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
2.22.3.26.2.19.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	83
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	86
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	88
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.09.3.25.0.00.01.0000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	89
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
2.22.3.26.2.19.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	90
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	91
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	94
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	95
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	
3.32.2.07.0.00.01.0000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	96
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	98
4.02	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKERTARIAT DPRD	102
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	
5.01	PERENCANAAN	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	105
5.02	KEUANGAN	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAERAH	107
5.03	KEPEGAWAIAN	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	111

Kode REKENING	BIDANG, UNIT ORGANISASI	HAL
1	2	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	114
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	115
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT KABUPATEN	116
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	
7.01	KECAMATAN	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	119
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SITIUNG	121
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN KOTO BARU	123
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	125
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN IX KOTO	127
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN TIMPEH	129
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN KOTO SALAK	131
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	133
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN KOTO BESAR	135
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN PADANG LAWEH	137
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TIUMANG	139
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	141
LAMPIRAN 1.4	REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	144
LAMPIRAN II	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	201
LAMPIRAN III	LAPORAN OPERASIONAL	202
LAMPIRAN IV	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	204
LAMPIRAN V	NERACA	205
LAMPIRAN VI	LAPORAN ARUS KAS	207
LAMPIRAN VII	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	210
LAMPIRAN VIII	DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH	466
LAMPIRAN IX	DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	468
LAMPIRAN X	DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR	469
LAMPIRAN XI	DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	471
LAMPIRAN XII	DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH	472
LAMPIRAN XIII	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP	474

Kode REKENING	BIDANG, UNIT ORGANISASI	HAL
1	2	
LAMPIRAN XIV	DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	476
LAMPIRAN XV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA	477
LAMPIRAN XVI	DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH	478
LAMPIRAN XVII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	479
LAMPIRAN XVIII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	480
LAMPIRAN XIX	DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	481
LAMPIRAN XX	IKTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH TERDIRI ATAS	
LAMPIRAN XX.1	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH	483
LAMPIRAN XX.2	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/ RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH	484

LAMPIRAN I.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	**Pendapatan**	**966.739.327.933,46**	**952.036.775.854,25**	**(14.702.552.079,21)**	**98,47**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**72.298.215.351,00**	**72.236.921.689,00**	**28.706.338,00**	**100,03**
1.01			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**85.100.000,00**	**112.527.488,00**	**27.427.480,00**	**132,22**
1.01	**1.01.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pendidikan**	**85.100.000,00**	**112.527.488,00**	**27.427.480,00**	**132,22**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	85.100.000,00	112.527.480,00	27.427.480,00	132,22
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.100.000,00	112.527.480,00	27.427.480,00	132,22
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	85.000.000,00	112.396.200,00	27.396.200,00	132,23
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.000,00	131.280,00	31.280,00	131,28
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**69.633.915.351,00**	**69.727.472.057,00**	**93.556.706,00**	**100,13**
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Kesehatan**	**69.633.915.351,00**	**69.727.472.057,00**	**93.556.706,00**	**100,13**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	69.633.915.351,00	69.727.472.057,00	93.556.706,00	100,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.633.915.351,00	69.727.472.057,00	93.556.706,00	100,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	69.633.915.351,00	69.574.492.907,00	(58.422.444,00)	99,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	152.979.150,00	152.979.150,00	0,00
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**2.192.700.000,00**	**2.083.941.452,00**	**(108.758.548,00)**	**95,03**
1.03	**1.03.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang**	**2.192.700.000,00**	**2.083.941.452,00**	**(108.758.548,00)**	**95,03**
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.192.700.000,00	2.083.941.452,00	(108.758.548,00)	95,03
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.192.700.000,00	2.083.941.452,00	(108.758.548,00)	95,03
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.190.000.000,00	2.081.192.500,00	(108.807.500,00)	95,03
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.700.000,00	2.748.952,00	48.952,00	101,81
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**296.500.000,00**	**312.980.700,00**	**16.480.700,00**	**105,55**
1.04	**1.04.2.10.0.00.01.0000**		**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**	**296.500.000,00**	**312.980.700,00**	**16.480.700,00**	**105,55**
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	296.500.000,00	312.980.700,00	16.480.700,00	105,55
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	296.500.000,00	312.980.700,00	16.480.700,00	105,55
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	290.000.000,00	305.745.000,00	15.745.000,00	105,42
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.500.000,00	7.235.700,00	735.700,00	111,31
2			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**625.280.000,00**	**656.886.900,00**	**31.606.900,00**	**105,05**
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**75.000.000,00**	**49.590.000,00**	**(25.410.000,00)**	**66,12**
2.09	**2.09.3.25.0.00.01.0000**		**Dinas Pangan dan Perikanan**	**75.000.000,00**	**49.590.000,00**	**(25.410.000,00)**	**66,12**
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	75.000.000,00	49.590.000,00	(25.410.000,00)	66,12
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000,00	49.590.000,00	(25.410.000,00)	66,12
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	75.000.000,00	49.590.000,00	(25.410.000,00)	66,12
2.17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**87.200.000,00**	**101.460.000,00**	**14.260.000,00**	**116,35**
2.17	**2.17.3.30.3.31.01.0000**		**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan**	**87.200.000,00**	**101.460.000,00**	**14.260.000,00**	**116,35**
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**5.500.000,00**	**4.850.000,00**	**(650.000,00)**	**88,18**
2.19	**2.22.3.26.2.19.01.0000**		**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**5.500.000,00**	**4.850.000,00**	**(650.000,00)**	**88,18**
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**13.980.000,00**	**12.681.000,00**	**(1.299.000,00)**	**90,70**
2.07	**3.32.2.07.0.00.01.0000**		**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**13.980.000,00**	**12.681.000,00**	**(1.299.000,00)**	**90,70**
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	13.980.000,00	12.681.000,00	(1.299.000,00)	90,70
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.980.000,00	12.681.000,00	(1.299.000,00)	90,70
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	13.980.000,00	12.681.000,00	(1.299.000,00)	90,70
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**318.600.000,00**	**372.080.000,00**	**53.480.000,00**	**116,78**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**318.600.000,00**	**372.080.000,00**	**53.480.000,00**	**116,78**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	318.600.000,00	372.080.000,00	53.480.000,00	116,78
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	318.600.000,00	372.080.000,00	53.480.000,00	116,78
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	318.000.000,00	372.030.000,00	54.030.000,00	116,99
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	600.000,00	50.000,00	(550.000,00)	8,33

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**5.500.000,00**	**4.850.000,00**	**(650.000,00)**	**88,18**
2.19	**2.22.3.26.2.19.01.0000**		**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**5.500.000,00**	**4.850.000,00**	**(650.000,00)**	**88,18**
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**13.980.000,00**	**12.681.000,00**	**(1.299.000,00)**	**90,70**
2.07	**3.32.2.07.0.00.01.0000**		**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**13.980.000,00**	**12.681.000,00**	**(1.299.000,00)**	**90,70**
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	13.980.000,00	12.681.000,00	(1.299.000,00)	90,70
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.980.000,00	12.681.000,00	(1.299.000,00)	90,70
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	13.980.000,00	12.681.000,00	(1.299.000,00)	90,70
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**318.600.000,00**	**372.080.000,00**	**53.480.000,00**	**116,78**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**318.600.000,00**	**372.080.000,00**	**53.480.000,00**	**116,78**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	318.600.000,00	372.080.000,00	53.480.000,00	116,78
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	318.600.000,00	372.080.000,00	53.480.000,00	116,78
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	318.000.000,00	372.030.000,00	54.030.000,00	116,99
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	600.000,00	50.000,00	(550.000,00)	8,33
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**110.000.000,00**	**103.225.000,00**	**(6.775.000,00)**	**93,84**
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Perhubungan**	**110.000.000,00**	**103.225.000,00**	**(6.775.000,00)**	**93,84**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	110.000.000,00	103.225.000,00	(6.775.000,00)	93,84
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.000.000,00	103.225.000,00	(6.775.000,00)	93,84
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	110.000.000,00	103.225.000,00	(6.775.000,00)	93,84
2.16			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**15.000.000,00**	**13.000.000,00**	**(2.000.000,00)**	**86,66**
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**15.000.000,00**	**13.000.000,00**	**(2.000.000,00)**	**86,66**
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,66
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,66
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,66
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**227.000.000,00**	**241.696.000,00**	**14.696.000,00**	**106,47**
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**227.000.000,00**	**241.696.000,00**	**14.696.000,00**	**106,47**
3.27	**3.27.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pertanian**	**227.000.000,00**	**241.696.000,00**	**14.696.000,00**	**106,47**
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	227.000.000,00	241.696.000,00	14.696.000,00	106,47
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	227.000.000,00	241.696.000,00	14.696.000,00	106,47
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	227.000.000,00	241.696.000,00	14.696.000,00	106,47
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**110.000.000,00**	**146.600.000,00**	**36.600.000,00**	**133,27**
4.01			**SEKRETARIAT DAERAH**	**110.000.000,00**	**146.600.000,00**	**36.600.000,00**	**133,27**
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**		**Sekretariat Daerah**	**110.000.000,00**	**146.600.000,00**	**36.600.000,00**	**133,27**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	110.000.000,00	146.600.000,00	36.600.000,00	133,27
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.000.000,00	146.600.000,00	36.600.000,00	133,27
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	110.000.000,00	146.600.000,00	36.600.000,00	133,27
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**893.551.682.582,46**	**878.736.554.165,25**	**(14.815.128.417,21)**	**98,34**
5.02			**KEUANGAN**	**893.551.682.582,46**	**878.736.554.165,25**	**(14.815.128.417,21)**	**98,34**
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**		**Badan Keuangan Daerah**	**893.551.682.582,46**	**878.736.554.165,25**	**(14.815.128.417,21)**	**98,34**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	893.551.682.582,46	878.736.554.165,25	(14.815.128.417,21)	98,34
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63.759.619.469,00	64.161.641.007,65	402.021.538,65	100,63
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.01	Pajak Daerah	53.158.000.000,00	54.317.593.473,00	1.159.593.473,00	102,18
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000,00	41.658.240,00	36.658.240,00	833,16

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.529.319.469,00	5.529.319.459,00	(10,00)	99,99
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.067.300.000,00	4.273.069.835,65	(794.230.164,35)	84,32
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	811.958.696.072,35	795.934.821.722,00	(16.023.874.350,35)	98,02
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766.702.365.600,00	750.718.824.220,00	(15.983.541.380,00)	97,91
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.256.330.472,35	45.215.997.502,00	(40.332.970,35)	99,91
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.833.367.041,11	18.640.091.435,60	806.724.394,49	104,52
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	82.698.940,00	(17.301.060,00)	82,69
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.733.367.041,11	18.557.392.495,60	824.025.454,49	104,64
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**17.150.000,00**	**18.118.000,00**	**968.000,00**	**105,64**
7.01			**KECAMATAN**	**17.150.000,00**	**18.118.000,00**	**968.000,00**	**105,64**
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**		**Kecamatan Pulau Punjung**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**		**Kecamatan Sitiung**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**		**Kecamatan Koto Baru**	**2.000.000,00**	**2.250.000,00**	**250.000,00**	**112,50**
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	112,50
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	112,50
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	112,50
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**		**Kecamatan Sungai Rumbai**	**3.900.000,00**	**7.768.000,00**	**3.868.000,00**	**199,17**
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.900.000,00	7.768.000,00	3.868.000,00	199,17
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.900.000,00	7.768.000,00	3.868.000,00	199,17
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	3.900.000,00	7.768.000,00	3.868.000,00	199,17
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**		**Kecamatan Sembilan Koto**	**2.000.000,00**	**1.250.000,00**	**(750.000,00)**	**62,50**
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**		**Kecamatan Timpeh**	**2.500.000,00**	**850.000,00**	**(1.650.000,00)**	**34,00**
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.500.000,00	850.000,00	(1.650.000,00)	34,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.500.000,00	850.000,00	(1.650.000,00)	34,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000,00	850.000,00	(1.650.000,00)	34,00
7.01	**7.01.0.00.0.00.09.0000**		**Kecamatan Koto Besar**	**2.000.000,00**	**1.250.000,00**	**(750.000,00)**	**62,50**
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50
		5	**Belanja**	**969.324.397.922,01**	**915.611.872.582,45**	**(53.712.525.339,56)**	**94,45**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	634.069.153.500,61	607.123.824.968,62	(26.945.328.531,99)	95,75
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	327.075.279.465,39	315.934.199.800,63	(11.141.079.664,76)	96,59
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	327.075.279.465,39	315.934.199.800,63	(11.141.079.664,76)	96,59
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	327.075.279.465,39	315.934.199.800,64	(11.141.079.664,75)	96,59
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	308.779.376.624,89	298.373.409.359,00	(10.405.967.265,89)	96,62
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	265.678.067.294,39	256.439.912.709,00	(9.238.154.585,39)	96,52
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.517.444.330,50	33.428.846.507,00	(1.088.597.823,50)	96,84
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	8.583.865.000,00	8.504.650.143,00	(79.214.857,00)	99,07
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	18.295.902.840,50	17.560.790.441,64	(735.112.398,86)	95,98
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.969.437.700,00	4.944.120.588,00	(25.317.112,00)	99,49
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.034.411.580,50	8.330.872.323,64	(703.539.256,86)	92,21
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.292.053.560,00	4.285.797.530,00	(6.256.030,00)	99,85
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	254.546.703.649,57	248.326.530.196,29	(6.220.173.453,28)	97,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	155.136.281.800,00	151.969.998.067,83	(3.166.283.732,17)	97,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	155.136.281.800,00	151.969.998.067,83	(3.166.283.732,17)	97,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	149.790.222.129,00	146.916.801.833,00	(2.873.420.296,00)	98,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	113.337.611.677,00	112.219.174.476,00	(1.118.437.201,00)	99,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.452.610.452,00	34.697.627.357,00	(1.754.983.095,00)	95,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.346.059.671,00	5.053.196.234,83	(292.863.436,17)	94,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.400.000,00	84.180.750,00	(2.219.250,00)	97,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.163.439.671,00	2.894.015.484,83	(269.424.186,17)	91,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.096.220.000,00	2.075.000.000,00	(21.220.000,00)	98,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019		Laboratorium Kesehatan Daerah	609.338.337,00	594.068.666,00	(15.269.671,00)	97,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5	BELANJA DAERAH	609.338.337,00	594.068.666,00	(15.269.671,00)	97,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	609.338.337,00	594.068.666,00	(15.269.671,00)	97,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1.01	Belanja Pegawai	155.327.877,00	155.316.328,00	(11.549,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	454.010.460,00	438.752.338,00	(15.258.122,00)	96,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	64.635.100.000,00	62.161.867.469,00	(2.473.232.531,00)	96,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	64.635.100.000,00	62.161.867.469,00	(2.473.232.531,00)	96,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.014.740.515,00	57.835.467.708,00	(179.272.807,00)	99,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.669.530.637,00	2.668.359.701,00	(1.170.936,00)	99,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.345.209.878,00	55.167.108.007,00	(178.101.871,00)	99,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	6.620.359.485,00	4.326.399.761,00	(2.293.959.724,00)	65,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.475.259.485,00	970.579.570,00	(504.679.915,00)	65,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.845.100.000,00	3.355.820.191,00	(1.489.279.809,00)	69,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021		Puskesmas Sungai Limau	1.218.140.334,70	1.200.233.351,00	(17.906.983,70)	98,52

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5	BELANJA DAERAH	1.218.140.334,70	1.200.233.351,00	(17.906.983,70)	98,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	1.211.140.334,70	1.200.233.351,00	(10.906.983,70)	99,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.1.01	Belanja Pegawai	206.919.745,70	206.183.377,00	(736.368,70)	99,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.004.220.589,00	994.049.974,00	(10.170.615,00)	98,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0020**		**Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai**	**7.366.308.000,00**	**7.299.484.271,00**	**(66.823.729,00)**	**99,09**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5	BELANJA DAERAH	7.366.308.000,00	7.299.484.271,00	(66.823.729,00)	99,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	6.176.769.000,00	6.121.624.074,00	(55.144.926,00)	99,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1.01	Belanja Pegawai	268.800.000,00	267.300.000,00	(1.500.000,00)	99,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.907.969.000,00	5.854.324.074,00	(53.644.926,00)	99,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	1.189.539.000,00	1.177.860.197,00	(11.678.803,00)	99,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.081.539.000,00	1.070.270.190,00	(11.268.810,00)	98,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.000.000,00	107.590.007,00	(409.993,00)	99,62
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0022**		**Puskesmas Sitiung I**	**2.616.112.010,62**	**2.608.312.819,00**	**(7.799.191,62)**	**99,70**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5	BELANJA DAERAH	2.616.112.010,62	2.608.312.819,00	(7.799.191,62)	99,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	2.536.112.010,62	2.529.058.565,00	(7.053.445,62)	99,72
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.1.01	Belanja Pegawai	969.697.812,00	969.672.228,00	(25.584,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.566.414.198,62	1.559.386.337,00	(7.027.861,62)	99,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.2	EELANJA MODAL	80.000.000,00	79.254.254,00	(745.746,00)	99,06
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	59.995.473,00	(4 527,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.258.781,00	(741.219,00)	96,29
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0023**		**Puskesmas Tiumang**	**1.724.190.611,00**	**1.668.462.527,00**	**(55.728.084,00)**	**96,76**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5	BELANJA DAERAH	1.724.190.611,00	1.668.462.527,00	(55.728.084,00)	96,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	1.692.790.611,00	1.640.615.797,00	(52.174.814,00)	96,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.1.01	Belanja Pegawai	485.140.611,00	477.503.483,00	(7.637.128,00)	98,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.207.650.000,00	1.163.112.314,00	(44.537.686.00)	96,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.2	BELANJA MODAL	31.400.000,00	27.846.730,00	(3.553.270,00)	88,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.400.000,00	27.846.730,00	(3.553.270,00)	88,68
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0024**		**Puskesmas Silago**	**1.652.967.217,00**	**1.643.635.053,00**	**(9.332.164,00)**	**99,43**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5	BELANJA DAERAH	1.652.967.217,00	1.643.635.053,00	(9.332.164,00)	99,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	1.637.967.217,00	1.634.311.053,00	(3.656.164,00)	99,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.1.01	Belanja Pegawai	650.926.320,00	650.734.360,00	(191.960,00)	99,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	987.040.897,00	983.576.693,00	(3.464.204,00)	99,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	9.324.000,00	(5.676.000,00)	62,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	9.324.000,00	(5.676.000,00)	62,16
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0025**		**Puskesmas Sialang**	**1.545.151.825,00**	**1.514.874.285,00**	**(30.277.540,00)**	**98,04**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5	BELANJA DAERAH	1.545.151.825,00	1.514.874.285,00	(30.277.540,00)	98,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	1.475.151.825,00	1.445.066.385,00	(30.085.440,00)	97,96

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.1.01	Belanja Pegawai	575.478.239,00	561.562.684,00	(13.915.555,00)	97,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	899.673.586,00	883.503.701,00	(16.169.885,00)	98,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.2	BELANJA MODAL	70.000.000,00	69.807.900,00	(192.100,00)	99,72
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	69.807.900,00	(192.100,00)	99,72
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0026**		**Puskesmas Sitiung II**	**1.548.625.500,09**	**1.533.928.382,00**	**(14.697.118,09)**	**99,05**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5	BELANJA DAERAH	1.548.625.500,09	1.533.928.382,00	(14.697.118,09)	99,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	1.448.385.500,09	1.433.806.382,00	(14.579.118,09)	98,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5.1.01	Belanja Pegawai	403.342.367,00	403.342.367,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.045.043.133,09	1.030.464.015,00	(14.579.118,09)	98,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5.2	BELANJA MODAL	100.240.000,00	100.122.000,00	(118.000,00)	99,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.240.000,00	100.122.000,00	(118.000,00)	99,88
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0027**		**Puskesmas Padang Laweh**	**1.248.051.184,21**	**1.238.701.394,00**	**(9.349.790,21)**	**99,25**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5	BELANJA DAERAH	1.248.051.184,21	1.238.701.394,00	(9.349.790,21)	99,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	1.226.051.184,21	1.216.723.394,00	(9.327.790,21)	99,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.1.01	Belanja Pegawai	295.600.000,21	288.421.040,00	(7.178.960,21)	97,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	930.451.184,00	928.302.354,00	(2.148.830,00)	99,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.2	BELANJA MODAL	22.000.000,00	21.978.000,00	(22.000,00)	99,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	21.978.000,00	(22.000,00)	99,90
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0028**		**Puskesmas Koto Besar**	**2.022.082.203,37**	**1.896.437.856,13**	**(125.644.347,24)**	**93,78**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5	BELANJA DAERAH	2.022.082.203,37	1.896.437.856,13	(125.644.347,24)	93,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	1.989.632.203,37	1.864.628.981,13	(125.003.222,24)	93,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5.1.01	Belanja Pegawai	593.934.220,00	555.973.616,60	(37.960.603,40)	93,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.395.697.983,37	1.308.655.364,53	(87.042.618,84)	93,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	32.450.000,00	31.808.875,00	(641.125,00)	98,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.450.000,00	31.808.875,00	(641.125,00)	98,02
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0029**		**Puskesmas Koto Baru**	**3.239.440.425,00**	**3.228.613.851,33**	**(10.826.573,67)**	**99,66**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	5	BELANJA DAERAH	3.239.440.425,00	3.228.613.851,33	(10.826.573,67)	99,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	3.167.440.425,00	3.157.727.661,33	(9.712.763,67)	99,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	5.1.01	Belanja Pegawai	1.102.047.209,00	1.095.986.721,48	(6.060.487,52)	99,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.065.393.216,00	2.061.740.939,85	(3.652.276,15)	99,82
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	72.000.000,00	70.886.190,00	(1.113.810,00)	98,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.000.000,00	70.886.190,00	(1.113.810,00)	98,45
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0030**		**Puskesmas Sungai Rumbai**	**2.433.518.107,00**	**2.430.607.392,00**	**(2.910.715,00)**	**99,88**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	5	BELANJA DAERAH	2.433.518.107,00	2.430.607.392,00	(2.910.715,00)	99,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	2.354.208.107,00	2.353.275.394,00	(932.713,00)	99,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	5.1.01	Belanja Pegawai	955.386.000,00	955.223.854,00	(162.146,00)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.398.822.107,00	1.398.051.540,00	(770.567,00)	99,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	5.2	BELANJA MODAL	79.310.000,00	77.331.998,00	(1.978.002,00)	97,50
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.310.000,00	77.331.998,00	(1.978.002,00)	97,50
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0031**		**Puskesmas Gunung Medan**	**1.462.424.208,00**	**1.452.137.772,00**	**(10.286.436,00)**	**99,29**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	5	BELANJA DAERAH	1.462.424.208,00	1.452.137.772,00	(10.286.436,00)	99,29

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	1.434.424.208,00	1.425.092.085,00	(9.332.123,00)	99,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	5.1.01	Belanja Pegawai	452.461.208,00	448.497.136,00	(3.964.072,00)	99,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	981.963.000,00	976.594.949,00	(5.368.051,00)	99,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	28.000.000,00	27.045.687,00	(954.313,00)	96,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	5.2.02	Belanja Modal Peraletan dan Mesin	28.000.000,00	27.045.687,00	(954.313,00)	96,59
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0032**		**Puskesmas Sungai Dareh**	**2.953.918.620,00**	**2.841.238.020,00**	**(112.680.600,00)**	**96,18**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	5	BELANJA DAERAH	2.953.918.620,00	2.841.238.020,00	(112.680.600,00)	96,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	2.813.618.620,00	2.727.101.520,00	(86.517.100,00)	96,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	5.1.01	Belanja Pegawai	1.178.895.646,00	1.174.627.896,00	(4.267.750,00)	99,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.634.722.974,00	1.552.473.624,00	(82.249.350,00)	94,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	140.300.000,00	114.136.500,00	(26.163.500,00)	81,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.800.000,00	46.786.500,00	(4.013.500,00)	92,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.500.000,00	67.350.000,00	(7.150.000,00)	90,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0033**		**Puskesmas Timpeh**	**1.839.376.235,00**	**1.804.762.910,00**	**(34.613.325,00)**	**98,11**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	5	BELANJA DAERAH	1.839.376.235,00	1.804.762.910,00	(34.613.325,00)	98,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	1.769.376.235,00	1.744.844.000,00	(24.532.235,00)	98,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	500.041.516,00	478.244.236,00	(21.797.280,00)	95,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.269.334.719,00	1.266.599.764,00	(2.734.955,00)	99,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	70.000.000,00	59.918.910,00	(10.081.090,00)	85,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	59.918.910,00	(10.081.090,00)	85,59
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0034**		**Puskesmas Beringin Sakti**	**1.295.677.031,58**	**1.239.166.110,00**	**(56.510.921,58)**	**95,63**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	5	BELANJA DAERAH	1.295.677.031,58	1.239.166.110,00	(56.510.921,58)	95,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	5.1	BELANJA OPERASI	1.266.677.031,58	1.211.060.910,00	(55.616.121,58)	95,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	255.500.000,00	241.782.373,00	(13.717.627,00)	94,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.011.177.031,58	969.278.537,00	(41.898.494,58)	95,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	5.2	BELANJA MODAL	29.000.000,00	28.105.200,00	(894.800,00)	96,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.000.000,00	28.105.200,00	(894.800,00)	96,91
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**31.147.690.854,00**	**22.326.624.992,00**	**(8.821.065.862,00)**	**71,67**
1.03	**1.03.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang**	**31.147.690.854,00**	**22.326.624.992,00**	**(8.821.065.862,00)**	**71,67**
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	31.147.690.854,00	22.326.624.992,00	(8.821.065.862,00)	71,67
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.828.339.659,00	12.599.355.779,00	(1.228.983.880,00)	91,11
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.508.220.229,00	4.414.942.495,00	(93.277.734,00)	97,93
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.320.119.430,00	8.184.413.284,00	(1.135.706.146,00)	87,81
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	17.319.351.195,00	9.727.269.213,00	(7.592.081.982,00)	56,16
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	674.000.000,00	569.499.888,00	(104.500.112,00)	84,49
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.207.148.695,00	314.684.600,00	(4.892.464.095,00)	6,04
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.438.202.500,00	8.843.084.725,00	(2.595.117.775,00)	77,31
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**5.823.238.851,65**	**5.664.187.424,99**	**(159.051.426,66)**	**97,26**
1.04	**1.04.2.10.0.00.01.0000**		**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**	**5.823.238.851,65**	**5.664.187.424,99**	**(159.051.426,66)**	**97,26**
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.823.238.851,65	5.664.187.425,00	(159.051.426,65)	97,26

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.823.238.851,65	5.664.187.425,00	(159.051.426,65)	97,26
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.781.324.964,00	1.744.477.996,00	(36.846.968,00)	97,93
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.041.913.887,65	3.919.709.429,00	(122.204.458,65)	96,97
1.05			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**11.299.323.397,00**	**10.792.339.125,72**	**(506.984.271,28)**	**95,51**
1.05	**1.05.0.00.0.00.01.0000**		**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**8.120.513.672,00**	**7.706.704.947,00**	**(413.808.725,00)**	**94,90**
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.120.513.672,00	7.706.704.947,00	(413.808.725,00)	94,90
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.567.013.672,00	7.264.229.948,00	(302.783.724,00)	95,99
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.403.585.422,00	3.350.269.715,00	(53.315.707,00)	98,43
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.163.428.250,00	3.913.960.233,00	(249.468.017,00)	94,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	553.500.000,00	442.474.999,00	(111.025.001,00)	79,94
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	553.500.000,00	442.474.999,00	(111.025.001,00)	79,94
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**3.178.809.725,00**	**3.085.634.178,72**	**(93.175.546,28)**	**97,06**
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.178.809.725,00	3.085.634.178,72	(93.175.546,28)	97,06
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.153.309.725,00	3.060.306.178,72	(93.003.546,28)	97,05
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.299.129.957,00	1.259.270.514,00	(39.859.443,00)	96,93
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.854.179.768,00	1.801.035.664,72	(53.144.103,28)	97,13
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	25.500.000,00	25.328.000,00	(172.000,00)	99,32
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.500.000,00	25.328.000,00	(172.000,00)	99,32
1.06			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**4.176.917.283,00**	**4.079.943.428,99**	**(96.973.854,01)**	**97,67**
1.06	**1.06.2.08.2.14.01.0000**		**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**4.176.917.283,00**	**4.079.943.428,99**	**(96.973.854,01)**	**97,67**
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.176.917.283,00	4.079.943.429,00	(96.973.854,00)	97,67
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.176.917.283,00	4.079.943.429,00	(96.973.854,00)	97,67
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.666.396.225,00	2.623.763.754,00	(42.632.471,00)	98,40
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.510.521.058,00	1.456.179.675,00	(54.341.383,00)	96,40
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**77.611.557.116,40**	**64.278.839.467,24**	**(13.332.717.649,16)**	**82,82**
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**5.019.247.301,00**	**4.917.401.891,00**	**(101.845.410,00)**	**97,97**
2.07	**3.32.2.07.0.00.01.0000**		**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**5.019.247.301,00**	**4.917.401.891,00**	**(101.845.410,00)**	**97,97**
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.019.247.301,00	4.917.401.891,00	(101.845.410,00)	97,97
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.804.163.141,00	4.702.762.234,00	(101.400.907,00)	97,88
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.464.944.441,00	3.394.283.744,00	(70.660.697,00)	97,96
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.339.218.700,00	1.308.478.490,00	(30.740.210,00)	97,70
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	215.084.160,00	214.639.657,00	(444.503,00)	99,79
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.084.160,00	214.639.657,00	(444.503,00)	99,79
2.08			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**2.745.200.870,00**	**2.271.212.125,24**	**(473.988.744,76)**	**82,73**
2.08	**1.06.2.08.2.14.01.0000**		**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**2.745.200.870,00**	**2.271.212.125,24**	**(473.988.744,76)**	**82,73**
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.745.200.870,00	2.271.212.125,24	(473.988.744,76)	82,73
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	739.545.900,00	659.029.790,00	(80.516.110,00)	89,11
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	739.545.900,00	659.029.790,00	(80.516.110,00)	89,11
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.005.654.970,00	1.612.182.335,24	(393.472.634,76)	80,38
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.005.654.970,00	1.612.182.335,24	(393.472.634,76)	80,38
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**3.692.990.121,00**	**3.609.108.442,00**	**(83.881.679,00)**	**97,72**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.09	**2.09.3.25.0.00.01.0000**		**Dinas Pangan dan Perikanan**	**3.692.990.121,00**	**3.609.108.442,00**	**(83.881.679,00)**	**97,72**
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.692.990.121,00	3.609.108.442,00	(83.881.679,00)	97,72
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.664.790.121,00	3.581.058.442,00	(83.731.679,00)	97,71
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.601.281,00	2.387.612.804,00	(32.988.477,00)	98,63
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.244.188.840,00	1.193.445.638,00	(50.743.202,00)	95,92
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	28.200.000,00	28.050.000,00	(150.000,00)	99,46
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.200.000,00	28.050.000,00	(150.000,00)	99,46
2.10			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**132.940.000,00**	**132.354.250,00**	**(585.750,00)**	**99,55**
2.10	**1.04.2.10.0.00.01.0000**		**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**	**132.940.000,00**	**132.354.250,00**	**(585.750,00)**	**99,55**
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	132.940.000,00	132.354.250,00	(585.750,00)	99,55
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	132.940.000,00	132.354.250,00	(585.750,00)	99,55
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.940.000,00	132.354.250,00	(585.750,00)	99,55
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**6.544.139.251,00**	**6.204.667.759,00**	**(339.471.492,00)**	**94,81**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**6.544.139.251,00**	**6.204.667.759,00**	**(339.471.492,00)**	**94,81**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.544.139.251,00	6.204.667.759,00	(339.471.492,00)	94,81
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.772.139.251,00	5.434.835.264,00	(337.303.987,00)	94,15
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.364.760.104,00	2.315.774.322,00	(48.985.782,00)	97,92
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.407.379.147,00	3.119.060.942,00	(288.318.205,00)	91,53
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	772.000.000,00	769.832.495,00	(2.167.505,00)	99,71
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	772.000.000,00	769.832.495,00	(2.167.505,00)	99,71
2.12			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**3.353.714.299,00**	**3.241.755.417,00**	**(111.958.882,00)**	**96,66**
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**3.353.714.299,00**	**3.241.755.417,00**	**(111.958.882,00)**	**96,66**
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.353.714.299,00	3.241.755.417,00	(111.958.882,00)	96,66
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.351.914.299,00	3.239.981.017,00	(111.933.282,00)	96,66
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.376.829.037,00	2.294.239.787,00	(82.589.250,00)	96,52
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	975.085.262,00	945.741.230,00	(29.344.032,00)	96,99
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.800.000,00	1.774.400,00	(25.600,00)	98,57
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	1.774.400,00	(25.600,00)	98,57
2.13			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**4.284.356.312,00**	**4.112.944.807,00**	**(171.411.505,00)**	**95,99**
2.13	**2.13.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**4.284.356.312,00**	**4.112.944.807,00**	**(171.411.505,00)**	**95,99**
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.284.356.312,00	4.112.944.807,00	(171.411.505,00)	95,99
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.279.356.312,00	4.108.005.307,00	(171.351.005,00)	95,99
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.382.720.362,00	2.336.804.379,00	(45.915.983,00)	98,07
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.896.635.950,00	1.771.200.928,00	(125.435.022,00)	93,38
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	4.939.500,00	(60.500,00)	98,79
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.939.500,00	(60.500,00)	98,79
2.14			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**4.119.102.000,00**	**3.122.231.152,00**	**(996.870.848,00)**	**75,79**
2.14	**1.06.2.08.2.14.01.0000**		**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**4.119.102.000,00**	**3.122.231.152,00**	**(996.870.848,00)**	**75,79**
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.119.102.000,00	3.122.231.152,00	(996.870.848,00)	75,79
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.119.102.000,00	3.122.231.152,00	(996.870.848,00)	75,79
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.119.102.000,00	3.122.231.152,00	(996.870.848,00)	75,79
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**23.162.429.698,00**	**14.085.949.737,00**	**(9.076.479.961,00)**	**60,81**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Perhubungan**	**23.162.429.698,00**	**14.085.949.737,00**	**(9.076.479.961,00)**	**60,81**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	23.162.429.698,00	14.085.949.737,00	(9.076.479.961,00)	60,81
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	22.992.772.370,00	13.919.871.597,00	(9.072.900.773,00)	60,54
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.122.507.880,00	3.061.746.680,00	(60.761.200,00)	98,05
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.870.264.490,00	10.858.124.917,00	(9.012.139.573,00)	54,64
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	169.657.328,00	166.078.140,00	(3.579.188,00)	97,89
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.606.328,00	107.803.140,00	(1.803.188,00)	98,35
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.051.000,00	58.275.000,00	(1.776.000,00)	97,04
2.16			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**4.924.023.342,40**	**4.802.549.932,00**	**(121.473.410,40)**	**97,53**
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**4.924.023.342,40**	**4.802.549.932,00**	**(121.473.410,40)**	**97,53**
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.924.023.342,40	4.802.549.932,00	(121.473.410,40)	97,53
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.889.723.342,40	4.768.599.932,00	(121.123.410,40)	97,52
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.036.501.056,00	1.988.757.630,00	(47.743.426,00)	97,65
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.853.222.286,40	2.779.842.302,00	(73.379.984,40)	97,42
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	34.300.000,00	33.950.000,00	(350.000,00)	98,97
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.300.000,00	33.950.000,00	(350.000,00)	98,97
2.17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**3.648.448.239,00**	**3.365.596.278,00**	**(282.851.961,00)**	**92,24**
2.17	**2.17.3.30.3.31.01.0000**		**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan**	**3.648.448.239,00**	**3.365.596.278,00**	**(282.851.961,00)**	**92,24**
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.648.448.239,00	3.365.596.278,00	(282.851.961,00)	92,24
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.615.548.239,00	3.334.625.438,00	(280.922.801,00)	92,23
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.246.352.329,00	2.196.435.255,00	(49.917.074,00)	97,77
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.369.195.910,00	1.138.190.183,00	(231.005.727,00)	83,12
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	32.900.000,00	30.970.840,00	(1.929.160,00)	94,13
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.900.000,00	30.970.840,00	(1.929.160,00)	94,13
2.18			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**2.836.141.038,00**	**2.783.126.819,00**	**(53.014.219,00)**	**98,13**
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**2.836.141.038,00**	**2.783.126.819,00**	**(53.014.219,00)**	**98,13**
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.836.141.038,00	2.783.126.819,00	(53.014.219,00)	98,13
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.823.141.038,00	2.770.126.819,00	(53.014.219,00)	98,12
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.958.223.258,00	1.917.218.463,00	(41.004.795,00)	97,90
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	864.917.780,00	852.908.356,00	(12.009.424,00)	98,61
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
2.18	2.18 0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**2.496.920.382,00**	**1.833.299.990,00**	**(663.620.392,00)**	**73,42**
2.19	**2.22.3.26.2.19.01.0000**		**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**2.496.920.382,00**	**1.833.299.990,00**	**(663.620.392,00)**	**73,42**
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.496.920.382,00	1.833.299.990,00	(663.620.392,00)	73,42
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.441.920.382,00	1.778.465.990,00	(663.454.392,00)	72,83
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.920.382,00	1.383.549.090,00	(608.371.292,00)	69,45
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	394.916.900,00	(55.083.100,00)	87,75
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	55.000.000,00	54.834.000,00	(166.000,00)	99,69
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.000.000,00	54.834.000,00	(166.000,00)	99,69
2.20			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**5.751.051,00**	**5.441.200,00**	**(309.851,00)**	**94,61**
2.20	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**5.751.051,00**	**5.441.200,00**	**(309.851,00)**	**94,61**
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.751.051,00	5.441.200,00	(309.851,00)	94,61
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.751.051,00	5.441.200,00	(309.851,00)	94,61
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.751.051,00	5.441.200,00	(309.851,00)	94,61
2.21			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**7.922.499,00**	**7.358.050,00**	**(564.449,00)**	**92,87**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.21	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**7.922.499,00**	**7.358.050,00**	**(564.449,00)**	**92,87**
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.922.499,00	7.358.050,00	(564.449,00)	92,87
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.922.499,00	7.358.050,00	(564.449,00)	92,87
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.922.499,00	7.358.050,00	(564.449,00)	92,87
2.22			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**7.261.632.633,00**	**6.502.464.338,00**	**(759.168.295,00)**	**89,54**
2.22	**2.22.3.26.2.19.01.0000**		**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**7.261.632.633,00**	**6.502.464.338,00**	**(759.168.295,00)**	**89,54**
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.261.632.633,00	6.502.464.338,00	(759.168.295,00)	89,54
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.088.810.223,00	6.330.270.199,00	(758.540.024,00)	89,29
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.952.572.795,00	1.898.525.731,00	(54.047.064,00)	97,23
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.582.237.428,00	4.431.744.468,00	(150.492.960,00)	96,71
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	554.000.000,00	0,00	(554.000.000,00)	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	172.822.410,00	172.194.139,00	(628.271,00)	99,63
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.999.999,00	(1,00)	99,99
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.822.410,00	142.194.140,00	(628.270,00)	99,56
2.23			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**3.342.067.080,00**	**3.247.801.580,00**	**(94.265.500,00)**	**97,17**
2.23	**2.23.2.24.0.00.01.0000**		**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**3.342.067.080,00**	**3.247.801.580,00**	**(94.265.500,00)**	**97,17**
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.342.067.080,00	3.247.801.580,00	(94.265.500,00)	97,17
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.327.959.580,00	3.235.501.580,00	(92.458.000,00)	97,22
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.584.548.135,00	2.547.899.732,00	(36.648.403,00)	98,58
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.411.445,00	687.601.848,00	(55.809.597,00)	92,49
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	14.107.500,00	12.300.000,00	(1.807.500,00)	87,18
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	3.300.000,00	(1.700.000,00)	66,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.107.500,00	9.000.000,00	(107.500,00)	98,81
2.24			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**34.531.000,00**	**33.575.700,00**	**(955.300,00)**	**97,23**
2.24	**2.23.2.24.0.00.01.0000**		**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**34.531.000,00**	**33.575.700,00**	**(955.300,00)**	**97,23**
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	34.531.000,00	33.575.700,00	(955.300,00)	97,23
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	34.531.000,00	33.575.700,00	(955.300,00)	97,23
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.531.000,00	33.575.700,00	(955.300,00)	97,23
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**17.753.335.464,00**	**16.529.933.706,59**	**(1.223.401.757,41)**	**93,10**
3.25			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1.349.444.100,00**	**1.250.403.485,59**	**(99.040.614,41)**	**92,66**
3.25	**2.09.3.25.0.00.01.0000**		**Dinas Pangan dan Perikanan**	**1.349.444.100,00**	**1.250.403.485,59**	**(99.040.614,41)**	**92,66**
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.349.444.100,00	1.250.403.485,59	(99.040.614,41)	92,66
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.077.876.100,00	984.980.999,00	(92.895.101,00)	91,38
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.077.876.100,00	984.980.999,00	(92.895.101,00)	91,38
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	271.568.000,00	265.422.486,59	(6.145.513,41)	97,73
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.400.000,00	36.350.000,00	(1.050.000,00)	97,19
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.768.000,00	175.672.486,59	(5.095.513,41)	97,18
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	100,00
3.26			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**26.148.350,00**	**26.096.430,00**	**(51.920,00)**	**99,80**
3.26	**2.22.3.26.2.19.01.0000**		**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**26.148.350,00**	**26.096.430,00**	**(51.920,00)**	**99,80**
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	5	BELANJA DAERAH	26.148.350,00	26.096.430,00	(51.920,00)	99,80
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	26.148.350,00	26.096.430,00	(51.920,00)	99,80
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.148.350,00	26.096.430,00	(51.920,00)	99,80
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**16.155.034.064,00**	**15.052.299.542,00**	**(1.102.734.522,00)**	**93,17**
3.27	**3.27.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pertanian**	**16.155.034.064,00**	**15.052.299.542,00**	**(1.102.734.522,00)**	**93,17**
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	16.155.034.064,00	15.052.299.542,00	(1.102.734.522,00)	93,17
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.875.034.064,00	14.782.699.542,00	(1.092.334.522,00)	93,11
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.769.337.569,00	10.665.821.698,00	(103.515.871,00)	99,03

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.696.495,00	3.831.877.844,00	(968.818.651,00)	79,81
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	305.000.000,00	285.000.000,00	(20.000.000,00)	93,44
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	280.000.000,00	269.600.000,00	(10.400.000,00)	96,28
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	280.000.000,00	269.600.000,00	(10.400.000,00)	96,28
3.30			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**122.800.750,00**	**120.287.979,00**	**(2.512.771,00)**	**97,95**
3.30	**2.17.3.30.3.31.01.0000**		**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan**	**122.800.750,00**	**120.287.979,00**	**(2.512.771,00)**	**97,95**
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	122.800.750,00	120.287.979,00	(2.512.771,00)	97,95
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	122.800.750,00	120.287.979,00	(2.512.771,00)	97,95
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.800.750,00	120.287.979,00	(2.512.771,00)	97,95
3.31			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**99.908.200,00**	**80.846.270,00**	**(19.061.930,00)**	**80,92**
3.31	**2.17.3.30.3.31.01.0000**		**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan**	**99.908.200,00**	**80.846.270,00**	**(19.061.930,00)**	**80,92**
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	99.908.200,00	80.846.270,00	(19.061.930,00)	80,92
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	99.908.200,00	80.846.270,00	(19.061.930,00)	80,92
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.908.200,00	80.846.270,00	(19.061.930,00)	80,92
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**70.298.519.143,00**	**64.940.549.448,00**	**(5.357.969.695,00)**	**92,37**
4.01			**SEKRETARIAT DAERAH**	**31.470.228.597,00**	**27.032.725.740,00**	**(4.437.502.857,00)**	**85,89**
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0000**		**Sekretariat Daerah**	**31.470.228.597,00**	**27.032.725.740,00**	**(4.437.502.857,00)**	**85,89**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	31.470.228.597,00	27.032.725.740,00	(4.437.502.857,00)	85,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	29.834.391.247,00	25.939.989.688,00	(3.894.401.559,00)	86,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.053.595.447,00	7.891.983.510,00	(161.611.937,00)	97,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.143.795.800,00	17.258.926.563,00	(1.884.869.237,00)	90,15
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.637.000.000,00	789.079.615,00	(1.847.920.385,00)	29,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.635.837.350,00	1.092.736.052,00	(543.101.298,00)	66,79
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.635.837.350,00	1.092.736.052,00	(543.101.298,00)	66,79
4.02			**SEKRETARIAT DPRD**	**38.828.290.546,00**	**37.907.823.708,00**	**(920.466.838,00)**	**97,62**
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**		**Sekretariat DPRD**	**38.828.290.546,00**	**37.907.823.708,00**	**(920.466.838,00)**	**97,62**
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	38.828.290.546,00	37.907.823.708,00	(920.466.838,00)	97,62
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	37.146.290.546,00	36.407.923.739,00	(738.366.807,00)	98,01
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	15.424.048.866,00	15.334.150.799,00	(89.898.067,00)	99,41
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.722.241.680,00	21.073.772.940,00	(648.468.740,00)	97,01
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.682.000.000,00	1.499.899.969,00	(182.100.031,00)	89,17
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.682.000.000,00	1.499.899.969,00	(182.100.031,00)	89,17
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**142.312.475.766,00**	**136.743.640.869,00**	**(5.568.834.897,00)**	**96,08**
5.01			**PERENCANAAN**	**4.116.239.481,00**	**3.997.298.539,00**	**(118.940.942,00)**	**97,11**
5.01	**5.01.5.05.0.00.01.0000**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**4.116.239.481,00**	**3.997.298.539,00**	**(118.940.942,00)**	**97,11**
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.116.239.481,00	3.997.298.539,00	(118.940.942,00)	97,11
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.099.109.691,00	3.980.177.085,00	(118.932.606,00)	97,09
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.636.886.116,00	2.571.022.128,00	(65.863.988,00)	97,50
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.452.223.575,00	1.409.154.957,00	(53.068.618,00)	96,37
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	17.129.790,00	17.121.454,00	(8.336,00)	99,95
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.009.790,00	14.001.454,00	(8.336,00)	99,94
5.02			**KEUANGAN**	**132.703.784.865,00**	**127.421.457.245,00**	**(5.282.327.620,00)**	**96,01**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**		**Badan Keuangan Daerah**	**132.703.784.865,00**	**127.421.457.245,00**	**(5.282.327.620,00)**	**96,01**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	132.703.784.865,00	127.421.457.245,00	(5.282.327.620,00)	96,01
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.375.312.725,00	12.674.648.037,00	(700.664.688,00)	94,76
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.451.781.845,00	7.148.897.222,00	(302.884.623,00)	95,93
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.923.530.880,00	5.525.750.815,00	(397.780.065,00)	93,28
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	374.675.000,00	346.888.950,00	(27.786.050,00)	92,58
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.675.000,00	153.859.950,00	(20.815.050,00)	88,08
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	193.029.000,00	(6.971.000,00)	96,51
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.775.000.000,00	196.489.050,00	(1.578.510.950,00)	11,06
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.775.000.000,00	196.489.050,00	(1.578.510.950,00)	11,06
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	117.178.797.140,00	114.203.431.208,00	(2.975.365.932,00)	97,46
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.134.311.500,00	2.800.869.072,00	(2.333.442.428,00)	54,55
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	112.044.485.640,00	111.402.562.136,00	(641.923.504,00)	99,42
5.03			**KEPEGAWAIAN**	**4.742.129.020,00**	**4.587.985.142,00**	**(154.143.878,00)**	**96,74**
5.03	**5.03.5.04.0.00.01.0000**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**4.742.129.020,00**	**4.587.985.142,00**	**(154.143.878,00)**	**96,74**
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.742.129.020,00	4.587.985.142,00	(154.143.878,00)	96,74
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.742.129.020,00	4.587.985.142,00	(154.143.878,00)	96,74
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.765.854.970,00	3.695.275.346,00	(70.579.624,00)	98,12
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	976.274.050,00	892.709.796,00	(83.564.254,00)	91,44
5.04			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**545.322.400,00**	**544.759.672,00**	**(562.728,00)**	**99,89**
5.04	**5.03.5.04.0.00.01.0000**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**545.322.400,00**	**544.759.672,00**	**(562.728,00)**	**99,89**
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	545.322.400,00	544.759.672,00	(562.728,00)	99,89
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	545.322.400,00	544.759.672,00	(562.728,00)	99,89
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.322.400,00	544.759.672,00	(562.728,00)	99,89
5.05			**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**205.000.000,00**	**192.140.271,00**	**(12.859.729,00)**	**93,72**
5.05	**5.01.5.05.0.00.01.0000**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**205.000.000,00**	**192.140.271,00**	**(12.859.729,00)**	**93,72**
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	205.000.000,00	192.140.271,00	(12.859.729,00)	93,72
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	205.000.000,00	192.140.271,00	(12.859.729,00)	93,72
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000,00	192.140.271,00	(12.859.729,00)	93,72
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**6.486.094.838,00**	**5.958.367.966,00**	**(527.726.872,00)**	**91,86**
6.01			**INSPEKTORAT DAERAH**	**6.486.094.838,00**	**5.958.367.966,00**	**(527.726.872,00)**	**91,86**
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.0000**		**Inspektorat Kabupaten**	**6.486.094.838,00**	**5.958.367.966,00**	**(527.726.872,00)**	**91,86**
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.486.094.838,00	5.958.367.966,00	(527.726.872,00)	91,86
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.401.294.838,00	5.957.382.966,00	(443.911.872,00)	93,06
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.036.987.738,00	3.983.378.742,00	(53.608.996,00)	98,67
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.364.307.100,00	1.974.004.224,00	(390.302.876,00)	83,49
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	84.800.000,00	985.000,00	(83.815.000,00)	1,16
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.800.000,00	985.000,00	(83.815.000,00)	1,16
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**16.912.503.491,00**	**16.303.922.771,00**	**(608.580.720,00)**	**96,40**
7.01			**KECAMATAN**	**16.912.503.491,00**	**16.303.922.771,00**	**(608.580.720,00)**	**96,40**
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**		**Kecamatan Pulau Punjung**	**2.116.292.429,00**	**2.054.792.411,00**	**(61.500.018,00)**	**97,09**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.116.292.429,00	2.054.792.411,00	(61.500.018,00)	97,09
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.116.292.429,00	2.054.792.411,00	(61.500.018,00)	97,09

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.861.680.869,00	1.814.757.189,00	(46.923.680,00)	97,47
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.611.560,00	240.035.222,00	(14.576.338,00)	94,27
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**		**Kecamatan Sitiung**	**1.898.247.255,00**	**1.853.476.012,00**	**(44.771.243,00)**	**97,64**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	1.898.247.255,00	1.853.476.012,00	(44.771.243,00)	97,64
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.898.247.255,00	1.853.476.012,00	(44.771.243,00)	97,64
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.667.312.860,00	1.628.537.875,00	(38.774.985,00)	97,67
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.934.395,00	224.938.137,00	(5.996.258,00)	97,40
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**		**Kecamatan Koto Baru**	**1.928.089.411,00**	**1.873.883.513,00**	**(54.205.898,00)**	**97,18**
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	1.928.089.411,00	1.873.883.513,00	(54.205.898,00)	97,18
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.928.089.411,00	1.873.883.513,00	(54.205.898,00)	97,18
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.586.425.861,00	1.545.168.380,00	(41.257.481,00)	97,39
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.663.550,00	328.715.133,00	(12.948.417,00)	96,21
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**		**Kecamatan Sungai Rumbai**	**1.616.082.047,00**	**1.570.479.407,00**	**(45.602.640,00)**	**97,17**
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	1.616.082.047,00	1.570.479.407,00	(45.602.640,00)	97,17
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.616.082.047,00	1.570.479.407,00	(45.602.640,00)	97,17
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.322.188.997,00	1.292.764.017,00	(29.424.980,00)	97,77
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.893.050,00	277.715.390,00	(16.177.660,00)	94,49
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**		**Kecamatan Sembilan Koto**	**1.245.340.431,00**	**1.202.069.515,00**	**(43.270.916,00)**	**96,52**
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	1.245.340.431,00	1.202.069.515,00	(43.270.916,00)	96,52
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.245.340.431,00	1.202.069.515,00	(43.270.916,00)	96,52
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	977.465.176,00	949.554.458,00	(27.910.718,00)	97,14
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.875.255,00	252.515.057,00	(15.360.198,00)	94,26
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**		**Kecamatan Timpeh**	**1.282.898.250,00**	**1.150.382.108,00**	**(132.516.142,00)**	**89,67**
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	1.282.898.250,00	1.150.382.108,00	(132.516.142,00)	89,67
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.282.898.250,00	1.150.382.108,00	(132.516.142,00)	89,67
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.008.478.630,00	936.707.208,00	(71.771.422,00)	92,88
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.419.620,00	213.674.900,00	(60.744.720,00)	77,86
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**		**Kecamatan Koto Salak**	**1.198.909.454,00**	**1.161.300.501,00**	**(37.608.953,00)**	**96,86**
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	1.198.909.454,00	1.161.300.501,00	(37.608.953,00)	96,86
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.198.909.454,00	1.161.300.501,00	(37.608.953,00)	96,86
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	955.907.104,00	927.597.335,00	(28.309.769,00)	97,03
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.002.350,00	233.703.166,00	(9.299.184,00)	96,17
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**		**Kecamatan Asam Jujuhan**	**1.179.195.026,00**	**1.121.488.984,00**	**(57.706.042,00)**	**95,10**
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	1.179.195.026,00	1.121.488.984,00	(57.706.042,00)	95,10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.179.195.026,00	1.121.488.984,00	(57.706.042,00)	95,10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	888.410.076,00	842.360.084,00	(46.049.992,00)	94,81
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.784.950,00	279.128.900,00	(11.656.050,00)	95,99
7.01	**7.01.0.00.0.00.09.0000**		**Kecamatan Koto Besar**	**1.844.464.792,00**	**1.796.343.963,00**	**(48.120.829,00)**	**97,39**
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	1.844.464.792,00	1.796.343.963,00	(48.120.829,00)	97,39
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.844.464.792,00	1.796.343.963,00	(48.120.829,00)	97,39
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.508.631.242,00	1.469.330.094,00	(39.301.148,00)	97,39

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.833.550,00	327.013.869,00	(8.819.681,00)	97,37
7.01	**7.01.0.00.0.00.10.0000**		**Kecamatan Padang Laweh**	**1.161.290.702,00**	**1.118.301.214,00**	**(42.989.488,00)**	**96,29**
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	1.161.290.702,00	1.118.301.214,00	(42.989.488,00)	96,29
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.161.290.702,00	1.118.301.214,00	(42.989.488,00)	96,29
7.01	7.01.0.00 0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	908.656.002,00	877.676.214,00	(30.979.788,00)	96,59
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.634.700,00	240.625.000,00	(12.009.700,00)	95,24
7.01	**7.01.0.00.0.00.11.0000**		**Kecamatan Tiumang**	**1.441.693.694,00**	**1.401.405.143,00**	**(40.288.551,00)**	**97,20**
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	1.441.693.694,00	1.401.405.143,00	(40.288.551,00)	97,20
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.441.693.694,00	1.401.405.143,00	(40.288.551,00)	97,20
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.113.009.144,00	1.088.693.123,00	(24.316.021,00)	97,81
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.684.550,00	312.712.020,00	(15.972.530,00)	95,14
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**3.880.758.603,00**	**3.732.793.386,00**	**(147.965.217,00)**	**96,18**
8.01			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**3.880.758.603,00**	**3.732.793.386,00**	**(147.965.217,00)**	**96,18**
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**3.880.758.603,00**	**3.732.793.386,00**	**(147.965.217,00)**	**96,18**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.880.758.603,00	3.732.793.386,00	(147.965.217,00)	96,18
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.862.758.603,00	3.714.863.886,00	(147.894.717,00)	96,17
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.109.973.133,00	1.072.928.144,00	(37.044.989,00)	96,66
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.635.820.185,00	1.524.990.457,00	(110.829.728,00)	93,22
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.116.965.285,00	1.116.945.285,00	(20.000,00)	99,99
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	17.929.500,00	(70.500,00)	99,60
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	17.929.500,00	(70.500,00)	99,60
			Jumlah	**(2.585.069.988,55)**	**36.424.903.271,80**	**39.009.973.260,35**	**(1.409,04)**

LAMPIRAN I.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	**966.739.327.933,46**	**952.036.775.854,25**	**98,48**	**970.822.454.588,79**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**136.947.264.820,00**	**137.461.862.696,65**	**100,38**	**108.370.246.672,79**
Pendapatan Pajak Daerah	53.158.000.000,00	54.317.593.473,00	102,18	25.092.743.485,78
Pendapatan Retribusi Daerah	73.182.745.351,00	73.178.734.847,00	99,99	65.941.537.340,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.529.319.469,00	5.529.319.459,00	100,00	5.347.929.006,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.077.200.000,00	4.436.214.917,65	87,38	11.988.036.841,01
PENDAPATAN TRANSFER	**811.958.696.072,35**	**795.934.821.722,00**	**98,03**	**850.689.858.617,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**703.312.378.600,00**	**687.331.418.220,00**	**97,73**	**716.383.072.416,00**
Dana Bagi Hasil Pajak	19.517.202.000,00	16.769.613.800,00	85,92	14.676.153.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	26.633.537.500,00	26.270.721.000,00	98,64	22.402.073.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	499.375.747.100,00	496.572.481.339,00	99,44	512.944.707.932,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	157.785.892.000,00	147.718.602.081,00	93,62	166.360.138.484,00
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	**63.389.987.000,00**	**63.387.406.000,00**	**100,00**	**76.065.729.000,00**
Dana Desa	56.185.785.000,00	56.185.785.000,00	100,00	55.320.687.000,00
Dana Insentif Fiskal	7.204.202.000,00	7.201.621.000,00	99,96	20.745.042.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	**45.256.330.472,35**	**45.215.997.502,00**	**99,91**	**58.241.057.201,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.256.330.472,35	45.215.997.502,00	99,91	58.241.057.201,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**17.833.367.041,11**	**18.640.091.435,60**	**104,52**	**11.762.349.299,00**
Pendapatan Hibah	100.000.000,00	82.698.940,00	82,70	71.350.441,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	17.733.367.041,11	18.557.392.495,60	104,65	11.690.998.858,00
JUMLAH PENDAPATAN	**966.739.327.933,46**	**952.036.775.854,25**	**98,48**	**970.822.454.588,79**
BELANJA DAERAH	**969.324.397.922,01**	**915.611.872.582,48**	**94,46**	**1.013.167.924.077,29**
BELANJA OPERASI	**792.360.152.082,51**	**755.555.738.316,18**	**95,36**	**793.179.544.263,13**
Belanja Pegawai	498.350.557.499,30	485.726.445.153,08	97,47	454.911.665.442,94
Belanja Barang dan Jasa	280.362.764.298,21	258.738.701.220,10	92,29	304.013.952.063,19
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	13.646.830.285,00	11.090.591.943,00	81,27	34.253.926.757,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	**58.010.448.699,50**	**45.656.214.008,30**	**78,70**	**102.187.717.063,16**
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan mesin	14.255.474.863,00	12.620.746.293,00	88,53	24.237.257.450,00
Gedung dan Bangunan	24.722.171.276,50	16.965.018.966,71	68,62	28.954.072.575,16
Jalan, irigasi dan jaringan	14.138.190.500,00	11.201.347.218,59	79,23	45.054.989.838,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.634.561.060,00	4.617.797.530,00	99,64	3.810.397.200,00
Belanja Aset Lainnya	260.051.000,00	251.304.000,00	0,00	131.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.775.000.000,00**	**196.489.050,00**	**11,07**	**2.485.520.287,00**
Belanja Tidak Terduga	1.775.000.000,00	196.489.050,00	11,07	2.485.520.287,00
JUMLAH BELANJA	**852.145.600.782,01**	**801.408.441.374,48**	**94,05**	**897.852.781.613,29**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5
TRANSFER	**117.178.797.140,00**	**114.203.431.208,00**	**97,46**	**115.315.142.464,00**
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	**117.178.797.140,00**	**114.203.431.208,00**	**97,46**	**115.315.142.464,00**
Bagi Hasil Pajak	4.870.101.500,00	2.590.944.672,00	53,20	1.809.666.373,00
Bagi Hasil Retribusi	264.210.000,00	209.924.400,00	79,45	174.703.451,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	112.044.485.640,00	111.402.562.136,00	99,43	113.330.772.640,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**969.324.397.922,01**	**915.611.872.582,48**	**94,46**	**1.013.167.924.077,29**
SURPLUS/(DEFISIT)	**(2.585.069.988,55)**	**36.424.903.271,77**	**(1.409,05)**	**(42.345.469.488,50)**
PEMBIAYAAN	**4.085.069.988,55**	**4.085.069.988,55**	**100,00**	**46.430.539.477,05**
PENERIMAAN DAERAH	**4.085.069.988,55**	**4.085.069.988,55**	**100,00**	**46.430.539.477,05**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	4.085.069.988,55	4.085.069.988,55	100,00	46.430.539.477,05
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	**4.085.069.988,55**	**4.085.069.988,55**	**100,00**	**46.430.539.477,05**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Utang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	**2.585.069.988,55**	**2.585.069.988,55**	**100,00**	**46.430.539.477,05**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SEBELUM KOREKSI	0,00	39.009.973.260,32	0,00	4.085.069.988,55
KOREKSI SILPA	0,00	(589.849.590,00)	0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SETELAH KOREKSI		**38.420.123.670,32**		**4.085.069.988,55**

BUPATI DHARMASRAYA

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN I.3

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Pendidikan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	85.100.000,00	112.527.480,00	27.427.480,00	132,22	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.100.000,00	112.527.480,00	27.427.480,00	132,22	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	85.000.000,00	112.396.200,00	27.396.200,00	132,23	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.000,00	131.280,00	31.280,00	131,28	
				JUMLAH PENDAPATAN	85.100.000,00	112.527.480,00	27.427.480,00	132,22	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	327.075.279.465,39	315.934.199.800,64	(11.141.079.664,75)	96,59	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	268.681.235.219,39	259.127.042.212,00	(9.554.193.007,39)	96,44	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	266.912.817.294,39	257.624.562.709,00	(9.288.254.585,39)	96,52	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	266.912.817.294,39	257.624.562.709,00	(9.288.254.585,39)	96,52	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5,1	BELANJA OPERASI	266.912.817.294,39	257.624.562.709,00	(9.288.254.585,39)	96,52	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	265.678.067.294,39	256.439.912.709,00	(9.238.154.585,39)	96,52	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.234.750.000,00	1.184.650.000,00	(50.100.000,00)	95,94	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	156.429.000,00	153.380.668,00	(3.048.332,00)	98,05	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5,1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	46.345.000,00	46.345.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5,1	BELANJA OPERASI	46.345.000,00	46.345.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.345.000,00	46.345.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.989.000,00	6.988.000,00	(1.000,00)	99,98	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5,1	BELANJA OPERASI	6.989.000,00	6.988.000,00	(1.000,00)	99,98	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.989.000,00	6.988.000,00	(1.000,00)	99,98	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	22.598.000,00	22.594.000,00	(4.000,00)	99,98	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5,1	BELANJA OPERASI	22.598.000,00	22.594.000,00	(4.000,00)	99,98	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.598.000,00	22.594.000,00	(4.000,00)	99,98	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.699.500,00	34.699.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5,1	BELANJA OPERASI	34.699.500,00	34.699.500,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.699.500,00	34.699.500,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	41.297.500,00	38.254.168,00	(3.043.332,00)	92,63	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5,1	BELANJA OPERASI	41.297.500,00	38.254.168,00	(3.043.332,00)	92,63	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.297.500,00	38.254.168,00	(3.043.332,00)	92,63	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.460.748.925,00	1.248.535.485,00	(212.213.440,00)	85,47	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5,1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	118.638.325,00	117.737.485,00	(900.840,00)	99,24	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5,1	BELANJA OPERASI	118.638.325,00	117.737.485,00	(900.840,00)	99,24	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.638.325,00	117.737.485,00	(900.840,00)	99,24	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.338.110.600,00	1.126.798.000,00	(211.312.600,00)	84,20	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5,1	BELANJA OPERASI	1.338.110.600,00	1.126.798.000,00	(211.312.600,00)	84,20	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.338.110.600,00	1.126.798.000,00	(211.312.600,00)	84,20	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	151.240.000,00	100.563.350,00	(50.676.650,00)	66,49	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN	18.000.000,00	17.091.400,00	(908.600,00)	94,95	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5,1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.091.400,00	(908.600,00)	94,95	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.091.400,00	(908.600,00)	94,95	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	123.200.000,00	73.431.950,00	(49.768.050,00)	59,60	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5,1	BELANJA OPERASI	123.200.000,00	73.431.950,00	(49.768.050,00)	59,60	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.200.000,00	73.431.950,00	(49.768.050,00)	59,60	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5,1	BELANJA OPERASI	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.1.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	58.363.155.996,00	56.797.369.888,64	(1.585.786.107,36)	97,28	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	34.333.459.163,00	33.616.123.946,64	(717.335.216,36)	97,91	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	726.599.676,00	711.345.566,82	(15.254.109,18)	97,90	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	5,1	BELANJA OPERASI	55.928.100,00	44.853.898,00	(11.074.202,00)	80,19	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.928.100,00	44.853.898,00	(11.074.202,00)	80,19	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	5,2	BELANJA MODAL	670.671.576,00	666.491.668,82	(4.179.907,18)	99,37	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	670.671.576,00	666.491.668,82	(4.179.907,18)	99,37	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5,1	BELANJA OPERASI	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004		PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5,1	BELANJA OPERASI	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005		PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5,1	BELANJA OPERASI	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.253.387.362,08	1.177.389.573,00	(75.997.789,08)	93,93	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5,1	BELANJA OPERASI	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5,2	BELANJA MODAL	1.252.807.362,08	1.176.819.573,00	(75.987.789,08)	93,93	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.252.807.362,08	1.176.819.573,00	(75.987.789,08)	93,93	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5,1	BELANJA OPERASI	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	320.580.000,00	320.512.045,00	(67.955,00)	99,97	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010	5,1	BELANJA OPERASI	120.580.000,00	120.543.805,00	(36.195,00)	99,96	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.580.000,00	120.543.805,00	(36.195,00)	99,96	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010	5,2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.968.240,00	(31.760,00)	99,98	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	199.968.240,00	(31.760,00)	99,98	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011		REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5,1	BELANJA OPERASI	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	570.000,00	(10.000,00)	98,27	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	1.122.830.000,00	1.121.260.497,00	(1.569.503,00)	99,86	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5,1	BELANJA OPERASI	516.830.000,00	515.356.727,00	(1.473.273,00)	99,71	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	516.830.000,00	515.356.727,00	(1.473.273,00)	99,71	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5,2	BELANJA MODAL	606.000.000,00	605.903.770,00	(96.230,00)	99,98	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	606.000.000,00	605.903.770,00	(96.230,00)	99,98	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	223.924.700,00	218.005.000,00	(5.919.700,00)	97,35	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5,1	BELANJA OPERASI	223.924.700,00	218.005.000,00	(5.919.700,00)	97,35	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.924.700,00	218.005.000,00	(5.919.700,00)	97,35	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	6.793.800,00	4.520.000,00	(2.273.800,00)	66,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5,1	BELANJA OPERASI	6.793.800,00	4.520.000,00	(2.273.800,00)	66,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.793.800,00	4.520.000,00	(2.273.800,00)	66,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	668.470.050,00	633.230.164,00	(35.239.886,00)	94,72	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5,1	BELANJA OPERASI	668.470.050,00	633.230.164,00	(35.239.886,00)	94,72	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.470.050,00	633.230.164,00	(35.239.886,00)	94,72	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	37.773.000,00	34.826.000,00	(2.947.000,00)	92,19	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5,1	BELANJA OPERASI	37.773.000,00	34.826.000,00	(2.947.000,00)	92,19	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.773.000,00	34.826.000,00	(2.947.000,00)	92,19	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	24.423.048.717,00	24.388.418.514,00	(34.630.203,00)	99,85	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5,1	BELANJA OPERASI	19.516.201.357,00	19.487.727.154,00	(28.474.203,00)	99,85	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.935.101.357,00	15.909.247.154,00	(25.854.203,00)	99,83	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	3.581.100.000,00	3.578.480.000,00	(2.620.000,00)	99,92	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5,2	BELANJA MODAL	4.906.847.360,00	4.900.691.360,00	(6.156.000,00)	99,87	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.254.428.900,00	2.254.428.900,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.652.418.460,00	2.646.262.460,00	(6.156.000,00)	99,76	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	338.636.800,00	333.580.000,00	(5.056.800,00)	98,50	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5,1	BELANJA OPERASI	338.636.800,00	333.580.000,00	(5.056.800,00)	98,50	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.636.800,00	333.580.000,00	(5.056.800,00)	98,50	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	7.708.000,00	6.878.000,00	(830.000,00)	89,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035	5,1	BELANJA OPERASI	7.708.000,00	6.878.000,00	(830.000,00)	89,23	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.708.000,00	6.878.000,00	(830.000,00)	89,23	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	6.878.000,00	6.878.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036	5,1	BELANJA OPERASI	6.878.000,00	6.878.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.878.000,00	6.878.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	5,1	BELANJA OPERASI	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG	33.907.250,00	31.915.700,00	(1.991.550,00)	94,12	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5,1	BELANJA OPERASI	33.907.250,00	31.915.700,00	(1.991.550,00)	94,12	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.907.250,00	31.915.700,00	(1.991.550,00)	94,12	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	1.870.000,00	0,00	(1.870.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	5,1	BELANJA OPERASI	1.870.000,00	0,00	(1.870.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	0,00	(1.870.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0041		FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.140.000,00	4.090.000,00	(3.050.000,00)	57,28	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0041	5,1	BELANJA OPERASI	7.140.000,00	4.090.000,00	(3.050.000,00)	57,28	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	4.090.000,00	(3.050.000,00)	57,28	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0042		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TIK	291.700.000,00	234.975.900,00	(56.724.100,00)	80,55	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0042	5,1	BELANJA OPERASI	291.700.000,00	234.975.900,00	(56.724.100,00)	80,55	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.700.000,00	234.975.900,00	(56.724.100,00)	80,55	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043		PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	26.495.800,00	25.952.500,00	(543.300,00)	97,94	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	5,1	BELANJA OPERASI	26.495.800,00	25.952.500,00	(543.300,00)	97,94	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.495.800,00	25.952.500,00	(543.300,00)	97,94	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0045		PERLENGKAPAN DASAR BUKU TEKS DAN NON TEKS PESERTA DIDIK	40.879.250,00	33.053.000,00	(7.826.250,00)	80,85	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0045	5,1	BELANJA OPERASI	7.826.250,00	0,00	(7.826.250,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.826.250,00	0,00	(7.826.250,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0045	5,2	BELANJA MODAL	33.053.000,00	33.053.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0045	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.053.000,00	33.053.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	5.847.700,00	5.520.000,00	(327.700,00)	94,39	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5,1	BELANJA OPERASI	5.847.700,00	5.520.000,00	(327.700,00)	94,39	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.847.700,00	5.520.000,00	(327.700,00)	94,39	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	3.137.917.037,92	2.799.816.990,00	(338.100.047,92)	89,22	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5,1	BELANJA OPERASI	234.891.724,50	219.441.518,00	(15.450.206,50)	93,42	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.891.724,50	219.441.518,00	(15.450.206,50)	93,42	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5,2	BELANJA MODAL	2.903.025.313,42	2.580.375.472,00	(322.649.841,42)	88,88	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.903.025.313,42	2.580.375.472,00	(322.649.841,42)	88,88	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	19.883.880,00	19.820.000,00	(63.880,00)	99,67	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5,1	BELANJA OPERASI	19.883.880,00	19.820.000,00	(63.880,00)	99,67	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.883.880,00	19.820.000,00	(63.880,00)	99,67	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0049		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0049	5,1	BELANJA OPERASI	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	37.009.800,00	36.156.400,00	(853.400,00)	97,69	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5,1	BELANJA OPERASI	37.009.800,00	36.156.400,00	(853.400,00)	97,69	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.009.800,00	36.156.400,00	(853.400,00)	97,69	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	985.608.840,00	928.705.896,82	(56.902.943,18)	94,22	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5,2	BELANJA MODAL	985.608.840,00	928.705.896,82	(56.902.943,18)	94,22	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	985.608.840,00	928.705.896,82	(56.902.943,18)	94,22	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR	386.473.500,00	321.765.200,00	(64.708.300,00)	83,25	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5,1	BELANJA OPERASI	386.473.500,00	321.765.200,00	(64.708.300,00)	83,25	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.473.500,00	321.765.200,00	(64.708.300,00)	83,25	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	208.000.000,00	203.463.000,00	(4.537.060,00)	97,81	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5,2	BELANJA MODAL	208.000.000,00	203.463.000,00	(4.537.000,00)	97,81	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.000.000,00	203.463.000,00	(4.537.000,00)	97,81	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	16.201.999.353,00	15.512.478.512,00	(689.520.841,00)	95,74	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0001		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	471.095.040,00	464.097.297,00	(6.997.743,00)	98,51	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0001	5,1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	5.785.000,00	(6.215.000,00)	48,20	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	5.785.000,00	(6.215.000,00)	48,20	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0001	5,2	BELANJA MODAL	459.095.040,00	458.312.297,00	(782.743,00)	99,82	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	459.095.040,00	458.312.297,00	(782.743,00)	99,82	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006		PEMBANGUNAN LABORATORIUM	855.375.090,00	801.656.792,00	(53.718.208,00)	93,71	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5,1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	35.950.023,00	(49.977,00)	99,86	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.950.023,00	(49.977,00)	99,86	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5,2	BELANJA MODAL	819.375.000,00	765.706.769,00	(53.668.231,00)	93,45	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	59.949.978,00	(50.022,00)	99,91	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	759.375.000,00	705.756.791,00	(53.618.209,00)	92,93	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	429.618.816,00	363.944.364,00	(65.674.452,00)	84,71	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5,2	BELANJA MODAL	429.618.816,00	363.944.364,00	(65.674.452,00)	84,71	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	429.618.816,00	363.944.364,00	(65.674.452,00)	84,71	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	477.574.913,00	379.548.687,00	(98.026.226,00)	79,47	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5,1	BELANJA OPERASI	98.791.000,00	95.679.969,00	(3.111.031,00)	96,85	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.791.000,00	95.679.969,00	(3.111.031,00)	96,85	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5,2	BELANJA MODAL	378.783.913,00	283.868.718,00	(94.915.195,00)	74,94	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	378.783.913,00	283.868.718,00	(94.915.195,00)	74,94	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	224.000.000,00	222.079.920,00	(1.920.080,00)	99,14	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5,1	BELANJA OPERASI	224.000.000,00	222.079.920,00	(1.920.080,00)	99,14	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.000.000,00	222.079.920,00	(1.920.080,00)	99,14	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	1.642.425.000,00	1.575.322.500,00	(67.102.500,00)	95,91	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5,1	BELANJA OPERASI	1.642.425.000,00	1.575.322.500,00	(67.102.500,00)	95,91	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.642.425.000,00	1.575.322.500,00	(67.102.500,00)	95,91	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	146.700.000,00	143.123.600,00	(3.576.400,00)	97,56	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5,1	BELANJA OPERASI	146.700.000,00	143.123.600,00	(3.576.400,00)	97,56	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.700.000,00	143.123.600,00	(3.576.400,00)	97,56	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	7.024.000,00	1.970.000,00	(5.054.000,00)	28,04	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5,1	BELANJA OPERASI	7.024.000,00	1.970.000,00	(5.054.000,00)	28.04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.024.000,00	1.970.000,00	(5.054.000,00)	28,04	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN	564.573.100,00	272.829.900,00	(291.743.200,00)	48,32	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5,1	BELANJA OPERASI	564.573.100,00	272.829.900,00	(291.743.200,00)	48,32	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.573.100,00	272.829.900,00	(291.743.200,00)	48,32	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	13.497.900,00	8.766.900,00	(4.731.000,00)	64,95	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5,1	BELANJA OPERASI	13.497.900,00	8.766.900,00	(4.731.000,00)	64,95	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.497.900,00	8.766.900,00	(4.731.000,00)	64,95	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	10.442.574.594,00	10.416.640.492,00	(25.934.102,00)	99,75	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5,1	BELANJA OPERASI	8.003.837.294,00	7.977.963.192,00	(25.934.102,00)	99,67	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.225.497.294,00	7.205.111.192,00	(20.386.102,00)	99,71	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	778.400.000,00	772.852.000,00	(5.548.000,00)	99,28	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5,2	BELANJA MODAL	2.438.677.300,00	2.438.677.300,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.602.200,00	968.602.200,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.470.075.100,00	1.470.075.100,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH	120.656.550,00	120.485.800,00	(170.750,00)	99,85	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5,1	BELANJA OPERASI	120.656.550,00	120.485.800,00	(170.750,00)	99,85	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.656.550,00	120.485.800,00	(170.750,00)	99,85	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK	6.959.000,00	6.509.000,00	(450.000,00)	93,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5,1	BELANJA OPERASI	6.959.000,00	6.509.000,00	(450.000,00)	93,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.959.000,00	6.509.000,00	(450.000,00)	93,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	6.959.000,00	6.509.000,00	(450.000,00)	93,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	5,1	BELANJA OPERASI	6.959.000,00	6.509.000,00	(450.000,00)	93,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.959.000,00	6.509.000,00	(450.000,00)	93,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	5.900.000,00	1.900.000,00	(5.000.000,00)	27,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	5,1	BELANJA OPERASI	6.900.000,00	1.900.000,00	(5.000.000,00)	27,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	1.900.000,00	(5.000.000,00)	27,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG	29.712.500,00	27.991.632,00	(1.720.868,00)	94,20	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5,1	BELANJA OPERASI	29.712.500,00	27.991.632,00	(1.720.868,00)	94,20	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.712.500,00	27.991.632,00	(1.720.868,00)	94,20	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0054		FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.870.000,00	2.420.000,00	(4.450.000,00)	35,22	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0054	5,1	BELANJA OPERASI	6.870.000,00	2.420.000,00	(4.450.000,00)	35,22	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0054	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.870.000,00	2.420.000,00	(4.450.000,00)	35,22	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0055		PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK	20.666.000,00	19.019.000,00	(1.647.000,00)	92,03	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0055	5,1	BELANJA OPERASI	20.666.000,00	19.019.000,00	(1.647.000,00)	92,03	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0055	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.666.000,00	19.019.000,00	(1.647.000,00)	92,03	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	25.285.000,00	23.599.000,00	(1.686.000,00)	93,33	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5,1	BELANJA OPERASI	25.285.000,00	23.599.000,00	(1.686.000,00)	93,33	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.285.000,00	23.599.000,00	(1.686.000,00)	93,33	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	540.099.540,00	506.335.358,00	(33.764.182,00)	93,74	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5,1	BELANJA OPERASI	58.954.500,00	50.382.798,00	(8.571.702,00)	85,46	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.954.500,00	50.382.798,00	(8.571.702,00)	85,46	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5,2	BELANJA MODAL	481.145.040,00	455.952.560,00	(25.192.480,00)	94,76	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	481.145.040,00	455.952.560,00	(25.192.480,00)	94,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.024.000,00	1.970.000,00	(5.054.000,00)	28,04	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN	564.573.100,00	272.829.900,00	(291.743.200,00)	48,32	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5,1	BELANJA OPERASI	564.573.100,00	272.829.900,00	(291.743.200,00)	48,32	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.573.100,00	272.829.900,00	(291.743.200,00)	48,32	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	13.497.900,00	8.766.900,00	(4.731.000,00)	64,95	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5,1	BELANJA OPERASI	13.497.900,00	8.766.900,00	(4.731.000,00)	64,95	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.497.900,00	8.766.900,00	(4.731.000,00)	64,95	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	10.442.574.594,00	10.416.640.492,00	(25.934.102,00)	99,75	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5,1	BELANJA OPERASI	8.003.897.294,00	7.977.963.192,00	(25.934.102,00)	99,67	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.225.497.294,00	7.205.111.192,00	(20.386.102,00)	99,71	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	778.400.000,00	772.852.000,00	(5.548.000,00)	99,28	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5,2	BELANJA MODAL	2.438.677.300,00	2.438.677.300,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02 0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.602.200,00	968.602.200,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.470.075.100,00	1.470.075.100,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH	120.656.550,00	120.485.800,00	(170.750,00)	99,85	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5,1	BELANJA OPERASI	120.656.550,00	120.485.800,00	(170.750,00)	99,85	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.656.550,00	120.485.800,00	(170.750,00)	99,85	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK	6.959.000,00	6.509.000,00	(450.000,00)	93,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5,1	BELANJA OPERASI	6.959.000,00	6.509.000,00	(450.000,00)	93,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.959.000,00	6.509.000,00	(450.000,00)	93,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	6.959.000,00	6.509.000,00	(450.000,00)	93,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	5,1	BELANJA OPERASI	6.959.000,00	6.509.000,00	(450.000,00)	93,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	1.900.000,00	(5.000.000,00)	27,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	6.900.000,00	1.900.000,00	(5.000.000,00)	27,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	5,1	BELANJA OPERASI	6.900.000,00	1.900.000,00	(5.000.000,00)	27,53	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.712.500,00	27.991.632,00	(1.720.868,00)	94,20	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG	29.712.500,00	27.991.632,00	(1.720.868,00)	94,20	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5,1	BELANJA OPERASI	29.712.500,00	27.991.632,00	(1.720.868,00)	94,20	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.870.000,00	2.420.000,00	(4.450.000,00)	35,22	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0054		FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.870.000,00	2.420.000,00	(4.450.000,00)	35,22	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0054	5,1	BELANJA OPERASI	6.870.000,00	2.420.000,00	(4.450.000,00)	35,22	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0054	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.666.000,00	19.019.000,00	(1.647.000,00)	92,03	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0055		PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK	20.666.000,00	19.019.000,00	(1.647.000,00)	92,03	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0055	5,1	BELANJA OPERASI	20.666.000,00	19.019.000,00	(1.647.000,00)	92,03	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0055	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.285.000,00	23.599.000,00	(1.686.000,00)	93,33	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	25.285.000,00	23.599.000,00	(1.686.000,00)	93,33	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5,1	BELANJA OPERASI	25.285.000,00	23.599.000,00	(1.686.000,00)	93,33	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.099.540,00	506.335.358,00	(33.764.182,00)	93,74	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	58.954.500,00	50.382.798,00	(8.571.702,00)	85,46	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5,1	BELANJA OPERASI	58.954.500,00	50.382.798,00	(8.571.702,00)	85,46	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.145.040,00	455.952.560,00	(25.192.480,00)	94,76	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5,2	BELANJA MODAL	481.145.040,00	455.952.560,00	(25.192.480,00)	94,76	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.093.000,00	2.382.000,00	(2.711.000,00)	46,77	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG	24.274.000,00	24.223.150,00	(50.850,00)	99,79	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5,1	BELANJA OPERASI	24.274.000,00	24.223.150,00	(50.850,00)	99,79	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.274.000,00	24.223.150,00	(50.850,00)	99,79	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	22.044.450,00	16.443.300,00	(5.601.150,00)	74,59	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026	5,1	BELANJA OPERASI	22.044.450,00	16.443.300,00	(5.601.150,00)	74,59	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.044.450,00	16.443.300,00	(5.601.150,00)	74,59	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0029		FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4.810.000,00	3.310.000,00	(1.500.000,00)	68,81	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0029	5,1	BELANJA OPERASI	4.810.000,00	3.310.000,00	(1.500.000,00)	68,81	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.810.000,00	3.310.000,00	(1.500.000,00)	68,81	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	197.267.400,00	196.373.295,00	(894.105,00)	99,54	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5,2	BELANJA MODAL	197.267.400,00	196.373.295,00	(894.105,00)	99,54	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.267.400,00	196.373.295,00	(894.105,00)	99,54	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0035		PERLENGKAPAN DASAR BUKU TEKS DAN NON TEKS PESERTA DIDIK	15.484.500,00	15.319.500,00	(165.000,00)	98,93	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0035	5,1	BELANJA OPERASI	15.484.500,00	15.319.500,00	(165.000,00)	98,93	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.484.500,00	15.319.500,00	(165.000,00)	98,93	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0037		PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK	25.434.000,00	25.434.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0037	5,1	BELANJA OPERASI	25.434.000,00	25.434.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.434.000,00	25.434.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0039		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	5.425.750,00	4.548.900,00	(876.850,00)	83,83	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0039	5,1	BELANJA OPERASI	5.425.750,00	4.548.900,00	(876.850,00)	83,83	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.425.750,00	4.548.900,00	(876.850,00)	83,83	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0040		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	198.567.400,00	196.111.820,00	(2.455.580,00)	98,76	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0040	5,1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0040	5,2	BELANJA MODAL	197.267.400,00	196.111.820,00	(1.155.580,00)	99,41	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0040	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.267.400,00	196.111.820,00	(1.155.580,00)	99,41	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	30.000.000,00	27.000.000,00	(3.000.000,00)	90,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041	5,1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.000.000,00	(3.000.000,00)	90,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.000.000,00	(3.000.000,00)	90,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	40.328.280,00	40.061.949,00	(266.331,00)	99,33	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	5,2	BELANJA MODAL	40.328.280,00	40.061.949,00	(266.331,00)	99,33	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.328.280,00	40.061.949,00	(266.331,00)	99,33	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK PAUD	1.612.222.000,00	1.585.175.610,00	(27.046.390,00)	98,32	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5,1	BELANJA OPERASI	1.057.322.000,00	1.050.658.110,00	(6.663.890,00)	99,36	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.057.322.000,00	1.050.658.110,00	(6.663.890,00)	99,36	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5,2	BELANJA MODAL	554.900.000,00	534.517.500,00	(20.382.500,00)	96,32	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	554.900.000,00	534.517.500,00	(20.382.500,00)	96,32	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	16.410.000,00	0,00	(16.410.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	5,1	BELANJA OPERASI	16.410.000,00	0,00	(16.410.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.410.000,00	0,00	(16.410.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	1.311.644.750,00	1.259.567.567,00	(52.077.183,00)	96,02	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5,1	BELANJA OPERASI	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN	3.136.000,00	2.953.350,00	(182.650,00)	94,17	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	5,1	BELANJA OPERASI	3.136.000,00	2.953.350,00	(182.650,00)	94,17	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.136.000,00	2.953.350,00	(182.650,00)	94,17	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	3.833.350,00	3.330.000,00	(503.350,00)	86,86	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5,1	BELANJA OPERASI	3.833.350,00	3.330.000,00	(503.350,00)	86,86	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.833.350,00	3.330.000,00	(503.350,00)	86,86	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	958.600.000,00	934.016.000,00	(24.584.000,00)	97,43	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5,1	BELANJA OPERASI	958.600.000,00	934.016.000,00	(24.584.000,00)	97,43	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.700.000,00	160.700.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	797.900.000,00	773.316.000,00	(24.584.000,00)	96,91	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0024		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	6.850.000,00	6.305.200,00	(544.800,00)	92,04	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0024	5,1	BELANJA OPERASI	6.850.000,00	6.305.200,00	(544.800,00)	92,04	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	6.305.200,00	(544.800,00)	92,04	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0026		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	3.941.000,00	3.540.000,00	(401.000,00)	89,82	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0026	5,1	BELANJA OPERASI	3.941.000,00	3.540.000,00	(401.000,00)	89,82	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.941.000,00	3.540.000,00	(401.000,00)	89,82	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG	28.859.000,00	28.834.098,00	(24.902,00)	99,91	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	5,1	BELANJA OPERASI	28.859.000,00	28.834.098,00	(24.902,00)	99,91	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.859.000,00	28.834.098,00	(24.902,00)	99,91	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	3.458.800,00	966.000,00	(2.492.800,00)	27,92	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042	5,1	BELANJA OPERASI	3.458.800,00	966.000,00	(2.492.800,00)	27,92	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042	37377	Belanja Barang dan Jasa	3.458.800,00	966.000,00	(2.492.800,00)	27,92	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0044		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	197.267.400,00	196.281.788,00	(985.612,00)	99,50	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0044	5,2	BELANJA MODAL	197.267.400,00	196.281.788,00	(985.612,00)	99,50	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0044	37743	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.267.400,00	196.281.788,00	(985.612,00)	99,50	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	2.220.000,00	0,00	(2.220.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5,1	BELANJA OPERASI	2.220.000,00	0,00	(2.220.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	37377	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	0,00	(2.220.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0049		PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	9.424.000,00	0,00	(9.424.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0049	5,1	BELANJA OPERASI	9.424.000,00	0,00	(9.424.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0049	37377	Belanja Barang dan Jasa	9.424.000,00	0,00	(9.424.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0055		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK NONFORMAL /	10.380.000,00	0,00	(10.380.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0055	5,1	BELANJA OPERASI	10.380.000,00	0,00	(10.380.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0055	37377	Belanja Barang dan Jasa	10.380.000,00	0,00	(10.380.000,00)	0,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0061		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	82.150.200,00	81.816.131,00	(334.069,00)	99,59	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0061	5,2	BELANJA MODAL	82.150.200,00	81.816.131,00	(334.069,00)	99,59	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0061	37743	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.150.200,00	81.816.131,00	(334.069,00)	99,59	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	37622		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006		PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR/CAPAIAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006	5,1	BELANJA OPERASI	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006	37377	Belanja Barang dan Jasa	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	100,00	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	37987		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.843.250,00	6.742.700,00	(1.100.550,00)	85,96	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01		PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN	7.843.250,00	6.742.700,00	(1.100.550,00)	85,96	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001		PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	3.928.250,00	3.207.200,00	(721.050,00)	81,64	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5,1	BELANJA OPERASI	3.928.250,00	3.207.200,00	(721.050,00)	81,64	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	37377	Belanja Barang dan Jasa	3.928.250,00	3.207.200,00	(721.050,00)	81,64	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002		PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	3.915.000,00	3.535.500,00	(379.500,00)	90,30	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5,1	BELANJA OPERASI	3.915.000,00	3.535.500,00	(379.500,00)	90,30	
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	37377	Belanja Barang dan Jasa	3.915.000,00	3.535.500,00	(379.500,00)	90,30	
				JUMLAH BELANJA	327.075.279.465,39	315.934.199.800,64	(11.141.079.664,75)	96,59	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(326.990.179.465,39)	(315.821.672.320,64)	11.168.507.144,75	96,58	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(326.990.179.465,39)	(315.821.672.320,64)	11.168.507.144,75	96,58	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	69.633.915.351,00	69.727.472.057,00	93.556.706,00	100,13	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.633.915.351,00	69.727.472.057,00	93.556.706,00	100,13	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	69.633.915.351,00	69.574.492.907,00	(59.422.444,00)	99,91	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	152.979.150,00	152.979.150,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	69.633.915.351,00	69.727.472.057,00	93.556.706,00	100,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH					
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	254.546.703.649,57	248.326.530.196,29	(6.220.173.453,28)	97,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	138.334.341.505,57	136.739.581.511,46	(1.594.759.994,11)	98,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	113.492.161.677,00	112.369.874.476,00	(1.122.287.201,00)	99,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	113.492.161.677,00	112.369.874.476,00	(1.122.287.201,00)	99,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0	5.1.01	Belanja Pegawai	113.492.161.677,00	112.369.874.476,00	(1.122.287.201,00)	99,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.337.611.677,00	112.219.174.476,00	(1.118.437.201,00)	99,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	154.550.000,00	150.700.000,00	(3.850.000,00)	97,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	95.648.250,00	95.069.500,00	(578.750,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0	5.1	BELANJA OPERASI	2.481.500,00	2.475.000,00	(6.500,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.481.500,00	2.475.000,00	(6.500,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.481.500,00	2.475.000,00	(6.500,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.815.000,00	(184.000,00)	99,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.816.000,00	(184.000,00)	99,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.000.000,00	19.816.000,00	(184.000,00)	99,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0	5.1	BELANJA OPERASI	10.002.000,00	9.634.000,00	(368.000,00)	96,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.002.000,00	9.634.000,00	(368.000,00)	96,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	10.002.000,00	9.634.000,00	(368.000,00)	96,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0	5.1	BELANJA OPERASI	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.997.200,00	(2.800,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.997.200,00	(2.800,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	10.000.000,00	9.997.200,00	(2.800,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0	5.1	BELANJA OPERASI	41.814.750,00	41.797.300,00	(17.450,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.814.750,00	41.797.300,00	(17.450,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	41.814.750,00	41.797.300,00	(17.450,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0		PENGADAAN MEBEL	36.600.000,00	35.661.000,00	(939.000,00)	97,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0	5.2	BELANJA MODAL	6.600.000,00	5.661.000,00	(939.000,00)	85,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.600.000,00	5.661.000,00	(939.000,00)	85,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.600.000,00	5.661.000,00	(939.000,00)	85,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.137.793.517,00	2.119.959.701,00	(17.833.816,00)	99,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
					4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	88.177.717,00	86.976.051,00	(1.201.666,00)	98,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0	5.1	BELANJA OPERASI	88.177.717,00	86.976.051,00	(1.201.666,00)	98,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.177.717,00	86.976.051,00	(1.201.666,00)	98,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0	5.1	BELANJA OPERASI	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.038.175.800,00	2.021.543.650,00	(16.632.150,00)	99,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0	5.1	BELANJA OPERASI	2.038.175.800,00	2.021.543.650,00	(16.632.150,00)	99,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.038.175.800,00	2.021.543.650,00	(16.632.150,00)	99,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	84.551.000,00	84.156.800,00	(394.200,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU	17.000.000,00	16.738.000,00	(262.000,00)	98,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.738.000,00	(262.000,00)	98,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.738.000,00	(262.000,00)	98,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	67.551.000,00	67.418.800,00	(132.200,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0	5.1	BELANJA OPERASI	67.551.000,00	67.418.800,00	(132.200,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.551.000,00	67.418.800,00	(132.200,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	22.487.587.061,57	22.034.860.034,46	(452.727.027,11)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	22.487.587.061,57	22.034.860.034,46	(452.727.027,11)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0	5.1	BELANJA OPERASI	21.420.963.061,57	21.029.733.593,46	(391.229.468,11)	98,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0	5.1.01	Belanja Pegawai	9.049.498.770,91	8.930.371.700,08	(119.127.070,83)	98,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.371.464.290,66	12.099.361.893,38	(272.102.397,28)	97,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0	5.2	BELANJA MODAL	1.066.624.000,00	1.005.126.441,00	(61.497.559,00)	94,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	849.124.000,00	810.927.653,00	(38.196.347,00)	95,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.500.000,00	86.608.781,00	(7.891.219,00)	91,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.000.000,00	107.590.007,00	(15.409.993,00)	87,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90.901.999.944,00	87.888.694.128,83	(3.013.305.815,17)	96,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.102.584.071,00	14.337.462.408,83	(1.765.121.662,17)	89,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0		PENGEMBANGAN PUSKESMAS	4.205.647.119,00	3.948.323.151,09	(257.323.967,91)	93,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.1	BELANJA OPERASI	11.979.000,00	11.227.050,00	(751.950,00)	93,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.979.000,00	11.227.050,00	(751.950,00)	93,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.2	BELANJA MODAL	4.193.668.119,00	3.937.096.101,09	(256.572.017,91)	93,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.097.448.119,00	1.862.096.101,09	(235.352.017,91)	88,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.096.220.000,00	2.075.000.000,00	(21.220.000,00)	98,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0		PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	485.991.552,00	453.832.383,74	(32.159.168,26)	93,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.2	BELANJA MODAL	485.991.552,00	453.832.383,74	(32.159.168,26)	93,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	485.991.552,00	453.832.383,74	(32.159.168,26)	93,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT	130.000.000,00	129.599.400,00	(400.600,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.2	BELANJA MODAL	130.000.000,00	129.599.400,00	(400.600,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.000.000,00	129.599.400,00	(400.600,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	450.000.000,00	448.487.600,00	(1.512.400,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.2	BELANJA MODAL	450.000.000,00	448.487.600,00	(1.512.400,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	450.000.000,00	448.487.600,00	(1.512.400,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	225.000.000,00	223.813.500,00	(1.186.500,00)	99,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	223.813.500,00	(1.186.500,00)	99,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	223.813.500,00	(1.186.500,00)	99,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	690.000.000,00	681.850.000,00	(8.150.000,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.2	BELANJA MODAL	690.000.000,00	681.850.000,00	(8.150.000,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	690.000.000,00	681.850.000,00	(8.150.000,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI	201.479.000,00	200.984.200,00	(494.800,00)	99,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.1	BELANJA OPERASI	201.479.000,00	200.984.200,00	(494.800,00)	99,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.479.000,00	200.984.200,00	(494.800,00)	99,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0		PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	4.135.100.000,00	2.729.003.502,00	(1.406.096.498,00)	65,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.2	BELANJA MODAL	4.135.100.000,00	2.729.003.502,00	(1.406.096.498,00)	65,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.135.100.000,00	2.729.003.502,00	(1.406.096.498,00)	65,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS	5.499.839.200,00	5.442.506.372,00	(57.332.828,00)	98,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.1	BELANJA OPERASI	5.499.839.200,00	5.442.506.372,00	(57.332.828,00)	98,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.499.839.200,00	5.442.506.372,00	(57.332.828,00)	98,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0		DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN	79.527.200,00	79.062.300,00	(464.900,00)	99,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.1	BELANJA OPERASI	79.527.200,00	79.062.300,00	(464.900,00)	99,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.527.200,00	79.062.300,00	(464.900,00)	99,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.590.831.223,00	73.353.286.768,00	(1.237.544.455,00)	98,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	664.297.700,00	659.801.200,00	(4.496.500,00)	99,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	664.297.700,00	659.801.200,00	(4.496.500,00)	99,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	664.297.700,00	659.801.200,00	(4.496.500,00)	99,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	186.913.050,00	164.202.600,00	(22.710.450,00)	87,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	186.913.050,00	164.202.600,00	(22.710.450,00)	87,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.913.050,00	164.202.600,00	(22.710.450,00)	87,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	114.203.700,00	111.790.450,00	(2.413.250,00)	97,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	114.203.700,00	111.790.450,00	(2.413.250,00)	97,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.203.700,00	111.790.450,00	(2.413.250,00)	97,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	173.376.250,00	168.499.500,00	(4.876.750,00)	97,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	173.376.250,00	168.499.500,00	(4.876.750,00)	97,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.376.250,00	168.499.500,00	(4.876.750,00)	97,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	742.700.000,00	736.615.900,00	(6.084.100,00)	99,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	742.700.000,00	736.615.900,00	(6.084.100,00)	99,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	742.700.000,00	736.615.900,00	(6.084.100,00)	99,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	27.699.800,00	26.516.800,00	(1.183.000,00)	95,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	27.699.800,00	26.516.800,00	(1.183.000,00)	95,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.699.800,00	26.516.800,00	(1.183.000,00)	95,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	43.200.000,00	41.736.540,00	(1.463.460,00)	96,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	43.200.000,00	41.736.540,00	(1.463.460,00)	96,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	41.736.540,00	(1.463.460,00)	96,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	81.077.000,00	80.110.000,00	(967.000,00)	98,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	81.077.000,00	80.110.000,00	(967.000,00)	98,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.077.000,00	80.110.000,00	(967.000,00)	98,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	72.400.000,00	71.868.600,00	(531.400,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	72.400.000,00	71.868.600,00	(531.400,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.400.000,00	71.868.600,00	(531.400,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	199.696.000,00	199.605.950,00	(90.050,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	199.696.000,00	199.605.950,00	(90.050,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.696.000,00	199.605.950,00	(90.050,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	213.689.000,00	213.034.600,00	(654.400,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	213.689.000,00	213.034.600,00	(654.400,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.689.000,00	213.034.600,00	(654.400,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	32.495.000,00	31.559.900,00	(935.100,00)	97,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	32.495.000,00	31.559.900,00	(935.100,00)	97,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.495.000,00	31.559.900,00	(935.100,00)	97,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	3.252.673.000,00	3.243.682.236,00	(8.990.764,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	3.252.673.000,00	3.243.682.236,00	(8.990.764,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.252.673.000,00	3.243.682.236,00	(8.990.764,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	225.125.000,00	222.015.780,00	(3.109.220,00)	98,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	225.125.000,00	222.015.780,00	(3.109.220,00)	98,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.125.000,00	222.015.780,00	(3.109.220,00)	98,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	289.390.000,00	289.180.000,00	(210.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	289.390.000,00	289.180.000,00	(210.000,00)	99,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.390.000,00	289.180.000,00	(210.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	151.905.725,00	148.517.100,00	(3.388.625,00)	97,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	151.905.725,00	148.517.100,00	(3.388.625,00)	97,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.905.725,00	148.517.100,00	(3.388.625,00)	97,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	232.271.900,00	226.363.369,00	(5.908.531,00)	97,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	232.271.900,00	226.363.369,00	(5.908.531,00)	97,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.271.900,00	226.363.369,00	(5.908.531,00)	97,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	109.640.000,00	109.640.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	109.640.000,00	109.640.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.640.000,00	109.640.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	808.670.800,00	797.372.300,00	(11.298.500,00)	98,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	808.670.800,00	797.372.300,00	(11.298.500,00)	98,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	808.670.800,00	797.372.300,00	(11.298.500,00)	98,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	123.310.000,00	122.530.982,00	(779.018,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	123.310.000,00	122.530.982,00	(779.018,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.310.000,00	122.530.982,00	(779.018,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	61.500.000.000,00	60.401.454.567,00	(1.098.545.433,00)	98,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	58.765.125.515,00	58.556.758.308,00	(208.367.207,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.01	Belanja Pegawai	2.669.530.637,00	2.668.359.701,00	(1.170.936,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.095.594.878,00	55.888.398.607,00	(207.196.271,00)	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.2	BELANJA MODAL	2.734.874.485,00	1.844.696.259,00	(890.178.226,00)	67,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.724.874.485,00	1.217.879.570,00	(506.994.915,00)	70,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	710.000.000,00	626.816.689,00	(83.183.311,00)	88,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	3.393.551.340,00	3.349.600.346,00	(43.950.994,00)	98,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	3.353.751.340,00	3.309.930.596,00	(43.820.744,00)	98,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.353.751.340,00	3.309.930.596,00	(43.820.744,00)	98,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.2	BELANJA MODAL	39.800.000,00	39.669.750,00	(130.250,00)	99,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.800.000,00	39.669.750,00	(130.250,00)	99,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	532.411.753,00	528.854.668,00	(3.557.085,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	532.411.753,00	528.854.668,00	(3.557.085,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.411.753,00	528.854.668,00	(3.557.085,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	83.040.000,00	82.723.150,00	(316.850,00)	99,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	83.040.000,00	82.723.150,00	(316.850,00)	99,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.040.000,00	82.723.150,00	(316.850,00)	99,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH	126.505.500,00	126.018.530,00	(486.970,00)	99,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	126.505.500,00	126.018.530,00	(486.970,00)	99,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.505.500,00	126.018.530,00	(486.970,00)	99,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	178.570.000,00	176.160.000,00	(2.410.000,00)	98,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	178.570.000,00	176.160.000,00	(2.410.000,00)	98,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.570.000,00	176.160.000,00	(2.410.000,00)	98,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	35.758.705,00	27.831.700,00	(7.927.005,00)	77,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	35.758.705,00	27.831.700,00	(7.927.005,00)	77,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.758.705,00	27.831.700,00	(7.927.005,00)	77,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	192.760.000,00	192.600.000,00	(160.000,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	192.760.000,00	192.600.000,00	(160.000,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.760.000,00	192.600.000,00	(160.000,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0		PENGELOLAAN LAYANAN IMUNISASI	796.700.000,00	796.600.000,00	(100.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	796.700.000,00	796.600.000,00	(100.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	796.700.000,00	796.600.000,00	(100.000,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	90.099.900,00	86.537.612,00	(3.562.288,00)	96,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	90.099.900,00	86.537.612,00	(3.562.288,00)	96,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0	5.1	BELANJA OPERASI	90.099.900,00	86.537.612,00	(3.562.288,00)	96,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.099.900,00	86.537.612,00	(3.562.288,00)	96,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH	118.484.750,00	111.407.340,00	(7.077.410,00)	94,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0		PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	118.484.750,00	111.407.340,00	(7.077.410,00)	94,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0	5.1	BELANJA OPERASI	118.484.750,00	111.407.340,00	(7.077.410,00)	94,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.484.750,00	111.407.340,00	(7.077.410,00)	94,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.216.914.950,00	1.038.030.806,00	(178.884.144,00)	85,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01		PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	57.499.450,00	56.031.326,00	(1.468.124,00)	97,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	57.499.450,00	56.031.326,00	(1.468.124,00)	97,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0	5.1	BELANJA OPERASI	57.499.450,00	56.031.326,00	(1.468.124,00)	97,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.499.450,00	56.031.326,00	(1.468.124,00)	97,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI	244.526.000,00	234.899.880,00	(9.626.120,00)	96,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	244.526.000,00	234.899.880,00	(9.626.120,00)	96,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	244.526.000,00	234.899.880,00	(9.626.120,00)	96,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.526.000,00	234.899.880,00	(9.626.120,00)	96,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH	914.889.500,00	747.099.600,00	(167.789.900,00)	81,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH	914.889.500,00	747.099.600,00	(167.789.900,00)	81,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0	5.1	BELANJA OPERASI	914.889.500,00	747.099.600,00	(167.789.900,00)	81,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	914.889.500,00	747.099.600,00	(167.789.900,00)	81,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	297.749.000,00	297.491.800,00	(257.200,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	124.180.000,00	124.115.000,00	(65.000,00)	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0 001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	124.180.000,00	124.115.000,00	(65.000,00)	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0	5.1	BELANJA OPERASI	124.180.000,00	124.115.000,00	(65.000,00)	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.180.000,00	124.115.000,00	(65.000,00)	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03		PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN/MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	173.569.000,00	173.376.800,00	(192.200,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0 001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN/MINUMAN TERTENTU YANG	173.569.000,00	173.376.800,00	(192.200,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0	5.1	BELANJA OPERASI	173.569.000,00	173.376.800,00	(192.200,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.569.000,00	173.376.800,00	(192.200,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.795.698.250,00	22.362.731.950,00	(1.432.966.300,00)	93,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT	23.478.676.350,00	22.054.385.550,00	(1.424.290.800,00)	93,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0		PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23.478.676.350,00	22.054.385.550,00	(1.424.290.800,00)	93,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0	5.1	BELANJA OPERASI	23.478.676.350,00	22.054.385.550,00	(1.424.290.800,00)	93,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.478.676.350,00	22.054.385.550,00	(1.424.290.800,00)	93,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02		PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	182.220.000,00	173.645.400,00	(8.574.600,00)	95,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0		PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	182.220.000,00	173.645.400,00	(8.574.600,00)	95,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0	5.1	BELANJA OPERASI	182.220.000,00	173.645.400,00	(8.574.600,00)	95,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.220.000,00	173.645.400,00	(8.574.600,00)	95,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH	134.801.900,00	134.701.000,00	(100.900,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA	134.801.900,00	134.701.000,00	(100.900,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0	5.1	BELANJA OPERASI	134.801.900,00	134.701.000,00	(100.900,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.801.900,00	134.701.000,00	(100.900,00)	99,92	
				JUMLAH BELANJA	254.546.703.649,57	248.326.530.196,29	(6.220.173.453,28)	97,55	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(184.912.788.298,57)	(178.599.058.139,29)	6.313.730.159,28	96,58	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(184.912.788.298,57)	(178.599.058.139,29)	6.313.730.159,28	96,58	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.192.700.000,00	2.083.941.452,00	(108.758.548,00)	95,03	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.192.700.000,00	2.083.941.452,00	(108.758.548,00)	95,03	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.190.000.000,00	2.081.192.500,00	(108.807.500,00)	95,03	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.700.000,00	2.748.952,00	48.952,00	101,81	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.192.700.000,00	2.083.941.452,00	(108.758.548,00)	95,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	31.147.690.854,00	22.326.624.992,00	(8.821.065.862,00)	71,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.779.362.934,00	7.101.865.824,00	(677.497.110,00)	91,29	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.777.720.229,00	4.596.442.495,00	(181.277.734,00)	96,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.777.720.229,00	4.596.442.495,00	(181.277.734,00)	96,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.777.720.229,00	4.596.442.495,00	(181.277.734,00)	96,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.508.220.229,00	4.414.942.495,00	(93.277.734,00)	97,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.500.000,00	181.500.000,00	(88.000.000,00)	67,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	144.573.000,00	141.132.538,00	(3.440.462,00)	97,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.490.000,00	2.210.000,00	(280.000,00)	88,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.490.000,00	2.210.000,00	(280.000,00)	88,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	2.210.000,00	(280.000,00)	88,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.144.000,00	40.092.888,00	(51.112,00)	99,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.144.000,00	16.093.000,00	(51.000,00)	99,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.144.000,00	16.093.000,00	(51.000,00)	99,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	24.000.000,00	23.999.888,00	(112,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	23.999.888,00	(112,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.750.000,00	3.308.000,00	(442.000,00)	88,21	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.308.000,00	(442.000,00)	88,21	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.308.000,00	(442.000,00)	88,21	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	7.500.000,00	7.170.000,00	(330.000,00)	95,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.170.000,00	(330.000,00)	95,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.170.000,00	(330.000,00)	95,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.500.000,00	6.675.000,00	(825.000,00)	89,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	6.675.000,00	(825.000,00)	89,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.675.000,00	(825.000,00)	89,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	KEALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	83.189.000,00	81.676.650,00	(1.512.350,00)	98,18	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	83.189.000,00	81.676.650,00	(1.512.350,00)	98,18	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.189.000,00	81.676.650,00	(1.512.350,00)	98,18	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	50.000.000,00	46.000.000,00	(4.000.000,00)	92,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	50.000.000,00	46.000.000,00	(4.000.000,00)	92,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	46.000.000,00	(4.000.000,00)	92,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	46.000.000,00	(4.000.000,00)	92,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.263.888.905,00	2.019.292.261,00	(244.596.644,00)	89,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	3.700.000,00	(300.000,00)	92,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.700.000,00	(300.000,00)	92,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.700.000,00	(300.000,00)	92,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	602.020.505,00	477.431.461,00	(124.589.044,00)	79,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	602.020.505,00	477.431.461,00	(124.589.044,00)	79,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.020.505,00	477.431.461,00	(124.589.044,00)	79,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.657.868.400,00	1.538.160.800,00	(119.707.600,00)	92,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.657.868.400,00	1.538.160.800,00	(119.707.600,00)	92,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.657.868.400,00	1.538.160.800,00	(119.707.600,00)	92,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	542.040.800,00	297.858.530,00	(244.182.270,00)	54,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	222.250.000,00	96.426.080,00	(125.823.920,00)	43,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	222.250.000,00	96.426.080,00	(125.823.920,00)	43,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.250.000,00	96.426.080,00	(125.823.920,00)	43,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	62.200.000,00	22.113.400,00	(40.086.600,00)	35,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.200.000,00	22.113.400,00	(40.086.600,00)	35,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.200.000,00	22.113.400,00	(40.086.600,00)	35,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	249.650.800,00	171.379.050,00	(78.271.750,00)	68,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	249.650.800,00	171.379.050,00	(78.271.750,00)	68,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.650.800,00	171.379.050,00	(78.271.750,00)	68,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	569.210.000,00	568.252.582,00	(957.418,00)	99,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	68.460.000,00	68.423.822,00	(36.178,00)	99,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093		NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	68.460.000,00	68.423.822,00	(36.178,00)	99,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.2	BELANJA MODAL	68.460.000,00	68.423.822,00	(36.178,00)	99,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.460.000,00	68.423.822,00	(36.178,00)	99,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.750.000,00	499.828.760,00	(921.240,00)	99,81	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008		PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	500.000.000,00	499.126.760,00	(873.240,00)	99,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	499.126.760,00	(873.240,00)	99,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	499.126.760,00	(873.240,00)	99,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021		OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	750.000,00	702.000,00	(48.000,00)	93,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.2	BELANJA MODAL	750.000,00	702.000,00	(48.000,00)	93,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	750.000,00	702.000,00	(48.000,00)	93,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.466.777.375,00	1.108.554.620,00	(358.222.755,00)	75,57	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.466.777.375,00	1.108.554.620,00	(358.222.755,00)	75,57	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0023		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	10.989.875,00	10.137.400,00	(852.475,00)	92,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	10.989.875,00	10.137.400,00	(852.475,00)	92,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.989.875,00	10.137.400,00	(852.475,00)	92,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0024		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	9.050.000,00	7.898.750,00	(1.151.250,00)	87,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	9.050.000,00	7.898.750,00	(1.151.250,00)	87,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	7.898.750,00	(1.151.250,00)	87,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	300.000.000,00	199.816.000,00	(100.184.000,00)	66,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	199.816.000,00	(100.184.000,00)	66,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	199.816.000,00	(100.184.000,00)	66,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028		PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	2.082.500,00	1.876.250,00	(206.250,00)	90,09	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	2.082.500,00	1.876.250,00	(206.250,00)	90,09	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.082.500,00	1.876.250,00	(206.250,00)	90,09	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	1.141.172.500,00	887.587.420,00	(253.585.080,00)	77,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	441.180.000,00	317.087.420,00	(124.092.580,00)	71,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.180.000,00	317.087.420,00	(124.092.580,00)	71,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	699.992.500,00	570.500.000,00	(129.492.500,00)	81,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	499.500.000,00	(100.500.000,00)	83,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.992.500,00	71.000.000,00	(28.992.500,00)	71,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0031		OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	732.500,00	0,00	(732.500,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	732.500,00	0,00	(732.500,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	732.500,00	0,00	(732.500,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032		PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	2.750.000,00	1.238.800,00	(1.511.200,00)	45,04	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	1.238.800,00	(1.511.200,00)	45,04	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	1.238.800,00	(1.511.200,00)	45,04	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	216.281.000,00	214.259.000,00	(2.022.000,00)	99,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01		PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	216.281.000,00	214.259.000,00	(2.022.000,00)	99,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0011		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.925.000,00	3.179.350,00	(745.650,00)	81,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.925.000,00	3.179.350,00	(745.650,00)	81,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.925.000,00	3.179.350,00	(745.650,00)	81,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0015		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	212.356.000,00	211.079.650,00	(1.276.350,00)	99,39	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	212.356.000,00	211.079.650,00	(1.276.350,00)	99,39	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.356.000,00	211.079.650,00	(1.276.350,00)	99,39	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	153.918.250,00	147.201.424,00	(6.716.826,00)	95,63	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	153.918.250,00	147.201.424,00	(6.716.826,00)	95,63	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0033		PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA	67.235.000,00	62.428.674,00	(4.806.326,00)	92,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	67.235.000,00	62.428.674,00	(4.806.326,00)	92,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.235.000,00	62.428.674,00	(4.806.326,00)	92,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0035		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	4.713.000,00	4.215.000,00	(498.000,00)	89,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0035	5.1	BELANJA OPERASI	4.713.000,00	4.215.000,00	(498.000,00)	89,43	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.713.000,00	4.215.000,00	(498.000,00)	89,43	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0036		PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)	482.500,00	0,00	(482.500,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0036	5.1	BELANJA OPERASI	482.500,00	0,00	(482.500,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.500,00	0,00	(482.500,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	78.834.000,00	78.426.550,00	(407.450,00)	99,48	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	78.834.000,00	78.426.550,00	(407.450,00)	99,48	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.834.000,00	78.426.550,00	(407.450,00)	99,48	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	2.653.750,00	2.131.200,00	(522.550,00)	80,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	2.653.750,00	2.131.200,00	(522.550,00)	80,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.653.750,00	2.131.200,00	(522.550,00)	80,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	6.059.058.845,00	1.132.579.650,00	(4.926.479.195,00)	18,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	6.059.058.845,00	1.132.579.650,00	(4.926.479.195,00)	18,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017		PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.903.144.045,00	980.228.700,00	(4.922.915.345,00)	16,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	695.995.350,00	665.544.100,00	(30.451.250,00)	95,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	695.995.350,00	665.544.100,00	(30.451.250,00)	95,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	5.207.148.695,00	314.684.600,00	(4.892.464.095,00)	6,04	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.207.148.695,00	314.684.600,00	(4.892.464.095,00)	6,04	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022		PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	155.914.800,00	152.350.950,00	(3.563.850,00)	97,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	155.914.800,00	152.350.950,00	(3.563.850,00)	97,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.914.800,00	152.350.950,00	(3.563.850,00)	97,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14.035.410.750,00	11.201.748.432,00	(2.833.662.318,00)	79,81	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	14.035.410.750,00	11.201.748.432,00	(2.833.662.318,00)	79,81	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032		PEMBANGUNAN JALAN	5.413.380.750,00	5.155.412.420,00	(257.968.330,00)	95,23	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	1.133.380.750,00	875.790.980,00	(257.589.770,00)	77,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.133.380.750,00	875.790.980,00	(257.589.770,00)	77,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	4.280.000.000,00	4.279.621.440,00	(378.560,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.280.000.000,00	4.279.621.440,00	(378.560,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040		PEMBANGUNAN JEMBATAN	802.945.000,00	701.894.549,00	(101.050.451,00)	87,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	503.945.000,00	501.898.549,00	(2.046.451,00)	99,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.945.000,00	501.898.549,00	(2.046.451,00)	99,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	299.000.000,00	199.996.000,00	(99.004.000,00)	66,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	299.000.000,00	199.996.000,00	(99.004.000,00)	66,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0042		PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN	250.085.000,00	249.900.000,00	(185.000,00)	99,92	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0042	5.1	BELANJA OPERASI	250.085.000,00	249.900.000,00	(185.000,00)	99,92	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.085.000,00	249.900.000,00	(185.000,00)	99,92	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044		REHABILITASI JALAN	6.250.000.000,00	3.853.237.463,00	(2.396.762.537,00)	61,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2	BELANJA MODAL	6.250.000.000,00	3.853.237.463,00	(2.396.762.537,00)	61,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.250.000.000,00	3.853.237.463,00	(2.396.762.537,00)	61,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	1.319.000.000,00	1.241.304.000,00	(77.696.000,00)	94,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	879.000.000,00	871.200.000,00	(7.800.000,00)	99,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	879.000.000,00	871.200.000,00	(7.800.000,00)	99,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2	BELANJA MODAL	440.000.000,00	370.104.000,00	(69.896.000,00)	84,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	440.000.000,00	370.104.000,00	(69.896.000,00)	84,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	867.671.700,00	852.163.460,00	(15.508.240,00)	98,21	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	728.192.750,00	714.480.887,00	(13.711.863,00)	98,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0005		PENYUSUNAN RDTR KABUPATEN/KOTA	728.192.750,00	714.480.887,00	(13.711.863,00)	98,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	728.192.750,00	714.480.887,00	(13.711.863,00)	98,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	728.192.750,00	714.480.887,00	(13.711.863,00)	98,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	139.478.950,00	137.682.573,00	(1.796.377,00)	98,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	139.478.950,00	137.682.573,00	(1.796.377,00)	98,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	139.478.950,00	137.682.573,00	(1.796.377,00)	98,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.478.950,00	137.682.573,00	(1.796.377,00)	98,71	
				JUMLAH BELANJA	31.147.690.854,00	22.326.624.992,00	(8.821.065.862,00)	71,67	
				SURPLUS / (DEFISIT)	-28.954.990.854,00	-20.242.683.540,00	8.712.307.314,00	69,91	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-28.954.990.854,00	-20.242.683.540,00	8.712.307.314,00	69,91	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	296.500.000,00	312.980.700,00	16.480.700,00	105,55	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	296.500.000,00	312.980.700,00	16.480.700,00	105,55	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	290.000.000,00	305.745.000,00	15.745.000,00	105,42	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.500.000,00	7.235.700,00	735.700,00	111,31	
				JUMLAH PENDAPATAN	296.500.000,00	312.980.700,00	16.480.700,00	105,55	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH					
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.4.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.823.238.851,65	5.664.187.425,00	(159.051.426,65)	97,26	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.610.472.684,00	2.541.244.564,00	(69.228.120,00)	97,34	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.847.524.964,00	1.808.727.996,00	(38.796.968,00)	97,90	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.847.524.964,00	1.808.727.996,00	(38.796.968,00)	97,90	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.847.524.964,00	1.808.727.996,00	(38.796.968,00)	97,90	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.781.324.964,00	1.744.477.996,00	(36.846.968,00)	97,93	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	66.200.000,00	64.250.000,00	(1.950.000,00)	97,05	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	143.633.300,00	143.493.650,00	(139.650,00)	99,90	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.515.000,00	3.510.000,00	(5.000,00)	99,85	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.515.000,00	3.510.000,00	(5.000,00)	99,85	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.515.000,00	3.510.000,00	(5.000,00)	99,85	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.615.000,00	25.577.000,00	(38.000,00)	99,85	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.615.000,00	25.577.000,00	(38.000,00)	99,85	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25.615.000,00	25.577.000,00	(38.000,00)	99,85	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.753.000,00	3.739.000,00	(14.000,00)	99,62	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.753.000,00	3.739.000,00	(14.000,00)	99,62	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	3.753.000,00	3.739.000,00	(14.000,00)	99,62	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.490.000,00	(10.000,00)	99,94	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.490.000,00	(10.000,00)	99,94	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.500.000,00	17.490.000,00	(10.000,00)	99,94	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.861.800,00	8.860.500,00	(1.300,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.861.800,00	8.860.500,00	(1.300,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	8.861.800,00	8.860.500,00	(1.300,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	84.388.500,00	84.317.150,00	(71.350,00)	99,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.388.500,00	84.317.150,00	(71.350,00)	99,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	84.388.500,00	84.317.150,00	(71.350,00)	99,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.500.000,00	4.000.000,00	(500.000,00)	88,88	
					4.500.000,00	4.000.000,00	(500.000,00)	88,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.000.000,00	(500.000,00)	88,88	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.000.000,00	(500.000,00)	88,88	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	346.902.800,00	319.484.750,00	(27.418.050,00)	92,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	341.902.800,00	314.484.750,00	(27.418.050,00)	91,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	341.902.800,00	314.484.750,00	(27.418.050,00)	91,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.902.800,00	314.484.750,00	(27.418.050,00)	91,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	267.911.620,00	265.538.168,00	(2.373.452,00)	99,11	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	17.500.000,00	17.053.000,00	(447.000,00)	97,44	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.053.000,00	(447.000,00)	97,44	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.053.000,00	(447.000,00)	97,44	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	41.750.000,00	39.935.168,00	(1.814.832,00)	95,65	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.750.000,00	39.935.168,00	(1.814.832,00)	95,65	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.750.000,00	39.935.168,00	(1.814.832,00)	95,65	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.660.000,00	8.650.000,00	(10.000,00)	99,88	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.660.000,00	8.650.000,00	(10.000,00)	99,88	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.660.000,00	8.650.000,00	(10.000,00)	99,88	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	200.001.620,00	199.900.000,00	(101.620,00)	99,94	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	200.001.620,00	199.900.000,00	(101.620,00)	99,94	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.001.620,00	199.900.000,00	(101.620,00)	99,94	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.4.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	226.848.445,00	221.847.148,00	(5.001.297,00)	97,79	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01		PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	2.297.875,00	1.618.400,00	(679.475,00)	70,43	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009		IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.297.875,00	1.618.400,00	(679.475,00)	70,43	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.297.875,00	1.618.400,00	(679.475,00)	70,43	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.297.875,00	1.618.400,00	(679.475,00)	70,43	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02		SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	21.208.950,00	19.636.600,00	(1.572.350,00)	92,58	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001		SOSIALISASI STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KEPADA MASYARAKAT/SUKARELAWAN TANGGAP BENCANA	21.208.950,00	19.636.600,00	(1.572.350,00)	92,58	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.208.950,00	19.636.600,00	(1.572.350,00)	92,58	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.208.950,00	19.636.600,00	(1.572.350,00)	92,58	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	55.813.475,00	54.919.900,00	(893.575,00)	98,39	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004		PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	55.813.475,00	54.919.900,00	(893.575,00)	98,39	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	55.813.475,00	54.919.900,00	(893.575,00)	98,39	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.813.475,00	54.919.900,00	(893.575,00)	98,39	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.04		PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	615.050,00	510.000,00	(105.050,00)	82,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.04.0004		PENATAUSAHAAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	615.050,00	510.000,00	(105.050,00)	82,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	615.050,00	510.000,00	(105.050,00)	82,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.050,00	510.000,00	(105.050,00)	82,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05		PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	139.033.070,00	137.428.748,00	(1.604.322,00)	98,84	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001		FASILITASI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN PEMILIK/PENGHUNI RUMAH SUSUN	139.033.070,00	137.428.748,00	(1.604.322,00)	98,84	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	139.033.070,00	137.428.748,00	(1.604.322,00)	98,84	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.033.070,00	137.428.748,00	(1.604.322,00)	98,84	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06		PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	7.880.025,00	7.733.500,00	(146.525,00)	98,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0001		FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN	7.880.025,00	7.733.500,00	(146.525,00)	98,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.880.025,00	7.733.500,00	(146.525,00)	98,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.880.025,00	7.733.500,00	(146.525,00)	98,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.4.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	429.903.200,00	426.555.013,00	(3.348.187,00)	99,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02		PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	429.903.200,00	426.555.013,00	(3.348.187,00)	99,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008		PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP	429.903.200,00	426.555.013,00	(3.348.187,00)	99,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	429.903.200,00	426.555.013,00	(3.348.187,00)	99,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.903.200,00	426.555.013,00	(3.348.187,00)	99,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.4.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	656.733.424,00	648.401.200,00	(8.332.224,00)	98,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01		PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	656.733.424,00	648.401.200,00	(8.332.224,00)	98,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN	656.733.424,00	648.401.200,00	(8.332.224,00)	98,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	656.733.424,00	648.401.200,00	(8.332.224,00)	98,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	656.733.424,00	648.401.200,00	(8.332.224,00)	98,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.4.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.899.281.098,65	1.826.139.500,00	(73.141.598,65)	96,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	1.899.281.098,65	1.826.139.500,00	(73.141.598,65)	96,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	1.899.281.098,65	1.826.139.500,00	(73.141.598,65)	96,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.899.281.098,65	1.826.139.500,00	(73.141.598,65)	96,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.899.281.098,65	1.826.139.500,00	(73.141.598,65)	96,14	
				JUMLAH BELANJA	5.823.238.851,65	5.664.187.425,00	(159.051.426,65)	97,26	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.526.738.851,65)	(5.351.206.725,00)	175.532.126,65	96,82	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.526.738.851,65)	(5.351.206.725,00)	175.532.126,65	96,82	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.120.513.672,00	7.706.704.947,00	(413.808.725,00)	94,90
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.102.749.572,00	6.807.333.764,00	(295.415.808,00)	95,84
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.460.235.422,00	3.404.219.715,00	(56.015.707,00)	98,38
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.460.235.422,00	3.404.219.715,00	(56.015.707,00)	98,38
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.460.235.422,00	3.404.219.715,00	(56.015.707,00)	98,38
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.403.585.422,00	3.350.269.715,00	(53.315.707,00)	98,43
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.650.000,00	53.950.000,00	(2.700.000,00)	95,23
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	70.912.050,00	68.195.000,00	(2.717.050,00)	96,16
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.603.500,00	6.551.000,00	(1.052.500,00)	86,15
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.603.500,00	6.551.000,00	(1.052.500,00)	86,15
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.603.500,00	6.551.000,00	(1.052.500,00)	86,15
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.336.000,00	20.325.000,00	(11.000,00)	99,94
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.336.000,00	20.325.000,00	(11.000,00)	99,94
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.336.000,00	20.325.000,00	(11.000,00)	99,94
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.179.000,00	5.166.000,00	(1.013.000,00)	83,60
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.179.000,00	5.166.000,00	(1.013.000,00)	83,60
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.179.000,00	5.166.000,00	(1.013.000,00)	83,60
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	7.200.000,00	6.600.000,00	(600.000,00)	91,66
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	6.600.000,00	(600.000,00)	91,66
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	6.600.000,00	(600.000,00)	91,66
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.853.900,00	13.825.000,00	(28.900,00)	99,79
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.853.900,00	13.825.000,00	(28.900,00)	99,79
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.853.900,00	13.825.000,00	(28.900,00)	99,79
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	15.739.650,00	15.728.000,00	(11.650,00)	99,92
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.739.650,00	15.728.000,00	(11.650,00)	99,92
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.739.650,00	15.728.000,00	(11.650,00)	99,92
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.471.660.500,00	3.247.189.799,00	(224.470.701,00)	93,53
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	119.310.700,00	67.674.337,00	(51.636.363,00)	56,72
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	119.310.700,00	67.674.337,00	(51.636.363,00)	56,72
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.310.700,00	67.674.337,00	(51.636.363,00)	56,72
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.346.049.800,00	3.173.215.462,00	(172.834.338,00)	94,83

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.346.049.800,00	3.173.215.462,00	(172.834.338,00)	94,83
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.346.049.800,00	3.173.215.462,00	(172.834.338,00)	94,83
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	99.941.600,00	87.729.250,00	(12.212.350,00)	87,78
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	15.000.000,00	14.975.000,00	(25.000,00)	99,83
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.975.000,00	(25.000,00)	99,83
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.975.000,00	(25.000,00)	99,83
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	78.001.600,00	69.979.250,00	(8.022.350,00)	89,71
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.001.600,00	69.979.250,00	(8.022.350,00)	89,71
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.001.600,00	69.979.250,00	(8.022.350,00)	89,71
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.940.000,00	2.775.000,00	(4.165.000,00)	39,98
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.940.000,00	2.775.000,00	(4.165.000,00)	39,98
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.940.000,00	2.775.000,00	(4.165.000,00)	39,98
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.5.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	234.221.100,00	229.723.600,00	(4.497.500,00)	98,07
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	195.558.100,00	191.192.800,00	(4.365.300,00)	97,76
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA	1.920.000,00	1.900.000,00	(20.000,00)	98,95
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.920.000,00	1.900.000,00	(20.000,00)	98,95
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.900.000,00	(20.000,00)	98,95
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	189.638.100,00	189.292.800,00	(345.300,00)	99,81
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	189.638.100,00	189.292.800,00	(345.300,00)	99,81
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.638.100,00	189.292.800,00	(345.300,00)	99,81
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017		PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERTURAN KEPALA DAERAH	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	38.663.000,00	38.530.800,00	(132.200,00)	99,65
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010		SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	6.893.000,00	6.889.200,00	(3.800,00)	99,94
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	6.893.000,00	6.889.200,00	(3.800,00)	99,94
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.893.000,00	6.889.200,00	(3.800,00)	99,94
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011		PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	31.770.000,00	31.641.600,00	(128.400,00)	99,59
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	31.770.000,00	31.641.600,00	(128.400,00)	99,59
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.770.000,00	31.641.600,00	(128.400,00)	99,59
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.5.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	783.543.000,00	669.647.583,00	(113.895.417,00)	85,46
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	781.953.000,00	668.083.583,00	(113.869.417,00)	85,43
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002		PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	228.453.000,00	225.608.584,00	(2.844.416,00)	98,75

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	228.453.000,00	225.608.584,00	(2.844.416,00)	98,75
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.453.000,00	225.608.584,00	(2.844.416,00)	98,75
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	553.500.000,00	442.474.999,00	(111.025.001,00)	79,94
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	553.500.000,00	442.474.999,00	(111.025.001,00)	79,94
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	553.500.000,00	442.474.999,00	(111.025.001,00)	79,94
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02		INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	1.590.000,00	1.564.000,00	(26.000,00)	98,36
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0001		PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN	1.590.000,00	1.564.000,00	(26.000,00)	98,36
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.590.000,00	1.564.000,00	(26.000,00)	98,36
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	1.564.000,00	(26.000,00)	98,36
				JUMLAH BELANJA	8.120.513.672,00	7.706.704.947,00	(413.808.725,00)	94,90
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.120.513.672,00)	(7.706.704.947,00)	413.808.725,00	94,90
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.120.513.672,00)	(7.706.704.947,00)	413.808.725,00	94,90

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan
Organisasi

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Organisasi : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.178.809.725,00	3.085.634.178,72	(93.175.546,28)	97,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.251.062.400,00	2.171.541.964,00	(79.520.436,00)	96,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.339.829.957,00	1.291.870.514,00	(47.959.443,00)	96,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.339.829.957,00	1.291.870.514,00	(47.959.443,00)	96,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.339.829.957,00	1.291.870.514,00	(47.959.443,00)	96,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.299.129.957,00	1.259.270.514,00	(39.859.443,00)	96,93	
1.05	1.05.0 00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.700.000,00	32.600.000,00	(8.100.000,00)	80,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	91.370.516,00	78.877.200,00	(12.493.316,00)	86,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.915.000,00	4.915.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.915.000,00	4.915.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.915.000,00	4.915.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	22.617.500,00	22.617.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.617.500,00	22.617.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.617.500,00	22.617.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	22.800.016,00	10.917.000,00	(11.883.016,00)	47,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.800.016,00	10.917.000,00	(11.883.016,00)	47,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.800.016,00	10.917.000,00	(11.883.016,00)	47,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.217.900,00	9.150.000,00	(67.900,00)	99,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.217.900,00	9.150.000,00	(67.900,00)	99,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.217.900,00	9.150.000,00	(67.900,00)	99,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	24.330.100,00	23.787.700,00	(542.400,00)	97,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.330.100,00	23.787.700,00	(542.400,00)	97,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.330.100,00	23.787.700,00	(542.400,00)	97,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000 000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0 00.02.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	596.367.827,00	589.262.750,00	(7.105.077,00)	98,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	36.008.907,00	35.997.550,00	(11.357,00)	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.008.907,00	35.997.550,00	(11.357,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.008.907,00	35.997.550,00	(11.357,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	560.358.920,00	553.265.200,00	(7.093.720,00)	98,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	560.358.920,00	553.265.200,00	(7.093.720,00)	98,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.358.920,00	553.265.200,00	(7.093.720,00)	98,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	203.494.100,00	191.531.500,00	(11.962.600,00)	94,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	15.000.000,00	12.350.000,00	(2.650.000,00)	82,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	12.350.000,00	(2.650.000,00)	82,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.350.000,00	(2.650.000,00)	82,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	82.054.100,00	73.490.200,00	(8.563.900,00)	89,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	82.054.100,00	73.490.200,00	(8.563.900,00)	89,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.054.100,00	73.490.200,00	(8.563.900,00)	89,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.440.000,00	6.390.000,00	(50.000,00)	99,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.440.000,00	6.390.000,00	(50.000,00)	99,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.440.000,00	6.390.000,00	(50.000,00)	99,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	100.000.000,00	99.301.300,00	(698.700,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.301.300,00	(698.700,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.301.300,00	(698.700,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	927.747.325,00	914.092.214,72	(13.655.110,28)	98,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	1.042.875,00	1.010.000,00	(32.875,00)	96,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0007		SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA	1.042.875,00	1.010.000,00	(32.875,00)	96,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.042.875,00	1.010.000,00	(32.875,00)	96,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.042.875,00	1.010.000,00	(32.875,00)	96,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	380.152.100,00	376.428.700,00	(3.723.400,00)	99,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015		PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	5.500.000,00	5.328.000,00	(172.000,00)	96,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	5.500.000,00	5.328.000,00	(172.000,00)	96,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.328.000,00	(172.000,00)	96,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0018		GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0022		PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI KABUPATEN/KOTA	2.962.500,00	2.287.600,00	(674.900,00)	77,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	2.962.500,00	2.287.600,00	(674.900,00)	77,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.962.500,00	2.287.600,00	(674.900,00)	77,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0026		PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0027		PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.962.500,00	2.200.000,00	(762.500,00)	74,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	2.962.500,00	2.200.000,00	(762.500,00)	74,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.962.500,00	2.200.000,00	(762.500,00)	74,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0028		PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	364.587.100,00	362.473.100,00	(2.114.000,00)	99,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	364.587.100,00	362.473.100,00	(2.114.000,00)	99,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.587.100,00	362.473.100,00	(2.114.000,00)	99,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	101.223.650,00	101.118.800,00	(104.850,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0001		RESPON CEPAT KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT/WABAH ZOONOSIS PRIORITAS	53.760.000,00	53.760.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.760.000,00	53.760.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.760.000,00	53.760.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002		RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA	10.760.000,00	10.760.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.760.000,00	10.760.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.760.000,00	10.760.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003		PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	34.503.650,00	34.398.800,00	(104.850,00)	99,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.503.650,00	34.398.800,00	(104.850,00)	99,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.503.650,00	34.398.800,00	(104.850,00)	99,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0012		AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	445.328.700,00	435.534.714,72	(9.793.985,28)	97,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010		KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	3.151.650,00	2.418.600,00	(733.050,00)	76,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.151.650,00	2.418.600,00	(733.050,00)	76,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.151.650,00	2.418.600,00	(733.050,00)	76,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0015		PENYUSUNAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA) DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCABENCANA (R3P) KAB/KOTA	442.177.050,00	433.116.114,72	(9.060.935,28)	97,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0015	5.1	BELANJA OPERASI	442.177.050,00	433.116.114,72	(9.060.935,28)	97,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.177.050,00	433.116.114,72	(9.060.935,28)	97,95	
				JUMLAH BELANJA	3.178.809.725,00	3.085.634.178,72	(93.175.546,28)	97,06	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.178.809.725,00)	(3.085.634.178,72)	93.175.546,28	97,06	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.178.809.725,00)	(3.085.634.178,72)	93.175.546,28	97,06	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.176.917.283,00	4.079.943.429,00	(96.973.854,00)	97,67	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.6.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.714.479.283,00	3.625.764.419,00	(88.714.864,00)	97,61	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.754.846.225,00	2.705.563.754,00	(49.282.471,00)	98,21	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.754.846.225,00	2.705.563.754,00	(49.282.471,00)	98,21	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.754.846.225,00	2.705.563.754,00	(49.282.471,00)	98,21	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.666.396.225,00	2.623.763.754,00	(42.632.471,00)	98,40	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.450.000,00	81.800.000,00	(6.650.000,00)	92,48	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	129.565.150,00	128.883.905,00	(681.245,00)	99,47	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.500.000,00	2.447.000,00	(53.000,00)	97,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.447.000,00	(53.000,00)	97,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.447.000,00	(53.000,00)	97,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	32.309.000,00	32.307.500,00	(1.500,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.309.000,00	32.307.500,00	(1.500,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.309.000,00	32.307.500,00	(1.500,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.760.000,00	3.730.000,00	(30.000,00)	99,20	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.760.000,00	3.730.000,00	(30.000,00)	99,20	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.760.000,00	3.730.000,00	(30.000,00)	99,20	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	24.138.000,00	24.048.000,00	(90.000,00)	99,62	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.138.000,00	24.048.000,00	(90.000,00)	99,62	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.138.000,00	24.048.000,00	(90.000,00)	99,62	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.641.600,00	19.641.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.641.600,00	19.641.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.641.600,00	19.641.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	47.216.550,00	46.709.805,00	(506.745,00)	98,92	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	47.216.550,00	46.709.805,00	(506.745,00)	98,92	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.216.550,00	46.709.805,00	(506.745,00)	98,92	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	615.187.908,00	593.920.831,00	(21.267.077,00)	96,54	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	73.659.840,00	69.359.381,00	(4.300.459,00)	94,16	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.659.840,00	69.359.381,00	(4.300.459,00)	94,16	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.659.840,00	69.359.381,00	(4.300.459,00)	94,16	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	538.028.068,00	521.061.450,00	(16.966.618,00)	96,84	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	538.028.068,00	521.061.450,00	(16.966.618,00)	96,84	

1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.028.068,00	521.061.450,00	(16.966.618,00)	96,84	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	214.880.000,00	197.395.929,00	(17.484.071,00)	91,86	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS	21.000.000,00	4.277.500,00	(16.722.500,00)	20,36	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	4.277.500,00	(16.722.500,00)	20,36	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	4.277.500,00	(16.722.500,00)	20,36	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	182.000.000,00	181.328.429,00	(671.571,00)	99,63	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	182.000.000,00	181.328.429,00	(671.571,00)	99,63	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.000.000,00	181.328.429,00	(671.571,00)	99,63	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	11.880.000,00	11.790.000,00	(90.000,00)	99,24	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.880.000,00	11.790.000,00	(90.000,00)	99,24	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.880.000,00	11.790.000,00	(90.000,00)	99,24	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.6.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	27.243.350,00	27.144.710,00	(98.640,00)	99,63	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.243.350,00	27.144.710,00	(98.640,00)	99,63	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN	20.712.450,00	20.701.700,00	(10.750,00)	99,94	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.712.450,00	20.701.700,00	(10.750,00)	99,94	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.712.450,00	20.701.700,00	(10.750,00)	99,94	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT	6.530.900,00	6.443.010,00	(87.890,00)	98,65	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.530.900,00	6.443.010,00	(87.890,00)	98,65	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.530.900,00	6.443.010,00	(87.890,00)	98,65	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.6.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	311.396.000,00	307.838.850,00	(3.557.150,00)	98,85	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA	274.655.000,00	272.156.350,00	(2.498.650,00)	99,09	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	9.390.000,00	9.390.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.390.000,00	9.390.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.390.000,00	9.390.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003		PENYEDIAAN ALAT BANTU	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0004		PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	7.800.000,00	5.950.000,00	(1.850.000,00)	76,28	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	5.950.000,00	(1.850.000,00)	76,28	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	5.950.000,00	(1.850.000,00)	76,28	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	65.905.000,00	65.794.667,00	(110.333,00)	99,83	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	65.905.000,00	65.794.667,00	(110.333,00)	99,83	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.905.000,00	65.794.667,00	(110.333,00)	99,83	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK	32.455.250,00	32.385.430,00	(69.820,00)	99,78	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.455.250,00	32.385.430,00	(69.820,00)	99,78	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.455.250,00	32.385.430,00	(69.820,00)	99,78	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0007		FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU	2.412.500,00	2.198.200,00	(214.300,00)	91,11	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.412.500,00	2.198.200,00	(214.300,00)	91,11	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.412.500,00	2.198.200,00	(214.300,00)	91,11	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0008		PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	121.857.750,00	121.824.103,00	(33.647,00)	99,97	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	121.857.750,00	121.824.103,00	(33.647,00)	99,97	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.857.750,00	121.824.103,00	(33.647,00)	99,97	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0009		PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	2.819.500,00	2.731.850,00	(87.650,00)	96,89	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.819.500,00	2.731.850,00	(87.650,00)	96,89	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.819.500,00	2.731.850,00	(87.650,00)	96,89	

1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0010		PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	2.782.500,00	2.695.700,00	(86.800,00)	96,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.782.500,00	2.695.700,00	(86.800,00)	96,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.782.500,00	2.695.700,00	(86.800,00)	96,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0011		PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	2.897.500,00	2.894.100,00	(3.400,00)	99,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	2.897.500,00	2.894.100,00	(3.400,00)	99,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.897.500,00	2.894.100,00	(3.400,00)	99,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0012		PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	3.815.000,00	3.772.300,00	(42.700,00)	98,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	3.815.000,00	3.772.300,00	(42.700,00)	98,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.815.000,00	3.772.300,00	(42.700,00)	98,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02		REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN	36.741.000,00	35.682.500,00	(1.058.500,00)	97,11	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0008		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	36.741.000,00	35.682.500,00	(1.058.500,00)	97,11	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	36.741.000,00	35.682.500,00	(1.058.500,00)	97,11	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.741.000,00	35.682.500,00	(1.058.500,00)	97,11	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.6.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	22.187.650,00	21.874.900,00	(312.750,00)	98,59	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.187.650,00	21.874.900,00	(312.750,00)	98,59	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0002		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.087.700,00	9.042.750,00	(44.950,00)	99,50	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.087.700,00	9.042.750,00	(44.950,00)	99,50	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.087.700,00	9.042.750,00	(44.950,00)	99,50	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	1.568.000,00	1.338.000,00	(230.000,00)	85,33	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.568.000,00	1.338.000,00	(230.000,00)	85,33	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.568.000,00	1.338.000,00	(230.000,00)	85,33	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0004		FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	11.531.950,00	11.494.150,00	(37.800,00)	99,67	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.531.950,00	11.494.150,00	(37.800,00)	99,67	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.531.950,00	11.494.150,00	(37.800,00)	99,67	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.6.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	101.611.000,00	97.320.550,00	(4.290.450,00)	95,77	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	101.611.000,00	97.320.550,00	(4.290.450,00)	95,77	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0001		PENYEDIAAN MAKANAN	76.043.500,00	72.204.700,00	(3.838.800,00)	94,95	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.043.500,00	72.204.700,00	(3.838.800,00)	94,95	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.043.500,00	72.204.700,00	(3.838.800,00)	94,95	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	11.828.750,00	11.730.400,00	(98.350,00)	99,16	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.828.750,00	11.730.400,00	(98.350,00)	99,16	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.828.750,00	11.730.400,00	(98.350,00)	99,16	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0003		PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI	5.312.500,00	5.272.500,00	(40.000,00)	99,24	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.312.500,00	5.272.500,00	(40.000,00)	99,24	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.312.500,00	5.272.500,00	(40.000,00)	99,24	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0004		PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	4.131.250,00	3.893.600,00	(237.650,00)	94,24	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.131.250,00	3.893.600,00	(237.650,00)	94,24	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.131.250,00	3.893.600,00	(237.650,00)	94,24	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	4.295.000,00	4.219.350,00	(75.650,00)	98,23	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.295.000,00	4.219.350,00	(75.650,00)	98,23	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.295.000,00	4.219.350,00	(75.650,00)	98,23	
				JUMLAH BELANJA	4.176.917.283,00	4.079.943.429,00	(96.973.854,00)	97,67	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.176.917.283,00)	(4.079.943.429,00)	96.973.854,00	97,67	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.176.917.283,00)	(4.079.943.429,00)	96.973.854,00	97,67	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.745.200.870,00	2.271.212.125,24	(473.988.744,76)	82,73	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.8.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	115.789.900,00	100.482.600,00	(15.307.300,00)	86,78	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	115.789.900,00	100.482.600,00	(15.307.300,00)	86,78	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN	115.789.900,00	100.482.600,00	(15.307.300,00)	86,78	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	115.789.900,00	100.482.600,00	(15.307.300,00)	86,78	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.789.900,00	100.482.600,00	(15.307.300,00)	86,78	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.8.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	123.703.000,00	105.203.613,00	(18.499.387,00)	85,04	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.800.000,00	35.600.000,00	(200.000,00)	99,44	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.800.000,00	35.600.000,00	(200.000,00)	99,44	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.800.000,00	35.600.000,00	(200.000,00)	99,44	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000,00	35.600.000,00	(200.000,00)	99,44	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	87.903.000,00	69.603.613,00	(18.299.387,00)	79,18	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	87.903.000,00	69.603.613,00	(18.299.387,00)	79,18	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	87.903.000,00	69.603.613,00	(18.299.387,00)	79,18	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.903.000,00	69.603.613,00	(18.299.387,00)	79,18	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.8.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	59.759.000,00	57.943.100,00	(1.815.900,00)	96,96	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK	59.759.000,00	57.943.100,00	(1.815.900,00)	96,96	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK	59.759.000,00	57.943.100,00	(1.815.900,00)	96,96	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.759.000,00	57.943.100,00	(1.815.900,00)	96,96	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.759.000,00	57.943.100,00	(1.815.900,00)	96,96	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.8.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.8.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.422.698.970,00	1.984.332.812,24	(438.366.157,76)	81,90	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH	94.200.000,00	89.930.000,00	(4.270.000,00)	95,46	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004		ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN	94.200.000,00	89.930.000,00	(4.270.000,00)	95,46	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	94.200.000,00	89.930.000,00	(4.270.000,00)	95,46	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.200.000,00	89.930.000,00	(4.270.000,00)	95,46	

2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.240.098.970,00	1.816.219.411,24	(423.879.558,76)	81,07	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0007		KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK	2.240.098.970,00	1.816.219.411,24	(423.879.558,76)	81,07	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	234.444.000,00	204.037.076,00	(30.406.924,00)	87,03	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.444.000,00	204.037.076,00	(30.406.924,00)	87,03	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	2.005.654.970,00	1.612.182.335,24	(393.472.634,76)	80,38	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.005.654.970,00	1.612.182.335,24	(393.472.634,76)	80,38	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.400.000,00	78.183.401,00	(10.216.599,00)	88,44	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006		PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/	88.400.000,00	78.183.401,00	(10.216.599,00)	88,44	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	88.400.000,00	78.183.401,00	(10.216.599,00)	88,44	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	78.183.401,00	(10.216.599,00)	88,44	
				JUMLAH BELANJA	2.745.200.870,00	2.271.212.125,24	(473.988.744,76)	82,73	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.745.200.870,00)	(2.271.212.125,24)	473.988.744,76	82,73	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.745.200.870,00)	(2.271.212.125,24)	473.988.744,76	82,73	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Pangan dan Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.25.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	75.000.000,00	49.590.000,00	(25.410.000,00)	66,12	
	2.09.3.25.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000,00	49.590.000,00	(25.410.000,00)	66,12	
	2.09.3.25.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	75.000.000,00	49.590.000,00	(25.410.000,00)	66,12	
				JUMLAH PENDAPATAN	75.000.000,00	49.590.000,00	(25.410.000,00)	66,12	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.692.990.121,00	3.609.108.442,00	(83.881.679,00)	97,72	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.9.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.237.144.371,00	3.163.306.778,00	(73.837.593,00)	97,71	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.482.201.281,00	2.446.412.804,00	(35.788.477,00)	98,55	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.482.201.281,00	2.446.412.804,00	(35.788.477,00)	98,55	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.482.201.281,00	2.446.412.804,00	(35.788.477,00)	98,55	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.601.281,00	2.387.612.804,00	(32.988.477,00)	98,63	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.600.000,00	58.800.000,00	(2.800.000,00)	95,45	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	86.160.250,00	85.913.450,00	(246.800,00)	99,71	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	560.000,00	560.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	560.000,00	560.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.000,00	560.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	18.500.000,00	18.428.000,00	(72.000,00)	99,61	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.500.000,00	18.428.000,00	(72.000,00)	99,61	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.428.000,00	(72.000,00)	99,61	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.750.000,00	3.740.000,00	(10.000,00)	99,73	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.740.000,00	(10.000,00)	99,73	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.740.000,00	(10.000,00)	99,73	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	6.510.000,00	6.510.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.510.000,00	6.510.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.510.000,00	6.510.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.498.000,00	5.497.900,00	(100,00)	99,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.498.000,00	5.497.900,00	(100,00)	99,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.498.000,00	5.497.900,00	(100,00)	99,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	51.342.250,00	51.177.550,00	(164.700,00)	99,67	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	51.342.250,00	51.177.550,00	(164.700,00)	99,67	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.342.250,00	51.177.550,00	(164.700,00)	99,67	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	28.200.000,00	28.050.000,00	(150.000,00)	99,46	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.200.000,00	28.050.000,00	(150.000,00)	99,46	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	28.200.000,00	28.050.000,00	(150.000,00)	99,46	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.200.000,00	28.050.000,00	(150.000,00)	99,46	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	566.032.840,00	530.074.124,00	(35.958.716,00)	93,64	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	41.686.040,00	40.615.524,00	(1.070.516,00)	97,43	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.686.040,00	40.615.524,00	(1.070.516,00)	97,43	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.686.040,00	40.615.524,00	(1.070.516,00)	97,43	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	520.836.800,00	485.948.600,00	(34.888.200,00)	93,30	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	520.836.800,00	485.948.600,00	(34.888.200,00)	93,30	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.836.800,00	485.948.600,00	(34.888.200,00)	93,30	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	74.550.000,00	72.856.400,00	(1.693.600,00)	97,72	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	17.000.000,00	16.841.500,00	(158.500,00)	99,06	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.841.500,00	(158.500,00)	99,06	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.841.500,00	(158.500,00)	99,06	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	52.000.000,00	50.464.900,00	(1.535.100,00)	97,04	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	50.464.900,00	(1.535.100,00)	97,04	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	50.464.900,00	(1.535.100,00)	97,04	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.9.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	267.994.800,00	267.608.000,00	(386.800,00)	99,85	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	87.176.750,00	87.093.650,00	(83.100,00)	99,90	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015		PEMANTAUAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN	73.617.150,00	73.534.250,00	(82.900,00)	99,88	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	73.617.150,00	73.534.250,00	(82.900,00)	99,88	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.617.150,00	73.534.250,00	(82.900,00)	99,88	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016		PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)	13.559.600,00	13.559.400,00	(200,00)	99,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	13.559.600,00	13.559.400,00	(200,00)	99,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.559.600,00	13.559.400,00	(200,00)	99,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02		PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	146.490.800,00	146.474.850,00	(15.950,00)	99,98	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003		PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	146.490.800,00	146.474.850,00	(15.950,00)	99,98	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	146.490.800,00	146.474.850,00	(15.950,00)	99,98	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.490.800,00	146.474.850,00	(15.950,00)	99,98	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	34.327.250,00	34.039.500,00	(287.750,00)	99,16	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001		PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	5.772.850,00	5.663.100,00	(109.750,00)	98,09	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.772.850,00	5.663.100,00	(109.750,00)	98,09	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.772.850,00	5.663.100,00	(109.750,00)	98,09	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	28.554.400,00	28.376.400,00	(178.000,00)	99,37	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.554.400,00	28.376.400,00	(178.000,00)	99,37	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.554.400,00	28.376.400,00	(178.000,00)	99,37	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.9.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	178.841.250,00	170.048.964,00	(8.792.286,00)	95,08	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.02		PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	178.841.250,00	170.048.964,00	(8.792.286,00)	95,08	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0002		PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	178.841.250,00	170.048.964,00	(8.792.286,00)	95,08	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	178.841.250,00	170.048.964,00	(8.792.286,00)	95,08	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.841.250,00	170.048.964,00	(8.792.286,00)	95,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.9.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	9.009.700,00	8.144.700,00	(865.000,00)	90,39	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.009.700,00	8.144.700,00	(865.000,00)	90,39	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0004		REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.009.700,00	8.144.700,00	(865.000,00)	90,39	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.009.700,00	8.144.700,00	(865.000,00)	90,39	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.009.700,00	8.144.700,00	(865.000,00)	90,39	
				JUMLAH BELANJA	3.692.990.121,00	3.609.108.442,00	(83.881.679,00)	97,72	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.617.990.121,00)	(3.559.518.442,00)	58.471.679,00	98,38	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.617.990.121,00)	(3.559.518.442,00)	58.471.679,00	98,38	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	296.500.000,00	312.980.700,00	16.480.700,00	105,55	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	296.500.000,00	312.980.700,00	16.480.700,00	105,55	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	290.000.000,00	305.745.000,00	15.745.000,00	105,42	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.500.000,00	7.235.700,00	735.700,00	111,31	
				JUMLAH PENDAPATAN	296.500.000,00	312.980.700,00	16.480.700,00	105,55	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH					
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	132.940.000,00	132.354.250,00	(585.750,00)	99,55	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01		PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	132.940.000,00	132.354.250,00	(585.750,00)	99,55	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERIAN IZIN MEMBUKA TANAH	132.940.000,00	132.354.250,00	(585.750,00)	99,55	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	132.940.000,00	132.354.250,00	(585.750,00)	99,55	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.940.000,00	132.354.250,00	(585.750,00)	99,55	
				JUMLAH BELANJA	132.940.000,00	132.354.250,00	(585.750,00)	99,55	
				SURPLUS / (DEFISIT)	163.560.000,00	180.626.450,00	17.066.450,00	110,43	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	163.560.000,00	180.626.450,00	17.066.450,00	110,43	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	318.500.000,00	372.080.000,00	53.480.000,00	116,78	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	318.600.000,00	372.080.000,00	53.480.000,00	116,78	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	318.000.000,00	372.030.000,00	54.030.000,00	116,99	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	600.000,00	50.000,00	(550.000,00)	8,33	
				JUMLAH PENDAPATAN	318.600.000,00	372.080.000,00	53.480.000,00	116,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH					
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.544.139.251,00	6.204.667.759,00	(339.471.492,00)	94,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.119.388.484,00	4.026.412.922,00	(92.975.562,00)	97,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.456.060.104,00	2.379.274.322,00	(76.785.782,00)	96,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.456.060.104,00	2.379.274.322,00	(76.785.782,00)	96,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.456.060.104,00	2.379.274.322,00	(76.785.782,00)	96,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.364.760.104,00	2.315.774.322,00	(48.985.782,00)	97,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	91.300.000,00	63.500.000,00	(27.800.000,00)	69,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	58.312.800,00	57.905.800,00	(407.000,00)	99,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.265.000,00	2.232.000,00	(33.000,00)	98,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.265.000,00	2.232.000,00	(33.000,00)	98,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.265.000,00	2.232.000,00	(33.000,00)	98,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.615.000,00	19.559.000,00	(56.000,00)	99,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.615.000,00	19.559.000,00	(56.000,00)	99,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.615.000,00	19.559.000,00	(56.000,00)	99,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.753.000,00	3.727.500,00	(25.500,00)	99,32	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.753.000,00	3.727.500,00	(25.500,00)	99,32	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	3.753.000,00	3.727.500,00	(25.500,00)	99,32	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.934.000,00	6.934.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.934.000,00	6.934.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.934.000,00	6.934.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.494.700,00	5.493.000,00	(1.700,00)	99,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.494.700,00	5.493.000,00	(1.700,00)	99,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	5.494.700,00	5.493.000,00	(1.700,00)	99,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.251.100,00	19.960.300,00	(290.800,00)	98,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.251.100,00	19.960.300,00	(290.800,00)	98,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.251.100,00	19.960.300,00	(290.800,00)	98,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.521.195.170,00	1.508.191.300,00	(13.003.870,00)	99,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
					39.664.570,00	39.658.400,00	(6.170,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.664.570,00	39.658.400,00	(6.170,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.664.570,00	39.658.400,00	(6.170,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.477.530.600,00	1.464.532.900,00	(12.997.700,00)	99,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.477.530.600,00	1.464.532.900,00	(12.997.700,00)	99,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.477.530.600,00	1.464.532.900,00	(12.997.700,00)	99,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	83.820.410,00	81.041.500,00	(2.778.910,00)	96,68	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU	38.500.000,00	37.956.500,00	(543.500,00)	98,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.500.000,00	37.956.500,00	(543.500,00)	98,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	37.956.500,00	(543.500,00)	98,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	40.250.000,00	38.025.000,00	(2.225.000,00)	94,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.250.000,00	38.025.000,00	(2.225.000,00)	94,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.250.000,00	38.025.000,00	(2.225.000,00)	94,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.070.410,00	5.060.000,00	(10.410,00)	99,79	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.070.410,00	5.060.000,00	(10.410,00)	99,79	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.070.410,00	5.060.000,00	(10.410,00)	99,79	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	236.914.092,00	231.348.950,00	(5.565.142,00)	97,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02		PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	236.914.092,00	231.348.950,00	(5.565.142,00)	97,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002		PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD	236.914.092,00	231.348.950,00	(5.565.142,00)	97,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	236.914.092,00	231.348.950,00	(5.565.142,00)	97,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.914.092,00	231.348.950,00	(5.565.142,00)	97,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	173.490.250,00	172.188.999,00	(1.301.251,00)	99,24	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	150.830.250,00	149.597.399,00	(1.232.851,00)	99,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	67.621.000,00	67.300.781,00	(320.219,00)	99,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.621.000,00	67.300.781,00	(320.219,00)	99,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.621.000,00	67.300.781,00	(320.219,00)	99,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015		PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	83.209.250,00	82.296.618,00	(912.632,00)	98,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	83.209.250,00	82.296.618,00	(912.632,00)	98,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.209.250,00	82.296.618,00	(912.632,00)	98,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02		PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	22.660.000,00	22.591.600,00	(68.400,00)	99,69	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0003		PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	22.660.000,00	22.591.600,00	(68.400,00)	99,69	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.660.000,00	22.591.600,00	(68.400,00)	99,69	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.660.000,00	22.591.600,00	(68.400,00)	99,69	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	80.122.250,00	78.487.400,00	(1.634.850,00)	97,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	80.122.250,00	78.487.400,00	(1.634.850,00)	97,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004		PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	80.122.250,00	78.487.400,00	(1.634.850,00)	97,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	80.122.250,00	78.487.400,00	(1.634.850,00)	97,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.122.250,00	78.487.400,00	(1.634.850,00)	97,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	11.635.450,00	11.090.850,00	(544.600,00)	95,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01		PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	11.635.450,00	11.090.850,00	(544.600,00)	95,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI	11.635.450,00	11.090.850,00	(544.600,00)	95,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.635.450,00	11.090.850,00	(544.600,00)	95,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.635.450,00	11.090.850,00	(544.600,00)	95,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	834.178.725,00	825.670.060,00	(8.508.665,00)	98,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA	834.178.725,00	825.670.060,00	(8.508.665,00)	98,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP	77.796.525,00	76.215.900,00	(1.580.625,00)	97,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	77.796.525,00	76.215.900,00	(1.580.625,00)	97,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.796.525,00	76.215.900,00	(1.580.625,00)	97,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	756.382.200,00	749.454.160,00	(6.928.040,00)	99,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	741.382.200,00	734.524.660,00	(6.857.540,00)	99,07	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	741.382.200,00	734.524.660,00	(6.857.540,00)	99,07	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.929.500,00	(70.500,00)	99,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.929.500,00	(70.500,00)	99,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.088.410.000,00	859.468.578,00	(228.941.422,00)	78,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	1.088.410.000,00	859.468.578,00	(228.941.422,00)	78,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	1.088.410.000,00	859.468.578,00	(228.941.422,00)	78,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	331.410.000,00	104.565.583,00	(226.844.417,00)	31,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.410.000,00	104.565.583,00	(226.844.417,00)	31,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	757.000.000,00	754.902.995,00	(2.097.005,00)	99,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	11.635.450,00	11.090.850,00	(544.600,00)	95,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01		PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	11.635.450,00	11.090.850,00	(544.600,00)	95,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	11.635.450,00	11.090.850,00	(544.600,00)	95,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.635.450,00	11.090.850,00	(544.600,00)	95,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.635.450,00	11.090.850,00	(544.600,00)	95,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	834.178.725,00	825.670.060,00	(8.508.665,00)	98,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	834.178.725,00	825.670.060,00	(8.508.665,00)	98,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP	77.796.525,00	76.215.900,00	(1.580.625,00)	97,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	77.796.525,00	76.215.900,00	(1.580.625,00)	97,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.796.525,00	76.215.900,00	(1.580.625,00)	97,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT	756.382.200,00	749.454.160,00	(6.928.040,00)	99,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	741.382.200,00	734.524.660,00	(6.857.540,00)	99,07	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	741.382.200,00	734.524.660,00	(6.857.540,00)	99,07	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.929.500,00	(70.500,00)	99,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.929.500,00	(70.500,00)	99,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.088.410.000,00	859.468.578,00	(228.941.422,00)	78,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	1.088.410.000,00	859.468.578,00	(228.941.422,00)	78,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	1.088.410.000,00	859.468.578,00	(228.941.422,00)	78,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	331.410.000,00	104.565.583,00	(226.844.417,00)	31,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.410.000,00	104.565.583,00	(226.844.417,00)	31,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	757.000.000,00	754.902.995,00	(2.097.005,00)	99,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	757.000.000,00	754.902.995,00	(2.097.005,00)	99,72	
				JUMLAH BELANJA	6.544.139.251,00	6.204.667.759,00	(339.471.492,00)	94,81	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.225.539.251,00)	(5.832.587.759,00)	392.951.492,00	93,68	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.225.539.251,00)	(5.832.587.759,00)	392.951.492,00	93,68	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.353.714.299,00	3.241.755.417,00	(111.958.882,00)	96,66	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.228.754.049,00	3.121.344.969,00	(107.409.080,00)	96,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.426.329.037,00	2.339.639.787,00	(86.689.250,00)	96,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.426.329.037,00	2.339.639.787,00	(86.689.250,00)	96,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.426.329.037,00	2.339.639.787,00	(86.689.250,00)	96,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.376.829.037,00	2.294.239.787,00	(82.589.250,00)	96,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	45.400.000,00	(4.100.000,00)	91,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	347.823.762,00	347.327.397,00	(496.365,00)	99,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.975.000,00	8.970.704,00	(4.296,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.975.000,00	8.970.704,00	(4.296,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.975.000,00	8.970.704,00	(4.296,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	245.197.000,00	244.721.693,00	(475.307,00)	99,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	245.197.000,00	244.721.693,00	(475.307,00)	99,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.197.000,00	244.721.693,00	(475.307,00)	99,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.061.832,00	1.061.832,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.061.832,00	1.061.832,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.061.832,00	1.061.832,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	16.375.000,00	16.374.920,00	(80,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.375.000,00	16.374.920,00	(80,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.375.000,00	16.374.920,00	(80,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.200.000,00	6.193.318,00	(6.682,00)	99,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.200.000,00	6.193.318,00	(6.682,00)	99,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.193.318,00	(6.682,00)	99,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	70.014.930,00	70.004.930,00	(10.000,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	70.014.930,00	70.004.930,00	(10.000,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.014.930,00	70.004.930,00	(10.000,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	6.210.000,00	6.025.662,00	(184.338,00)	97,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	6.210.000,00	6.025.662,00	(184.338,00)	97,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.410.000,00	4.251.262,00	(158.738,00)	96,40	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.410.000,00	4.251.262,00	(158.738,00)	96,40	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	1.800.000,00	1.774.400,00	(25.600,00)	98,57	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	1.774.400,00	(25.600,00)	98,57	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	328.513.920,00	309.117.542,00	(19.396.378,00)	94,09	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.744.000,00	2.658.548,00	(85.452,00)	96,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.744.000,00	2.658.548,00	(85.452,00)	96,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.744.000,00	2.658.548,00	(85.452,00)	96,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	89.459.680,00	85.219.444,00	(4.240.236,00)	95,26	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.459.680,00	85.219.444,00	(4.240.236,00)	95,26	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.459.680,00	85.219.444,00	(4.240.236,00)	95,26	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	236.310.240,00	221.239.550,00	(15.070.690,00)	93,62	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	236.310.240,00	221.239.550,00	(15.070.690,00)	93,62	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.310.240,00	221.239.550,00	(15.070.690,00)	93,62	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	119.877.330,00	119.234.581,00	(642.749,00)	99,46	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	17.500.000,00	17.233.250,00	(266.750,00)	98,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.233.250,00	(266.750,00)	98,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.233.250,00	(266.750,00)	98,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	67.500.000,00	67.129.696,00	(370.304,00)	99,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.500.000,00	67.129.696,00	(370.304,00)	99,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	67.129.696,00	(370.304,00)	99,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	34.877.330,00	34.871.635,00	(5.695,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	34.877.330,00	34.871.635,00	(5.695,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.877.330,00	34.871.635,00	(5.695,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	12.913.400,00	12.831.200,00	(82.200,00)	99,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03		PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	12.913.400,00	12.831.200,00	(82.200,00)	99,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001		KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA DALAM PENERTIBAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	5.224.000,00	5.141.800,00	(82.200,00)	98,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.224.000,00	5.141.800,00	(82.200,00)	98,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.224.000,00	5.141.800,00	(82.200,00)	98,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002		PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	7.689.400,00	7.689.400,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.689.400,00	7.689.400,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.689.400,00	7.689.400,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	99.995.000,00	95.717.448,00	(4.277.552,00)	95,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	99.995.000,00	95.717.448,00	(4.277.552,00)	95,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004		BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL	99.995.000,00	95.717.448,00	(4.277.552,00)	95,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.995.000,00	95.717.448,00	(4.277.552,00)	95,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.995.000,00	95.717.448,00	(4.277.552,00)	95,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	12.051.850,00	11.861.800,00	(190.050,00)	98,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	9.336.850,00	9.146.800,00	(190.050,00)	97,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001		KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA DALAM PENERTIBAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5.586.850,00	5.586.800,00	(50,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.586.850,00	5.586.800,00	(50,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.586.850,00	5.586.800,00	(50,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003		FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.750.000,00	3.560.000,00	(190.000,00)	94,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.560.000,00	(190.000,00)	94,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.560.000,00	(190.000,00)	94,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003		BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	3.353.714.299,00	3.241.755.417,00	(111.958.882,00)	96,66	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.353.714.299,00)	(3.241.755.417,00)	111.958.882,00	96,66	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.353.714.299,00)	(3.241.755.417,00)	111.958.882,00	96,66	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.284.356.312,00	4.112.944.807,00	(171.411.505,00)	95,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.935.259.762,00	2.871.277.040,00	(63.982.722,00)	97,82	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.455.920.362,00	2.402.104.379,00	(53.815.983,00)	97,80	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.455.920.362,00	2.402.104 379,00	(53.815.983,00)	97,80	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.455.920.362,00	2.402.104.379,00	(53.815.983,00)	97,80	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.382.720.362,00	2.336.804.379,00	(45.915.983,00)	98,07	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	65.300.000,00	(7.900.000,00)	89,20	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	117.919.800,00	110.257.600,00	(7.662.200,00)	93,50	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.522.000,00	6.426.000,00	(96.000,00)	98,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.522.000,00	6.426.000,00	(96.000,00)	98,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.522.000,00	6.426.000,00	(96.000,00)	98,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	16.651.000,00	16.633.000,00	(18.000,00)	99,89	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.651.000,00	16.633.000,00	(18.000,00)	99,89	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.651.000,00	16.633.000,00	(18.000,00)	99,89	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.000.000,00	5.996.000,00	(4.000,00)	99,93	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.996.000,00	(4.000,00)	99,93	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.996.000,00	(4.000,00)	99,93	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	26.595.000,00	26.590.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.595.000,00	26.590.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.595.000,00	26.590.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.490.000,00	7.489.400,00	(600,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.490.000,00	7.489.400,00	(600,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.490.000,00	7.489.400,00	(600,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	54.661.800,00	47.123.200,00	(7.538.600,00)	86,20	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	54.661.800,00	47.123.200,00	(7.538.600,00)	86,20	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.661.800,00	47.123.200,00	(7.538.600,00)	86,20	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	194.165.600,00	193.537.603,00	(627.997,00)	99,67	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2 08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.426.250,00	20.037.703,00	(388.547,00)	98,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08 0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.426.250,00	20.037.703,00	(388.547,00)	98,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.426.250,00	20.037.703,00	(388.547,00)	98,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	170.239.350,00	169.999.900,00	(239.450,00)	99,85	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	170.239.350,00	169.999.900,00	(239.450,00)	99,85	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.239.350,00	169.999.900,00	(239.450,00)	99,85	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	167.254.000,00	165.377.458,00	(1.876.542,00)	98,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	27.000.000,00	26.695.500,00	(304.500,00)	98,87	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	26.695.500,00	(304.500,00)	98,87	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	26.695.500,00	(304.500,00)	98,87	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	77.000.000,00	75.565.958,00	(1.434.042,00)	98,13	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	77.000.000,00	75.565.958,00	(1.434.042,00)	98,13	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	75.565.958,00	(1.434.042,00)	98,13	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.490.000,00	13.376.000,00	(114.000,00)	99,15	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.490.000,00	13.376.000,00	(114.000,00)	99,15	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.490.000,00	13.376.000,00	(114.000,00)	99,15	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	49.764.000,00	49.740.000,00	(24.000,00)	99,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.764.000,00	49.740.000,00	(24.000,00)	99,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.764.000,00	49.740.000,00	(24.000,00)	99,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	15.233.550,00	14.201.300,00	(1.032.250,00)	93,22	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA	15.233.550,00	14.201.300,00	(1.032.250,00)	93,22	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0002		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM KABUPATEN/KOTA	8.677.300,00	8.489.500,00	(187.800,00)	97,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.677.300,00	8.489.500,00	(187.800,00)	97,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.677.300,00	8.489.500,00	(187.800,00)	97,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003		FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	6.556.250,00	5.711.800,00	(844.450,00)	87,11	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.556.250,00	5.711.800,00	(844.450,00)	87,11	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.556.250,00	5.711.800,00	(844.450,00)	87,11	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	159.806.050,00	153.014.912,00	(6.791.138,00)	95,75	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	159.806.050,00	153.014.912,00	(6.791.138,00)	95,75	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001		FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	116.645.850,00	112.078.012,00	(4.567.838,00)	96,08	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	116.645.850,00	112.078.012,00	(4.567.838,00)	96,08	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.645.850,00	112.078.012,00	(4.567.838,00)	96,08	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA	14.014.400,00	13.533.500,00	(480.900,00)	96,56	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.014.400,00	13.533.500,00	(480.900,00)	96,56	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.014.400,00	13.533.500,00	(480.900,00)	96,56	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011		FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA	29.145.800,00	27.403.400,00	(1.742.400,00)	94,02	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	29.145.800,00	27.403.400,00	(1.742.400,00)	94,02	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.145.800,00	27.403.400,00	(1.742.400,00)	94,02	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.174.056.950,00	1.074.451.555,00	(99.605.395,00)	91,51	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.174.056.950,00	1.074.451.555,00	(99.605.395,00)	91,51	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002		FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	774.854.150,00	704.149.144,00	(70.705.006,00)	90,87	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	769.854.150,00	699.209.644,00	(70.644.506,00)	90,82	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	769.854.150,00	699.209.644,00	(70.644.506,00)	90,82	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	4.939.500,00	(60.500,00)	98,79	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.939.500,00	(60.500,00)	98,79	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	393.559.350,00	365.196.511,00	(28.362.839,00)	92,79	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	393.559.350,00	365.196.511,00	(28.362.839,00)	92,79	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.559.350,00	365.196.511,00	(28.362.839,00)	92,79	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006		FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	5.643.450,00	5.105.900,00	(537.550,00)	90,47	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.643.450,00	5.105.900,00	(537.550,00)	90,47	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.643.450,00	5.105.900,00	(537.550,00)	90,47	
				JUMLAH BELANJA	4.284.356.312,00	4.112.944.807,00	(171.411.505,00)	95,99	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.284.356.312,00)	(4.112.944.807,00)	171.411.505,00	95,99	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.284.356.312,00)	(4.112.944.807,00)	171.411.505,00	95,99	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	264.170.000,00	254.452.060,00	(9.717.940,00)	96,32	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01		PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH	12.170.000,00	12.000.840,00	(169.160,00)	98,61	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01.0009		ADVOKASI, SOSIALISASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL DI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI DAN SLTP/MTS, JALUR NONFORMAL DAN INFORMAL	12.170.000,00	12.000.840,00	(169.160,00)	98,61	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.170.000,00	12.000.840,00	(169.160,00)	98,61	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.170.000,00	12.000.840,00	(169.160,00)	98,61	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02		PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	252.000.000,00	242.451.220,00	(9.548.780,00)	96,21	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0009		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA	60.000.000,00	50.751.220,00	(9.248.780,00)	84,58	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	50.751.220,00	(9.248.780,00)	84,58	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	50.751.220,00	(9.248.780,00)	84,58	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0012		PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA	60.000.000,00	59.700.000,00	(300.000,00)	99,50	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.700.000,00	(300.000,00)	99,50	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.700.000,00	(300.000,00)	99,50	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0013		PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.662.332.000,00	1.780.699.090,00	(881.632.910,00)	66,88	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	1.084.000.000,00	878.318.640,00	(205.681.360,00)	81,02	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0010		PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	539.000.000,00	509.380.000,00	(29.620.000,00)	94,50	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	539.000.000,00	509.380.000,00	(29.620.000,00)	94,50	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.000.000,00	509.380.000,00	(29.620.000,00)	94,50	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0011		PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	220.000.000,00	165.062.500,00	(54.937.500,00)	75,02	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	220.000.000,00	165.062.500,00	(54.937.500,00)	75,02	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	165.062.500,00	(54.937.500,00)	75,02	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0012		PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	125.000.000,00	95.633.140,00	(29.366.860,00)	76,50	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	95.633.140,00	(29.366.860,00)	76,50	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	95.633.140,00	(29.366.860,00)	76,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0014		ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	200.000.000,00	108.243.000,00	(91.757.000,00)	54,12	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	108.243.000,00	(91.757.000,00)	54,12	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	108.243.000,00	(91.757.000,00)	54,12	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	416.000.000,00	288.500.000,00	(127.500.000,00)	69,35	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0004		PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	416.000.000,00	288.500.000,00	(127.500.000,00)	69,35	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	416.000.000,00	288.500.000,00	(127.500.000,00)	69,35	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.000.000,00	288.500.000,00	(127.500.000,00)	69,35	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	943.932.000,00	425.890.450,00	(518.041.550,00)	45,11	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001		PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	21.600.000,00	16.098.450,00	(5.501.550,00)	74,52	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	16.098.450,00	(5.501.550,00)	74,52	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	16.098.450,00	(5.501.550,00)	74,52	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003		PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	898.032.000,00	393.152.000,00	(504.880.000,00)	43,77	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	898.032.000,00	393.152.000,00	(504.880.000,00)	43,77	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	898.032.000,00	393.152.000,00	(504.880.000,00)	43,77	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008		PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	24.300.000,00	16.640.000,00	(7.660.000,00)	68,47	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	24.300.000,00	16.640.000,00	(7.660.000,00)	68,47	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	16.640.000,00	(7.660.000,00)	68,47	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	218.400.000,00	187.990.000,00	(30.410.000,00)	86,07	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006		PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	218.400.000,00	187.990.000,00	(30.410.000,00)	86,07	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	218.400.000,00	187.990.000,00	(30.410.000,00)	86,07	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.400.000,00	187.990.000,00	(30.410.000,00)	86,07	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.192.600.000,00	1.087.080.002,00	(105.519.998,00)	91,15	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	235.600.000,00	130.980.002,00	(104.619.998,00)	55,59	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0016		PENGELOLAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)	105.600.000,00	990.000,00	(104.610.000,00)	0,93	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	105.600.000,00	990.000,00	(104.610.000,00)	0,93	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.600.000,00	990.000,00	(104.610.000,00)	0,93	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018		PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL,	130.000.000,00	129.990.002,00	(9.998,00)	99,99	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.990.002,00	(9.998,00)	99,99	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.990.002,00	(9.998,00)	99,99	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02		PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	957.000.000,00	956.100.000,00	(900.000,00)	99,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0005		PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0006		PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENCANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	522.000.000,00	521.100.000,00	(900.000,00)	99,82	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	522.000.000,00	521.100.000,00	(900.000,00)	99,82	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.000.000,00	521.100.000,00	(900.000,00)	99,82	
				JUMLAH BELANJA	4.119.102.000,00	3.122.231.152,00	(996.870.848,00)	75,79	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.119.102.000,00)	(3.122.231.152,00)	996.870.848,00	75,79	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.119.102.000,00)	(3.122.231.152,00)	996.870.848,00	75,79	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	110.000.000,00	103.225.000,00	(6.775.000,00)	93,84	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.000.000,00	103.225.000,00	(6.775.000,00)	93,84	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	110.000.000,00	103.225.000,00	(6.775.000,00)	93,84	
				JUMLAH PENDAPATAN	110.000.000,00	103.225.000,00	(6.775.000,00)	93,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	23.162.429.698,00	14.085.949.737,00	(9.076.479.961,00)	60,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.956.352.700,00	5.495.367.868,00	(460.984.832,00)	92,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.202.257.880,00	3.139.696.680,00	(62.561.200,00)	98,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.202.257.880,00	3.139.696.680,00	(62.561.200,00)	98,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.202.257.880,00	3.139.696.680,00	(62.561.200,00)	98,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.122.507.880,00	3.061.746.680,00	(60.761.200,00)	98,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.750.000,00	77.950.000,00	(1.800.000,00)	97,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	137.363.950,00	131.747.276,00	(5.616.674,00)	95,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.498.000,00	2.496.378,00	(1.622,00)	99,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.498.000,00	2.496.378,00	(1.622,00)	99,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.498.000,00	2.496.378,00	(1.622,00)	99,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.846.000,00	14.733.900,00	(112.100,00)	99,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.846.000,00	14.733.900,00	(112.100,00)	99,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.846.000,00	14.733.900,00	(112.100,00)	99,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.727.000,00	3.663.030,00	(63.970,00)	98,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.727.000,00	3.663.030,00	(63.970,00)	98,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.727.000,00	3.663.030,00	(63.970,00)	98,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	24.998.475,00	(1.525,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.998.475,00	(1.525,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.998.475,00	(1.525,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	89.792.950,00	85.855.493,00	(3.937.457,00)	95,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	89.792.950,00	85.855.493,00	(3.937.457,00)	95,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.792.950,00	85.855.493,00	(3.937.457,00)	95,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	25.000.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)	99,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	25.000.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)	99,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)	99,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)	99,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.243.580.870,00	1.902.251.945,00	(341.328.925,00)	84,78	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	56.027.070,00	51.775.945,00	(4.251.125,00)	92,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.027.070,00	51.775.945,00	(4.251.125,00)	92,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.027.070,00	51.775.945,00	(4.251.125,00)	92,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.183.553.800,00	1.846.476.000,00	(337.077.800,00)	84,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.183.553.800,00	1.846.476.000,00	(337.077.800,00)	84,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.183.553.800,00	1.846.476.000,00	(337.077.800,00)	84,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	348.150.000,00	296.821.967,00	(51.328.033,00)	85,25	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	20.000.000,00	18.012.900,00	(1.987.100,00)	90,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.012.900,00	(1.987.100,00)	90,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.012.900,00	(1.987.100,00)	90,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	220.490.000,00	171.449.067,00	(49.040.933,00)	77,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	220.490.000,00	171.449.067,00	(49.040.933,00)	77,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.490.000,00	171.449.067,00	(49.040.933,00)	77,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	100.000.000,00	99.700.000,00	(300.000,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.700.000,00	(300.000,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.700.000,00	(300.000,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.205.076.998,00	8.590.581.869,00	(8.615.495.129,00)	49,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	16.977.207.448,00	8.367.359.119,00	(8.609.848.329,00)	49,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	45.306.078,00	44.029.762,00	(1.276.316,00)	97,18	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	568.750,00	562.430,00	(6.320,00)	98,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.750,00	562.430,00	(6.320,00)	98,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	44.737.328,00	43.467.332,00	(1.269.996,00)	97,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.737.328,00	43.467.332,00	(1.269.996,00)	97,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	16.931.901.370,00	8.323.329.357,00	(8.608.572.013,00)	49,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.911.901.370,00	8.303.490.549,00	(8.608.410.821,00)	49,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.911.901.370,00	8.303.490.549,00	(8.608.410.821,00)	49,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.838.808,00	(161.192,00)	99,19	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.838.808,00	(161.192,00)	99,19	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05		PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	148.289.250,00	145.280.450,00	(3.008.800,00)	97,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007		PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	148.289.250,00	145.280.450,00	(3.008.800,00)	97,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	68.365.250,00	67.358.450,00	(1.010.800,00)	98,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.369.250,00	67.358.450,00	(1.010.800,00)	98,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.2	BELANJA MODAL	79.920.000,00	77.922.000,00	(1.998.000,00)	97,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.869.000,00	19.647.000,00	(222.000,00)	98,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.051.000,00	58.275.000,00	(1.776.000,00)	97,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08		AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	80.580.300,00	77.942.300,00	(2.638.000,00)	96,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0004		PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN/KOTA	80.580.300,00	77.942.300,00	(2.638.000,00)	96,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	80.580.300,00	77.942.300,00	(2.638.000,00)	96,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.580.300,00	77.942.300,00	(2.638.000,00)	96,72	
				JUMLAH BELANJA	23.162.429.698,00	14.085.945.737,00	(9.076.479.961,00)	60,81	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(23.052.429.698,00)	(13.982.724.737,00)	9.069.704.961,00	60,65	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(23.052.429.698,00)	(13.982.724.737,00)	9.069.704.961,00	60,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	34.300.000,00	33.950.000,00	(350.000,00)	98,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	34.300.000,00	33.950.000,00	(350.000,00)	98,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.300.000,00	33.950.000,00	(350.000,00)	98,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.237.409.080,00	1.213.302.600,00	(24.106.480,00)	98,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	912.749.080,00	900.000.000,00	(12.749.080,00)	98,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	912.749.080,00	900.000.000,00	(12.749.080,00)	98,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	912.749.080,00	900.000.000,00	(12.749.080,00)	98,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	314.720.000,00	303.362.600,00	(11.357.400,00)	96,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	314.720.000,00	303.362.600,00	(11.357.400,00)	96,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.720.000,00	303.362.600,00	(11.357.400,00)	96,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	209.730.660,00	181.665.600,00	(28.065.060,00)	86,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	16.995.000,00	10.935.000,00	(6.060.000,00)	64,34	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.995.000,00	10.935.000,00	(6.060.000,00)	64,34	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.995.000,00	10.935.000,00	(6.060.000,00)	64,34	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	39.212.500,00	19.430.600,00	(19.781.900,00)	49,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.212.500,00	19.430.600,00	(19.781.900,00)	49,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.212.500,00	19.430.600,00	(19.781.900,00)	49,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19.500.000,00	19.350.000,00	(150.000,00)	99,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	19.350.000,00	(150.000,00)	99,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.350.000,00	(150.000,00)	99,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0007		PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	63.823.160,00	61.750.000,00	(2.073.160,00)	96,75	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	63.823.160,00	61.750.000,00	(2.073.160,00)	96,75	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.823.160,00	61.750.000,00	(2.073.160,00)	96,75	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.046.471.004,90	1.039.419.152,00	(7.051.852,90)	99,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.046.471.004,90	1.039.419.152,00	(7.051.852,90)	99,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014		RELASI MEDIA	742.300.500,00	738.643.752,00	(3.656.748,00)	99,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	742.300.500,00	738.643.752,00	(3.656.748,00)	99,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	742.300.500,00	738.643.752,00	(3.656.748,00)	99,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	13.643.504,90	13.060.800,00	(582.704,90)	95,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	13.643.504,90	13.060.800,00	(582.704,90)	95,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.643.504,90	13.060.800,00	(582.704,90)	95,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021		PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	289.027.000,00	286.252.600,00	(2.774.400,00)	99,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	289.027.000,00	286.252.600,00	(2.774.400,00)	99,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	kEALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.027.000,00	286.252.600,00	(2.774.400,00)	99,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0024		PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI PUBLIK	1.500.000,00	1.462.000,00	(38.000,00)	97,46	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.462.000,00	(38.000,00)	97,46	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.462.000,00	(38.000,00)	97,46	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	220.989.287,00	217.215.500,00	(3.773.787,00)	98,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	220.989.287,00	217.215.500,00	(3.773.787,00)	98,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0015		FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA	18.035.250,00	14.709.100,00	(3.326.150,00)	81,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	18.035.250,00	14.709.100,00	(3.326.150,00)	81,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.035.250,00	14.709.100,00	(3.326.150,00)	81,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0025		KOORDINASI PEMANFAATAN PORTAL PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERINTEGRASI	202.954.037,00	202.506.400,00	(447.637,00)	99,77	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	202.954.037,00	202.506.400,00	(447.637,00)	99,77	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.954.037,00	202.506.400,00	(447.637,00)	99,77	
				JUMLAH BELANJA	4.924.023.342,40	4.802.549.932,00	(121.473.410,40)	97,53	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.909.023.342,40)	(4.789.549.932,00)	119.473.410,40	97,56	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.909.023.342,40)	(4.789.549.932,00)	119.473.410,40	97,56	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35	
				JUMLAH PENDAPATAN	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.648.448.239,00	3.365.596.278,00	(282.851.961,00)	92,24	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.416.014.239,00	3.297.277.952,00	(118.736.287,00)	96,52	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.837.850,00	5.005.000,00	(2.832.850,00)	63,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.837.850,00	5.005.000,00	(2.832.850,00)	63,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.837.850,00	5.005.000,00	(2.832.850,00)	63,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.837.850,00	5.005.000,00	(2.832.850,00)	63,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.311.252.329,00	2.258.635.255,00	(52.617.074,00)	97,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.311.252.329,00	2.258.635.255,00	(52.617.074,00)	97,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.311.252.329,00	2.258.635.255,00	(52.617.074,00)	97,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.246.352.329,00	2.196.435.255,00	(49.917.074,00)	97,77	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.900.000,00	62.200.000,00	(2.700.000,00)	95,83	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	120.226.000,00	111.525.700,00	(8.700.300,00)	92,76	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.500.000,00	2.486.000,00	(14.000,00)	99,44	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.486.000,00	(14.000,00)	99,44	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.486.000,00	(14.000,00)	99,44	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	16.249.000,00	16.166.000,00	(83.000,00)	99,48	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.249.000,00	16.166.000,00	(83.000,00)	99,48	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.249.000,00	16.166.000,00	(83.000,00)	99,48	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	18.149.000,00	17.077.000,00	(1.072.000,00)	94,09	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.149.000,00	17.077.000,00	(1.072.000,00)	94,09	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.149.000,00	17.077.000,00	(1.072.000,00)	94,09	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	13.965.000,00	8.237.000,00	(5.728.000,00)	58,98	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.965.000,00	8.237.000,00	(5.728.000,00)	58,98	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.965.000,00	8.237.000,00	(5.728.000,00)	58,98	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.499.900,00	11.800.000,00	(1.699.900,00)	87,40	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.499.900,00	11.800.000,00	(1.699.900,00)	87,40	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.499.900,00	11.800.000,00	(1.699.900,00)	87,40	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	55.863.100,00	55.759.700,00	(103.400,00)	99,81	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.863.100,00	55.759.700,00	(103.400,00)	99,81	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.863.100,00	55.759.700,00	(103.400,00)	99,81	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	70.720.000,00	65.870.840,00	(4.849.160,00)	93,14	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	55.720.000,00	50.870.840,00	(4.849.160,00)	91,29	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.820.000,00	19.900.000,00	(2.920.000,00)	87,20	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.820.000,00	19.900.000,00	(2.920.000,00)	87,20	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	32.900.000,00	30.970.840,00	(1.929.160,00)	94,13	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.900.000,00	30.970.840,00	(1.929.160,00)	94,13	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	817.158.060,00	781.399.357,00	(35.758.703,00)	95,62	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	321.920.060,00	307.984.607,00	(13.935.453,00)	95,67	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	321.920.060,00	307.984.607,00	(13.935.453,00)	95,67	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.920.060,00	307.984.607,00	(13.935.453,00)	95,67	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	490.238.000,00	468.414.750,00	(21.823.250,00)	95,54	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	490.238.000,00	468.414.750,00	(21.823.250,00)	95,54	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.238.000,00	468.414.750,00	(21.823.250,00)	95,54	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	88.820.000,00	74.841.800,00	(13.978.200,00)	84,26	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	15.000.000,00	14.996.000,00	(4.000,00)	99,97	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.996.000,00	(4.000,00)	99,97	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.996.000,00	(4.000,00)	99,97	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	53.000.000,00	50.710.800,00	(2.289.200,00)	95,68	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.000.000,00	50.710.800,00	(2.289.200,00)	95,68	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	50.710.800,00	(2.289.200,00)	95,68	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.990.000,00	9.135.000,00	(855.000,00)	91,44	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.990.000,00	9.135.000,00	(855.000,00)	91,44	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.135.000,00	(855.000,00)	91,44	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.830.000,00	0,00	(10.830.000,00)	0,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.830.000,00	0,00	(10.830.000,00)	0,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.830.000,00	0,00	(10.830.000,00)	0,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	57.044.150,00	54.501.438,00	(2.542.712,00)	95,54	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.02.2.01		PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.044.150,00	54.501.438,00	(2.542.712,00)	95,54	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.02.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.044.150,00	54.501.438,00	(2.542.712,00)	95,54	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.044.150,00	54.501.438,00	(2.542.712,00)	95,54	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.044.150,00	54.501.438,00	(2.542.712,00)	95,54	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	5.439.700,00	5.179.500,00	(260.200,00)	95,21	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01		PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.439.700,00	5.179.500,00	(260.200,00)	95,21	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0001		PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	5.439.700,00	5.179.500,00	(260.200,00)	95,21	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.439.700,00	5.179.500,00	(260.200,00)	95,21	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.439.700,00	5.179.500,00	(260.200,00)	95,21	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	157.984.750,00	0,00	(157.984.750,00)	0,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.984.750,00	0,00	(157.984.750,00)	0,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01.0001		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	157.984.750,00	0,00	(157.984.750,00)	0,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	157.984.750,00	0,00	(157.984.750,00)	0,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.984.750,00	0,00	(157.984.750,00)	0,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	11.965.400,00	8.637.388,00	(3.328.012,00)	72,18	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	11.965.400,00	8.637.388,00	(3.328.012,00)	72,18	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0004		PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	11.965.400,00	8.637.388,00	(3.328.012,00)	72,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0004		PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	11.965.400,00	8.637.388,00	(3.328.012,00)	72,18	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.965.400,00	8.637.388,00	(3.328.012,00)	72,18	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.965.400,00	8.637.388,00	(3.328.012,00)	72,18	
				JUMLAH BELANJA	3.648.448.239,00	3.365.596.278,00	(282.851.961,00)	92,24	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.561.248.239,00)	(3.264.136.278,00)	297.111.961,00	91,65	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.561.248.239,00)	(3.264.136.278,00)	297.111.961,00	91,65	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.836.141.038,00	2.783.126.819,00	(53.014.219,00)	98,13	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.760.473.688,00	2.707.733.422,00	(52.740.266,00)	98,08	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.013.223.258,00	1.965.518.463,00	(47.704.795,00)	97,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.013.223.258,00	1.965.518.463,00	(47.704.795,00)	97,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.013.223.258,00	1.965.518.463,00	(47.704.795,00)	97,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.958.223.258,00	1.917.218.463,00	(41.004.795,00)	97,90	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	48.300.000,00	(6.700.000,00)	87,81	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	227.922.600,00	227.786.650,00	(135.950,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.087.300,00	4.085.100,00	(1.900,00)	99,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.087.000,00	4.085.100,00	(1.900,00)	99,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.087.000,00	4.085.100,00	(1.900,00)	99,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.789.000,00	25.674.000,00	(115.000,00)	99,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.789.000,00	25.674.000,00	(115.000,00)	99,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.789.000,00	25.674.000,00	(115.000,00)	99,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	11.819.950,00	11.818.500,00	(1.450,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.819.950,00	11.818.500,00	(1.450,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.819.950,00	11.818.500,00	(1.450,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	38.797.000,00	38.796.000,00	(1.000,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	38.797.000,00	38.796.000,00	(1.000,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.797.000,00	38.796.000,00	(1.000,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.560.500,00	15.552.050,00	(8.450,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.560.500,00	15.552.050,00	(8.450,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.560.500,00	15.552.050,00	(8.450,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	131.869.150,00	131.861.000,00	(8.150,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	131.869.150,00	131.861.000,00	(8.150,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.869.150,00	131.861.000,00	(8.150,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	429.077.830,00	426.251.340,00	(2.826.490,00)	99,34	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	90.069.030,00	89.556.241,00	(512.789,00)	99,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	90.069.030,00	89.556.241,00	(512.789,00)	99,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.069.030,00	89.556.241,00	(512.789,00)	99,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.660.000,00	15.660.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.660.000,00	15.660.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	15.660.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	319.048.800,00	316.735.099,00	(2.313.701,00)	99,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	319.048.800,00	316.735.099,00	(2.313.701,00)	99,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.048.800,00	316.735.099,00	(2.313.701,00)	99,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	77.250.000,00	75.176.969,00	(2.073.031,00)	97,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	17.500.000,00	16.994.400,00	(505.600,00)	97,11	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	16.994.400,00	(505.600,00)	97,11	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	16.994.400,00	(505.600,00)	97,11	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	59.750.000,00	58.182.569,00	(1.567.431,00)	97,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	59.750.000,00	58.182.569,00	(1.567.431,00)	97,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.750.000,00	58.182.569,00	(1.567.431,00)	97,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	3.393.000,00	3.367.700,00	(25.300,00)	99,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.393.000,00	3.367.700,00	(25.300,00)	99,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002		PELAKSANAAN KEGIATAN FROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.393.000,00	3.367.700,00	(25.300,00)	99,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.393.000,00	3.367.700,00	(25.300,00)	99,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.393.000,00	3.367.700,00	(25.300,00)	99,25	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	51.337.450,00	51.131.947,00	(205.503,00)	99,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.337.450,00	51.131.947,00	(205.503,00)	99,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH	12.499.150,00	12.462.600,00	(36.550,00)	99,70	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.499.150,00	12.462.600,00	(36.550,00)	99,70	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.499.150,00	12.462.600,00	(36.550,00)	99,70	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	26.273.850,00	26.245.277,00	(28.573,00)	99,89	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	26.273.850,00	26.245.277,00	(28.573,00)	99,89	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.273.850,00	26.245.277,00	(28.573,00)	99,89	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	4.685.050,00	4.570.017,00	(115.033,00)	97,54	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.685.050,00	4.570.017,00	(115.033,00)	97,54	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.685.050,00	4.570.017,00	(115.033,00)	97,54	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008		PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	7.879.400,00	7.854.053,00	(25.347,00)	99,67	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.879.400,00	7.854.053,00	(25.347,00)	99,67	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.879.400,00	7.854.053,00	(25.347,00)	99,67	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	20.936.900,00	20.893.750,00	(43.150,00)	99,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.936.900,00	20.893.750,00	(43.150,00)	99,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004		PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	1.846.250,00	1.824.800,00	(21.450,00)	98,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.846.250,00	1.824.800,00	(21.450,00)	98,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.846.250,00	1.824.800,00	(21.450,00)	98,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006		PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	19.090.650,00	19.068.950,00	(21.700,00)	99,88	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.090.650,00	19.068.950,00	(21.700,00)	99,88	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.090.650,00	19.068.950,00	(21.700,00)	99,88	
				JUMLAH BELANJA	2.836.141.038,00	2.783.126.819,00	(53.014.219,00)	98,13	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.836.141.038,00)	(2.783.126.819,00)	53.014.219,00	98,13	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.836.141.038,00)	(2.783.126.819,00)	53.014.219,00	98,13	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18	
				JUMLAH PENDAPATAN	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000		5	BELANJA DAERAH					
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.496.920.382,00	1.833.299.990,00	(663.620.392,00)	73,42	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	488.594.950,00	364.552.314,00	(124.042.636,00)	74,61	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0012		PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN BAGI YANG BERPRESTASI DAN/ATAU BERJASA DALAM MEMAJUKAN	488.594.950,00	364.552.314,00	(124.042.636,00)	74,61	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	416.469.100,00	303.142.264,00	(113.326.836,00)	72,78	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.469.100,00	303.142.264,00	(113.326.836,00)	72,78	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0015		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA BAGI PEMUDA	416.469.100,00	303.142.264,00	(113.326.836,00)	72,78	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	72.125.850,00	61.410.050,00	(10.715.800,00)	85,14	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.125.850,00	61.410.050,00	(10.715.800,00)	85,14	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	72.125.850,00	61.410.050,00	(10.715.800,00)	85,14	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.858.325.432,00	1.323.468.676,00	(534.856.756,00)	71,21	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	764.903.632,00	504.382.196,00	(260.521.436,00)	65,94	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	764.903.632,00	504.382.196,00	(260.521.436,00)	65,94	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.903.632,00	449.548.196,00	(260.355.436,00)	63,32	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	709.903.632,00	449.548.196,00	(260.355.436,00)	63,32	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.000.000,00	54.834.000,00	(166.000,00)	99,69	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.000.000,00	54.834.000,00	(166.000,00)	99,69	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02.0004		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	564.061.100,00	460.113.500,00	(103.947.600,00)	81,57	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	63.575.000,00	37.810.800,00	(25.764.200,00)	59,47	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.575.000,00	37.810.800,00	(25.764.200,00)	59,47	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02.0006		KEIKUTSERTAAN ANGGOTA KONTINGEN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA	63.575.000,00	37.810.800,00	(25.764.200,00)	59,47	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	500.486.100,00	422.302.700,00	(78.183.400,00)	84,37	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.486.100,00	422.302.700,00	(78.183.400,00)	84,37	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1.05	Belanja Hibah	300.486.100,00	222.664.800,00	(77.821.300,00)	74,10	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.05		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	200.000.000,00	199.637.900,00	(362.100,00)	99,81	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.05.0006		PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI	529.360.700,00	358.972.980,00	(170.387.720,00)	67,81	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.05.0006	5.1	BELANJA OPERASI	529.360.700,00	358.972.980,00	(170.387.720,00)	67,81	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.360.700,00	358.972.980,00	(170.387.720,00)	67,81	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.05.0006	5.1.05	Belanja Hibah	429.360.700,00	308.972.980,00	(120.387.720,00)	71,96	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	50,00	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	150.000.000,00	145.279.000,00	(4.721.000,00)	96,85	
					150.000.000,00	145.279.000,00	(4.721.000,00)	96,85	

2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04.2.01.0003		PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	150.000.000,00	145.279.000,00	(4.721.000,00)	96,85	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	145.279.000,00	(4.721.000,00)	96,85	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	145.279.000,00	(4.721.000,00)	96,85	
				JUMLAH BELANJA	2.496.920.382,00	1.833.299.990,00	(663.620.392,00)	73,42	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.491.420.382,00)	(1.828.449.990,00)	662.970.392,00	73,38	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.491.420.382,00)	(1.828.449.990,00)	662.970.392,00	73,38	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,66	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,66	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,66	
				JUMLAH PENDAPATAN	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,66	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.751.051,00	5.441.200,00	(309.851,00)	94,61	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5.751.051,00	5.441.200,00	(309.851,00)	94,61	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.751.051,00	5.441.200,00	(309.851,00)	94,61	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0007		PENGINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	3.861.051,00	3.551.200,00	(309.851,00)	91,97	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.861.051,00	3.551.200,00	(309.851,00)	91,97	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.861.051,00	3.551.200,00	(309.851,00)	91,97	
				JUMLAH BELANJA	5.751.051,00	5.441.200,00	(309.851,00)	94,61	
				SURPLUS / (DEFISIT)	9.248.949,00	7.558.800,00	(1.690.149,00)	81,72	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	9.248.949,00	7.558.800,00	(1.690.149,00)	81,72	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,66	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,66	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,66	
				JUMLAH PENDAPATAN	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,66	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.922.499,00	7.358.050,00	(564.449,00)	92,87	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	7.922.499,00	7.358.050,00	(564.449,00)	92,87	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.922.499,00	7.358.050,00	(564.449,00)	92,87	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004		PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.922.499,00	7.358.050,00	(564.449,00)	92,87	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.922.499,00	7.358.050,00	(564.449,00)	92,87	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.922.499,00	7.358.050,00	(564.449,00)	92,87	
				JUMLAH BELANJA	7.922.499,00	7.358.050,00	(564.449,00)	92,87	
				SURPLUS / (DEFISIT)	7.077.501,00	5.641.950,00	(1.435.551,00)	79,71	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.077.501,00	5.641.950,00	(1.435.551,00)	79,71	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18	
				JUMLAH PENDAPATAN	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.261.632.633,00	6.502.464.338,00	(759.168.295,00)	89,54	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.957.529.445,00	2.874.231.081,00	(83.298.364,00)	97,18	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.033.372.795,00	1.968.225.731,00	(65.147.064,00)	96,79	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.033.372.795,00	1.968.225.731,00	(65.147.064,00)	96,79	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.033.372.795,00	1.968.225.731,00	(65.147.064,00)	96,79	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.952.572.795,00	1.898.525.731,00	(54.047.064,00)	97,23	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.800.000,00	69.700.000,00	(11.100.000,00)	86,26	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	104.124.850,00	103.724.670,00	(400.180,00)	99,61	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.500.000,00	2.401.000,00	(99.000,00)	96,04	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.401.000,00	(99.000,00)	96,04	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.401.000,00	(99.000,00)	96,04	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.500.000,00	17.335.500,00	(164.500,00)	99,06	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.335.500,00	(164.500,00)	99,06	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.335.500,00	(164.500,00)	99,06	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.760.000,00	5.724.000,00	(36.000,00)	99,37	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.760.000,00	5.724.000,00	(36.000,00)	99,37	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	5.724.000,00	(36.000,00)	99,37	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	8.550.000,00	8.539.000,00	(11.000,00)	99,87	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.550.000,00	8.539.000,00	(11.000,00)	99,87	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	8.539.000,00	(11.000,00)	99,87	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.778.500,00	9.778.300,00	(200,00)	99,99	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.778.500,00	9.778.300,00	(200,00)	99,99	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.778.500,00	9.778.300,00	(200,00)	99,99	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	60.036.350,00	59.946.870,00	(89.480,00)	99,85	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	60.036.350,00	59.946.870,00	(89.480,00)	99,85	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.036.350,00	59.946.870,00	(89.480,00)	99,85	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	620.809.390,00	605.277.590,00	(15.531.800,00)	97,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	3.996.000,00	(4.000,00)	99,90	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.996.000,00	(4.000,00)	99,90	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.996.000,00	(4.000,00)	99,90	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	137.402.290,00	127.756.140,00	(9.646.150,00)	92,97	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	137.402.290,00	127.756.140,00	(9.646.150,00)	92,97	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.402.290,00	127.756.140,00	(9.646.150,00)	92,97	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.550.000,00	7.545.000,00	(5.000,00)	99,93	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.550.000,00	7.545.000,00	(5.000,00)	99,93	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	7.545.000,00	(5.000,00)	99,93	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	471.857.100,00	465.980.450,00	(5.876.650,00)	98,75	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	471.857.100,00	465.980.450,00	(5.876.650,00)	98,75	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.857.100,00	465.980.450,00	(5.876.650,00)	98,75	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	199.222.410,00	197.003.090,00	(2.219.320,00)	98,88	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	17.500.000,00	17.025.200,00	(474.800,00)	97,28	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.025.200,00	(474.800,00)	97,28	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.025.200,00	(474.800,00)	97,28	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	38.000.000,00	36.883.750,00	(1.116.250,00)	97,06	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	36.883.750,00	(1.116.250,00)	97,06	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	36.883.750,00	(1.116.250,00)	97,06	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	143.722.410,00	143.094.140,00	(628.270,00)	99,56	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	142.822.410,00	142.194.140,00	(628.270,00)	99,56	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.822.410,00	142.194.140,00	(628.270,00)	99,56	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.982.037.432,00	1.391.204.299,00	(590.833.133,00)	70,19	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03		PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.982.037.432,00	1.391.204.299,00	(590.833.133,00)	70,19	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN LEMBAGA ADAT	236.232.050,00	217.525.960,00	(18.706.090,00)	92,08	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	236.232.050,00	217.525.960,00	(18.706.090,00)	92,08	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.232.050,00	217.525.960,00	(18.706.090,00)	92,08	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0003		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN LEMBAGA ADAT	1.745.805.382,00	1.173.678.339,00	(572.127.043,00)	67,22	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.715.805.382,00	1.143.678.340,00	(572.127.042,00)	66,65	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.161.805.382,00	1.143.678.340,00	(18.127.042,00)	98,43	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0003	5.1.05	Belanja Lubah	554.000.000,00	0,00	(554.000.000,00)	0,00	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	29.999.999,00	(1,00)	99,99	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.999.999,00	(1,00)	99,99	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.228.354.006,00	2.169.238.058,00	(59.115.948,00)	97,34	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01		PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.228.354.006,00	2.169.238.058,00	(59.115.948,00)	97,34	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL	2.228.354.006,00	2.169.238.058,00	(59.115.948,00)	97,34	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.228.354.006,00	2.169.238.058,00	(59.115.948,00)	97,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.228.354.006,00	2.169.238.058,00	(59.115.948,00)	97,34	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	93.711.750,00	67.790.900,00	(25.920.850,00)	72,33	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05.2.01		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	93.711.750,00	67.790.900,00	(25.920.850,00)	72,33	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05.2.01.0002		PENETAPAN CAGAR BUDAYA	93.711.750,00	67.790.900,00	(25.920.850,00)	72,33	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	93.711.750,00	67.790.900,00	(25.920.850,00)	72,33	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.711.750,00	67.790.900,00	(25.920.850,00)	72,33	
				JUMLAH BELANJA	7.261.632.633,00	6.502.464.338,00	(759.168.295,00)	89,54	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.256.132.633,00)	(6.497.614.338,00)	758.518.295,00	89,54	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.256.132.633,00)	(6.497.614.338,00)	758.518.295,00	89,54	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.342.067.080,00	3.247 801.580,00	(94.265.500,00)	97,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.207.761.480,00	3.118.146.280,00	(89.615.200,00)	97,20	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.636.798 135,00	2.595.649.732,00	(41.148.403,00)	98,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.636.798.135,00	2.595.649.732,00	(41.148.403,00)	98,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.636.798.135,00	2.595.649.732,00	(41.148.403,00)	98,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.584.548.135,00	2.547.899.732,00	(36.648.403,00)	98,58	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.250.000,00	47.750.000,00	(4.500.000,00)	91,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	69.898.750,00	68.559.480,00	(1.339.270,00)	98,08	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	26.230.500,00	26.209.500,00	(21.000,00)	99,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	26.230.500,00	26.209.500,00	(21.000,00)	99,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.230.500,00	26.209.500,00	(21.000,00)	99,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12.985.000,00	12.615.000,00	(370.000,00)	97,15	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.985.000,00	12.615.000,00	(370.000,00)	97,15	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.985.000,00	12.615.000,00	(370.000,00)	97,15	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.940.000,00	7.590.000,00	(350.000,00)	95,59	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.940.000,00	7.590.000,00	(350.000,00)	95,59	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.940.000,00	7.590.000,00	(350.000,00)	95,59	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	22.743.250,00	22.144.980,00	(598.270,00)	97,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	22.743.250,00	22.144.980,00	(598.270,00)	97,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.743.250,00	22.144.980,00	(598.270,00)	97,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.000.000,00	3.300.000,00	(1.700.000,00)	66,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.000.000,00	3.300.000,00	(1.700.000,00)	66,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	3.300.000,00	(1.700.000,00)	66,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	3.300.000,00	(1.700.000,00)	66,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	367.344.595,00	335.155.056,00	(32.189.539,00)	91,23	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	86.047.345,00	83.496.606,00	(2.550.739,00)	97,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.047.345,00	83.496.606,00	(2.550.739,00)	97,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.047.345,00	83.496.606,00	(2.550.739,00)	97,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	279.797.250,00	250.158.450,00	(29.638.800,00)	89,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	279.797.250,00	250.158.450,00	(29.638.800,00)	89,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.797.250,00	250.158.450,00	(29.638.800,00)	89,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	128.720.000,00	115.482.012,00	(13.237.988,00)	89,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	61.940.000,00	59.786.512,00	(2.153.488,00)	96,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.940.000,00	59.786.512,00	(2.153.488,00)	96,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.940.000,00	59.786.512,00	(2.153.488,00)	96,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	44.010.000,00	33.697.500,00	(10.312.500,00)	76,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.010.000,00	33.697.500,00	(10.312.500,00)	76,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.010.000,00	33.697.500,00	(10.312.500,00)	76,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	11.650.000,00	10.950.000,00	(700.000,00)	93,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.650.000,00	10.950.000,00	(700.000,00)	93,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	10.950.000,00	(700.000,00)	93,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	11.120.000,00	11.048.000,00	(72.000,00)	99,35	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.120.000,00	11.048.000,00	(72.000,00)	99,35	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.120.000,00	11.048.000,00	(72.000,00)	99,35	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	134.305.600,00	129.655.300,00	(4.650.300,00)	96,53	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.729.300,00	92.134.100,00	(4.595.200,00)	95,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	8.122.550,00	6.666.300,00	(1.456.250,00)	82,07	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.122.550,00	6.666.300,00	(1.456.250,00)	82,07	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.122.550,00	6.666.300,00	(1.456.250,00)	82,07	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011		PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.139.550,00	34.607.400,00	(1.532.150,00)	95,76	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	36.139.550,00	34.607.400,00	(1.532.150,00)	95,76	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.139.550,00	34.607.400,00	(1.532.150,00)	95,76	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0012		PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	27.889.700,00	27.310.400,00	(579.300,00)	97,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	27.889.700,00	27.310.400,00	(579.300,00)	97,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.889.700,00	27.310.400,00	(579.300,00)	97,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0016		PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.470.000,00	14.550.000,00	(920.000,00)	94,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	15.470.000,00	14.550.000,00	(920.000,00)	94,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.470.000,00	14.550.000,00	(920.000,00)	94,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN	9.107.500,00	9.000.000,00	(107.500,00)	98,81	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	9.107.500,00	9.000.000,00	(107.500,00)	98,81	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.107.500,00	9.000.000,00	(107.500,00)	98,81	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.576.300,00	37.521.200,00	(55.100,00)	99,85	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007		PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009		PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	34.546.300,00	34.491.200,00	(55.100,00)	99,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	34.546.300,00	34.491.200,00	(55.100,00)	99,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.546.300,00	34.491.200,00	(55.100,00)	99,84	
				JUMLAH BELANJA	3.342.067.080,00	3.247.801.580,00	(94.265.500,00)	97,17	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.342.067.080,00)	(3.247.801.580,00)	94.265.500,00	97,17	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.342.067.080,00)	(3.247.801.580,00)	94.265.500,00	97,17	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	34.531.000,00	33.575.700,00	(955.300,00)	97,23	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	34.531.000,00	33.575.700,00	(955.300,00)	97,23	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.531.000,00	33.575.700,00	(955.300,00)	97,23	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001		PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	22.450.000,00	21.877.400,00	(572.600,00)	97,44	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.450.000,00	21.877.400,00	(572.600,00)	97,44	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.450.000,00	21.877.400,00	(572.600,00)	97,44	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003		PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	12.081.000,00	11.698.300,00	(382.700,00)	96,83	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.081.000,00	11.698.300,00	(382.700,00)	96,83	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.081.000,00	11.698.300,00	(382.700,00)	96,83	
				JUMLAH BELANJA	34.531.000,00	33.575.700,00	(955.300,00)	97,23	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(34.531.000,00)	(33.575.700,00)	955.300,00	97,23	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(34.531.000,00)	(33.575.700,00)	955.300,00	97,23	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : Dinas Pangan dan Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.25.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	75.000.000,00	49.590.000,00	(25.410.000,00)	66,12	
	2.09.3.25.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000,00	49.590.000,00	(25.410.000,00)	66,12	
	2.09.3.25.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	75.000.000,00	49.590.000,00	(25.410.000,00)	66,12	
				JUMLAH PENDAPATAN	75.000.000,00	49.590.000,00	(25.410.000,00)	66,12	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH					
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.349.444.100,00	1.250.403.485,59	(99.040.614,41)	92,66	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	1.328.910.450,00	1.230.155.185,59	(98.755.264,41)	92,56	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002		PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.328.910.450,00	1.230.155.185,59	(98.755.264,41)	92,56	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	782.783.950,00	720.383.439,00	(62.400.511,00)	92,02	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	782.783.950,00	720.383.439,00	(62.400.511,00)	92,02	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	782.783.950,00	720.383.439,00	(62.400.511,00)	92,02	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	546.126.500,00	509.771.746,59	(36.354.753,41)	93,34	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.558.500,00	244.349.260,00	(30.209.240,00)	88,99	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.2	BELANJA MODAL	274.558.500,00	244.349.260,00	(30.209.240,00)	88,99	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	271.568.000,00	265.422.486,59	(6.145.513,41)	97,73	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.400.000,00	36.350.000,00	(1.050.000,00)	97,19	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	180 768.000,00	175.672.486,59	(5.095.513,41)	97,18	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	100,00	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05.2.01		PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	13.017.800,00	12.968.000,00	(49.800,00)	99,61	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0007		PENGAWASAN USAHA PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU USAHA PENGANGKUTAN IKAN SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	13.017.800,00	12.968.000,00	(49.800,00)	99,61	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.017.800,00	12.968.000,00	(49.800,00)	99,61	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.017.800,00	12.968.000,00	(49.800,00)	99,61	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	7.515.850,00	7.280.300,00	(235.550,00)	96,86	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06.2.03		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.515.850,00	7.280.300,00	(235.550,00)	96,86	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001		PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.515.850,00	7.280.300,00	(235.550,00)	96,86	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.515.850,00	7.280.300,00	(235.550,00)	96,86	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.515.850,00	7.280.300,00	(235.550,00)	96,86	
				JUMLAH BELANJA	1.349.444.100,00	1.250.403.485,59	(99.040.614,41)	92,66	
				SURPLUS / (DEFISIT)					
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.274.444.100,00)	(1.200.813.485,59)	73.630.614,41	94,22	
					(1.274.444.100,00)	(1.200.813.485,59)	73.630.614,41	94,22	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18	
				JUMLAH PENDAPATAN	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000		5	BELANJA DAERAH					
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	26.148.350,00	26.096.430,00	(51.920,00)	99,80	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05.2.01		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	26.148.350,00	26.096.430,00	(51.920,00)	99,80	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05.2.01.0006		FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	26.148.350,00	26.096.430,00	(51.920,00)	99,80	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	26.148.350,00	26.096.430,00	(51.920,00)	99,80	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.148.350,00	26.096.430,00	(51.920,00)	99,80	
				JUMLAH BELANJA	26.148.350,00	26.096.430,00	(51.920,00)	99,80	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(20.648.350,00)	(21.246.430,00)	(598.080,00)	102,89	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(20.648.350,00)	(21.246.430,00)	(598.080,00)	102,89	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Pertanian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	227.000.000,00	241.696.000,00	14.696.000,00	106,47	
	3.27.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	227.000.000,00	241.696.000,00	14.696.000,00	106,47	
	3.27.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	227.000.000,00	241.696.000,00	14.696.000,00	106,47	
				JUMLAH PENDAPATAN	227.000.000,00	241.696.000,00	14.696.000,00	106,47	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH					
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.155.034.064,00	15.052.299.542,00	(1.102.734.522,00)	93,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.708.124.864,00	12.515.854.513,00	(192.270.351,00)	98,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.863.537.569,00	10.755.921.698,00	(107.615.871,00)	99,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.863.537.569,00	10.755.921.698,00	(107.615.871,00)	99,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.863.537.569,00	10.755.921.698,00	(107.615.871,00)	99,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.769.337.569,00	10.665.821.698,00	(103.515.871,00)	99,03	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	94.200.000,00	90.100.000,00	(4.100.000,00)	95,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	247.108.250,00	246.870.061,00	(238.189,00)	99,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.636.000,00	3.636.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.636.000,00	3.636.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.636.000,00	3.636.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.266.500,00	24.179.430,00	(87.070,00)	99,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.266.500,00	24.179.430,00	(87.070,00)	99,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	24.266.500,00	24.179.430,00	(87.070,00)	99,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.741.000,00	6.740.500,00	(500,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.741.000,00	6.740.500,00	(500,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	6.741.000,00	6.740.500,00	(500,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.209.000,00	12.203.000,00	(6.000,00)	99,95	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.209.000,00	12.203.000,00	(6.000,00)	99,95	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.209.000,00	12.203.000,00	(6.000,00)	99,95	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.310.000,00	9.301.000,00	(9.000,00)	99,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.310.000,00	9.301.000,00	(9.000,00)	99,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	9.310.000,00	9.301.000,00	(9.000,00)	99,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	190.945.750,00	190.810.131,00	(135.619,00)	99,92	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.945.750,00	190.810.131,00	(135.619,00)	99,92	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	190.945.750,00	190.810.131,00	(135.619,00)	99,92	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.271.999.045,00	1.238.551.854,00	(33.447.191,00)	97,37	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.848.845,00	113.529.554,00	(319.291,00)	99,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.848.845,00	113.529.554,00	(319.291,00)	99,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	113.848.845,00	113.529.554,00	(319.291,00)	99,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.155.150.200,00	1.122.022.300,00	(33.127.900,00)	97,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.155.150.200,00	1.122.022.300,00	(33.127.900,00)	97,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.155.150.200,00	1.122.022.300,00	(33.127.900,00)	97,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	325.480.000,00	274.510.900,00	(50.969.100,00)	84,34	
					16.500.000,00	11.480.000,00	(5.020.000,00)	69,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	11.480.000,00	(5.020.000,00)	69,57	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	11.480.000,00	(5.020.000,00)	69,57	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	291.600.000,00	245.650.900,00	(45.949.100,00)	84,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	291.600.000,00	245.650.900,00	(45.949.100,00)	84,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.600.000,00	245.650.900,00	(45.949.100,00)	84,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	17.380.000,00	17.380.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.380.000,00	17.380.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.380.000,00	17.380.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.752.217.350,00	1.460.156.493,00	(292.060.857,00)	83,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	117.483.100,00	107.122.935,00	(10.360.165,00)	91,18	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	117.483.100,00	107.122.935,00	(10.360.165,00)	91,18	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	117.483.100,00	107.122.935,00	(10.360.165,00)	91,18	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.483.100,00	107.122.935,00	(10.360.165,00)	91,18	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02		PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	415.195.000,00	192.651.789,00	(222.543.211,00)	46,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002		PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	361.399.000,00	139.011.019,00	(222.387.981,00)	38,46	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	361.399.000,00	139.011.019,00	(222.387.981,00)	38,46	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.399.000,00	139.011.019,00	(222.387.981,00)	38,46	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003		PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN	53.796.000,00	53.640.770,00	(155.230,00)	99,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	53.796.000,00	53.640.770,00	(155.230,00)	99,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.796.000,00	53.640.770,00	(155.230,00)	99,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	1.219.539.250,00	1.160.381.769,00	(59.157.481,00)	95,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	1.219.539.250,00	1.160.381.769,00	(59.157.481,00)	95,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.219.539.250,00	1.160.381.769,00	(59.157.481,00)	95,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	914.539.250,00	875.381.769,00	(39.157.481,00)	95,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.05	Belanja Hibah	305.000.000,00	285.000.000,00	(20.000.000,00)	93,44	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.279.533.650,00	665.062.649,00	(614.471.001,00)	51,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	517.411.350,00	60.066.009,00	(457.345.341,00)	11,60	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA	456.641.400,00	1.010.000,00	(455.631.400,00)	0,22	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	456.641.400,00	1.010.000,00	(455.631.400,00)	0,22	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.641.400,00	1.010.000,00	(455.631.400,00)	0,22	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015		PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B DI KABUPATEN/KOTA	60.769.950,00	59.056.009,00	(1.713.941,00)	97,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	60.769.950,00	59.056.009,00	(1.713.941,00)	97,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.769.950,00	59.056.009,00	(1.713.941,00)	97,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	762.122.300,00	604.996.640,00	(157.125.660,00)	79,38	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	101.243.500,00	3.696.000,00	(97.547.500,00)	3,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	101.243.500,00	3.696.000,00	(97.547.500,00)	3,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.243.500,00	3.696.000,00	(97.547.500,00)	3,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	209.098.400,00	200.171.890,00	(8.926.510,00)	95,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	209.098.400,00	200.171.890,00	(8.926.510,00)	95,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.098.400,00	200.171.890,00	(8.926.510,00)	95,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0011		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA UPTD PEMBIBITAN/PRODUKSI TERNAK	427.014.950,00	376.421.000,00	(50.593.950,00)	88,15	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	147.014.950,00	106.821.000,00	(40.193.950,00)	72,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.014.950,00	106.821.000,00	(40.193.950,00)	72,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0011	5.2	BELANJA MODAL	280.000.000,00	269.600.000,00	(10.400.000,00)	96,28	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0011	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	280.000.000,00	269.600.000,00	(10.400.000,00)	96,28	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0014		PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONALISASI PUSKESWAN	12.795.450,00	12.757.750,00	(37.700,00)	99,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	12.795.450,00	12.757.750,00	(37.700,00)	99,70	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.795.450,00	12.757.750,00	(37.700,00)	99,70	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0015		PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH POTONG HEWAN	11.970.000,00	11.950.000,00	(20.000,00)	99,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	11.970.000,00	11.950.000,00	(20.000,00)	99,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.970.000,00	11.950.000,00	(20.000,00)	99,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	61.751.950,00	60.999.642,00	(752.308,00)	98,78	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.670.250,00	56.931.542,00	(738.708,00)	98,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008		PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.670.250,00	56.931.542,00	(738.708,00)	98,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	57.670.250,00	56.931.542,00	(738.708,00)	98,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.670.250,00	56.931.542,00	(738.708,00)	98,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.081.700,00	4.068.100,00	(13.600,00)	99,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0002		PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	4.081.700,00	4.068.100,00	(13.600,00)	99,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.081.700,00	4.068.100,00	(13.600,00)	99,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.081.700,00	4.068.100,00	(13.600,00)	99,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	353.406.250,00	350.226.245,00	(3.180.005,00)	99,10	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	353.406.250,00	350.226.245,00	(3.180.005,00)	99,10	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005		PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	67.413.750,00	64.727.545,00	(2.686.205,00)	96,01	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	67.413.750,00	64.727.545,00	(2.686.205,00)	96,01	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.413.750,00	64.727.545,00	(2.686.205,00)	96,01	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0006		PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN	285.992.500,00	285.498.700,00	(493.800,00)	99,82	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	285.992.500,00	285.498.700,00	(493.800,00)	99,82	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.992.500,00	285.498.700,00	(493.800,00)	99,82	
				JUMLAH BELANJA	16.155.034.064,00	15.052.299.542,00	(1.102.734.522,00)	93,17	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(15.928.034.064,00)	(14.810.603.542,00)	1.117.430.522,00	92,98	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.928.034.064,00)	(14.810.603.542,00)	1.117.430.522,00	92,98	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35	
				JUMLAH PENDAPATAN	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH					
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	122.800.750,00	120.287.979,00	(2.512.771,00)	97,95	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	82.645.750,00	80.481.618,00	(2.164.132,00)	97,38	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0002		FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	82.645.750,00	80.481.618,00	(2.164.132,00)	97,38	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	82.645.750,00	80.481.618,00	(2.164.132,00)	97,38	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.645.750,00	80.481.618,00	(2.164.132,00)	97,38	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	82.645.750,00	80.481.618,00	(2.164.132,00)	97,38	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	7.182.250,00	6.889.300,00	(292.950,00)	95,92	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0002		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	7.182.250,00	6.889.300,00	(292.950,00)	95,92	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.182.250,00	6.889.300,00	(292.950,00)	95,92	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.182.250,00	6.889.300,00	(292.950,00)	95,92	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	32.972.750,00	32.917.061,00	(55.689,00)	99,83	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	32.972.750,00	32.917.061,00	(55.689,00)	99,83	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	29.429.000,00	29.409.511,00	(19.489,00)	99,93	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.429.000,00	29.409.511,00	(19.489,00)	99,93	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.429.000,00	29.409.511,00	(19.489,00)	99,93	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002		PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	3.543.750,00	3.507.550,00	(36.200,00)	98,97	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.543.750,00	3.507.550,00	(36.200,00)	98,97	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.543.750,00	3.507.550,00	(36.200,00)	98,97	
				JUMLAH BELANJA	122.800.750,00	120.287.979,00	(2.512.771,00)	97,95	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(35.600.750,00)	(18.827.979,00)	16.772.771,00	52,88	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(35.600.750,00)	(18.827.979,00)	16.772.771,00	52,88	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35	
				JUMLAH PENDAPATAN	87.200.000,00	101.460.000,00	14.260.000,00	116,35	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH					
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	99.908.200,00	80.846.270,00	(19.061.930,00)	80,92	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	96.070.200,00	77.013.470,00	(19.056.730,00)	80,16	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	96.070.200,00	77.013.470,00	(19.056.730,00)	80,16	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	96.070.200,00	77.013.470,00	(19.056.730,00)	80,16	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.070.200,00	77.013.470,00	(19.056.730,00)	80,16	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	96.070.200,00	77.013.470,00	(19.056.730,00)	80,16	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN	3.838.000,00	3.832.800,00	(5.200,00)	99,86	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001		FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	3.838.000,00	3.832.800,00	(5.200,00)	99,86	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.838.000,00	3.832.800,00	(5.200,00)	99,86	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.838.000,00	3.832.800,00	(5.200,00)	99,86	
				JUMLAH BELANJA	99.908.200,00	80.846.270,00	(19.061.930,00)	80,92	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(12.708.200,00)	20.613.730,00	33.321.930,00	(162,20)	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.708.200,00)	20.613.730,00	33.321.930,00	(162,20)	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.32.2.07.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	13.980.000,00	12.681.000,00	(1.299.000,00)	90,70	
	3.32.2.07.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.980.000,00	12.681.000,00	(1.299.000,00)	90,70	
	3.32.2.07.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	13.980.000,00	12.681.000,00	(1.299.000,00)	90,70	
				JUMLAH PENDAPATAN	13.980.000,00	12.681.000,00	(1.299.000,00)	90,70	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH					
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.7.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.019.247.301,00	4.917.401.891,00	(101.845.410,00)	97,97	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.320.873.701,00	4.227.617.521,00	(93.256.180,00)	97,84	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.518.844.441,00	3.439.383.744,00	(79.460.697,00)	97,74	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.518.844.441,00	3.439.383.744,00	(79.460.697,00)	97,74	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.518.844.441,00	3.439.383.744,00	(79.460.697,00)	97,74	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.464.944.441,00	3.394.283.744,00	(70.660.697,00)	97,96	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	53.900.000,00	45.100.000,00	(8.800.000,00)	83,67	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	155.485.150,00	154.738.870,00	(746.280,00)	99,52	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.560.000,00	4.558.000,00	(2.000,00)	99,95	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	4.558.000,00	(2.000,00)	99,95	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.560.000,00	4.558.000,00	(2.000,00)	99,95	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.765.000,00	20.629.000,00	(136.000,00)	99,34	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.765.000,00	20.629.000,00	(136.000,00)	99,34	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.765.000,00	20.629.000,00	(136.000,00)	99,34	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.982.000,00	8.814.000,00	(168.000,00)	98,12	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.982.000,00	8.814.000,00	(168.000,00)	98,12	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	8.982.000,00	8.814.000,00	(168.000,00)	98,12	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.062.000,00	26.026.000,00	(36.000,00)	99,86	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.062.000,00	26.026.000,00	(36.000,00)	99,86	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.062.000,00	26.026.000,00	(36.000,00)	99,86	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.338.000,00	8.338.000,00	0,00	100,00	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.338.000,00	8.338.000,00	0,00	100,00	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	8.338.000,00	8.338.000,00	0,00	100,00	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	86.778.150,00	86.373.870,00	(404.280,00)	99,53	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.778.150,00	86.373.870,00	(404.280,00)	99,53	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	86.778.150,00	86.373.870,00	(404.280,00)	99,53	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	383.079.950,00	374.059.850,00	(9.020.100,00)	97,64	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.494.950,00	61.128.250,00	(366.700,00)	99,40	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.494.950,00	61.128.250,00	(366.700,00)	99,40	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	61.494.950,00	61.128.250,00	(366.700,00)	99,40	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	321.585.000,00	312.931.600,00	(8.653.400,00)	97,30	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.585.000,00	312.931.600,00	(8.653.400,00)	97,30	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	321.585.000,00	312.931.600,00	(8.653.400,00)	97,30	
					263.464.160,00	259.435.057,00	(4.029.103,00)	98,47	

2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	6.500.000,00	4.538.400,00	(1.961.600,00)	69,82	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	4.538.400,00	(1.961.600,00)	69,82	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	4.538.400,00	(1.961.600,00)	69,82	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	33.000.000,00	31.457.000,00	(1.543.000,00)	95,32	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	31.457.000,00	(1.543.000,00)	95,32	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	31.457.000,00	(1.543.000,00)	95,32	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.880.000,00	8.800.000,00	(80.000,00)	99,09	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.880.000,00	8.800.000,00	(80.000,00)	99,09	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	8.800.000,00	(80.000,00)	99,09	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	215.084.160,00	214.639.657,00	(444.503,00)	99,79	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	215.084.160,00	214.639.657,00	(444.503,00)	99,79	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.084.160,00	214.639.657,00	(444.503,00)	99,79	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.7.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	275.220.450,00	269.815.470,00	(5.404.980,00)	98,03	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	275.220.450,00	269.815.470,00	(5.404.980,00)	98,03	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	275.220.450,00	269.815.470,00	(5.404.980,00)	98,03	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	275.220.450,00	269.815.470,00	(5.404.980,00)	98,03	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.220.450,00	269.815.470,00	(5.404.980,00)	98,03	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.7.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	48.230.000,00	46.150.800,00	(2.079.200,00)	95,68	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01		PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.729.650,00	23.883.200,00	(846.450,00)	96,57	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002		PELAYANAN ANTAR KERJA	24.729.650,00	23.883.200,00	(846.450,00)	96,57	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.729.650,00	23.883.200,00	(846.450,00)	96,57	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.729.650,00	23.883.200,00	(846.450,00)	96,57	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03		PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	23.500.350,00	22.267.600,00	(1.232.750,00)	94,75	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002		PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	23.500.350,00	22.267.600,00	(1.232.750,00)	94,75	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.500.350,00	22.267.600,00	(1.232.750,00)	94,75	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.500.350,00	22.267.600,00	(1.232.750,00)	94,75	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.7.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	374.923.150,00	373.818.100,00	(1.105.050,00)	99,70	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	374.923.150,00	373.818.100,00	(1.105.050,00)	99,70	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001		PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.488.900,00	14.558.300,00	(930.600,00)	93,99	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.488.900,00	14.558.300,00	(930.600,00)	93,99	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.488.900,00	14.558.300,00	(930.600,00)	93,99	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005		PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA	359.434.250,00	359.259.800,00	(174.450,00)	99,95	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	359.434.250,00	359.259.800,00	(174.450,00)	99,95	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.434.250,00	359.259.800,00	(174.450,00)	99,95	
				JUMLAH BELANJA	5.019.247.301,00	4.917.401.891,00	(101.845.410,00)	97,97	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.005.267.301,00)	(4.904.720.891,00)	100.546.410,00	97,99	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.005.267.301,00)	(4.904.720.891,00)	100.546.410,00	97,99	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	4.01.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	110.000.000,00	146.600.000,00	36.600.000,00	133,27	
	4.01.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.000.000,00	146.600.000,00	36.600.000,00	133,27	
	4.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	110.000.000,00	146.600.000,00	36.600.000,00	133,27	
				JUMLAH PENDAPATAN	110.000.000,00	146.600.000,00	36.600.000,00	133,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	31.470.228.597,00	27.032.725.740,00	(4.437.502.857,00)	85,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.491.055.447,00	21.159.149.253,00	(2.331.906.194,00)	90,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.695.708.447,00	7.594.920.739,00	(100.787.708,00)	98,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.695.708.447,00	7.594.920.739,00	(100.787.708,00)	98,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.695.708.447,00	7.594.920.739,00	(100.787.708,00)	98,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.396.658.447,00	7.314.652.963,00	(82.005.484,00)	98,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.050.000,00	280.267.776,00	(18.782.224,00)	93,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	250.000.000,00	233.972.388,00	(16.027.612,00)	93,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	250.000.000,00	233.972.388,00	(16.027.612,00)	93,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	233.972.388,00	(16.027.612,00)	93,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.826.402.850,00	2.449.278.085,00	(377.124.765,00)	86,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	133.706.200,00	110.851.820,00	(22.854.380,00)	82,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	133.706.200,00	110.851.820,00	(22.854.380,00)	82,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	133.706.200,00	110.851.820,00	(22.854.380,00)	82,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.630.000,00	107.445.224,00	(72.184.776,00)	59,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	179.630.000,00	107.445.224,00	(72.184.776,00)	59,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	179.630.000,00	107.445.224,00	(72.184.776,00)	59,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.675.000,00	58.432.802,00	(25.242.198,00)	69,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	83.675.000,00	58.432.802,00	(25.242.198,00)	69,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	83.675.000,00	58.432.802,00	(25.242.198,00)	69,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.191.970.000,00	986.619.478,00	(205.350.522,00)	82,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.191.970.000,00	986.619.478,00	(205.350.522,00)	82,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.191.970.000,00	986.619.478,00	(205.350.522,00)	82,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	22.157.399,00	(8.842.601,00)	71,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	31.000.000,00	22.157.399,00	(8.842.601,00)	71,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	22.157.399,00	(8.842.601,00)	71,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.206.421.650,00	1.163.771.362,00	(42.650.288,00)	96,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.206.421.650,00	1.163.771.362,00	(42.650.288,00)	96,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.206.421.650,00	1.163.771.362,00	(42.650.288,00)	96,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.681.011.350,00	1.116.384.205,00	(564.627.145,00)	66,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	835.049.000,00	408.725.287,00	(426.323.713,00)	48,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	44.894.000,00	23.368.153,00	(21.525.847,00)	52,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	44.894.000,00	23.368.153,00	(21.525.847,00)	52,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	790.155.000,00	385.357.134,00	(404.797.866,00)	48,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	790.155.000,00	385.357.134,00	(404.797.866,00)	48,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	845.962.350,00	707.658.918,00	(138.303.432,00)	83,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA					

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	845.682.350,00	707.378.918,00	(138.303.432,00)	83,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	845.682.350,00	707.378.918,00	(138.303.432,00)	83,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.795.696.800,00	4.175.528.177,00	(620.168.623,00)	87,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12.000.000,00	9.500.000,00	(2.500.000,00)	79,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	9.500.000,00	(2.500.000,00)	79,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	9.500.000,00	(2.500.000,00)	79,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	918.046.800,00	882.171.594,00	(35.875.206,00)	96,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	918.046.800,00	882.171.594,00	(35.875.206,00)	96,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	918.046.800,00	882.171.594,00	(35.875.206,00)	96,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	541.302.000,00	416.413.406,00	(124.888.594,00)	76,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	541.302.000,00	416.413.406,00	(124.888.594,00)	76,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.302.000,00	416.413.406,00	(124.888.594,00)	76,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.324.348.000,00	2.867.443.177,00	(456.904.823,00)	86,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.324.348.000,00	2.867.443.177,00	(456.904.823,00)	86,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.324.348.000,00	2.867.443.177,00	(456.904.823,00)	86,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.666.908.500,00	1.465.598.504,00	(201.309.996,00)	87,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	237.245.500,00	199.834.674,00	(37.410.826,00)	84,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	237.245.500,00	199.834.674,00	(37.410.826,00)	84,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.245.500,00	199.834.674,00	(37.410.826,00)	84,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	615.030.000,00	484.317.554,00	(130.712.446,00)	78,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	615.030.000,00	484.317.554,00	(130.712.446,00)	78,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.030.000,00	484.317.554,00	(130.712.446,00)	78,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	158.759.000,00	133.746.518,00	(25.012.482,00)	84,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	158.759.000,00	133.746.518,00	(25.012.482,00)	84,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.759.000,00	133.746.518,00	(25.012.482,00)	84,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	655.874.000,00	647.699.758,00	(8.174.242,00)	98,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	655.874.000,00	647.699.758,00	(8.174.242,00)	98,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.874.000,00	647.699.758,00	(8.174.242,00)	98,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.141.437.000,00	895.579.159,00	(245.857.841,00)	78,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	256.937.000,00	177.334.547,00	(79.602.453,00)	69,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	256.937.000,00	177.334.547,00	(79.602.453,00)	69,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	256.937.000,00	177.334.547,00	(79.602.453,00)	69,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA	284.500.000,00	245.801.335,00	(38.698.665,00)	86,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	284.500.000,00	245.801.335,00	(38.698.665,00)	86,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.500.000,00	245.801.335,00	(38.698.665,00)	86,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	200.000.000,00	72.447.277,00	(127.552.723,00)	36,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	72.447.277,00	(127.552.723,00)	36,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	72.447.277,00	(127.552.723,00)	36,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004		PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	400.000.000,00	399.996.000,00	(4.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	399.996.000,00	(4.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	400.000.000,00	399.996.000,00	(4.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	766.660.000,00	585.540.900,00	(181.119.100,00)	76,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	389.895.000,00	362.723.635,00	(27.171.365,00)	93,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	389.895.000,00	362.723.635,00	(27.171.365,00)	93,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.895.000,00	362.723.635,00	(27.171.365,00)	93,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	366.575.000,00	212.659.265,00	(153.915.735,00)	58,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	366.575.000,00	212.659.265,00	(153.915.735,00)	58,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.575.000,00	212.659.265,00	(153.915.735,00)	58,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	10.190.000,00	10.158.000,00	(32.000,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.190.000,00	10.158.000,00	(32.000,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.190.000,00	10.158.000,00	(32.000,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	158.492.000,00	152.093.092,00	(6.398.908,00)	95,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	80.229.050,00	75.485.250,00	(4.743.800,00)	94,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.229.050,00	75.485.250,00	(4.743.800,00)	94,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.229.050,00	75.485.250,00	(4.743.800,00)	94,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	28.602.800,00	28.078.200,00	(524.600,00)	98,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.602.800,00	28.078.200,00	(524.600,00)	98,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.602.800,00	28.078.200,00	(524.600,00)	98,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	49.660.150,00	48.529.642,00	(1.130.508,00)	97,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.660.150,00	48.529.642,00	(1.130.508,00)	97,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.660.150,00	48.529.642,00	(1.130.508,00)	97,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.508.738.500,00	2.490.254.004,00	(18.484.496,00)	99,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	2.508.738.500,00	2.490.254.004,00	(18.484.496,00)	99,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.508.738.500,00	2.490.254.004,00	(18.484.496,00)	99,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.508.738.500,00	2.490.254.004,00	(18.484.496,00)	99,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.895.794.850,00	4.833.197.211,00	(2.062.597.639,00)	70,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	170.760.450,00	162.751.461,00	(8.008.989,00)	95,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	67.162.700,00	62.669.926,00	(4.492.774,00)	93,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.162.700,00	62.669.926,00	(4.492.774,00)	93,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.162.700,00	62.669.926,00	(4.492.774,00)	93,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	36.613.400,00	34.206.270,00	(2.407.130,00)	93,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.613.400,00	34.206.270,00	(2.407.130,00)	93,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.613.400,00	34.206.270,00	(2.407.130,00)	93,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003		FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	66.984.350,00	65.875.265,00	(1.109.085,00)	98,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	66.984.350,00	65.875.265,00	(1.109.085,00)	98,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.984.350,00	65.875.265,00	(1.109.085,00)	98,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.569.242.850,00	4.517.732.711,00	(2.051.510.139,00)	68,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	6.569.242.850,00	4.517.732.711,00	(2.051.510.139,00)	68,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.569.242.850,00	4.517.732.711,00	(2.051.510.139,00)	68,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.932.242.850,00	3.728.653.096,00	(203.589.754,00)	94,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	2.637.000.000,00	789.079.615,00	(1.847.920.385,00)	29,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	139.386.150,00	137.487.739,00	(1.898.411,00)	98,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	58.797.700,00	57.890.267,00	(907.433,00)	98,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.797.700,00	57.890.267,00	(907.433,00)	98,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.797.700,00	57.890.267,00	(907.433,00)	98,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	36.034.000,00	35.483.748,00	(550.252,00)	98,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.034.000,00	35.483.748,00	(550.252,00)	98,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.034.000,00	35.483.748,00	(550.252,00)	98,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	44.554.450,00	44.113.724,00	(440.726,00)	99,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.554.450,00	44.113.724,00	(440.726,00)	99,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.554.450,00	44.113.724,00	(440.726,00)	99,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	16.405.400,00	15.225.300,00	(1.180.100,00)	92,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001		FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	16.405.400,00	15.225.300,00	(1.180.100,00)	92,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.405.400,00	15.225.300,00	(1.180.100,00)	92,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.083.378.300,00	1.040.379.276,00	(42.999.024,00)	96,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	676.201.100,00	640.734.150,00	(35.466.950,00)	94,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN					

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	676.201.100,00	640.734.150,00	(35.466.950,00)	94,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	676.201.100,00	640.734.150,00	(35.466.950,00)	94,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.201.100,00	640.734.150,00	(35.466.950,00)	94,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	160.442.650,00	159.413.106,00	(1.029.544,00)	99,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	56.098.950,00	55.851.378,00	(247.572,00)	99,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.098.950,00	55.851.378,00	(247.572,00)	99,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.098.950,00	55.851.378,00	(247.572,00)	99,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	65.104.100,00	64.475.328,00	(628.772,00)	99,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.104.100,00	64.475.328,00	(628.772,00)	99,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.104.100,00	64.475.328,00	(628.772,00)	99,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	39.239.600,00	39.086.400,00	(153.200,00)	99,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.239.600,00	39.086.400,00	(153.200,00)	99,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.239.600,00	39.086.400,00	(153.200,00)	99,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	224.234.400,00	221.784.820,00	(2.449.580,00)	98,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	147.016.550,00	145.175.500,00	(1.841.050,00)	98,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	147.016.550,00	145.175.500,00	(1.841.050,00)	98,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.016.550,00	145.175.500,00	(1.841.050,00)	98,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	54.051.500,00	53.702.720,00	(348.780,00)	99,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.051.500,00	53.702.720,00	(348.780,00)	99,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.051.500,00	53.702.720,00	(348.780,00)	99,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	23.166.350,00	22.906.600,00	(259.750,00)	98,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.166.350,00	22.906.600,00	(259.750,00)	98,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.166.350,00	22.906.600,00	(259.750,00)	98,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	22.500.150,00	18.447.200,00	(4.052.950,00)	81,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	22.500.150,00	18.447.200,00	(4.052.950,00)	81,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.150,00	18.447.200,00	(4.052.950,00)	81,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.150,00	18.447.200,00	(4.052.950,00)	81,98	
				JUMLAH BELANJA	31.470.228.597,00	27.032.725.740,00	(4.437.502.857,00)	85,89	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(31.360.228.597,00)	(26.886.125.740,00)	4.474.102.857,00	85,73	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(31.360.228.597,00)	(26.886.125.740,00)	4.474.102.857,00	85,73	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	38.828.290.546,00	37.907.823.708,00	(920.466.838,00)	97,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.530.552.256,00	20.967.909.306,00	(562.642.950,00)	97,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.321.718.958,00	2.267.267.567,00	(54.451.391,00)	97,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.321.718.958,00	2.267.267.567,00	(54.451.391,00)	97,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.321.718.958,00	2.267.267.567,00	(54.451.391,00)	97,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.246.368.958,00	2.201.417.567,00	(44.951.391,00)	97,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.350.000,00	65.850.000,00	(9.500.000,00)	87,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	15.000.000,00	10.682.700,00	(4.317.300,00)	71,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15.000.000,00	10.682.700,00	(4.317.300,00)	71,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	10.682.700,00	(4.317.300,00)	71,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.682.700,00	(4.317.300,00)	71,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.474.225.100,00	1.435.980.299,00	(38.244.801,00)	97,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	45.294.000,00	45.025.000,00	(269.000,00)	99,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.294.000,00	45.025.000,00	(269.000,00)	99,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.294.000,00	45.025.000,00	(269.000,00)	99,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	451.294.000,00	434.753.999,00	(16.540.001,00)	96,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	451.294.000,00	434.753.999,00	(16.540.001,00)	96,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.294.000,00	434.753.999,00	(16.540.001,00)	96,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	92.562.000,00	92.545.000,00	(17.000,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	92.562.000,00	92.545.000,00	(17.000,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.562.000,00	92.545.000,00	(17.000,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	342.805.000,00	335.913.000,00	(6.892.000,00)	97,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	342.805.000,00	335.913.000,00	(6.892.000,00)	97,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.805.000,00	335.913.000,00	(6.892.000,00)	97,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	299.969.100,00	287.339.100,00	(12.630.000,00)	95,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	299.969.100,00	287.339.100,00	(12.630.000,00)	95,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.969.100,00	287.339.100,00	(12.630.000,00)	95,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	242.301.000,00	240.404.200,00	(1.896.800,00)	99,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	242.301.000,00	240.404.200,00	(1.896.800,00)	99,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.301.000,00	240.404.200,00	(1.896.800,00)	99,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.682.000.000,00	1.499.899.969,00	(182.100.031,00)	89,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.642.000.000,00	1.460.000.000,00	(182.000.000,00)	88,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.642.000.000,00	1.460.000.000,00	(182.000.000,00)	88,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.642.000.000,00	1.460.000.000,00	(182.000.000,00)	88,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	40.000.000,00	39.899.969,00	(100.031,00)	99,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	39.899.969,00	(100.031,00)	99,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.899.969,00	(100.031,00)	99,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.436.202.540,00	1.276.970.066,00	(159.232.474,00)	88,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	229.579.540,00	212.219.766,00	(17.359.774,00)	92,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	229.579.540,00	212.219.766,00	(17.359.774,00)	92,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.579.540,00	212.219.766,00	(17.359.774,00)	92,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.164.123.000,00	1.022.250.300,00	(141.872.700,00)	87,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.164.123.000,00	1.022.250.300,00	(141.872.700,00)	87,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.164.123.000,00	1.022.250.300,00	(141.872.700,00)	87,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	718.625.750,00	639.750.827,00	(78.874.923,00)	89,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	244.500.000,00	198.251.127,00	(46.248.873,00)	81,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	244.500.000,00	198.251.127,00	(46.248.873,00)	81,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.500.000,00	198.251.127,00	(46.248.873,00)	81,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	81.930.000,00	58.627.200,00	(23.302.800,00)	71,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.930.000,00	58.627.200,00	(23.302.800,00)	71,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.930.000,00	58.627.200,00	(23.302.800,00)	71,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	217.195.750,00	211.402.500,00	(5.793.250,00)	97,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	217.195.750,00	211.402.500,00	(5.793.250,00)	97,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.195.750,00	211.402.500,00	(5.793.250,00)	97,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	175.000.000,00	171.470.000,00	(3.530.000,00)	97,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	171.470.000,00	(3.530.000,00)	97,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	171.470.000,00	(3.530.000,00)	97,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	13.651.404.908,00	13.606.129.878,00	(45.275.030,00)	99,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	13.251.404.908,00	13.206.444.878,00	(44.960.030,00)	99,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.251.404.908,00	13.206.444.878,00	(44.960.030,00)	99,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	13.177.679.908,00	13.132.733.232,00	(44.946.676,00)	99,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.725.000,00	73.711.646,00	(13.354,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	400.000.000,00	399.685.000,00	(315.000,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	399.685.000,00	(315.000,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	399.685.000,00	(315.000,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	231.375.000,00	231.228.000,00	(147.000,00)	99,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003		FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	231.375.000,00	231.228.000,00	(147.000,00)	99,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	231.375.000,00	231.228.000,00	(147.000,00)	99,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.375.000,00	231.228.000,00	(147.000,00)	99,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.297.738.290,00	16.939.914.402,00	(357.823.888,00)	97,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	2.842.322.500,00	2.819.542.678,00	(22.779.822,00)	99,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001		PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	2.770.642.500,00	2.752.342.678,00	(18.299.822,00)	99,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.770.642.500,00	2.752.342.678,00	(18.299.822,00)	99,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.770.642.500,00	2.752.342.678,00	(18.299.822,00)	99,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004		FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	71.680.000,00	67.200.000,00	(4.480.000,00)	93,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	71.680.000,00	67.200.000,00	(4.480.000,00)	93,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.680.000,00	67.200.000,00	(4.480.000,00)	93,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	1.103.421.190,00	1.098.098.747,00	(5.322.443,00)	99,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001		PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	291.672.890,00	290.210.300,00	(1.462.590,00)	99,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	291.672.890,00	290.210.300,00	(1.462.590,00)	99,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.672.890,00	290.210.300,00	(1.462.590,00)	99,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002		PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	361.453.250,00	359.127.747,00	(2.325.503,00)	99,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	361.453.250,00	359.127.747,00	(2.325.503,00)	99,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.453.250,00	359.127.747,00	(2.325.503,00)	99,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003		PEMBAHASAN APBD	40.500.000,00	40.455.000,00	(45.000,00)	99,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.500.000,00	40.455.000,00	(45.000,00)	99,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	40.455.000,00	(45.000,00)	99,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004		PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	59.190.000,00	59.155.000,00	(35.000,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	59.190.000,00	59.155.000,00	(35.000,00)	99,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.190.000,00	59.155.000,00	(35.000,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006		PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	350.605.050,00	349.150.700,00	(1.454.350,00)	99,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	350.605.050,00	349.150.700,00	(1.454.350,00)	99,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.605.050,00	349.150.700,00	(1.454.350,00)	99,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2.256.227.350,00	2.120.836.351,00	(135.390.999,00)	93,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	1.430.747.350,00	1.362.393.851,00	(68.353.499,00)	95,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.430.747.350,00	1.362.393.851,00	(68.353.499,00)	95,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.430.747.350,00	1.362.393.851,00	(68.353.499,00)	95,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	825.480.000,00	758.442.500,00	(67.037.500,00)	91,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	825.480.000,00	758.442.500,00	(67.037.500,00)	91,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.480.000,00	758.442.500,00	(67.037.500,00)	91,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	11.095.767.250,00	10.901.436.626,00	(194.330.624,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	10.624.883.750,00	10.542.778.626,00	(82.105.124,00)	99,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.624.883.750,00	10.542.778.626,00	(82.105.124,00)	99,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.624.883.750,00	10.542.778.626,00	(82.105.124,00)	99,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	470.883.500,00	358.658.000,00	(112.225.500,00)	76,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	470.883.500,00	358.658.000,00	(112.225.500,00)	76,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.883.500,00	358.658.000,00	(112.225.500,00)	76,16	
				JUMLAH BELANJA	38.828.290.546,00	37.907.823.708,00	(920.466.838,00)	97,62	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(38.828.290.546,00)	(37.907.823.708,00)	920.466.838,00	97,62	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(38.828.290.546,00)	(37.907.823.708,00)	920.466.838,00	97,62	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	5	BELANJA DAERAH	4.116.239.481,00	3.997.298.539,00	(118.940.942,00)	97,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.420.081.581,00	3.311.457.225,00	(108.624.356,00)	96,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.703.986.116,00	2.627.422.128,00	(76.563.988,00)	97,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.703.986.116,00	2.627.422.128,00	(76.563.988,00)	97,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.703.986.116,00	2.627.422.128,00	(76.563.988,00)	97,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.636.886.116,00	2.571.022.128,00	(65.863.988,00)	97,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.100.000,00	56.400.000,00	(10.700.000,00)	84,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	275.272.000,00	271.611.445,00	(3.660.555,00)	98,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.791.000,00	11.791.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.791.000,00	11.791.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.791.000,00	11.791.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	29.870.000,00	29.764.600,00	(105.400,00)	99,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.870.000,00	29.764.600,00	(105.400,00)	99,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.870.000,00	29.764.600,00	(105.400,00)	99,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	55.180.000,00	55.180.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.180.000,00	55.180.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	15.120.000,00	15.000.000,00	(120.000,00)	99,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.120.000,00	15.000.000,00	(120.000,00)	99,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	15.000.000,00	(120.000,00)	99,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.424.000,00	6.417.500,00	(6.500,00)	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.424.000,00	6.417.500,00	(6.500,00)	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.424.000,00	6.417.500,00	(6.500,00)	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	153.767.000,00	150.338.345,00	(3.428.655,00)	97,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	153.767.000,00	150.338.345,00	(3.428.655,00)	97,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.767.000,00	150.338.345,00	(3.428.655,00)	97,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	352.613.675,00	331.520.294,00	(21.093.381,00)	94,01	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	99.699.875,00	96.541.444,00	(3.158.431,00)	96,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.699.875,00	96.541.444,00	(3.158.431,00)	96,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.699.875,00	96.541.444,00	(3.158.431,00)	96,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	246.913.800,00	228.978.850,00	(17.934.950,00)	92,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	246.913.800,00	228.978.850,00	(17.934.950,00)	92,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.913.800,00	228.978.850,00	(17.934.950,00)	92,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	88.209.790,00	80.903.358,00	(7.306.432,00)	91,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	21.000.000,00	17.016.443,00	(3.983.557,00)	81,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	17.016.443,00	(3.983.557,00)	81,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	32.960.000,00	29.645.461,00	(3.314.539,00)	89,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.960.000,00	29.645.461,00	(3.314.539,00)	89,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.960.000,00	29.645.461,00	(3.314.539,00)	89,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.240.000,00	20.240.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.240.000,00	20.240.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.240.000,00	20.240.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	14.009.790,00	14.001.454,00	(8.336,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	14.009.790,00	14.001.454,00	(8.336,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.009.790,00	14.001.454,00	(8.336,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	577.750.750,00	569.492.848,00	(8.257.902,00)	98,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	575.500.750,00	567.242.848,00	(8.257.902,00)	98,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	70.870.000,00	70.310.000,00	(560.000,00)	99,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	70.870.000,00	70.310.000,00	(560.000,00)	99,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.870.000,00	70.310.000,00	(560.000,00)	99,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	504.630.750,00	496.932.848,00	(7.697.902,00)	98,47	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	504.630.750,00	496.932.848,00	(7.697.902,00)	98,47	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	504.630.750,00	496.932.848,00	(7.697.902,00)	98,47	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	118.407.150,00	116.348.466,00	(2.058.684,00)	98,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	55.595.300,00	54.682.400,00	(912.900,00)	98,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	24.047.750,00	23.530.600,00	(517.150,00)	97,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.047.750,00	23.530.600,00	(517.150,00)	97,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.047.750,00	23.530.600,00	(517.150,00)	97,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	31.547.550,00	31.151.800,00	(395.750,00)	98,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.547.550,00	31.151.800,00	(395.750,00)	98,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.547.550,00	31.151.800,00	(395.750,00)	98,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	21.249.700,00	20.741.500,00	(508.200,00)	97,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	21.249.700,00	20.741.500,00	(508.200,00)	97,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.249.700,00	20.741.500,00	(508.200,00)	97,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.249.700,00	20.741.500,00	(508.200,00)	97,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	41.562.150,00	40.924.566,00	(637.584,00)	98,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	41.562.150,00	40.924.566,00	(637.584,00)	98,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	41.562.150,00	40.924.566,00	(637.584,00)	98,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.562.150,00	40.924.566,00	(637.584,00)	98,46	
				JUMLAH BELANJA	4.116.239.481,00	3.997.298.539,00	(118.940.942,00)	97,11	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.116.239.481,00)	(3.997.298.539,00)	118.940.942,00	97,11	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.116.239.481,00)	(3.997.298.539,00)	118.940.942,00	97,11	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Keuangan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	893.551.682.582,46	878.736.554.165,25	(14.815.128.417,21)	98,34	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63.759.619.469,00	64.161.641.007,65	402.021.538,65	100,63	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.01	Pajak Daerah	53.158.000.000,00	54.317.593.473,00	1.159.593.473,00	102,18	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000,00	41.658.240,00	36.658.240,00	833,16	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.529.319.469,00	5.529.319.459,00	(10,00)	99,99	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.067.300.000,00	4.273.069.835,65	(794.230.164,35)	84,32	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	811.958.696.072,35	795.934.821.722,00	(16.023.874.350,35)	98,02	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766.702.365.600,00	750.718.824.220,00	(15.983.541.380,00)	97,91	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.256.330.472,35	45.215.997.502,00	(40.332.970,35)	99,91	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.833.367.041,11	18.640.091.435,60	806.724.394,49	104,52	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	82.698.940,00	(17.301.060,00)	82,69	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.733.367.041,11	18.557.392.495,60	824.025.454,49	104,64	
				JUMLAH PENDAPATAN	893.551.682.582,46	878.736.554.165,25	(14.815.128.417,21)	98,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	132.703.784.865,00	127.421.457.245,00	(5.282.327.620,00)	96,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.292.177.125,00	8.807.279.661,00	(484.897.464,00)	94,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.676.781.845,00	7.339.448.222,00	(337.333.623,00)	95,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.000		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.676.781.845,00	7.339.448.222,00	(337.333.623,00)	95,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.000	5.1	BELANJA OPERASI	7.676.781.845,00	7.339.448.222,00	(337.333.623,00)	95,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.451.781.845,00	7.148.897.222,00	(302.884.623,00)	95,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	190.551.000,00	(34.449.000,00)	84,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	507.834.600,00	484.191.867,00	(23.642.733,00)	95,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.990.000,00	9.955.000,00	(35.000,00)	99,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	9.990.000,00	9.955.000,00	(35.000,00)	99,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.955.000,00	(35.000,00)	99,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	153.383.000,00	153.321.000,00	(62.000,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	153.383.000,00	153.321.000,00	(62.000,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.383.000,00	153.321.000,00	(62.000,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	43.662.000,00	43.662.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	43.662.000,00	43.662.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.662.000,00	43.662.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	49.186.000,00	44.763.000,00	(4.423.000,00)	91,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	49.186.000,00	44.763.000,00	(4.423.000,00)	91,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.186.000,00	44.763.000,00	(4.423.000,00)	91,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	146.091.600,00	146.033.800,00	(57.800,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	146.091.600,00	146.033.800,00	(57.800,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.091.600,00	146.033.800,00	(57.800,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	105.522.000,00	86.457.067,00	(19.064.933,00)	81,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	105.522.000,00	86.457.067,00	(19.064.933,00)	81,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.522.000,00	86.457.067,00	(19.064.933,00)	81,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	159.525.000,00	153.859.950,00	(5.665.050,00)	96,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	24.525.000,00	21.694.950,00	(2.830.050,00)	88,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	24.525.000,00	21.694.950,00	(2.830.050,00)	88,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.525.000,00	21.694.950,00	(2.830.050,00)	88,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	135.000.000,00	132.165.000,00	(2.835.000,00)	97,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	135.000.000,00	132.165.000,00	(2.835.000,00)	97,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.000.000,00	132.165.000,00	(2.835.000,00)	97,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	762.655.680,00	703.423.549,00	(59.232.131,00)	92,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	14.995.000,00	10.201.000,00	(4.794.000,00)	68,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.995.000,00	10.201.000,00	(4.794.000,00)	68,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.995.000,00	10.201.000,00	(4.794.000,00)	68,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	293.148.480,00	292.963.099,00	(185.381,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	293.148.480,00	292.963.099,00	(185.381,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.148.480,00	292.963.099,00	(185.381,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	39.994.400,00	36.187.950,00	(3.806.450,00)	90,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.994.400,00	36.187.950,00	(3.806.450,00)	90,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.994.400,00	36.187.950,00	(3.806.450,00)	90,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	414.517.800,00	364.071.500,00	(50.446.300,00)	87,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	414.517.800,00	364.071.500,00	(50.446.300,00)	87,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.517.800,00	364.071.500,00	(50.446.300,00)	87,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	185.380.000,00	126.356.073,00	(59.023.927,00)	68,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	18.000.000,00	13.979.400,00	(4.020.600,00)	77,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	13.979.400,00	(4.020.600,00)	77,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	13.979.400,00	(4.020.600,00)	77,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN	91.850.000,00	46.081.673,00	(45.768.327,00)	50,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	91.850.000,00	46.081.673,00	(45.768.327,00)	50,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.850.000,00	46.081.673,00	(45.768.327,00)	50,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	75.530.000,00	66.295.000,00	(9.235.000,00)	87,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.530.000,00	66.295.000,00	(9.235.000,00)	87,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.530.000,00	66.295.000,00	(9.235.000,00)	87,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	122.471.276.490,00	117.811.390.648,00	(4.659.885.842,00)	96,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	1.346.166.500,00	1.292.205.530,00	(53.960.970,00)	95,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	147.619.500,00	141.002.300,00	(6.617.200,00)	95,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	147.619.500,00	141.002.300,00	(6.617.200,00)	95,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.619.500,00	141.002.300,00	(6.617.200,00)	95,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	101.036.500,00	96.161.900,00	(4.874.600,00)	95,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	101.036.500,00	96.161.900,00	(4.874.600,00)	95,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.036.500,00	96.161.900,00	(4.874.600,00)	95,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA	177.745.500,00	153.045.100,00	(24.700.400,00)	86,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	177.745.500,00	153.045.100,00	(24.700.400,00)	86,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.745.500,00	153.045.100,00	(24.700.400,00)	86,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	919.765.000,00	901.996.230,00	(17.768.770,00)	98,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	919.765.000,00	901.996.230,00	(17.768.770,00)	98,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	919.765.000,00	901.996.230,00	(17.768.770,00)	98,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	148.958.550,00	144.953.234,00	(4.005.316,00)	97,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	28.470.200,00	28.353.200,00	(117.000,00)	99,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	28.470.200,00	28.353.200,00	(117.000,00)	99,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.470.200,00	28.353.200,00	(117.000,00)	99,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011		PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	120.488.350,00	116.600.034,00	(3.888.316,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	120.488.350,00	116.600.034,00	(3.888.316,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.488.350,00	116.600.034,00	(3.888.316,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	291.411.300,00	285.530.682,00	(5.880.618,00)	97,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN,	46.396.000,00	42.933.500,00	(3.462.500,00)	92,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.396.000,00	42.933.500,00	(3.462.500,00)	92,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.396.000,00	42.933.500,00	(3.462.500,00)	92,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH	94.395.850,00	94.280.650,00	(115.200,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	94.395.850,00	94.280.650,00	(115.200,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.395.850,00	94.280.650,00	(115.200,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	135.360.200,00	134.389.632,00	(970.568,00)	99,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	135.360.200,00	134.389.632,00	(970.568,00)	99,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.360.200,00	134.389.632,00	(970.568,00)	99,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006		PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	15.259.250,00	13.926.900,00	(1.332.350,00)	91,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.259.250,00	13.926.900,00	(1.332.350,00)	91,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.259.250,00	13.926.900,00	(1.332.350,00)	91,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	120.316.037.140,00	115.746.735.202,00	(4.569.301.938,00)	96,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	113.406.725.640,00	112.749.377.080,00	(657.348.560,00)	99,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.362.240.000,00	1.346.814.944,00	(15.425.056,00)	98,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.362.240.000,00	1.346.814.944,00	(15.425.056,00)	98,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	112.044.485.640,00	111.402.562.136,00	(641.923.504,00)	99,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	112.044.485.640,00	111.402.562.136,00	(641.923.504,00)	99,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	1.775.000.000,00	196.489.050,00	(1.578.510.950,00)	11,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.775.000.000,00	196.489.050,00	(1.578.510.950,00)	11,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.775.000.000,00	196.489.050,00	(1.578.510.950,00)	11,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010		PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	5.134.311.500,00	2.800.869.072,00	(2.333.442.428,00)	54,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	5.134.311.500,00	2.800.869.072,00	(2.333.442.428,00)	54,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.134.311.500,00	2.800.869.072,00	(2.333.442.428,00)	54,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05		PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP	368.703.000,00	341.966.000,00	(26.737.000,00)	92,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0001		INVENTARISASI DAN ANALISIS DATA BIDANG KEUANGAN DAERAH	19.037.000,00	18.220.400,00	(816.600,00)	95,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.037.000,00	18.220.400,00	(816.600,00)	95,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.037.000,00	18.220.400,00	(816.600,00)	95,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002		IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG	349.666.000,00	323.745.600,00	(25.920.400,00)	92,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	149.666.000,00	130.716.600,00	(18.949.400,00)	87,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.666.000,00	130.716.600,00	(18.949.400,00)	87,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	193.029.000,00	(6.971.000,00)	96,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	193.029.000,00	(6.971.000,00)	96,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	316.806.200,00	260.478.469,00	(56.327.731,00)	82,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	316.806.200,00	260.478.469,00	(56.327.731,00)	82,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	61.789.000,00	52.911.700,00	(8.877.300,00)	85,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.789.000,00	52.911.700,00	(8.877.300,00)	85,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.789.000,00	52.911.700,00	(8.877.300,00)	85,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.000		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	17.732.000,00	17.310.000,00	(422.000,00)	97,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	17.732.000,00	17.310.000,00	(422.000,00)	97,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.732.000,00	17.310.000,00	(422.000,00)	97.62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.000		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	115.492.000,00	91.545.367,00	(23.946.633,00)	79,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	115.492.000,00	91.545.367,00	(23.946.633,00)	79,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.492.000,00	91.545.367,00	(23.946.633,00)	79,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.000		INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	33.810.200,00	28.841.000,00	(4.969.200,00)	85,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	33.810.200,00	28.841.000,00	(4.969.200,00)	85,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.810.200,00	28.841.000,00	(4.969.200,00)	85,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.001		OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	87.983.000,00	69.870.402,00	(18.112.598,00)	79,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.001	5.1	BELANJA OPERASI	87.983.000,00	69.870.402,00	(18.112.598,00)	79,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.983.000,00	69.870.402,00	(18.112.598,00)	79.41	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	623.525.050,00	542.308.467,00	(81.216.583,00)	86,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	623.525.050,00	542.308.467,00	(81.216.583,00)	86,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.000		ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	98.356.300,00	77.038.317,00	(21.317.983,00)	78,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	98.356.300,00	77.038.317,00	(21.317.983,00)	78,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.356.300,00	77.038.317,00	(21.317.983,00)	78,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.000		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	264.157.750,00	227.603.250,00	(36.554.500,00)	86,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	249.007.750,00	227.603.250,00	(21.404.500,00)	91,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.007.750,00	227.603.250,00	(21.404.500,00)	91,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.000	5.2	BELANJA MODAL	15.150.000,00	0,00	(15.150.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.150.000,00	0,00	(15.150.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.000		PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN	115.072.500,00	102.816.200,00	(12.256.300,00)	89,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	115.072.500,00	102.816.200,00	(12.256.300,00)	89,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.072.500,00	102.816.200,00	(12.256.300,00)	89,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.000		PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	135.296.500,00	131.579.200,00	(3.717.300,00)	97,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	135.296.500,00	131.579.200,00	(3.717.300,00)	97,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.296.500,00	131.579.200,00	(3.717.300,00)	97,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.001		ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH	10.642.000,00	3.271.500,00	(7.370.500,00)	30,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.001	5.1	BELANJA OPERASI	10.642.000,00	3.271.500,00	(7.370.500,00)	30,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.642.000,00	3.271.500,00	(7.370.500,00)	30,74	
				JUMLAH BELANJA	132.703.784.865,00	127.421.457.245,00	(5.282.327.620,00)	96,01	
				SURPLUS / (DEFISIT)	760.847.897.717,46	751.315.096.920,25	(9.532.800.797,21)	98,74	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	2.585.069.988,55	2.585.069.988,55	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.085.069.988,55	4.085.069.988,55	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.085.069.988,55	4.085.069.988,55	0,00	100,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.085.069.988,55	4.085.069.988,55	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	2.585.069.988,55	2.585.069.988,55	0,00	100,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	763.432.967.706,01	753.900.166.908,80	(9.532.800.797,21)	98,75	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.742.129.020,00	4.587.985.142,00	(154.143.878,00)	96,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.231.840.070,00	4.139.261.395,00	(92.578.675,00)	97,81	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.064.000,00	20.064.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	20.064.000,00	20.064.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.064.000,00	20.064.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.064.000,00	20.064.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.826.904.970,00	3.749.625.346,00	(77.279.624,00)	97,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.826.904.970,00	3.749.625.346,00	(77.279.624,00)	97,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.826.904.970,00	3.749.625.346,00	(77.279.624,00)	97,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.765.854.970,00	3.695.275.346,00	(70.579.624,00)	98,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.050.000,00	54.350.000,00	(6.700.000,00)	89,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	111.000.800,00	110.757.740,00	(243.060,00)	99,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.089.000,00	25.089.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.089.000,00	25.089.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.089.000,00	25.089.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	16.328.000,00	16.308.000,00	(20.000,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.328.000,00	16.308.000,00	(20.000,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.328.000,00	16.308.000,00	(20.000,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.131.700,00	8.129.000,00	(2.700,00)	99,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.131.700,00	8.129.000,00	(2.700,00)	99,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.131.700,00	8.129.000,00	(2.700,00)	99,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	54.465.100,00	54.244.740,00	(220.360,00)	99,59	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	54.465.100,00	54.244.740,00	(220.360,00)	99,59	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.465.100,00	54.244.740,00	(220.360,00)	99,59	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	235.731.800,00	221.398.129,00	(14.333.671,00)	93,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	53.022.000,00	48.242.479,00	(4.779.521,00)	90,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.022.000,00	48.242.479,00	(4.779.521,00)	90,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.022.000,00	48.242.479,00	(4.779.521,00)	90,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	179.609.800,00	170.055.650,00	(9.554.150,00)	94,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	179.609.800,00	170.055.650,00	(9.554.150,00)	94,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.609.800,00	170.055.650,00	(9.554.150,00)	94,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	38.138.500,00	37.416.180,00	(722.320,00)	98,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	13.100.000,00	13.098.580,00	(1.420,00)	99,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.100.000,00	13.098.580,00	(1.420,00)	99,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	13.098.580,00	(1.420,00)	99,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	21.500.000,00	20.787.600,00	(712.400,00)	96,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.500.000,00	20.787.600,00	(712.400,00)	96,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	20.787.600,00	(712.400,00)	96,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.538.500,00	3.530.000,00	(8.500,00)	99,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.538.500,00	3.530.000,00	(8.500,00)	99,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.538.500,00	3.530.000,00	(8.500,00)	99,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.3.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	510.288.950,00	448.723.747,00	(61.565.203,00)	87,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	89.174.550,00	88.814.154,00	(360.396,00)	99,59	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	9.736.000,00	9.714.900,00	(21.100,00)	99,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.736.000,00	9.714.900,00	(21.100,00)	99,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.736.000,00	9.714.900,00	(21.100,00)	99,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003		KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	64.551.550,00	64.438.454,00	(113.096,00)	99,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	64.551.550,00	64.438.454,00	(113.096,00)	99,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.551.550,00	64.438.454,00	(113.096,00)	99,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	9.445.000,00	9.281.800,00	(163.200,00)	98,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	9.445.000,00	9.281.800,00	(163.200,00)	98,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.445.000,00	9.281.800,00	(163.200,00)	98,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011		PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	5.442.000,00	5.379.000,00	(63.000,00)	98,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.442.000,00	5.379.000,00	(63.000,00)	98,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.442.000,00	5.379.000,00	(63.000,00)	98,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	8.640.000,00	8.635.000,00	(5.000,00)	99,94	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	5.445.000,00	5.440.000,00	(5.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.445.000,00	5.440.000,00	(5.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.445.000,00	5.440.000,00	(5.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	358.816.150,00	299.643.003,00	(59.173.147,00)	83,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	20.564.650,00	20.496.800,00	(67.850,00)	99,67	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.564.650,00	20.496.800,00	(67.850,00)	99,67	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.564.650,00	20.496.800,00	(67.850,00)	99,67	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002		PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER	270.585.800,00	225.980.603,00	(44.605.197,00)	83,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	270.585.800,00	225.980.603,00	(44.605.197,00)	83,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.585.800,00	225.980.603,00	(44.605.197,00)	83,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0003		PENGELOAAN ADMINISTRASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI ASN	67.665.700,00	53.165.600,00	(14.500.100,00)	78,57	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	67.665.700,00	53.165.600,00	(14.500.100,00)	78,57	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.665.700,00	53.165.600,00	(14.500.100,00)	78,57	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	53.658.250,00	51 631.590,00	(2.026.660,00)	96,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002		PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	3.212.750,00	3.203.600,00	(9.150,00)	99,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.212.750,00	3.203.600,00	(9.150,00)	99,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.212.750,00	3.203.600,00	(9.150,00)	99,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004		PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	8.678.000,00	8.332.000,00	(346.000,00)	96,01	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.678.000,00	8.332.000,00	(346.000,00)	96,01	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.678.000,00	8.332.000,00	(346.000,00)	96,01	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008		PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	41.767.500,00	40.095.990,00	(1.671.510,00)	95,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	41.767.500,00	40.095.990,00	(1.671.510,00)	95,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.767.500,00	40.095.990,00	(1.671.510,00)	95,99	
				JUMLAH BELANJA	4.742.129.020,00	4.587.985.142,00	(154.143.878,00)	96,74	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.742.129.020,00)	(4.587.985.142,00)	154.143.878,00	96,74	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.742.129.020,00)	(4.587.985.142,00)	154.143.878,00	96,74	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	545.322.400,00	544.759.672,00	(562.728,00)	99,89	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.4.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	545.322.400,00	544.759.672,00	(562.728,00)	99,89	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01		PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0001		PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02		SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	544.002.400,00	543.439.672,00	(562.728,00)	99,89	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	544.002.400,00	543.439.672,00	(562.728,00)	99,89	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	544.002.400,00	543.439.672,00	(562.728,00)	99,89	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.002.400,00	543.439.672,00	(562.728,00)	99,89	
				JUMLAH BELANJA	545.322.400,00	544.759.672,00	(562.728,00)	99,89	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(545.322.400,00)	(544.759.672,00)	562.728,00	99,89	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(545.322.400,00)	(544.759.672,00)	562.728,00	99,89	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	205.000.000,00	192.140.271,00	(12.859.729,00)	93,72	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.5.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	205.000.000,00	192.140.271,00	(12.859.729,00)	93,72	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	192.415.100,00	179.711.871,00	(12.703.229,00)	93,39	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0013		PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN	192.415.100,00	179.711.871,00	(12.703.229,00)	93,39	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	192.415.100,00	179.711.871,00	(12.703.229,00)	93,39	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.415.100,00	179.711.871,00	(12.703.229,00)	93,39	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	12.584.900,00	12.428.400,00	(156.500,00)	98,75	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001		PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	12.584.900,00	12.428.400,00	(156.500,00)	98,75	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.584.900,00	12.428.400,00	(156.500,00)	98,75	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.584.900,00	12.428.400,00	(156.500,00)	98,75	
				JUMLAH BELANJA	205.000.000,00	192.140.271,00	(12.859.729,00)	93,72	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(205.000.000,00)	(192.140.271,00)	12.859.729,00	93,72	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(205.000.000,00)	(192.140.271,00)	12.859.729,00	93,72	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Inspektorat Kabupaten

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.01	5	BELANJA DAERAH	6.486.094.838,00	5.958.367.966,00	(527.726.872,00)	91,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.234.849.838,00	4.856.631.160,00	(378.218.678,00)	92,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	36.674.500,00	23.992.590,00	(12.681.910,00)	65,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	36.674.500,00	23.992.590,00	(12.681.910,00)	65,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.674.500,00	23.992.590,00	(12.681.910,00)	65,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.674.500,00	23.992.590,00	(12.681.910,00)	65,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.104.087.738,00	4.027.628.742,00	(76.458.996,00)	98,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.104.087.738,00	4.027.628.742,00	(76.458.996,00)	98,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.104.087.738,00	4.027.628.742,00	(76.458.996,00)	98,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.036.987.738,00	3.983.378.742,00	(53.608.996,00)	98,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.100.000,00	44.250.000,00	(22.850.000,00)	65,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	306.150.000,00	193.783.278,00	(112.366.722,00)	63,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	306.150.000,00	193.783.278,00	(112.366.722,00)	63,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	306.150.000,00	193.783.278,00	(112.366.722,00)	63,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.150.000,00	193.783.278,00	(112.366.722,00)	63,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	313.732.000,00	265.793.164,00	(47.938.836,00)	84,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.380.000,00	5.474.000,00	(906.000,00)	85,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.380.000,00	5.474.000,00	(906.000,00)	85,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	5.474.000,00	(906.000,00)	85,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	43.162.000,00	37.439.218,00	(5.722.782,00)	86,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.162.000,00	37.439.218,00	(5.722.782,00)	86,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.162.000,00	37.439.218,00	(5.722.782,00)	86,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	24.039.000,00	9.119.000,00	(14.920.000,00)	37,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.839.000,00	8.134.000,00	(2.705.000,00)	75,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.839.000,00	8.134.000,00	(2.705.000,00)	75,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	13.200.000,00	985.000,00	(12.215.000,00)	7,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.200.000,00	985.000,00	(12.215.000,00)	7,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	18.496.000,00	15.758.000,00	(2.738.000,00)	85,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.496.000,00	15.758.000,00	(2.738.000,00)	85,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.496.000,00	15.758.000,00	(2.738.000,00)	85,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	7.705.888,00	(2.294.112,00)	77,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	7.705.888,00	(2.294.112,00)	77,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.705.888,00	(2.294.112,00)	77,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	211.655.000,00	190.297.058,00	(21.357.942,00)	89,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	211.655.000,00	190.297.058,00	(21.357.942,00)	89,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.655.000,00	190.297.058,00	(21.357.942,00)	89,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	77.900.000,00	4.225.888,00	(73.674.112,00)	5,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	6.300.000,00	4.225.888,00	(2.074.112,00)	67,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	4.225.888,00	(2.074.112,00)	67,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	4.225.888,00	(2.074.112,00)	67,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	71.600.000,00	0,00	(71.600.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	71.600.000,00	0,00	(71.600.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.600.000,00	0,00	(71.600.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	292.105.600,00	276.780.351,00	(15.325.249,00)	94,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	108.887.600,00	102.728.751,00	(6.158.849,00)	94,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	108.887.600,00	102.728.751,00	(6.158.849,00)	94,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.887.600,00	102.728.751,00	(6.158.849,00)	94,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	181.218.000,00	172.051.600,00	(9.166.400,00)	94,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	181.218.000,00	172.051.600,00	(9.166.400,00)	94,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.218.000,00	172.051.600,00	(9.166.400,00)	94,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	104.200.000,00	64.427.147,00	(39.772.853,00)	61,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	12.500.000,00	10.881.345,00	(1.618.655,00)	87,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	10.881.345,00	(1.618.655,00)	87,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	10.881.345,00	(1.618.655,00)	87,05	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	64.500.000,00	34.351.202,00	(30.148.798,00)	53,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.500.000,00	34.351.202,00	(30.148.798,00)	53,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	34.351.202,00	(30.148.798,00)	53,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	27.200.000,00	19.194.600,00	(8.005.400,00)	70,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.200.000,00	19.194.600,00	(8.005.400,00)	70,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	19.194.600,00	(8.005.400,00)	70,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.077.624.200,00	973.320.950,00	(104.303.250,00)	90,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	858.500.050,00	787.428.300,00	(71.071.750,00)	91,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	129.149.850,00	113.495.200,00	(15.654.650,00)	87,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	129.149.850,00	113.495.200,00	(15.654.650,00)	87,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.149.850,00	113.495.200,00	(15.654.650,00)	87,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	107.788.800,00	107.386.600,00	(402.200,00)	99,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	107.788.800,00	107.386.600,00	(402.200,00)	99,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.788.800,00	107.386.600,00	(402.200,00)	99,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	142.556.250,00	141.427.750,00	(1.128.500,00)	99,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	142.556.250,00	141.427.750,00	(1.128.500,00)	99,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.556.250,00	141.427.750,00	(1.128.500,00)	99,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	96.595.450,00	95.060.000,00	(1.535.450,00)	98,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	96.595.450,00	95.060.000,00	(1.535.450,00)	98,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.595.450,00	95.060.000,00	(1.535.450,00)	98,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005		PENGAWASAN DESA	75.409.900,00	69.905.400,00	(5.504.500,00)	92,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	75.409.900,00	69.905.400,00	(5.504.500,00)	92,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.409.900,00	69.905.400,00	(5.504.500,00)	92,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006		KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL	157.216.850,00	118.994.800,00	(38.222.050,00)	75,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	157.216.850,00	118.994.800,00	(38.222.050,00)	75,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.216.850,00	118.994.800,00	(38.222.050,00)	75,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL	149.782.950,00	141.158.550,00	(8.624.400,00)	94,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	149.782.950,00	141.158.550,00	(8.624.400,00)	94,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.782.950,00	141.158.550,00	(8.624.400,00)	94,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	219.124.150,00	185.892.650,00	(33.231.500,00)	84,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	64.691.650,00	53.746.700,00	(10.944.950,00)	83,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.691.650,00	53.746.700,00	(10.944.950,00)	83,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.691.650,00	53.746.700,00	(10.944.950,00)	83,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	154.432.500,00	132.145.950,00	(22.286.550,00)	85,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	154.432.500,00	132.145.950,00	(22.286.550,00)	85,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.432.500,00	132.145.950,00	(22.286.550,00)	85,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	173.620.800,00	128.415.856,00	(45.204.944,00)	73,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	23.291.650,00	22.361.652,00	(929.998,00)	96,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN	23.291.650,00	22.361.652,00	(929.998,00)	96,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.291.650,00	22.361.652,00	(929.998,00)	96,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.291.650,00	22.361.652,00	(929.998,00)	96,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	150.329.150,00	106.054.204,00	(44.274.946,00)	70,54	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	55.575.000,00	43.170.404,00	(12.404.596,00)	77,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.575.000,00	43.170.404,00	(12.404.596,00)	77,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.575.000,00	43.170.404,00	(12.404.596,00)	77,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	30.919.000,00	23.865.200,00	(7.053.800,00)	77,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.919.000,00	23.865.200,00	(7.053.800,00)	77,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.919.000,00	23.865.200,00	(7.053.800,00)	77,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	63.835.150,00	39.018.600,00	(24.816.550,00)	61,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	63.835.150,00	39.018.600,00	(24.816.550,00)	61,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.835.150,00	39.018.600,00	(24.816.550,00)	61,12	
				JUMLAH BELANJA	6.486.094.838,00	5.958.367.966,00	(527.726.872,00)	91,86	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.486.094.838,00)	(5.958.367.966,00)	527.726.872,00	91,86	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.486.094.838,00)	(5.958.367.966,00)	527.726.872,00	91,86	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Pulau Punjung

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	7.01.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
	7.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.116.292.429,00	2.054.792.411,00	(61.500.018,00)	97,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.104.692.429,00	2.043.192.411,00	(61.500.018,00)	97,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.898.530.869,00	1.847.207.189,00	(51.323.680,00)	97,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.898.530.869,00	1.847.207.189,00	(51.323.680,00)	97,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.898.530.869,00	1.847.207.189,00	(51.323.680,00)	97,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.861.680.869,00	1.814.757.189,00	(46.923.680,00)	97,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.850.000,00	32.450.000,00	(4.400.000,00)	88,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	58.072.500,00	57.692.200,00	(380.300,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	987.000,00	940.000,00	(47.000,00)	95,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	987.000,00	940.000,00	(47.000,00)	95,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	987.000,00	940.000,00	(47.000,00)	95,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.000.000,00	7.908.000,00	(92.000,00)	98,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.908.000,00	(92.000,00)	98,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.908.000,00	(92.000,00)	98,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.224.000,00	3.148.000,00	(76.000,00)	97,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.224.000,00	3.148.000,00	(76.000,00)	97,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.224.000,00	3.148.000,00	(76.000,00)	97,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.298.500,00	5.298.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.298.500,00	5.298.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.298.500,00	5.298.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	25.583.000,00	25.417.700,00	(165.300,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.583.000,00	25.417.700,00	(165.300,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.583.000,00	25.417.700,00	(165.300,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	129.089.060,00	119.914.722,00	(9.174.338,00)	92,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.500.260,00	9.451.572,00	(48.688,00)	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.500.260,00	9.451.572,00	(48.688,00)	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.260,00	9.451.572,00	(48.688,00)	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.830.000,00	3.780.000,00	(50.000,00)	98,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.830.000,00	3.780.000,00	(50.000,00)	98,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.830.000,00	3.780.000,00	(50.000,00)	98,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	113.758.800,00	104.683.150,00	(9.075.650,00)	92,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	113.758.800,00	104.683.150,00	(9.075.650,00)	92,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.758.800,00	104.683.150,00	(9.075.650,00)	92,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19.000.000,00	18.378.300,00	(621.700,00)	96,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2 09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	5.000.000,00	4.378.300,00	(621.700,00)	87,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.378.300,00	(621.700,00)	87,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.378.300,00	(621.700,00)	87,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.116.292.429,00	2.054.792.411,00	(61.500.018,00)	97,09	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.113.292.429,00)	(2.051.792.411,00)	61.500.018,00	97,08	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.113.292.429,00)	(2.051.792.411,00)	61.500.018,00	97,08	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Sitiung

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	7.01.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
	7.01.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
	7.01.0.00.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	1.898.247.255,00	1.853.476.012,00	(44.771.243,00)	97,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.887.362.255,00	1.842.912.012,00	(44.450.243,00)	97,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.704.162.860,00	1.660.987.875,00	(43.174.985,00)	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.704.162.860,00	1.660.987.875,00	(43.174.985,00)	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.704.162.860,00	1.660.987.875,00	(43.174.985,00)	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.667.312.860,00	1.628.537.875,00	(38.774.985,00)	97,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.850.000,00	32.450.000,00	(4.400.000,00)	88,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	58.655.000,00	58.515.800,00	(139.200,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.344.000,00	1.341.000,00	(3.000,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.344.000,00	1.341.000,00	(3.000,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.344.000,00	1.341.000,00	(3.000,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.623.000,00	7.620.000,00	(3.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.623.000,00	7.620.000,00	(3.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.623.000,00	7.620.000,00	(3.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.679.000,00	1.677.000,00	(2.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.679.000,00	1.677.000,00	(2.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.679.000,00	1.677.000,00	(2.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	7.470.000,00	7.450.000,00	(20.000,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.470.000,00	7.450.000,00	(20.000,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.470.000,00	7.450.000,00	(20.000,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.650.300,00	3.650.000,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.650.300,00	3.650.000,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.300,00	3.650.000,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	36.888.700,00	36.777.800,00	(110.900,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	36.888.700,00	36.777.800,00	(110.900,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.888.700,00	36.777.800,00	(110.900,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	102.214.395,00	101.733.200,00	(481.195,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.125.195,00	7.104.000,00	(21.195,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.125.195,00	7.104.000,00	(21.195,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.125.195,00	7.104.000,00	(21.195,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	93.589.200,00	93.129.200,00	(460.000,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	93.589.200,00	93.129.200,00	(460.000,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.589.200,00	93.129.200,00	(460.000,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.330.000,00	21.675.137,00	(654.863,00)	97,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	14.000.000,00	13.479.437,00	(520.563,00)	96,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.479.437,00	(520.563,00)	96,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.479.437,00	(520.563,00)	96,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	5.000.000,00	4.865.700,00	(134.300,00)	97,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.865.700,00	(134.300,00)	97,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.865.700,00	(134.300,00)	97,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.050.000,00	980.000,00	(70.000,00)	93,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.050.000,00	980.000,00	(70.000,00)	93,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	1.050.000,00	980.000,00	(70.000,00)	93,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	980.000,00	(70.000,00)	93,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	980.000,00	(70.000,00)	93,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.312.500,00	2.256.800,00	(55.700,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	2.312.500,00	2.256.800,00	(55.700,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	2.312.500,00	2.256.800,00	(55.700,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.312.500,00	2.256.800,00	(55.700,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.312.500,00	2.256.800,00	(55.700,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.380.000,00	2.250.000,00	(130.000,00)	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	2.380.000,00	2.250.000,00	(130.000,00)	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.380.000,00	2.250.000,00	(130.000,00)	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.380.000,00	2.250.000,00	(130.000,00)	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	2.250.000,00	(130.000,00)	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.142.500,00	5.077.200,00	(65.300,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.142.500,00	5.077.200,00	(65.300,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	5.142.500,00	5.077.200,00	(65.300,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.142.500,00	5.077.200,00	(65.300,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.142.500,00	5.077.200,00	(65.300,00)	98,73	
				JUMLAH BELANJA	1.898.247.255,00	1.853.476.012,00	(44.771.243,00)	97,64	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.896.497.255,00)	(1.851.726.012,00)	44.771.243,00	97,63	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Koto Baru

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	7.01.0.00.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	112,50	
	7.01.0.00.0.00.03.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	112,50	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	112,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	1.928.089.411,00	1.873.883.513,00	(54.205.898,00)	97,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.914.839.411,00	1.860.653.513,00	(54.185.898,00)	97,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.673.275.861,00	1.577.618.380,00	(45.657.481,00)	97,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.623.275.861,00	1.577.618.380,00	(45.657.481,00)	97,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.623.275.861,00	1.577.618.380,00	(45.657.481,00)	97,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.586.425.861,00	1.545.168.380,00	(41.257.481,00)	97,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.850.000,00	32.450.000,00	(4.400.000,00)	88,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	61.452.750,00	61.170.200,00	(282.550,00)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	264.000,00	257.000,00	(7.000,00)	97,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	264.000,00	257.000,00	(7.000,00)	97,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.000,00	257.000,00	(7.000,00)	97,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.079.000,00	1.079.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.079.000,00	1.079.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.079.000,00	1.079.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	7.412.000,00	7.390.000,00	(22.000,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.412.000,00	7.390.000,00	(22.000,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.412.000,00	7.390.000,00	(22.000,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.124.000,00	7.124.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.124.000,00	7.124.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.124.000,00	7.124.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	45.573.750,00	45.320.200,00	(253.550,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.573.750,00	45.320.200,00	(253.550,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.573.750,00	45.320.200,00	(253.550,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	205.390.800,00	197.564.804,00	(7.825.996,00)	96,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.366.000,00	3.364.904,00	(1.096,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.366.000,00	3.364.904,00	(1.096,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.366.000,00	3.364.904,00	(1.096,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	200.224.800,00	192.399.900,00	(7.824.900,00)	96,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	200.224.800,00	192.399.900,00	(7.824.900,00)	96,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.224.800,00	192.399.900,00	(7.824.900,00)	96,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24.720.000,00	24.300.129,00	(419.871,00)	98,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	14.000.000,00	13.998.729,00	(1.271,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.998.729,00	(1.271,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.998.729,00	(1.271,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	6.500.000,00	6.081.400,00	(418.600,00)	93,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.081.400,00	(418.600,00)	93,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.081.400,00	(418.600,00)	93,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.250.000,00	13.230.000,00	(20.000,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	13.250.000,00	13.230.000,00	(20.000,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI	13.250.000,00	13.230.000,00	(20.000,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.250.000,00	13.230.000,00	(20.000,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	13.230.000,00	(20.000,00)	99,84	
				JUMLAH BELANJA	1.928.089.411,00	1.873.883.513,00	(54.205.898,00)	97,18	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.926.089.411,00)	(1.871.633.513,00)	54.455.898,00	97,17	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.926.089.411,00)	(1.871.633.513,00)	54.455.898,00	97,17	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Sungai Rumbai

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	7.01.0.00.0.00.04.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.900.000,00	7.768.000,00	3.868.000,00	199,17	
	7.01.0.00.0.00.04.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.900.000,00	7.768.000,00	3.868.000,00	199,17	
	7.01.0.00.0.00.04.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.900.000,00	7.768.000,00	3.868.000,00	199,17	
				JUMLAH PENDAPATAN	3.900.000,00	7.768.000,00	3.868.000,00	199,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	1.616.082.047,00	1.570.479.407,00	(45.602.640,00)	97,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.601.462.047,00	1.555.919.407,00	(45.542.640,00)	97,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.359.038.997,00	1.325.214.017,00	(33.824.980,00)	97,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.359.038.997,00	1.325.214.017,00	(33.824.980,00)	97,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.359.038.997,00	1.325.214.017,00	(33.824.980,00)	97,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.322.188.997,00	1.292.764.017,00	(29.424.980,00)	97,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.850.000,00	32.450.000,00	(4.400.000,00)	88,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.503.950,00	76.110.400,00	(4.393.550,00)	94,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.477.000,00	2.371.000,00	(106.000,00)	95,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.477.000,00	2.371.000,00	(106.000,00)	95,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.477.000,00	2.371.000,00	(106.000,00)	95,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.960.500,00	6.861.500,00	(99.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.960.500,00	6.861.500,00	(99.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.960.500,00	6.861.500,00	(99.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.791.000,00	1.787.000,00	(4.000,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.791.000,00	1.787.000,00	(4.000,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.791.000,00	1.787.000,00	(4.000,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	15.525.000,00	11.454.000,00	(4.071.000,00)	73,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.525.000,00	11.454.000,00	(4.071.000,00)	73,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.525.000,00	11.454.000,00	(4.071.000,00)	73,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.089.400,00	2.074.200,00	(15.200,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.089.400,00	2.074.200,00	(15.200,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.089.400,00	2.074.200,00	(15.200,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	51.661.050,00	51.562.700,00	(98.350,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	51.661.050,00	51.562.700,00	(98.350,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.661.050,00	51.562.700,00	(98.350,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	120.193.100,00	114.086.190,00	(6.106.910,00)	94,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.055.700,00	13.288.190,00	(767.510,00)	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.055.700,00	13.288.190,00	(767.510,00)	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.055.700,00	13.288.190,00	(767.510,00)	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	104.537.400,00	99.198.000,00	(5.339.400,00)	94,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	104.537.400,00	99.198.000,00	(5.339.400,00)	94,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.537.400,00	99.198.000,00	(5.339.400,00)	94,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	41.726.000,00	40.508.800,00	(1.217.200,00)	97,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	6.250.000,00	5.508.800,00	(741.200,00)	88,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.250.000,00	5.508.800,00	(741.200,00)	88,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	5.508.800,00	(741.200,00)	88,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	25.476.000,00	25.000.000,00	(476.000,00)	98,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.476.000,00	25.000.000,00	(476.000,00)	98,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.476.000,00	25.000.000,00	(476.000,00)	98,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0001		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.450.000,00	13.390.000,00	(60.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	13.450.000,00	13.390.000,00	(60.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	13.450.000,00	13.390.000,00	(60.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.450.000,00	13.390.000,00	(60.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.450.000,00	13.390.000,00	(60.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.616.082.047,00	1.570.479.407,00	(45.602.640,00)	97,17	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.612.182.047,00)	(1.562.711.407,00)	49.470.640,00	96,93	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.612.182.047,00)	(1.562.711.407,00)	49.470.640,00	96,93	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Sembilan Koto

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	7.01.0.00.0.00.05.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50	
	7.01.0.00.0.00.05.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50	
	7.01.0.00.0.00.05.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	1.245.340.431,00	1.202.069.515,00	(43.270.916,00)	96,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.241.106.431,00	1.198.069.515,00	(43.036.916,00)	96,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.014.315.176,00	982.004.458,00	(32.310.718,00)	96,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.014.315.176,00	982.004.458,00	(32.310.718,00)	96,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.014.315.176,00	982.004.458,00	(32.310.718,00)	96,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	977.465.176,00	949.554.458,00	(27.910.718,00)	97,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.850.000,00	32.450.000,00	(4.400.000,00)	88,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	63.716.000,00	63.449.000,00	(267.000,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	970.000,00	967.000,00	(3.000,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	970.000,00	967.000,00	(3.000,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	970.000,00	967.000,00	(3.000,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.752.000,00	6.748.000,00	(4.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.752.000,00	6.748.000,00	(4.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.752.000,00	6.748.000,00	(4.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.768.000,00	2.765.000,00	(3.000,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.768.000,00	2.765.000,00	(3.000,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.768.000,00	2.765.000,00	(3.000,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	10.363.000,00	10.215.000,00	(148.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.363.000,00	10.215.000,00	(148.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.363.000,00	10.215.000,00	(148.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.991.000,00	2.960.000,00	(31.000,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.991.000,00	2.960.000,00	(31.000,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.991.000,00	2.960.000,00	(31.000,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	39.872.000,00	39.794.000,00	(78.000,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	39.872.000,00	39.794.000,00	(78.000,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.872.000,00	39.794.000,00	(78.000,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	138.375.255,00	130.061.800,00	(8.313.455,00)	93,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.491.455,00	2.958.000,00	(533.455,00)	84,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.491.455,00	2.958.000,00	(533.455,00)	84,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.491.455,00	2.958.000,00	(533.455,00)	84,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	133.383.800,00	125.603.800,00	(7.780.000,00)	94,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	133.383.800,00	125.603.800,00	(7.780.000,00)	94,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.383.800,00	125.603.800,00	(7.780.000,00)	94,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24.700.000,00	22.554.257,00	(2.145.743,00)	91,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	3.700.000,00	1.565.000,00	(2.135.000,00)	42,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000,00	1.565.000,00	(2.135.000,00)	42,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	1.565.000,00	(2.135.000,00)	42,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	17.500.000,00	17.496.400,00	(3.600,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.496.400,00	(3.600,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.496.400,00	(3.600,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.500.000,00	3.492.857,00	(7.143,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.492.857,00	(7.143,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.492.857,00	(7.143,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.130.000,00	2.050.000,00	(80.000,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	2.130.000,00	2.050.000,00	(80.000,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	2.130.000,00	2.050.000,00	(80.000,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.130.000,00	2.050.000,00	(80.000,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.130.000,00	2.050.000,00	(80.000,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.084.000,00	960.000,00	(124.000,00)	88,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	1.084.000,00	960.000,00	(124.000,00)	88,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.084.000,00	960.000,00	(124.000,00)	88,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.084.000,00	960.000,00	(124.000,00)	88,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.084.000,00	960.000,00	(124.000,00)	88,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.020.000,00	990.000,00	(30.000,00)	97,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.020.000,00	990.000,00	(30.000,00)	97,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	1.020.000,00	990.000,00	(30.000,00)	97,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.020.000,00	990.000,00	(30.000,00)	97,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	990.000,00	(30.000,00)	97,05	
				JUMLAH BELANJA	1.245.340.431,00	1.202.069.515,00	(43.270.916,00)	96,52	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.243.340.431,00)	(1.200.819.515,00)	42.520.916,00	96,58	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.243.340.431,00)	(1.200.819.515,00)	42.520.916,00	96,58	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Timpeh

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	7.01.0.00.0.00.06.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.500.000,00	850.000,00	(1.650.000,00)	34,00	
	7.01.0.00.0.00.06.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.500.000,00	850.000,00	(1.650.000,00)	34,00	
	7.01.0.00.0.00.06.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000,00	850.000,00	(1.650.000,00)	34,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.500.000,00	850.000,00	(1.650.000,00)	34,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	1.282.898.250,00	1.150.382.108,00	(132.516.142,00)	89,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.282.898.250,00	1.150.382.108,00	(132.516.142,00)	89,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.044.778.630,00	967.007.208,00	(77.771.422,00)	92,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.044.778.630,00	967.007.208,00	(77.771.422,00)	92,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.044.778.630,00	967.007.208,00	(77.771.422,00)	92,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.008.478.630,00	936.707.208,00	(71.771.422,00)	92,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	30.300.000,00	(6.000.000,00)	83,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	70.596.350,00	70.026.200,00	(570.150,00)	99,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.225.000,00	1.142.000,00	(83.000,00)	93,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.225.000,00	1.142.000,00	(83.000,00)	93,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	1.142.000,00	(83.000,00)	93,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.128.500,00	10.124.450,00	(4.050,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.128.500,00	10.124.450,00	(4.050,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.128.500,00	10.124.450,00	(4.050,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.941.000,00	3.636.000,00	(305.000,00)	92,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.941.000,00	3.636.000,00	(305.000,00)	92,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.941.000,00	3.636.000,00	(305.000,00)	92,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.992.400,00	1.992.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.992.400,00	1.992.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.400,00	1.992.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	49.709.450,00	49.531.350,00	(178.100,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.709.450,00	49.531.350,00	(178.100,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.709.450,00	49.531.350,00	(178.100,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	146.523.270,00	96.060.100,00	(50.463.170,00)	65,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.039.470,00	6.930.000,00	(109.470,00)	98,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.039.470,00	6.930.000,00	(109.470,00)	98,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.039.470,00	6.930.000,00	(109.470,00)	98,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	137.983.800,00	87.630.100,00	(50.353.700,00)	63,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	137.983.800,00	87.630.100,00	(50.353.700,00)	63,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.983.800,00	87.630.100,00	(50.353.700,00)	63,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.000.000,00	17.288.600,00	(3.711.400,00)	82,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	12.500.000,00	12.119.000,00	(381.000,00)	96,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.119.000,00	(381.000,00)	96,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.119.000,00	(381.000,00)	96,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	6.000.000,00	3.474.600,00	(2.525.400,00)	57,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	3.474.600,00	(2.525.400,00)	57,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.474.600,00	(2.525.400,00)	57,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.500.000,00	1.695.000,00	(805.000,00)	67,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	1.695.000,00	(805.000,00)	67,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.695.000,00	(805.000,00)	67,80	
				JUMLAH BELANJA	1.282.898.250,00	1.150.382.108,00	(132.516.142,00)	89,67	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.280.398.250,00)	(1.149.532.108,00)	130.866.142,00	89,77	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.280.398.250,00)	(1.149.532.108,00)	130.866.142,00	89,77	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Koto Salak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		5	BELANJA DAERAH	1.198.909.454,00	1.161.300.501,00	(37.608.953,00)	96,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.187.219.454,00	1.149.610.501,00	(37.608.953,00)	96,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	990.557.104,00	957.847.335,00	(32.709.769,00)	96,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	990.557.104,00	957.847.335,00	(32.709.769,00)	96,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	990.557.104,00	957.847.335,00	(32.709.769,00)	96,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	955.907.104,00	927.597.335,00	(28.309.769,00)	97,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.650.000,00	30.250.000,00	(4.400.000,00)	87,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	58.776.950,00	57.312.554,00	(1.464.396,00)	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	894.000,00	894.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	894.000,00	894.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	894.000,00	894.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.655.000,00	6.325.000,00	(330.000,00)	95,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.655.000,00	6.325.000,00	(330.000,00)	95,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.655.000,00	6.325.000,00	(330.000,00)	95,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.538.000,00	3.536.000,00	(2.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.538.000,00	3.536.000,00	(2.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.538.000,00	3.536.000,00	(2.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	8.078.000,00	7.160.000,00	(918.000,00)	88,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.078.000,00	7.160.000,00	(918.000,00)	88,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.078.000,00	7.160.000,00	(918.000,00)	88,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.722.300,00	2.722.204,00	(96,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.722.300,00	2.722.204,00	(96,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.722.300,00	2.722.204,00	(96,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	36.889.650,00	36.675.350,00	(214.300,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	36.889.650,00	36.675.350,00	(214.300,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.889.650,00	36.675.350,00	(214.300,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	114.915.400,00	113.479.712,00	(1.435.688,00)	98,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.488.000,00	4.482.312,00	(5.688,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.488.000,00	4.482.312,00	(5.688,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.488.000,00	4.482.312,00	(5.688,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	109.427.400,00	107.997.400,00	(1.430.000,00)	98,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	109.427.400,00	107.997.400,00	(1.430.000,00)	98,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.427.400,00	107.997.400,00	(1.430.000,00)	98,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.970.000,00	20.970.900,00	(1.999.100,00)	91,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	14.000.000,00	13.230.000,00	(770.000,00)	94,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.230.000,00	(770.000,00)	94,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.230.000,00	(770.000,00)	94,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	5.750.000,00	4.630.900,00	(1.119.100,00)	80,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.750.000,00	4.630.900,00	(1.119.100,00)	80,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	4.630.900,00	(1.119.100,00)	80,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.220.000,00	3.110.000,00	(110.000,00)	96,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.220.000,00	3.110.000,00	(110.000,00)	96,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	3.110.000,00	(110.000,00)	96,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0001		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.198.909.454,00	1.161.300.501,00	(37.608.953,00)	96,86	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.198.909.454,00)	(1.161.300.501,00)	37.608.953,00	96,86	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.198.909.454,00)	(1.161.300.501,00)	37.608.953,00	96,86	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Asam Jujuhan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	1.179.195.026,00	1.121.488.984,00	(57.706.042,00)	95,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.166.365.026,00	1.108.658.984,00	(57.706.042,00)	95,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	923.060.076,00	872.360.084,00	(50.699.992,00)	94,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	923.060.076,00	872.360.084,00	(50.699.992,00)	94,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	923.060.076,00	872.360.084,00	(50.699.992,00)	94,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	888.410.076,00	842.360.084,00	(46.049.992,00)	94,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.650.000,00	30.000.000,00	(4.650.000,00)	86,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	85.900.600,00	85.664.800,00	(235.800,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	13.005.000,00	13.005.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.005.000,00	13.005.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.005.000,00	13.005.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.848.000,00	10.848.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.848.000,00	10.848.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.848.000,00	10.848.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	56.353.600,00	56.117.800,00	(235.800,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	56.353.600,00	56.117.800,00	(235.800,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.353.600,00	56.117.800,00	(235.800,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	133.654.350,00	127.182.600,00	(6.471.750,00)	95,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.908.750,00	4.877.000,00	(31.750,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.908.750,00	4.877.000,00	(31.750,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.908.750,00	4.877.000,00	(31.750,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	127.045.600,00	120.605.600,00	(6.440.000,00)	94,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	127.045.600,00	120.605.600,00	(6.440.000,00)	94,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.045.600,00	120.605.600,00	(6.440.000,00)	94,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.750.000,00	23.451.500,00	(298.500,00)	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	16.500.000,00	16.392.900,00	(107.100,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	16.392.900,00	(107.100,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.392.900,00	(107.100,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	5.250.000,00	5.058.600,00	(191.400,00)	96,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.058.600,00	(191.400,00)	96,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.058.600,00	(191.400,00)	96,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.179.195.026,00	1.121.488.984,00	(57.706.042,00)	95,10	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.179.195.026,00)	(1.121.488.984,00)	57.706.042,00	95,10	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.179.195.026,00)	(1 121.488.984,00)	57.706.042,00	95,10	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Koto Besar

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	7.01.0.00.0.00.09.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50	
	7.01.0.00.0.00.09.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50	
	7.01.0.00.0.00.09.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	1.844.464.792,00	1.796.343.963,00	(48.120.829,00)	97,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.831.964.792,00	1.783.843.963,00	(48.120.829,00)	97,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.545.481.242,00	1.501.780.094,00	(43.701.148,00)	97,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.545.481.242,00	1.501.780.094,00	(43.701.148,00)	97,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.545.481.242,00	1.501.780.094,00	(43.701.148,00)	97,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.508.631.242,00	1.469.330.094,00	(39.301.148,00)	97,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.850.000,00	32.450.000,00	(4.400.000,00)	88,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	94.459.750,00	94.283.050,00	(176.700,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.686.000,00	1.686.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.686.000,00	1.686.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.686.000,00	1.686.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.433.500,00	9.433.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.433.500,00	9.433.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.433.500,00	9.433.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	9.576.000,00	9.576.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.576.000,00	9.576.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.576.000,00	9.576.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	21.980.000,00	21.980.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.980.000,00	21.980.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.980.000,00	21.980.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.500.600,00	6.500.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.600,00	6.500.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.600,00	6.500.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	45.283.650,00	45.106.950,00	(176.700,00)	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.283.650,00	45.106.950,00	(176.700,00)	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.283.650,00	45.106.950,00	(176.700,00)	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	171.773.800,00	167.671.350,00	(4.102.450,00)	97,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.133.600,00	9.121.000,00	(12.600,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.133.600,00	9.121.000,00	(12.600,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.133.600,00	9.121.000,00	(12.600,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	161.140.200,00	157.050.350,00	(4.089.850,00)	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	161.140.200,00	157.050.350,00	(4.089.850,00)	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.140.200,00	157.050.350,00	(4.089.850,00)	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.250.000,00	20.109.469,00	(140.531,00)	99,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	14.000.000,00	13.999.869,00	(131,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.999.869,00	(131,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.999.869,00	(131,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	3.250.000,00	3.109.600,00	(140.400,00)	95,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.250.000,00	3.109.600,00	(140.400,00)	95,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.109.600,00	(140.400,00)	95,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01 02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.844.464.792,00	1.796.343.963,00	(48.120.829,00)	97,39	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.842.464.792,00)	(1.795.093.963,00)	47.370.829,00	97,42	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.842.464.792,00)	(1.795.093.963,00)	47.370.829,00	97,42	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Padang Laweh

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	1.161.290.702,00	1.118.301.214,00	(42.989.488,00)	96,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.144.381.702,00	1.101.392.214,00	(42.989.488,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	943.306.002,00	907.926.214,00	(35.379.788,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	943.306.002,00	907.926.214,00	(35.379.788,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	943.306.002,00	907.926.214,00	(35.379.788,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	908.656.002,00	877.676.214,00	(30.979.788,00)	96,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.650.000,00	30.250.000,00	(4.400.000,00)	87,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	68.697.900,00	68.203.300,00	(494.600,00)	99,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.606.000,00	6.606.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.606.000,00	6.606.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.606.000,00	6.606.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.678.000,00	6.678.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.678.000,00	6.678.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.678.000,00	6.678.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	6.000.000,00	5.880.000,00	(120.000,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.880.000,00	(120.000,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.880.000,00	(120.000,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.571.200,00	4.571.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.571.200,00	4.571.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.571.200,00	4.571.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	43.787.700,00	43.413.100,00	(374.600,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	43.787.700,00	43.413.100,00	(374.600,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.787.700,00	43.413.100,00	(374.600,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	110.127.800,00	103.100.400,00	(7.027.400,00)	93,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	510.400,00	503.000,00	(7.400,00)	98,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	510.400,00	503.000,00	(7.400,00)	98,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.400,00	503.000,00	(7.400,00)	98,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	107.617.400,00	100.597.400,00	(7.020.000,00)	93,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	107.617.400,00	100.597.400,00	(7.020.000,00)	93,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.617.400,00	100.597.400,00	(7.020.000,00)	93,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.250.000,00	22.162.300,00	(87.700,00)	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU	16.000.000,00	15.948.600,00	(51.400,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.948.600,00	(51.400,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.948.600,00	(51.400,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	4.750.000,00	4.713.700,00	(36.300,00)	99,23	

7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.750.000,00	4.713.700,00	(36.300,00)	99,23
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.713.700,00	(36.300,00)	99,23
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0001		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	100,00
				JUMLAH BELANJA	1.161.290.702,00	1.118.301.214,00	(42.989.488,00)	96,29
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.161.290.702,00)	(1.118.301.214,00)	42.989.488,00	96,29
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.161.290.702,00)	(1.118.301.214,00)	42.989.488,00	96,29

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tiumang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	1.441.693.694,00	1.401.405.143,00	(40.288.551,00)	97,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.426.593.694,00	1.386.305.143,00	(40.288.551,00)	97,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.147.659.144,00	1.118.943.123,00	(28.716.021,00)	97,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.147.659.144,00	1.118.943.123,00	(28.716.021,00)	97,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.147.659.144,00	1.118.943.123,00	(28.716.021,00)	97,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.113.009.144,00	1.088.693.123,00	(24.316.021,00)	97,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.650.000,00	30.250.000,00	(4.400.000,00)	87,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	79.380.500,00	79.187.950,00	(192.550,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.804.000,00	8.804.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.804.000,00	8.804.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.804.000,00	8.804.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.107.500,00	4.107.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.107.500,00	4.107.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.107.500,00	4.107.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2 06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.297.300,00	5.297.300,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.297.300,00	5.297.300,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.297.300,00	5.297.300,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	47.011.700,00	46.819.150,00	(192.550,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	47.011.700,00	46.819.150,00	(192.550,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.011.700,00	46.819.150,00	(192.550,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	175.224.050,00	165.720.470,00	(9.503.580,00)	94,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.535.650,00	6.290.270,00	(245.380,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.535.650,00	6.290.270,00	(245.380,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.535.650,00	6.290.270,00	(245.380,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	167.688.400,00	158.430.200,00	(9.258.200,00)	94,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	167.688.400,00	158.430.200,00	(9.258.200,00)	94,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.688.400,00	158.430.200,00	(9.258.200,00)	94,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24.330.000,00	22.453.600,00	(1.876.400,00)	92,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU	14.000.000,00	13.453.600,00	(546.400,00)	96,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.453.600,00	(546.400,00)	96,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.453.600,00	(546.400,00)	96,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	83,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	83,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	83,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.330.000,00	4.000.000,00	(330.000,00)	92,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.330.000,00	4.000.000,00	(330.000,00)	92,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.330.000,00	4.000.000,00	(330.000,00)	92,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.441.693.694,00	1.401.405.143,00	(40.288.551,00)	97,20	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.441.693.694,00)	(1.401.405.143,00)	40.288.551,00	97,20	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.441.693.694,00)	(1.401.405.143,00)	40.288.551,00	97,20	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.880.758.603,00	3.732.793.386,00	(147.965.217,00)	96,18	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.519.946.718,00	1.472.051.323,00	(47.895.395,00)	96,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.163.323.133,00	1.125.178.144,00	(38.144.989,00)	96,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001		PENYELENGGARAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.163.323.133,00	1.125.178.144,00	(38.144.989,00)	96,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.163.323.133,00	1.125.178.144,00	(38.144.989,00)	96,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.109.973.133,00	1.072.928.144,00	(37.044.989,00)	96,66	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.350.000,00	52.250.000,00	(1.100.000,00)	97,93	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	87.672.800,00	84.420.600,00	(3.252.200,00)	96,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.112.250,00	2.112.250,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.112.250,00	2.112.250,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.112.250,00	2.112.250,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.542.000,00	17.542.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.542.000,00	17.542.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.542.000,00	17.542.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.221.000,00	4.221.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.221.000,00	4.221.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.221.000,00	4.221.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	14.484.000,00	14.484.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.484.000,00	14.484.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.484.000,00	14.484.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.598.500,00	9.598.500,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.598.500,00	9.598.500,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.598.500,00	9.598.500,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	39.715.050,00	36.462.850,00	(3.252.200,00)	91,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	39.715.050,00	36.462.850,00	(3.252.200,00)	91,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.715.050,00	36.462.850,00	(3.252.200,00)	91,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	18.000.000,00	17.929.500,00	(70.500,00)	99,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	12.000.000,00	11.991.000,00	(9.000,00)	99,92	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	11.991.000,00	(9.000,00)	99,92	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	11.991.000,00	(9.000,00)	99,92	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.000.000,00	5.938.500,00	(61.500,00)	98,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	5.938.500,00	(61.500,00)	98,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	5.938.500,00	(61.500,00)	98,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	108.930.785,00	103.320.009,00	(5.610.776,00)	94,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.110.585,00	11.941.109,00	(4.169.476,00)	74,11	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.110.585,00	11.941.109,00	(4.169.476,00)	74,11	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.110.585,00	11.941.109,00	(4.169.476,00)	74,11	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	90.320.200,00	88.878.900,00	(1.441.300,00)	98,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	90.320.200,00	88.878.900,00	(1.441.300,00)	98,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	90.320.200,00	88.878.900,00	(1.441.300,00)	98,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	142.020.000,00	141.203.070,00	(816.930,00)	99,42	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	1.997.100,00	(502.900,00)	79,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.997.100,00	(502.900,00)	79,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU	2.500.000,00	1.997.100,00	(502.900,00)	79,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	32.910.000,00	(90.000,00)	99,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	32.910.000,00	(90.000,00)	99,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	33.000.000,00	32.910.000,00	(90.000,00)	99,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.220.000,00	6.200.000,00	(20.000,00)	99,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	6.200.000,00	(20.000,00)	99,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	6.220.000,00	6.200.000,00	(20.000,00)	99,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	100.300.000,00	100.095.970,00	(204.030,00)	99,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.300.000,00	100.095.970,00	(204.030,00)	99,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100.300.000,00	100.095.970,00	(204.030,00)	99,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	880.917.000,00	852.963.478,00	(27.953.522,00)	96,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	880.917.000,00	852.963.478,00	(27.953.522,00)	96,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.590.750,00	31.157.400,00	(10.433.350,00)	74,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.590.750,00	31.157.400,00	(10.433.350,00)	74,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	41.590.750,00	31.157.400,00	(10.433.350,00)	74,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.878.400,00	13.584.700,00	(5.293.700,00)	71,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.878.400,00	13.584.700,00	(5.293.700,00)	71,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008		PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	18.878.400,00	13.584.700,00	(5.293.700,00)	71,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	820.447.850,00	808.221.378,00	(12.226.472,00)	98,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	820.447.850,00	808.221.378,00	(12.226.472,00)	98,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	820.447.850,00	808.221.378,00	(12.226.472,00)	98,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	1.156.714.435,00	1.155.482.685,00	(1.231.750,00)	99,89	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	1.156.714.435,00	1.155.482.685,00	(1.231.750,00)	99,89	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.156.714.435,00	1.155.482.685,00	(1.231.750,00)	99,89	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.749.150,00	38.537.400,00	(1.211.750,00)	96,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	1.116.965.285,00	1.116.945.285,00	(20.000,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5.410.500,00	4.152.200,00	(1.258.300,00)	76,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	5.410.500,00	4.152.200,00	(1.258.300,00)	76,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	5.410.500,00	4.152.200,00	(1.258.300,00)	76,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.410.500,00	4.152.200,00	(1.258.300,00)	76,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.410.500,00	4.152.200,00	(1.258.300,00)	76,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	105.538.650,00	94.996.400,00	(10.542.250,00)	90,01	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	105.538.650,00	94.996.400,00	(10.542.250,00)	90,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	89.891.300,00	79.630.900,00	(10.260.400,00)	88,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	89.891.300,00	79.630.900,00	(10.260.400,00)	88,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.891.300,00	79.630.900,00	(10.260.400,00)	88,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	15.647.350,00	15.365.500,00	(281.850,00)	98,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.647.350,00	15.365.500,00	(281.850,00)	98,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.647.350,00	15.365.500,00	(281.850,00)	98,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.06		FROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	212.231.300,00	153.147.300,00	(59.084.000,00)	72,16	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	212.231.300,00	153.147.300,00	(59.084.000,00)	72,16	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	197.672.300,00	142.688.800,00	(54.983.500,00)	72,18	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	197.672.300,00	142.688.800,00	(54.983.500,00)	72,18	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.672.300,00	142.688.800,00	(54.983.500,00)	72,18	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	14.559.000,00	10.458.500,00	(4.100.500,00)	71,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.559.000,00	10.458.500,00	(4.100.500,00)	71,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.559.000,00	10.458.500,00	(4.100.500,00)	71,83	
				JUMLAH BELANJA	3.880.758.603,00	3.732.793.386,00	(147.965.217,00)	96,18	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.880.758.603,00)	(3.732.793.386,00)	147.965.217,00	96,18	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.880.758.603,00)	(3.732.793.386,00)	147.965.217,00	96,18	

PEMERINTAHAN KAB. DHARMASRAYA

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	583.942.241.309,11	568.092.939.878,18	50.126.912.191,50	39.030.885.093,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	308.779.376.624,89	298.373.409.359,00	18.295.902.840,50	17.560.790.441,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	308.779.376.624,89	298.373.409.359,00	18.295.902.840,50	17.560.790.441,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	268.681.235.219,39	259.127.042.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	266.912.817.294,39	257.624.562.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	266.912.817.294,39	257.624.562.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.429.000,00	153.380.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.345.000,00	46.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.988.000,00	6.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.596.000,00	22.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.699.500,00	34.699.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.297.500,00	38.254.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.460.748.925,00	1.248.535.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.638.325,00	117.737.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.338.110.600,00	1.126.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.240.000,00	100.563.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.000.000,00	17.091.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.200.000,00	73.431.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.087.253.155,50	39.236.579.447,00	18.295.902.840,50	17.560.790.441,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22.567.445.711,50	22.320.651.966,00	11.766.013.451,50	11.295.471.980,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	55.928.100,00	44.853.898,00	670.671.576,00	666.491.668,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	580.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	580.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	580.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	580.000,00	570.000,00	1.252.807.362,08	1.176.819.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	580.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	120.580.000,00	120.543.805,00	200.000.000,00	199.968.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	580.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	516.830.000,00	515.356.727,00	606.000.000,00	605.903.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	223.924.700,00	218.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.793.800,00	4.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	668.470.050,00	633.230.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19.516.201.357,00	19.487.727.154,00	4.906.847.350,00	4.900.691.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	338.636.800,00	333.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	7.708.000,00	6.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	6.878.000,00	6.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	33.907.250,00	31.915.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.140.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan Infrastruktur TIK	29..700.000,00	234.975.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	26.485.800,00	25.952.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	7.826.250,00	0,00	33.053.000,00	33.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.847.700,00	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	234.891.724,50	2..9.441.518,00	2.903.025.313,42	2.580.375.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	19.883.880,00	19.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	37.009.800,00	36.156.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	985.608.840,00	928.705.896,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	386.473.500,00	321.765.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	..01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	0,00	208.000.000,00	203.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11.085.843.644,00	10.636.875.534,00	5.116.155.709,00	4.875.602.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12.000.000,00	5.785.000,00	459.695.040,00	458.312.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	36.000.000,00	35.950.023,00	819.375.000,00	765.706.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	429.618.816,00	363.944.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	98.791.000,00	95.679.969,00	378.783.913,00	283.868.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	224.000.000,00	222.079.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.642.425.000,00	1.575.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	146.700.000,00	143.123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.024.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	564.573.100,00	272.829.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	13.497.900,00	8.766.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.003.897.294,00	7.977.963.192,00	2.438.677.300,00	2.438.677.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	120.656.550,00	120.485.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	6.959.000,00	6.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	6.959.000,00	6.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	6.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.712.500,00	27.991.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.370.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	20.866.000,00	19.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	25.295.000,00	23.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	58.954.500,00	50.382.798,00	481.145.040,00	455.952.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	12.000.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	11.729.000,00	0,00	41.841.000,00	41.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.487.800,00	4.660.300,00	32.000.000,00	31.899.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	24.756.000,00	21.978.000,00	35.619.600,00	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.401.736.650,00	5.297.582.293,00	1.134.316.080,00	1.111.617.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	159.750.000,00	145.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.840.300,00	3.478.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	62.627.100,00	62.038.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	20.575.550,00	18.552.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.938.572.000,00	3.891.307.239,00	144.553.000,00	144.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	8.574.000,00	7.401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	5.093.000,00	2.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24.274.000,00	24.223.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	22.044.450,00	16.443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.810.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	197.267.400,00	196.373.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	15.484.500,00	15.319.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	25.434.000,00	25.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.425.750,00	4.548.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.300.000,00	0,00	197.267.400,00	196.111.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	30.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00	0,00	40.328.280,00	40.061.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.057.322.000,00	1.050.658.110,00	534.900.000,00	534.517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	16.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.032.227.150,00	981.469.648,00	279.417.600,00	278.097.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.136.000,00	2.953.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.833.350,00	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	958.600.000,00	934.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	6.850.000,00	6.305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	3.941.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	28.859.000,00	28.834.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	3.458.800,00	966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	0,00	197.267.400,00	196.281.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0058	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	10.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	82.150.200,00	81.816.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.843.250,00	6.742.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.843.250,00	6.742.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.928.250,00	3.207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.915.000,00	3.535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	240.614.045.493,57	237.051.507.759,46	13.932.658.156,00	11.275.022.436,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	149.790.222.129,00	146.916.801.833,00	5.346.059.671,00	5.053.196.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.840.154.444,00	114.699.060.477,00	6.900.000,00	5.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.492.161.677,00	112.369.874.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	113.492.161.677,00	112.369.874.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.648.250,00	95.069.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.481.500,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	19.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.002.000,00	9.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	9.987.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.814.750,00	41.717.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	6.900.000,00	5.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	6.900.000,00	5.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.137.793.517,00	2.119.959.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.177.717,00	86.976.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.038.175.800,00	2.021.543.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.551.000,00	84.156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.000.000,00	16.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.551.000,00	67.418.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.875.856.385,00	8.750.696.800,00	5.339.459.671,00	5.047.535.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.017.824.400,00	5.957.593.422,00	5.299.659.671,00	5.007.865.484,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0005	Pengembangan Puskesmas	11.979.000,00	11.227.050,00	4.193.668.119,00	3.937.096.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.551.000,00	67.418.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.875.856.365,00	8.748.711.800,00	5.339.459.671,00	5.047.535.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.017.824.400,00	5.957.593.422,00	5.299.659.671,00	5.007.865.484,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	11.979.000,00	11.227.050,00	4.193.668.119,00	3.937.096.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	485.991.552,00	453.832.383,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0,00	0,00	130.000.000,00	129.599.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0,00	0,00	450.000.000,00	448.487.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	225.000.000,00	223.813.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	40.000.000,00	38.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	201.479.000,00	200.984.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.499.830.200,00	5.442.506.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	79.527.200,00	79.062.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.649.447.335,00	2.593.173.426,00	39.800.000,00	39.668.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68.389.800,00	65.997.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	186.913.050,00	184.202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	114.203.700,00	111.790.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	173.376.250,00	168.491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.000.000,00	26.615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	27.899.800,00	26.516.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	43.200.000,00	41.736.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	81.077.000,00	80.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	72.400.000,00	71.868.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24.996.000,00	24.905.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	64.389.000,00	63.734.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	32.495.000,00	31.559.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	51.005.000,00	48.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	67.525.000,00	64.415.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26.890.000,00	25.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	151.905.725,00	148.517.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	91.730.000,00	91.441.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.382.000,00	54.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	123.310.000,00	122.530.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	633.096.340,00	630.447.350,00	39.800.000,00	39.668.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	320.918.170,00	320.470.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	83.040.000,00	82.723.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	126.505.500,00	126.018.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	90.099.900,00	86.537.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	90.099.900,00	86.537.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.484.750,00	111.407.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	118.484.750,00	111.407.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.115.565.950,00	943.506.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	57.499.450,00	56.031.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	57.499.450,00	56.031.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	143.177.000,00	140.375.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	143.177.000,00	140.375.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	914.889.500,00	747.099.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	914.889.500,00	747.099.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	297.749.000,00	297.491.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	124.180.000,00	124.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	124.180.000,00	124.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	173.569.000,00	173.376.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	173.569.000,00	173.376.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.660.896.350,00	22.228.030.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.478.676.350,00	22.054.385.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	23.478.676.350,00	22.054.385.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	182.220.000,00	173.645.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	182.220.000,00	173.645.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	58.014.740.515,00	57.835.467.708,00	6.620.359.485,00	4.326.399.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	58.014.740.515,00	57.835.467.708,00	6.620.359.485,00	4.326.399.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	4.135.100.000,00	2.729.003.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	0,00	4.135.100.000,00	2.729.003.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.014.740.515,00	57.835.467.708,00	2.485.259.485,00	1.597.396.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	58.014.740.515,00	57.835.467.708,00	2.485.259.485,00	1.597.396.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019		Laboratorium Kesehatan Daerah	609.338.337,00	594.038.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	310.655.754,00	304.840.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutuslaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.943.900,00	9.943.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.943.900,00	9.943.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.943.900,00	9.943.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022		Puskesmas Sitiung I	2.536.112.010,62	2.529.058.565,00	80.000.000,00	79.254.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.689.677.010,62	1.689.582.541,00	80.000.000,00	79.254.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.689.677.010,62	1.689.582.541,00	80.000.000,00	79.254.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.689.677.010,62	1.689.582.541,00	80.000.000,00	79.254.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	839.475.000,00	832.516.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	839.475.000,00	832.516.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.000.000,00	49.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	215.100.000,00	215.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.100.000,00	86.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	237.575.000,00	231.208.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutuslaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023		Puskesmas Tiumang	1.692.790.611,00	1.640.615.797,00	31.400.000,00	27.846.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	848.690.611,00	798.028.658,00	31.400.000,00	27.846.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	848.690.611,00	798.028.658,00	31.400.000,00	27.846.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	848.690.611,00	798.028.658,00	31.400.000,00	27.846.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	839.700.000,00	838.187.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	839.700.000,00	838.187.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87.240.000,00	87.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022		Puskesmas Siliung I	2.536.112.010,62	2.529.050.565,00	80.000.000,00	79.254.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.689.677.010,62	1.689.582.541,00	80.000.000,00	79.254.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.689.677.010,62	1.689.582.541,00	80.000.000,00	79.254.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.689.677.010,62	1.689.582.541,00	80.000.000,00	79.254.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	839.475.000,00	832.516.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	839.475.000,00	832.516.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.000.000,00	49.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	215.100.000,00	215.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.100.000,00	86.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	237.575.000,00	231.208.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023		Puskesmas Tiumang	1.692.790.611,00	1.640.615.797,00	31.400.000,00	27.846.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	848.690.611,00	798.028.658,00	31.400.000,00	27.846.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	848.690.611,00	798.028.658,00	31.400.000,00	27.846.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	848.690.611,00	798.028.658,00	31.400.000,00	27.846.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	839.700.000,00	838.187.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	839.700.000,00	838.187.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87.240.000,00	87.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	334.100.000,00	333.717.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.040.000,00	18.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	334.100.000,00	333.717.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.040.000,00	18.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	51.960.000,00	51.356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	205.100.000,00	205.072.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024		Puskesmas Silago	1.637.967.217,00	1.634.311.053,00	15.000.000,00	9.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	959.562.217,00	956.818.092,00	15.000.000,00	9.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	959.562.217,00	956.818.092,00	15.000.000,00	9.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	959.562.217,00	956.818.092,00	15.000.000,00	9.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	665.475.000,00	664.562.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	665.475.000,00	664.562.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	76.805.000,00	76.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	189.670.000,00	189.657.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	J	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025		Puskesmas Sialang	1.475.151.825,00	1.445.066.385,00	70.000.000,00	69.807.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	829.579.825,00	800.324.984,00	70.000.000,00	69.807.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	829.579.825,00	800.324.984,00	70.000.000,00	69.807.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	829.579.825,00	800.324.984,00	70.000.000,00	69.807.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	631.324.000,00	630.493.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	631.324.000,00	630.493.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.160.000,00	28.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0011	Penyelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	210.892.000,00	210.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.328.000,00	3.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30.800.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	170.684.000,00	170.453.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.248.000,00	14.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.248.000,00	14.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.248.000,00	14.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026		Puskesmas Situng II	1.445.385.500,09	1.433.806.382,00	100.240.000,00	100.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	808.900.100,09	808.879.444,00	100.240.000,00	100.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	808.900.100,09	808.879.444,00	100.240.000,00	100.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	808.900.100,09	808.879.444,00	100.240.000,00	100.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	633.315.400,00	618.757.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	633.315.400,00	618.757.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.608.000,00	21.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	178.065.000,00	177.684.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	9	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.443.600,00	12.211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	56.755.800,00	55.939.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	170.330.000,00	157.522.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	891.700,00	691.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	82.400.000,00	82.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.170.000,00	6.169.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.170.000,00	6.169.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.170.000,00	6.169.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027		Puskesmas Padang Laweh	1.226.051.184,21	1.216.723.394,00	22.000.000,00	21.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	596.415.184,21	588.023.137,00	22.000.000,00	21.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	596.415.184,21	588.023.137,00	22.000.000,00	21.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	596.415.184,21	588.023.137,00	22.000.000,00	21.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	615.796.000,00	614.860.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	615.796.000,00	614.660.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	190.136.000,00	190.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	184.960.000,00	184.824.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.840.000,00	13.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.840.000,00	13.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.840.000,00	13.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.840.000,00	13.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.840.000,00	13.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.840.000,00	13.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028		Puskesmas Koto Besar	1.969.632.203,37	1.864.628.981,13	32.450.000,00	31.808.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	...02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.316.212.203,37	1.227.938.816,13	32.450.000,00	31.808.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.316.212.203,37	1.227.938.816,13	32.450.000,00	31.808.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.316.212.203,37	1.227.938.816,13	32.450.000,00	31.808.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	654.620.000,00	617.890.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	654.620.000,00	617.890.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.160.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.400.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	191.600.000,00	187.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.200.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	49.200.000,00	42.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	182.700.000,00	166.812.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.700.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.000.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	11.360.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	41.800.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029		Puskesmas Koto Baru	3.157.440.425,00	3.157.727.761,33	72.000.000,00	70.886.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.295.454.625,00	2.285.972.722,33	72.000.000,00	70.886.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.295.454.625,00	2.285.972.722,33	72.000.000,00	70.886.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.295.454.625,00	2.285.972.722,33	72.000.000,00	70.886.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	864.465.800,00	864.334.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	864.465.800,00	864.334.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.599.900,00	28.599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.03.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.840.000,00	13.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.840.000,00	13.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.840.000,00	13.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028		Puskesmas Koto Besar	1.969.632.203,37	1.864.628.981,13	32.450.000,00	31.808.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.316.212.203,37	1.227.938.816,13	32.450.000,00	31.808.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.316.212.203,37	1.227.938.816,13	32.450.000,00	31.808.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.316.212.203,37	1.227.938.816,13	32.450.000,00	31.808.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	654.620.000,00	617.890.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	654.620.000,00	617.890.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.160.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.400.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	191.600.000,00	187.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.200.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	49.200.000,00	42.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	182.700.000,00	166.812.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.700.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	11.360.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029		Puskesmas Koto Baru	3.167.440.425,00	3.157.727.161,33	72.000.000,00	70.886.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.295.454.625,00	2.285.972.722,33	72.000.000,00	70.886.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.295.454.625,00	2.285.972.722,33	72.000.000,00	70.886.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.295.454.625,00	2.285.972.722,33	72.000.000,00	70.886.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	864.465.800,00	864.334.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	864.465.800,00	864.334.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.599.900,00	28.599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	289.700.000,00	289.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	55.585.900,00	55.585.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	244.080.000,00	243.989.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	95.100.000,00	95.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.520.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.520.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.520.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030		Puskesmas Sungai Rumbai	2.354.208.107,00	2.353.275.394,00	79.310.000,00	77.331.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.495.486.157,00	1.495.045.752,00	79.310.000,00	77.331.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.495.486.157,00	1.495.045.752,00	79.310.000,00	77.331.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.495.486.157,00	1.495.045.752,00	79.310.000,00	77.331.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	845.623.950,00	845.131.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	845.623.950,00	845.131.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.520.000,00	43.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	80.800.000,00	80.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	267.294.000,00	267.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.600.000,00	8.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	38.499.950,00	38.499.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	213.000.000,00	212.937.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.730.000,00	5.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.840.000,00	17.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	767.076.208,00	758.244.085,00	28.000.000,00	27.045.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	767.076.208,00	758.244.085,00	28.000.000,00	27.045.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	662.436.000,00	661.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	362.436.000,00	661.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	215.886.000,00	215.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	157.680.000,00	157.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.912.000,00	4.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.912.000,00	4.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.912.000,00	4.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032		Puskesmas Sungai Dareh	2.813.618.620,00	2.727.101.520,00	140.300.000,00	114.136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.973.581.670,00	1.889.711.270,00	140.300.000,00	114.136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.973.581.670,00	1.889.711.270,00	140.300.000,00	114.136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.973.581.670,00	1.889.711.270,00	140.300.000,00	114.136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	831.636.950,00	828.990.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	831.636.950,00	828.990.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	81.920.000,00	81.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	88.800.000,00	88.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	275.880.000,00	275.678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.325.000,00	17.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	81.920.000,00	81.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	98.800.000,00	98.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	275.880.300,00	275.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.325.000,00	17.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.374.950,00	35.346.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	188.100.000,00	188.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.160.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	6.677.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033		Puskesmas Timpeh	1.769.376.235,00	1.744.844.000,00	70.000.000,00	59.918.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	971.676.235,00	949.650.114,00	70.000.000,00	59.918.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	971.676.235,00	949.650.114,00	70.000.000,00	59.918.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	971.676.235,00	949.650.114,00	70.000.000,00	59.918.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	790.540.000,00	788.033.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	790.540.000,00	788.033.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.360.000,00	36.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	222.700.000,00	222.099.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.585.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	65.515.000,00	65.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	230.840.000,00	229.448.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	81.920.000,00	81.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	88.800.000,00	88.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	275.880.000,00	275.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.325.000,00	17.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.374.950,00	35.346.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	188.100.000,00	188.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.160.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	6.677.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033		Puskesmas Timpeh	1.769.376.235,00	1.744.844.000,00	70.000.000,00	59.918.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	971.676.235,00	949.650.114,00	70.000.000,00	59.918.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	971.676.235,00	949.650.114,00	70.000.000,00	59.918.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	971.676.235,00	949.650.114,00	70.000.000,00	59.918.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	790.540.000,00	788.033.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	790.540.000,00	788.033.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.360.000,00	36.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	222.700.000,00	222.089.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.585.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	65.515.000,00	65.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	230.840.000,00	229.448.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	659.977.031,58	606.327.730,00	29.000.000,00	28.105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	659.977.031,58	606.327.730,00	29.000.000,00	28.105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	600.280.000,00	598.313.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.280.000,00	598.313.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.700.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	196.200.000,00	195.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.320.000,00	6.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	41.480.000,00	41.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.880.000,00	168.855.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.660.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0045	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.840.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.828.339.659,00	12.599.355.779,00	17.319.351.195,00	9.727.269.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	13.828.339.659,00	12.599.355.779,00	17.319.351.195,00	9.727.269.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.705.362.934,00	7.031.865.936,00	74.000.000,00	69.999.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.777.720.229,00	4.596.442.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.777.720.229,00	4.596.442.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.573.000,00	117.132.650,00	24.000.000,00	23.999.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.490.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.144.000,00	16.093.000,00	24.000.000,00	23.999.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.750.000,00	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000,00	7.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	6.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.189.000,00	81.676.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	50.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	50.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.263.886.905,00	2.019.292.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	602.020.505,00	477.431.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.657.868.400,00	1.538.160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542.040.800,00	297.856.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.250.000,00	98.426.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.200.000,00	22.113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	249.650.800,00	171.379.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	500.000.000,00	499.126.760,00	69.210.000,00	69.125.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	68.460.000,00	68.423.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	0,00	0,00	68.460.000,00	68.423.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	499.126.760,00	750.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	500.000.000,00	499.126.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	0,00	750.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	766.784.875,00	538.054.620,00	699.992.500,00	570.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	766.784.875,00	538.054.620,00	699.992.500,00	570.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10.989.875,00	10.137.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	9.050.000,00	7.896.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300.000.000,00	199.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.082.500,00	1.876.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	441.180.000,00	317.087.420,00	699.992.500,00	570.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.750.000,00	1.238.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	216.281.000,00	214.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	216.281.000,00	214.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	3.925.000,00	3.179.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	212.356.000,00	211.079.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	153.918.250,00	147.201.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	153.918.250,00	147.201.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0033	Penyedisan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	67.235.000,00	62.428.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	4.713.000,00	4.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	78.834.000,00	78.426.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2.653.750,00	2.131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	851.910.150,00	817.895.050,00	5.207.148.695,00	314.684.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	851.910.150,00	817.895.050,00	5.207.148.695,00	314.684.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	695.995.350,00	665.544.100,00	5.207.148.695,00	314.684.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	155.914.800,00	152.350.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.766.410.750,00	2.498.789.529,00	11.269.000.000,00	8.702.958.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.766.410.750,00	2.498.789.529,00	11.269.000.000,00	8.702.958.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	1.133.380.750,00	875.790.980,00	4.280.000.000,00	4.279.621.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	503.945.000,00	501.898.549,00	299.000.000,00	199.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	250.065.000,00	249.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	0,00	0,00	6.750.000.000,00	3.853.237.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	879.000.000,00	871.200.000,00	440.000.000,00	370.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	867.671.700,00	852.163.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	728.192.750,00	714.480.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	728.192.750,00	714.480.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	139.478.950,00	137.682.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	139.478.950,00	137.682.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.823.238.851,65	5.664.187.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.823.238.851,65	5.664.187.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.610.472.684,00	2.541.244.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.847.524.964,00	1.808.727.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.817.524.964,00	1.808.727.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.633.300,00	143.493.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.515.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.615.000,00	25.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.753.000,00	3.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000,00	17.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.861.800,00	8.860.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.388.500,00	84.317.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.902.800,00	319.484.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.902.800,00	314.484.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.911.620,00	265.538.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	17.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.750.000,00	39.935.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.660.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.001.620,00	199.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	226.848.445,00	221.847.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.297.875,00	1.618.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.297.875,00	1.618.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	21.208.950,00	19.636.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	21.208.950,00	19.636.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	55.813.475,00	54.919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	55.813.475,00	54.919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	615.050,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	615.050,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	139.033.070,00	137.428.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	139.033.070,00	137.428.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	7.880.025,00	7.733.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	7.880.025,00	7.733.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	429.903.200,00	426.555.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	429.903.200,00	426.555.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	429.903.200,00	426.555.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	656.733.424,00	648.401.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	656.733.424,00	648.401.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	656.733.424,00	648.401.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.899.281.098,65	1.826.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.899.281.098,65	1.826.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.899.281.098,65	1.826.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.720.323.397,00	10.324.536.126,72	579.000.000,00	467.802.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.567.013.672,00	7.264.229.948,00	553.500.000,00	442.474.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.102.749.572,00	6.807.333.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.460.235.422,00	3.404.219.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.460.235.422,00	3.404.219.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.912.050,00	68.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.003.500,00	6.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.336.000,00	20.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.179.000,00	5.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.200.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.853.900,00	13.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.739.650,00	15.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.471.660.500,00	3.247.189.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.310.700,00	87.674.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.346.049.800,00	3.173.215.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.941.600,00	87.729.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	14.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.001.600,00	69.979.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.940.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	234.221.100,00	229.723.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	195.558.100,00	191.192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	1.920.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	189.638.100,00	189.292.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	38.663.000,00	38.530.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.893.000,00	6.889.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	31.770.000,00	31.641.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	230.043.000,00	227.172.584,00	553.500.000,00	442.474.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	228.453.000,00	225.608.584,00	553.500.000,00	442.474.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	228.453.000,00	225.608.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0,00	0,00	553.500.000,00	442.474.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.590.000,00	1.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.590.000,00	1.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.153.309.725,00	3.060.306.178,72	25.500.000,00	25.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.231.062.400,00	2.151.541.964,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.339.829.957,00	1.291.870.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.339.829.957,00	1.291.870.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.7.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.370.516,00	78.877.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.915.000,00	4.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.617.500,00	22.617.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.800.016,00	10.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.217.900,00	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.330.100,00	23.787.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.367.827,00	589.262.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.008.907,00	35.987.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	560.358.920,00	553.265.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.494.100,00	191.531.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.054.100,00	79.490.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.440.000,00	6.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.301.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	922.247.325,00	908.764.214,72	5.500.000,00	5.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.042.875,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1.042.875,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	374.662.100,00	371.100.700,00	5.500.000,00	5.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	0,00	0,00	5.500.000,00	5.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/Kota	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	2.962.500,00	2.287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.7.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2.962.500,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	364.587.100,00	362.473.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	101.223.650,00	101.118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	53.760.000,00	53.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	10.760.000,00	10.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	34.503.650,00	34.398.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	445.328.700,00	435.534.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	3.151.650,00	2.418.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (RSP) Kab/Kota	442.177.050,00	433.116.114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06			UPUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.176.917.283,00	4.079.943.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.176.917.283,00	4.079.943.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.714.479.283,00	3.625.764.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.754.846.225,00	2.705.563.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.754.846.225,00	2.705.563.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.565.150,00	128.883.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.309.000,00	32.307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.760.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.138.000,00	24.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.641.600,00	19.641.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.216.550,00	46.709.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.187.908,00	593.920.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.659.540,00	69.358.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	538.028.068,00	521.061.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.880.000,00	197.395.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.090.000,00	4.277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.000.000,00	181.328.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.880.000,00	11.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	27.243.350,00	27.144.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	27.243.350,00	27.144.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.712.450,00	20.701.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6.530.900,00	6.443.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	311.396.000,00	307.838.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	274.655.000,00	272.156.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	9.390.000,00	9.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.800.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	65.905.000,00	65.794.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	32.455.250,00	32.385.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.412.500,00	2.198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	121.857.750,00	121.824.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2.819.500,00	2.731.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.782.500,00	2.695.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.897.500,00	2.894.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	3.815.000,00	3.772.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	36.741.000,00	35.682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	36.741.000,00	35.682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	22.187.650,00	21.874.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	22.187.650,00	21.874.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.087.700,00	9.042.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.568.000,00	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	11.531.950,00	11.494.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	101.611.000,00	97.320.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	101.611.000,00	97.320.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	76.043.500,00	72.204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	11.828.750,00	11.730.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5.312.500,00	5.272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	4.131.250,00	3.893.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	4.295.000,00	4.219.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	74.092.090.748,40	61.164.095.961,00	3.519.526.368,00	3.114.745.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.804.163.141,00	4.702.762.234,00	215.084.160,00	214.639.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.804.163.141,00	4.702.762.234,00	215.084.160,00	214.639.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.105.789.541,00	4.012.977.864,00	215.084.160,00	214.639.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.518.844.441,00	3.439.383.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.518.844.441,00	3.439.383.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.485.150,00	154.738.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.560.000,00	4.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.765.000,00	20.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.982.000,00	8.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.062.000,00	26.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.338.000,00	8.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.778.150,00	86.373.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.079.950,00	374.059.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.494.950,00	61.128.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.585.000,00	312.931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.390.000,00	44.795.400,00	215.084.160,00	214.639.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.500.000,00	4.538.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.000.000,00	31.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.880.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	215.084.160,00	214.639.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	275.220.450,00	269.815.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	275.220.450,00	269.815.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	275.220.450,00	269.815.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	48.230.000,00	46.150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	24.729.650,00	23.883.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	24.729.650,00	23.883.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	23.500.350,00	22.267.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	23.500.350,00	22.267.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	374.923.150,00	373.818.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	374.923.150,00	373.818.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berdibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.488.900,00	14.558.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	359.434.250,00	359.259.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	739.545.900,00	659.029.790,00	2.005.654.970,00	1.612.182.335,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	739.545.900,00	659.029.790,00	2.005.654.970,00	1.612.182.335,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	115.789.900,00	100.482.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03	Penyusun dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.789.900,00	100.482.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.789.900,00	100.482.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	123.703.000,00	105.203.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	35.800.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	35.800.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	87.903.000,00	69.603.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	87.903.000,00	69.603.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	59.759.000,00	57.943.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.759.000,00	57.943.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	59.759.000,00	57.943.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	417.044.000,00	372.150.477,00	2.005.654.970,00	1.612.182.335,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	94.200.000,00	89.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	94.200.000,00	89.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlin lungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	234.444.000,00	204.037.078,00	2.005.654.970,00	1.612.182.335,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	234.444.000,00	204.037.078,00	2.005.654.970,00	1.612.182.335,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000,00	78.183.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000,00	78.183.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.664.790.121,00	3.581.058.442,00	28.200.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000		Dinas Pangan dan Perikanan	3.664.790.121,00	3.581.058.442,00	28.200.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.208. 44.371,00	3.135.256.778,00	28.200.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.482.201.281,00	2.446.412.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.482.201.281,00	2.446.412.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.160.250,00	85.913.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	18.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.750.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.498.000,00	5.497.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.342.250,00	51.177.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	28.200.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	28.200.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.032.840,00	530.074.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.686.040,00	40.615.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	520.836.800,00	485.948.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.550.000,00	72.856.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.000.000,00	16.841.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.000.000,00	50.464.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	267.994.800,00	267.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	87.176.750,00	87.093.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	73.617.150,00	73.534.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	13.559.600,00	13.559.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	146.490.800,00	146.474.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	146.490.800,00	146.474.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	34.327.250,00	34.039.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5.772.850,00	5.663.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	28.554.400,00	28.376.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	178.841.250,00	170.048.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	178.841.250,00	170.048.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	178.841.250,00	170.048.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	9.009.700,00	8.144.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	9.009.700,00	8.144.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	9.009.700,00	8.144.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	132.940.000,00	132.354.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	132.940.000,00	132.354.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	132.940.000,00	132.354.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	132.940.000,00	132.354.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	132.940.000,00	132.354.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.772.139.251,00	5.434.835.264,00	772.000.000,00	769.832.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	5.772.139.251,00	5.434.835.264,00	772.000.000,00	769.832.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.119.388.484,00	4.026.412.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.456.060.104,00	2.379.274.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.456.060.104,00	2.379.274.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.312.800,00	57.905.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.265.000,00	2.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.615.000,00	19.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.753.000,00	3.727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.934.000,00	6.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.494.700,00	5.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.251.100,00	19.970.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.521.195.170,00	1.506.191.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.664.570,00	39.658.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.477.530.600,00	1.464.532.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.820.410,00	81.041.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.500.000,00	37.956.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.250.000,00	38.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.070.410,00	5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	236.914.092,00	231.348.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	236.914.092,00	231.348.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	236.914.092,00	231.348.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	173.490.250,00	172.188.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	150.830.250,00	149.597.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	67.621.000,00	67.300.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.3015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	83.209.250,00	82.296.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	22.660.000,00	22.591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	22.660.000,00	22.591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	80.122.250,00	78.487.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	80.122.250,00	78.487.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	80.122.250,00	78.487.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	11.635.450,00	11.090.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	11.635.450,00	11.090.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11.635.450,00	11.090.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	819.178.725,00	810.740.560,00	15.000.000,00	14.929.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	819.178.725,00	810.740.560,00	15.000.000,00	14.929.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	77.796.525,00	76.215.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	741.382.200,00	734.524.660,00	15.000.000,00	14.929.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	331.410.000,00	104.565.583,00	757.000.000,00	754.902.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	331.410.000,00	104.565.583,00	757.000.000,00	754.902.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	331.410.000,00	104.565.583,00	757.000.000,00	754.902.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.351.914.299,00	3.239.981.017,00	1.800.000,00	1.774.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.351.914.299,00	3.239.981.017,00	1.800.000,00	1.774.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.226.954.049,00	3.119.570.569,00	1.800.000,00	1.774.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.426.329.037,00	2.339.639.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.426.329.037,00	2.339.639.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.823.762,00	347.327.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.975.000,00	8.970.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.197.000,00	244.721.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.061.832,00	1.061.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.375.000,00	16.374.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.200.000,00	6.193.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.014.930,00	70.004.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.410.000,00	4.251.262,00	1.800.000,00	1.774.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.410.000,00	4.251.262,00	1.800.000,00	1.774.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.513.920,00	309.117.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.744.000,00	2.658.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.459.680,00	85.219.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.310.240,00	221.239.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.877.330,00	119.234.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	17.233.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.500.000,00	67.129.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.877.330,00	34.871.635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	12.913.400,00	12.831.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12.913.400,00	12.831.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5.224.000,00	5.141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	7.689.400,00	7.689.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	99.995.000,00	95.717.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	99.995.000,00	95.717.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	99.995.000,00	95.717.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	12.051.650,00	11.861.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrusi Kependudukan	9.336.850,00	9.146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.586.850,00	5.586.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.750.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.279.356.312,00	4.108.005.307,00	5.000.000,00	4.939.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.279.356.312,00	4.108.005.307,00	5.000.000,00	4.939.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.935.259.762,00	2.871.277.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.455.920.362,00	2.402.104.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.455.920.362,00	2.402.104.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.919.800,00	110.257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.522.000,00	6.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.651.000,00	16.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	5.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.595.000,00	26.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.490.000,00	7.489.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.661.800,00	47.123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.165.600,00	193.537.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.426.250,00	20.037.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.239.350,00	169.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.254.000,00	165.377.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.000.000,00	26.695.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.000.000,00	75.565.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.490.000,00	13.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.764.000,00	49.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	15.233.550,00	14.201.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	15.233.550,00	14.201.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	8.677.300,00	8.489.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6.556.250,00	5.711.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	159.806.050,00	153.014.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	159.806.050,00	153.014.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	116.645.850,00	112.078.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0006	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	14.014.400,00	13.533.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	29.145.800,00	27.403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0 00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.169.056.950,00	1.069.512.055,00	5.000.000,00	4.939.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Polukunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.169.056.950,00	1.069.512.055,00	5.000.000,00	4.939.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	769.854.150,00	699.209.844,00	5.000.000,00	4.939.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	393.559.350,00	365.196.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5.643.450,00	5.105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.119.102.000,00	3.122.231.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.119.102.000,00	3.122.231.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	264.170.000,00	254.452.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	12.170.000,00	12.000.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	12.170.000,00	12.000.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	252.000.000,00	242.451.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	50.753.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	60.000.000,00	59.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.662.332.000,00	1.780.699.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.084.000.000,00	878.318.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	539.000.000,00	509.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	220.000.000,00	165.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000,00	95.633.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	108.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	416.000.000,00	288.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	416.000.000,00	288.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	943.932.000,00	425.890.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.600.000,00	16.098.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	808.032.000,00	393.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000,00	16.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	218.400.000,00	187.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	218.400.000,00	187.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.192.600.000,00	1.087.090.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	235.600.000,00	130.980.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	105.600.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000,00	129.990.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	957.000.000,00	956.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	522.000.000,00	521.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	22.992.772.370,00	13.919.871.597,00	169.657.328,00	166.078.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	22.992.772.370,00	13.919.871.597,00	169.657.328,00	166.078.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.931.352.700,00	5.470.517.668,00	25.000.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.202.257.880,00	3.139.696.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.202.257.880,00	3.139.696.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.363.950,00	131.747.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.000,00	2.496.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.846.000,00	14.733.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.727.000,00	3.663.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	24.998.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.792.950,00	85.855.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	25.000.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	25.000.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.243.580.870,00	1.902.251.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.027.070,00	51.775.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.183.553.800,00	1.846.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.150.000,00	216.821.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	18.012.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.490.000,00	171.449.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.061.419.670,00	8.449.353.729,00	144.657.328,00	141.228.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16.912.470.120,00	8.304.052.979,00	64.737.328,00	63.306.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	568.750,00	562.490,00	44.737.328,00	43.467.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	16.911.901.370,00	8.303.490.549,00	20.000.000,00	19.838.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	68.369.250,00	67.358.450,00	79.920.000,00	77.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	68.369.250,00	67.358.450,00	79.920.000,00	77.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	80.580.300,00	77.942.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	80.580.300,00	77.942.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.889.723.342,40	4.768.599.932,00	34.300.000,00	33.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	4.889.723.342,40	4.768.599.932,00	34.300.000,00	33.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.622.263.050,50	3.511.965.280,00	34.300.000,00	33.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.151.004,50	1.363.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.151.004,50	1.363.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.101.951.056,00	2.047.507.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.101.951.056,00	2.047.507.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.521.250,00	64.626.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.437.550,00	12.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.560.000,00	3.530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.112.000,00	6.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.611.700,00	11.611.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.294.000,00	30.439.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	34.300.000,00	33.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	34.300.000,00	33.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.237.409.080,00	1.213.302.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	912.749.080,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.720.000,00	303.362.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.730.960,00	181.665.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.995.000,00	10.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.212.500,00	19.430.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	70.200.000,00	70.200.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.823.160,00	61.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.046.471.004,90	1.039.419.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.046.471.004,90	1.039.419.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	742.300.500,00	738.643.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	17.643.504,90	13.060.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	289.027.000,00	286.252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	1.500.000,00	1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	220.989.287,00	217.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	220.989.287,00	217.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	18.035.250,00	14.709.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	202.954.037,00	202.506.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.615.548.238,00	3.334.625.438,00	32.900.000,00	30.970.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	3.615.548.238,00	3.334.625.438,00	32.900.000,00	30.970.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.383.114.239,00	3.266.307.112,00	32.900.000,00	30.970.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.837.850,00	5.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.837.850,00	5.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.311.252.329,00	2.258.635.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.311.252.329,00	2.258.635.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.226.000,00	111.525.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.249.000,00	16.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.149.000,00	17.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.935.000,00	8.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.499.900,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.863.100,00	55.759.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.820.000,00	34.900.000,00	32.900.000,00	30.970.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.820.000,00	19.900.000,00	32.900.000,00	30.970.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.158.060,00	781.399.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.920.060,00	307.984.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.238.000,00	468.414.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.820.000,00	74.841.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	14.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.000.000,00	50.710.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	9.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	57.044.150,00	54.501.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	57.044.150,00	54.501.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	57.044.150,00	54.501.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	5.439.700,00	5.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.439.700,00	5.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.439.700,00	5.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	157.984.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	157.984.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	157.984.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	11.965.400,00	8.637.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	11.965.400,00	8.637.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	**2.17.3.30.3.31.01.0000**	**2.17.07.2.01.0004**	**Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	**11.965.400,00**	**8.637.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.823.141.038,00	2.770.126.819,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.823.141.038,00	2.770.126.819,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.747.473.688,00	2.694.733.422,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.013.223.258,00	1.965.518.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.013.223.258,00	1.965.518.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.922.600,00	227.786.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.097.000,00	4.085.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.789.000,00	25.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.819.950,00	11.818.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.797.000,00	38.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.560.000,00	15.552.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.869.150,00	131.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.077.830,00	426.251.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.059.030,00	80.556.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perlengkapan Kantor	15.690.001,00	15.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319.048.800,00	316.735.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.250.000,00	75.176.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	16.994.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.750.000,00	58.182.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	3.393.000,00	3.367.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.393.000,00	3.367.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3.393.000,00	3.367.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	51.337.450,00	51.131.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	51.337.450,00	51.131.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12.499.150,00	12.462.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	26.273.850,00	26.245.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	4.685.050,00	4.670.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	7.879.400,00	7.854.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	20.936.900,00	20.893.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.936.900,00	20.893.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1.846.250,00	1.824.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0016	Pengawasan Penanaman Modal	19.090.650,00	19.068.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.441.920.382,00	1.778.465.990,00	55.000.000,00	54.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.441.920.382,00	1.778.465.990,00	55.000.000,00	54.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	488.594.950,00	364.552.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	488.594.950,00	364.552.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	416.469.100,00	303.142.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	72.125.850,00	61.410.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGENBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.803.325.432,00	1.268.634.676,00	55.000.000,00	54.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	709.903.632,00	449.548.196,00	55.000.000,00	54.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/Kota	709.903.632,00	449.548.196,00	55.000.000,00	54.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	564.061.100,00	460.113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	63.575.000,00	37.810.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	500.486.100,00	422.302.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	529.360.700,00	358.972.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	529.360.700,00	358.972.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150.000.000,00	145.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150.000.000,00	145.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000,00	145.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	5.751.051,00	5.441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	5.751.051,00	5.441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5.751.051,00	5.441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5.751.051,00	5.441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	3.861.051,00	3.551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	7.922.499,00	7.358.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	7.922.499,00	7.358.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	7.922.499,00	7.358.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.922.499,00	7.358.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.922.499,00	7.358.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.088.810.223,00	6.330.270.199,00	172.822.410,00	172.194.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.088.810.223,00	6.330.270.199,00	172.822.410,00	172.194.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.914.707.035,00	2.732.036.941,00	142.822.410,00	142.194.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.033.372.795,00	1.968.225.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.033.372.795,00	1.968.225.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.124.850,00	103.724.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	17.335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.760.000,00	5.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.550.000,00	8.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.778.500,00	9.778.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.036.350,00	59.946.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.809.390,00	605.277.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.402.290,00	127.756.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.550.000,00	7.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	471.057.100,00	465.980.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.400.000,00	54.808.950,00	142.822.410,00	142.194.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	17.025.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000,00	36.883.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	900.000,00	900.000,00	142.822.410,00	142.194.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.952.037.432,00	1.361.204.303,00	30.000.000,00	29.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.952.037.432,00	1.361.204.303,00	30.000.000,00	29.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	236.232.050,00	217.525.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1.715.805.382,00	1.143.678.340,00	30.000.000,00	29.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.228.354.006,00	2.189.238.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.228.354.006,00	2.189.238.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.228.354.006,00	2.189.238.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	93.711.750,00	67.790.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	93.711.750,00	67.790.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	93.711.750,00	67.790.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.327.959.580,00	3.235.501.580,00	14.107.500,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.327.959.580,00	3.235.501.580,00	14.107.500,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.202.761.480,00	3.114.846.280,00	5.000.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.636.798.135,00	2.595.649.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.636.798.135,00	2.595.649.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.898.750,00	68.559.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.230.500,00	26.209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.985.000,00	12.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.940.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.743.250,00	22.144.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	5.000.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	5.000.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.344.595,00	335.155.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.047.345,00	83.496.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279.797.250,00	250.158.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.720.000,00	115.482.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.940.000,00	59.786.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.010.000,00	33.697.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.650.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.120.000,00	11.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	125.198.100,00	120.655.300,00	9.107.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.621.800,00	83.134.100,00	9.107.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	8.122.550,00	6.666.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.139.550,00	34.607.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	27.889.700,00	27.310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.470.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	9.107.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.576.300,00	37.521.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	34.546.300,00	34.491.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	34.531.000,00	33.575.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34.531.000,00	33.575.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	34.531.000,00	33.575.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	34.531.000,00	33.575.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	22.450.000,00	21.877.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	12.081.000,00	11.698.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17.201.767.464,00	15.994.911.220,00	551.568.000,00	535.022.486,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.077.876.100,00	984.980.999,00	271.568.000,00	265.422.486,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000		Dinas Pangan dan Perikanan	1.077.876.100,00	984.980.999,00	271.568.000,00	265.422.486,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.057.342.450,00	964.732.699,00	271.568.000,00	265.422.486,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.057.342.450,00	964.732.699,00	271.568.000,00	265.422.486,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	782.783.950,00	720.383.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	274.558.500,00	244.349.260,00	271.568.000,00	265.422.486,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.017.800,00	12.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	13.017.800,00	12.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	13.017.800,00	12.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	7.515.850,00	7.280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	7.515.850,00	7.280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.515.850,00	7.280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	26.148.350,00	26.096.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	26.148.350,00	26.096.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	26.148.350,00	26.096.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	26.148.350,00	26.096.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	26.148.350,00	26.096.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	15.875.034.064,00	14.782.699.542,00	280.000.000,00	269.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pertanian	15.875.034.064,00	14.782.699.542,00	280.000.000,00	269.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.708.124.864,00	12.515.654.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.863.537.569,00	10.755.921.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.863.537.569,00	10.755.921.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.108.250,00	240.870.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.636.000,00	3.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.266.500,00	24.170.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.741.000,00	6.740.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.209.000,00	12.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.310.000,00	9.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.945.750,00	190.810.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.271.999.045,00	1.238.551.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.648.845,00	113.529.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.155.150.200,00	1.122.022.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.480.000,00	274.510.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	11.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.600.000,00	245.650.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.380.000,00	17.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.752.217.350,00	1.460.156.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	117.483.100,00	107.122.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	117.483.100,00	107.122.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	415.195.000,00	192.651.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	361.399.000,00	139.011.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	53.796.000,00	53.640.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.219.539.250,00	1.160.381.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.219.539.250,00	1.160.381.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	999.533.650,00	395.462.649,00	280.000.000,00	269.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	517.411.350,00	60.066.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	456.641.400,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	60.769.950,00	59.056.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	482.122.300,00	335.396.640,00	280.000.000,00	269.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	101.243.500,00	3.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	209.098.400,00	200.171.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	147.014.950,00	106.821.009,00	280.000.000,00	269.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	12.795.450,00	12.757.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	11.970.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	65.751.050,00	60.099.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	57.670.250,00	56.931.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0006	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.670.250,00	56.931.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.081.700,00	4.068.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4.081.700,00	4.068.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	353.406.250,00	350.226.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	353.406.250,00	350.226.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompuk Tani Tingkat Kabupaten/Kota	67.413.750,00	64.727.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	285.992.500,00	285.498.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	122.800.750,00	120.287.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	122.800.750,00	120.287.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	82.645.750,00	80.481.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Disribusi Perdagangan	82.645.750,00	80.481.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	82.645.750,00	80.481.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	7.182.250,00	6.889.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	7.182.250,00	6.889.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	7.182.250,00	6.889.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	32.972.750,00	32.917.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	32.972.750,00	32.917.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	29.429.000,00	29.409.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	3.543.750,00	3.507.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	99.908.200,00	80.846.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	99.908.200,00	80.846.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	96.070.200,00	77.013.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	96.070.200,00	77.013.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	96.070.200,00	77.013.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.838.000,00	3.832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Indusri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.838.000,00	3.832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.838.000,00	3.832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	66.980.681.783,00	62.347.913.427,00	3.317.837.350,00	2.592.636.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	29.834.391.247,00	25.939.989.688,00	1.635.837.350,00	1.092.736.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	29.834.391.247,00	25.939.989.688,00	1.635.837.350,00	1.092.736.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.855.218.097,00	20.066.413.201,00	1.635.837.350,00	1.092.736.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.695.708.447,00	7.594.920.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.695.708.447,00	7.594.920.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	250.000.000,00	233.972.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	250.000.000,00	233.972.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.826.402.850,00	2.449.278.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	133.706.200,00	110.851.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.630.000,00	107.445.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83.675.000,00	58.432.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.191.970.000,00	986.619.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.000.000,00	22.157.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.206.421.650,00	1.163.771.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.174.000,00	23.648.153,00	1.635.837.150,00	1.092.736.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	44.894.000,00	23.368.153,00	790.155.000,00	385.357.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	280.000,00	280.000,00	845.682.350,00	707.378.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.795.696.800,00	4.175.528.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	918.346.800,00	882.171.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	541.302.000,00	418.413.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.324.348.000,00	2.867.443.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.666.908.500,00	1.465.598.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237.245.500,00	199.834.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	615.030.000,00	484.317.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.759.000,00	133.746.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	655.874.000,00	647.699.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.141.437.000,00	895.579.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	256.937.000,00	177.334.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	284.500.000,00	245.801.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000,00	72.447.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	399.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	766.660.000,00	585.540.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	389.895.000,00	302.723.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	366.575.000,00	212.658.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	10.190.000,00	10.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	158.492.000,00	152.093.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	80.229.050,00	75.485.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	28.602.800,00	28.078.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	49.660.150,00	48.529.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.508.738.500,00	2.490.254.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	2.508.738.500,00	2.490.254.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.895.794.850,00	4.833.197.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	170.780.450,00	162.751.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	67.162.700,00	62.669.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	36.613.400,00	34.206.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	66.964.350,00	65.875.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.569.242.850,00	4.517.732.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.569.242.850,00	4.517.732.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	139.386.150,00	137.487.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	58.797.700,00	57.890.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	36.034.000,00	35.483.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	44.554.450,00	44.113.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	16.405.400,00	15.225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	16.405.400,00	15.225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.083.378.300,00	1.040.379.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	676.201.100,00	640.734.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	676.201.100,00	640.734.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	160.442.650,00	159.413.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	56.096.850,00	55.851.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	65.104.100,00	64.475.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	39.239.800,00	39.086.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	224.234.400,00	221.784.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	147.016.550,00	145.175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	54.051.500,00	53.702.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	23.166.350,00	22.906.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	22.500.150,00	18.447.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	22.500.150,00	18.447.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	37.146.290.546,00	36.407.923.739,00	1.682.000.000,00	1.499.899.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	37.146.290.546,00	36.407.923.739,00	1.682.000.000,00	1.499.899.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.848.552.256,00	19.468.909.337,00	1.682.000.000,00	1.499.899.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.321.718.958,00	2.267.267.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.321.718.958,00	2.267.267.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	10.682.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	10.682.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.474.225.100,00	1.435.980.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.294.000,00	45.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	451.294.000,00	434.753.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	92.562.000,00	92.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	342.805.000,00	335.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	299.969.100,00	287.339.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.301.000,00	240.404.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.682.000.000,00	1.499.899.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	1.642.000.000,00	1.460.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	40.000.000,00	39.899.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.436.202.540,00	1.276.970.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.579.540,00	212.219.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.164.123.000,00	1.022.250.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.625.750,00	639.750.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	244.500.000,00	198.251.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.900.000,00	58.627.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.195.750,00	211.402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000,00	171.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.651.404.908,00	13.606.129.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.251.404.908,00	13.206.444.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	400.000.000,00	399.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	231.375.000,00	231.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	231.375.000,00	231.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.297.738.290,00	16.939.914.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.842.372.500,00	2.819.542.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.770.642.500,00	2.752.342.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	71.680.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.103.421.190,00	1.098.098.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	291.672.890,00	290.210.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	361.453.250,00	359.127.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	40.500.000,00	40.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	59.190.000,00	59.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	350.605.050,00	349.150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.256.227.350,00	2.120.836.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.430.747.350,00	1.362.393.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	825.480.000,00	758.442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	11.095.767.250,00	10.901.436.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	10.624.883.750,00	10.542.778.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	470.883.500,00	358.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	22.966.873.836,00	21.979.710.707,00	391.804.790,00	364.010.404,00	1.775.000.000,00	196.489.050,00	117.178.797.142,00	114.203.431.208,00
5.01			PERENCANAAN	4.099.109.691,00	3.980.177.085,00	17.129.790,00	17.121.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.0..0000		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.099.109.691,00	3.980.177.085,00	17.129.790,00	17.121.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.402.951.791,00	3.294.335.771,00	17.129.790,00	17.121.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.703.966.116,00	2.627.422.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.703.966.116,00	2.627.422.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.152.000,00	268.491.445,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.791.000,00	11.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.870.000,00	29.764.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.180.000,00	55.180.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.130.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.424.000,00	6.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.767.000,00	150.338.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.613.675,00	331.520.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.699.875,00	96.541.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.913.800,00	228.978.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.200.000,00	66.901.904,00	14.009.790,00	14.001.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000,00	17.016.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.960.000,00	29.645.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.240.000,00	20.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	14.009.790,00	14.001.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	577.750.750,00	569.492.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	575.500.750,00	567.242.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	70.870.000,00	70.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	504.630.750,00	496.932.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	118.407.150,00	116.348.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	55.595.300,00	54.682.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.047.750,00	23.530.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.547.550,00	31.151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	21.249.700,00	20.741.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	21.249.700,00	20.741.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	41.562.150,00	40.924.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	41.562.150,00	40.924.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02			KEUANGAN	13.375.312.725,00	12.674.648.037,00	374.675.000,00	346.888.950,00	1.775.000.000,00	196.489.050,00	117.178.797.140,00	114.203.431.208,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan Daerah	13.375.312.725,00	12.674.648.037,00	374.675.000,00	346.888.950,00	1.775.000.000,00	196.489.050,00	117.178.797.140,00	114.203.431.208,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.132.652.125,00	8.653.419.711,00	159.525.000,00	153.859.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.676.781.845,00	7.339.448.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.676.781.845,00	7.339.448.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	507.834.600,00	484.191.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.990.000,00	9.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.383.000,00	153.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.662.000,00	43.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.186.000,00	44.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	146.091.600,00	140.033.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.522.000,00	86.457.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	159.525.000,00	153.859.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	24.525.000,00	21.694.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	135.000.000,00	132.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	762.655.680,00	703.423.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.995.000,00	10.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	293.148.480,00	292.963.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.994.400,00	36.187.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414.517.800,00	364.071.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.300.000,00	126.356.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.000.000,00	13.979.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.850.000,00	46.081.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.530.000,00	66.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.317.479.350,00	3.218.441.390,00	200.000.000,00	193.029.000,00	1.775.000.000,00	196.489.050,00	117.178.797.140,00	114.203.431.208,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.346.166.500,00	1.292.205.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	147.619.500,00	141.002.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	101.036.500,00	96.161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	177.745.500,00	153.045.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	919.765.000,00	901.996.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	148.958.550,00	144.953.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	28.470.200,00	28.353.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120.488.350,00	116.600.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	291.411.300,00	285.530.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	46.396.000,00	42.933.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	94.395.850,00	94.280.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	135.360.200,00	134.389.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	15.259.250,00	13.926.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.362.240.000,00	1.346.814.944,00	0,00	0,00	1.775.000.000,00	196.489.050,00	117.178.797.140,00	114.203.431.208,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.362.240.000,00	1.346.814.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.044.485.640,00	111.402.562.136,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000.000,00	196.489.050,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134.311.500,00	2.800.869.072,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	168.703.000,00	148.937.000,00	200.000.000,00	193.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	19.037.000,00	18.220.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	149.666.000,00	130.716.600,00	200.000.000,00	193.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	316.806.200,00	280.478.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	316.806.200,00	280.478.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	61.789.000,00	52.911.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	17.732.000,00	17.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	115.492.000,00	91.545.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	33.810.200,00	28.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	87.983.000,00	60.870.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	608.375.050,00	542.306.457,00	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	608.375.050,00	542.306.457,00	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	98.356.300,00	77.038.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	249.007.750,00	227.803.250,00	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	115.072.500,00	102.816.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	135.296.500,00	131.579.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10.642.000,00	3.271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	4.742.129.020,00	4.587.985.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.742.129.020,00	4.587.985.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.231.840.070,00	4.139.261.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.064.000,00	20.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.064.000,00	20.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.826.904.970,00	3.749.625.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.826.904.970,00	3.749.625.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.000.800,00	110.757.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.089.000,00	25.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.328.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.131.700,00	8.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.465.100,00	54.244.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.731.800,00	221.396.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.022.000,00	48.242.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.609.800,00	170.055.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.138.500,00	37.416.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.100.000,00	13.048.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.500.000,00	20.787.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.538.500,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	510.288.950,00	448.723.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	89.174.550,00	88.814.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	9.736.000,00	9.714.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	64.561.550,00	64.438.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.445.000,00	9.281.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	5.442.000,00	5.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	8.640.000,00	8.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5.445.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	358.816.150,00	299.643.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	20.564.650,00	20.496.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	270.585.800,00	225.980.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	67.665.700,00	53.165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	53.658.250,00	51.531.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3.212.750,00	3.203.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	8.678.000,00	8.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	41.767.500,00	40.095.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	545.322.400,00	544.759.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	545.322.400,00	544.759.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	545.322.400,00	544.759.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	544.002.400,00	543.439.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	544.002.400,00	543.439.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	205.000.000,00	192.140.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	205.000.000,00	192.140.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	205.000.000,00	192.140.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	192.415.100,00	179.711.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rancana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	192.415.100,00	179.711.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	12.584.900,00	12.428.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	12.584.900,00	12.428.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.401.294.838,00	5.957.382.966,00	84.800.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	6.401.294.838,00	5.957.382.966,00	84.800.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat Kabupaten	6.401.294.838,00	5.957.382.966,00	84.800.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.150.049.838,00	4.855.646.160,00	84.800.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.674.500,00	23.992.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.674.500,00	23.992.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.104.087.738,00	4.027.628.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.104.087.738,00	4.027.628.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	306.150.000,00	193.783.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	306.150.000,00	193.783.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.532.000,00	264.806.164,00	13.200.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.380.000,00	5.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.162.000,00	37.439.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.439.000,00	8.134.000,00	13.200.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.496.000,00	15.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	7.705.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.605.000,00	190.297.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.300.000,00	4.225.888,00	71.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.300.000,00	4.225.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	71.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.105.600,00	276.780.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.887.600,00	102.728.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.218.000,00	172.051.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.200.000,00	84.427.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	10.881.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.500.000,00	34.351.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.200.000,00	19.194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.077.624.200,00	973.320.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	859.500.050,00	787.428.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	129.149.850,00	113.495.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	107.788.800,00	107.386.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	142.556.250,00	141.427.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	96.595.450,00	95.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	75.409.900,00	69.905.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	157.216.650,00	118.994.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	149.782.950,00	141.158.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	219.124.150,00	185.892.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	64.691.650,00	53.746.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	154.432.500,00	132.145.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	173.626.800,00	128.415.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	23.291.650,00	22.361.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	23.291.650,00	22.361.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	150.329.150,00	106.054.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	55.575.000,00	43.170.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30.919.000,00	23.865.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	63.835.150,00	39.018.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	16.912.503.491,00	16.303.922.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01			KECAMATAN	16.912.503.491,00	16.303.922.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Pulau Punjung	2.116.292.429,00	2.054.792.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.104.692.429,00	2.043.192.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.898.530.869,00	1.847.207.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.898.530.869,00	1.847.207.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.072.500,00	57.692.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	987.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	7.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.224.000,00	3.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.298.500,00	5.298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.583.000,00	25.417.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.069.060,00	119.914.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.500.260,00	9.451.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.830.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.758.800,00	104.683.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.000.000,00	18.378.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	4.378.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Sitiung	1.898.247.255,00	1.853.476.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.887.362.255,00	1.842.912.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.704.162.860,00	1.660.987.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.704.162.860,00	1.660.987.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.685.000,00	58.515.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.344.000,00	1.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.623.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.679.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.470.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.650.300,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.888.700,00	36.777.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.214.395,00	101.733.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.125.195,00	7.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.04.0034	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.589.200,00	93.129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.330.000,00	21.675.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	13.479.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	4.865.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.050.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.050.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.050.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.312.500,00	2.256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.312.500,00	2.256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.0 .0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.312.500,00	2.256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.380.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.380.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.380.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.142.500,00	5.077.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.142.500,00	5.077.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.142.500,00	5.077.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00 03.0000		Kecamatan Kota Baru	1.928.089.411,00	1.873.883.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.914.839.411,00	1.880.653.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.623.275.861,00	1.577.618.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.623.275.861,00	1.577.618.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.452.750,00	61.170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	264.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.079.000,00	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.412.000,00	7.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.124.000,00	7.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.573.750,00	45.320.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.390.800,00	197.564.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.366.000,00	3.364.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.224.800,00	192.399.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.720.000,00	24.300.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	13.998.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.500.000,00	6.081.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.250.000,00	13.230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.250.000,00	13.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.250.000,00	13.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Sungai Rumbai	1.616.082.047,00	1.570.479.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.601.482.047,00	1.555.919.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.359.038.997,00	1.325.214.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.359.038.997,00	1.325.214.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.503.950,00	78.110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.477.000,00	2.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.960.500,00	6.861.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.791.000,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.525.000,00	11.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.089.400,00	2.074.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.661.050,00	51.562.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.193.100,00	114.086.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.055.700,00	13.288.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.537.400,00	99.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.726.000,00	40.508.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.250.000,00	5.508.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.476.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.450.000,00	13.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.450.000,00	13.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.450.000,00	13.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Sembilan Koto	1.245.340.431,00	1.202.069.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.241.106.431,00	1.198.068.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.014.315.176,00	982.004.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.014.315.176,00	982.004.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.716.000,00	63.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	970.000,00	967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.752.000,00	6.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.768.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.363.000,00	10.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.991.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.872.000,00	39.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.375.255,00	130.061.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.491.455,00	2.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.383.800,00	125.603.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.700.000,00	22.554.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.700.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.500.000,00	17.490.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.492.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.130.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.130.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.130.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.084.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.084.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.084.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.020.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.020.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.020.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Tempeh	1.282.898.250,00	1.150.382.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.282.898.250,00	1.150.382.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.044.778.630,00	967.007.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.044.778.630,00	967.007.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.596.350,00	70.026.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.225.000,00	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.128.500,00	10.124.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.941.000,00	3.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.992.400,00	1.992.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.709.450,00	49.531.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.523.270,00	96.060.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.038.470,00	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.983.800,00	87.630.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.000.000,00	17.288.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	12.119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	3.474.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		Kecamatan Koto Salak	1.198.909.454,00	1.161.300.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.187.219.454,00	1.149.610.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	990.557.104,00	957.847.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	990.557.104,00	957.847.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.776.950,00	57.312.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	894.000,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.655.000,00	6.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.078.000,00	7.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.722.300,00	2.722.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.889.650,00	36.675.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.915.400,00	113.479.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.488.000,00	4.482.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfe/	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.427.400,00	107.997.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.970.000,00	20.970.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	13.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.750.000,00	4.630.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.220.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		Kecamatan Asam Jujuhan	1.179.195.026,00	1.121.488.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.166.365.026,00	1.108.658.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	923.060.076,00	872.360.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0301	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	923.060.076,00	872.360.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.900.600,00	85.664.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.005.000,00	13.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.848.000,00	10.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.353.600,00	56.117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.654.350,00	127.182.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.908.750,00	4.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.045.600,00	120.605.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.750.000,00	23.451.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	16.392.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.250.000,00	5.058.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		Kecamatan Kota Besar	1.844.464.792,00	1.798.343.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.831.964.792,00	1.783.843.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.545.481.242,00	1.501.780.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.545.481.242,00	1.501.780.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.459.750,00	94.283.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.686.000,00	1.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.433.500,00	9.433.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.576.000,00	9.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.980.000,00	21.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.600,00	6.500.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.283.650,00	45.106.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.773.800,00	167.671.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.133.600,00	9.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.140.200,00	157.050.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.250.000,00	20.109.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	13.999.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.250.000,00	3.109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		Kecamatan Padang Lawas	1.161.290.702,00	1.118.301.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.144.361.702,00	1.101.392.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	943.306.002,00	907.926.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	943.306.002,00	907.926.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.697.900,00	68.203.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.606.000,00	6.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.678.000,00	6.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.571.200,00	4.571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.787.700,00	43.413.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.127.800,00	109.100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	510.400,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.617.400,00	100.597.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.250.000,00	22.162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000,00	15.948.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.750.000,00	4.713.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		Kecamatan Tiumang	1.441.693.694,00	1.401.405.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.1?.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.426.393.694,00	1.386.305.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.147.659.144,00	1.118.943.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.147.659.144,00	1.118.943.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.380.500,00	79.187.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.804.000,00	8.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.107.500,00	4.107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.297.300,00	5.297.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.011.700,00	46.819.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.224.050,00	165.720.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.535.650,00	3.290.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.688.400,00	158.430.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.330.000,00	22.453.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	13.453.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.330.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3.862.758.603,00	3.714.863.886,00	18.000.000,00	17.929.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.862.758.603,00	3.714.863.886,00	18.000.000,00	17.929.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.862.758.603,00	3.714.863.886,00	18.000.000,00	17.929.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.501.946.718,00	1.454.121.823,00	18.000.000,00	17.929.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.163.323.133,00	1.125.178.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.163.323.133,00	1.125.178.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.672.800,00	84.420.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.112.250,00	2.112.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.542.000,00	17.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.221.000,00	4.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.484.000,00	14.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.598.500,00	9.598.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.715.050,00	39.462.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	18.000.000,00	17.929.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	12.000.000,00	11.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	6.000.000,00	5.938.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.930.785,00	103.320.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.110.585,00	11.941.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.320.200,00	88.878.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.030.000,00	141.203.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.500.000,00	1.997.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.000.000,00	32.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.220.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.300.000,00	100.095.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	880.917.000,00	852.963.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	880.917.000,00	852.963.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	41.590.750,00	31.157.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18.878.400,00	13.584.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	820.447.850,00	808.221.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.156.714.435,00	1.155.482.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.156.714.435,00	1.155.482.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.156.714.435,00	1.155.482.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5.410.500,00	4.152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.410.500,00	4.152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.410.500,00	4.152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	105.538.650,00	94.996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	105.538.650,00	94.996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	89.881.300,00	79.630.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15.647.350,00	15.365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	212.231.300,00	153.147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	212.231.300,00	153.147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	197.672.300,00	142.688.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14.559.000,00	10.458.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	792.360.152.082,51	755.555.738.316,18	58.010.448.699,50	45.656.214.008,30	1.775.000.000,00	196.489.050,00	117.178.797.140,00	114.203.431.208,00

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	2025	2024
1	2	3
Saldo Anggaran Lebih Awal	4.085.069.988,55	46.430.539.477,05
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	4.085.069.988,55	46.430.539.477,05
Subtotal	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	38.420.123.670,32	4.085.069.988,55
Subtotal	38.420.123.670,32	4.085.069.988,55
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**38.420.123.670,32**	**4.085.069.988,55**

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Pajak Daerah	56.677.138.430,00	27.218.922.589,78	29.458.215.840,22	108,23
Pendapatan Retribusi Daerah	77.511.074.989,69	70.063.061.076,91	7.448.013.912,78	10,63
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.058.604.307,00	10.863.659.575,00	(5.805.055.268,00)	(53,44)
Pendapatan Asli Dacrah Lainnya	4.521.435.494,93	11.939.130.310,51	(7.417.694.815,58)	(62,13)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	143.768.253.221,62	120.084.773.552,20	23.683.479.669,42	19,72
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	15.939.581.800,00	13.843.113.000,00	2.096.468.800,00	15,14
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	19.446.711.000,00	32.094.396.000,00	(12.647.685.000,00)	(39,41)
Dana Alokasi Umum (DAU)	496.572.481.339,00	512.944.707.932,00	(16.372.226.593,00)	(3,19)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	147.718.602.081,00	166.360.138.484,00	(18.641.536.403,00)	(11,21)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	679.677.376.220,00	725.242.355.416,00	(45.564.979.196,00)	(6,28)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Penyesuaian	63.387.406.000,00	76.065.729.000,00	(12.678.323.000,00)	(16,67)
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	63.387.406.000,00	76.065.729.000,00	(12.678.323.000,00)	(16,67)
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37.251.243.716,00	62.031.100.836,00	(24.779.857.120,00)	(39,95)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	37.251.243.716,00	62.031.100.836,00	(24.779.857.120,00)	(39,95)
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	780.316.025.936,00	863.339.185.252,00	(83.023.159.316,00)	(9,62)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	41.815.422.649,76	27.250.662.781,79	14.564.759.867,97	53,45
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	18.824.698.352,60	11.691.354.470,00	7.133.343.882,60	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	60.640.121.002,36	38.942.017.251,79	21.698.103.750,57	55,72
JUMLAH PENDAPATAN	984.724.400.159,98	1.022.365.976.055,99	(37.641.575.896,01)	(3,68)
BEBAN				

URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	484.254.267.653,56	459.854.645.158,04	24.399.622.495,52	5,31
Beban Persediaan	96.092.973.602,81	100.041.670.605,50	(3.948.697.002,69)	(3,95)
Beban Jasa	152.582.828.721,36	122.893.828.449,15	29.689.000.272,21	24,16
Beban Sewa	2.647.796.083,00	5.782.869.796,00	(3.135.073.713,00)	(54,21)
Beban Pemeliharaan	8.796.593.287,00	12.080.586.952,00	(3.283.993.665,00)	(27,18)
Beban Perjalanan Dinas	30.617.608.799,00	62.205.866.889,00	(31.588.258.090,00)	(50,78)
Beban Hibah	11.090.591.943,00	35.212.246.757,00	(24.121.654.814,00)	(68,50)
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan/Amortisasi	112.915.339.350,95	183.081.156.800,42	(70.165.817.449,47)	(38,32)
Beban Penyisihan Piutang	2.788.037.315,40	2.619.299.693,24	168.737.622,16	6,44
Beban Transfer	114.203.431.208,00	115.200.007.844,00	(996.576.636,00)	(0,87)
Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASI	1.015.989.467.964,08	1.098.972.178.944,35	(82.982.710.980,27)	(7,55)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(31.265.067.804,10)	(76.606.202.888,36)	45.341.135.084,26	(59,19)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	238.683.524,00	380.744.000,00	(142.060.476,00)	(37,31)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	238.683.524,00	380.744.000,00	(142.060.476,00)	(37,31)
Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(31.026.384.280,10)	(76.225.458.888,36)	45.199.074.608,26	(59,30)
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	196.489.050,00	2.485.520.287,00	(2.289.031.237,00)	(92,09)
Jumlah Pos Luar Biasa	(196.489.050,00)	(2.485.520.287,00)	2.289.031.237,00	(92,09)
SURPLUS/DEFISIT LO	(31.222.873.330,10)	(78.710.979.175,36)	47.488.105.845,26	(60,33)

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	2025	2024
1	2	3
Ekuitas Awal	2.421.166.191.465,57	2.505.772.587.186,13
Surplus/Defisit-LO	(31.222.873.330,10)	(78.710.979.175,36)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
a Koreksi Persediaan	0,00	0,00
b Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
C Lain-lain	(1.631.871.623,85)	(5.895.416.545,20)
Ekuitas Akhir	**2.388.311.446.511,62**	**2.421.166.191.465,57**

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	SALDO 31 DES 2025	SALDO 31 DES 2024
1	2	3
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	35.693.263.773,72	1.714.291.612,49
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	6.925.010,00
Kas di BLUD	2.450.038.397,60	1.272.541.885,06
Kas di BOS	52.396.305,00	36.378.712,00
Kas Lainnya	224.425.194,00	1.054.932.769,00
Piutang Pajak	27.834.175.073,00	25.474.630.116,00
Penyisihan Piutang Pajak	(17.317.662.827,76)	(15.864.849.434,96)
Piutang Pajak Netto	10.516.512.245,24	9.609.780.681,04
Piutang Retribusi	8.692.733.877,00	6.774.178.699,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.984.631.072,37)	(1.305.862.079,55)
Piutang Retribusi Netto	6.708.102.804,63	5.468.316.619,45
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.058.604.307,00	5.529.319.459,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	(27.646.597,30)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	5.058.604.307,00	5.501.672.861,70
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.136.301.435,81	6.818.492.334,53
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.725.797.213,34)	(3.041.699.022,11)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	3.410.504.222,47	3.776.793.312,42
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	8.594.652.000,00	15.091.731.000,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	13.784.261.132,00	21.749.014.918,00
Piutang Pendapatan Lainnya	1.126.650,00	459.480,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(5.633,25)	(2.297,40)
Piutang Pendapatan Lainnya Netto	1.121.016,75	457.182,60
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	308.333.610,02	274.605.153,94
Persediaan	24.626.599.975,67	46.962.340.588,12
Jumlah Aset Lancar	111.428.814.984,10	112.519.782.305,82
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
Jumlah Investasi Non Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	30.452.000.000,00	28.952.000.000,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	30.452.000.000,00	28.952.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	30.452.000.000,00	28.952.000.000,00

URAIAN	SALDO 31 DES 2025	SALDO 31 DES 2024
1	2	3
ASET TETAP		
Tanah	648.670.324.008,00	643.176.924.008,00
Peralatan dan Mesin	455.931.402.582,41	457.431.418.474,76
Gedung dan Bangunan	1.169.212.381.936,29	1.129.495.528.240,53
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.651.302.675.579,92	1.511.485.488.792,33
Aset Tetap Lainnya	53.540.025.003,00	48.963.924.243,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.026.092.182,00	2.970.751.677,00
Akumulasi Penyusutan	(1.745.043.585.833,68)	(1.527.992.628.347,13)
Jumlah Aset Tetap Setelah Akumulasi Penyusutan	2.239.639.315.457,94	2.265.531.407.088,49
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tuntutan Ganti Rugi	877.757.319,00	287.907.729,00
Aset Tak Berwujud	4.808.780.277,00	4.557.476.277,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.168.970.434,00)	(2.873.514.683,00)
Aset Tak Berwujud Setelah Amortisasi	1.639.809.843,00	1.683.961.594,00
Aset Lain-Lain	113.230.130.680,27	225.626.423.917,27
Penyusutan Aset Lain-Lain	(78.264.584.980,81)	(182.859.988.190,62)
Aset Lain-Lain Setelah Penyusutan	34.965.545.699,46	42.766.435.726,65
Dana Transfer *Treasury Deposit Facility*	0,00	1.156.963.000,00
Jumlah Aset Lainnya	37.483.112.861,46	45.895.268.049,65
JUMLAH ASET	2.419.003.243.303,50	2.452.898.457.443,96
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	140.789.551,00
Pendapatan Diterima Dimuka	114.887.626,67	3.032.855.895,36
Utang Belanja	25.685.706.465,21	23.667.417.832,03
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.891.202.700,00	4.891.202.700,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	30.691.796.791,88	31.732.265.978,39
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	30.691.796.791,88	31.732.265.978,39
EKUITAS		
EKUITAS	2.388.311.446.511,62	2.421.166.191.465,57
JUMLAH EKUITAS	2.388.311.446.511,62	2.421.166.191.465,57
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.419.003.243.303,50	2.452.898.457.443,96

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	2	3
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	54.317.593.473,00	25.092.743.485,78
Penerimaan Retribusi Daerah	73.178.734.847,00	65.941.537.340,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.529.319.459,00	5.347.929.006,00
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	4.145.420.917,65	11.607.295.741,01
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	16.769.613.800,00	14.676.153.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	26.270.721.000,00	22.402.073.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	496.572.481.339,00	512.944.707.932,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	147.718.602.081,00	166.360.138.484,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	63.387.406.000,00	76.065.729.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.215.997.502,00	58.241.057.201,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	82.698.940,00	71.350.441,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	18.557.392.495,60	11.690.998.858,00
Jumlah Arus Masuk Kas	951.745.981.854,25	970.441.713.488,79
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	485.726.445.153,08	454.911.665.442,94
Pembayaran Barang	258.738.701.220,10	304.013.952.063,19
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	11.090.591.943,00	34.253.926.757,00
Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	196.489.050,00	2.485.520.287,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	2.590.944.672,00	1.762.449.469,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	209.924.400,00	221.920.355,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	111.402.562.136,00	113.330.772.640,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**869.955.658.574,18**	**910.980.207.014,13**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**81.790.323.280,07**	**59.461.506.474,66**
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	277.644.000,00	339.947.100,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	13.150.000,00	40.794.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**290.794.000,00**	**380.741.100,00**
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	0,00	0,00

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	2	3
Perolehan Peralatan dan Mesin	12.620.746.293,00	24.237.257.450,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	17.140.691.453,30	28.954.072.575,16
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.025.674.732,00	45.054.989.838,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.617.797.530,00	3.810.397.200,00
Perolehan Aset Lainnya	251.304.000,00	131.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**45.656.214.008,30**	**102.187.717.063,16**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(45.365.420.008,30)**	**(101.806.975.963,16)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**1.500.000.000,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(1.500.000.000,00)**	**0,00**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	54.487.435.652,00	56.445.682.997,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**54.487.435.652,00**	**56.445.682.997,00**
Arus Keluar Kas		
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	54.487.435.652,00	56.453.142.290,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**54.487.435.652,00**	**56.453.142.290,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**0,00**	**(7.459.293,00)**
Kenaikan/Penurunan Kas	**34.335.053.681,77**	**(42.359.853.791,50)**
Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas	1.721.216.622,49	38.616.835.495,09
Saldo Awal Kas di BLUD	1.272.541.885,06	4.558.804.440,96

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	2	3
Saldo Awal Kas di Dana BOS	36.378.712,00	21.743.185,00
Saldo Awal Kas Lainnya	1.054.932.769,00	3.240.615.649,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	35.693.263.773,72	1.714.291.612,49
Saldo Akhir Kas di BLUD	2.450.038.397,60	1.272.541.885,06
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	6.925.010,00
Saldo Akhir Kas di Dana BOS	52.396.305,00	36.378.712,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	224.425.194,00	1.054.932.769,00
Saldo Akhir Kas	**38.420.123.670,32**	**4.085.069.988,55**

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Informasi Umum

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas, setiap pengelola keuangan Negara wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan secara tertib dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dimaksud disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak kepada masyarakat dan atau golongan tertentu.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan (*financial accountability*) tetapi juga kaidah-kaidah yang baik (*best practices*), serta bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (*performance accountability*), dalam bentuk efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance and Clean Government*.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selaku Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI setelah direviu oleh Inspektorat untuk dilakukan Audit dan diberikan opini sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam pembahasan rapat paripurna antara Eksekutif dan Legislatif.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 disusun dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD dan SKPKD selaku Entitas Akuntansi. Laporan Keuangan dimaksud disusun dan disajikan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran 1.01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen
   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam

pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
4. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah; dan
6. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan konsolidasi dari laporan keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
30. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
31. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya;
32. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
34. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;
35. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;

36. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
37. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
39. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
40. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
41. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
42. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
43. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
44. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
45. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para *stake holder* secara luas, tidak terbatas pada kepentingan tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ini untuk menghindari kesalahpahaman dan multitafsir bagi pembaca dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan dengan tujuan :

1. Laporan keuangan mudah dipahami;
2. Menghindari kesalahpahaman;
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas; dan
5. Pengungkapan paripurna *(full disclosure)*.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

A. Informasi Umum
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Kinerja APBD

A. Ekonomi Makro
B. Kebijakan Keuangan Daerah
C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

A. Penjelasan Atas Kinerja dan Posisi Keuangan
B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
D. Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

A. Laporan Realisasi Anggaran
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
C. Neraca
D. Laporan Operasional
E. Laporan Arus Kas
F. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

A. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya
B. Susunan Perangkat Daerah
C. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Kerangka Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merumuskan arah kebijakan ekonomi yang menjadi landasan pencapaian sasaran indikator makro. Bagian ini menyajikan proyeksi kondisi ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi regional, nasional, maupun global. Indikator utama yang menjadi fokus meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, serta PDRB per kapita.

Adapun indikator ekonomi makro dapat diuraikan sebagai berikut:

A.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan output atau nilai tambah dalam periode tertentu. Secara sektoral, PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas produksi. Dalam penyusunan kebijakan anggaran Tahun 2025, analisis perkembangan nilai PDRB difokuskan pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

Tabel 2.1
Perkembangan Nilai dan kontribusi PDRB ADHB (Juta Rupiah) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2024

No	Lapangan Usaha	Nilai		Kontribusi		Pertumbuhan	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,466,880.92	3,935,770.00	25.98	29.49	6.52	13.52
B	Pertambangan dan Penggalian	864,192.41	799,220.00	6.48	5.99	8.80	(7.52)
C	Industri Pengolahan	686,641.94	719,790.00	5.15	5.39	6.95	4.83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,555.35	2,700.00	0.02	0.02	5.98	5.66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,389.11	1,480.00	0.01	0.01	-	6.54
F	Konstruksi	1,996,138.51	2,115,790.00	14.96	15.85	11.55	5.99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,051,995.93	2,204,410.00	15.38	16.52	11.35	7.43
H	Transportasi dan Pergudangan	841,347.61	871,580.00	6.30	6.53	12.85	3.59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	136,485.21	146,660.00	1.02	1.10	9.78	7.45
J	Informasi dan Komunikasi	936,127.00	992,050.00	7.01	7.43	10.66	5.97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	299,495.91	321,740.00	2.24	2.41	5.88	7.43
L	Real Estat	300,120.44	321,880.00	2.25	2.41	12.46	7.25
M,N	Jasa Perusahaan	2,613.46	2,730.00	0.02	0.02	12.89	4.46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	964,577.96	1,046,300.00	7.23	7.84	6.19	8.47
P	Jasa Pendidikan	410,772.31	431,300.00	3.08	3.23	6.51	5.00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	267,540.61	287,060.00	2.00	2.15	11.69	7.30
R, S, T, U	Jasa lainnya	116,849.30	127,160.00	0.88	0.95	11.53	8.82
TOTAL		13,345,769.26	14,327,620.00	100	100	9.09	7.36

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Dharmasraya menunjukkan performa yang dinamis dengan pertumbuhan nilai nominal yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dharmasraya, total nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp13.345.769,26 juta pada tahun 2023 menjadi Rp14.327.620,00 juta pada tahun 2024. Secara agregat, ekonomi daerah ini tumbuh

sebesar 7,36% pada tahun 2024, meskipun angka ini menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 9,09%.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi motor penggerak utama sekaligus pilar penyokong ekonomi terbesar di Dharmasraya. Kontribusi sektor ini meningkat tajam dari 25,98% di tahun 2023 menjadi 29,49% di tahun 2024. Ketangguhan sektor ini juga terlihat dari laju pertumbuhannya yang melesat dari 6,52% menjadi 13,52% dalam setahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan produktivitas yang masif atau kenaikan harga komoditas unggulan daerah di pasar. Selain pertanian, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Konstruksi menempati posisi kedua dan ketiga dalam struktur ekonomi daerah. Sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 16,52% dengan pertumbuhan stabil di angka 7,43%. Sementara itu, sektor konstruksi menyumbang 15,85% terhadap total PDRB, meskipun laju pertumbuhannya melambat dari double digit (11,55%) di tahun 2023 menjadi 5,99% di tahun 2024.

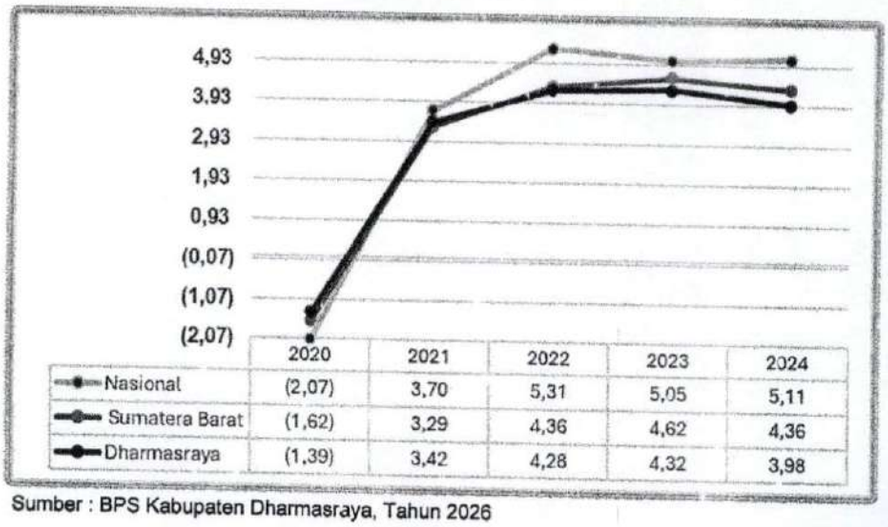
Di tengah tren positif sebagian besar lapangan usaha, sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar -7,52% pada tahun 2024. Penurunan ini cukup drastis mengingat pada tahun sebelumnya sektor ini tumbuh positif sebesar 8,80%. Hal ini berdampak pada penurunan kontribusi sektor tambang dari 6,48% menjadi 5,99%.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, struktur ekonomi Dharmasraya masih sangat bergantung pada sektor primer. Sektor-sektor pendukung lainnya seperti Informasi dan Komunikasi (kontribusi 7,43%) serta Administrasi Pemerintahan (kontribusi 7,84%) terus menunjukkan pertumbuhan positif yang menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dominasi sektor pertanian yang semakin menguat menegaskan posisi Dharmasraya sebagai daerah agraris, namun penurunan di sektor pertambangan memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keseimbangan lapangan kerja dan pendapatan daerah.

A.2. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2000, indikator ini digunakan untuk untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah. Perbandingan Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	(2,07)	3,70	5,31	5,05	5,11
Sumatera Barat	(1,62)	3,29	4,36	4,62	4,36
Dharmasraya	(1,39)	3,42	4,28	4,32	3,98

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2026

Secara keseluruhan, perekonomian Kabupaten Dharmasraya terus menunjukkan tren pemulihan pasca-pandemi, meskipun mengalami sedikit perlambatan laju pertumbuhan di tahun terakhir. Laju pertumbuhan ekonomi Dharmasraya pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,98%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4,32%, sementara dilihat berdasarkan posisi terhadap wilayah lain, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya di tahun 2024 (3,98%) berada di bawah angka pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat (4,36%) dan Nasional (5,11%). Sejak titik terendah pada tahun 2020 (-1,39%), Dharmasraya sempat melesat ke angka 4,28% di tahun 2022, namun kini menunjukkan tren yang cenderung melandai.

Dilihat berdasarkan dinamika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya sangat dipengaruhi oleh pergerakan di lapangan usaha tertentu:

1. Sektor Penopang (*High Growth*)
   - Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Sektor ini merupakan penyelamat ekonomi daerah dengan lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan dari 6,52% (2023) menjadi 13,52% (2024).
   - Sektor Administrasi Pemerintahan: Menunjukkan peningkatan aktivitas dengan pertumbuhan sebesar 8,47%, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 6,19%.
   - Sektor Jasa Lainnya: Tumbuh stabil di angka 8,82%, menunjukkan geliat aktivitas masyarakat yang terus meningkat.

2. Sektor yang Melambat/Kontraksi
   - Sektor Pertambangan dan Penggalian: Menjadi titik lemah utama dengan mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar -7,52% di tahun 2024, padahal tahun sebelumnya tumbuh positif 8,80%.
   - Sektor Konstruksi: Mengalami perlambatan laju yang cukup dalam, dari 11,55% (2023) turun menjadi 5,99% (2024).
   - Sektor Transportasi dan Pergudangan: Mengalami penurunan laju pertumbuhan paling drastis, dari double digit 12,85% menjadi hanya 3,59%.

3. Struktur Ekonomi dan Kontribusi
   Meskipun terjadi fluktuasi pada laju pertumbuhan, struktur ekonomi Dharmasraya semakin mengukuhkan diri sebagai daerah berbasis agraris:
   - Kontribusi sektor Pertanian terhadap total PDRB meningkat dari 25,98% menjadi 29,49%. Artinya, hampir sepertiga ekonomi Dharmasraya bergantung pada sektor ini.
   - Sektor Perdagangan dan Konstruksi tetap menjadi pilar kedua dan ketiga dengan kontribusi masing-masing sebesar 16,52% dan 15,85%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 didorong kuat oleh sektor Pertanian yang tumbuh dua kali lipat lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan total daerah tertahan oleh anjloknya sektor Pertambangan dan melambatnya sektor infrastruktur (Konstruksi) serta transportasi.

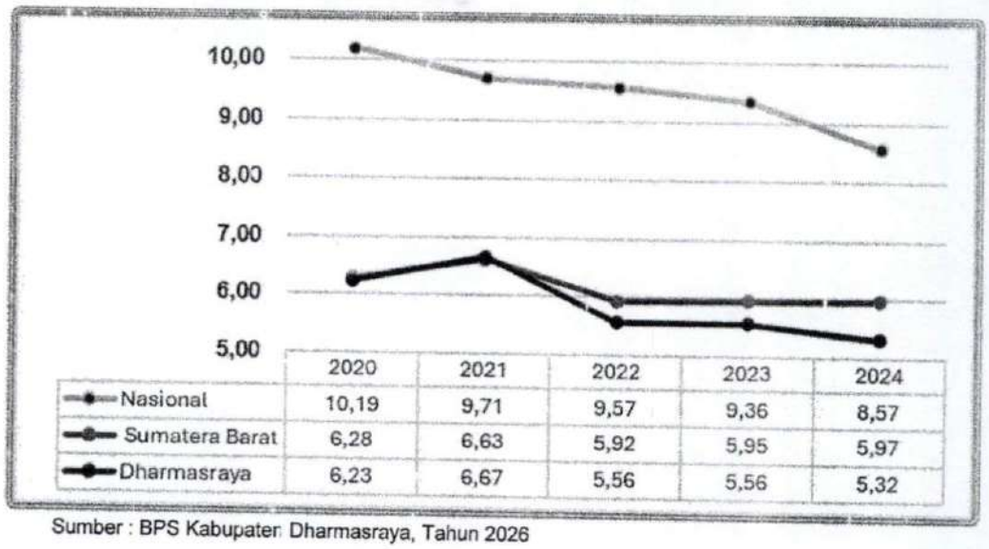
Hal ini menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi Dharmasraya saat ini sangat bergantung pada komoditas alam. Untuk mencapai angka pertumbuhan yang setara dengan Nasional, diperlukan upaya untuk membangkitkan kembali sektor pertambangan atau mempercepat hilirisasi pada industri pengolahan yang saat ini pertumbuhannya masih melambat di angka 4,83%.

A.3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau disebut juga dengan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan atau dikategorikan penduduk miskin. Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kondisi kemiskinan dikatakan membaik apabila tingkat kemiskinan semakin lama semakin menurun atau mendekati nol.

Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Garis kemiskinan (GK) pada Maret 2023 sebesar Rp. 477.580 per kapita per bulan. Artinya jika rata-rata satu orang memiliki pendapatan perkapita di bawah garis kemiskinan maka tergolong pada kelompok miskin. Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Grafik Tingkat Kemiskinan (Persen)



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57
Sumatera Barat	6,28	6,63	5,92	5,95	5,97
Dharmasraya	6,23	6,67	5,56	5,56	5,32

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2026

Tingkat kemiskinan Dharmasraya sedikit berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, dan cukup rendah dibandingkan capaian nasional. Meskipun begitu tingkat kemiskinan ini dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan angka kemiskinan Kabupaten Dharmasraya pada periode 2020-2024 sejalan dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data di atas artinya Kabupaten Dharmasraya berhasil mengukuhkan diri sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah dan stabil. Meskipun sempat terdampak pandemi di tahun 2021, resiliensi ekonomi daerah yang ditopang oleh sektor Pertanian (sebagaimana terlihat pada data PDRB) mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga menyentuh 5,32% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan di Dharmasraya berjalan lebih efektif dibandingkan banyak daerah lain di Sumatera Barat dan Indonesia secara umum. Tantangan ke depan adalah menjaga tren penurunan ini tetap berlanjut di tengah ketidakpastian ekonomi global.

A.4. Indeks Gini (Gini Rasio)/ Ketimpangan Pendapatan

Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris,

sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.

Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:

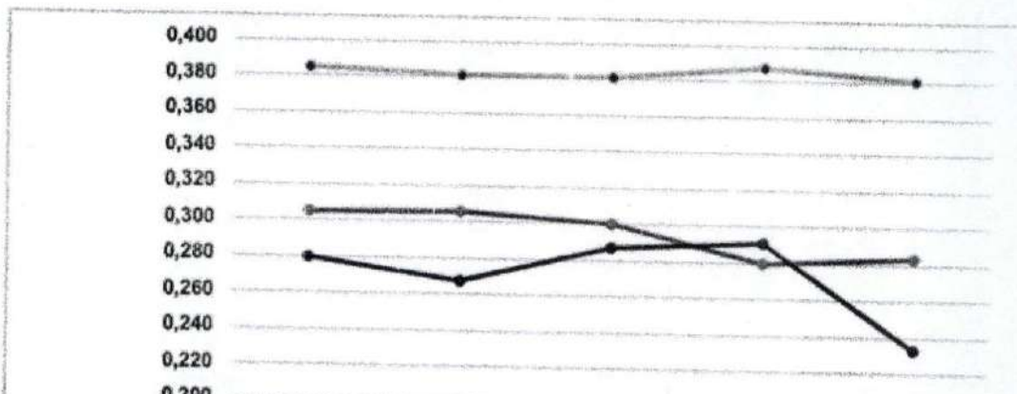
1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang.
3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik.

Tren Indeks Gini di Kabupaten Dharmasraya cukup fluktuatif namun berakhir dengan pencapaian luar biasa di tahun terakhir. Tahun 2020–2023, angka ketimpangan bergerak dinamis di kisaran 0,268 hingga 0,291. Puncak ketimpangan tertinggi dalam periode ini terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,291. Dan tahun 2024 terjadi penurunan tajam yang sangat signifikan menjadi 0,233. Ini merupakan angka ketimpangan terendah dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran di masyarakat Dharmasraya semakin merata.

Jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi, Kabupaten Dharmasraya berhasil mempertahankan posisi sebagai daerah dengan tingkat ketimpangan yang sangat rendah jika dibandingkan dengan skala yang lebih luas. Terhadap Nasional, Angka Gini Dharmasraya (0,233) terpaut sangat jauh dari angka nasional yang berada di level 0,381 pada tahun 2024 dan erhadap Provinsi: Dharmasraya juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebesar 0,283.

Untuk lebih jelasnya gini rasio Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Grafik Gini Rasio (Indeks)



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381
Sumatera Barat	0,305	0,306	0,300	0,280	0,283
Dharmasraya	0,280	0,268	0,287	0,291	0,233

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2026

Rasio Gini Dharmasraya maupun Provinsi Sumatera Barat tergolong pada ketimpangan rendah sehingga disini dipandang bahwa pemerataan pendapatan di masyarakatnya Berbeda dengan capaian nasional yang tergolong pada ketimpangan sedang.

Artinya Kabupaten Dharmasraya tidak hanya berhasil menekan angka kemiskinan, tetapi juga sukses mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keberhasilan menurunkan Indeks Gini hingga ke angka 0,233 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa adanya kesenjangan yang mencolok antara kelompok kaya dan miskin.

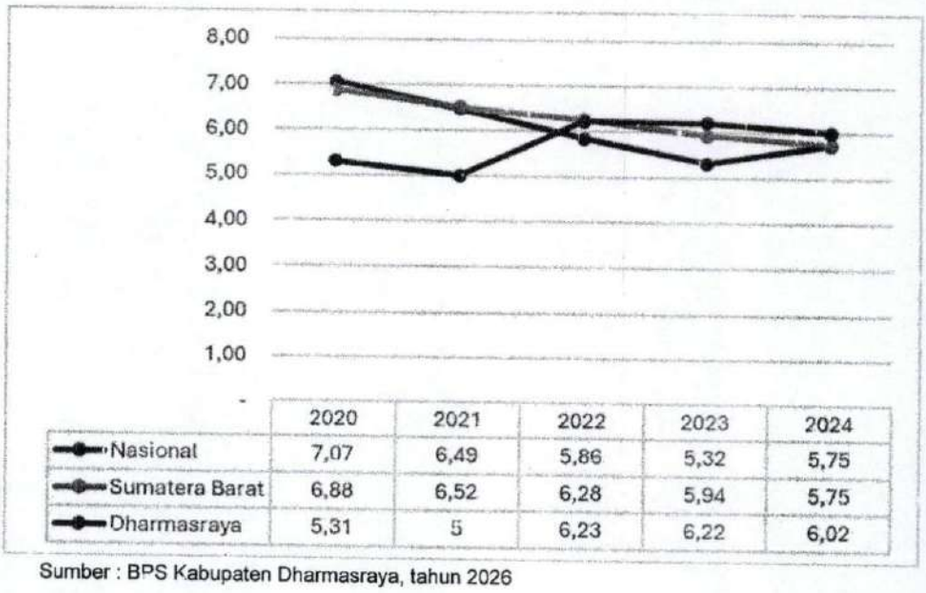
Penurunan ketimpangan ini kemungkinan besar dipicu oleh dominasi sektor Pertanian yang tumbuh pesat sebesar 13,52% di tahun 2024. Karena sektor pertanian umumnya melibatkan banyak masyarakat di tingkat akar rumput, peningkatan di sektor ini berdampak langsung pada pemerataan pendapatan dan pengeluaran di daerah.

A.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Untuk lebih jelasnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	5,75
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75
Dharmasraya	5,31	5	6,23	6,22	6,02

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2026

Capaian TPT di Kabupaten Dharmasraya selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun relatif terkendali dibandingkan wilayah lain pada awal periode: Tahun 2020–2021: Dharmasraya mencatatkan angka pengangguran yang rendah, bahkan sempat turun dari 5,31% menjadi 5,00%, tahun 2022–2023 terjadi lonjakan angka pengangguran yang cukup signifikan menjadi 6,23% dan bertahan di level 6,22%. Peningkatan ini berlawanan dengan tren Nasional dan Provinsi yang justru mengalami penurunan pada periode yang sama. Sedangkan tahun 2024, capaian tingkat pengangguran mulai menunjukkan tren pemulihan dengan turun ke angka 6,02%.

Meskipun sempat memiliki angka TPT terendah pada tahun 2020 dan 2021, posisi Dharmasraya di tahun 2024 memerlukan perhatian khusus. Jika dibandingkan dengan

capaian nasional, angka TPT Dharmasraya (6,02%) kini berada di atas rata-rata Nasional yang sebesar 5,75%. Sementara dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat: Senada dengan posisi nasional, TPT Dharmasraya juga sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi yang berada di level 5,75%.

Namun demikian hal ini diharapkan ke depan tidak akan lebih buruk mengingat masih tingginya daya serap sektor pertanian serta sektor pendukung lainnya seperti sektor industri dan sektor perdagangan yang juga memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah perekonomian daerah, serta masih tumbuhnya perekonomian daerah cukup baik.

A.6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

a. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
b. Pengetahuan (knowledge)
c. Standar hidup layak (decent standard of living)

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

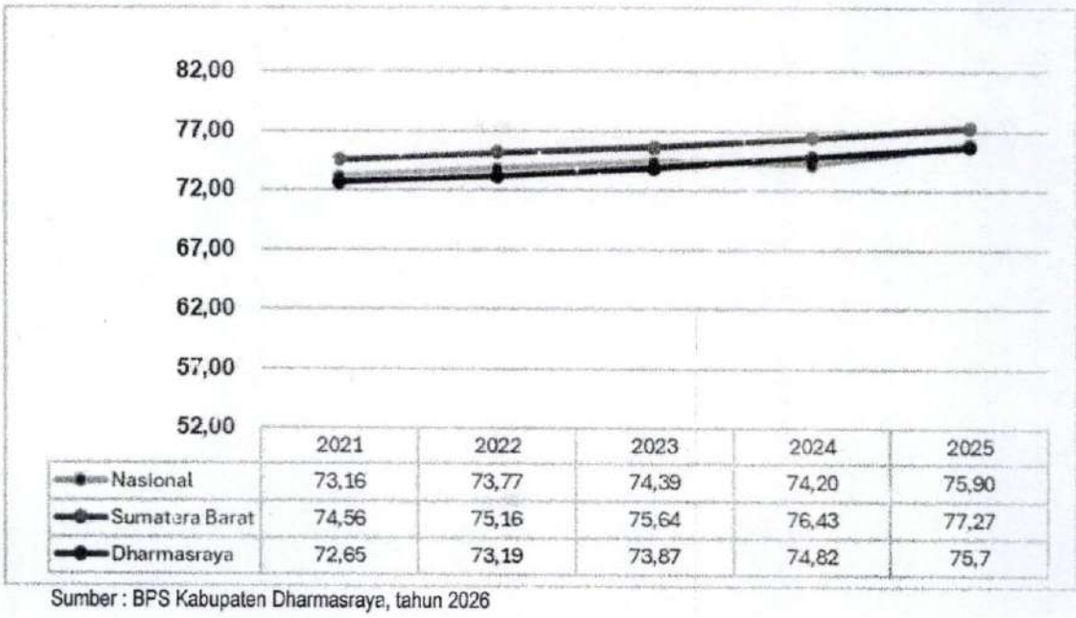
Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

1) Rendah: IPM < 60;
2) Sedang: 60 ≤ IPM < 70;
3) Tinggi: 70 ≤ IPM < 80;
4) Sangat tinggi: IPM ≥ 80.

Berdasarkan data, indeks pembangunan manusia di Dharmasraya terus mengalami peningkatan tanpa adanya penurunan dalam lima tahun terakhir: Awal Periode (2021), IPM Dharmasraya berada pada angka 72,65. Pertumbuhan Menengah (2022-2023) meningkat menjadi 73,19 pada 2022 dan naik kembali menjadi 73,87 pada 2023. Pencapaian tahun 2024-2025, pada tahun 2024, IPM menyentuh angka 74,82 dan diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 75,7 pada tahun 2025.

Dilbandingkan dengan IPM Nasional dan Provinsi tahun 2024, IPM Kabupaten Dharmasraya (74,82) telah berhasil melampaui angka IPM Nasional yang berada di level 74,20. Hal ini berlanjut pada proyeksi 2025 di mana Dharmasraya (75,7) tetap kompetitif terhadap Nasional (75,90), meskipun masih berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat (yang mencapai 77,27 pada 2025), laju peningkatan IPM Dharmasraya terlihat konsisten mengejar ketertinggalan tersebut. Perkembangan IPM secara nasional, provinsi, serta Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat dari Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2024 (indeks) di Kabupaten Dharmasraya



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	73,16	73,77	74,39	74,20	75,90
Sumatera Barat	74,56	75,16	75,64	76,43	77,27
Dharmasraya	72,65	73,19	73,87	74,82	75,7

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2026

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mempertahankan tren positif dalam pembangunan kualitas manusia. Dengan status IPM yang berada di kategori 'Tinggi' (di atas 70), Dharmasraya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didominasi sektor pertanian berjalan selaras dengan peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Dharmasraya melampaui angka IPM Nasional pada tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pembangunan daerah efektif dalam meningkatkan standar hidup warganya. Jika tren ini berlanjut, Dharmasraya berpotensi besar untuk segera mendekati rata-rata pencapaian IPM tingkat provinsi dalam beberapa tahun ke depan.

Dari sisi relevansi, kecenderungan perkembangan Kabupaten Dharmasraya sejalan dengan perkembangan IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Apabila dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, maka posisi IPM Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	IPM	
		Urutan	Indeks
1	Kab. Kepulauan Mentawai	20	67,62
2	Kab. Pesisir Selatan	15	73,72
3	Kab. Solok	18	73,26
4	Kab. Sijunjung	14	73,73
5	Kab. Tanah Datar	9	77,04
6	Kab. Padang Pariaman	11	75,71
7	Kab. Agam	10	76,04
8	Kab. Lima Puluh Kota	17	73,43
9	Kab. Pasaman	19	71,6
10	Kab. Solok Selatan	13	74,01
11	**Kab. Dharmasraya**	**12**	**75,7**
12	Kab. Pasaman Barat	16	73,69
13	Kota Padang	1	84,93
14	Kota Solok	6	80,9
15	Kota Sawahlunto	8	77,05

No	Kabupaten/Kota	IPM	
		Urutan	Indeks
16	Kota Padang Panjang	4	81,32
17	Kota Bukittinggi	2	83,05
18	Kota Payakumbuh	3	81,62
19	Kota Pariaman	5	81,27
20	SUMATERA BARAT		77,27

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2026

Jika dilihat dari perkembangan IPM Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Capaian IPM Dharmasraya naik dari 74,82 pada tahun 2024 menjadi 75,7 pada tahun 2025 dan Dharmasraya menempati urutan ke-12 dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Secara indeks capaian Dharmasraya pada tahun 2025 (75,7) masih di bawah rata-rata provinsi (77,27), dan nasional (75,90).

Adapun IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowleage*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

a. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

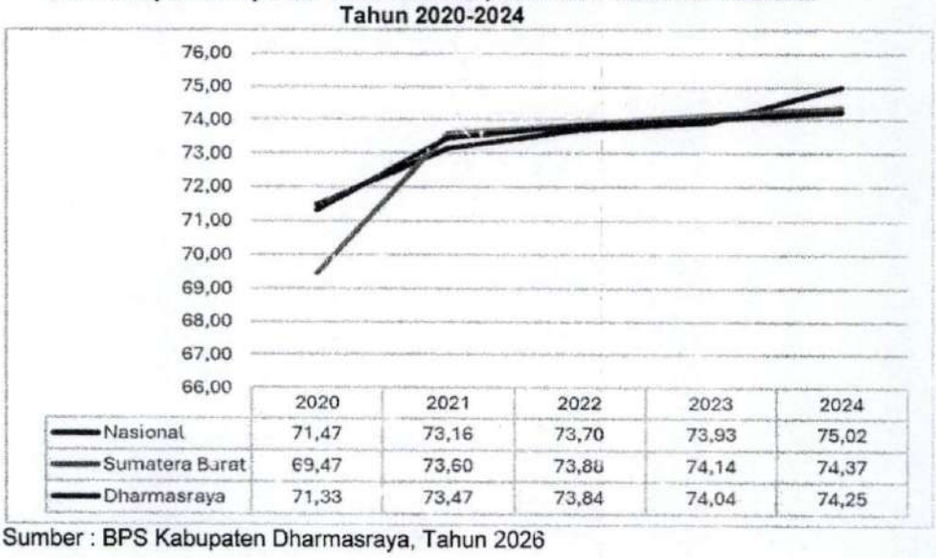
Umur Harapan Hidup Saat Lahir atau disebut juga dengan Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang sangat positif dan stabil dalam lima tahun terakhir. Angka Usia Harapan Hidup di wilayah ini terus merangkak naik setiap tahunnya. Pada tahun 2020 angka usia harapan hidup Kabupaten Dharmasraya yaitu 71,33 tahun dan tahun 2024 yaitu 74,25 tahun. Secara akumulatif, selama periode 2020–2024, penduduk Dharmasraya mendapatkan tambahan harapan hidup sebesar 2,92 tahun.

Dilihat berdasarkan capaian terhadap Provinsi Sumatera Barat: Angka UHH Dharmasraya (74,25) hampir menyamai rata-rata provinsi yang berada di level 74,37 tahun. Selisih tipis ini menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan di Dharmasraya sudah sejalan dengan standar provinsi. Sedangkan terhadap capaian Nasional: Meskipun masih berada di bawah angka Nasional (75,02), tren pertumbuhan UHH di Dharmasraya tergolong stabil dan terus mengejar ketertinggalan.

Perbandingan data usia harapan hidup Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6
Usia Harapan Hidup Saat Lahir Nasional, Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	71,47	73,16	73,70	73,93	75,02
Sumatera Barat	69,47	73,60	73,80	74,14	74,37
Dharmasraya	71,33	73,47	73,84	74,04	74,25

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2026

Pencapaian IPM di Kabupaten Dharmasraya ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat diukur dari indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 74,25 tahun, hal ini merupakan cerminan dari keberhasilan integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Selama periode 2020-2024, walaupun relatif lambat, AHH meningkat 2,92 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi, hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Dharmasraya dan peningkatanan kualitas sarana pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Peningkatan konsisten ini menjadi salah satu indikator utama yang mendorong naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dharmasraya hingga mencapai level 74,82. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menjamin standar hidup sehat dan kualitas pelayanan medis bagi masyarakatnya, sehingga Dharmasraya kini memiliki pondasi sumber daya manusia yang lebih tangguh dan berumur panjang untuk mendukung pembangunan di masa depan.

UHH Kabupaten Dharmasraya diatas rata-rata nasional namun meskipun dari angka capaian berada dibawah rata-rata provinsi, namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Artinya capaian pembangunan bidang kesehatan Dharmasraya dibawah capaian nasional, tetapi tidak jauh berbeda atau beriringan dengan capaian provinsi.

b. Rata-rata Lama Sekolah

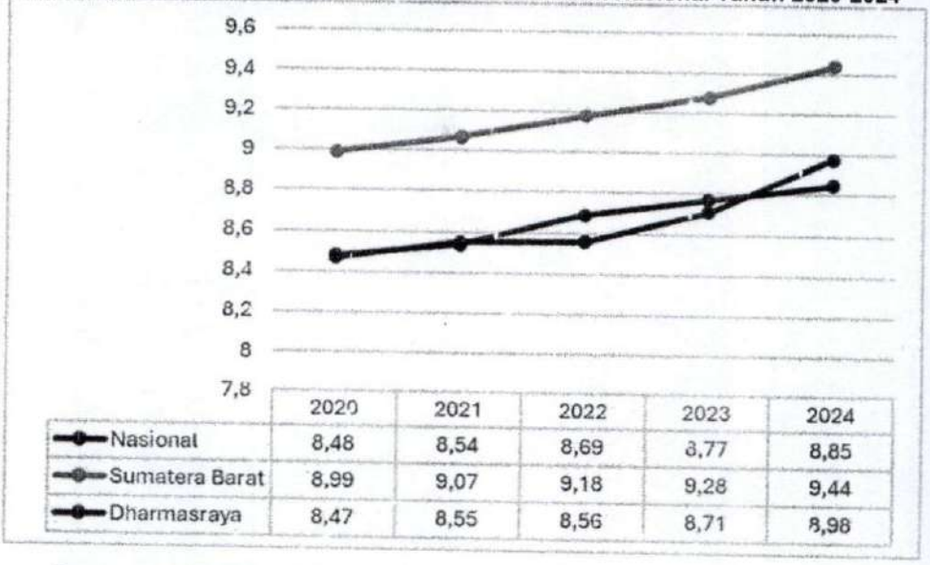
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Berdasarkan data, RLS Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 adalah 8,47 tahun, dan tahun 2024 yaitu 8,98 tahun. Dalam lima tahun terakhir, penduduk Dharmasraya mengalami peningkatan durasi mengenyam pendidikan formal sebesar 0,51 tahun. Angka 8,98 tahun pada 2024 mengindikasikan bahwa secara rata-rata masyarakat Dharmasraya telah menempuh pendidikan hampir setingkat dengan lulusan SMP/Sederajat (9 tahun).

Capaian RLS Kabupaten Dharmasraya menunjukkan performa yang sangat kompetitif jika dibandingkan capaian Nasional, dimana pada tahun 2024, RLS Dharmasraya (8,98) berhasil melampaui rata-rata RLS Nasional yang berada di angka 8,85. Lompatan signifikan terjadi antara tahun 2023 ke 2024, di mana Dharmasraya berhasil menyalip kurva nasional. Sedangkan capaian terhadap Provinsi Sumatera Barat: Meskipun masih berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 9,44 pada tahun 2024, percepatan pertumbuhan RLS di Dharmasraya menunjukkan tren yang positif untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Perbandingan data rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7
Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85
Sumatera Barat	8,99	9,07	9,18	9,28	9,44
Dharmasraya	8,47	8,55	8,56	8,71	8,98

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Dharmasraya yang mencapai 8,98 tahun pada 2024 merupakan prestasi strategis, mengingat capaian ini telah berada di atas rata-rata nasional. Keberhasilan menyentuh angka psikologis 9 tahun (setingkat lulusan SMP) menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun di Dharmasraya berjalan efektif. Peningkatan dimensi pengetahuan ini menjadi penggerak utama naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dharmasraya yang menyentuh angka 74,82 pada 2024. Dengan masyarakat yang semakin terdidik, Kabupaten Dharmasraya memiliki modal sosial yang kuat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah di masa depan.

Berbeda dibandingkan dengan dimensi kesehatan, RLS Kabupaten Dharmasraya hanya mengalami sedikit kenaikan dari 8,71 tahun menjadi 8,98 tahun. Sehingga posisi Dharmasraya jauh di bawah nasional serta berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat.

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

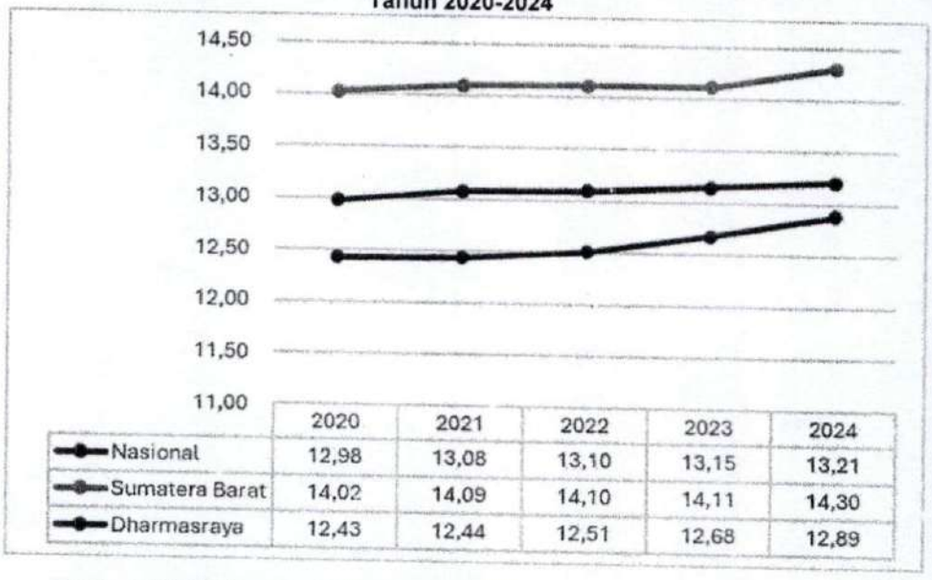
HLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk yang berusia 7 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berdasarkan data Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren peningkatan yang stabil setiap tahunnya. Indikator ini mencerminkan peluang anak-anak di Dharmasraya untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih tinggi di masa depan. Tahun 2020 HLS Dharmasraya adalah 12,43 tahun dan tahun 2025 yaitu 12,89 tahun.

Jika dibandingkan dengan Capaian Nasional dan Capaian Provinsi Sumatera Barat, Meskipun terus mengalami kenaikan, posisi HLS Dharmasraya masih menghadapi tantangan jika dibandingkan dengan rata-rata wilayah yang lebih luas. Capaian HLS Dharmasraya (12,89 tahun) masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 13,21 tahun pada tahun 2024. Sedangan dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, terdapat selisih yang cukup lebar dibandingkan rata-rata provinsi yang telah mencapai 14,30 tahun. Hal ini menunjukkan adanya ruang bagi Pemerintah Daerah untuk terus mendorong program transisi pendidikan dari tingkat menengah atas ke perguruan tinggi.

Perbandingan data harapan lama sekolah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8
Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21
Sumatera Barat	14,02	14,09	14,10	14,11	14,30
Dharmasraya	12,43	12,44	12,51	12,68	12,89

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2026

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Dharmasraya yang menyentuh angka 12,89 tahun pada tahun 2024 atau setara dengan Diploma I, lebih lama dibandingkan dengan anak berusia sama di tahun 2024, hal ini menandai fase transisi penting bagi kualitas pendidikan daerah. Kenaikan yang stabil ini merupakan kontributor krusial bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dharmasraya yang mencapai 74,82 di tahun 2024.

Peningkatan HLS menunjukkan bahwa investasi pemerintah daerah pada infrastruktur sekolah dan program bantuan pendidikan telah meningkatkan motivasi belajar masyarakat. Jika tren ini dijaga dan target partisipasi di tahun 2025 dapat dioptimalkan kembali, Dharmasraya berpotensi besar untuk memperkecil gap pendidikan dengan rata-rata provinsi dan menciptakan generasi yang lebih kompetitif di tingkat perguruan tinggi

Dibandingkan dengan HLS nasional dan provinsi, maka HLS Kabupaten Dharmasraya masih berada paling rendah, begitu juga ditinjau dari perkembangan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 juga masih menunjukkan perkembangan yang rendah.

Berdasarkan dimensi pengetahuan untuk indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masih relatif rendah sehingga hal ini mempengaruhi percepatan perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya.

Sehubungan dengan relatif rendahnya capaian IPM serta lambatnya perkembangan pada dimensi pendidkan, maka perlu strategi serta menjadi prioritas pembangunan yang lebih efektif dalam mendorong indikator-indikator pembangunan bidang pendidikan. Dengan dijadikannya bidang pendidikan sebagai prioritas pembangunan maka diharapkan IPM Dharmasraya dapat didongkrak untuk bersaing dalam pencapaian IPM tingkat Provinsi.

d. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Perbulan

Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan adalah jumlah rata-rata pengeluaran yang dibelanjakan oleh satu orang (per kapita) dalam satu bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Berdasarkan Data menunjukkan bahwa selama periode 2020 hingga 2024, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di Kabupaten Dharmasraya mengalami tren kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2020, pengeluaran tercatat sebesar Rp939.416,67, kemudian meningkat menjadi Rp943.666,67 pada tahun 2021. Kenaikan terus berlanjut pada 2022 sebesar Rp970.833,33, dan pada 2023 menjadi Rp991.750,00. Di tahun 2024, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan mencapai angka tertinggi dalam periode lima tahun, yaitu Rp1.021.166,67.

Perbandingan data pengeluaran rata-rata per kapita perbulan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pertahun	(Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	11.273.000	11.324.000	11.650.000	11.901.000	12.254.000
Perbulan	(Ribu Rupiah/Orang/ Bulan)	939.416.67	943.666.67	970.833.33	991.750.00	1.021.166.67

Sumber : https://www.bps.go.id/ dan Hasil Analisis. Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren positif selama 2020–2024. Hal ini bisa menjadi indikator pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. meskipun perlu dilihat dalam konteks inflasi dan distribusi pendapatan.

B. Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan menjadi pedoman dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah.

B.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

B.1.1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

A. Kebijakan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah

1. Penyempurnaan regulasi pengelolaan pendapatan daerah terutama pajak dan retribusi daerah. Diantaranya dengan penerbitan perda Nomor 1 tahun 2024 serta kerjasama dengan pihak pemerintah nagari sekaligus pemberian reward bagi pemerintah daerah capaian pajak tertinggi.

2. Melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak melalui pembayaran online/aplikasi dengan bekerjasama dengan pihak perbankan. Dengan inovasi ini wajib pajak dapat membayar pajak kapanpun dan dimanapun. Hal ini terus dioptimalkan melalui sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak.
3. Dimulainya sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat taat pajak agar taat pajak yang dimulai dari ASN, sehingga ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya agar taat pajak dan tertib dalam pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pendataan potensi pajak dan wajib pajak sebagai dasar dalam penetapan besaran target pajak dan menghindari duplikasi database pajak daerah.
5. Penyediaan mall pelayanan publik (MPP) terkait pelayanan pendapatan daerah dan layanan keuangan daerah lainnya.
6. Pemungutan opsen pajak PKB dan BBNKB.
7. Perbaikan sarana dan prasarana pemerintah daerah yang akan digunakan oleh masyarakat yang disejalankan dengan optimalisasi pendapatan dari retribusi daerah.

B. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam rangka optimalisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan melalui:

1) Penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk peningkatan deviden/ bagi hasil yang diperoleh setiap tahunnya.
2) Pengelolaan aset milik daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan melalui sewa aset milik daerah kepada masyarakat/ pihak swasta, baik aset yang berupa gedung, tanah dan aset tetap lainnya.
3) Kerja sama dengan pihak swasta melalui skema kerja sama atau investasi untuk mengelola sumber daya alam atau aset daerah. Hal ini dapat mengoptimalkan pengelolaan serta memperluas basis pendapatan asli daerah.

C. Lain-lain PAD Yang Sah yang dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, meliputi :

Diantara kebijakan yang akan dilakukan di tahun 2025 terkait PAD yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah yaitu:

1. Penjualan aset yang sudah tidak efisien digunakan oleh pemda, diantaranya kendaraan yang sudah tidak dapat digunakan secara optimal oleh daerah.
2. Sedangkan sumber lainnya seperti pendapatan denda, jasa giro atau lainnya berjalan seperti ketentuan yang berlaku.

B.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan transfer dari pemerintah lainnya, meskipun sebagian besar pendapatan ini sudah *given* berdasarkan data teknis dan besaran pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat/ provinsi ke kabupaten Dharmasraya. Namun terdapat upaya/ kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya:

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Untuk mendapatkan alokasi DAK Fisik dan beberapa jenis DAK Non Fisik, maka pemerintah pusat melalui Bappenas mengkoordinasikan kegiatan yang dapat diusulkan ke pemerintah pusat yang mendukung prioritas nasional sekaligus juga sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pemerintah daerah. Usulan kegiatan ini dilaksanakan melalui aplikasi Krisna berdasarkan lokasi prioritas (Lokpri) yang ditetapkan. Adapun bidang yang dapat diusulkan yaitu pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang air minum, dan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

2. Optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit:
   - Dilakukan melalui pendataan sawit yang telah dimulai tahun 2024 dan berlanjut di tahun 2025 agar alokasi sesuai dengan potensi dan produksi nyata.
   - Sebagai informasi, alokasi DBH Dharmasraya pada tahun 2023 sebesar Rp 10.982.777.000,- dan turun menjadi Rp 9.701.540.000,- pada tahun 2024 (turun sekitar Rp 1.281.237.000,-).
3. Peluang Dana Insentif Daerah (DID): Diusahakan berdasarkan penilaian indikator kinerja makro maupun hasil penilaian tertentu yang dilakukan setiap tahunnya, termasuk optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

   Pada Perubahan APBD tahun 2025, terdapat perubahan target pendapatan pada yaitu penurunan Pendapatan Transfer sebesar Rp.45.536.176.082,00 dengan uraian sebagai berikut:
   - Adanya penurunan Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat sebesar Rp67.285.191.000,0
   - Adanya kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp21.749.014.918,00

B. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

C. Salah satu peluang untuk mendapatkan pendanaan pembangunan dari proinsi adalah adanya bantuan keuangan dari provinsi, dimana bantuan keuangan ini dalam bentuk kegiatan yang pendanaannya sesuai pricritas provinsi dan sesuai dengan prioritas kabupaten dan kewenangan kabupaten.

D. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah diperoleh dari hibah pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Adapun hibah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah lainnya, masyarakat, bagan/lembaga dan pihak ketiga, namun besaran yang akan diperoleh belum dapat ditentukan besarannya, karena ini sangat dipengaruhi oleh iklim perekonomian dan perkembangan dunia usaha yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Beberapa kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah antara lain:

a. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah saat ini untuk mengetahui apakah target yang ditetapkan sebelumnya masih realistis atau perlu disesuaikan. Ini bisa melibatkan analisis tren pendapatan, potensi pendapatan baru, dan perubahan dalam kondisi ekonomi.
b. Menyesuaikan anggaran belanja dan rencana keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan yang baru. Jika pendapatan diproyeksikan lebih rendah dari yang sebelumnya, maka anggaran belanja mungkin perlu dikurangi.
c. Mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi baru untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan, seperti peningkatan efisiensi dalam administrasi pajak, pengenalan pajak baru, atau revisi tarif pajak dan retribusi.
d. Memanfaatkan data dan analisis untuk membuat proyeksi pendapatan yang lebih akurat. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen data yang lebih baik.
e. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perubahan perencanaan untuk mendapatkan masukan dan dukungan, serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
f. Menetapkan mekanisme pemantauan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan perubahan perencanaan pendapatan dan membuat penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan.
g. Menjaga agar kebijakan fiskal tetap bertanggung jawab, termasuk menghindari defisit yang berlebihan dan memastikan bahwa perubahan tidak merugikan stabilitas keuangan daerah.

B.2. Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaranntuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Penggunaan Belanja Daerah dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

B.2.1. Belanja Operasi, terdiri dari:

Belanja operasi digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a) **Belanja Pegawai**

Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari gaji pokok pns/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, termasuk tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas pnsd, pembulatan gaji, iuran asuransi jaminan kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang operasional pimpinan DPRD, tunjangan badan legislasi, tunjangan profesi guru pnsd, tambahan penghasilan guru pnsd, tunjangan transportasi, tunjangan reses.

Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja. Selain Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai, Belanja Pegawai juga berisi alokasi belanja untuk Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. Sedangkan belanja gaji PPPK akan disesuaikan dengan alokasi DAU yang diitentukan. Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Asuransi Jaminan Kematian, Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai BOS Belanja Pegawai BOK, Honorarium Pelayanan Kesehatan, Uang Lembur. Selain itu dalam belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

b) **Belanja barang dan jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan,

sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

c) Belanja Bunga

Belanja bunga pada tahun 2024 tidak dialokasikan.

d) Belanja Subsidi

Belanja subsidi pada tahun 2024 tidak dialokasikan.

e) Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemeritah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya serta hibah untuk pelaksanaan Pileg dan Pilkada yang akkan dilaksanakan di tahun 2024 Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

f) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial ditambah untuk bantuan pangan non tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan keluarga miskin.

B.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringanya, dan belanja aset tetap lainnya.

B.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan biaya administrasi pelaksanaan DAK.

B.2.4. Belanja Transfer, terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa dihitung berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol
3. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol dihitung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati perubahan belanja diarahkan salah satunya dalam bentuk penyesuaian arah keijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, serta program Bupati Dan Wakil Bupati sebagai tahun awal dalam pelaksanaan program unggulan lima tahun ke depan, sehingga terdapat beberapa perubahan pada belanja.

Perubahan belanja diarahkan salah satunya dalam bentuk penyesuaian arah keijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, serta program Bupati Dan Wakil Bupati sebagai tahun awal dalam pelaksanaan program unggulan lima tahun ke depan. Beberapa program unggulan Pemerintah Daerah pada tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pengembangan sektor pertanian yang mencakup berbagai aspek seperti seperti peningkatan produksi jagung, pengembangan desa mandiri benih, dan bantuan bibit untuk tanaman unggulan seperti sawit dan karet.
2. Mendorong setiap nagari di Dharmasraya untuk memiliki produk unggulan berbasis potensi lokal, baik dalam bentuk hasil pertanian, olahan hutan, kerajinan, hingga pangan khas daerah atau disebut *One Village One Product* (OVOP).
3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Peningkatan Infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta fasilitas pendidikan.

B.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Pengelolaran pembiayan tahun 2025 dialokasikan untuk:

1. Pembiayaan Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Penerangan jalan Umum;
2. Penambahan pembiayaan untuk penambahan modal kepada BUMD.

C. Asumsi - Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD

C.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025.

Ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan, antara lain pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,2% dari pertumbuhan 3,5% di tahun 2022. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,2% Pertumbuhan ekonomi global tersebut relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, eskalasi Timur Tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan *Gross National Income per kapita (Atlas Method)* menjadi US$5.500-5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3-5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US$.

C.2. Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (well-being), serta mendorong pemerataan antardaerah. Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan dengan cara optimalisasi Pendapatan Negara (collecting more), peningkatan kualitas Belanja Negara (spending better), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (innovative financing) yang dikelola secara prudent dan kredibel.

1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 13,21-14,20 persen Produk Domestik Bruto, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar 10,70-11,20 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 2,50-3,00 persen Produk Domestik Bruto. Optimalisasi Pendapatan Negara diarahkan pada upaya perbaikan administrasi dan pemungutan perpajakan yang lebih efektif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Arah kebijakan difokuskan pada penguatan kelembagaan penerimaan negara, percepatan implementasi core tax system, penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak, penajaman tax incentive tepat sasaran untuk mendorong sektor prioritas, serta reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, pemanfaatan aset Barang Milik Negara, serta inovasi layanan. Selain itu, upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain didukung oleh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

2. Belanja Negara

Pada tahun 2025, Belanja Negara ditargetkan mencapai 15,66- 17,01 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,61-12,74 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke Daerah sebesar 4,05-4,27 persen Produk Domestik Bruto. Kebijakan Belanja Negara, baik Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja NonKementerian/Lembaga, dan Belanja Transfer ke Daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan tetap mendorong peningkatan Kualitas Belanja Negara (spending better) supaya lebih produktif untuk mendukung prioritas pembangunan (antara lain pendidikan, kesehatan, subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran, infrastruktur/konektivitas, serta pembenahan kelembagaan dan

regulasi) dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

3. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 diarahkan mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana Defisit Anggaran ditargetkan sebesar (2,45)-(2,80) persen Produk Domestik Bruto, dan belanja investasi below the line sebesar satu persen Produk Domestik Bruto. Dengan kebijakan tersebut, upaya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan pada upaya penyediaan pembiayaan yang kredibel untuk mendukung kebutuhan pembangunan baik melalui pembiayaan utang dan non-utang (optimalisasi Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha dan blended finance).

Fokus pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, proyek-proyek yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek pengganda besar terhadap perekonomian, serta diarahkan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai agent of development yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal nasional, perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan juga perlu dilakukan di tingkat pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut di antaranya melalui pemanfaatan instrumen pinjaman daerah dan obligasi/sukuk daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

C.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Secara keseluruhan tahun, perekonomian Sumatera Barat tumbuh kuat pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,62% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,32% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi yang lebih baik pasca pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di akhir tahun 2022. Berdasarkan komponen pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didorong oleh komponen PMTB dan Konsumsi Pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan kinerja ekonomi Sumatera Barat tahun 2023 terjadi pada lapangan usaha Konstruksi dan Industri Pengolahan. Tekanan inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV 2023 mengalami peningkatan. Inflasi pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,94% (yoy).

Peningkatan inflasi didorong oleh akselerasi konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru sehingga menyebabkan gejolak harga utamanya komoditas pangan dan transportasi. Meningkatnya transmisi penyesuaian komponen harga yang diatur pemerintah, terutama cukai hasil tembakau, juga berpengaruh pada realisasi inflasi yang lebih tinggi di akhir tahun. Lebih lanjut, berbagai faktor lain seperti curah hujan yang relatif tinggi, harga emas dunia yang fluktuatif, serta ketidakpastian ekonomi dan keuangan global juga menjadi pendorong inflasi gabungan Sumatera Barat. Meskipun mengalami peningkatan, inflasi gabungan Sumatera Barat pada triwulan IV 2023 mencatatkan capaian lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi Nasional sebesar 2,61% (yoy) serta berada dalam rentang sasaran inflasi yang ditetapkan sebesar 3 ± 1% (yoy).

Adapun arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang secara tidak langsung berpengaruh pada perekonomian Kabupaten Dharmasraya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki backward dan forward linkage yang besar.
3. Pembangunan di sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor dengan distribusi PDRB yang dominan di Sumatera Barat diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.
4. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat inflasi di tahun 2022 akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program akselerasi perekonomian dan transformasi ekonomi akan berlanjut di tahun 2024 dan 2025 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, menurunkan tingkat ketimpagan antar wilayah, pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kuallitas Sumber Daya Manusia yang diukur melalui peningkatan nilai IPM.

C.4. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

Sejalan dengan menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Sumatera Barat, maka perkembangan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya juga memperlihatkan perkembangan yang positif. Selanjutnya adanya peningkatan pendapatan perkapita yang sudah mencapai 55,62 juta rupiah di tahun 2023. Namun perkembangan tersebut belum dapat menekan tingkat kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan masyarakat. Namun pada tingkat pengangguran terbuka sudah menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022, atau turun dari 6,23 persen menjadi 6,22 persen.

Tabel 2.4
Kondisi Ekonomi Makro Kab. Dharmasraya Tahun 2021- 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Sasaran 2025 (RPJMD)	Sasaran 2025 (RKPD)
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	3,42	4,28	4,32	4,5	4,7	4,7
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	46,52	52,12	55,62	55,95	46,74	56

No	Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Sasaran 2025 (RPJMD)	Sasaran 2025 (RKPD)
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,63	5,56	5,56	5,4	5,92	5,3
4	Gini Rasio	0,268	0,287	0,291	0,284	0,25	0,27
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5	6,23	6,22	5,3	5,1	5,1
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76	72,3	73,04	74,8	72,29	75

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya,2024, dan hasil analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2025
Keterangan :
* = Proyeksi indikator makro

Berdasarkan hasil evaluasi capaian 6 (enam) indikator ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB, berdasarkan perkembangan PDRB tahun 2021- 2023 maka target pertumbuhan ekopnomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 masih dapat mengikuti target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 4,7 persen.
2. PDRB perkapita, perkembangan PDRB nilai PDRB ADHB hingga tahun 2023 selalu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan atau sudah melampaui target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dimana target RPJMD di tahun 2025 semula ditetapkan sebesar 46,74 juta ditingkatkan menjadi 56 juta rupiah.
3. Tingkat kemiskinan, proyeksi tingkat kemiskinan juga diproyeksikan lebih baik dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini didasari oleh perkembangan hingga tahun 2023 yang masih memperlihatkan kecenderungan turun.
4. Gini rasio, sedangkan untuk indeks gini yang memperlihatkan ketimpangan pedapatan penduduk berbanding negatif dari indikator lainnya. Karena dilihat dari perkembangan hingga tahun 2023 masih belum memperlihatkan penurunan.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka, meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya terlihat cenderung meningkat. Namun dilihat dari perkembangan perkenomian beberapa tahun belakangan. Serta optimisnya tingkat penerimaan tenaga kerja baik oleh pemerintah sendiri maupun sektor swasta di Dharmasraya masih.

Sementara pada perubahan APBD Tahun 2025, terdapat perubahan beberapa indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi*				Target 2026			
		2021	2022	2023	2024	RPJMD 2025	*Sasaran*	*Outlook*	Ket.
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	3,42	4,28	4,32	3,86	4,7	4,7	4,8	↑
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	46,52	52,12	55,62	58,71	46,74	56	60	↑
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,63	5,56	5,56	5,32	5,92	5,3	5,3	=
4	Gini Rasio	0,268	0,287	0,291	0,233	0,259	0,27	0,23	↑
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5	6,23	6,22	6,02	5,1	5,1	6	↑
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76	72,3	73,04	74,82	72,29	75,02	75,02	=
	Usia Harapan Hidup (Tahun)*	73,47	73,84	74,04	74,25	72,24	74,55	74,55	=
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,44	12,51	12,68	12,89	12,46	13,00	13,00	=

No	Indikator	Realisasi*				Target 2025			
		2021	2022	2023	2024	RPJMD 2025	*Sasaran*	*Outlook*	Ket.
	Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	8,55	8,56	8,71	8,98	12,46	9,10	9,10	=
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.324	11.650	11.901	12.254	12.000	12.500	12.500	=
7	Inflasi (persen)				0,49			0,45	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2025, dan hasil analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2025
Keterangan : * menggunakan Usia Harapan Hidup hasil sensus 2020

Dari 7 (tujuh) indikator makro yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang didasarkan pada perkembangan hingga tahun 2024, maka target pembangunan tahun 2025 untuk 5 (lima) indikator makro masih relevan dijadikan sebagai target pembangunan tahun 2024, sedangkan untuk IPM mengalami perubahan dibandingkan target awal, dimana target kinerja IPM awal masih didasarkan pada realisasi 2022, dengan telah keluarnya IPM tahun 2023 oleh BPS, dimana target IPM 2024 dimaksud sudah berada di atas target IPM pada RKPD 2024, sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat perubahan target 2024 yang didasarkan pada perhitungan dimensi dan dimensi pembentuk nilai IPM.

D. Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut :

1. APBD Awal Tahun 2025
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 30 Desember 2024;
   b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 30 Desember 2024;
2. Pergeseran I APBD Tahun 2025
   Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 24 Januari 2025.

   Perubahan dilakukan didasari karena adanya kekurangan anggaran belanja pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. sehingga berdampak tidak dapat terealisasinya pembayaran gaji aparatur sipil Negara di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Pergeseran II APBD Tahun 2025
   Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 9 April 2025.

   Perubahan dilakukan bahwa adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk

teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya. maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

4. Pergeseran III APBD Tahun 2025
   Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas atas atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 28 April 2025.

   Perubahan dilakukan bahwa adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. maka Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. perlu diubah untuk ketiga kalinya.

5. Pergeseran IV APBD Tahun 2025
   Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas atas atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 22 Mei 2025.

   Perubahan dilakukan bahwa adanya Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.64/2025/KEUDA tanggal 16 Mei 2025 tentang Percepatan Realisasi APBD TA.2025 guna untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. pelaksanaan pembangunan. peningkatan pelayanan publik. dan kesejahteraan masyarakat maka perlu didukung peningkatan konsumsi Pemerintah Daerah melalui percepatan penyerapan anggaran dan belanja daerah. dalam hal untuk percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas atas atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. perlu diubah untuk keempat kalinya.

6. APBD Perubahan Tahun 2025
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 dengan penetapan tanggal 17 Oktober 2025.
   b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 17 Oktober 2025.

7. Pergeseran APBD setelah APBD Perubahan Tahun 2025
   Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 29 Desember 2025.

Perubahan dilakukan bahwa bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025. sebagai penyesuaian atas perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sesuai dengan instruksi Keputusan Menteri Keuangan dimaksud. perlu dilakukan penyesuaian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2025 guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. pelaksanaan pembangunan. peningkatan pelayanan publik. dan kesejahteraan guru. sehingga perlu dilakukan pergeseran terhadap Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

Ringkasan Perubahan atas pos Pendapatan. Belanja dan Pembiayaan TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD 2025

Uraian	JUMLAH (Rp)							Bertambah / (Berkurang)	
	APBD Murni 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	APBD-P 2025	Pergeseran Setelah APBD-P	(Rp)	%
	PERDA No. 7 Tahun 2024	PERBUP No. 1 Tahun 2025	PERBUP No. 3 Tahun 2025	PERBUP No. 4 Tahun 2025	PERBUP No. 6 Tahun 2025	PERDA No. 6 Tahun 2025	PERBUP No. 15 Tahun 2025		
	30/12/2024	24/01/2025	09/04/2025	28/04/2025	22/05/2025	17/10/2025	29/12/2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-2	10
PENDAPATAN	1.030.307.107.411.00	1.030.307.107.411.00	1.030.307.107.411.00	963.021.916.411.00	963.021.916.411.00	966.466.057.933.35	966.739.327.933.46	(63.567.779.477.54)	(6.17)
BELANJA	1.101.791.542.379.00	1.101.791.542.379.00	1.102.344.950.428.00	1.016.797.915.300.65	1.016.797.915.300.65	969.051.127.921.90	969.324.397.922.01	(132.467.144.456.99)	(12.02)
SURPLUS/ (DEFISIT)	(71.484.434.968.00)	(71.484.434.968.00)	(72.037.843.017.00)	(53.775.998.889.65)	(53.775.998.889.65)	(2.585.069.988.55)	(2.585.069.988.55)	68.899.364.979.45	(96.38)
PEMBIAYAAN	71.484.434.968.00	71.484.434.968.00	72.037.843.017.00	53.775.998.889.65	53.775.998.889.65	2.585.069.988.55	2.585.069.988.55	(68.899.364.979.45)	(96.38)
SILPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar Rp966.739.327.933,46 yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp136.947.264.820,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp811.958.696.072,35 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp17.833.367.041,11.

Rencana penerimaan sejumlah tersebut. akan digunakan untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp969.324.397.922,01 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Operasi Rp 792.360.152.082,51
- Belanja Modal Rp 58.010.448.699,50
- Belanja Tidak Terduga Rp 852.145.600.782,01
- Belanja Transfer Rp 117.178.797.140,00

Kekurangan dana untuk membiayai belanja daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp(2.585.069.988,55) akan di danai dari SiLPA Tahun Lalu sebesar Rp4.085.069.988,55 dan digunakan untuk Penyertaan Modal di Bank Nagari sebesar Rp1.500.000.000,00.

Tabel 3.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025

URAIAN	APBD TA. 2025	REALISASI	%
Pendapatan	966.739.327.933,46	952.036.775.854,25	98,48
Belanja	969.324.397.922,01	915.611.872.582,48	94,46
Surflus/Defisit	(2.585.069.988,55)	36.424.903.271,77	(1.409,05)

Realisasi Capaian Kinerja Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp952.036.775.854,25 atau sebesar 98,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp966.739.327.933,46. Adapun rincian realisasi Pendapatan Daerah per OPD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Anggaran dan Realisasi Pendapatan per OPD TA 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TA 2025 (Rp)	REALISASI TA 2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	85.100.000,00	112.527.480,00	132,23
2	Dinas Kesehatan	69.633.915.351,00	69.727.472.057,00	100,13
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	2.192.700.000,00	2.083.941.452,00	95,04
4	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	296.500.000,00	312.980.700,00	105,56
5	Dinas Pangan Perikanan	75.000.000,00	49.590.000,00	66,12
6	Dinas Lingkungan Hidup	318.600.000,00	372.080.000,00	116,79
7	Dinas Perhubungan	110.000.000,00	103.225.000,00	93,84
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	13.000.000,00	86,67
9	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	87.200.000,00	101.460.000,00	116,35
10	Dinas Kebudayaan. Pariwisata. pemuda dan Olahraga	5.500.000,00	4.850.000,00	88,18
11	Dinas Pertanian	227.000.000,00	241.696.000,00	106,47
12	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13.980.000,00	12.681.000,00	90,71
13	Badan Keuangan Daerah	893.551.682.582,46	878.736.554.165,25	98,34

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TA 2025 (Rp)	REALISASI TA 2025 (Rp)	%
14	Sekretariat Daerah	110.000.000,00	146.600.000.00	133,27
15	Kecamatan Pulau Punjung	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
16	Kecamatan Sitiung	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
17	Kecamatan Koto Baru	2.000.000,00	2.250.000,00	112,50
18	Kecamatan Sungai Rumbai	3.900.000,00	7.768.000,00	199,18
19	Kecamatan IX Koto	2.000.000,00	1.250.000,00	62,50
20	Kecamatan Timpeh	2.500.000,00	850.000,00	34,00
21	Kecamatan Koto Besar	2.000.000,00	1.250.000,00	62,50
	Jumlah	**966.739.327.933,46**	**952.036.775.854,25**	**98,48**

Selanjutnya realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp915.611.872.582,48. atau 94,46% dari nilai anggaran sebesar Rp 969.324.397.922,01. Adapun rincian realisasi Belanja Daerah per OPD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Target Capaian Kinerja APBD Kabupaten Dharmasraya Per SKPD Tahun Anggaran 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TA 2025 (Rp)	REALISASI TA 2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	327.075.279.465,39	315.934.199.800,64	96,59
2	Dinas Kesehatan	254.546.703.649,57	248.326.530.196,29	97,56
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	31.147.690.854,00	22.326.624.992,00	71,68
4	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	5.956.178.851,65	5.796.541.675,00	97,32
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.120.513.672,00	7.706.704.947,00	94,90
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.178.809.725,00	3.085.634.178,72	97,07
7	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengedalian Penduduk dan keluarga Berencana	11.041.220.153,00	9.473.386.706,24	85,80
8	Dinas Pangan Perikanan	5.042.434.221,00	4.859.511.927,59	96,37
9	Dinas Lingkungan Hidup	6.544.139.251,00	6.204.667.759,00	94,81
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.353.714.299,00	3.241.755.417,00	96,66
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.284.356.312,00	4.112.944.807,00	96,00
12	Dinas Perhubungan	23.162.429.698,00	14.085.949.737,00	60,81
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.937.696.892,40	4.815.349.182,00	97,52
14	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.871.157.189,00	3.566.730.527,00	92,14
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	2.836.141.038,00	2.783.126.819,00	98,13
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	9.784.701.365,00	8.361.860.758,00	85,46
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.376.598.080,00	3.281.377.280,00	97,18
18	Dinas Pertanian	16.155.034.064,00	15.052.299.542,00	93,17
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.019.247.301,00	4.917.401.891,00	97,97
20	Inspektorat Kabupaten	6.486.094.838,00	5.958.367.966,00	91,86
21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.321.239.481,00	4.189.438.810,00	96,95
22	Badan Keuangan Daerah	132.703.784.865,00	127.421.457.245,00	96,02
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.287.451.420,00	5.132.744.814,00	97,07
24	Sekretariat Daerah	31.470.228.597,00	27.032.725.740,00	85,90

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TA 2025 (Rp)	REALISASI TA 2025 (Rp)	%
25	Sekretariat DPRD	38.828.290.546,00	37.907.823.708,00	97,63
26	Kecamatan Pulau Punjung	2.116.292.429,00	2.054.792.411,00	97,09
27	Kecamatan Sitiung	1.898.247.255,00	1.853.476.012,00	97,64
28	Kecamatan Koto Baru	1.928.089.411,00	1.873.883.513,00	97,19
29	Kecamatan Sungai Rumbai	1.616.082.047,00	1.570.479.407,00	97,18
30	Kecamatan IX Koto	1.245.340.431,00	1.202.069.515,00	96,53
31	Kecamatan Timpeh	1.282.898.250,00	1.150.382.108,00	89,67
32	Kecamatan Koto Salak	1.198.909.454,00	1.161.300.501,00	96,86
33	Kecamatan Asam Jujuhan	1.179.195.026,00	1.121.488.984,00	95,11
34	Kecamatan Koto Besar	1.844.464.792,00	1.796.343.963,00	97,39
35	Kecamatan Padang Laweh	1.161.290.702,00	1.118.301.214,00	96,30
36	Kecamatan Tiumang	1.441.693.694,00	1.401.405.143,00	97,21
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.880.758.603,00	3.732.793.386,00	96,19
	Jumlah	**969.324.397.922,01**	**915.611.872.582,48**	**94,46**

Berdasarkan realisasi pendapatan. belanja dan pembiayaan tersebut diatas. maka dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlihat pada ringkasan realasasi APBD pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Dharmasraya TA 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/ KURANG
PENDAPATAN	**966.739.327.933,46**	**952.036.775.854,25**	**98,48**	**(14.702.552.079,21)**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	136.947.264.820,00	137.461.862.696,65	100,38	514.597.876,65
PENDAPATAN TRANSFER	811.958.696.072,35	795.934.821.722,00	98,03	(16.023.874.350,35)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	17.833.367.041,11	18.640.091.435,60	104,52	806.724.394,49
BELANJA	**969.324.397.922,01**	**915.611.872.582,48**	**94,46**	**(53.712.525.339,53)**
BELANJA OPERASI	792.360.152.082,51	755.555.738.316,18	95,36	(36.804.413.766,33)
BELANJA MODAL	58.010.448.699,50	45.656.214.008,30	78,70	(12.354.234.691,20)
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.775.000.000,00	196.489.050,00	11,07	(1.578.510.950,00)
TRANSFER	117.178.797.140,00	114.203.431.208,00	97,46	(2.975.365.932,00)
SURPLUS/(DEFISIT)	**(2.585.069.988,55)**	**36.424.903.271,77**	**(1.409.05)**	**39.009.973.260,32**
PEMBIAYAAN				-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.085.069.988,55	4.085.069.988,55	**100**	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	**100**	-
PEMBIAYAAN NETTO	**2.585.069.988,55**	**2.585.069.988,55**	**100**	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0.00**	**39.009.973.260,32**	**0.00**	**39.009.973.260,32**

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan daerah antara lain:

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan yang ada di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
2. Belum optimalnya penerapan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan perolehan pendapatan.

3. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait pengelolaan pendapatan;
4. Adanya kecenderungan wajib pajak menunda waktu penyetoran pajak

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, akan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, pengusaha maupun masyarakat.
2. Menjaga akurasi data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap memperhatikan dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
4. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung kualitas pelayanan.

Adapun permasalahan umum belanja daerah yang dihadapi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang digunakan untuk belanja program dan kegiatan prioritas masih kurang besar dibandingkan kebutuhan belanja yang disediakan;
2. Belum optimalnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran dalam upaya efisiensi penggunaan belanja atas dana yang disediakan dalam anggaran;
3. Masih kurang pahamnya tertib administrasi pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD.

Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dengan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia melalui skala prioritas anggaran;
2. Peningkatan penyerapan dana masing-masing SKPD melalui mekanisme pencairan dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pencapaian target kinerja APBD Tahun 2025 masih ada beberapa kegiatan yang capaian kinerja keuangannya masih rendah, dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.
Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan Tahun 2025

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
1	1 01 01	**DINAS PENDIDIKAN**				
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	123.200.000.00	73.431.950.00	59.60	Karena keterlambatan pemakai Kendaraan Dinas dalam mengajukan SPJ dan diajukan di akhir tahun dan GU tidak mencukupi untuk membayarkan SPJ tersebut.
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.793.800.00	4.520.000.00	66.53	Ketersediaan waktu yang tidak mencukupi sehingga tidak terlaksananya kegiatan
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.024.000.00	1.970.000.00	28.05	Dikarenakan kegiatan ini dianggarkan pada anggaran perubahan. sehingga Perjalanan Dinas yang direncanakan untuk Koordinasi ke Propinsi tidak terlaksana di Akhir tahun.
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	564.573.100.00	272.829.900.00	48.32	Belanja Penghargaan guru Berprestasi berupa Umroh belum bisa dibayarkan di tahun 2025. yang realisasi akan dibayarkan tahun 2026.
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	13.497.900.00	8.766.900.00	64.95	Efesiensi anggaran dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	6.900.000.00	1.900.000.00	27.54	Efesiensi anggaran dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	6.870.000.00	2.420.000.00	35.23	Keterbatasan waktu untuk melaksanakan monitoring ke lapangan
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	22.044.450.00	16.443.300.00	74.59	keterlambatan dalam pelaksanaan
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.810.000.00	3.310.000.00	68.81	Keterbatasan waktu untuk melaksanakan Koordinasi ke Provinsi
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	3.458.800.00	966.000.00	27.93	Keterbatasan waktu untuk melaksanakan Koordinasi ke Provinsi
2	1.03.01	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG**				
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.250.000.00	96.426.080.00	43.39	Belum optimalnya realisasi anggaran disebabkan oleh belum dilaksanakannya pembayaran pajak beberapa kendaraan dinas pada UPT ALKal karena adanya kewajiban denda pajak kendaraan dari tahun sebelumnya yang masih dalam proses penyelesaian.
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	62.200.000.00	22.113.400.00	35.55	Realisasi anggaran belum optimal karena pembayaran KIR kendaraan dinas pada UPT ALKal dan kendaraan operasional lainnya masih dalam proses penyelesaian.

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	249.650.800.00	171.379.050.00	68.65	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Perizinan Alat Besar merupakan kegiatan operasional UPT ALKal. Belanja pemeliharaan alat berat tidak direalisasikan seluruhnya karena pelaksanaan pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan riil alat besar. sehingga tidak seluruh alokasi anggaran digunakan.
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300.000.000.00	199.816.000.00	66.61	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi. dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdapat tiga pekerjaan.yaitu: 1. Penyusunan Studi Kelayakan Peningkatan Kelembagaan UPT SPAM; 2. Penyusunan Perencanaan Peningkatan SPAM WTP Koto Baru. WTP Sitiung. dan WTP Sungai Duo dengan anggaran sebesar Rp100.000.000; 3. Penyusunan Perencanaan Peningkatan SPAM WTP Pulau Sawah dan WTP Batang Mimpi. Dari ketiga pekerjaan tersebut terdapat satu pekerjaan yang belum terlaksana. yaitu Penyusunan Studi Kelayakan Peningkatan Kelembagaan UPT SPAM. karena laporan akhir masih dalam proses penyempurnaan dan finalisasi oleh penyedia jasa sesuai dengan masukan hasil pembahasan.
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.750.000.00	1.238.800.00	45.05	Pada Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pekerjaan Jaringan Perpipaan (Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SPAM Koto Baru) tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pemangkasan anggaran Tahun 2025. Meskipun pekerjaan fisik tidak terlaksana. belanja pendukung kegiatan tetap direalisasikan dan digunakan untuk menunjang sub kegiatan lainnya. meskipun pengembangan jaringan perpipaan SPAM Koto Baru tertunda pada tahun 2025. pemanfaatan anggaran belanja pendukung tetap produktif dan mendukung kelanjutan program strategis di bidang penyediaan air bersih.
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.903.144.045.00	980.228.700.00	16.61	Sub kegiatan Rehabilitasi. Renovasi. dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran total sebesar Rp5.903.144.045.00. Dari jumlah tersebut. realisasi anggaran yang tercatat sebesar Rp980.228.700.00. yang sepenuhnya digunakan untuk kegiatan rehabilitasi. renovasi. dan ubahsuai bangunan gedung. dan kegiatan ini telah terlaksana seluruhnya sesuai rencana. Sementara itu. terdapat belanja untuk Retensi Masjid Agung sebesar Rp4.891.202.700.00 yang tidak terealisasi pada tahun anggaran ini. Dengan demikian. meskipun sebagian besar anggaran tidak direalisasikan. kegiatan utama rehabilitasi. renovasi. dan ubahsuai bangunan strategis tetap terlaksana secara penuh sesuai target yang direncanakan.
3	1.04.02	DINAS PERUMAHAN. KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.297.875.00	1.618.400.00	70.43	Untuk Mengidentifikasi lokasi bencana memerlukan akurasi tinggi. namun sering terbentur realitas di lapangan. Bencana juga terjadinya bersifat dinamis.
4	**1.05.01**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**				
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	119.310.700.00	67.674.337.00	56.72	Belum terealisasinya penambahan daya listrik.
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.940.000.00	2.775.000.00	39.99	Karena tidak ada perbaikan barang inventperaltan dan mesin yang rusak dan dapat ditingkatkan kelayakan pakainya sehingga terjadi efisiensi dan Penghematan anggaran
5	**1.05.02**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.800.016.00	10.917.000.00	47.88	Karena diakhir tahun tidak ada bencana sehingga terjadinya efisiensi Anggaran
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	2.962.500.00	2.200.000.00	74.26	Efisiensi Anggaran pada Biaya perjalanan dinas dan BBM
6	**1.06.02**	**DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000.00	4.277.500.00	20.37	Pengembalian belanja biaya pemeliharaan pada hasil pemeriksanaan BPK bulan Desember 2025 sebesar Rp.13.010.000.-
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders Dan Mitra Kerja	200.000.000.00	108.243.000.00	54.12	1 Kali kegiatan tidak terlaksana karena bertepatan dengan ulang tahun Dharmasraya. sehingga beberapa unsur TPPS menyesuaikan jadwal
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	416.000.000.00	288.500.000.00	69.35	Kegiatan terlaksana sesuai dengan DPA. namun Pembayaran Transportasi Peserta tidak maksimal dengan sistem SIPD yang non tunai
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	24.300.000.00	16.640.000.00	68.48	1 kali Kegiatan tidak terlaksana karena terkendala waktu pelaksanaan (Minggu ke-2 Desember 2025)
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	105.600.000.00	990.000.00	0.94	Tidak Adanya Pihak Penyedia atau Vendor Melalui e-Katalog sehingga Kegiatan tidak dapat dilaksanakan
7	**2.15.01**	**DINAS PERHUBUNGAN**				

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.500.000.00	0.00	0.00	Tidak terealisasi Kegiatan Penyediaan bahan Logistik terkendala karena Pihak penyedia Makanan dan Minuman belum menggunakan E purchasing sehingga menghambat dalam proses pengadaan Barang pada sub kegiatan tersebut
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	16.911.901.370.00	8.303.490.549.00	49.10	Realisasi sub kegiatan rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan khususnya Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) sampai dengan akhir periode pelaporan belum terealisasi secara optimal Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan masih menunggu selesainya proses review dan pendampingan BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap rencana Proyek KPBU PJU Kabupaten Dharmasraya. sehingga Pemerintah Daerah menunda realisasi belanja sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan kesesuaian perencanaan. skema pembiayaan. serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
8	2.16.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.995.000.00	10.935.000.00	64.34	Karena perpindahan kadis pada pertengan juli. dan dagantikan oleh Asisten I sebagai Plt Kadis . sehingga Kendaraan Dinas jarang digunakan karena PLt.sebagai asisten I punya kendaraan Operasional sehingga terjadi Efisiensi anggaran
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.212.500.00	19.430.600.00	49.55	Terjadinya Efisiensi anggaran Karena 1 Kendaraan Dinas Pindah ke Sekretariat Daerah maka biaya pemeliharaannya tidak terpakai
9	2.17.01	DINAS KOPERASI. USAHA KECIL. MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.965.000.00	8.237 000.00	58.98	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.830.000.00	0.00	0.00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	157.984.750.00	0.00	0.00	
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	11.965.400.00	8.637.388.00	72.19	
10	2.19.01	DINAS KEBUDAYAAN. PARIWISATA. PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan Bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa Dalam Memajukan Potensi Pemuda	416.469.100.00	303.142.264.00	72.79	Adanya Efisiensi Anggaran Pada APBD perubahanan sehingga kegiatan pemilihan uda uni duta wisata dan putri otonomi belum dapat dilaksanakan

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga Di Tingkat Kabupaten/Kota	764.903.632.00	504.382.196.00	65.94	Adanya Efisiensi anggaran karena kegiatan Sport Talent sebahagian anggarannya ada pada Sekretariat Daerah
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	63.575.000.00	37.810.800.00	59.47	Kegiatan atletik belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Efisiensi Anggaran
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	529.360.700.00	358.972.980.00	67.81	Kegiatan jalan santai dan sepeda santai tidak dilaksanakan karena sepenuhnya karena Efisiensi Anggaran
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1.745.805.382.00	1.173.678.339.00	67.23	Anggaran dana hibah tidak termasuk dalam Renstra dan renja SKPD. Selain itu. juga perlu adanya pengkajian ulang Regulasi atau Aturan tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok masyarakat atau kelompok Hukum adat
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	93.711.750.00	67.790.900.00	72.34	Efesiensi anggaran dan penghematan dalam penggunaan anggaran
11	2.23.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**				
		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000.00	3.300.000.00	66.00	Efesiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
12	3.27.02	**DINAS PERTANIAN**				
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/Tanaman	361.399.000.00	139.011.019.00	38.46	Untuk pengadaan bibit belum dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya bibit siap salur sesuai berita acara survei tanggal 13 November 2025
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	456.641.400.00	1.010.000.00	0.22	Pendampingan sertifikasi ISPO kelompok tani tidak jadi dilaksanakan. karena telah dilaksanakan oleh provinsi menggunakan pendanaan DBH provinsi
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	101.243.500.00	3.696.000.00	3.65	Pembukaan jalan Usaha Tani tidak Jadi terlaksana karena efisensi anggaran pemerintah daerah Kab. Dharmasraya
13	2.07.01	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**				
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.500.000.00	4.538.400.00	69.82	Kendaraan dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2025. Yakni Roda empat ada 2 unit dan Roda dua ada 2 Unit. maka pencapaiannya hanya 70%. sedangkan untuk pagu penganggarannya mempedoman anggaran tahun sebelumnya.
14	4.01.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.630.000.00	107.445.224.00	59.81	Efesiensi anggaran dan penghematan dalam penggunaan anggaran

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83.675.000.00	58.432.802.00	69.83	Adanya efisiensi anggaran sehingga untuk cetak plakat dan penggandaan tidak bisa dilaksanakan.
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.000.000.00	22.157.399.00	71.48	Adanya efisiensi anggaran sehingga untuk cetak plakat dan penggandaan tidak bisa dilaksanakan.
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	835.049.000.00	408.725.287.00	48.95	Adanya efisiensi anggaran sehingga untuk cetak plakat dan penggandaan tidak bisa dilaksanakan.
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	366.575.000.00	212.659.265.00	58.01	Keterbatasan waktu yang ada untuk melaksanakan kegiatan berupa verifikasi data dan cek langsung ke lapangan karena dana hibah baru ada di anggaran perubahan
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.569.242.850.00	4.517.732.711.00	68.77	
15	4.02.01	SEKRETARIAT DPRD				
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	15.000.000.00	10.682.700.00	71.22	Efesiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.930.000.00	58.627.200.00	71.56	Efesiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
16	5.02.01	BADAN KEUANGAN DAERAH				
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.850.000.00	46.081.673.00	50.17	Efesiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Belanja Tidak Terduga)	1.775.000.000.00	196.489.050.00	11.07	Pengajuan BTT berdasarkan adanya kejadian bencana terkait tanggap darurat. penanggulangan bencana alam dan/atau bencana social. pada tahun 2025 tidak banyak terealisasi.
17	6.01.01	INSPEKTORAT KABUPATEN				
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	306.150.000.00	193.783.278.00	63.30	Adanya Edaran Efesiensi Belanja Tahun 2025 Sehingga Diklat dan Bimtek Dilaksanakan Secara Daring
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.039.000.00	9.119.000.00	37.93	keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dikarenakan sub kegiatan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ditambahkan pada saat perubahan APBD 2025
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.600.000.00	0.00	0.00	Adanya Edaran Efesiensi Belanja Tahun 2025 Sehingga Sebagian Besar Belanja Modal yang tidak Mendesak tidak jadi dilaksanakan

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	64.500.000.00	34.351.202.00	53.26	Pada saat perencanaan awal kendaraan operasional atau lapangan inspektorat berjumlah 5 (lima) unit. namun pada pertengahan kendaraan operasional atau lapangan tinggal 3 (tiga) unit dengan keterangan 1 (satu) unit kendaraan bermerek Mitshubishi L300 di serahkan ke bagian aset dan 1 (satu) unit kendaraan bermerek HRV mengalami kecelakaan. dengan kondisi tersebut jumlah anggaran pemeliharaan tidak terserap optimal
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.200.000.00	19.194.600.00	70.57	Secara umum kegiatan terlaksana sesuai terget namun ada beberapa peralatan yang sudah mengalami rusak berat tidak bisa diperbaiki lagi dan sudah diusulkan untuk dihapuskan
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	63.835.150.00	39.018.600.00	61.12	Adanya Edaran Efesiensi Belanja Tahun 2025 Sehingga kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dikurangi
18	**7 01 01**	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.525.000.00	11.454.000.00	73.78	Efesiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
19	**7 01 05**	**KECAMATAN SEMBILAN KOTO**				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.700.000.00	1.565.00.00	42.30	Pembayaran lisrik rumah dinas dibayar oleh orang yang menempati (PPK Kec). sehingga terjadi efisiensi dan penghematan penggunaan aggaran.
20	**7 01 06**	**KECAMATAN TIMPEH**				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.983.800.00	87.630.100.00	63.51	Efesiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000.00	1.695.000.00	67.80	Efesiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
21	**8.01.01**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
	8.01.02.2.01.0004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.590.750.00	31.157.400.00	74.91	Efesiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18.878.400.00	13.584.700.00	71.96	Efesiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara. Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	197.672.300.00	142.688.800.00	72.18	Efesiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. Serta Penanganan Konflik di Daerah	14.559.000.00	10.458.500.00	71.84	Efesiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	14.559.000.00	10.458.500.00	71.84	Efesiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur akuntansi pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Organisasi pemerintah daerah yang bertindak sebagai kantor pusat adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan yang bertindak sebagai kantor cabang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemilihan struktur ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebanyak 37 SKPD yaitu :

1) Dinas Pendidikan
2) Dinas Kesehatan
3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
6) Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk. dan Keluarga Berencana
7) Dinas Pangan dan Perikanan
8) Dinas Lingkungan Hidup
9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11) Dinas Perhubungan
12) Dinas Komunikasi Dan Informatika
13) Dinas Koperasi. Usaha Kecil. Menengah. dan Perdagangan
14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15) Dinas Kebudayaan. Pariwisata. Pemuda. dan Olahraga
16) Dinas Perpustakaan Kearsipan
17) Dinas Pertanian
18) Dinas Transmisgrasi dan Tenaga Kerja
19) Inspektorat Kabupaten
20) Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Daerah
21) Badan Keuangan Daerah
22) Kecamatan Pulau Punjung
23) Kecamatan Sitiung
24) Kecamatan Koto Baru
25) Kecamatan Sungai Rumbai
26) Kecamatan IX Koto
27) Kecamatan Timpeh
28) Kecamatan Koto Salak
29) Kecamatan Asam Jujuhan
30) Kecamatan Koto Besar
31) Kecamatan Padang Laweh
32) Kecamatan Tiumang

33) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34) Sekretariat Daerah
35) Sekretariat DPRD
36) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
37) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai entitas pelaporan, menyusun Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD, terdiri dari.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPKD sebagai PPKD/Bendahara Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi kas untuk tingkat SKPD. PPKD. dan Pemda.

- *Angka Realisasi Pendapatan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 adalah menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. dan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah atas seluruh penerimaan uang yang masuk pada Rekening Kas Daerah dan ditambah dengan realisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana BOSP Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan yang terdiri dari 147 SD Negeri, 33 SMP Negeri, 16 TK Negeri dan 1 SKB. tidak melalui Rekening Kas Daerah.

  Adapun BLUD yang dikelola sebanyak 17, yaitu:
  1. BLUD RSUD Sungai Dareh.
  2. BLUD RSUD Sungai Rumbai
  3. BLUD Puskesmas Sungai Rumbai.
  4. BLUD Puskesmas Sungai Limau.
  5. BLUD Puskesmas Sitiung II.
  6. BLUD Puskesmas Padang Laweh.
  7. BLUD Puskesmas Sungai Dareh.
  8. BLUD Puskesmas Silago.
  9. BLUD Puskesmas Gunung Medan.
  10. BLUD Puskesmas Sitiung I.
  11. BLUD Puskesmas Koto Baru.
  12. BLUD Puskesmas Timpeh.
  13. BLUD Puskesmas Sialang.
  14. BLUD Puskesmas Tiumang.
  15. BLUD Puskesmas Koto Besar
  16. BLUD Puskesmas Beringin Sakti
  17. BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah

- *Angka Realisasi Belanja* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kompilasi realisasi belanja seluruh entitas (SKPD). dimana *pengguna* anggaran bertanggungjawab atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakan. Sedangkan data realisasi pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah berfungsi sebagai kontrol melalui rekonsiliasi dengan SKPKD, ditambah dengan realisasi belanja BLUD sebanyak 17 BLUD dan Dana BOSP Satuan Pendidikan yang terdiri dari 147 SD Negeri, 33 SMP Negeri, 16 TK Negeri dan 1 SLB, yang tidak melalui rekening Kas Daerah.

- *Angka Realisasi Pembiayaan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah.

b. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

   Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

   Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat di masukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
   - Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
   - Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

   Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

   Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
   Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
   Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks

pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2) Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang di haruskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

- ***basis kas*** untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- ***basis akrual*** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah.

D. Kebijakan Akuntansi

D.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. Umum

Definisi Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Klasifikasi pendapatan dapat dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah
   a) Pajak Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah.
   b) Retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang retribusi daerah.
   c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerja Sama Daerah, Jasa Giro, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain, Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan BLUD, Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*), Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah, Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer

Merupakan pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

a) Pendapatan Transfer berdasarkan jenis pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
b) Pendapatan Transfer dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa yang pengalokasiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
d) Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus-Fisik dan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik. DHB dan DAU merupakan kategori dari Dana transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori Dana Transfer Khusus.
e) Insentif Fiskal (DIF) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
f) Dana Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g) Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
h) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, yang terdiri atas Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

a) Pendapatan hibah berupa uang, barang, dan/jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri, badan/lembaga/organisasi dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

b) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c) Kelompok dana darurat yang berasal dari pemerintah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, diakui pada saat:

1) kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2) kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD. Apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD, maka kas di Bendahara Penerimaan yang pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke RKUD tidak diakui sebagai pendapatan LRA, tapi diakui sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan.
3) Kas diterima SKPD atas nama BUD yang dapat digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Contoh: pendapatan dana BLUD, pendapatan dana BOSP, dan pendapatan BOK Puskesmas.
4) Kas diterima SKPD yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran SKPD, dengan syarat SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Contoh: Dana Hibah yang diterima SKPD dari Kementrian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pihak Lainnya.
5) Kas diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Contoh: pendapatan daerah yang diterima oleh Bank Persepsi yang belum disetorkan ke RKUD pada akhir periode pelaporan.

c. Pengukuran

1) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

e. Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah.

1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO

a. Umum

1. Definisi

Definisi *Pendapatan-LO* adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Perbedaan mendasar antara pendapatan-LO dan pendapatan-LRA terletak pada basis pencatatan yang digunakan. Pendapatan-LO akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional dengan basis akrual, sedangkan pendapatan-LRA akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas.

2. Klasifikasi

Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada lima kelompok pendapatan daerah yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO;
2) Pendapatan Transfer-LO;
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO;
4) Surplus Non Operasional-LO;
5) Pendapatan Luar Biasa-LO.

b. Pengakuan

Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayarannya secara tunai (realized).

Pengakuan Pendapatan-LO tersebut dapat dikelompokkan ke dalam:

a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
c. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan-LO ini dapat terjadi di SKPKD dan SKPD.

c. Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai pendapatan brutonya (tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pengukuran Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment* dicatat sebesar nilai pajak/retribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak/retribusi daerah, dan yang dicantumkan dalam SKPDKB/ SKRDKB dan SKPDKBT/SKRDKBT.
3. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official assessment*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam SKPD/SKRD atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKPD/SKRD atau dokumen yang dipersamakan mengacu pada Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati Dharmasraya.

4. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses eksekusi jaminan dicatat sebesar nilai jaminan yang dapat direalisasikan.
5. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil dijual, bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut.
6. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
7. Pendapatan Operasional Non Pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
11. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Penyajian

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

e. Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO antara lain adalah:

1. Perbandingan dengan periode yang lalu;
2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
3. Rincian lebih lanjut oendaoatan-LO menurut sumber pendapatan;
4. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
5. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
6. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;
7. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
8. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Umum

1. Definisi

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga.

Sedangkan klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, seperti belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah daerah, belanja kantor dan lembaga teknis daerah.

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1) terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung;
2) khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran di SKPD dan SKPKD pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
3) dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Pengukuran

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pengeluaran kas yang menggunakan SP2D Langsung dan atau sejumlah pengeluaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan atau PPK SKPD untuk pengeluaran kas melalui rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penilaian

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi ekonomi.

e. Penyajian

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi Bagan Akun Standar (BAS).

f. Pengungkapan

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D.4. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Umum

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

2. Klasifikasi

Beban dapat diklasifikasikan menurut ekonomi. Klasifikasi beban menurut ekonomi diklasifikasikan berdasarkan jenis terdiri dari:

a. Beban Operasi – LO, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban Lain-lain;
b. Beban Transfer, terdiri dari : Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
2. Terjadinya konsumsi aset

   Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

   Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi).

c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat dalam satuan rupiah sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

d. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

e. Pengungkapan

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
2. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Umum

1. Definisi

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam pengganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan terdiri dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pembiayaan hanya dapat dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan BLUD.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pembentukan Dana Cadangan, hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

b. Pengakuan

1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

c. Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian di Laporan Keuangan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
3. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

D.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Umum

1. Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan kas di BLUD.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a) Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah.
b) Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito tidak lebih dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas Pemerintah Daerah terdiri dari kas di Kas Daerah, kas di Bendahara Penerimaan, kas di Bendahara Pengeluaran, kas di BLUD, kas Dana BOS, kas Dana Kapitasi pada FKTP, kas lainnya, dan Setara Kas.

b. Pengakuan

Penambahan Kas Daerah dicatat pada saat diterima di RKUD yang berasal dari:
1. penyetoran PAD dari Bendahara Penerimaan;
2. penyetoran pengembalian sisa UYHD dari Bendahara Pengeluaran;
3. penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
5. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Pengeluaran Kas Daerah dicatat pada saat dikeluarkan dari RKUD yang digunakan untuk:
1. uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
2. pembayaran tagihan pihak ketiga;
3. pembayaran belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bunga, belanja subsidi;

4. transfer belanja daerah terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
5. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman; dan
6. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam Saldo Kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK.

d. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Jika kas memenuhi definisi aset lancar, yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan dan memenuhi definisi kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, maka uang tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Lancar. Uang pada aset lancar disajikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

D.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Umum

1. Definisi

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a) Piutang Pendapatan daerah

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan daerah pada umumnya terjadi karena adanya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pendapatan daerah yang terdiri dari Piutang Pendapatan Asli Daerah (piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang lain-lain PAD yang sah) dan Piutang Pendapatan Transfer (piutang transfer pemerintah pusat dan piutang transfer antar daerah).

b) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya timbul karena adanya pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian jasa/fasilitas yang terdiri dari: Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.

3. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dengan menetapkan persentase piutang yang tidak tertagih untuk semua jenis piutang yang terlebih dahulu ditetapkan umur piutang dan kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan ataupun macet.

4. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah beban yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi pemerintah daerah sudah membayarnya terlebih dahulu. Oleh karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban pemerintah daerah untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut diakui sebagai pembayaran dimuka dan termasuk dalam aset lancar.

Atas pengeluaran beban dibayar dimuka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas beban tersebut.

b. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

c. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
4. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net reliazable value) untuk

piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

d. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria.
   a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
   c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
   e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria.
   a. Umur piutang satu sampai dengan tiga tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria.
   a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria.
   a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria.
   a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria.
   a. Umur piutang satu sampai dengan tiga tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria.
   a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria.
   a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan satu bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang satu sampai dengan tiga bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang tiga sampai dengan 12 bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

e. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

f. Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
   a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
   b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
   c) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
   d) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

D.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Umum

1. Definisi

   Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

   Persediaan merupakan aset yang berupa:

   a. Barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor dan sebagainya, Persediaan Bahan/Material seperti Persediaan Bahan Baku Bangunan;
   b. Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian dan bahan baku pembuatan benih.
   c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

b. Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan

   Persediaan diakui pada saat:

   a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
   b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah;
   c) akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik *(stock opname)*.

2. Pengakuan Beban Persediaan

   Pengakuan beban persediaan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

   Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

   Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

   Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerapkan pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset artinya mengakui beban persediaan ketika persediaan tersebut telah digunakan atau dikonsumsi. Pendekatan ini digunakan untuk persediaan yang akan digunakan selama satu periode akuntansi atau untuk berjaga-jaga.

   Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

3. Selisih Persediaan

Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluwarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang tidak normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

c. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar *(arm length transaction)*.
4. Persediaan akhir periode dinilai dengan menggunakan metode periodik dengan harga menggunakan metode FIFO *(First In First Out)*, kecuali persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

d. Metode Pencatatan

1. Metode Periodik

   Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik *(stock opname)* pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

   Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
2. Metode Perpetual

   Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan sebagainya. dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan pengukuran menggunakan rumus biaya rata-rata tertimbang.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerapkan sistem pencatatan dengan metode perpetual, yaitu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar yang berlaku untuk semua SKPD

e. Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

f. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan.

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, penilaian dan pencatatan persediaan;
b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang/daluwarsa.

D.9. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Umum

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis, seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualikan secara bebas/dicairkan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas untuk meningkatkan produktivitas aset. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

1) Investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
2) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
3) Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dengan dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis *(revolving deposits);*
2) Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
4) Reksa dana.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Non permanen
   Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

2) Investasi Permanen
   Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau melepas investasi.

   Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik pemerintah daerah;
   b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:

1) Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
4) Investasi non permanen lainnya.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga. Penyertaan modal berupa non surat berharga yaitu kepemilikan modal pada perusahaan bukan perseroan terbatas atau lembaga/organisasi tertentu.

b. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*)

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal. Kepastian bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh, memerlukan suatu keyakinan *(assurance)* bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi yang nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal, dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal suatu investasi diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau bukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan, dapat menggunakan nilai estimasi yang layak.

c. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek
   a) Investasi dalam bentuk surat berharga.
      1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
      2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
   b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang
   a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
   b) Investasi non permanen
      1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
      2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
      3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
      4) Investasi dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan.
      5) Investasi dalam bentuk tagihan dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.
   c) Nilai investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
3. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Metode Akuntansi Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya.

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20%.

2. Metode ekuitas

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%.

   Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima tidak termasuk dividen dalam bentuk saham, yang akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a) Kepemilikan kurang dari 20%, menggunakan metode biaya.
b) Kepemilikan 20 sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi diakui sebagai berikut:

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi dan deviden tunai *(cash dividen)* diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
3. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pada neraca.

   Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

   Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah daerah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah daerah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah daerah akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negative tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

g. Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan *(contra account)* dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang.

Kriteria kolektibilitas beserta penyisihannya untuk dana bergulir yang disalurkan sebagai berikut:

No.	Kriteria	Kondisi	% Penyisihan
1	Lancar	Tidak Terjadi tunggakan	0,5%
2	Kurang Lancar	Tunggakan 1 tahun	10%
3	Diragukan	Tunggakan 1 - 3 tahun	50%
4	Macet	Lebih dari 3 tahun	100%

h. Penyajian di Laporan Keuangan

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non permanen dan Investasi Permanen.

i. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
7. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
8. Perubahan pos investasi.
9. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh yang signifikan yang mengakibatkan perubahan metode ekuitas.

D.10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Umum

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
b) Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan *(materials)* dan perlengkapan *(supplies)*.

c. Klasifikasi Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;

   Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

2. Peralatan dan Mesin;
   Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, rambu-rambu, peralatan olahraga dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan
   Mencakup seluruh bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok bangunan gedung adalah bangunan gedung kantor, bangunan kesehatan, bangunan gedung tempat ibadah, rumah negara dan taman. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
   Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.
   Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud.
   Jalan, irigasi, dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

   a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
   b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
   c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
   d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
5. Aset Tetap Lainnya
   Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan non digital (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.
   Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
   Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

d. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikkannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Untuk dapat diakui sebagai aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.

Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, perubahan/koreksi, penghentian atau penggunaan kembali, dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Perolehan adalah suatu transaksi perolehan Aset Tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan. Perolehan aset tetap antara lain mencakup transaksi pembelian, transfer masuk, hibah masuk, dan perolehan lainnya.
2) Perubahan/koreksi adalah transaksi yang berdampak pada perubahan nilai dan/atau kuantitas Aset Tetap. Yang termasuk perubahan/koreksi aset tetap antara lain transaksi pengembangan nilai, penyesuaian/koreksi nilai/kuantitas, dan penyusutan.
3) Penghentian adalah suatu transaksi untuk menghentikan Aset Tetap dari penggunaan aktif, sehingga Aset Tetap tersebut dipindahkan ke pos Aset Lainnya. Sedangkan penggunaan kembali adalah suatu transaksi untuk mengembalikan aset yang telah dihentikan sebelumnya menjadi aset aktif. Aset yang digunakan kembali dipindahkan dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap.
4) Pelepasan Aset Tetap antara lain terdiri dari transaksi penghapusan, penjualan, pemusnahan, penyertaan modal pemerintah, hibah keluar, dan transfer keluar. Aset Tetap yang dilepaskan dieliminasi dari neraca, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

e. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp1.000.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp1.000.000,00 maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan BMD.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak honor tim,biaya perjalanan dinas. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari *sumbangan (donasi)* dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00. Artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp20.000.000,00 maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam Laporan BMD dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan

Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

4. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

5. **Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya sebesar Rp1.000.000,00, sedangkan untuk buku perpustakaan sebesar Rp0,00 keatas.

Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak kesenian/ kebudayaan disusutkan secara garis lurus sedangkan untuk hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

6. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,

biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan bangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya penjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeur*, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force majeur*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

f. Penyajian

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

g. Hal-Hal Khusus Tentang Aset Tetap

1. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Setelah aset diperoleh, Pemerintah daerah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) seperti belanja rehabilitasi dan lain sejenisnya. Sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) seperti belanja pemeliharaan.

Pembedaan antara *capital expenditure* atau *revenue expenditure* selain dari menambah manfaat atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran yang disebut dengan *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset) yang dapat diklasifikasi sebagai aset tetap. Kriteria suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) setelah perolehan pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 dan untuk gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00.

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang

kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlukan sebagai biaya (*expense*).

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan, berupa pengembangan (peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut) dan penggantian utama (memperbarui bagian aset tetap).

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, seperti pembangunan tanggul lumpur, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar dan lain sejenisnya tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).
Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi berpedoman pada Peraturan Bupati.

2. Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lannya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Ada bebarapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu:
- Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari Neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki

nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

3. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Eliminasi Aset Tetap dari neraca dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindah tanganan, dan dilakukan dengan cara:

a. Dijual;
b. Dipertukarkan;
c. Dihibahkan; atau
d. Dijadikan penyertaan modal daerah.

4. Renovasi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang subtansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan objeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Renovasi aset tetap milik sendiri, merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.
b. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan,

   Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

   Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

c. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan yang meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).
Sama halnya dengan huruf b diatas dan apabila pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini diserahkan pada pemilik sesuai Berita Acara Penyerahan/dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

5. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

a. Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset.
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode pelaporan.

b. Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tegantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

6. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistemasis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah metode garis lurus (straight line method). Metode ini menetapkan beban penyusutan untuk masing-masing periode waktu tertentu adalah konstan berdasarkan umur ekonomi dan atau umur penggunaan aset tetap, dan dihitung dari nilai perolehan tanpa dikurangi nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

h. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   a. Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);
   b. Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);

c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
d. Mutasi aset tetap lainnya.

4. Informasi penyusutan, meliputi:
   a. Nilai penyusutan;
   b. Metode penyusutan yang digunakan;
   c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5. Untuk KDP perlu diungkapkan:
   a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
   b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
   c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
6. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

D.11. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

a. Umum

1 Definisi

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah.

2 Klasifikasi

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga, dan lainnya.
Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan harus diungkapkan dan dirinci menurut peruntukannya.

b. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

c. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan
   Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
   Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
3. Pencairan Dana Cadangan
   Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas

Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

d. Penyajian di Laporan Keuangan

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

D.12. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya dan Amortisasi

a. Umum

1. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain.

Tujuan

a) Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset lainnya. Masalah utama akuntansi untuk aset lainnya adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, dan pengungkapan yang perlu dilakukan, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat *(carrying value)* aset tak berwujud.
b) Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset lainnya dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila kebijakan akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian
1.5.	**ASET LAINNYA**
1.5.01.	**Tagihan Jangka Panjang**
1.5.01.01.	Tagihan Penjualan Angsuran
1.5.01.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.5.02.	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kode Akun	Uraian
1.5.02.01.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1.5.03.	**Aset Tidak Berwujud**
1.5.3.01.	Aset Tidak Berwujud Lainnya
1.5.04.	**Aset Lain-lain**
1.5.4.01.	Aset Lain-lain
1.5.05.	**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1.5.06.	**Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.
Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
a. Tagihan Jangka Panjang;
b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
a. Aset Tak Berwujud; dan
b. Aset lain-lain.

b. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

   Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

   a) Tagihan Penjualan Angsuran

      Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah/dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

   b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah.

      Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat terbit SJTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang. SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

   Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT)

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. *Hak* Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

e. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (*intangible asset-work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.
Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah.
   1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
   2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
   3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Budaya/Sejarah Tak Berwujud *(Intagible Heritage Asset)*
ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

5. Amortisasi
Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang

memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

a. Metode Amortisasi

   Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

b. Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat Terbatas

   Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dan lain-lain) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

   Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

   1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
   2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut, dan nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut, serta besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

   Untuk ATB dengan masa manfaat terbatas, umur ekonomis diatur sebagai berikut:

No	Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Software	5
2.	Hak paten atau hak cipta	5
3.	Lisensi dan franchise	5
4.	Hasil kajian/penelitian	5

c. Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

   Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan masa manfaat yang tak terbatas, dan lain-lain) tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas.

6. Aset Lain-lain

Yang termasuk dalam kategori aset lain-lain antara lain aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan atau aset tetap yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat (nilai perolehan aset tetap yang direklasifikasi beserta akumulasi penyusutannya) atau nilai bukunya. Tidak ada lagi pembebanan penyusutan untuk aset lain-lain tersebut.

7. Penurunan Nilai *(Impairment)*

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapan pun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Penghentian dan Pelepasan ATB

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

a. dijual;
b. dipertukarkan;
c. dihibahkan; atau
d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai

buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan di dalam CaLK.

d. Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

e. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. besaran dan rincian aset lainnya;
b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
c. Dokumen penting/pendukung;
d. informasi lainnya yang penting.

D.13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Umum

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan..

2. Klasifikasi

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pajak, utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Pos-pos kewajiban antara lain:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Utang Pinjaman Jangka Pendek
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang kepada Pemerintah Pusat
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
	Utang kepada Masyarakat

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
   Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
   Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
   Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
   Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misalnya pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Contoh: utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Utang pajak adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah pusat sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang pajak diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pengukuran Utang Bunga
   Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
3. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka
   Pendapatan diterima dimuka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara pendapatan diterima dimuka yang telah diterima pemerintah daerah dengan jumlah yang benar-benar menjadi kewajiban (beban) pihak ketiga untuk membayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pelaporan keuangan.
5. Pengukuran Utang Belanja
   Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
   Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
6. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
   Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan
   Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
2. Utang yang diperjualbelikan
   Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pajak SKPD/pemerintah berdasarkan rincian utang pajak dan tanggal jatuh temponya;
4. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
5. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
6. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
   a. Pengurangan pinjaman;
   b. Modifikasi persyaratan utang;
   c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
   d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
   e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
   f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
7. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
8. Biaya pinjaman:
   a. Perlakuan biaya pinjaman;
   b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
   c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan
9. Informasi Penting Lainnya

D.14. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah

a. Definisi

Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar BLUD.

b. Karakteristik dan Prinsip BLUD

BLUD mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Pendanaan BLUD merupakan bagian dari APBD;
b. BLUD dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
d. BLUD membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah
i. Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

c. Pengakuan Akun Laporan Keuangan

1) Pendapatan- LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh BUD.
2) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD.
3) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan BUD.
4) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan BUD.
5) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
   - saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
   - Pendapatan direalisasi.
6) Pendapatan – LO pada BLUD yang diakui pada saat pendapatan direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
7) Pendapatan – LO pada BLUD diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
8) Beban pada BLUD diakui pada saat:
   - Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
   - terjadinya konsumsi aset pada saat terjadinya peralihan hak pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.
   - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan aset berhubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

d. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan.

1) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
2) Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
3) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD.
4) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada laporan Kas BUD adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disahkan oleh BUD.
5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya.
6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUD dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
7) Terhadap konsolidasi Laporan Keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik.
8) Akun-akun timbal balik meliputi pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan.
9) Dikecualikan terhadap akun-akun timbal balik adalah akun –akun pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

V.A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

LRA bertujuan untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan yaitu perbandingan antara anggaran dan realisasi yang menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LRA juga berguna untuk menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, namun adanya penyesuaian atas perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun 2025, selanjutnya dilakukan pergeseran setelah APBD Perubahan melalui penetapan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 beberapa kali dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD 2025

Uraian	JUMLAH (Rp)							Bertambah / (Berkurang)	
	APBD Murni 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	APBD-P 2025	Pergeseran Setelah APBD-P		
	PERDA No. 7 Tahun 2024	PERBUP No. 1 Tahun 2025	PERBUP No. 3 Tahun 2025	PERBUP No. 4 Tahun 2025	PERBUP No. 6 Tahun 2025	PERDA No. 6 Tahun 2025	PERBUP No. 11 Tahun 2025	(Rp)	%
	30/12/2024	24/01/2025	09/04/2025	28/04/2025	22/05/2025	17/10/2025	29/12/2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-2	10
PENDAPATAN	1.030.307.107.411,00	1.030.307.107.411,00	1.030.307.107.411,00	963.021.916.411,00	963.021.916.411,00	966.466.057.933,35	966.739.327.933,46	(63.567.779.477,54)	(6,17)
BELANJA	1.101.791.542.379,00	1.101.791.542.379,00	1.102.344.950.428,00	1.016.797.915.300,65	1.016.797.915.300,65	969.051.127.921,90	969.324.397.922,01	(132.467.144.456,99)	(12,02)
SURPLUS/ (DEFISIT)	(71.484.434.968,00)	(71.484.434.968,00)	(72.037.843.017,00)	(53.775.998.889,65)	(53.775.998.889,65)	(2.585.069.988,55)	(2.585.069.988,55)	68.899.364.979,45	(96,38)
PEMBIAYAAN	71.484.434.968,00	71.484.434.968,00	72.037.843.017,00	53.775.998.889,65	53.775.998.889,65	2.585.069.988,55	2.585.069.988,55	(68.899.364.979,45)	(96,38)
SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8. APBD Awal Tahun 2025
   c. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 30 Desember 2024;
   d. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 30 Desember 2024;

9. Pergeseran I APBD Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 24 Januari 2025.

Perubahan dilakukan didasari karena adanya kekurangan anggaran belanja pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, sehingga berdampak tidak dapat terealisasinya pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.

10. Pergeseran II APBD Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 9 April 2025.

Perubahan dilakukan bahwa adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

11. Pergeseran III APBD Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 28 April 2025.

Perubahan dilakukan bahwa adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, perlu diubah untuk ketiga kalinya.

12. Pergeseran IV APBD Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 22 Mei 2025.

Perubahan dilakukan bahwa adanya Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.64/2025/KEUDA tanggal 16 Mei 2025 tentang Percepatan Realisasi APBD TA. 2025 guna untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat maka perlu didukung peningkatan konsumsi Pemerintah Daerah melalui percepatan penyerapan anggaran dan belanja daerah, dalam hal untuk percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, perlu diubah untuk keempat kalinya.

13. APBD Perubahan Tahun 2025

a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 dengan penetapan tanggal 17 Oktober 2025.
b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 17 Oktober 2025.

14. Pergeseran APBD setelah APBD Perubahan Tahun 2025

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 29 Desember 2025.

Perubahan dilakukan bahwa bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, sebagai penyesuaian atas perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sesuai dengan instruksi Keputusan Menteri Keuangan dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2025 guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan guru, sehingga perlu dilakukan pergeseran terhadap Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1. Pendapatan Daerah	**952.036.775.854,25**	**970.822.454.588,79**

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp966.739.327.933,46 dengan realisasi sebesar Rp952.036.775.854,25 atau 98,48% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp970.822.454.588,79 maka terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp18.785.678.734,54 atau -1,94%.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Dalam upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 oleh Perangkat Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/309/KPTS-BUP/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/29/KPTS-BUP/2025 tentang Penetapan Target Penerimaan Pendapatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 dan 2024 dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.1.2
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli Daerah	136.947.264.820,00	137.461.862.696,65	100,38	108.370.243.672,79
2	Pendapatan Transfer	811.958.696.072,35	795.934.821.722,00	98,03	850.689.858.617,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	17.833.367.041,11	18.640.091.435,60	104,52	11.762.349.299,00
	JUMLAH	**966.739.327.933,46**	**952.036.775.854,25**	98,48	**970.822.454.588,79**

Selanjutnya anggaran dan realisasi akun-akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.a.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**137.461.862.696,65**	**108.370.246.672,79**

PAD – terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah – Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp136.947.264.820,00 dan realisasinya sebesar Rp137.461.862.696,65 atau sebesar 100,36%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp108.370.246.672,79 maka terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp29.091.616.023,86 atau 26,84%.

Realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2025 dan 2024 dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.1.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Daerah	53.153.000.000,00	54.317.593.473,00	102,18	25.092.743.485,78
2	Retribusi Daerah	73.182.745.351,00	73.178.734.847,00	99,99	65.941.537.340,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.529.319.469,00	5.529.319.459,00	100,00	5.347.929.006,00
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	5.077.200.000,00	4.436.214.917,65	87,38	11.988.036.841,01
	JUMLAH	**136.947.264.820,00**	**137.461.862.696,65**	100,38	**108.370.246.672,79**

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.a.1.	**Pendapatan Pajak Daerah**	**54.317.593.473,00**	**25.092.743.485,78**

Pendapatan Pajak Daerah dipungut berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 3 ayat 1 Penetapan Pajak terdiri atas :

a. Ditetapkan oleh Bupati yaitu :
   1. PBB Perdesaan dan Perkotaan;
   2. Pajak Reklame;
   3. Pajak Air Tanah;
   4. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
   5. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
b. Perhitungan sendiri oleh wajib pajak, yaitu :
   1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
   2. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas:
      a. Makanan dan /atau minuman;
      b. Tenaga listrik;
      c. Jasa perhotelan;
      d. Jasa parkir;
      e. Jasa kesenian dan hiburan;
   3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
   4. Pajak Sarang Burung Walet.

Berdasarkan penetapan target penerimaan dibebankan kepada Badan Keuangan Daerah selaku pemungut Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp53.158.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp54.317.593.473,00 atau sebesar 102,18%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25.092.743.485,78, maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp29.224.849.987,22 atau 116,47%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Reklame	350.000.000,00	351.380.547,00	100,39	341.020.598,00
2	Pajak Air Tanah	110.000.000,00	126.709.052,00	115,19	69.875.770,00
3	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	5.200.000,00	52,00	3.900.000,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	550.000.000,00	596.315.895,00	108,42	356.993.896,00
5	PBB Perdesaan dan Perkotaan	3.200.000.000,00	3.314.830.211,00	103,59	2.665.512.655,00
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.643.000.000,00	4.682.680.455,00	100,85	5.091.948.132,00
7	Pajak Barang Jasa Tertentu-Makanan dan/ atau minuman	1.470.000.000,00	1.530.491.037,00	104,12	1.490.712.906,78
8	Pajak Barang Jasa Tertentu-Tenaga Listrik	14.510.000.000,00	14.539.125.043,00	100,20	14.761.538.520,00
9	Pajak Barang Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan	370.000.000,00	382.299.133,00	103,32	288.281.956,00
10	Pajak Barang Jasa Tertentu-Jasa Parkir	20.000.000,00	21.825.900,00	109,13	12.228.152,00
11	Pajak Barang Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan	15.000.000,00	22.207.900,00	148,05	10.730.700,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.423.000.000,00	16.776.873.700,00	102,15	-
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	11.487.000.000,00	11.967.654.600,00	104,18	-
JUMLAH		**53.158.000.000,00**	**54.317.593.473,00**	**102,18**	**25.092.743.485,78**

Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 karena adanya penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kedua Opsen ini berupa tambahan pungutan pajak oleh kabupaten/kota sebesar 66% dari pokok PKB dan BBNKB, efektif mulai 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan mempercepat penerimaan daerah dan memperkuat sinergi pemungutan, tanpa meningkatkan beban total pajak kendaraan secara signifikan bagi pemilik. Dampak secara langsung adalah mengubah struktur penerimaan, di mana kabupaten/kota menerima bagian langsung, bukan lagi melalui mekanisme bagi hasil dari Provinsi, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, pada tahun 2025 ditetapkan target Rp350.000.000,00 dengan realisasi Rp351.380.547,00 atau 100,39%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp341.020.598,00, maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp 10.359.949,00 atau 3,04%. Hal ini disebabkan karena adanya objek pajak baru papan reklame praktek dokter dan bidan di Dharmasraya.

b) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar Rp110.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp126.709.052,00 atau 115,19%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar

Rp69.875.770,00, maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp56.833.282,00 atau 81,33%. Hal ini disebabkan tahun 2025 adanya pendataan objek baru air tanah yaitu pabrik tahu.

c) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar Rp10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.200.000,00 atau 52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.900.000,00, maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp1.300.000,00 atau 33,33%.

d) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp550.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp596.315.895,00 atau 108,42%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp356.993.896,00 maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp239.321.999,00 atau 67,04%. Kenaikan ini karena adanya penambahan 2 wajib pajak baru yaitu CV. Mutiara Chaniago di Sitiung dan CV. Berkah Alam Dharmasraya di Timpeh.

e) PBB Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar Rp3.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar. Rp3.314.830.211,00 atau 103.59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.665.512.855,00 maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp649.317.356,00 atau 24,36%. Meningkatnya penerimaan PBB P2 karena intensnya pelaksanaan penagihan PBB P2 melalui nagari, dan pembayaran PPB bagi PNS dikorelasikan dengan pembayaran TPP Pegawai.

f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar Rp4.643.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.682.680.455,00 atau 100.89%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.091.948.132,00, maka terdapat **penurunan** pendapatan sebesar Rp409.267.677,00 atau -8,04%. Hal tersebut terjadi karena adanya Program Presiden yaitu 3 (tiga) juta Rumah Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Adapun potensi pendapatan BPHTB yang berasal dari Peralihan Hak Perumahan Subsidi yang masuk ke dalam kategori Perumahan Subsidi MBR yang mulai diberlakukan pada bulan Juli tahun 2025 adalah sebesar Rp485.900.000,00 sebanyak 113 unit rumah.

g) Pajak Barang Jasa Tertentu

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

h) PBJT-Makanan dan/ atau minuman

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Pada tahun 2025 ditetapkan target Rp1.470.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.530.491.037,00 atau 104.12%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.490.712.906,78 maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp39.778.130,22

atau 2,67%. Hal ini disebabkan adanya 3 restoran yang telah memakai Tapping Box sehingga ada kenaikan pembayaran pajak.

i) **PBJT-Tenaga Listrik**

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar Rp14.510.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.539.125.043,00 atau 100.20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.761.538.520,00 maka terdapat **penurunan** pendapatan sebesar Rp222.413.477,00 atau -1,51%. hal ini disebabkan pada tahun 2025 bulan Januari sampai Februari PLN melakukan promo diskon besar-besaran sehingga berpengaruh kepada capaian realisasi.

j) **PBJT-Jasa Perhotelan**

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp370.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp382.299.133,00 atau 103,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp288.281.956,00 maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp94.017.177,00 atau 32,61%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan penerimaan pada Hotel Umega sebesar Rp74.525.790,00 dan hotel Sakato sebesar Rp15.225.400 selain itu adanya wajib pajak baru yaitu Penginapan Raudatul Jannah dan Teressra Hotel.

k) **PBJT-Jasa Parkir**

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. Pada tahun 2025 sebesar Rp20.000.000,00 dengan capaian sebesar Rp21.825.900,00 atau 109,13%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.228.152,00 maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp9.597.748,00 atau 78,49%. Hal ini karena adanya wajib pajak baru yaitu PT. DSL .

l) **PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan**

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar Rp15.000.000,00 dengan capaian sebesar Rp22.207.900,00 atau 148,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.730.700,00 maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp11.477.200,00 atau 106,96%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan objek pajak yaitu tempat bilyard di Dharmasraya sebanyak 7 wajib pajak.

m) **Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)**

Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Target tahun 2025 sebesar Rp16.423.000.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp16.776.873.700,00 atau 102,15%. Opsen PKB baru ditetapkan tahun 2025, realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan oleh provinsi sebesar Rp14.298.799.874,00 sehingga capaian dari target provinsi terealisasi sebesar 117,35%. Hal ini karena adanya sinergi antara pemerintah Daerah dengan Samsat Dharmasraya dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran baik dengan melakukan razia maupun berkerjasama dengan nagari dalam penyampaian tagihan pajak terutang *by name by address*.

n) **Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)**

Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Target tahun 2025 sebesar Rp11.487.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.967.654.600,00 atau 104,18%. Opsen BBNKB baru ditetapkan tahun 2025, realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan oleh provinsi sebesar Rp7.844.403.254 sehingga capaian dari target provinsi terealisasi sebesar 152,56%. Hal ini karena adanya sinergi antara pemerintah Daerah dengan Samsat Dharmasraya.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.a.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**73.178.734.847,00**	**65.941.537.340,00**

Mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semua jenis retribusi daerah yang diatur dengan peraturan daerah ini terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum, meliputi :
   a. Pelayanan kesehatan;
   b. Pelayanan kebersihan;
   c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum ; dan
   d. Pelayanan pasar

2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoaan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan temasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
   d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
   e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   g. penjualan hasil produksi usaha; dan
   h. pemanfaat aset daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi :
   a. Persetujuan bangunan gedung; dan
   b. Penggunaan tenaga kerja asing.

Retribusi Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp73.182.745.351,00 dengan realisasi sebesar Rp73.178.734.847,00 atau 99,99%. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp65.941.537.340,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.237.197.507,00 atau sebesar 10,98%.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.5
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
A	**Retribusi Jasa Umum**	**69.930.465.351,00**	**69.897.762.907,00**	**99,95**	**64.417.107.253,00**
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	69.488.465.351,00	69.397.447.907,00	99,87	64.022.568.743,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	310.000.000,00	361.220.000,00	116,52	250.608.500,00

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	97.825.000,00	97,83	14.400.010,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	2.000.000,00	1.770.000,00	88,50	96.780.000,00
5.	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	30.000.000,00	39.500.000,00	131,67	32.750.000,00
B	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.552.280.000,00**	**1.563.447.540,00**	**100,72**	**1.181.907.300,00**
1.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	3.600.000,00	72,00	6.050.000,00
2.	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.000.000,00	5.010.000,00	100,20	5.460.000,00
3.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.000.000,00	3.250.000,00	81,25	3.400.000,00
4.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	400.000.000,00	142.528.100,00	35,63	251.504.100,00
5.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	8.700.000,00	7.000.000,00	80,46	10.800.000,00
6.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	46.000.000,00	43.140.000,00	93,78	24.540.000,00
7.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.083.580.000,00	1.358.919.440,00	125,41	880.153.200,00
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**1.700.000.000,00**	**1.717.524.400,00**	**101,03**	**342.522.787,00**
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.700.000.000,00	1.717.524.400,00	101,03	342.522.787,00
JUMLAH		**73.182.745.351,00**	**73.178.734.847,00**	**99,99**	**65.941.537.340,00**

Berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Dharmasraya Pada Tahun 2025 memiliki 17 unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu 2 unit Badan Layanan Umum RSUD yaitu RSUD Sungai Dareh dan RSUD Sungai Rumbai, 14 unit Badan Layanan Umum UPT Puskesmas dan 1 unit Laboratorium Kesehatan Daerah, uraian sejarah singkat mengenai pembentukan BLUD di Kabupaten Dharmasraya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Badan Layanan Umum RSUD Sungai Dareh

BLUD RSUD Sungai Dareh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/460/KPTS-BUP/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan RSUD Sungai Dareh untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh di Kabupaten Dharmasraya. Pelaksanaan unit BLUD RSUD Sungai Dareh mulai berjalan pada 1 Januari 2015.

2. Badan Layanan Umum UPT Puskesmas, RSUD Sungai Rumbai dan Labkesda

Tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya memiliki UPT Puskesmas Kabupaten Dharmasraya *(holding)* pada Dinas Kesehatan. UPT Puskesmas membawahi 13 Puskesmas sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Adanya penetapan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, telah terjadi Perubahan Struktur Organisasi UPT Puskesmas melalui Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/147/KPTS-BUP/2018 tentang Pencabutan atas Keputusan Dharmasraya Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 18 April 2018.

Pencabutan keputusan tersebut diiringi dengan pembentukan UPT Puskesmas sebanyak 13 Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka diterbitkan Keputusan Bupati Tahun 2019 tentang penetapan UPT Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/463/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/464/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/465/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/466/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/467/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya SK Nomor 188.45/468/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/469/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/470/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/471/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/472/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/473/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya karena operasional Puskesmas Koto Besar digabungkan dengan Puskesmas Sitiung IV, maka kembali ditetapkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/374/KPTS-BUP/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/473/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/474/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/475/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Gunung Medan sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pada akhir Tahun 2019 Kabupaten Dharmasraya telah menambah 2 unit BLUD yaitu UPT RSUD Sungai Rumbai dan UPT Puskesmas Beringin Sakti yang mulai berjalan pada tanggal 2 Januari 2020, dengan dasar penetapan sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/462/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
b. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/476/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Beringi Sakti sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan menjadi BLUD pada Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/443/KPTS-BUP/2022 tanggal 12 Desember 2022, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Pada Dinas Kesehatan masih terdapat 1 UPT Puskesmas yang belum ditetapkan menjadi BLUD yaitu Puskesmas Sitiung IV, yang mulai memberikan pelayanan ke masyarakat pada Tahun 2023, berdasarkan Surat dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan RI Nomor IR.01.02/2/50/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Pemutakhiran Data Puskesmas, yang menyebutkan Puskesmas Sitiung IV dengan Kategori Kemampuan Pelayanan Non rawat Inap dan Kategori Karakteristik Wilayah Kerja Pedesaan. Saat ini pelaporan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan belanja Puskesmas Sitiung IV tergabung dengan Puskesmas Koto Besar, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/374/KPTS-BUP/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/473/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang menyatakan bahwa pencatatan operasional keuangan BLUD Puskesmas Sitiung IV dikonsolidasi dengan Puskesmas Koto Besar. Sedangkan Belanja BOK Puskesmas Sitiung IV tergabung di Belanja Barang dan Jasa BOK Dinas Kesehatan.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp69.488.465.351,00 terealisasi sebesar Rp69.397.447.907,00 atau sebesar 99,88%. Retribusi Pelayanan kesehatan ini tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Retribusi Pelayanan kesehatan ini bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp4.188.313.600,00, Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp64.839.085.207,00 dan Pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebesar Rp370.049.100,00. Realiasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.6
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I	**Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas**	**3.472.157.351,00**	**4.188.313.600,00**	**120,63**	**3.364.903.484,00**
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	324.328.239,00	438.167.500,00	135,10	359.518.900,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	145.614.485,00	183.713.900,00	126,16	165.134.000,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	125.780.839,00	140.087.400,00	111,37	116.643.000,00
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	209.163.051,00	239.305.600,00	114,41	209.567.120,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	154.560.239,00	160.231.700,00	103,67	95.968.400,00
6	BLUD Puskesmas Silago	249.582.784,00	304.314.000,00	121,93	295.072.500,00

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	122.328.239,00	153.003.500,00	125,08	121.940.980,00
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	480.000.000,00	672.147.200,00	140,03	547.385.300,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	650.000.000,00	909.478.500,00	139,92	927.787.200,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	290.945.239,00	322.035.400,00	110,69	243.846.700,00
11	BLUD Puskesmas Sialang	57.328.239,00	61.202.100,00	106,76	39.188.200,00
12	BLUD Puskesmas Tiumang	117.328.239,00	154.152.000,00	131,39	136.068.500,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	205.869.519,00	133.186.200,00	64,69	134.353.984,00
14	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	339.328.239,00	317.288.600,00	93,50	272.428.700,00
II	**Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah**	**65.716.308.000,00**	**64.839.085.207,00**	**98,67**	**60.496.355.259,00**
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	60.000.000.000,00	58.940.158.021,00	98,23	54.303.752.973,00
2	BLUD RSUD Sungai Rumbai	5.716.308.000,00	5.898.927.186,00	103,19	6.192.602.286,00
III	**Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis**	**300.000.000,00**	**370.049.100,00**	**123,35**	**161.310.000,00**
1	BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	300.000.000,00	370.049.100,00	123,35	161.310.000,00
	JUMLAH	**69.488.465.351,00**	**69.397.447.907,00**	**99,87**	**64.022.568.743,00**

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini diberikan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp310.000.000,00 terealisasi sebesar Rp361.220.000,00 atau sebesar 116,52%. Adanya **kenaikan** penerimaan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp110.611.500,00 atau 44,14%. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya area pelayanan persampahan/kebersihan di sektor perumahan.

c) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan yang ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp97.825.000,00 atau 97,83%. Tingginya capaian atas retribusi ini adanya penetapan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

d) Retribusi Pelayanan Pasar.

Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Retribusi Los pada Dinas Pertanian di Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.770.000,00 atau 88,50%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp95.010.000,00 atau -98,17% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp96.780.000,00 karena adanya reklasifikasi Retribusi Pelayanan Pasar ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas pemanfaatan sewa kios pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

e) Retribusi Pelayanan Kebersihan

Retribusi Pelayanan Kebersihan sub rincian objeknya adalah Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada Tahun 2025 ditargetkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp39.500.000,00 atau 131,67%. Mengalami **kenaikan** penerimaan retribusi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp6.750.000,00 atau 20,61% disebabkan karena meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan kakus.

f) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Pendapatan retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila baru merupakan sewa penginapan / mess Pemda yang berada di Kota Padang, dibawah pengelolaan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, ditargetkan Tahun 2025 sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.600.000,00 atau sebesar 72%, mengalami **penurunan** sebesar Rp2.450.000,00 atau -40,50% disebabkan kurangnya fasilitas serta pemeliharaan penginapan sehingga pengunjung menjadi berkurang.

g) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Tahun 2025 ditargetkan pada Dinas Pertanian sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.010.000,00 atau sebesar 100,20%. Mengalami **penurunan** penerimaan retribusi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp450.000,00 atau -8,24%.

h) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pendapatan Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2025 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berupa sewa pemakaian GOR Olahraga di Koto Padang sebesar Rp4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.250.000,00 atau sebesar 81,25%. Mengalami **penurunan** penerimaan retribusi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp150.000,00 atau -4,41%. Kurang nya pencapaian realisasi pendapatan disebabkan tidak memadainya fasilitas gedung olah raga serta biaya sewa yang tidak sepadan dengan fasilitas yang ada.

i) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan pada Tahun 2025 sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp142.528.100,00 atau 35,63%. Penerimaan Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 mengalami **penurunan** sebesar Rp108.976.000,00 atau -43,33%, yang terdiri dari :

1) Dinas Pertanian adalah Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah adalah berupa Bibit atau Benih Tanaman yang terdiri dari penjualan anak ayam, telur, dan kambing persediaan yang ditargetkan sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi 100%. Mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar Rp10.500.000,00 dibandingkan Tahun 2024 atau 110,5%.
2) Dinas Pangan dan Perikanan adalah Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan yang ditargetkan sebesar Rp75.000.000,00 terealisasi sebesar Rp49.590.000 atau 66,12%, mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar Rp17.510.000,00 atau 54,58% dari penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp32.080.000,00.
3) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan ditargetkan sebesar Rp305.000.000,00 terealisasi sebesar Rp72.938.100,00 yang merupakan pendapatan pada :
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalalah berupa Pengelolaan Air Minum berada pada Unit Pelaksana Teknis Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan target Tahun 2025 sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp65.548.100,00 atau sebesar 21,85%. Mengalami **penurunan** penerimaan sebesar Rp140.971.000,00 dibandingkan Tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp206.519.100,00 atau -68,26%.
   b. Dinas Lingkungan Hidup berupa penjualan pupuk kompos ditargetkan Tahun 2025 sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.390.000,00 atau 147,80%.

j) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun 2024 baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan penyewaan tempat usaha berupa bengkel pada IKM Logam sebanyak 3

unit gudang yang ditargetkan sebesar Rp8.700.000,00 terealisasi sebesar Rp7.000.000,00 atau sebesar 80,45%. Mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp3.800.000,00 atau -35,19% disebabkan adanya penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp1.800.000,00 yang belum di setor ke Kas Daerah per tanggal pelaporan.

k) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan ditargetkan sebesar Rp46.000.000,00 terealisasi sebesar Rp43.140.000,00 atau sebesar 93,78% terdapat pada:

1) Dinas Perhubungan ditargetkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.400.000,00 atau 54%. Mengalami penurunan sebesar Rp3.600.000,00 dibandingkan Tahun 2024 atau -40% disebabkan tidak terealisasinya pemungutan beberapa pasar yang telah di targetkan sebelumnya.
2) Dinas Kesehatan ditargetkan sebesar Rp36.000.000,00 terealisasi sebesar Rp37.740.000,00 atau sebesar 104,83%. Pendapatan ini bersumber dari penyediaan tempat parkir pada BLUD RSUD Sungai Dareh.

l) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut berupa Pemakaian Rumah Dinas, Pemakaian Gedung Auditorium dan Gedung Pertemuan di Kecamatan, Sewa ATM, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dan Sewa Alat Berat. Retribusi ini ditargetkan sebesar Rp1.083.580.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.358.919.440,00 atau 125,41%. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terdapat pada 18 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.7
Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dinas Pendidikan	85.000.000,00	112.396.200,00	132,23	68.569.200,00
2	Dinas Kesehatan	109.450.000,00	139.305.000,00	127,28	63.213.000,00
a	Puskesmas Sialang	0,00	0,00	0,00	20.875.000,00
b	RSUD Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	160.000.000,00	258.620.000,00	161,64	94.570.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	290.000.000,00	305.745.000,00	105,43	289.300.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	3.000.000,00	3.420.000,00	114,00	1.530.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	13.000.000,00	86,67	4.300.000,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	80.000.000,00	96.060.000,00	120,08	0,00
8	Dinas Pertanian	200.000.000,00	214.916.000,00	107,46	78.000.000,00
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13.980.000,00	12.681.000,00	90,71	11.237.500,00
10	Sekretariat Daerah	105.000.000,00	143.000.000,00	136,19	120.000.000,00
11	Badan Keuangan Daerah	5.000.000,00	41.658.240,00	833,16	86.408.500,00
12	Kecamatan Pulau Punjung	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.500.000,00
13	Kecamatan Sitiung	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	2.000.000,00
14	Kecamatan Koto Baru	2.000.000,00	2.250.000,00	112,50	4.750.000,00
15	Kecamatan Sungai Rumbai	3.900.000,00	7.768.000,00	199,18	10.750.000,00
16	Kecamatan Sembilan Koto	2.000.000,00	1.250.000,00	62,50	2.000.000,00
17	Kecamatan Timpeh	2.500.000,00	850.000,00	34,00	2.750.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
18	Kecamatan Koto Besar	2.000.000,00	1.250.000,00	62,50	2.000.000,00
Jumlah		**1.083.580.000,00**	**1.358.919.440,00**	**125,41**	**880.153.200,00**

m) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berupa persetujuan bangunan gedung dan serfikat laik fungsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target penerimaan Tahun 2025 berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.717.524.400,00 atau sebesar 101,03%.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.a.3.	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**5.529.319.459,00**	**5.347.929.006,00**

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.8
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Deviden Bank Nagari Tahun 2024	5.514.346.639,00	5.514.346.629,00	100	5.334.340.116,00
2	Deviden BPR Pulau Punjung Tahun 2024	14.972.830,00	14.972.830,00	100	13.588.890,00
	Jumlah	**5.529.319.469,00**	**5.529.319.459,00**	**100**	**5.347.929.006,00**

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp5.529.319.469,00 dengan realisasi 100% yang berasal dari penerimaan deviden Bank Nagari Tahun 2024 sebesar Rp5.514.346.629,00 dan penerimaan deviden PT BPR Pulau Punjung Tahun 2024 sebesar Rp14.972.830,00. Jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp5.347.929.006,00 penerimaan untuk Tahun 2025 mengalami **kenaikan** sebesar Rp181.390.463,00 atau 3,39%.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.a.4.	**Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	**4.436.214.917,65**	**11.988.036.841,01**

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.077.200.000,00 dengan realisasi Rp4.436.214.917,65 atau 87,38%. Terdapat penurunan pendapatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp7.551.821.923,36 atau -62,99%. Signifikannya penurunan pendapatan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, disebabkan adanya penurunan penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp6.838.648.986,02 atau -75,66%, pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.200.602.481,19 sedangkan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp9.039.251.467,21.

Anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.9
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	770.000.000,00	290.794.000,00	37,77	380.741.100
2	Jasa Giro	1.000.000.000,00	842.095.448,46	84,21	900.964.205,71
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.500.000.000,00	2.200.602.481,19	88,02	9.039.251.467,21
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	303.500.000,00	582.407.951,00	191,90	1.270.764.474,09
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	45.470.000,00	32.086.600,00	70,57	37.632.514
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	201.830.000,00	247.293.346,00	122,53	80.075.452
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.400.000,00	5.337.432,00	83,40	6.087.628
8	Pendapatan dari Pengembalian	250.000.000,00	235.597.659,00	94,24	272.520.000
JUMLAH		**5.077.200.000,00**	**4.436.214.917,65**	**87,38**	**11.983.036.841,01**

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 terdiri dari delapan obyek penerimaan. Berdasarkan realisasi penerimaan dari **delapan** obyek penerimaan dibandingkan tahun 2024 secara keseluruhan mengalami **penurunan**, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**
   Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sub rincian objeknya adalah pendapatan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang, target Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp770.000.000,00 terealisasi sebesar Rp290.794.000,00 atau 37,77%. Rendahnya realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD ini terjadi karena tidak terlaksananya proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), disebabkan belum lengkapnya proses administrasi dalam persyaratan lelang. Namun adanya realisasi sebesar Rp290.794.000,00 terdiri dari penjualan langsung kendaraan perorangan dinas kepada tiga orang mantan pejabat negara di Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp277.644.000,00 dan penjualan atas gedung dan bangunan berupa atap/seng atas revitalisasi gedung dan bangunan sebesar Rp13.150.000,00.

2. **Jasa Giro**
   Penerimaan Jasa Giro Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp842.095.448,46 atau 84,21%. Jasa Giro terdiri dari :

   a) Jasa Giro pada Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp875.000.000,00 terealisasi sebesar Rp729.488.090,00 atau 83,37%. Terjadi **penurunan** penerimaan sebesar Rp277.379.123,00 atau 58,62% dibandingkan penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp21.068.281,00. Hal ini disebabkan kurangnya saldo kas yang mengendap di Kas Daerah.
   b) Jasa Giro pada Kas di Bendahara dianggarkan sebesar Rp125.000.000,0 terealisasi sebesar Rp112.607.358,00 atau 90,08%. Terjadi **penurunan** penerimaan sebesar Rp37.800.476,25 atau -25,13% dibandingkan penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp 150.407.834,71. Tidak banyaknya saldo kas yang mengendap di rekening Kas Bendahara memberikan dampak penurunan penerimaan jasa giro Tahun 2025.

3. **Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**
   Penerimaan Kerugian Daerah berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dikembalikan ke Kas Daerah berupa temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang telah dilakukan penetapan keputusan kerugian daerahnya terdiri dari Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) maupun Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Penerimaan Kerugian Daerah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.200.602.481,19 atau 88,02%.

Terdapat **penurunan** penerimaan sebesar Rp6.838.648.986,02 atau -75,66% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp9.039.251.467,21 disebabkan tidak banyak nya penetapan atas keputusan kerugian daerah yang berasal dari pemeriksaan BPK pada Tahun 2025.

4. **Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terdiri dari penerimaan penutupan rekening yang tidak aktif, penerimaan bunga deposito berasal dari penempatan deposito selama Tahun 2024. Target Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp303.500.000,00 dengan penerimaan sebesar Rp582.407.951,00 atau 191,90%. Terdapat **penurunan** pendapatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp688.356.523,09 atau -54,17%.

5. **Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Penerimaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan berupa penerimaan dari penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Penerimaan denda keterlambatan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp45.470.000,00 terealisasi sebesar Rp32.086.600,00 atau 70,56%. Mengalami **penurunan** sebesar Rp5.545.914,00 atau -14,74% dibandingkan penerimaan tahun 2024 sebesar Rp37.632.514,00.

6. **Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah dianggarkan pada Tahun 2025 dengan target sebesar Rp201.830.000,00 dengan realisasi sebesar Rp247.293.346,00 atau 122,53%, Terdapat **kenaikan** pendapatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp167.217.894,00 atau 208,83%, dengan uraian realisasi sebagai berikut :

Tabel 5.1.10
Realisasi Pendapatan Denda Pajak DaerahTahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	320.061,00
2	Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	2.537.324,00
3	Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	49.800,00
4	Denda Pajak Reklame	250.000,00	315.405,00	126,16	1.456.531,00
5	Denda Pajak Air Tanah	230.000,00	236.151,00	102,67	413.162,00
6	Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000,00	331.063,00	94,59	858.085,00
7	Denda PBBP2	75.000.000,00	82.601.414,00	110,40	74.440.489,00
8	Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000,00	1.846.050,00	3692,10	0,00
9	Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	2.850.000,00	2.717.236,00	95,34	0,00
10	Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	2.100.000,00	2.185.700,00	104,08	0,00
12	Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	100.000,00	74.227,00	74,23	0,00
13	Denda Opsen PKB	120.850.000,00	156.786.100,00	129,74	0,00
	Jumlah	**201.830.000,00**	**247.293.346,00**	**122,53**	**80.075.452,00**

7. **Pendapatan Denda Retribusi Daerah.**

Penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah dianggarkan pada Tahun 2025 dengan target sebesar Rp6.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.337.432,00 atau 83,40%, apabila dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp6.087.628,00 mengalami penurunan sebesar Rp750.196,00 atau -12,32%, dengan uraian realisasi sebagai berikut :

Tabel 5.1.11
Realisasi Pendapatan Denda Retribusi DaerahTahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan	600.000,00	50.000,00	8,33	93.000,00
2	Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	4.262.028,00
3	Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah	3.100.000,00	2.538.480,00	81,89	5.000,00
4	Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	2.700.000,00	2.748.952,00	101,81	1.727.600,00
	Jumlah	**6.400.000,00**	**5.337.432,00**	**83,40**	**6.087.628,00**

8. Pendapatan Dari Pengembalian

Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari Pengembalian Temuan pada saat NHP/LHP APIP yang tidak tercantum dalam kerugian daerah dan pengembalian pendapatan yang berasal dari keterlanjuran pembayaran Tunjangan Jabatan PNS tahun sebelumnya.

Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp235.597.659,00 atau 94,23%, dengan uraian sebagai berikut :

a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa Rp201.952.826,00.
b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS Rp5.798.400,00.
c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS Rp27.846.433,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.b. Pendapatan Transfer	**795.934.821.722,00**	**850.689.858.617,00**

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diperoleh suatu entitas pelaporan dari entitas pelaporan lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dana Transfer dari Pemerintah Pusat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah.

Pendapatan Transfer Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp811.958.696.072,35 dengan realisasi Rp795.934.821.722,00 atau sebesar 98,03%. Pendapatan Transfer Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp54.755.036.895,00 atau -6,44% dibandingkan tahun lalu. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.12
Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766.702.365.600,00	750.718.824.220,00	97,92	792.448.801.416,00
	a Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	703.312.378.600,00	687.331.418.220,00	97,73	716.383.072.416,00
	b Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	63.389.987.000,00	63.387.406.000,00	100,00	76.035.729.000,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.256.330.472,35	45.215.997.502,00	99,91	58.241.057.201,00
	JUMLAH	**811.958.696.072,35**	**795.934.821.722,00**	**98,03**	**850.689.858.617,00**

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.b.1.	**Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan**	**687.331.418.220,00**	**716.383.072.416,00**

Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dianggarkan pada Tahun 2025 sebesar Rp703.312.378.600,00 dengan realisasi sebesar Rp687.331.418.220,00 atau 97,73%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp716.383.072.416,00, Pendapatan Transfer Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp29.051.654.196,00 atau -4,06%.

Tabel 5.1.13

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bagi Hasil Pajak	19.517.202.000,00	16.769.613.800,00	85,92	14.676.153.000,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	26.633.537.500,00	26.270.721.000,00	98,64	22.402.073.000,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	499.375.747.100,00	496.572.481.339,00	99,44	512.944.707.932,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	157.785.892.000,00	147.718.602.081,00	93,62	166.360.138.484,00
JUMLAH		**703.312.378.600,00**	**687.331.418.220,00**	**97,73**	**716.383.072.416,00**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.b.1.a	**Bagi Hasil Pajak**	**16.769.613.800,00**	**14.676.153.000,00**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan kepada daerah sesuai dengan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pada Tahun Anggaran 2025 penerimaan Bagi Hasil Pajak dianggarkan Rp19.517.202.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.769.613.800,00 atau sebesar 85,92%. Penerimaan Bagi Hasil Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp2.093.460.800,00 atau 14,26% dibandingkan penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 sebesar Rp14.676.370.792,00. Penerimaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.14

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				
1	**Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan**	**5.706.437.000,00**	**5.307.551.300,00**	**93,01**	**4.832.909.000,00**
	DBH PPh Pasal 21	5.604.243.000,00	5.079.349.800,00	90,63	4.688.537.000,00
	DBH PPh Pasall 25/29 OP	102.194.000,00	228.201.500,00	223,30	144.372.000,00
2	**Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan**	**13.763.005.000,00**	**11.414.302.500,00**	**82,93**	**9.802.804.000,00**
	DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/ Kota	13.763.005.000,00	11.414.302.500,00	82,93	9.802.804.000,00
3	**Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**	**47.760.000,00**	**47.760.000,00**	**100,00**	**40.440.000,00**
	DBH Cukai untuk Prov/Kab/Kota	47.760.000,00	47.760.000,00	100,00	40.440.000,00
JUMLAH		**19.517.202.000,00**	**16.769.613.800,00**	**85,92**	**14.676.153.000,00**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.b.1.b	**Bagi Hasil Sumber Daya Alam**	**26.270.721.000,00**	**22.402.073.000,00**

Pada Tahun Anggaran 2025 penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp26.633.537.500,00 dengan realisasi sebesar Rp26.270.721.000,00 atau 98,64%. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.868.648.000,00 atau 17,27% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp22.402.073.000,00. Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.15
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	**Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**	**22.563.130.500,00**	**22.190.314.000,00**	**98,39**	**12.700.533.000,00**
a.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	3.851.186.000,00	2.118.985.000,00	55,02	10.414.000,00
b.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	16.621.702.000,00	17.991.031.200,00	108,24	10.331.892.000,00
d	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	914.039.000,00	910.533.800,00	99,62	1.261.072.000,00
e.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	332.398.500,00	335.959.000,00	101,07	-
f.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	1.097.155.000,00
2.	**Bagi Hasil Lainnya**	**4.080.407.000,00**	**4.080.407.000,00**	**100,00**	**9.701.540.000,00**
	DBH Sawit	4.080.407.000,00	4.080.407.000,00	100,00	9.701.540.000,00
JUMLAH		**26.633.537.500,00**	**26.270.721.000,00**	**98,64**	**22.402.073.000,00**

Penerimaan Dana Bagi Hasil yang masuk ke Kas Daerah Tahun 2025 terdiri atas Penyaluran Transfer Tahun 2025 dan penerimaan Dana *Treasury Defosit Facilty* (TDF) Tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.16
Sumber Pendapatan Dana Treasury Defosit (TDF) Tahun 2024

No	Uraian	Transfer TDF 2024
	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	**1.156.963.000,00**
a	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	1.153.400.000,00
b	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	2.000,00
c	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.561.000,00
	Jumlah	**1.156.963.000,00**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.b.1.c.	**Dana Alokasi Umum**	**496.572.481.339,00**	**512.944.707.932,00**

Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp499.375.747.100,00 terealisasi sebesar Rp496.572.481.339,00 atau 99,44%. Penerimaan DAU Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.372.226.593,00 atau -3,19% dibandingkan penerimaan Tahun 2024 sebesar RpRp512.944.707.932,00. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Keuangan atas KMK Nomor 29 Tahun 2025 yang menyesuaikan rincian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2025. Kebijakan ini berfokus pada efisiensi anggaran, yang berimbas pada pengurangan dana untuk infrastruktur di daerah, sehingga alokasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum ditiadakan. Adapun rincian DAU Tahun 2025 terdiri dari :

Tabel 5.1.17
Rincian DAU Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAU	426.784.884.100,00	426.784.884.100,00	100	422.691.705.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11.476.300.000,00	8.673.034.239,00	75,57	13.679.463.932,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	34.559.893.000,00	34.559.893.000,00	100	33.343.800.000,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	26.554.670.000,00	26.554.670.000,00	100	16.365.536.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	26.864.203.000,00
	Jumlah	**499.375.747.100,00**	**496.572.481.339,00**	**99,44**	**512.944.707.932,00**

		Tahun 2025 (Rp)	**Tahun 2024 (Rp)**
V.A.1.b.1.e	**Dana Alokasi Khusus**	**147.718.602.081,00**	**166.360.138.484,00**

Pada Tahun Anggaran 2025 penerimaan Dana Alokasi Khusus direncanakan Rp157.785.892.000,00 dan terealisasi Rp147.718.602.081,00 atau sebesar 93,62%. Penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.641.536.403,00 atau -11,21% dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 sebesar Rp166.360.138.484,00. Jika Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan kepada setiap daerah, maka Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya diberikan kepada daerah yang memiliki kegiatan khusus yang memiliki prioritas nasional tinggi dan memenuhi kriteria tertentu.

Tabel 5.1.18
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	10.058.006.000,00	8.778.269.954,00	87,28	34.621.165.717,00
2	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	147.727.886.000,00	138.940.332.127,00	94,05	131.738.972.767,00
JUMLAH		**157.785.892.000,00**	**147.718.602.081,00**	**93,62**	**166.360.138.484,00**

1) Dana Aloksi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penerimaan DAK Fisik Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.19
Realisasi DAK Fisik Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	214.449.000,00	203.463.000,00	94,88	9.898.329.250,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.612.280.000,00	1.585.175.610,00	98,32	569.310.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	4.728.640.261,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.231.320.000,00	5.382.883.033,00	86,38	12.679.434.706,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
5	DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	1.999.957.000,00	1.606.748.311,00	80,34	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	483.177.500,00
7	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	77.700.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	6.184.574.000,00
JUMLAH		**10.058.006.000,00**	**8.778.269.954,00**	**87,28**	**34.621.165.717,00**

2) Dana Aloksi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik)

Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK-Nonfisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Penerimaan DAK Nonfisik Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.20
Realisasi DAK Nonfisik Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Nonfisik-TPG PNSD	79.625.672.000,00	73.866.849.506,00	92,77	59.707.154.000,00
2	DAK Nonfisik-TKG PNSD	3.474.485.000,00	2.392.156.671,00	68,85	3.550.290.000,00
3	DAK Nonfisik-Tamsil Guru PNSD	743.000.000,00	487.532.500,00	65,62	2.750.575.000,00
4	DAK Nonfisik-BOKKB-BOK	7.917.298.000,00	7 407.081.918,00	93,56	10.684.376.220,00
6	DAK Nonfisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	287.749.000,00	287.749.000,00	100,00	332.678.500,00
7	DAK Nonfisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.954.587.000,00	10.022.258.231,00	91,49	9.863.223.644,00
8	DAK Nonfisik-BOKKB-BOKB	4.076.212.000,00	3.981.838.150,00	97,68	3.997.734.621,00
9	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	413.682.313,00	81,81	398.452.445,00
10	DAK Nonfisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	565.061.300,00
12	DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOS Reguler	33.579.178.000,00	33.570.064.383,00	99,97	33.532.789.037,00
13	DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.253.250.000,00	1.253.250.000,00	100,00	1.237.500.000,00
14	DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.023.125.000,00	3.994.813.455,00	99,30	4.192.128.000,00
15	DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00
16	DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	868.600.000,00	844.016.000,00	97,17	732.010.000,00
17	DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	135.000.000,00
18	DAK Nonfisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	269.040.000,00	269.040.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		**147.727.886.000,00**	**138.940.332.127,00**	**94,05**	**131.738.972.767,00**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.b.2.	**Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**	**63.387.406.000,00**	**76.065.729.000,00**

Pada Tahun Anggaran 2025 penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dianggarkan sebesar Rp63.389.987.000,00 terealisasi 100%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2024

sebesar Rp76.065.729.000,00 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp12.678.323.000,00 atau -16,67%. Penerimaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.21
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
A.	**Dana Penyesuaian**				
1	Dana Desa	56.185.785.000,00	56.185.785.000,00	100	55.320.687.000,00
2	Dana Insentif Fiskal	7.204.202.000,00	7.201.621.000,00	100	20.745.042.000,00
JUMLAH		**63.389.987.000,00**	**63.387.406.000,00**	**100**	**76.065.729.000,00**

Untuk Penerimaan Transfer Dana Desa pada Tahun 2025 sebesar Rp56.185.785.000,00 tidak melalui RKUD, tetapi ditransfer dari KPPN ke Rekening Kas Desa. Sumber pencatatan Dana Desa di Laporan Realisasi Anggaran adalah data dari SIKD Next Generation Kementerian Keuangan dan Laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Insentif fiskal adalah dana dari APBN yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, pelayanan umum, dan layanan dasar. Ini adalah bentuk apresiasi untuk mendorong kinerja daerah, bukan berdasarkan permohonan. Contohnya meliputi insentif untuk pengendalian inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp20.745.042.000,00 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp13.543.421.000,00 atau -65,29%.

V.A.1.b.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak .

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.b.3.a.	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**45.215.997.502,00**	**58.241.057.201,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp45.256.330.472,35 dengan realisasi sebesar Rp45.215.997.502,00 atau sebesar 99,91%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp58.241.057.201,00 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp13.025.059.699,00 atau -22,36%.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp45.215.997.502,00 berasal dari penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp23.466.982.584,00 dan penerimaan piutang kurang salur Tahun 2024 sebesar Rp21.749.014.918,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.22
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 dan 2024

No	Jenis Bagi Hasil	Anggaran	Penerimaan Tahun 2025				2024
			Penerimaan 2025	Piutang 2024	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6/3	8
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.896.221.285,00	94.967.435,00	3.801.253.820,00	3.896.221.285,00	100	15.031.840.925,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.625.015.467,00	96.391.661,00	1.528.623.806,00	1.625.015.467,00	100	4.631.937.409,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	23.874.093.124,35	8.063.614.483,00	16.321.017.625,00	24.384.632.108,00	102,14	23.799.193.946,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	314.247.557,00	162.474.706,00	98.119.667,00	260.594.373,00	82,9	132.335.453,00
5	Pajak Rokok	15.546.753.039,00	15.049.534.269,00	0,00	15.049.534.269,00	96,80	14.645.749.468,00
	Jumlah	**45.256.330.472,35**	**23.466.982.584,00**	**21.749.014.918,00**	**45.215.997.502,00**	**99,91**	**58.241.057.201,00**

		Tahun 2025(Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.c.	**Lain-Lain Pendapatan yang Sah**	**18.640.091.435,60**	**11.762.349.299,00**

Rencana penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp17.833.367.041,11 dengan realisasi sebesar Rp18.640.091.435,60 atau 104,52%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp11.762.349.299,00 Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.877.742.137,00 atau 58,47%.

Kenaikan realisasi pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 disebabkan adanya Pendapatan atas Pengembalian Sisa Hibah pada Pemerintah pada KPU dan Bawaslu atas Dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 sebesar Rp5.970.912.967,60 terdiri dari Rp4.388.984.022,11 dari KPU dan sebesar Rp1.581.928.945,49 dari Bawaslu. Pemberian Hibah pada KPU ditetapkan berdasarkan NPHD Tahun 2023 Nomor 200.1/04/Kesbangpol/XI/2023 dan Nomor 01/KU.07/1310/2023 tentang Pemberian Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024, dan pemberian hibah pada Bawaslu ditetapkan berdasarkan NPHD Nomor 200.1/05/Kesbangpol/XI/2023 dan Nomor 086/KU.00.01/K.SB-02/11/2023 tentang Pemberian Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp82.698.940,00 dengan persentase 82,69%. Pemberi hibah adalah perusahaan sektor perkebunan yang ada di Dharmasraya.

Penerimaan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.23
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	100.000.000,00	82.698.940,00	82,70	71.350.441,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	5.969.213.826,11	5.970.912.967,60	100,03	0,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.764.153.215,00	12.586.479.528,00	106,99	11.690.998.858,00
JUMLAH		**17.833.367.041,11**	**18.640.091.435,60**	**104,52**	**11.762.349.299,00**

Pendapatan Kapitasi Puskesmas

Penganggaran Pendapatan Kapitasi Puskesmas pada Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, diangkarkan dalam RKA-SKPKD sedangkan rencana belanja Kapitasi dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP –Lain-Lain Pendapatan yang Sah dianggarkan pada DPA Badan Keuangan Daerah sebesar Rp11.764.153.215,00 terealisasi sebesar Rp12.586.479.528,00 atau 106,99% mengalami **kenaikan** sebesar Rp895.480.670,00 atau 7,66% dibandingkan penerimaan Dana Kapitasi Tahun 2024. Uraian penerimaan kapitasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.24
Penerimaan Kapitasi Puskesmas Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	1.166.000.000,00	1.202.471.312,00	103,13	1.118.225.326,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	281.500.000,00	301.078.805,00	106,96	294.345.870,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	769.569.623,00	862.368.448,00	112,06	815.086.603,00
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	395.000.000,00	414.414.085,00	104,91	389.504.483,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.878.955.200,00	1.970.759.443,00	104,89	1.803.082.181,00
6	BLUD Puskesmas Silago	647.220.611,00	657.522.842,00	101,59	679.659.028,00
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	665.000.000,00	708.970.515,00	106,61	651.977.466,00
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	1.237.343.004,00	1.302.891.873,00	105,30	1.223.924.003,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	1.391.476.057,00	1.683.188.926,00	120,96	1.520.596.410,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	690.000.000,00	707.351.030,00	102,51	646.462.121,00
11	BLUD Puskesmas Sialang	747.580.000,00	762.479.381,00	101,99	747.478.187,00
12	BLUD Puskesmas Tiumang	680.050.000,00	694.141.396,00	102,07	642.069.854,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	924.458.720,00	1.028.662.433,00	111,27	888.658.166,00
14	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	290.000.000,00	290.179.009,00	100,06	269.929.160,00
JUMLAH		**11.764.153.215,00**	**12.586.479.528,00**	**106,99**	**11.690.998.058,00**

V.A.2. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah. Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya. Belanja Tak Terduga dipersiapkan untuk hal-hal yang tidak direncanakan dalam APBD tahun berjalan. Sedangkan Belanja Transfer merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

Anggaran belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp969.324.397.922,01 dengan realisasi Rp915.611.872.582,48 atau sebesar 94,46%. Mengalami penurunan belanja sebesar Rp97.556.051.494,81 atau -9,63% dibandingkan belanja Tahun 2024 sebesar Rp1.013.167.924.077,29.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024 terdiri dari :

Tabel 5.1.25
Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Operasi	792.360.152.082,51	755.555.738.316,18	95,36	793.179.544.263,13
2	Belanja Modal	58.010.448.699,50	45.656.214.008,30	78,70	102.187.717.063,16
3	Belanja Tak Terduga	1.775.000.000,00	196.489.050,00	11,07	2.485.520.287,00
4	Belanja Transfer	117.178.797.140,00	114.203.431.208,00	97,46	115.315.142.464,00
	JUMLAH	**969.324.397.922,01**	**915.611.872.582,48**	**94,46**	**1.013.167.924.077,29**

Adapun penjelasan anggaran dan realisasi pos-pos Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.a.	**Belanja Operasi**	**755.555.738.316,18**	**793.179.544.263,13**

Belanja Operasi TA 2025 direncanakan Rp792.360.152.082,51 dengan realisasi sebesar Rp755.555.738.316,18 atau sebesar 95,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp793.179.544.263,13 terjadi penurunan sebesar Rp37.623.805.946,95 atau -4,74%.

Tabel 5.1.26
Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pegawai	498.350.557.499,30	485.726.445.153,08	97,47	454.911.665.442,94
2	Belanja Barang dan Jasa	280.362.764.298,21	258.738.701.220,10	92,29	304.013.952.063,19
3	Hibah	13.646.830.285,00	11.090.591.943,00	81,27	34.253.926.757,00
	JUMLAH	**792.360.152.082,51**	**755.555.738.316,18**	**95,36**	**793.179.544.263,13**

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.a.1.	**Belanja Pegawai**	**485.726.445.153,08**	**454.911.665.442,94**

Belanja Pegawai Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp498.350.557.499,30 dengan realisasi Rp485.726.445.153,08 atau 97,47%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp454.911.665.442,94 terjadi peningkatan sebesar Rp30.814.779.710,14 atau 6,77%.

Belanja Pegawai Tahun 2024 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.27

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	327.824.702.268,28	322.938.491.156,00	98,51	306.466.231.954,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	144.169.223.511,11	136.753.726.750,00	94,86	43.669.061.704,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	0,00	0,00	0,00	69.042.538.710,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.976.079.908,00	12.931.133.232,00	99,65	11.159.937.860,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.059.922.404,00	902.766.614,00	85,17	430.965.781,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	601.596.000,00	100,00	474.756.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	11.719.029.407,91	11.598.731.401,08	98,97	25.668.173.433,94
JUMLAH		**498.350.557.499,30**	**485.726.445.153,08**	**97,47**	**454.911.665.442,94**

Adapun rincian belanja pegawai Tahun 2025 dan 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp322.938.491.156,00, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.28

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji Pokok ASN	242.628.547.666,28	241.996.455.452,00	99,74	228.070.156.036,00

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.161.459.856,00	24.464.833.710,00	97,23	23.174.366.415,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.537.456.683,00	3.269.936.448,00	92,44	3.535.459.869,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.991.540.348,00	21.734.178.069,00	98,83	21.860.575.162,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.159.427.070,00	1.134.987.834,00	97,89	1.016.237.045,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.286.660.537,00	14.166.492.615,00	99,16	13.365.110.825,00
7	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	1.233.451.619,00	365.126.314,00	29,60	1.072.473.077,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.790.278,00	3.693.343,00	63,79	3.508.946,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.563.188.562,00	13.800.309.442,00	94,76	12.476.233.481,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	511.176.666,00	500.702.718,00	97,95	471.940.475,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.532.694.983,00	1.501.775.211,00	97,98	1.420.170.623,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.213.308.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**327.824.702.268,28**	**322.938.491.156,00**	**98,51**	**306.466.231.954,00**

2) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai terealisasi sebesar Rp136.753.726.750,00, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.29

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I.	**Belanja Tambahan Penghasilan**	**144.169.223.511,11**	**136.753.726.750,00**	**94,86**	**112.737.496.222,00**
1)	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**57.239.039.215,00**	**56.999.574.939,00**	**99,58**	**43.669.061.704,00**
a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	57.239.039.215,00	56.999.574.939,00	99,58	43.669.061.704,00
2)	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**86.930.184.296,11**	**79.754.151.811,00**	**91,75**	**69.068.434.518,00**
a	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.447.223.622,00	1.293.070.689,00	89,35	809.279.643,00
b	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	120.777.474,00	104.816.245,00	86,78	44.283.475,00
c	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	79.566.754.000,11	73.866.849.506,00	92,84	60.062.543.200,00
d	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.258.679.200,00	3.276.932.871,00	76,95	2.619.546.200,00
e	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.521.250.000,00	1.202.032.500,00	79,02	2.049.250.000,00
f	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	2.998.327.000,00
g	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	15.500.000,00	10.450.000,00	67,42	485.200.000,00
JUMLAH		**144.169.223.511,11**	**136.753.726.750,00**	**94,86**	**112.737.496.222,00**

3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp14.435.495.846,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.30

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**	**12.976.079.908,00**	**12.931.133.232,00**	**99,65**	**11.159.937.860,00**
1	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.790.000,00	100,00	667.695.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	64.856.400,00	64.856.400,00	100,00	66.828.300,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.130.320,00	72.130.320,00	100,00	75.823.740,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.582.000,00	100,00	57.172.500,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	974.095.500,00	100,00	968.157.750,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	96.282.900,00	96.282.900,00	100,00	86.949.975,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	43.914.000,00	0,00	0,00	22.883.183,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	100,00	2.261.700.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	945.000.000,00	100,00	365.400.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	228.788,00	196.104,00	85,71	180.264,00
11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	999.992,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.186.800.008,00	2.186.800.008,00	100,00	2.142.812.148,00
13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.082.400.000,00	4.082.400.000,00	100,00	4.170.600.000,00
14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	273.735.000,00
II	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**1.059.922.404,00**	**902.766.614,00**	**85,17**	**430.965.781,00**
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.270.000,00	76.200.000,00	98,62	29.400.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.437.000,00	948.000,00	11,24	4.116.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.486.000,00	91.800.000,00	84,62	52.920.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.000,00	2.462.280,00	29,62	4.055.320,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.000.000,00	639.595,00	63,96	989.638,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.000.000,00	832,00	0,08	556,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	50.431.000,00	4.869.120,00	9,66	2.963.520,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.000.000,00	103.680,00	10,37	60.480,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.000.000,00	311.040,00	31,10	181.440,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	742.276.378,00	667.994.062,00	89,99	317.297.852,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	60.709.026,00	57.438.005,00	94,61	18.980.775,00
III	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**	**601.600.000,00**	**601.596.000,00**	100,00	**474.756.000,00**
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	74.760.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.996.000,00	100,00	399.996.000,00
JUMLAH		**14.637.602.312,00**	**14.435.495.846,00**	**98,62**	**12.065.659.641,00**

4) Belanja Pegawai BLUD Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp11.598.731.401,08,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.31

Belanja Pegawai BLUD Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I	**BLUD RSUD**	**2.938.330.637,00**	**2.935.659.701,00**	**99,91**	**16.061.050.141,00**
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	2.669.530.637,00	2.668.359.701,00	99,96	15.433.824.177,00
2	RSUD Sungai Rumbai	268.800.000,00	267.300.000,00	99,44	627.225.964,00
II	**BLUD Puskesmas**	**8.780.698.770,91**	**8.663.071.700,08**	**98,66**	**7.607.123.292,94**
1	BLUD Labkesda	155.327.877,00	155.316.328,00	99,99	117.157.378,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	206.919.745,70	206.183.377,00	99,64	207.026.255,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung I	969.697.812,00	969.672.228,00	100,00	942.913.032,00
4	BLUD Puskesmas Tiumang	485.140.611,00	477.503.483,00	98,43	401.948.073,00
5	BLUD Puskesmas Silago	650.926.320,00	650.734.360,00	99,97	490.033.996,00
6	BLUD Puskesmas Sialang	575.478.239,00	561.562.684,00	97,58	491.167.572,00
7	BLUD Puskesmas Sitiung II	403.342.367,00	403.342.367,00	100,00	382.962.425,00
8	BLUD Puskesmas Padang Laweh	295.600.000,21	288.421.040,00	97,57	261.602.609,00
9	BLUD Puskesmas Koto Besar	593.934.220,00	555.973.616,60	93,61	391.378.837,17
10	BLUD Puskesmas Koto Baru	1.102 047.209,00	1.095.986.721,48	99,45	870.545.337,00
11	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	955.386.000,00	955.223.854,00	99,98	914.218.225,00
12	BLUD Puskesmas Gunung Medan	452.481.208,00	448.497.136,00	99,12	417.439.801,00
13	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.178.895.646,00	1.174.627.896,00	99,64	971.218.710,00
14	BLUD Puskesmas Timpeh	500.041.516,00	478.244.236,00	95,64	512.299.435,77
15	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	255.500.000,00	241.782.373,00	94,63	235.211.607,00
JUMLAH		**11.719.029.407,91**	**11.598.731.401,08**	**98,97**	**23.668.173.433,94**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.a.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**258.738.701.220,10**	**304.013.952.063,19**

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja pembelian barang maupun jasa yang digunakan untuk memperlancar operasional seluruh kegiatan yang akhirnya dapat memperlancar tugas-tugas pemerintahan.

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp280.362.764.298,21, terealisasi sebesar Rp258.738.701.220,10 atau 92,29%. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp45.275.250.843,09 atau -14,89 %.

Belanja Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.32

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	31.598.791.316,55	29.277.714.860,00	92,65	65.246.876.095,39
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.257.406.832,00	1.233.726.136,00	98,11	1.603.105.200,00
3	Belanja Jasa Kantor	54.706.676.534,00	51.093.066.534,00	93,39	50.806.975.596,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.038.572.400,00	24.296.889.520,00	93,31	25.761.420.440,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.484.549.106,00	1.300.470.102,00	87,60	2.751.137.026,00

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.163.109.200,00	918.515.446,00	78,97	2.387.673.070,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.330.550.000,00	3.726.718.473,72	86,05	99.713.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	500.000.000,00	399.548.000,00	79,90	548.155.930,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	9.300.000.000,00	788.141.861,00	8,47	0,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.875.216.000,00	7.107.944.378,00	80,08	9.653.903.178,00
12	Belanja Pemeliharaan Tanah	14.300.000,00	4.150.000,00	29,02	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.664.526.840,00	3.921.502.990,00	84,07	5.115.334.210,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.435.588.780,00	1.388.230.028,00	96,70	213.206.400,00
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.389.785.000,00	1.344.978.070,00	96,77	3.451.341.900,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.663.726.590,00	28.063.674.623,00	97,90	58.997.228.512,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	162.022.344,00
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	634.060.000,00	352.550.500,00	55,60	1.031.960.000,00
19	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	48.585.000,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	23.642.705.651,00	23.595.753.442,00	99,80	22.826.610.780,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	577.362.216,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	160.700.000,00	160.700.000,00	100,00	136.200.000,00
23	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.255.825.880,00	12.967.920.285,00	97,82	1.658.588.477,00
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.216.674.168,66	66.766.505.971,38	99,33	50.929.802.688,80
JUMLAH		**280.362.764.298,21**	**258.738.701.220,10**	**92,29**	**304.013.952.063,19**

a. Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp29.277.714.860,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.33
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	91.360.000,00	87.453.675,00	95,72	120.675.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.172.000,00	8.795.640,00	86,46	0,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.295.866.601,40	2.823.249.911,00	85,66	4.650.807.276,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	221.060.000,00	21.060.000,00	9,52	510.865.000,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	6.560.000,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	6.864.000,00	6.473.000,00	94,30	20.672.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	301.000.000,00	299.750.000,00	99,58	416.447.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.131.000,00	13.131.000,00	100,00	19.725.000,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.733.558.730,00	3.722.113.749,00	99,69	2.728.985.175,00

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	20.900.000,00	20.081.400,00	96,08	14.083.240,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	286.560.000,00	246.002.369,00	85,84	146.666.000,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.500.000,00	4.000.000,00	88,88	1.690.000,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	284.766.500,00	279.176.517,00	98,03	489.514.815,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	677.985.500,00	638.948.531,00	94,24	1.084.985.900,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.709.627.500,00	1.595.299.294,00	93,31	2.673.013.564,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	206.680.000,00	198.945.188,00	96,25	268.102.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	618.651.550,00	606.630.154,00	98,05	797.430.860,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	51.013.000,00	26.147.153,00	51,25	50.929.000,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	343.769.950,00	306.283.752,00	89,09	471.013.420,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	18.320.000,00	16.825.000,00	91,83	28.005.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	86.790.000,00	72.405.800,00	83,42	136.383.000,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	65.350.000,00	33.369.036,00	51,06	94.675.716,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	522.748.000,00	467.999.024,00	89,52	905.750.706,00
24	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.322.457.470,00	2.276.533.552,00	98,02	4.767.980.455,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	248.300.933,00	226.161.390,00	91,08	33.449.282,00
26	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.424.544.628,00	5.077.027.939,00	93,59	13.187.485.614,39
27	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	3.907.397.938,15	3.799.462.560,00	97,23	22.359.239.323,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.562.089.000,00	1.403.508.674,00	89,84	1.228.699.600,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	779.818.000,00	708.713.270,00	90,88	113.929.500,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.466.877.416,00	1.309.649.665,00	89,28	196.163.554,00
31	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	779.785.000,00	720.630.541,00	92,41	900.370.556,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.694.064.401,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	946.759.700,00	752.003.453,00	79,42	2.686.591.900,00
34	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	284.500.000,00	245.801.335,00	86,39	198.252.782,00
35	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	400.000.000,00	399.685.000,00	99,92	691.420.000,00
36	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	236.001.900,00	233.277.810,00	98,84	121.990.456,00
37	Belanja Pakaian Siaga	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
38	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	16.770.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
39	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
40	Belanja Pakaian Adat Daerah	185.500.000,00	173.099.910,00	93,31	156.570.000,00
41	Belanja Pakaian Olahraga	280.095.000,00	254.009.804,00	90,68	52.100.000,00
42	Belanja Pakaian Paskibraka	203.540.000,00	203.539.764,00	99,99	197.069.000,00
JUMLAH		**31.598.791.316,55**	**29.277.714.860,00**	**92,65**	**65.246.876.095,39**

b. Belanja Aset tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi, merupakan belanja aset tetap peralatan dan mesin yang biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp1.000.000,00. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp1.233.726.136,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.34
Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.400.000,00	3.250.000,00	95,58	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.800.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.250.000,00	3.110.000,00	95,69	3.700.000,00
5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	750.000,00	750.000,00	100,00	4.875.000,00
6	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.199.330.000,00	1.181.881.896,00	98,54	1.386.753.500,00
7	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	5.340.000,00	3.570.000,00	66,85	3.070.000,00
9	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.039.832,00	8.564.440,00	94,74	37.876.700,00
10	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
11	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	3.150.000,00	2.719.500,00	86,33	0,00
12	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
13	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
14	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
15	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	0,00	0,00	0,00	55.500.000,00
16	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	0,00
18	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	8.850.000,00
19	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00
20	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
21	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	5.610.000,00	5.610.000,00	100,00	5.630.000,00
22	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	2.125.000,00	1.865.300,00	87,77	0,00
23	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	13.962.000,00	13.755.000,00	98,51	0,00
JUMLAH		**1.257.406.832,00**	**1.233.726.136,00**	**98,12**	**1.603.105.200,00**

Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan akuntansi pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Untuk Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, ketentuan mengenai nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp1.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang di bawah batasan minimal kapitalisasi aset tetap, dianggarkan dan dicatat pada kelompok belanja barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp51.093.066.534,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.35
Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	639.550.000,00	587.150.000,00	91,81	0,00
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	549.700.000,00	404.737.500,00	73,63	554.250.000,00
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	226.080.000,00	193.350.000,00	85,52	752.305.000,00
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	26.600.000,00	12.600.000,00	47,37	109.931.484,00
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	72.000.000,00	54.000.000,00	75,00	32.500.000,00
6	Honorarium Rohaniwan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	2.700.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
7	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	9.500.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	5.200.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	741.300.000,00	731.600.000,00	98,69	667.180.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	161.600.000,00	157.800.000,00	97,65	0,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.354.690.000,00	1.207.125.000,00	89,11	3.476.671.573,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	93.918.000,00	91.875.379,00	97,83	231.442.083,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	31.920.000,00	23.940.000,00	75,00	0,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.756.480.000,00	2.582.856.800,00	93,70	3.077.160.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	868.590.000,00	868.590.000,00	100,00	990.400.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	497.008.200,00	493.935.000,00	99,38	405.340.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	84.810.000,00	67.090.000,00	79,11	100.330.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.865.760.000,00	1.572.090.000,00	84,26	1.762.995.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	437.970.000,00	435.060.000,00	99,34	127.400.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	163.350.000,00	143.510.000,00	87,85	147.915.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	720.464.000,00	709.864.000,00	98,53	774.949.669,00
22	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.544.870.428,00	7.044.500.000,00	93,37	10.912.325.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	53.240.000,00	53.240.000,00	100,00	84.285.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.065.500.000,00	935.300.000,00	87,78	0,00
25	Belanja Jasa Tenaga Ahli	426.120.192,00	414.820.000,00	97,35	380.640.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.422.992.328,00	4.248.345.000,00	96,05	3.955.800.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.915.578.800,00	2.820.240.000,00	96,73	2.793.360.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.248.808.772,00	2.008.325.000,00	89,31	1.963.080.000,00
29	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	602.400.000,00	547.930.000,00	90,96	393.210.000,00
30	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	23.540.000,00	15.140.000,00	64,32	7.980.000,00
31	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	131.900.000,00	103.120.000,00	78,18	163.500.000,00
32	Belanja Jasa Tata Rias	33.950.000,00	27.750.000,00	81,74	218.500.000,00
33	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	120.000.000,00
34	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	165.500.000,00	144.237.500,00	87,15	28.023.580,00
35	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	700.755.000,00	672.405.000,00	95,95	772.151.000,00
36	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	2.501.460.000,00	2.433.893.200,00	97,30	624.482.500,00
37	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	28.002.000,00	6.527.459,00	23,31	0,00
38	Belanja Jasa Kalibrasi	185.043.000,00	184.437.000,00	99,67	155.680.657,00
39	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.000.000,00	5.850.000,00	97,50	8.679.720,00
40	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	46.200.000,00	34.200.000,00	74,03	38.400.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
41	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	40.000.000,00	39.984.950,00	99,96	5.000.000,00
42	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.102.500.000,00	1.057.890.000,00	95,95	1.909.104.000,00
43	Belanja Tagihan Telepon	599.355.200,00	585.375.016,00	97,67	642.629.470,00
44	Belanja Tagihan Air	32.990.000,00	31.652.300,00	95,95	31.366.600,00
45	Belanja Tagihan Listrik	3.678.151.327,00	3.461.975.755,00	94,12	9.702.355.709,00
46	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
47	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.785.197.217,00	1.714.542.086,00	96,04	1.541.451.014,00
48	Belanja Paket/Pengiriman	2.139.000,00	1.759.548,00	82,26	4.747.192,00
49	Belanja Penambahan Daya	237.340.000,00	186.056.800,00	78,39	24.874.600,00
50	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	583.601.000,00	380.608.300,00	65,22	271.178.605,00
51	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	7.496.831.870,00	7.431.201.988,00	99,12	0,00
52	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Belanja Lembur	981.780.200,00	903.350.000,00	92,01	795.836.000,00
54	Belanja Medical Check Up	200.000.000,00	72.447.277,00	36,22	28.485.140,00
55	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.236.800.000,00	2.891.448.776,00	89,33	0,00
56	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	177.240.000,00	142.639.900,00	80,48	0,00
57	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	44.600.000,00	44.200.000,00	99,10	0,00
JUMLAH		**54.706.676.534,00**	**51.093.066.534,00**	**93,39**	**50.806.975.596,00**

d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp24.296.889.520,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.36
Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.362.240.000,00	1.346.814.944,00	98,87	1.273.115.592,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	22.833.148.800,00	21.881.202.000,00	95,83	23.125.240.000,00
3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	470.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	584.198.400,00	467.706.200,00	80,06	755.818.514,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	295.385.200,00	147.569.361,00	49,96	180.043.071,00
6	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	490.000.000,00	453.597.015,00	92,57	427.203.263,00
7	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**26.038.572.400,00**	**24.296.889.520,00**	**93,31**	**25.761.420.440,00**

e. Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar 1.300.470.102,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.37
Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Alat Pengangkat	7.200.000,00	3.600.000,00	50,00	6.000.000,00
2	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	20.300.000,00	19.700.000,00	97,04	6.250.000,00
3	Belanja Sewa Electric Generating Set	74.205.004,00	70.205.000,00	94,60	60.890.000,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	268.800.000,00	194.134.183,00	72,22	487.039.866,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	46.500.000,00	40.750.000,00	87,63	204.000.000,00
6	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	443.550.000,00	409.889.459,00	92,41	580.780.000,00
7	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
8	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	195.345.100,00	187.861.040,00	96,16	338.530.560,00
9	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	232.100.000,00	190.189.918,00	81,94	329.554.000,00
10	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	196.549.002,00	184.140.502,00	93,68	169.417.600,00
11	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	521.650.000,00
12	Belanja Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	42.525.000,00
JUMLAH		**1.484.549.106,00**	**1.300.470.102,00**	**87,60**	**2.751.137.026,00**

f. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp918.515.446,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.38
Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	968.780.200,00	874.186.446,00	90,23	1.943.894.070,00
4	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Sewa Mess/ Wisma/ Bungalow/Tempat Peristirahatan	42.379.000,00	42.379.000,00	100,00	74.879.000,00
6	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00
7	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	219.750.000,00
8	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
JUMLAH		**1.163.109.200,00**	**918.515.446,00**	**78,97**	**2.387.673.070,00**

g. Belanja Sewa Aset Tetap lainnya sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.39
Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
JUMLAH		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.750.000,00**

h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp3.726.718.473,72 terdiri dari:

Tabel 5.1.40

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	59.600.000,00	58.746.827,00	98,57	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	473.725.000,00	473.409.646,00	99,93	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	650.000.000,00	648.901.970,00	99,83	99.713.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	352.225.000,00	352.040.000,00	99,95	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	2.795.000.000,00	2.193.620.030,72	78,48	0,00
JUMLAH		**4.330.550.000,00**	**3.726.718.473,72**	**86,06**	**99.713.000,00**

i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp399.548.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.41

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	500.000.000,00	399.548.000,00	79,91	199.618.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	198.537.930,00
JUMLAH		**500.000.000,00**	**399.548.000,00**	**79,91**	**548.155.930,00**

j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Sebesar Rp788.141.861,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.42

Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* Infrastruktur Ketenagalistrikan	9.300.000.000,00	788.141.861,00	8,47	0,00
JUMLAH		**9.300.000.000,00**	**788.141.861,00**	**8,47**	**0,00**

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availability Payment)* pada Dinas Perhubungan ditetapkan anggaran sebesar Rp9.300.000.000,00 dan baru terealisasi sebesar Rp788.141.861,00 atau 8,47%. Realisasi tersebut berupa Kegiatan Peningkatan Insfrastruktur Ketersediaan Jasa Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Dharmasraya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha *(Unsolicited)* Tahun 2023-2025. Sampai dengan akhir periode pelaporan pembayaran jasa belum terealisasi secara optimal, pembayaran baru satu kali tagihan pada bulan Januari 2025. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan masih menunggu selesainya proses review dan pendampingan BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap rencana Proyek KPBU PJU Kabupaten

Dharmasraya. Sehingga Pemerintah Daerah menunda realisasi belanja sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan kesesuaian perencanaan, skema pembiayaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp7.107.944.378,00 terdiri dari :

Tabel 5.1.43
Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.342.440.000,00	1.285.231.050,00	95,74	711.949.426,00
2	Belanja Sosialisasi	5.844.282.950,00	4.352.597.600,00	74,48	6.009.723.900,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	1.688.493.050,00	1.470.115.728,00	87,07	2.824.284.852,00
4	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	107.945.000,00
JUMLAH		**8.875.216.000,00**	**7.107.944.378,00**	**80,09**	**9.653.903.178,00**

l. Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp4.150.000,00 terdiri dari :

Tabel 5.1.44
Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	14.300.000,00	4.150.000,00	29,02	0,00
JUMLAH		**14.300.000,00**	**4.150.000,00**	**29,02**	**0,00**

m. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.921.502.990,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.45
Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	225.000.000,00	147.834.500,00	65,70	254.201.750,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	91.999.000,00	91.568.671,00	99,53	30.101.900,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	130.000.000,00	54.792.250,00	42,15	147.637.760,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	501.175.000,00	465.429.886,00	92,87	281.050.986,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.136.894.100,00	1.826.397.315,00	84,29	2.792.617.724,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	145.000.000,00	127.952.262,00	88,24	302.217.769,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	498.782.500,00	368.843.117,00	73,95	436.841.289,00

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	21.000.000,00	20.828.500,00	99,18	11.113.540,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	100.000.000,00	99.982.000,00	99,98	89.998.500,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	8.000.000,00	7.944.000,00	99,30	11.000.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	39.000.000,00	97,50	44.594.250,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	9.000.000,00	7.842.000,00	87,13	7.554.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	28.500.000,00	28.370.000,00	99,54	23.208.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	247.618.910,00	224.469.973,00	90,65	221.341.801,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000,00	39.919.000,00	99,80	39.900.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	72.500.000,00	67.370.000,00	92,92	56.944.224,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.000.000,00	11.500.000,00	38,33	59.850.600,00
23	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	207.901.830,00	192.359.016,00	92,52	200.230.117,00
24	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	57.655.500,00	55.610.500,00	96,45	57.730.000,00
25	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	13.200.000,00
JUMLAH		**4.664.526.840,00**	**3.921.502.990,00**	**84,07**	**5.115.334.210,00**

n. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.388.230.028,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.46
Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.027.154.780,00	1.013.534.070,00	98,67	75.082.800,00

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	49.197.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	88.926.600,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	380.434.000,00	374.695.958,00	98,49	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**1.435.538.780,00**	**1.388.230.028,00**	**96,70**	**213.206.400,00**

o. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.344.978.070,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.47
Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.129.085.000,00	1.121.100.000,00	99,29	3.299.803.900,00
2	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	70.000.000,00	69.700.000,00	99,57	67.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	120.500.000,00	83.978.070,00	69,69	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.988.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah	70.200.000,00	70.200.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	0,00	0,00	0,00	74.550.000,00
JUMLAH		**1.389.785.000,00**	**1.344.978.070,00**	**96,78**	**3.451.341.900,00**

p. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp28.063.674.623,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.48
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.669.917.090,00	24.423.028.073,00	99,00	47.621.865.817,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.993.809.500,00	3.640.646.550,00	91,16	10.826.229.850,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	535.932.845,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	162.022.344,00
JUMLAH		**28.663.726.590,00**	**28.063.674.623,00**	**97,91**	**59.159.250.856,00**

q. Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp352.550.500,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.49
Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	166.200.000,00	125.990.500,00	75,81	966.960.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	467.860.000,00	226.560.000,00	48,42	65.000.000,00
JUMLAH		**634.060.000,00**	**352.550.500,00**	**55,60**	**1.031.960.000,00**

r. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp23.786.453.442,00.

Penerimaan Dana BOS Reguler dan Kinerja, BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2025 dianggarkan pada Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2025 yang ditransfer langsung ke rekening sekolah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Tabel 5.1.50
Realisasi Belanja Belanja Barang dan Jasa BOS dan BOSP Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	48.585.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP	23.833.405.651,00	23.786.453.442,00	99,80	23.540.172.996,00
JUMLAH		**23.833.405.651,00**	**23.786.453.442,00**	**99,80**	**23.588.757.996,00**

Pendapatan dan Belanja Dana BOS, BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.51
Realisasi Pendapatan dan Belanja BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Saldo Awal	158.982.712,00	36.378.712,00	22,88	21.743.185,00
2	**Pendapatan**	**39.874.153.000,00**	**39.812.143.838,00**	**99,84**	**39.889.427.037,00**
	BOS Reguler	33.579.178.000,00	33.570.064.383,00	99,97	33.532.789.037,00
	BOS Kinerja	1.253.250.000,00	1.253.250.000,00	100,00	1.237.500.000,00
	BOP PAUD	4.083.125.000,00	4.054.813.455,00	99,31	4.252.128.000,00
	BOP Kesetaraan	958.600.000,00	934.016.000,00	97,44	867.010.000,00
3	**Total Penerimaan (1+2)**	**40.033.135.712,00**	**39.848.522.550,00**	**99,54**	**39.911.170.222,00**
4	**Belanja Barang dan Jasa BOSP (Negeri)**	**23.833.405.651,00**	**23.786.453.442,00**	**99,80**	**23.588.757.996,00**
	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	48.585.000,00
	Barang dan Jasa- BOS Reguler	22.746.884.876,00	22.719.962.567,00	99,88	22.242.751.480,00
	Barang dan Jasa- BOS Kinerja	895.820.775,00	875.790.875,00	97,76	583.859.300,00
	Barang dan Jasa BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	577.362.216,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
	Barang dan Jasa BOP Kesetaraan	160.700.000,00	160.700.000,00	100,00	136.200.000,00
5	**Belanja Modal BOSP (Negeri)**	**7.490.077.660,00**	**7.483.921.660,00**	**99,92**	**7.613.438.364,00**
	Belanja Peralatan dan Mesin BOS	3.304.918.100,00	3.304.918.100,00	100,00	3.993.991.164,00

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.185.159.560,00	4.179.003.560,00	99,85	3.619.447.200,00
6	**Belanja Hibah Dana BOSP (Swasta)**	**8.583.865.000,00**	**8.504.650.143,00**	99,08	**8.549.991.150,00**
	Belanja Hibah BOS	4.359.500.000,00	4.351.332.000,00	99,81	4.344.257.150,00
	Belanja Hibah BOP PAUD	3.426.465.000,00	3.380.002.143,00	98,64	3.576.834.000,00
	Belanja Hibah BOP Kesetaraan	797.900.000,00	773.316.000,00	96,92	628.900.000,00
	Total Belanja	**39.907.348.311,00**	**39.775.025.245,00**	**99,67**	**39.752.187.510,00**
	Surplus / Defisit	**125.787.401,00**	**73.497.305,00**	**58,43**	**158.982.712,00**

Nilai Surplus Dana BOSP Tahun 2025 sebesar Rp73.497.305,00 terdiri dari saldo Kas di BOS sebesar Rp52.396.305,00 dan pengembalian Dana BOSP PAUD yang tidak beroperasi pada Tahun 2025 ke Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.100.000,00, serta kekurangan setor pengembalian Dana BOSP-BOP PAUD Reguler ke Kasda sebesar Rp1.000,00.

s. Belanja Barang dan Jasa BOK Dinas Kesehatan dan BLUD Puskesmas sebesar Rp12.967.920.285,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.52
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Dinas Kesehatan dan BLUD Puskesmas Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I	**Dinas Kesehatan**	**2.815.424.675,00**	**2.614.410.503,00**	**92,86**	**750.000,00**
1	Dinas Kesehatan	2.200.024.675,00	1.999.529.479,00	90,89	750.000,00
2	Puskesmas Sitiung IV	615.400.000,00	614.881.024,00	99,92	0,00
II	**BLUD Puskesmas**	**10.440.401.205,00**	**10.353.509.782,00**	**99,17**	**1.657.358.477,00**
1	Laboratorium Kesehatan Daerah	101.349.000,00	94.524.000,00	93,27	0,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	739.506.105,00	730.221.000,00	98,74	0,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung I	846.435.000,00	839.476.024,00	99,18	0,00
4	BLUD Puskesmas Tiumang	844.100.000,00	842.587.139,00	99,82	159.724.439,00
5	BLUD Puskesmas Silago	678.405.000,00	677.492.961,00	99,87	530.711.147,00
6	BLUD Puskesmas Sialang	645.572.000,00	644.741.401,00	99,87	12.822.000,00
7	BLUD Puskesmas Sitiung II	639.485.400,00	624.926.938,00	97,72	395.942.000,00
8	Puskesmas Padang Laweh	629.636.000,00	628.700.257,00	99,85	0,00
9	Puskesmas Koto Besar	673.420.000,00	636.690.165,00	94,55	0,00
10	Puskesmas Koto Baru	871.985.800,00	871.754.939,00	99,97	0,00
11	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	858.721.950,00	858.229.642,00	99,94	474.872.000,00
12	BLUD Puskesmas Gunung Medan	667.348.000,00	666.848.000,00	99,93	750.000,00
13	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	840.036.950,00	837.390.250,00	99,68	750.000,00
14	BLUD Puskesmas Timpeh	797.700.000,00	795.193.886,00	99,69	0,00
15	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	606.700.000,00	604.733.180,00	99,68	81.786.891,00
JUMLAH		**13.255.825.880,00**	**12.967.920.285,00**	**97,83**	**1.658.108.477,00**

t. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp66.766.505.971,38 terdiri dari:

Tabel 5.1.53
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I	**BLUD RSUD**	**60.002.793.878,00**	**59.800.177.552,00**	**99,66**	**44.141.885.938,00**

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	54.845.209.870,00	54.667.144.078,00	99,68	38.718.367.603,00
2	RSUD Sungai Rumbai	5.157.584.000,00	5.133.033.474,00	99,52	5.423.518.335,00
II	**BLUD Puskesmas**	**7.213.880.290,66**	**6.966.328.419,38**	**96,57**	**6.787.916.750,80**
1	BLUD Labkesda	155.327.877,00	149.524.095,00	96,26	107.069.116,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	264.714.484,00	263.828.974,00	99,67	261.523.972,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung I	719.979.198,62	719.910.313,00	99,99	777.463.991,00
4	BLUD Puskesmas Tiumang	363.550.000,00	320.525.175,00	88,17	334.976.142,00
5	BLUD Puskesmas Silago	308.635.897,00	306.083.732,00	99,17	391.452.600,00
6	BLUD Puskesmas Sialang	254.101.586,00	238.762.300,00	93,96	275.474.133,00
7	BLUD Puskesmas Sitiung II	405.557.733,09	405.537.077,00	99,99	474.935.262,00
8	BLUD Puskesmas Padang Laweh	300.815.184,00	299.602.097,00	99,60	353.578.373,00
9	BLUD Puskesmas Koto Besar	722.277.983,37	671.965.199,53	93,03	566.521.091,82
10	BLUD Puskesmas Koto Baru	1.193.407.416,00	1.189.986.000,85	99,71	920.573.033,00
11	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	540.100.157,00	539.821.898,00	99,95	523.838.923,00
12	BLUD Puskesmas Gunung Medan	314.615.000,00	309.746.949,00	98,45	348.120.543,00
13	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	794.686.024,00	715.083.374,00	89,98	734.162.922,00
14	BLUD Puskesmas Timpeh	471.634.719,00	471.405.878,00	99,95	423.470.588,98
15	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	404.477.031,58	364.545.357,00	90,13	294.756.030,00
JUMLAH		**67.216.674.168,66**	**66.766.505.971,38**	**99,33**	**50.929.802.688,80**

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp67.216.674.168,66 terealisasi sebesar Rp66.766.505.971,38 atau 99,33%. Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp15.836.703.282,58 atau 31,10 %.

	Tahun 2025 (Rp)	**Tahun 2024 (Rp)**
V.A.2.a.3. Hibah	**11.090.591.943,00**	**34.253.926.757,00**

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp13.646.830.285,00 dengan realisasi Rp11.090.591.943,00 atau 81,27%. Belanja Hibah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.163.334.814,00 atau -67,62% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp34.253.926.757,00.

Tabel 5.1.54
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**	**181.000.000,00**	**180.980.000,00**	**99,99**	**21.706.113.000,00**
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	181.000.000,00	180.980.000,00	99,99	21.706.113.000,00
II	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**3.946.000.000,00**	**1.468.996.515,00**	**37,23**	**3.142.109.059,00**
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.555.000.000,00	1.057.079.615,00	67,98	1.229.825.159,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.391.000.000,00	411.916.900,00	17,23	1.867.283.900,00
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
III	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**935.965.285,00**	**935.965.285,00**	**100,00**	**855.713.548,00**
1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	935.965.285,00	935.965.285,00	100,00	855.713.548,00
IV	**Belanja Hibah Dana BOSP**	**8.583.865.000,00**	**8.504.650.143,00**	**99,08**	**8.549.991.150,00**
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.359.500.000,00	4.351.332.000,00	99,81	4.344.257.150,00
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.426.465.000,00	3.380.002.143,00	98,64	3.576.834.000,00
3	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	797.900.000,00	773.316.000,00	96,92	628.900.000,00
JUMLAH		**13.646.830.285,00**	**11.090.591.943,00**	**81,27**	**34.253.926.757,00**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.b.	**Belanja Modal**	**45.656.214.008,30**	**102.187.717.063,16**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Belanja Modal Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp58.010.448.699,50 dengan realisasi sebesar Rp45.656.214.008,30 atau 78,70%. Belanja Modal Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp56.531.503.054,86 atau -55,32 % dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp102.187.717.063,16. Realisasi Belanja Modal terinci pada akun-akun aset berikut ini:

Tabel 5.1.55
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.255.474.863,00	12.620.746.293,00	88,53	24.237.257.450,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.722.171.276,50	16.965.018.966,71	68,62	28.954.072.575,16
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.138.190.500,00	11.201.347.218,59	79,23	45.054.989.838,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.634.561.060,00	4.617.797.530,00	99,64	3.810.397.200,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	260.051.000,00	251.304.000,00	96,64	131.000.000,00
JUMLAH		**58.010.448.699,50**	**45.656.214.008,30**	**78,70**	**102.187.717.063,16**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.b.1	**Belanja Tanah**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah pada Tahun 2025 dan Tahun 2024.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.b.2	**Belanja Peralatan dan Mesin**	**12.620.746.293,00**	**24.237.257.450,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp14.255.474.863,00 dengan realisasi sebesar Rp12.620.746.293,00 atau 88,53%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp11.616.511.157,00atau -47.93 %.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat diuraikan berikut ini:

Tabel 5.1.56
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Besar	1.215.000.000,00	1.110.500.000,00	91,40	12.642.100,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	1.834.000.000,00	1.649.902.995,00	89,96	8.424.966.950,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.500.000,00	5.328.000,00	96,87	11.700.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.538.871.250,00	2.006.252.290,00	79,02	3.292.100.882,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	269.146.100,00	192.543.880,00	71,54	118.350.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	939.615.000,00	929.150.000,00	98,89	1.683.388.467,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	497.078.000,00
9	Belanja Modal Komputer	1.336.184.000,00	1.217.437.662,00	91,11	2.680.330.000,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	387.500.000,00	324.500.003,00	83,74	0,00
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	64.737.328,00	63.306.140,00	97,79	34.380.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	35.619.600,00	35.400.000,00	99,38	0,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	3.993.991.164,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.304.918.100,00	3.304.918.100,00	100,00	0,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.324.383.485,00	1.781.507.223,00	76,64	3.477.229.887,00
JUMLAH		**14.255.474.863,00**	**12.620.746.293,00**	**88,53**	**24.237.257.450,00**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.b.3	**Belanja Gedung dan Bangunan**	**16.965.018.966,71**	**28.954.072.575,16**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp24.722.171.276,50 dengan realisasi sebesar Rp16.965.018.966,71 atau 68,62%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp11.989.053.608,45 atau -41,41%.

Tabel 5.1.57
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	23.015.783.276,50	15.375.518.773,71	66,80	26.466.910.850,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	901.888.000,00	876.074.723,00	97,14	2.015.207.578,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	804.500.000,00	713.425.470,00	88,68	471.954.147,16
JUMLAH		**24.722.171.276,50**	**16.965.018.966,71**	**68,62**	**28.954.072.575,16**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.b.4	**Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**11.201.347.218,59**	**45.054.989.838,00**

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp14.138.190.500,00 dengan realisasi sebesar Rp11.201.347.218,59 atau 79,23%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp33.853.642.619,41 atau -75,14%.

Tabel 5.1.58
Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.269.000.000,00	8.702.958.903,00	77,23	40.096.496.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	2.285.430.000,00	2.262.996.593,80	99,02	4.414.328.838,00
3	Belanja Modal Instalasi	60.768.000,00	56.801.714,79	93,47	88.450.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	99.992.500,00	71.000.000,00	71,01	0,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	423.000.000,00	107.590.007,00	25,43	455.715.000,00
JUMLAH		**14.138.190.500,00**	**11.201.347.218,59**	**79,23**	**45.054.989.838,00**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.b.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	**4.617.797.530,00**	**3.810.397.200,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.634.561.060,00 dengan realisasi sebesar Rp4.617.797.530,00 atau 99,64%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp807.400.330,00 atau 21,19%.

Tabel 5.1.59

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	84.001.500,00	83.894.000,00	99,87	0,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	32.000.000,00	31.899.970,00	99,68	190.950.000,00
3	Belanja Modal Hewan	280.000.000,00	269.600.000,00	96,28	0,00
4	Belanja Modal Biota Perairan	53.400.000,00	53.400.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	3.619.447.200,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.185.159.560,00	4.179.003.560,00	99,85	0,00
JUMLAH		**4.634.561.060,00**	**4.617.797.530,00**	**99,64**	**3.810.397.200,00**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.b.6 Belanja Aset Lainnya	**251.304.000,00**	**131.000.000,00**

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp260.051.000,00 dengan realisasi sebesar Rp251.304.000,00 atau 99,85%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp120.304.000,00 atau 91,84%.

Tabel 5.1.60

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	260.051.000,00	251.304.000,00	99,85	113.170.000,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	17.830.000,00
JUMLAH		**260.051.000,00**	**251.304.000,00**	**99,85**	**131.000.000,00**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.c.	**Belanja Tak Terduga**	**196.489.050,00**	**2.485.520.287,00**

Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp1.775.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp196.489.050,00 atau sebesar 11,06%.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2025 yang dianggarkan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial. Adapun realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.1.61

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pembayaran Belanja Tidak Terdugauntuk bantuan korban kebakaran di Kabupaten Dharmasraya an. Debby Chintia Suri dkk dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 100.3.3.2/388/KPTS-BUP/2024 Tanggal 14 Nopember Tahun 2024 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.	103.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga atas banjir a.n Martin Efendi, HS.S.Hut,M.M dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 100.3.3.2/76/KPTS-BUP/2025 Tanggal 12 Maret Tahun 2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.	43.489.050,00
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Konrban Bencana Kebakaran a.n Adamri dkk dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 100.3.3.2/103/KPTS-BUP/2025 Tanggal 15 April Tahun 2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.	5.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Korban Bencana Kebakaran a.n Andoni Rizal dkk dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 100.3.3.2/206/KPTS-BUP/2025 Tanggal 1 September 2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Korban Kebakaran di Kabupaten Dharmasraya.	45.000.000,00
	JUMLAH	**196.489.050,00**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.3	**Belanja Transfer**	**114.203.431.208,00**	**115.315.142.464,00**

Belanja Transfer /Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2025 berupa Transfer Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.

Realisasi Transfer dianggarkan sebesar Rp117.178.797.140,00 dan terealisasi sebesar Rp114.203.431.208,00 atau 97,42% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.62

Realisasi Transfer Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I	**Belanja Bagi Hasil**	**5.134.311.500,00**	**2.800.869.072,00**	**54,55**	**1.984.369.824,00**
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.870.101.500,00	2.590.944.672,00	53,20	1.762.449.469,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	264.210.000,00	209.924.400,00	79,45	221.920.355,00
II	**Belanja Bantuan Keuangan**	**112.044.485.640,00**	**111.402.562.136,00**	**99,43**	**113.330.772.640,00**
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	112.044.485.640,00	111.402.562.136,00	99,43	113.330.772.640,00
	JUMLAH	**117.178.797.140,00**	**114.203.431.208,00**	**97,46**	**115.315.142.464,00**

Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintahan Desa/Nagari dianggarkan Rp4.870.101.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.590.944.672,00 atau 53,20%. Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025 berupa Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintahan Desa/Nagari dianggarkan Rp264.210.000,00 terealisasi sebesar Rp209.924.400,00 atau 79,45%.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp112.044.485.640,00 dan terealisasi sebesar Rp111.402.562.136,00 atau 99,42% yang diperuntukkan untuk 52 Nagari. Dana Desa bersumber dari dana transfer APBN sebesar Rp56.185.785.000,00 dan terealisasi 100%. Dana Bantuan Keuangan ke Desa yang bersumber dari dana APBD atau Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sebesar Rp55.858.700.640,00 dan terealisasi sebesar Rp55.216.777.136,00 atau 98,85%.

Penyaluran Dana Desa dari APBN dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dicatat di Laporan Realisasi Anggaran sebesar penyaluran ke Desa berdasarkan Laporan pada Aplikasi Simtrada dan OMSPAN Kementerian Keuangan.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.4	**Surplus/(Defisit)**	**36.424.903.271,77**	**(42.345.469.488,50)**

Jumlah Surplus/(Defisit) LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Surplus sebesar Rp36.424.903.271,77 sedangkan pada Tahun 2024 (Defisit) sebesar Rp(42.345.469.488,50).

V.A.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Rencana dan realisasi pembiayaan daerah Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.5.a.	**Penerimaan Pembiayaan**	**4.085.069.988,55**	**46.430.539.477,05**

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp4.085.069.988,55 terealisasi sebesar Rp4.085.069.988,55 atau 100%.

V.A.5.a.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 ini merupakan penerimaan SiLPA Tahun 2024. Secara rinci nilai penerimaan SiLPA Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a.	Kas di Kas Daerah			Rp	1.714.291.612,49
	- Fisik Kas di Kasda	Rp	1.803.954.033,49		
	- Pengembalian Dana BOP PAUD	Rp	(89.662.421,00)		
b.	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD			Rp	6.925.010,00
c.	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Dareh			Rp	37.538.774,51
d.	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Rumbai			Rp	34.614,73
e.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas			Rp	1.234.968.495,82
f.	Saldo Akhir Kas di Dana BOK Puskesmas			Rp	932.328.769,00
g.	Saldo Akhir Dana BOSP			Rp	36.378.712,00
h.	Dana BOP PAUD Tahun 2024 atas sekolah yang tidak beroperasional dikembalikan ke Kas Daerah :				
	1) Pengembalian sebelum tanggal 31 Desember 2024			Rp	89.662.421,00
	2) Pengembalian setelah tanggal 31 Desember 2024			Rp	32.941.579,00
	Jumlah			**Rp**	**4.085.069.988,55**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.5.b.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**1.500.000.000,00**	**0,00**

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dianggarkan Rp1.500.000.000,00 terealisasi 100% merupakan penyertaan modal pada Bank Nagari, sedangkan Tahun 2024 tidak ada Pengeluaran Pembiayaan.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.6.	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebelum Koreksi**	**39.009.973.260,32**	**4.085.069.988,55**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebelum koreksi adalah sebesar Rp39.009.973.260,32 sedangkan SILPA Tahun 2024 sebesar Rp4.085.069.988,55. Bila dibandingkan SILPA Tahun 2025 dengan Tahun 2024 terjadi kenaikan SILPA sebesar Rp34.924.903.271,77 atau 854,94 %.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.6.a	**Koreksi SILPA**	**(589.849.590,00)**	**0,00**

Terdapatnya koreksi pada SILPA 2025 sebesar Rp589.849.590,00 disebabkan karena nilai kas di Kas Daerah berkurang sebesar Rp589.849.590,00. Hal ini terjadi berkaitan dengan Kasus an. Budi Yono yang merupakan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Nomor : LAP/05/ATT/Inspektorat-2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pencairan SP2D Ganda dengan Kegiatan yang sama pada Sekretariat DPRD dan Pencairan SP2D pada Dinas Pendidikan ke Rekening Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) a.n. Budi Yono Tahun Anggaran 2025. Telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 900.1.11.4/01/SKTJM-2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh Budi Yono. Kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya, dan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg, tanggal surat 15 Desember 2025 dan Nomor Surat Pelimpahan B-3202/L.3.24/Ft.1/12/2025. Saat ini status perkara adalah permohonan banding dari pihak penuntut umum/jaksa. Sehingga pada saat laporan ini disusun masih menunggu keputusan *inkracht* sidang di Pengadilan Negeri Padang.

Secara rinci Nilai SILPA Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a.	Kas di Kas Daerah			Rp	35.693.263.773,72
	- Fisik Kas di Kasda	Rp	35.853.079.773,72		
	- Kas BLUD RSUD Sungai Rumbai setor ke Kas Daerah	Rp	(15.812.000,00)		
	- Teller Bank Nagari transfer ganda	Rp	(300.000,00)		
	- Dana BOP PAUD Tahun 2025 atas sekolah yang tidak beroperasional setor ke Kasda	Rp	(122.604.000,00)		
	- Dana BOP PAUD Tahun 2024 atas sekolah yang tidak beroperasional setor ke Kasda	Rp	(21.100.000,00)		
b.	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas			Rp	2.450.038.397,60
c.	Saldo Akhir Kas di Dana BOK Puskesmas			Rp	80.720.194,00
d.	Saldo Akhir Kas di Dana BOSP			Rp	52.396.305,00
e.	Dana BOP PAUD Tahun 2024 dan 2025 atas sekolah yang tidak beroperasional setor ke Kasda per 31 Desember 2025			Rp	143.704.000,00
f.	Dana BOP PAUD atas sekolah yang tidak beroperasional Tahun 2025 belum setor ke Kasda per 31 Desember 2025			Rp	1.000,00
	Jumlah			**Rp**	**38.420.123.670,32**

Penjelasan lebih rinci mengenai saldo Kas di Kas Daerah, Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas, Saldo Akhir Kas di Dana BOK Puskesmas, dan Saldo Akhir Dana BOS, terdapat di penjelasan Neraca Aset Lancar.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.6.b	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Koreksi**	**38.420.123.670,32**	**4.085.069.988,55**

SILPA Tahun 2025 setelah koreksi adalah sebesar Rp38.420.123.670,32 sedangkan SILPA Tahun 2024 sebesar Rp4.085.069.988,55. Bila dibandingkan SILPA Tahun 2025 dengan Tahun 2024 terjadi kenaikan SILPA sebesar Rp34.335.053.681,77 atau 854,94 %. Uraian Perhitungan SILPA Tahun 2025 sebagai berikut:

Surplus/Defisit LRA	Rp	**36.424.903.271,77**
Pembiayaan Netto	Rp	2.585.069.988,55
SILPA LRA Sebelum Koreksi	Rp	**39.009.973.260,32**
Koreksi SILPA	Rp	(589.849.590,00)
SILPA LRA Setelah Koreksi	**Rp**	**38.420.123.670,32**

V.B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp4.085.069.988,55 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran 2024.

Penggunaan SAL

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan penggunaan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.085.069.988,55 yang digunakan untuk menutup defisit Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran Tahun Anggaran 2025.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Kurang/Pembiayaan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Realisasi Pendapatan			Rp	952.036.775.854,25
2.	Realisasi Belanja			Rp	915.611.872.582,48
3.	Surplus/Defisit (1 - 2)			Rp	36.424.903.271,77
4.	Pembiayaan				
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.085.069.988,55		
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.500.000.000,00		
5.	Pembiayaan Netto (4.a - 4.b)			Rp	2.585.069.988,55
6.	SILPA (3 + 5)			Rp	39.009.973.260,32
7.	Koreksi SILPA			Rp	589.849.590,00
8.	SILPA Setelah Koreksi (6 – 7)			**Rp**	**38.420.123.670,32**

Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah Sisa Lebih Pembiayan Anggaran (SILPA) pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.420.123.670,32 merupakan kelebihan perhitungan antara realisasi pendapatan dan belanja setelah diperhitungkan dengan pembiayaan netto.

V.C. NERACA

V.C.1. ASET

Neraca Kabupaten Dharmasraya merupakan Neraca yang kedua puluh kali disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Neraca Kabupaten Dharmasraya mengambarkan posisi keuangan Kabupaten Dharmasraya mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2024.

Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 memiliki Aset sebesar Rp2.419.003.243.303,50, Kewajiban sebesar Rp30.691.796.791,88 dan Ekuitas sebesar Rp2.388.311.446.511,62.

Total Aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.419.003.243.303,50 turun sebesar Rp33.895.214.140,46 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.452.898.457.443,96 atau -1,38%. Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.	**Aset Lancar**	**111.428.814.984,10**	**112.519.782.305,82**

Aset Lancar adalah kas dan setara kas, serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar adalah aset dalam bentuk Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Setara Kas, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Piutang Lainnya, Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan. Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp111.428.814.984,10 mengalami penurunan sebesar Rp1.090.967.321,72 atau -0,97% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp112.519.782.305,82. Adapun rincian Aset Lancar pada Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

	Aset Lancar	Tahun 2025	Tahun 2024
a.	Kas di Kas Daerah	35.693.263.773,72	1.714.291.612,49
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	6.925.010,00
d.	Kas di BLUD	2.450.038.397,60	1.272.541.885,06
e.	Kas di BOS	52.396.305,00	36.378.712,00
f.	Kas Lainnya	224.425.194,00	1.054.932.769,00
g.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
h.	Piutang Pajak	27.834.175.073,00	25.474.630.116,00
i.	Penyisihan Piutang Pajak	(17.317.662.827,76)	(15.864.849.434,96)
j.	Piutang Retribusi	8.692.733.877,00	6.774.178.699,00
k.	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.984.631.072,37)	(1.305.862.079,55)

	Aset Lancar	Tahun 2025	Tahun 2024
l.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.058.604.307,00	5.529.319.459,00
m.	Penyisihan Piutang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	(27.646.597,30)
n.	Piutang Lain - lain PAD yang Sah	7.136.301.435,81	6.818.492.334,53
o.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(3.725.797.213,34)	(3.041.699.022,11)
p.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	8.594.652.000,00	15.091.731.000,00
q.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	13.784.261.132,00	21.749.014.918,00
r.	Piutang Pendapatan Lainnya	1.126.650,00	459.480,00
s.	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(5.633,25)	(2.297,40)
t.	Belanja Dibayar Dimuka	308.333.610,02	274.605.153,94
u.	Persediaan	24.626.599.975,67	46.962.340.588,12
	Jumlah	**111.428.814.984,10**	**112.519.782.305,82**

Saldo masing-masing Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.1	**Kas di Kas Daerah**	**35.693.263.773,72**	**1.714.291.612,49**

Kas di Kas Daerah merupakan rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Dharmasraya adalah Bank Nagari Cabang Pulau Punjung. Penunjukan Bank Nagari sebagai bank umum untuk menyimpan uang daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/1/KPTS-BUP/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung sebagai Kas Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan rekening nomor 1403.0101.00075-4, serta diperkuat dengan Perjanjian Kerjasama antara Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung Nomor 900/796/BKD-2021 dan Nomor PKS/03/PL/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pelayanan Perbankan dan Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Saldo di Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025 berdasarkan rekening koran Bank Nagari Cabang Pulau Punjung adalah Rp35.853.079.773,72. Terdapat saldo sebesar Rp159.816.000,00 bukan merupakan bagian kas dikasda dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengembalian Dana BLUD atas temuan BPK RI pada belanja daerah Tahun 2025 disetor ke Kasda seharusnya ke Kas BLUD sebesar Rp15.812.000,00, telah dipindahbukukan ke rekening kas BLUD RSUD Sungai Rumbai pada tanggal 28 Januari 2026.
b. Transfer ganda oleh teller Bank Nagari atas virtual account TRF CR 9913111194102010901 ke kas daerah sebesar Rp300.000,00, dan telah disetor ke rekening teller Bank Nagari pada tanggal 30 April 2026 sebesar Rp300.000,00.
c. Pengembalian Dana BOSP PAUD atas sekolah yang tidak beroperasional Tahun 2024 dan 2025 telah disetor ke Kasda sebesar Rp143.705.000,00, di reklas pencatatannya ke Kas Lainnya. Terdiri dari penyetoran pada tahun 2024 sebesar Rp89.662421,00, tahun 2025 sebesar Rp64.041.579,00 dan tahun 2026 sebesar Rp1.000,00. Telah dilaksanakan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Nomor LAP-24/Reviu/Inspektorat-2026 tanggal 10 Maret 2026 tentang Laporan Hasil Reviu Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

(BOSP) PAUD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah bersurat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 900.1.14.2/454/BKD-2026 tanggal 14 April 2026 hal Rekapitulasi Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kab. Dharmasraya sampai dengan Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Pemerintah Daerah menyampaikan surat rekapitulasi pengembalian Dana BOSP, Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana BOK Puskesmas, Dana BOK Tunjangan Khusus, atau Dana BOP MTB kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, untuk dilakukan pemotongan penyalùran dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan/atau antar jenis DAK Nonfisik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Seharusnya nilai kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36.283.113.363,72, namun telah terjadi kekurangan kas sebesar Rp589.849.590,00. Hal ini berkaitan dengan Kasus an. Budi Yono yang merupakan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Nomor: LAP/05/ATT/Inspektorat-2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pencairan SP2D Ganda dengan Kegiatan yang sama pada Sekretariat DPRD dan Pencairan SP2D pada Dinas Pendidikan ke Rekening Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) a.n. Budi Yono Tahun Anggaran 2025. Telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 900.1.11.4/01/SKTJM-2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh Budi Yono. Kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya, dan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg, tanggal surat 15 Desember 2025 dan Nomor Surat Pelimpahan B-3202/L.3.24/Ft.1/12/2025. Saat ini status perkara adalah permohonan banding dari pihak penuntut umum/jaksa. Sehingga pada saat laporan ini disusun masih menunggu keputusan *inkracht* sidang di Pengadilan Negeri Padang.

Kas di Kas Daerah merupakan bagian dari SILPA Tahun 2025 termasuk di dalamnya sisa dana transfer pusat yang peruntukannya telah ditentukan penggunaannya, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.2

Rincian Sisa Dana Transfer *Earmark* Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1.	**DAU yang Ditentukan Penggunaannya**	**7.031.582.021,00**
	Bidang Pendidikan	3.993.555.707,00
	Bidang Kesehatan	2.339.223.377,00
	Bidang PPPK	698.802.937,00
2.	**DAK Fisik**	**584.977.419,56**
	PAUD	6.070.890,00
	Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	578.879.531,00
	Fisik Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	26.998,56
3.	**DAK Nonfisik**	**2.093.486.065,00**
	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	621.946.536,00
	Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	152.174.182,00
	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	100.950,00
	BOK Dinas Kesehatan	266.561.299,00
	BOK BPOM	149.200,00
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	991.519.188,00
	BOP Pertanian	380.000,00

No	Uraian	Jumlah
	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	60.654.710,00
4.	**Insentif Fiskal**	**192.390.453,00**
5.	**DBH Sawit**	**2.574.395.140,00**
	DBH Sawit 2025	474.385.160,00
	DBH Sawit 2024	2.100.009.980,00
	Total	**12.476.831.098,56**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dan Saldo Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.3 Kas di Bendahara Penerimaan	**0,00**	**6.925.010,00**

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024 adalah kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp6.925.010,00 yang terdiri atas Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp5.525.010,00 dan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp1.400.000 yang disetor ke RKUD pada tanggal 13 Januari 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.4 Kas di Kas BLUD	**2.450.038.397,60**	**1.272.541.885,06**

Kabupaten Dharmasraya Pada Tahun 2025 memiliki 17 unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu 2 unit Badan Layanan Umum RSUD yaitu RSUD Sungai Dareh dan RSUD Sungai Rumbai, 14 unit Badan Layanan Umum UPT Puskesmas dan 1 unit Laboratorium Kesehatan Daerah.

Adapun rincian saldo yang ada direkening BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.3
Saldo Kas di BLUD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	197.775.907,51	37.538.774,51
2	BLUD RSUD Sungai Rumbai	211.068.129,73	34.614,73
3	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	152.728.980,00	84.467.918,00
4	BLUD Puskesmas Sungai Limau	66.300.098,70	51.519.744,70
5	BLUD Puskesmas Sitiung II	107.244.042,09	13.789.638,09
6	BLUD Puskesmas Padang Laweh	57.970.681,21	14.252.133,21
7	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	207.509.604,00	80.366.231,00
8	BLUD Puskesmas Silago	73.453.572,00	77.758.822,00
9	BLUD Puskesmas Gunung Medan	84.432.212,00	7.747.969,00
10	BLUD Puskesmas Sitiung I	258.536.284,62	52.334.006,62
11	BLUD Puskesmas Koto Baru	561.787.081,67	325.978.568,00
12	BLUD Puskesmas Timpeh	80.548.402,25	60.730.996,25
13	BLUD Puskesmas Sialang	56.570.183,00	34.671.586,00

No	Uraian	2025	2024
14	BLUD Puskesmas Tiumang	105.130.380,00	82.712.372,00
15	BLUD Puskesmas Koto Besar	120.434.936,24	218.333.964,37
16	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	32.683.471,58	59.648.792,58
17	BLUD Labkesda	75.864.431,00	10.655.754,00
	JUMLAH	**2.450.038.397,60**	**1.272.541.885,06**

Saldo di BLUD Tahun 2025 merupakan saldo kas dibank sebesar Rp2.450.038.397,60. Untuk fisik saldo kas di BLUD pada RSUD Sungai Rumbai, nilai sebesar Rp15.812.000,00 per 31 Desember 2025 berada di Kas Daerah, dipindahbukukan ke rekening kas BLUD RSUD Sungai Rumbai pada tanggal 28 Januari 2026. Kas di BLUD Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.177.496.512,54 atau 92,53% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.272.541.885,06.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.5	**Kas di BOS**	**52.396.305,00**	**36.378.712,00**

Kas di BOS adalah saldo Kas Dana BOS pada saat tanggal neraca merupakan sisa Belanja BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan atas sekolah-sekolah negeri pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2025, terdiri dari 147 Sekolah Dasar Negeri, 33 Sekolah Menengah Pertama Negeri, 16 Taman Kanak-Kanak Negeri, dan 1 Sanggar Kegiatan Belajar. Saldo Kas di BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp52.396.305,00 merupakan kas dibank. Nilai saldo kas di BOS Tahun 2024 sebesar Rp36.378.712,00.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.6	**Kas Lainnya**	**224.425.194,00**	**1.054.932.769,00**

Kas Lainnya adalah berupa berupe pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara/ Kas Daerah atau pihak terkait.

Kas Lainnya sebesar Rp224.425.194,00 terdiri dari:

1. Pengembalian dana DAK Nonfisik BOP PAUD yang tidak beroperasional pada Tahun 2024 dan 2025 telah disetor ke Kasda sebesar Rp143.705.000,00, terdiri dari penyetoran pada tahun 2024 sebesar Rp89.662421,00, tahun 2025 sebesar Rp64.041.579,00 dan tahun 2026 sebesar Rp1.000,00.
   Telah dilaksanakan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Nomor LAP-24/Reviu/Inspektorat-2026 tanggal 10 Maret 2026 tentang Laporan Hasil Reviu Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah bersurat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 900.1.14.2/454/BKD-2026 tanggal 14 April 2026 hal Rekapitulasi Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kab. Dharmasraya sampai dengan Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Pemerintah Daerah menyampaikan surat rekapitulasi pengembalian Dana BOSP, Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana BOK Puskesmas, Dana BOK Tunjangan Khusus, atau Dana BOP MTB kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, untuk dilakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan/atau antar jenis DAK Nonfisik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Sisa Saldo Kas di Dana BOK Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp80.720.194,00 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2.4
Saldo Kas di Dana BOK Puskesmas Tahun 2025 dan 2024

No	Puskesmas	2025	2024
1	Beringin Sakti	1.966.820,00	111.162.109,00
2	Gunung Medan	524.000,00	39.529.945,00
3	Koto Baru	231.061,00	121.278.458,00
4	Koto Besar	36.809.835,00	102.854.414,00
5	Padang Laweh	936.743,00	26.714.057,00
6	Sialang	830.599,00	33.803.252,00
7	Silago	912.039,00	28.305.853,00
8	Sitiung I	6.958.976,00	147.187.256,00
9	Sitiung II	14.573.062,00	39.739.578,00
10	Sitiung IV	518.976,00	37.051.734,00
11	Sungai Dareh	2.659.750,00	33.998.041,00
12	Sungai Limau	9.279.000,00	121.964.474,00
13	Sungai Rumbai	500.358,00	12.104.937,00
14	Timpeh	2.506.114,00	11.256.600,00
15	Tiumang	1.512.861,00	65.378.061,00
	Jumlah	**80.720.194,00**	**932.328.769,00**

	Tahun 2025 (Rp)	**Tahun 2024 (Rp)**
V.C.1.a.7 Piutang Pajak	**27.834.175.073,00**	**25.474.630.116,00**

Piutang Pajak terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Piutang Pajak Reklame, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Piutang Pajak Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024
1	PBB-P2	26.317.162.155,00	24.014.340.394,00
2	Pajak Penerangan Jalan	1.313.490.012,00	1.250.349.347,00
3	Pajak Reklame	7.091.906,00	13.509.375,00
4	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	196.431.000,00	196.431.000,00
	Jumlah	**27.834.175.073,00**	**25.474.630.116,00**

1. Piutang PBB-P2

Dasar penetapan piutang PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) adalah sisa tunggakan pokok pajak beserta denda dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak, yang tercatat resmi dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atau SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Nilai Piutang PBB-P2 pada Tahun 2025 diberikan ketetapan piutang sebesar Rp5.317,967,018,00. Pada tahun berjalan terdapat koreksi piutang PBB P2 sebesar Rp299.684.954,00, disebabkan karena adanya perubahan data Objek Pajak yang mengakibatkan perubahan data piutang tahun-tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.5
Piutang PBB-P2 Tahun 2025 dan 2024

No	Tahun Pajak	Piutang Per 31 Desember 2024	Ketetapan Tahun 2025	Koreksi Penambahan Piutang	Koreksi Pengurangan Piutang	Penerimaan Pokok Piutang PBB-P2	Saldo Piutang Per 31 Des 2025
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6-7
1	2025		5.317.967.018,00	0,00	6.696.562,00	2.925.070.760,00	2.386.199.696,00
2	2024	2.271.532.328,00	0,00	0,00	1.905.705,00	152.505.935,00	2.117.122.688,00
3	2023	2.099.666.847,00	0,00	12.111.805,00	0,00	65.495.694,00	2.046.282.958,00
4	2022	2.059.573.139,00	0,00	41.863.128,00	0,00	51.858.206,00	2.049.578.061,00
5	2021	1.981.623.505,00	0,00	34.238.210,00	0,00	38.607.994,00	1.977.253.721,00
6	2020	2.172.631.698,00	0,00	0,00	849.848,00	21.127.533,00	2.150.654.317,00
7	2019	1.994.473.506,00	0,00	125.931.109,00	0,00	15.462.910,00	2.104.941.705,00
8	2018	2.229.454.596,00	0,00	50.536.754,00	0,00	14.973.789,00	2.265.017.561,00
9	2017	1.955.210.022,00	0,00	6.519.721,00	0,00	13.893.014,00	1.947.836.729,00
10	2016	2.165.401.946,00	0,00	37.936.342,00	0,00	15.667.733,00	2.187.670.555,00
11	2015	2.297.578.736,00	0,00	0,00	0,00	141.443,00	2.297.437.293,00
12	2014	2.787.194.071,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	2.787.166.871,00
	Jumlah	**24.014.340.394,00**	**5.317.967.018,00**	**309.137.069,00**	**9.452.115,00**	**3.314.830.211,00**	**26.317.162.155,00**

2. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Piutang PPJ per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.313.490.012,00 berasal dari Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PPJ PLN) yang telah masuk ke Kas Daerah pada tanggal 19 Januari 2026 dan Piutang PPJ PLN Tahun 2024 sebesar Rp1.250.349.347,00 telah masuk ke Kas Daerah pada tanggal 22 Januari 2025.

3. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp7.091.906,00 yang berasal dari beberapa Wajib pajak yang sampai pada Laporan Keuangan ini disusun belum melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Piutang Pajak Reklame Tahun 2025

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
1	**Tahun 2025**						
1	PT. KREASI GIRI KUSALO(000000753/REK/25)		0,00	0,00	6.233.906,00	6.233.906,00	Belum bayar
2	**Tahun 2024**						
1	CV. WULAN CAHAYA RIVSKI (000000042/REK/24)	321.750,00				321.750,00	Belum bayar
2	PT. KREASI GIRI KUSALO (000000045/REK/24)	10.560.000,00	10.560.000,00	18/06/2025	0,00	0,00	
3	CV. ARIZONA CENDIKA ABADI (000000052/REK/24)	321.750,00	0,00		0,00	321.750,00	Belum bayar
4	SUTAN RIKI (000000079/REK/24)	1.287.000,00	1.287.000,00	10/07/2025	0,00	0,00	
5	HERI (000000231/REK/24)	214.500,00	214.500,00	11/02/2025	0,00	0,00	
6	HERI (000000232/REK/24)	214.500,00	0,00		0,00	214.500,00	Belum bayar
7	MANDIRI TASPEN KCP DHARMASRAYA (000000265/REK/24)	536.250,00	536.250,00	22/08/2025	0,00	0,00	

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
8	MANDIRI TASPEN KCP DHARMASRAYA (000000266/REK/24)	53.625,00	53.625,00	22/08/2025	0,00	0,00	
	Jumlah	**13.509.375,00**	**12.651.375,00**		**6.233.906,00**	**7.091.906,00**	

4. Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2025 sebesar Rp196.431,000,00 merupakan piutang dari PT Nindya Karya atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung *(multy years)* Kabupaten Dharmasraya dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp785.724,000,00 sesuai dengan tarif sebesar 25% yang disampaikan melalui SPTPD yang diterbitkan tanggal 01 Oktober 2021 yang sampai pada Laporan Keuangan ini telah dilakukan pembayaran ke RKUD pada tanggal 30 Maret 2026.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	**(17.317.662.827,76)**	**(30.635.258.580,82)**

Adanya perubahan Kebijakan Akuntansi No 30 Tahun 2024 untuk Penyisihan Piutang Pajak Daerah juga mengalami perubahan penilaian sehingga penyisihan piutang pajak daerah mengalami perbedaan penghitungan dari tahun sebelumnya.

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.317.662.827,76 terdiri dari:

	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2025	2024
a.	Penyisihan Piutang PBB-P2	17.219.201.658,23	15.760.314.641,34
b.	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	6.251.746,74
c.	Penyisihan Piutang Reklame	245.669,53	67.546,88
d.	Penyisihan Mineral Bukan Logam dan Batuan	98.215.500,00	98.215.500,00
	Jumlah	**17.317.662.827,76**	**15.864.849.434,96**

a. Penyisihan Piutang PBB-P2 sampai Tahun 2025 sebesar Rp17.219,201.658,23 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.7
Penyisihan Piutang PBB-P2 Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Piutang (Rp)	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan Piutang
1	Tahun Pajak 2025	2.386.199.696,00	< 1	Lancar	0,50	11.930.998,48
2	Tahun Pajak 2024	2.117.122.688,00	1 s.d 3	Kurang Lancar	25	529.280.672,00
3	Tahun Pajak 2023	2.046.282.958,00	1 s.d 3	Kurang Lancar	25	511.570.739,50
4	Tahun Pajak 2022	2.049.578.061,00	1 s.d 3	Kurang Lancar	25	512.394.515,25
5	Tahun Pajak 2021	1.977.253.721,00	3 s.d 5	Diragukan	50	988.626.860,50
6	Tahun Pajak 2020	2.150.654.317,00	3 s.d 5	Diragukan	50	1.075.327.158,50
7	Tahun Pajak 2019	2.104.941.705,00	> 5	Macet	100	2.104.941.705,00
8	Tahun Pajak 2018	2.265.017.561,00	> 5	Macet	100	2.265.017.561,00
9	Tahun Pajak 2017	1.947.836.729,00	> 5	Macet	100	1.947.836.729,00
10	Tahun Pajak 2016	2.187.670.555,00	> 5	Macet	100	2.187.670.555,00
11	Tahun Pajak 2015	2.297.437.293,00	> 5	Macet	100	2.297.437.293,00
12	Tahun Pajak 2014	2.787.166.871,00	> 5	Macet	100	2.787.166.871,00
	Jumlah	**26.317.162.155,00**				**17.219.201.658,23**

Merujuk data pada tabel diatas, penyisihan piutang PBB-P2 sampai keadaan 31 Desember 2025 sebesar Rp17.219,201.658,23, terdapat penyisihan piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa sebesar Rp13.590.070.714,00 yang berasal dari penyisihan piutang tahun 2014 s.d 2019 dengan kategori macet.

b. Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2025 adalah sebesar Rp245.669,53 dari perhitungan (0,5% x Rp6.233.906,00) dan sisa piutang tahun 2024 sebesar Rp214.500,00 dari perhitungan (25% x Rp858,000,00).

c. Penyisihan Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025 adalah sebesar Rp98.215.500,00 dari perhitungan (50% x Rp196.431,000,00).

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.8	**Piutang Retribusi**	**8.692.733.877,00**	**6.774.178.699,00**

Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.692.733.877,00 dan piutang tahun 2024 sebesar Rp6.774.178.699,00 terdiri dari:

No	Uraian Piutang	2025	2024
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7,067,167,266.00	5.431.394.188,00
2.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	92.774.400,00	60.953,000,00
3.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	169.624.261,00	169.624.261,00
4.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	60.842.000,00	8.618,000,00
5.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	8.180.000,00	6.380,000,00
6.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah	1.294.145.950,00	1097209250
	Jumlah	**8.692.733.877,00**	**6.774.178.699,00**

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp7.067.167.266,00 adalah berasal dari piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh sebesar Rp5.846.014.362,00, pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai, BLUD Pusksemas dan Labkesda sebesar Rp1.221.152.904,00, diuraikan pada tabel dibawah ini.

a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Sungai Dareh.

Tabel 5.2.8
Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2025

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
1	**Tahun 2025**						
	Klaim BPJTKerjaan bulan Desember 2025				39.582.832,00	39.582.832,00	02/032026
	Klaim JKN bulan Desember 2025				4.667.087.100,00	4.667.087.100,00	06/02/2026
	Klaim PT TKA an Sawir bulan Desember 2025				6.205.200,00	6.205.200,00	Belum dibayar
	Klaim Jasaraharja bulan Desember 2025				23.624.145,00	23.624.145,00	09/01/2026
	Klaim JKN Kantong Darah bulan November 2025				4.320.000,00	4.320.000,00	26/01/2026

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
	Klaim BPJTKerjaan bulan November 2025				4.236.613,00	4.236.613,00	2/03/2026
	Klaim Jasaraharja bulan November 2025				60.764.126,00	60.764.126,00	09/01/2026
	Klaim Obat Kronis Nov 2025				263.942.221,00	263 942.221,00	28/01/2026
	Klaim Pending Obat Kronis Oktober 2025				97.991.980,00	97.991.980,00	26/01/2026
	Klaim BPJTKerjaan bulan Oktober 2025				27.701.913,00	27.701.913,00	06/03/2026
	Klaim Jasaraharja bulan Oktober 2025				14.501.814,00	14.501.814,00	Belum dibayar
	Klaim Jasaraharja bulan September 2025				41.380.610,00	41.380.610,00	09/01/2026
	Klaim Pending Obat Kronis bulan sept 2025				81.687.316,00	81.687.316,00	23/01/2026
	Klaim Pending Obat Kronis bulan Agust 2025				6.951.717,00	6.951.717,00	23/01/2026
	Klaim JKN Pending bulan Agust 2025				439.887.700,00	439.887.700,00	26/01/2026
	Klaim Jasaraharja bulan Agustus 2025				23.117.460,00	23.117.460,00	09/01/2026
	Klaim BPJTKerjaan bulan Juli 2025				114.920,00	114.920,00	Belum dibayar
	Klaim JKN Susulan bulan Juli 2025				8.096.700,00	8.096.700,00	23/01/2026
	Klaim BPJTKerjaan bulan Juni 2025				12.946.181,00	12.946.181,00	28/01/2026
	Klaim Jasaraharja bulan Juni 2025				4.329.032,00	4.329.032,00	14/04/2026
	Klaim Jasaraharja bulan Mei 2025				11.116.882,00	11.116.882,00	14/04/2026
	Tahun 2024					-	
	Klaim Pending obat kronis bulan Agustus 2024	52.719.648,00	52.719.648,00	02/01/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim Pending obat kronis bulan September 2024	88.151.452,00	88.151.452,00	02/01/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim obat kronis bulan November 2024	182.261.788,00	182.261.788,00	06/01/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Maret 2024	13.415.687,00	12.965.387,00	19/09/2025	0,00	450.300,00	Belum dibayar
	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Mei 2024	13.411.275,00	13.218.575,00	07/10/2025	0,00	192.700,00	Belum dibayar
	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan September 2024	102.225,00	102.225,00	10/01/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Oktober 2024	445.900,00	445.900,00	19/09/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan November 2024	12.228.971,00	12.228.971,00	10/10/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Desember 2024	65.437.328,00	65.437.328,00	07/10/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim Pelayanan Ambulance Tk Lanjutan bulan November 2024	1.468.000,00	1.468.000,00	17/01/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim Jasaraharja bulan Desember 2024	6.151.175,00	6.151.175,00	20/01/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim JKN bulan Desember 2024	4.153.066.300,00	4.153.066.300,00	06/02/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
3	**Tahun 2019**	5.784.900,00	0,00	-	0,00	5.784.900,00	Belum dibayar
	Jumlah	**4.594.644.649,00**	**4.588.216.749,00**		**5.839.586.462,00**	**5.846.014.362,00**	

b. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Sungai Rumbai, BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda.

Tabel 5.2.9
Piutang BLUD RSUD Sungai Rumbai dan BLUD Puskesmas Tahun 2025 dan 2024

No	Nama BLUD	Piutang 2025	Piutang 2024
1	RSUD Sungai Rumbai	665.009.704,00	403.487.539,00
2	Puskesmas Sungai Rumbai	48.402.000,00	41.664.000,00
3	Puskesmas Koto Besar	27.348.200,00	0,00
4	Puskesmas Sungai Limau	48.072.000,00	27.050.000,00
5	Puskesmas Koto Baru	71.105.000,00	95.910.000,00
6	Puskesmas Tiumang	13.419.000,00	2.860.000,00
7	Puskesmas Padang Laweh	28.796.000,00	41.511.000,00
8	Puskesmas Sitiung I	45.431.000,00	91.155.000,00
9	Puskesmas Timpeh	76.403.000,00	28.020.000,00
10	Puskesmas Gunung Medan	15.179.000,00	0,00
11	Puskesmas Sitiung II	9.847.000,00	2.800.000,00
12	Puskesmas Beringin Sakti	81.123.000,00	43.182.000,00
13	Puskesmas Silago	58.568.000,00	46.725.000,00
14	Puskesmas Sungai Dareh	12.493.000,00	5.808.000,00
15	Puskesmas Sialang	13.577.000,00	6.577.000,00
16	Laboratorium Kesehatan Daerah	6.380.000,00	0,00
	Jumlah	**1.221.152.904,00**	**836.749.539,00**

2. Piutang Pemanfaatan Aset Daerah

Piutang Pemanfaaan Aset Daerah tahun 2025 sebesar Rp92.774.400,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.10
Piutang Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Piutang 2025	Piutang 2024
1	**Dinas Pendidikan**	**75.405.000,00**	**47.841,000,00**
	Rumah Dinas	75.405.000,00	47.841,000,00
2	**Dinas Perkimtan**	16.958.400,00	13.112,000,00
	Sewa Rusunawa	16.958.400,00	13.112,000,00
3	**Dinas Kesehatan**	411.000,00	0,00
	Rumah Dinas	411.000,00	0,00
	Jumlah	**92.774.400,00**	**60.953,000,00**

3. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025 sama nilainya dengan piutang tahun 2024 sebesar Rp169.624.261,00. Adanya perubahan regulasi sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa sebagian objek retribusi tidak tercantum lagi dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik menjadi kewajiban pemerintah daerah, sehingga Retribusi Menara Telekomunikasi yang sebelumnya menjadi objek retribusi tidak lagi dilakukan pemungutan retribusinya. Sampai Tahun 2025 belum ada pembayaran piutang yang dilakukan oleh beberapa perusahaan terkait. Piutang tersebut dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2.11
Daftar Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025 dan 2024

No	Nama Perusahaan	Piutang 2025	Piutang 2024
A	**Tahun 2023**		
1	Protelindo	11.275.000,00	11.275.000,00
2	PT. Era Bangun Towerindo	4.950.000,00	4.950.000,00
3	PT. Excellindo Pratama (XI)	2.750.000,00	2.750.000,00
B	**Tahun 2022**		
1	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	32.725.000,00	32.725.000,00
2	Protelindo	11.275.000,00	11.275.000,00
3	PT. Excellindo Pratama (XI)	5.500.000,00	5.500.000,00
C	**Tahun 2021**		
1	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	15.125.000,00	15.125.000,00
2	Protelindo	11.275.000,00	11.275.000,00
3	PT. Era Bangun Towerindo	2.900,00	2.900,00
7	PT. Excellindo Pratama (XI)	5.500.000,00	5.500.000,00
D	**Tahun 2020**		
1	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	15.125.000,00	15.125.000,00
2	PT. Indosat	5.500.000,00	5.500.000,00
3	Protelindo	11.275.000,00	11.275.000,00
4	Era Bangun Towerindo	4.500.000,00	4.500.000,00
5	PT. Excellindo Pratama (XI)	5.500.000,00	5.500.000,00
E	**Tahun 2017**		
1	PT. Telkomsel	5.500.000,00	5.500.000,00

No	Nama Perusahaan	Piutang 2025	Piutang 2024
2	PT. Tower Bersama	550.000,00	550.000,00
F	**Tahun 2015**		
1	PT. Tower Bersama	8.995.321,00	8.995.321,00
2	PT. Indosat	12.301.040,00	12.301.040,00
	Jumlah	**169.624.261,00**	**169.624.261,00**

4. Piutang Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Piutang Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Dinas Kumperdag tahun 2025 sebesar Rp8.180,000,00 yang terdiri dari piutang tahun 2023 sebesar Rp3.340,000,00 piutang Tahun 2024 sebesar Rp3.040,000,00 dan penambahan piutang Tahun 2025 sebesar Rp1.800,000,00.

Tabel 5.2.12
Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun 2025

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurungan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
I	**Tahun 2025**						
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya (Sentra IKM Logam)		0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	06/02/2026
II	**Tahun 2024**						
	Piutang Pasar Koto Baru	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	6.380.000,00	Belum Bayar
	Jumlah	**6.380.000,00**				**8.180.000,00**	

5. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Piutang retribusi sampah berasal dari pemungutan sampah yang belum dibayarkan selama tahun 2025 sebesar Rp60.842,000,00.

6. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2025 merupakan Piutang Air Minum UPT SPAM pada Dinas PUPR sebesar Rp 1.294.145.950,00 berasal dari piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.097.209.250,00, penambahan piutang tahun 2025 Rp261.482.800,00 serta penerimaan piutang pada tahun 2025 sebesar Rp64.546.100,00. Piutang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2.13
Piutang Air Minum UPT SPAM Tahun 2025

No	Tahun Tunggakan	Nilai Piutang per 31 Des 2024	Piutang tertagih Tahun 2025	Piutang Tahun 2025	Nilai Piutang per 31 Des 2025
1	2012	13.130.300,00	0,00	0,00	13.130.300,00
2	2013	2.667.800,00	0,00	0,00	2.667.800,00
3	2014	22.578.050,00	0,00	0,00	22.578.050,00
4	2015	10.933.900,00	0,00	0,00	10.933.900,00
5	2016	3.523.500,00	0,00	0,00	3.523.500,00

No	Tahun Tunggakan	Nilai Piutang per 31 Des 2024	Piutang tertagih Tahun 2025	Piutang Tahun 2025	Nilai Piutang per 31 Des 2025
6	2017	32.487.600,00	0,00	0,00	32.487.600,00
7	2018	35.428.500,00	0,00	0,00	35.428.500,00
8	2019	78.859.900,00	0,00	0,00	78.859.900,00
9	2020	109.537.400,00	0,00	0,00	109.537.400,00
10	2021	124.926.600,00	0,00	0,00	124.926.600,00
11	2022	155.444.500,00	0,00	0,00	155.444.500,00
12	2023	240.546.900,00	2.213.900,00	0,00	238.333.000,00
13	2024	267.144.300,00	18.725.600,00	0,00	248.418.700,00
14	Jan - Agus 2025	0,00	43.606.600,00	179.459.800,00	135.853.200,00
15	Sept - Nov 2025	0,00	0,00	67.901.200,00	67.901.200,00
16	Desember 2025	0,00	0,00	14.121.800,00	14.121.800,00
	Jumlah	**1.097.209.250,00**	**64.546.100,00**	**261.482.800,00**	**1.294.145.950,00**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyisihan Piutang Retribusi	**(1.984.631.072,37)**	**(1.305.862.079,55)**

Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.14
Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2025

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1. Jasa Layanan BLUD RSUD Sungai Dareh				
Klaim BPJTKerjaan bulan Desember 2025	39.582.832,00	Lancar	0,50%	197.914,16
Klaim JKN bulan Desember 2025	4.667.087.100,00	Lancar	0,50%	23.335.435,50
Klaim PT TKA an Sawir bulan Desember 2025	6.205.200,00	Lancar	0,50%	31.026,00
Klaim Jasaraharja bulan Desember 2025	23.624.145,00	Lancar	0,50%	118.120 73
Klaim JKN Kantong Darah bulan Novernber 2025	4.320.000,00	Kurang Lancar	25%	1.080.000,00
Klaim BPJTKerjaan bulan November 2025	4.236.613,00	Kurang Lancar	25%	1.059.153,25
Klaim Jasaraharja bulan November 2025	60.764.126,00	Kurang Lancar	25%	15.191.031,50
Klaim Obat Kronis Nov 2025	263.942.221,00	Kurang Lancar	25%	65.985.555,25
Klaim Pending Obat Kronis Oktober 2025	97.991.980,00	Kurang Lancar	25%	24.497.995,00
Klaim BPJTKerjaan bulan Oktober 2025	27.701.913,00	Kurang Lancar	25%	6.925.478,25
Klaim Jasaraharja bulan Oktober 2025	14.501.814,00	Kurang Lancar	25%	3.625.453,50
Klaim Jasaraharja bulan September 2025	41.380.610,00	Kurang Lancar	25%	10.345.152 50
Klaim Pending Obat Kronis bulan sept 2025	81.687.316,00	Kurang Lancar	25%	20.421.829,00
Klaim Pending Obat Kronis bulan Agust 2025	6.951.717,00	Diragukan	50%	3.475.858,50
Klaim JKN Pending bulan Agust 2025	439.887.700,00	Diragukan	50%	219.943.850,00
Klaim Jasaraharja bulan Agustus 2025	23.117.460,00	Diragukan	50%	11.558.730,00
Klaim BPJTKerjaan bulan Juli 2025	114.920,00	Diragukan	50%	57.460,00
Klaim JKN Susulan bulan Juli 2025	8.096.700,00	Diragukan	50%	4.048.350,00
Klaim BPJTKerjaan bulan Juni 2025	12.946.101,00	Diragukan	50%	6.473.090,50

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Klaim Jasaraharja bulan Juni 2025	4.329.032,00	Diragukan	50%	2.164.516,00
Klaim Jasaraharja bulan Mei 2025	11.116.882,00	Diragukan	50%	5.558.441,00
Piutang Klaim suku anak dalam bulan Des 2019	5.784.900,00	Macet	100%	5.784.900,00
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Maret 2024	450.300,00	Macet	100%	450.300,00
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Mei 2024	192.700,00	Macet	100%	192.700,00
Jumlah	**5.846.014.362,00**			**432.522.340,64**
2. Jasa Layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda				
Tahun 2018	2.125.000,00	macet	100,00%	2.125.000,00
Tahun 2019	1.500.000,00	macet	100,00%	1.500.000,00
Januari - Agustus 2025	0,00	diragukan	50,00%	0,00
September - November 2025	340.579.200,00	kurang lancar	25,00%	85.144.800,00
Desember 2025	211.939.000,00	lancar	0,50%	1.059.695,00
Jumlah	**556.143.200,00**			**89.829.495,00**
3. Jasa Layanan BLUD RSUD Sungai Rumbai				
Januari - Agustus 2025	2.367.324,00	diragukan	50,00%	1.183.662,00
September - November 2025	161.739.583,00	kurang lancar	25,00%	40.434.895,75
Desember 2025	500.902.797,00	lancar	0,50%	2.504.513,99
Jumlah	**665.009.704,00**			**44.123.071,74**
4. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Piutang 2015	21.296.361,00	Macet	100%	21.296.361,00
Piutang 2017	6.050.000,00	Macet	100%	6.050.000,00
Piutang 2020	41.900.000,00	Macet	100%	41.900.000,00
Piutang 2021	37.402.900,00	Macet	100%	37.402.900,00
Piutang 2022	44.000.000,00	Macet	100%	44.000.000,00
Piutang 2023	18.975.000,00	Macet	100%	18.975.000,00
Jumlah	**169.624.261,00**			**169.624.261,00**
5. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				
Dinas Pendidikan				
Tahun 2017	7.927.000,00	Macet	100%	7.927.000,00
Tahun 2018	26.131.000,00	Macet	100%	26.131.000,00
Tahun 2019	13.783.000,00	Macet	100%	13.783.000,00
Januari - Agustus 2025	13.725.000,00	Diragukan	50%	6.862.500,00
September - November 2025	8.937.000,00	Kurang Lancar	25%	2.234.250,00
Desember 2025	4.902.000,00	Lancar	0,50%	24.510,00
Jumlah	**75.405.000,00**			**56.962.260,00**
Dinas Perumahan dan Permukiman				
Tahun 2023	708.400,00	macet	100%	708.400,00
Tahun 2024	5.000.000,00	macet	100%	5.000.000,00
Januari - Agustus 2025	3.300.000,00	Diragukan	50%	1.650.000,00
September - November 2025	4.700.000,00	Kurang Lancar	25%	1.175.000,00
Desember 2025	3.250.000,00	Lancar	0,50%	16.250,00
Jumlah	**16.958.400,00**			**8.549.650,00**

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Dinas Kesehatan				
Desember 2025	411.000,00	Lancar	0,50%	2.055,00
Jumlah	**411.000,00**			**2.055,00**
6. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
Tahun 2022	900.000,00	macet	100%	900.000,00
Tahun 2023	1.600.000,00	macet	100%	1.600.000,00
Januari - Agustus 2025	19.210.000,00	Diragukan	50%	9.605.000,00
September - November 2025	11.396.000,00	Kurang Lancar	25%	2.849.000,00
Desember 2025	27.736.000,00	Lancar	0,50%	138.680,00
Jumlah	**60.842.000,00**			**15.092.680,00**
7. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya				
Tahun 2023	3.340.000,00	macet	100%	3.340.000,00
Tahun 2024	3.040.000,00	macet	100%	3.040.000,00
September - November 2025	1.200.000,00	Kurang Lancar	25%	300.000,00
Desember 2025	600.000,00	Lancar	0,50%	3.000,00
Jumlah	**8.180.000,00**			**6.683.000,00**
8. Piutang Air Minum UPT SPAM - Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah				
Tahun 2012	13.130.300,00	macet	100%	13.130.300,00
Tahun 2013	2.667.800,00	macet	100%	2.667.800,00
Tahun 2014	22.578.050,00	macet	100%	22.578.050,00
Tahun 2015	10.933.900,00	macet	100%	10.933.900,00
Tahun 2016	3.523.500,00	macet	100%	3.523.500,00
Tahun 2017	32.487.600,00	macet	100%	32.487.600,00
Tahun 2018	35.428.500,00	macet	100%	35.428.500,00
Tahun 2019	78.859.900,00	macet	100%	78.859.900,00
Tahun 2020	109.537.400,00	macet	100%	109.537.400,00
Tahun 2021	124.926.600,00	macet	100%	124.926.600,00
Tahun 2022	155.444.500,00	macet	100%	155.444.500,00
Tahun 2023	238.333.000,00	macet	100%	238.333.000,00
Tahun 2024	248.418.700,00	macet	100%	248.418.700,00
Januari - Agustus 2025	135.853.200,00	diragukan	50%	67.926.600,00
September - November 2025	67.901.200,00	kurang lancar	25%	16.975.300,00
Desember 2025	14.121.800,00	lancar	0,50%	70.609,00
Jumlah	**1.294.145.950,00**			**1.161.242.259,00**
Total	**8.692.733.877,00**			**1.984.631.072,37**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.9	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**5.058.604.307,00**	**5.529.319.459,00**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah piutang dividen yang akan diterima dari penempatan modal pada Bank Nagari, PT. Balairung Citrajaya dan PT.BPR Pulau Punjung.

Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp5.058.604.307 yang terdiri dari piutang dividen PT. BPR Pulau Punjung Tahun 2025 sebesar Rp16.636.220,00 yang diterima pada RKUD tanggal 24 Februari 2026 dan dividen Bank Nagari Tahun 2025 sebesar Rp5.041.968.087,00 diterima di RKUD tanggal 12 Maret 2026. Sedangkan dividen PT. Balairung Citrajaya tidak ada penerimaannya pada tahun 2025 dan 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.11 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	**7.136.301.435,81**	**6.818.492.334,53**

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.136.301.435,81 yang terdiri dari:

Tabel 5.2.15
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	554.897.679,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	6.576.447.465,81	6.257.847.164,53
3	Piutang Pengembalian Belanja	4.129.991,00	5.129.991,00
4	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain	130.800,00	146.000,00
5	Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	695.500,00	471.500,00
	Jumlah	**7.136.301.435,81**	**6.818.492.334,53**

a. Piutang Dana Bergulir

Dana Bergulir pada Kabupaten Dharmasraya merupakan Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperindag Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2010 dengan Berita Acara Serah Terima Asset Tahap Kedua dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor 900/898/B.A/2010 tanggal 27 Desember 2010 berupa Kredit Penguatan Modal/Dana Bergulir UMKM (Pokok + Bunga + Denda) sebesar Rp834.993.485,00. Berdasarkan BAST tersebut, penyerahan kredit penguatan modal ke masyarakat direalisasikan pada Tahun 2002 dan 2004 oleh Dinas Koperindag Kabupaten Sijunjung.

Tidak dilakukannya penagihan atas Piutang Dana Bergulir disebabkan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan serta tidak adanya piutang yang dapat ditagih dari debitur. Hal lain tidak bisanya dilakukan penagihan disebabkan alamat yang tidak ditemukan, pindah alamat, meninggal dunia, dan tidak mampu. Hingga saat ini nilai Piutang Dana Bergulir Tahun 2025 adalah sebesar Rp554.897.679,00 tidak ada perubahan nilai piutang dari Tahun 2019.

b. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

Piutang TGR tahun 2025 tercatat sebesar Rp6.576.447.465,81 dapat dijelaskan pada perhitungan sebagai berikut.

Piutang TGR Tahun 2024	Rp	6.257.847.164,53
Penambahan Piutang 2025	Rp	1.070.090.816,66

Pengurangan Piutang tahun-tahun sebelumnya	Rp	(10.251.770,99)
Koreksi piutang tahun 2024	Rp	(6.095.000,00)
Penyetoran Tahun 2025	Rp	(735.143.744,39)
Nilai Piutang Per 31 Desember 2024	Rp	6.576.447.465,81

Untuk koreksi sebesar Rp 6.095,000,00 merupakan temuan Inspektorat Tahun 2022 dengan nilai temuan sebesar Rp18.567.900,00 yang sebelumnya diakui sebagai piutang namun saat diindentifikasi per temuan hanya sebesar Rp12.472.900,00 sehingga terdapat koreksi pengurangan nilai piutang pada tahun sebelumnya sebesar Rp6.095,000,00.

c. Piutang Pengembalian Belanja

Piutang pengembalian Belanja Tahun 2025 sebesar Rp4.129.991,00 merupakan Piutang yang timbul sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 09.I/LHP/XVIII.PDG/03/2020 atas Pertanggunjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, terdapat kelebihan pembayaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik periode Agustus 2019 pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp5.129.991,00,. Piutang ini telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 07 Oktober 2025 sebesar Rp1.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa Piutang Pengembalian Belanja sebesar Rp4.129.991,00 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.16
Piutang Pengembalian Belanja Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
	Tahun 2025						
1	Piutang Pengembalian Belanja Parpol (PPP)	5.129.991,00	1.000.000,00	07 Oktober 2025	0,00	4.129.991,00	Belum dibayar
	Jumlah	**5.129.991,00**	**1.000.000,00**		0,00	**4.129.991,00**	

d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Piutang penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain tahun 2025 sebesar Rp130.800,00 yang berasal dari pendapatan sewa air pada Rumah Susun Sewa (Rusunawa) pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

e. Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah- penyewaan tanah dan bangunan Rusunawa Tahun 2025 sebesar Rp695.500,00 pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.17
Piutang Denda Rusunawa Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian Piutang	Piutang 2024	Penerimaan 2025	Piutang 2025	Piutang per 31 Des 2025
1	Tahun 2023	160.000,00	90.000,00	0,00	70.000,00

No	Uraian Piutang	Piutang 2024	Penerimaan 2025	Piutang 2025	Piutang per 31 Des 2025
2	Tahun 2024	311.500,00	86.000,00	0,00	225.500,00
3	Januari - Agustus 2025	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00
4	September - November 2025	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
5	Desember 2025	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	Jumlah	**471.500,00**	**176.000,00**	**400.000,00**	**695.500,00**

Piutang denda tersebut merupakan piutang atas keterlambatan iuran sewa kamar Rusunawa sesuai dengan dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	**(3.725.797.213,34)**	**(3.041.699.022,11)**

Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp3.725.797.213,34, per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.2.18
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
a.	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	554.897.679,00
b.	Penyisihan Piutang TGR	3.166.266.168,84	2.481.399.759,11
c.	Penyisihan Piutang Pengembalian Belanja	4.129.991,00	5.129.991,00
d.	Penyisihan piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	52.962,00	13.288,00
e.	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	450.412,50	258.305,00
Jumlah		**3.725.797.213,34**	**3.041.699.022,11**

a) Penyisihan Piutang Dana Bergulir

Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2025 masih sama dengan penyisihan tahun sebelumnya sebesar Rp554.897.679,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.19
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2025

No	Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	(%) Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang
1	Kec. Pulau Punjung	122.349.281,00	Macet	100%	122.349.281,00
2	Kec. Sitiung	42.186,005,00	Macet	100%	42.186,005,00
3	Kec. Koto Baru	339.304.897,00	Macet	100%	339.304.897,00
4	Kec. Sungai Rumbai	51.057.496,00	Macet	100%	51.057.496,00
	Jumlah	**554.897.679,00**			**554.897.679,00**

b) Penyisihan Piutang TGR tahun 2025 sebesar Rp 3.166.266.168,84 diperoleh dari perhitungan:

Tabel 5.2.20
Penyisihan Piutang TGR Tahun 2025

No	Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	2024 keatas /Tagihan kedua belum lunas	6.088.617.209,54	diragukan	50%	3.044.308.604,77

No	Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
2	Piutang TGR 2025 SKP2KS telah jatuh tempo (lebih dari 90 hari)	487.830.256,27	kurang lancar	20%	121.957.564,07
	Jumlah	**6.576.447.465,81**			**3.166.266.168,84**

c) Penyisihan Piutang Pengembalian Belanja tahun 2025 sebesar Rp4.129.991,00 dari perhitungan (100%xRp4.129.991,00).

d) Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp52.962,00 diperoleh dari perhitungan:

Tabel 5.2.21

Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2025

No	Bulan	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% penyisihan	Penyisihan Piutang
I	**Tahun 2024**	**31.200,00**	**Macet**	**100%**	**31.200,00**
II	**Tahun 2025**	**99.600,00**			**21.762,00**
1	Januari	3.600,00	diragukan	50%	1.800,00
2	Februari	2.400,00	diragukan	50%	1.200,00
3	Maret	2.400,00	diragukan	50%	1.200,00
4	April	3.600,00	diragukan	50%	1.800,00
5	Mei	1.200,00	diragukan	50%	600,00
6	Juni	1.200,00	diragukan	50%	600,00
7	Juli	2.400,00	diragukan	50%	1.200,00
8	Agustus	2.400,00	diragukan	50%	1.200,00
9	September	2.400,00	Kurang Lancar	25%	600,00
10	Oktober	7.200,00	Kurang Lancar	25%	1.800,00
11	November	38.400,00	Kurang Lancar	25%	9.600,00
12	Desember	32.400,00	Lancar	0,50%	162,00
	Jumlah	**130.800,00**			**52.962,00**

e) Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp450.412,50 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.22

Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2025

No	Bulan	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% penyisihan	Penyisihan Piutang
I	**Tahun 2023**	**70.000,00**	Macet	100%	**70.000,00**
II	**Tahun 2024**	**225.500,00**	Macet	100%	**225.500,00**
III	**Tahun 2025**	**400.000,00**			**154.912,50**
a	Januari	33.000,00	diragukan	50%	16.500,00
b	Februari	30.000,00	diragukan	50%	15.000,00
c	Maret	27.000,00	diragukan	50%	13.500,00
d	April	54.000,00	diragukan	50%	27.000,00
e	Mei	21.000,00	diragukan	50%	10.500,00
f	Juni	32.000,00	diragukan	50%	16.000,00
g	Juli	30.000,00	diragukan	50%	15.000,00
h	Agustus	24.500,00	diragukan	50%	12.250,00
i	September	23.000,00	Kurang Lancar	25%	5.750,00
j	Oktober	42.000,00	Kurang Lancar	25%	10.500,00

No	Bulan	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% penyisihan	Penyisihan Piutang
k	November	51.000,00	Kurang Lancar	25%	12.750,00
	Desember	32.500,00	Lancar	0,50%	162,50
	Jumlah	**695.500,00**			**450.412,50**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024(Rp)
V.C.1.a.11	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**8.594.652,000,00**	**15.091.731,000,00**

Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar Rp8.594.652,000,00 bersumber dari Dana Transfer Pemerintah pusat atas ketetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2025. Nilai Piutang tersebut merupakan Sisa Kurang Bayar atas Piutang tahun 2024 sebesar Rp15.091.731,000,00 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 yang telah disalurkan pada Tahun 2025 sebesar Rp6.497.079.000,00 sehingga terdapat sisa kurang bayar sebesar piutang tersebut.

Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.23

Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025

No	Uraian	Kurang Bayar 2024	Penyaluran 2025	Sisa Kurang Bayar s.d 2025
1	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	3.223.000,00	1.388.000,00	1.835.000,00
2	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	1.920.212.000,00	826.662.000,00	1.093.550.000,00
3	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	1.325.304.000,00	570.551.000,00	754.753.000,00
4	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	11.826.791.000,00	5.091.503.000,00	6.735.288.000,00
5	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	11.598.000,00	4.993.000,00	6.605.000,00
6	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.603.000,00	1.982.000,00	2.621.000,00
	Jumlah	**15.091.731.000,00**	**6.497.079.000,00**	**8.594.652.000,00**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.12	**Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**13.784.261.132,00**	**21.749.014.918,00**

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah berupa Dana Bagi Hasil Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/023/PPD-Bapenda/2026 tentang Penetapan Alokasi Defenitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 13 Mei 2026. Berdasarkan Keputusan tersebut nilai piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp13.784.261.132,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.24
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No	Jenis Bagi Hasil	Definitif 2025	Penerimaan Tahun 2025		Penerimaan LRA 2025	Piutang DBH 2025
			Salur 2025	Piutang 2024		
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-4
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	94.967.465,00	94.967.465,00	3.801.253.820,00	3.896.221.285,00	0,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	96.391.661,00	96.391.661,00	1.528.623.806,00	1.625.015.467,00	0,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	21.834.140.638,00	8.063.614.483,00	16.321.017.625,00	24.384.632.108,00	13.770.526.155,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	176.209.683,00	162.474.706,00	98.119.667,00	260.594.373,00	13.734.977,00
5	Pajak Rokok	15.049.534.269,00	15.049.534.269,00	0,00	15.049.534.269,00	0,00
	Jumlah	**37.251.243.716,00**	**23.466.982.584,00**	**21.749.014.918,00**	**45.215.997.502,00**	**13.784.261.132,00**

Penerimaan Dana Bagi hasil Provinsi yang telah diterima di Kas Daerah selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp45.215.997.502,00 berasal dari salur tahun 2025 sebesar Rp23.466.982.584,00 dan penerimaan kurang salur atau Piutang Tahun 2024 sebesar Rp21.749.014.918,00.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.13	**Piutang Pendapatan Lainnya**	**1.126.650,00**	**459.480,00**

Piutang Pendapatan Lainnya merupakan piutang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP bulan Desember 2025 sebesar Rp1.126.650,00 dan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp459.480,00 diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.25
Piutang Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2025 dan 2024

No	Nama BLUD	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Puskesmas Sungai Rumbai	48.923,00	62.577,00
2	Puskesmas Koto Besar	103.907,00	44.012,00
3	Puskesmas Sungai Limau	6.912,00	13.802,00
4	Puskesmas Koto Baru	95.415,00	65.741,00
5	Puskesmas Tiumang	19.251,00	21.333,00
6	Puskesmas Padang Laweh	36.548,00	72.450,00
7	Puskesmas Sitiung I	130.020,00	35.545,00
8	Puskesmas Timpeh	79.121,00	18.942,00
9	Puskesmas Gunung Medan	44.744,00	29.671,00
10	Puskesmas Sitiung II	68.079,00	39.138,00
11	Puskesmas Beringin Sakti	46.706,00	21.597,00
12	Puskesmas Silago	77.800,00	15.220,00
13	Puskesmas Sungai Dareh	281.766,00	5.704,00
14	Puskesmas Sialang	87.458,00	13.748,00
	Jumlah	**1.126.650,00**	**459.480,00**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyisihan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**5.633,25**	**2.297,40**

Nilai Penyisihan Piutang Lain-lain pendapatan Daerah yang sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.126.650,00 dari perhitungan (1.126.650,00 x 0,50%=5.633,25).

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.14	**Piutang Lainnya**	**0,00**	**0,00**

Nilai Piutang Lainnya Tahun 2025 dan 2024 adalah Rp0,00.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.15	**Belanja Dibayar Dimuka**	**308.333.610,01**	**274.605.153,94**

Belanja Dibayar Dimuka pada Tahun 2025 sebesar Rp308.333.610,01 terdiri dari

1. Pembayaran premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah sebesar Rp156.873.977,64, dan
2. Pembayaran premi asuransi kendaraan dinas Sekretariat DPRD sebesar Rp151.459.632,37.

Adapun Belanja Dibayar Dimuka untuk pembayaran premi asuransi kendaraan dinas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.26
Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2025

No	SKPD	Asuransi Dibayar Dimuka 2025			Beban Asuransi
		total kontrak	TMT Kontrak	Asuransi dibyr dimuka	
I	**Sekretariat Daerah**				
1		6.236.550,00	31/01/2025 s.d. 31/01/2026	529.679,59	5.706.870,41
2		24.419.333,00	22/04/2025 s.d. 22/04/2026	7.493.055,61	16.926.277,39
3		30.069.000,00	15/02/2025 s.d. 15/02/2026	3.789.517,81	26.279.482,19
4		11.251.500,00	05/05/2025 s.d. 05/05/2026	3.853.253,42	7.398.246,58
5		8.969.000,00	19/06/2025 s.d. 19/06/2026	4.177.342,47	4.791.657,53
6		18.718.750,00	01/08/2025 s.d. 01/08/2026	10.923.544,52	7.795.205,48
7		10.940.680,00	26/08/2025 s.d. 26/08/2026	7.133.922,85	3.806.757,15
8		123.367.575,00	07/12/2025 s.d. 07/12/2026	118.973.661,37	4.393.913,63
	Jumlah	**233.972.388,00**		**156.873.977,64**	**77.098.410,36**
II	**Sekretariat DPRD**				
1		24.563.000,00	04/09/2025 sd 04/09/2026	16.554.789,04	8.008.210,96
2		48.591.627,00	08/04/2025 s.d 08/04/2026	12.913.391,28	35.678.235,72
		146.470.000,00	01/11/2025 s.d 01/11/2026	121.991.452,05	24.478.547,95
	Jumlah	**219.624.627,00**		**151.459.632,37**	**68.164.994,63**
	Total I + II	**453.597.015,00**		**308.333.610,01**	**145.263.404,99**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.16	**Persediaan**	**24.626.599.975,67**	**46.962.340.588,12**

Akun persediaan digunakan untuk mencatat barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan/atau dijual /diserahkan/digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.2.27
Persediaan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Persediaan Bahan habis pakai		**24.599.024.975,67**	**46.962.340.588,12**
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.790.083.532,50	4.855.089.172,50
2	Bahan-Bahan Kimia	128.788.061,87	256.328.045,73
3	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.200.000,00	5.561.684,21
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.050.000,00	1.050.000,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	36.080.000,00
6	Bahan-Isi Tabung Gas	14.715.000,00	13.422.200,00
7	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	46.150.000,00	134.675.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	155.286.781,54	1.059.063.680,64
9	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	4.255.953.671,67	3.460.175.098,58
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	560.000,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	8.045.000,00	0,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	161.993.262,50	65.460.357,00
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	35.494.600,00	13.983.900,00
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	94.515.521,00	102.366.351,00
15	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.640.000,00	7.500.000,00
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	93.183.054,00	89.809.000,00
17	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	49.417.500,00	11.046.500,00
18	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.619.500,00	5.125.000,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	196.000,00	0,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	22.900.500,00	1.305.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.894.556,00	19.585.694,00
22	Obat-Obatan-Obat	4.739.608.179,29	7.262.880.883,11
23	Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.205.650.982,38	1.946.756.661,50
24	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.005.721.940,00	9.894.383.230,93
25	Barang untuk Dijual/Diserahkan lainnya	3.266.731.582,92	17.678.634.503,92
26	Natura dan Pakan-Natura	318.198.000,00	5.557.875,00
27	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	72.552.000,00	0,00
28	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.242.000,00	0,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.439.000,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
30	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	52.604.750,00	3.440.750,00
31	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.150.000,00	0,00
32	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	32.500.000,00
Persediaan lainnya		**27.575.000,00**	0,00
1	Belanja Komponen-komponen Peralatan	27.575.000,00	0,00
Jumlah		**24.626.599.975,67**	**46.962.340.588,12**

Adapun rincian persediaan per SKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.2.28
Persediaan per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai
1	Dinas Pendidikan	390.180.000,00
	Dinas Pendidikan BOS	416.360.011,00
2	Dinas Kesehatan	5.680.823.647,16
	BLUD Puskesmas	4.208.849.585,31
	BLUD RSUD Sungai Dareh	2.144.685.860,70
3	Dinas PUPR	7.370.573.167,50
4	Dinas Perkimtan	2.474.520.300,00
5	Dinas Satpol PP & Damkar	420.000,00
6	BPBD	120.000,00
7	DINSOSP3APPKB	840.937.565,00
8	Dinas Pangan dan Perikanan	422.740.510,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	427.280.775,00
10	Disdukcapil	98.277.054,00
11	Dinas PMD	0,00
12	Dinas Perhubungan	23.636.600,00
13	Dinas Kominfo	0,00
14	Diskumperdag	459.000,00
15	Dinas DPMPTSP	0,00
16	Dinas BUDPARPORA	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	225.000,00
18	Dinas Pertanian	103.355.100,00
19	Dinas Transnaker	970.000,00
20	Sekretariat Daerah	13.190.800,00
21	Sekretariat DPRD	2.569.000,00
22	Bapperida	190.000,00
23	BKD	3.392.000,00
24	BKPSDM	264.000,00
25	Inspektorat	148.000,00
26	Kecamatan Pulau Punjung	126.000,00
27	Kecamatan Sitiung	0,00
28	Kecamatan Koto Baru	180.000,00

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai
29	Kecamatan Sungai Rumbai	20.000,00
30	Kecamatan Sembilan Koto	75.000,00
31	Kecamatan Timpeh	115.000,00
32	Kecamatan Koto Salak	284.000,00
33	Kecamatan Asam Jujuhan	160.000,00
34	Kecamatan Koto Besar	115.000,00
35	Kecamatan Padang Laweh	0,00
36	Kecamatan Tiumang	0,00
37	Badan Kesbangpol	1.357.000,00
	Jumlah	**24.626.599.975,67**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.b.1.	**Investasi Jangka Panjang**	**30.452,000,000,00**	**28.952,000,000,00**

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.452,000,000,00 merupakan Investasi Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Sumatera Barat (Bank Nagari), PT Balairung Citrajaya Sumbar, dan BPR Pulau Punjung. Adapun perkembangan penyertaan modal pada ketiga *investee* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	**27.352,000,000,00**
Penambahan selama Tahun 2025	Rp	1.500.000.000,00
Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	**28.852,000,000,00**

Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari tersebut terdiri dari.

a) Tahun 2007 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A,000013 dengan nilai nominal Rp1,000,000,000,00;
b) Tahun 2009 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A,000033 dengan nilai nominal Rp322,000,000,00;
c) Tahun 2010 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A,000052 dengan nilai nominal Rp9.678,000,000,00;
d) Tahun 2012 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A,000088 dengan nilai nominal Rp3.200,000,000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A,000102 dengan nilai nominal Rp36,000,000,00;
e) Tahun 2013 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A,000118 dengan nilai nominal Rp5.369,000,000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A,000131 dengan nilai nominal Rp31,000,000,00.
f) Tahun 2017 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.1427724-1431444 dengan nilai nominal Rp3.716,000,000,00.
g) Tahun 2019 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A,000232 dengan nilai nominal Rp2.500,000,000,00
h) Tahun 2023 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A,000276 dengan nilai nominal Rp1.500,000,000,00
i) Tahun 2025 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000297dengan nilai nominal Rp1.500,000,000,00

Sampai dengan 31 Desember 2025 Investasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Bank Nagari sebesar Rp28.852,000,000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 1,51%, sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

2) Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Balairung Citrajaya Sumbar

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	**1.500,000,000,00**
Penambahan selama Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	**1.500,000,000,00**

Investasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada PT Balairung Citra Jaya Sumatera Barat di Jakarta senilai Rp1.500,000,000,00 dengan jumlah modal disetor keseluruhan sebesar Rp164.025.990,000,00 sehingga kepemilikan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,91%. Pada tahun 2008 bersama-sama Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menanamkan investasi pada pembangunan Balairung Sumatera Barat. Investasi ini didasarkan pada adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Nomor 030-424.1-2007.

PT Balairung Citrajaya Sumbar merupakan BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bergerak pada bidang usaha Hotel, Restoran, dan fasilitas pendukung lainnya. Penyertaan modal pada PT Balairung Citrajaya Sumbar sesuai dengan Surat Saham Gabungan Nomor 012 dengan nilai nominal Rp1.500,000,000,00.

Jumlah lembar saham sebanyak 600.900 lembar terdiri dari :

a. Saham seri A sebanyak : 900 lembar/ no.seri 55.296 s.d. 56.195
b. Saham seri B sebanyak 600,000 lembar/ no.seri 36.864.299 s.d. 37.464.298

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum memperoleh bagi hasil dari penyertaan modal pada Balairung, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggunakan metode biaya karena kepemilikan hanya sebesar 0,91% dari ekuitas Balairung sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

3) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	**100,000,000,00**
Penambahan selama Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	**100,000,000,00**

Penyertaan Modal Pemerintah pada BPR Pulau Punjung pada Tahun 2012 sesuai dengan Surat Saham Biasa Nomor Seri B 0542 dengan nilai nominal Rp100,000,000,00.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperoleh bagi hasil dari penyertaan modal pada BPR Pulau Punjung. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggunakan metode biaya karena kepemilikan hanya sebesar 1,92% dari ekuitas PT BPR Pulau Punjung sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.	**ASET TETAP**	**3.984.682.901.291,62**	**3.793.524.035.435,62**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Akun aset tetap menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran per satuan peralatan mesin adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pengeluaran gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dalam penatausahaan aset tetap, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menerapkan kodefikasi barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebelum dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.984.682.901.291,62 dan Rp3.793.524.035.435,62 dengan rincian pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.29
Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
1	2	3	4	5=2+3-4
Tanah	643.176.924.008,00	5.501.300.000,00	7.900.000,00	648.670.324.008,00
Peralatan dan Mesin	457.431.418.474,76	17.744.917.198,65	19.244.933.091,00	455.931.402.582,41
Gedung dan Bangunan	1.129.495.528.240,53	55.261.680.956,71	15.544.827.260,95	1.169.212.381.936,29
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.511.485.488.792,33	140.282.249.191,59	465.062.404,00	1.651.302.675.579,92
Aset Tetap Lainya	48.963.924.243,00	4.633.867.530,00	57.766.770,00	53.540.025.003,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	2.970.751.677,00	3.215.805.593,00	160.465.088,00	6.026.092.182,00
Jumlah	**3.793.524.035.435,62**	**226.639.820.469,95**	**35.480.954.613,95**	**3.984.682.901.291,62**

Terdapat komponen yang menambah nilai Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp226.639.820.469,95, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 5.2.30
Komponen Penambahan Nilai Aset Tetap

Uraian	Belanja Modal	Penyerahan / Pengalihan Status Penggunaan	Penambahan Aset Dari Hutang Tahun 2024	Hibah	Kapitalisasi Aset	Reklasifikasi Aset	Kurang Catat	Jumlah Penambahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+3+4+5+6+7+8
Tanah	0,00	0,00	0,00	5.359.000.000,00	0,00	0,00	142.300.000,00	5.501.300.000,00
Peralatan dan Mesin	12.620.746.293,00	2.095.380.827,00	0,00	1.268.278.900,00	2.309.000,00	1.495.732.178,65	262.470.000,00	17.744.917.198,65
Gedung dan Bangunan	16.985.018.956,71	8.252.746.095,00	0,00	29.902.764.807,00	0,00	141.151.088,00	0,00	55.261.680.956,71
Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.201.347.218,59	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	129.077.601.973,00	0,00	140.282.249.191,59
Aset Tetap Lainya	4.617.797.530,00	0,00	0,00	0,00	16.070.000,00	0,00	0,00	4.633.867.530,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0,00	0,00	0,00	0,00	280.041.509,00	2.935.764.084,00	0,00	3.215.805.593,00
Jumlah	**45.404.910.008,30**	**10.348.126.922,00**	**3.300.000,00**	**36.530.043.707,00**	**298.420.509,00**	**133.650.249.323,65**	**404.770.000,00**	**226.639.820.469,95**

Terdapat komponen yang mengurangi nilai Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp35.480.954.613,95, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 5.2.31
Komponen Pengurang Nilai Aset Tetap

Uraian	Koreksi Pencatatan	Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	Bayar Hutang Tahun 2024	Reklasifikasi Aset	Jumlah Pengurangan
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Tanah	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
Peralatan dan Mesin	456.756.308,00	2.095.380.827,00	77.354.838,00	16.615.441.118,00	19.244.933.091,00
Gedung dan Bangunan	163.350.515,30	8.252.746.095,00	219.302.200,00	6.909.428.450,65	15.544.827.260,95
Jalan, Irigasi dan Jaringan	269.121.822,00	0,00	0,00	195.940.582,00	465.062.404,00
Aset Tetap Lainya	31.899.970,00	0,00	0,00	25.866.800,00	57.766.770,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0,00	0,00	0,00	160.465.088,00	160.465.088,00
Jumlah	**929.028.615,30**	**10.348.126.922,00**	**296.657.038,00**	**23.907.142.038,65**	**35.480.954.613,95**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.1.	**Tanah**	**648.670.324.008,00**	**643.176.924.008,00**

Aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp648.670.324.008,00 dan Rp643.176.924.008,00 Nilai tanah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah. Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap tanah tahun 2025 terdiri dari penambahan aset kurang catat dan koreksi pencatatan berdasarkan nilai perolehan.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi tanah, disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 5.2.32
Perhitungan Mutasi Tanah Per 31 Desember 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2024	643.176.924.008,00
Mutasi Tambah	
Hibah	5.359.000.000,00
Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	142.300.000,00
Total Penambahan	5.501.300.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	7.900.000,00
Jumlah Tanah per 31 Desember 2025	648.670.324.008,00

Berikut uraian perhitungan mutasi aset tetap tanah tahun anggaran 2025:

1. Penambahan Aset Tetap Tanah
   Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp5.501.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Penambahan hibah sebesar Rp5.359.000.000,00 dengan rincian :
      1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp39.600.000,00,00 berupa tanah UPT SPAM lokasi Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung

2) Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp5.319.400.000,00 berupa prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dengan rincian sebagai berikut :
   a) PT. Mutiara Bukik Limato dengan berita acara Nomor : 030/1141/PERKIMTAN-2024 seluas 8.757,43 M^2 dengan rincian sebagai berikut:
      - fasilitas umum seluas 1.488 M^2 dengan nilai Rp297.600.000,00
      - fasilitas sosial seluas 7.269 M^2 dengan nilai Rp1.453.800.000,00
   b) PT. Sarana Rangkiang Ventura dengan berita acara Nomor : 030/1143/PERKIMTAN-2024 seluas 16.294 M^2 dengan nilai Rp3.258.800.000,00
   c) PT. Duo Berlian Nusantara dengan berita acara Nomor : 030/1142/PERKIMTAN-2024 seluas 1.546 M^2 dengan nilai Rp309.200.000,00

b. Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset Rp142.300.000,00 dimana asetnya ada tetapi belum tercatat dengan rincian :
   1) Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp14.300.000,00 berupa 2 ruas jalan lingkungan yang berlokasi di Nagari Empat Koto Pulau Punjung, dengan rician 1 ruas di Jorong Pasar Lama dengan nilai Rp11.440.000,00 dan 1 ruas di Jorong Tabek dengan nilai Rp2.860.000,00;
   2) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp128.000.000,00 berupa tanah Bangunan Pustu lokasi Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh

2. Pengurangan Aset Tetap Tanah
   Koreksi Pencatatan sebesar Rp7.900.000,00 merupakan koreksi nilai perolehan tanah pada Dinas Perhubungan, karena ditemukan dokumen pengadaan awal.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.2.	**PERALATAN DAN MESIN**	**455.931.402.582,41**	**457.431.418.474,76**

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp455.539.026.372,41 dan Rp457.431.418.474,76 Penjelasan mengenai perhitungan mutasi peralatan dan mesin, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.33
Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo 31 Desember 2024 (Audited)	457.431.418.474,76
Mutasi Tambah	
1 Belanja Modal	12.620.746.293,00
2 Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	2.095.380.827,00
3 Hibah	1.268.278.900,00
4 Kapitalisasi Aset	2.309.000,00
5 Reklasifikasi Aset	1.495.732.178,65
6 Kurang Catat Menjadi Aset	262.470.000,00
Total Penambahan	**17.744.917.198,65**
Mutasi Kurang	
1 Koreksi Pencatatan	456.756.308,00
2 Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	2.095.380.827,00
3 Bayar Hutang Tahun 2024	77.354.838,00
4 Reklasifikasi Aset	16.615.441.118,00
Total Pengurangan	19.244.933.091,00
Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	**455.931.402.582,41**

Berikut uraian perhitungan mutasi aset tetap peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025:

1. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
   a. Belanja Modal
   b. Mutasi Antar OPD
   c. Hibah
   d. Kapitaslisasi Aset
   e. Reklasifikasi Aset

2. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
   a. Mutasi Antar OPD
   b. Kapitalisasi Aset
   c. Reklasifikasi Aset

Berikut uraian perhitungan mutasi aset tetap peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025

1. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
   a. Belanja Modal

      Belanja modal peralatan dan mesin Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar Rp12.620.746.293,00 dengan rincian sebagai berikut:
      1) Belanja Modal Kabupaten Dharmasraya yang tersebar pada OPD Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp7.534.320.970,00.
      2) Belanja Modal BLUD pada Dinas Kesehatan Rp1.781.507.223,00
      3) Belanja Modal BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.304.918.100,00

   b. Mutasi Antar OPD sebesar Rp2.095.380.827,00 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Mutasi Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp34.695.000,00 berupa 1 unit Laptop dengan merk apple mac book pro dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
      2) Mutasi ke Badan Keuangan Daerah sebesar Rp6.300.000,00 berupa 1 unit kendaraan roda dua merk Honda Win BA 6702 VB dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
      3) Mutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp25.501.225,00 berupa 4 unit ac split seharga Rp21.541.225,00 dari Dinas Kesehatan dan 1 Unit Meja Kerja Pejabat Eselon II seharga Rp3.960.000,00 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
      4) Mutasi ke Dinas Pendidikan sebesar Rp157.950.000,00 berupa 1 unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Terios BA 57 V dari Badan Keuangan Daerah.
      5) Mutasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp151.114.250,00 berupa 3 unit ac split seharga Rp 22.864.250,00 dari Dinas Kesehatan dan 1 unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 BC (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 2765 VG seharga Rp128.250.000,00 dari Inspektorat.
      6) Mutasi Ke Sekretariat Daerah sebesar Rp1.719.820.352,00 5 unit kendaraan roda empat dan 1 unit *video conference* dengan rincian sebagai berikut:
         - 1 unit kendaraan roda empat dengan merk Mitsubishi Pajera Sport 2.4L Dakar BA 9 V seharga Rp607.000.000,00 dari Sekretariat DPRD
         - 1 kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajera Sport 2.4L Dakar BA 8 V seharga Rp 607.000.000,00 dari Sekretariat DPRD
         - 1 kendaraan roda empat merk Toyota Avanza 1.5 M/T BA 1035 V seharga Rp203.116.552,00 dari Dinas Komunikasi dan Informatika
         - 1 unit kendaraan roda empat dengan merk Nissan Xtrail BA 1957 VK seharga Rp296.150.000,00 dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
         - 1 unit *video conference* dengan merk *logitech webcam* seharga Rp6.553.800,00 dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

   c. Hibah

      Hibah peralatan dan mesin sebesar Rp1.268.278.900,00 dengan rician sebagai berikut :
      1) Hibah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp598.000.000,00 dari Kementerian Perhubungan berupa 1 unit Bus Sekolah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima

Nomor: BA-DRJD 617 Tahun 2025 dan Nomor: 500.11.2/87/DISHUB-2025 tanggal 28 Mei 2025 dan Perjanjian Hibah Antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa 1 (satu) Unit Bus Sekolah Tahun Anggaran 2024 Nomor: HK.201/3/18//DRJD/2025 dan Nomor: 500.11.2/86/DISHUB/-2025.

2) Hibah pada Dinas Kesehatan dari Universitas Andalas sebesar Rp28.851.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - 1 unit Lemari Besi/Metal seharga Rp 3.685.000,00
   - 1 unit LCD Projector/Infocus seharga Rp5.345.000,00
   - 1 unit Meja Rapat seharga Rp3.685.000,00
   - 1 unit Tempat Tidur Besi seharga Rp3.200.000,00
   - 2 unit ac spilt seharga Rp12.936.000,00
3) Hibah pada Dinas Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah program revitalisasi sebesar Rp641.427.900,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Alat pertanian sebesar Rp43.095.000,00
   - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp508.732.900,00
   - Komputer sebesar Rp87.000.000,00
   - Peralatan olahraga sebesar Rp2.600.000,00

d. Kapitalisasi Aset

Kapitalisasi belanja barang dan jasa/non belanja modal atau hibah barang dan jasa yang diakui sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan barang yang dibeli/diterima dari belanja/hibah barang dan jasa sebesar Rp2.309.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) pada Dinas Pendidikan belanja jasa BOS menjadi aset sebesar Rp1.009.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga.
2) Pada Dinas Pendidikan belanja jasa BOS menjadi aset sebesar Rp1.300.000,00 berupa alat komputer.

e. Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.495.732.178,65 dengan rincian sebagai berikut:

1) Reklas pada Sekretariat Daerah sebesar Rp550.423.000,00 dari belanja aset lainnya berupa 1 unit kendaraan roda empat pengembalian pinjam pakai dari Polres Dharmasraya sebesar Rp542.600.000,00 dan 1 unit kendaraan roda dua yang telah diperbaiki dari kondisi rusak berat sebesar Rp7.823.000,00.
2) Reklas pada Kecamatan Koto Besar sebesar Rp21.750.000,00 dari belanja aset lainnya berupa 1 unit kendaraan roda dua yang telah diperbaiki dari kondisi rusak berat sebesar Rp6.750.000,00 dan 1 unit kendaraan roda dua pengembalian pinjam pakai dari Nagari sebesar Rp15.000.000,00
3) Reklas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp60.150.000,00 dari belanja aset lainnya berupa peralatan komputer yang telah diperbaiki dari kondisi rusak berat dan sebesar Rp49.500.000,00 dari gedung dan bangunan karena terjadi kesalahan penganggaran.
4) Reklas pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp399.088.100,00 dari belanja aset lainnya berupa 1 unit drump truck pengembalian dari pinjam pakai dari Nagari.
5) Reklas pada Dinas Pertanian sebesar Rp392.376.210,00 dari aset lainnya berupa kendaraan untuk penyuluh.
6) Reklas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp71.944.868,65 dari pengadaan gedung kantor UPT PPA berupa peralatan rumah tangga dan peralatan komputer.

2. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

a. Koreksi Pencatatan

Koreksi pencatatan peralatan dan mesin sebesar Rp456.756.308,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Koreksi pencatatan Dinas Perhubungan sebesar Rp19.838.808,00 dari belanja modal peralatan dan mesin menjadi persediaan
2) Koreksi pencatatan Dinas Pendidikan sebesar Rp431.062.500,00 dari belanja modal peralatan dan mesin menjadi persediaan
3) Koreksi pencatatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.855.000,00 dari belanja modal peralatan dan mesin menjadi persediaan

b. Penyerahan/Pengalihan Status Pengguna

Penyerahan/pengalihan status pengguna sebesar Rp2.095.380.827,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Sekretariat DPRD sebesar Rp1.214.000.000,00 ke Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut:
   - 1 unit kendaraan roda empat dengan merk Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar BA 9 V sebesar Rp607.000.000,00
   - 1 unit kendaraan roda empat dengan merk Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar BA 8 V sebesar Rp607.000.000,00
2) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Dinas Kesehatan sebesar Rp44.405.475,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - 4 unit ac split ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp21.541.225,00
   - 3 unit ac split ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp22.864.250,00
3) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp330.845.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - 1 unit kendaraan roda empat dengan merk Nissan Xtrail BA 1957 VK sebesar Rp296.150.000,00 ke Sekretariat Daerah
   - 1 unit laptop dengan merk *apple mac book pro* sebesar Rp34.695.000,00 ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa 1 unit Meja Kerja Pejabat Eselon II sebesar Rp3.960.000,00 ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Badan Keuangan Daerah berupa 1 unit kendaraan roda 4 dengan merk Daihatsu Terios BA 57 V sebesar Rp157.950.000,00 ke Dinas Pendidikan
6) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Inspektorat berupa 1 unit kendaraan bermotor dengan merk Mitsubishi L300 BC (4x2) M/T BA 2765 VG sebesar Rp128.250.000,00 ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berupa 1 unit kendaraan roda dua dengan merk Honda win BA 6702 VB sebesar Rp6.300.000,00 ke Badan Keungan Daerah
8) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp209.670.352,00 ke Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut:
   - 1 unit kendaraan roda empat dengan merk Toyota Avanza 1.5 M/T BA 1035 V sebesar Rp203.116.552,00
   - 1 unit Video Conference dengan merk *Logitech Webcam* sebesar Rp6.553.800,00

c. Bayar Hutang Tahun 2024

Bayar hutang tahun 2024 Dinas Kesehatan sebesar Rp77.354.838,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Bayar hutang tahun 2024 berupa alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp48.461.000,00
2) Bayar hutang tahun 2024 berupa alat kedokteran dan kesehatan Rp22.714.456,00
3) Bayar hutang tahun 2024 berupa komputer Rp6.179.382,00

d. Reklasifikasi Pengurangan Aset

Reklasifikasi aset sebesar Rp16.615.441.118,00 pada beberapa OPD dengan rician sebagai berikut :

1) Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp547.160.000,00
2) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp4.331.738.999,00
3) Pada Kecamatan Sembilan Koto sebesar Rp33.878.000,00
4) Pada Kecamatan Koto Besar sebesar Rp12.550.000,00
5) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.831.348.082,00
6) Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp54.824.800,00
7) Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp93.916.328,00
8) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.621.891.255,00
9) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp875.519.654,00
10) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.840.000,00
11) Pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp22.452.000,00
12) Pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp9.407.250,00
13) Pada Inspektorat sebesar Rp381.985.000,00
14) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp202.588.603,00
15) Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp222.011.298,00
16) Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp11.935.000,00
17) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp196.616.849,00
18) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp43.990.000,00
19) Pada Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp119.788.000,00

3. Aset Digitalisasi

Dalam rangka melakukan percepatan digitalisasi pembelajaran secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupa sarana digitalisasi yang tersebar di 147 Sekolah Dasar Negeri, 22 Sekolah Dasar Swasta, 33 Sekolah Menengah Pertama Negeri, 6 Sekolah Menengah Pertama Swasta dengan rincian sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit *Smartboard* dalam bentuk IFP *(interactive flat panel)*
b. 1 (satu) unit laptop

Tabel. 5.2.34
DAFTAR PENERIMAAN DIGITALISASI PEMBELAJARAN

No	Nama Sekolah	Status	Penerimaan Digitalisasi Tahun 2025			
			Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
			IFP		Laptop	
1	SDN 01 ASAM JUJUHAN	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
2	SDN 02 ASAM JUJUHAN	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
3	SDN 03 ASAM JUJUHAN	Negeri	1 paket	-	1 paket	-

No	Nama Sekolah	Status	Penerimaan Digitalisasi Tahun 2025			
			Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
			IFP		Laptop	
4	SDN 04 ASAM JUJUHAN	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
5	SDN 05 ASAM JUJUHAN	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
6	SD YTKA 02 ASAM JUJUHAN	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
7	SDS 03 YTKA Asam Jujuhan	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
8	SDS PT. INCASI RAYA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
9	SDS YTKA 04 ASAM JUJUHAN	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
10	SMPN 1 ASAM JUJUHAN	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
11	SDN 01 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
12	SDN 02 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
13	SDN 03 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
14	SDN 04 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
15	SDN 05 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
16	SDN 06 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
17	SDN 07 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
18	SDN 08 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
19	SDN 09 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
20	SDN 10 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
21	SDN 11 IX Koto	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
22	SDN 12 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
23	SDN 13 IX Koto	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
24	SDN 14 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
25	SDN 15 IX Koto	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
26	SMPN 1 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
27	SMPN 2 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
28	SMPN 3 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
29	SD IT AL FALAH	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
30	SD It Al-Ihsan	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
31	SDN 01 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
32	SDN 02 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
33	SDN 03 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
34	SDN 04 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
35	SDN 05 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
36	SDN 06 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
37	SDN 07 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
38	SDN 08 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
39	SDN 09 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
40	SDN 10 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
41	SDN 11 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
42	SDN 12 Koto Baru	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
43	SDN 13 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
44	SDN 14 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
45	SDN 15 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
46	SDN 16 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-

No	Nama Sekolah	Status	Penerimaan Digitalisasi Tahun 2025			
			Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
			IFP		Laptop	
47	SDS IT Al-Bina Koto Baru	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
48	SMPIT AL-BINA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
49	SMPN 1 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
50	SMPN 2 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
51	SMPN 3 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
52	SMPN 4 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
53	SDN 01 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
54	SDN 02 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
55	SDN 03 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
56	SDN 04 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
57	SDN 05 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
58	SDN 06 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
59	SDN 07 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
60	SDN 08 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
61	SDN 09 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
62	SDN 10 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
63	SDN 11 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
64	SDN 12 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
65	SDN 13 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
66	SDN 14 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
67	SDN 15 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
68	SDS PT SMP	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
69	SMP TERPADU ASY-SYAHADATAIN	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
70	SMPIT AL MUNAWWAROH	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
71	SMPN 1 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
72	SMPN 2 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
73	SMPN 3 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
74	SD ISLAM PLUS DAARUTH THULLAB 02 KOTO SALAK	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
75	SDN 01 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
76	SDN 02 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
77	SDN 03 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
78	SDN 04 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
79	SDN 05 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
80	SDN 06 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
81	SDN 07 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
82	SDN 08 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
83	SDN 09 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
84	SDN 10 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
85	SDN 11 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
86	SDN 12 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
87	SMPN 1 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
88	SMPN 2 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
89	SMPN 3 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-

No	Nama Sekolah	Status	Penerimaan Digitalisasi Tahun 2025			
			Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
			IFP		Laptop	
90	SD ISLAM MIFTAHUL ULUM	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
91	SDN 01 PADANG LAWEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
92	SDN 02 PADANG LAWEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
93	SDN 03 PADANG LAWEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
94	SDN 04 PADANG LAWEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
95	SDN 05 PADANG LAWEH	Negeri	1 paket		1 paket	-
96	SMPN 1 PADANG LAWEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
97	SD IP AN NAFII SCHOOL PULAU PUNJUNG	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
98	SD ISLAM TEKNOLOGI BMT DHARMASRAYA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
99	SD IT AL-BINA 02 PULAU PUNJUNG	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
100	SD IT ANDALAS CENDEKIA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
101	SD RAUDHAH ISLAMIC SCHOOL	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
102	SDIT ASA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
103	SDN 01 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
104	SDN 02 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
105	SDN 03 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
106	SDN 04 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
107	SDN 05 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
108	SDN 06 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
109	SDN 07 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
110	SDN 08 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
111	SDN 09 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
112	SDN 10 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
113	SDN 11 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
114	SDN 12 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
115	SDN 13 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
116	SDN 14 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
117	SDN 15 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
118	SDN 16 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
119	SDN 17 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
120	SDN 18 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
121	SDN 19 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
122	SDN 20 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
123	SDN 21 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
124	SDN 22 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
125	SDN 23 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
126	SDN 24 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
127	SDN 25 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
128	SMP IT ANDALAS CENDEKIA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
129	SMPN 1 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
130	SMPN 2 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
131	SMPN 3 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
132	SMPN 4 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-

No	Nama Sekolah	Status	Penerimaan Digitalisasi Tahun 2025			
			Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
			IFP		Laptop	
133	SMPN 5 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
134	SMPN 3 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
135	SMPN UNGGUL DHARMASRAYA	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
136	SD ABDI AL-MUGHNI	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
137	SD ISLAM PLUS DAARUTH THULLAB 03 SITIUNG	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
138	SD QUR AN AL-KAUTSAR DHARMASRAYA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
139	SDN 01 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
140	SDN 02 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
141	SDN 03 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
142	SDN 04 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
143	SDN 05 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
144	SDN 06 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
145	SDN 07 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
146	SDN 08 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
147	SDN 09 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
148	SDN 10 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
149	SDN 11 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
150	SDN 12 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
151	SDN 13 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
152	SDN 14 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
153	SDN 15 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
154	SDN 16 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
155	SDN 17 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
156	SDN 18 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
157	SDN 19 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
158	SDN 20 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
159	SMPN 1 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
160	SMPN 2 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
161	SMPN 3 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
162	SD IT GREAT SCHOOL	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
163	SD IT SAKINAH	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
164	SDN 01 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket		1 paket	-
165	SDN 02 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
166	SDN 03 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
167	SDN 04 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
168	SDN 05 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
169	SDN 06 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
170	SDN 07 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
171	SDN 08 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
172	SDN 09 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
173	SDN 10 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
174	SDN 11 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
175	SMP IT GREAT SCHOOL	Swasta	1 paket	-	1 paket	-

No	Nama Sekolah	Status	Penerimaan Digitalisasi Tahun 2025			
			Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
			IFP		Laptop	
176	SMPN 1 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
177	SMPN 2 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
178	SMPN 3 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
179	SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
180	SDN 01 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
181	SDN 02 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
182	SDN 03 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
183	SDN 04 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
184	SDN 05 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
185	SDN 06 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
186	SDN 07 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
187	SDN 08 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
188	SDN 09 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
189	SDN 10 TIMPEH	Negeri	1 paket		1 paket	-
190	SDN 11 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
191	SMP MIFTAHUL ULUM BOARDING SCHOOL	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
192	SMPN 1 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
193	SMPN 2 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
194	SMPN 3 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
195	SMPN 4 TIMPEH	Negeri	1 paket		1 paket	-
196	SDN 01 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
197	SDN 02 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
198	SDN 03 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
199	SDN 04 TIUMANG	Negeri	1 paket		1 paket	-
200	SDN 05 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
201	SDN 06 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
202	SDN 07 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
203	SDN 08 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
204	SDN 09 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
205	SDN 10 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
206	SDN 11 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
207	SDN 12 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
208	SMPN 1 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
TOTAL			208 paket		208 paket	

Aset digitalisasi diatas belum terdaftar sebagai barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya karena proses hibah belum terlaksana dan masih tercatat pada Kementerian Pendidikan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.3. GEDUNG DAN BANGUNAN	**1.169.212.381.936,29**	**1.129.495.528.240,53**

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 1.169.212.381.936,29 dan Rp1.129.495.528.240,53Penjelasan mengenai perhitungan mutasi gedung dan bangunan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 5.2.35
Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2024	1.129.495.528.240,53
Mutasi Tambah	
1 Belanja Modal	16.965.018.966,71
2 Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	8.252.746.095,00
3 Hibah	29.902.764.807,00
4 Reklasifikasi Aset	141.151.088,00
Total Penambahan	55.261.680.956,71
Mutasi Kurang	
1 Koreksi Pencatatan	163.350.515,30
2 Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	8.252.746.095,00
3 Bayar Hutang Tahun 2024	219.302.200,00
4 Reklasifikasi Aset	6.909.428.450,65
Total Pengurangan	15.544.827.260,95
Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025	1.169.212.381.936,29

Berikut uraian perhitungan mutasi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025:

1. Penambahan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan
   a. Belanja Modal

      Belanja modal gedung dan bangunan Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp16.965.018.966,71 dengan rincian sebagai berikut:

      1) Belanja modal Kabupaten Dharmasraya yang tersebar pada OPD Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp16.251.593.496,71 dengan rincian sebagai berikut:
         a) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp314.684.600,00
         b) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.623.018.986,83
         c) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.330.872.823,64
         d) Pada Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp142.194.140,00
         e) Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp214.639.657,00
         f) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.612.182.335,24
         g) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp14.001.454,00
      2) Belanja Modal BLUD pada Dinas Kesehatan Rp713.425.470,00

   b. Penyerahan/Pengalihan Status Pengguna

      Mutasi antar OPD sebesar Rp8.252.746.095,00 dengan rincian sebagai berikut:

      1) Mutasi ke Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp224.832.600,00 berupa rehabilitasi bangunan gedung IKM Logam dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
      2) Mutasi ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp20.052.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa lapangan voli dan sebesar Rp846.710.881,00 berupa 1 bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.
      3) Mutasi Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp419.205.907,00 berupa 1 unit bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.
      4) Mutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.278.733.769,00 berupa 2 unit bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.
      5) Mutasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.081.270.167,00 berupa 3 unit bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.
      6) Mutasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp596.041.145,00 berupa 2 unit bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.

7) Mutasi ke Dinas Perhubungan sebesar Rp1.758.304.471,00 berupa 1 unit bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.
8) Mutasi ke Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp620.436.564,00 berupa 1 unit bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.
9) Mutasi ke Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp407.158.591,00 berupa 1 unit bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.

c. Hibah

Hibah pada Dinas Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah program revitalisasi sebesar Rp29.902.764.807,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) SMPN 01 Koto Baru dengan nilai sebesar Rp2.004.407.000,00
2) SMPN 02 Sungai Rumbai dengan nilai sebesar Rp727.994.000,00
3) SMPN 02 Koto Salak dengan nilai sebesar Rp2.816.660.914,00
4) SMPN 03 Pulau Punjung dengan nilai sebesar Rp930.760.000,00
5) SMPN 01 Koto Besar dengan nilai sebesar Rp1.545.746.500,00
6) SMPN 01 Timpeh dengan nilai sebesar Rp779.668.000,00
7) SMPN 01 Padang Laweh dengan nilai sebesar Rp1.629.684.000,00
8) SMPN 06 Pulau Punjung dengan nilai sebesar Rp1.835.209.000,00
9) SMPN 01 Sungai Rumbau dengan nilai sebesar Rp605.474.980,000
10) SMPN 01 Pulau Punjung dengan nilai sebesar Rp2.838.346.500,00
11) SMPN 03 Sembilan Koto dengan nilai sebesar Rp721.703.100,00
12) SMPN 03 Sungai Rumbai dengan nilai sebesar Rp694.654.000,00
13) SMPN 03 Koto Baru dengan nilai sebesar sebesar Rp1.537.216.675,00
14) SDN 04 Koto Baru dengan nilai sebesar Rp1.019.674.711,00
15) SDN 10 Koto Baru dengan nilai sebesar Rp1.225.212.672,00
16) SDN 02 Padang Laweh dengan nilai sebesar Rp1.482.979.894,00
17) SDN 09 Koto Besar dengan nilai sebesar Rp896.923.697,00
18) SDN 13 Pulau Punjung dengan nilai sebesar Rp902.712.238,00
19) SDN 06 Koto Salak dengan nilai sebesar Rp1.357.137.525,00
20) SDN 05 Koto Salak dengan nilai sebesar Rp1.410.449.334,00
21) SDN 03 Timpeh dengan nilai sebesar Rp1.434.451.568,00
22) TKN Pembina Koto Besar dengan nilai sebesar Rp550.778.499,00
23) TKN 01 Sungai Rumbai dengan nilai sebesar Rp954.920.000,00

d. Reklasifikasi Aset

Penambahan reklasifikasi aset sebesar Rp141.151.088,00 terdiri dari :

1) Penambahan dari konstruksi dalam pengerjaan (KDP) reklasifikasi ke aset tetap bangunan dan gedung sebesar Rp60.544.088,00 merupakan perencanaan gedung UPT PPA pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
2) Penambahan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa Bangunan lokasi Landing Paralayang Nagari Gunung Selasih sebesar Rp 80.607.000,00

2. Pengurangan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan

a. Koreksi Pencatatan

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp163.350.515,30 terdiri dari sbb:

1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Pendidikan ke TK Swasta sebesar Rp149.349.061,30; dan
2) Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp14.001.454,00 menjadi Persediaan.

b. Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp8.252.746.095,00 terdiri dari :

1) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke beberapa OPD sebesar Rp244.884.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan berupa rehap *work shop* sebesar Rp224.832.600,00
   b. Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berupa pembuatan lapangan voly di sport center sebesar Rp20.052.000,00
2) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Dinas Kesehatan ke beberapa OPD sebesar Rp8.007.861.495,00 terdiri dari ;
   a. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.758.304.471,00
   b. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp846.710.881,00
   c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp596.041.145,00
   d. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp407.158.591,00
   e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp419.205.907,00
   f. Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp2.081.270.167,00
   g. Dinas Perpustakaan sebesar Rp620.436.564,00
   h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.278.733.769,00

c. Bayar hutang 2024

Pengurangan bayar hutang 2024 pada Dinas Kesehatan berupa gedung dan bangunan sebesar Rp219.302.200,00

d. Reklasifikasi Aset

Pengurangan reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp6.909.428.450,65 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset lainnya sebesar Rp1.325.570.460,00
2) Pada Dinas Kesehatan terdapat reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset lainnya sebesar Rp1.692.825.481,00 dan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp2.778.503.502,00
3) Pada Dinas Pendidikan terdapat reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp10.820.000,00
4) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana terdapat reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke pelatan dan mesin sebesar Rp71.944.868,65
5) Pada Dinas Pertanian terdapat reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset lainnya sebesar Rp1.029.764.139,00

		Tahun 2025 (Rp)	**Tahun 2024 (Rp)**
V.C.1.c.4.	**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	**1.651.302.675.579,92**	**1.511.485.488.792,33**

Nilai jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.651.302.675.579,92 dan Rp 1.511.485.488.792,33. Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.36
Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025

URAIAN		JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2024		1.511.485.488.792,33
Mutasi Tambah		
1	Belanja Modal	11.201.347.218,59
2	Aset dari Hutang Tahun 2024	3.300.000,00
3	Reklasifikasi Aset	129.077.601.973,00
	Total Penambahan	140.282.249.191,59
Mutasi Kurang		
1	Koreksi Pencatatan	269.121.822,00
2	Reklasifikasi Aset	195.940.582,00
	Total Pengurangan	465.062.404,00
	Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025	1.651.302.675.579,92

Uraian perhitungan mutasi jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
   a. Belanja Modal
      Belanja modal gedung dan bangunan Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp11.201.347.218,59 dengan rincian sebagai berikut:
      1) Belanja modal bangunan gedung pemerintah Kabupaten Dharmasraya di Tahun 2025 yang bersumber dari APBD adalah sebesar Rp11.093.757.211,59 yang tersebar di 3 OPD dengan rincian sebagai berikut:
         a) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.843.084.725,00
         b) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.075.000.000,00
         c) Pada Dinas Pangan dan Perikanan sebesar Rp175.672.486,59
      2) Belanja BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp107.590.007,00

   b. Aset dari Hutang Tahun 2025
      Aset dari hutang tahun 2025 menjadi aset berupa instalasi air bersih pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.300.000,00

   c. Reklasifikasi Aset
      Reklasifikasi aset menjadi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp129.077.601.973,00 dengan rincian sebagai berikut:
      1) Reklasifikasi dari aset lainnya (aset yang diserahkan ke masyarakat) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp117.167.614.526,00 berupa jalan lingkungan dan instalasi yang akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
      2) Reklasifikasi dari aset lainnya (aset yang diserahkan ke masyarakat pada Dinas Pertanian sebesar Rp11.746.487.447,00 berupa jalan, irigasi dan jaringan yang akan dikelola langsung oleh Dinas Pertanian;
      3) Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp163.500.000,00 berupa instalasi jaringan pipa gas lain-lain.

2. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
   a. Koreksi Pencatatan
      Koreksi pencatatan jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp269.121.822,00 dapat diuraikan sebagai berikut :
      1) Koreksi pencatatan berupa *box culvert* merupakan barang persediaan bahan-bahan bangungan dan konstruksi sebesar Rp199.996.000,00
      2) Koreksi pencatatan berupa belanja operasional sebesar Rp69.125.822,00.

b. Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp195.940.582,00 merupakan aset yang di reklasifikasi ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

1) Reklasifikasi aset berupa Perencanaan Rehab Jalan Paket I Pelebaran Jalan Samping RSUD Sungai Dareh Lama Perbaikan Jalan Padang Hilalang - Lubuk Labu Rehab Jalan Penghubung Koto Baru - Silago sebesar Rp49.934.000,00
2) Reklasifikasi aset berupa Perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan Kecamatan Sembilan Koto 2025 sebesar Rp146.006.582,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.5. ASET TETAP LAINNYA	**53.540.025.003,00**	**48.963.924.243,00**

Nilai aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp53.540.025.003,00 dan Rp48.963.924.243,00. Nilai tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai atau sesuai yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi aset tetap lainnya, disajikan pada Tabel berikut :

Tabel. 5.2.37
Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2024	48.963.924.243,00
Mutasi Tambah	
1 Belanja Modal	4.617.797.530,00
2 Kapitalisasi Aset	16.070.000,00
Total Penambahan	**4.633.867.530,00**
Mutasi Kurang	
1 Koreksi Pencatatan	31.899.970,00
2 Reklasifikasi Aset	25.866.800,00
Total Pengurangan	**57.766.770,00**
Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025	**53.540.025.003,00**

Berikut uraian perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025:

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya
   a. Belanja Modal

      Belanja modal aset tetap lainnya Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar Rp4.617.797.530,00 dengan rincian sebagai berikut:

      1) Dana APBD Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp438.793.970,00 dengan rincian sebagai berikut:
         - Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp106.793.970,00
         - Pada Dinas Pertanian sebesar Rp269.600.000,00
         - Pada Dinas Pangan dan Perikanan Rp53.400.000,00
         - Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 9.000.000,00
      2) Pada Dinas Kesehatan atas Dana BOS untuk aset tetap lainnya sebesar Rp4.179.003.560,00

   b. Kapitalisasi Aset

      Kapitalisasi barang dan jasa BOS yang diakui sebagai aset di Dinas Pendidikan berupa buku perpustakaan sebesar Rp16.070.000,00

2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya
   a. Koreksi Pencatatan

      Koreksi pencatatan aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan berupa seragam yang merupakan barang persediaan sebesar Rp31.899.970,00

   b. Reklasifikasi Aset

      Reklasifikasi aset tetap lainnya sebesar Rp25.866.800,00 terdiri dari:

      1) Reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset lainnya pada Dinas Pertanian berupa hewan sebesar Rp24.516.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Mati sebesar Rp7.004.800,00
- Dijual sebesar Rp17.512.000,00

2) Reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset lainnya karena kondisi rusak berat pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.350.000,00.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.6.	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	6.026.092.182,00	2.970.751.677,00

Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp6.026.092.182,00 dan Rp2.970.751.677,00. Perhitungan konstruksi dalam pengerjaan mencakup gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya dan apabila telah selesai pengerjaannya serta sudah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau pemerintah, maka dilakukan Reklasifikasi ke asetnya masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.2.38
Perhitungan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2024	2.970.751.677,00
MUTASI TAMBAH	
1 Kapitalisasi Aset	280.041.509,00
2 Reklasifikasi Aset	2.935.764.084,00
TOTAL PENAMBAHAN	**3.215.805.593,00**
MUTASI KURANG	
1 Reklasifikasi Aset	160.465.088,00
JUMLAH KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2025	**6.026.092.182,00**

Berikut uraian perhitungan mutasi konstruksi dalam pengerjaan Tahun Anggaran 2025:

1. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan
   a. Kapitalisasi Aset

      Penambahan aset konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada Dinas Kesehatan berupa kapitalisasi perencanaan gedung RI Paru dan ruang *Cathlab* pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp280.041.509,00

   b. Reklasifikasi Aset

      Penambahan reklasifikasi ke kontruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp2.935.764.084,00 terdiri dari:

      1) Reklasifikasi aset dari jalan, irigasi dan jaringan ke konstruksi dalam pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp195.940.582,00
      2) Reklasifikasi aset dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pekerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.729.003.502,00
      3) Reklasifikasi aset dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pekerjaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.820.000,00

2. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

   Reklasifikasi Aset

   Pengurangan reklasifikasi dari kontruksi dalam pengerjaan sebesar Rp160.465.088,00 dengan rincian sebagai berikut:

   1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp99.921.000,00
   2) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana ke gedung dan bangunan sebesar Rp60.544.088,00

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.7.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(1.745.043.585.833,68)	(1.527.992.628.347,13)

Tabel. 5.2.39
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025

Rincian nilai akumulasi penyusutan aset tetap per OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
		Berkurang			Bertambah				
		Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalinan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2-3-4+5+6+7+8+9
Peralatan dan Mesin	344.129.841.679,04	1.251.409.833,00	863.471.773,00	0,00	1.251.409.833,00	471.095.563,00	0,00	41.615.744.637,96	372.248.836.335,00
Gedung dan Bangunan	190.810.484.054,00	3.969.404.914,00	11.688.015,00	0,00	3.969.404.914,00	0,00	0,00	24.207.340.264,00	214.200.706.906,00
Jalan, Jembatan, Irigasi,& Jaringan	992.833.862.614,09	0,00	110.837.205.113,00	8.239.143.946,59	0,00	0,00	8.239.143.946,59	46.465.390.919,00	1.158.375.602.592,68
Aset Tetap Lainnya	218.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.440.000,00
JUMLAH	**1.527.992.626.347,13**	**5.220.814.747,00**	**111.712.364.901,00**	**8.239.143.946,59**	**5.220.814.747,00**	**471.095.563,00**	**8.239.143.946,59**	**112.288.475.820,96**	**1.745.043.585.833,68**

Tabel. 5.2.40
Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
			Berkurang			Bertambah				
			Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sekretariat DPRD	21.619.245.977,00	375.761.906,00	416.883.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.801.495,00	22.445.401.758,00
2	Sekretariat Daerah	38.956.662.220,00	0,00	3.821.094.252,00	0,00	881.582.258,00	169.311.096,00	0,00	3.555.002.459,00	39.741.463.781,00
3	Kecamatan Pulau Punjung	801.398.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.493.786,00	831.892.229,00

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
			Berkurang			Bertambah				
			Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Kecamatan Sitiung	578.903.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.205.219,00	649.108.948,00
5	Kecamatan Koto Baru	878.176.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.260.361,00	956.437.295,00
6	Kecamatan Sungai Rumbai	980.320.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.696.548,00	1.051.016.755,00
7	Kecamatan Sembilan Koto	426.783.648,00	0,00	33.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.628.941,00	411.534.589,00
8	Kecamatan Timpeh	819.710.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.979.819,00	886.690.287,00
9	Kecamatan Padang Laweh	694.242.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940.550,00	739.182.684,00
10	Kecamatan Tiumang	794.016.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.962.734,00	850.979.393,00
11	Kecamatan Koto Besar	999.739.775,00	0,00	12.550.000,00	0,00	0,00	21.750.000,00	0,00	90.639.181,00	1.099.578.956,00
12	Kecamatan Koto Salak	821.644.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.018.374,00	908.662.959,00
13	Kecamatan Asam Jujuhan	1.016.894.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.304.136,00	1.081.199.021,00
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	997.950.749.088,09	0,00	5.990.333.762,00	0,00	0,00	101.388.266.916,00	8.239.143.946,59	46.662.793.933,00	1.148.250.620.121,68
15	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	25.736.603.975,00	0,00	54.013.550,00	0,00	0,00	11.688.015,00	0,00	2.373.409.092,00	28.067.687.532,00
16	Dinas Perhubungan	7.978.189.413,00	0,00	92.744.453,00	0,00	1.102.669.884,00	0,00	0,00	705.479.083,00	9.693.593.932,00
17	Dinas Kesehatan	183.875.793.545,14	4.008.077.489,00	3.644.189.999,00	0,00	0,00	10.650.000,00	0,00	28.023.253.119,00	204.257.429.176,14
18	Dinas Pendidikan	127.456.377.224,00	0,00	9.697.666,00	0,00	157.950.000,00	0,00	0,00	17.576.435.544,96	145.181.065.102,96
19	Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	21.274.806.056,00	0,00	0,00	0,00	472.729.665,00	0,00	0,00	2.166.399.166,00	23.913.934.888,00
20	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	2.608.876.193,00	330.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.201.668,00	2.399.232.861,00
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	5.223.484.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.001.578,00	5.781.486.438,00
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.706.745.213,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.290.788,00	4.145.076.001,00

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
			Berkurang			Bertambah				
			Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.527.862.327,00	0,00	0,00	0,00	408.447.747,00	0,00	0,00	121.872.435,00	2.058.182.509,00
24	Dinas Pertanian	12.667.178.934,00	0,00	208.943.095,00	0,00	0,00	9.841.314.407,00	0,00	894.648.296,00	23.194.198.542,00
25	Dinas Pangan dan Perikanan	10.991.293.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.381.819,00	11.336.674.960,50
26	Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	22.089.300.441,40	0,00	22.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.696.463,00	25.407.544.904,40
27	Badan Keuangan Daerah	6.045.842.189,00	157.950.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	457.158.323,00	6.351.350.512,00
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.787.222.939,00	0,00	0,00	0,00	145.981.350,00	0,00	0,00	108.600.795,00	2.041.805.084,00
29	Inspektorat	1.685.262.929,00	128.250.000,00	99.785.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.597.739,00	1.820.824.953,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.359.905.949,00	6.300.000,00	199.566.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.519.535,00	1.245.559.395,00
31	Dinas Lingkungan Hidup	6.409.517.625,00	0,00	221.398.798,00	0,00	0,00	269.384.467,00	0,00	445.464.120,00	6.902.967.414,00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	423.113.521,00	0,00	6.216.146,00	0,00	339.565.896,00	0,00	0,00	25.554.696,00	782.017.967,00
33	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.507.345.343,00	0,00	0,00	0,00	250.105.928,00	0,00	0,00	25.064.989,00	6.782.516.260,00
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.854.544.046,00	0,00	0,00	0,00	818.541.919,00	0,00	0,00	632.432.268,00	4.305.518.251,00
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.305.609.447,00	0,00	196.616.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.067.770,00	1.194.060.368,00
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.954.388.353,00	0,00	43.990.000,00	0,00	284.728.426,00	0,00	0,00	595.436.997,00	3.790.563.776,00
37	Dinas Komunikasi Dan Informasi	4.184.875.925,00	209.670.352,00	114.673.000,00	0,00	352.211.673,00	0,00	0,00	273.781.984,00	4.436.526.230,00
	JUMLAH	1.527.992.628.347,13	5.220.814.747,00	15.189.027.182,00	0,00	5.220.814.747,00	111.712.364.901,00	8.239.143.946,59	112.288.475.820,96	1.745.043.585.833,68

V.C.1.d PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
b. Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa aset tetap yang berpotensi menjadi properti investasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.41
Daftar Aset Tetap yang berpotensi menjadi properti investasi

NO	SKPD	URAIAN	LOKASI	LUAS (M^2)	NILAI ASET	KETERANGAN
1	Dinas Perkimtan	Properti Investasi Tanah	Jl. Jorong Pasir Putih Nagari Sungai Kambut, Kec Pulau Punjung	23.815,00	595.625.000,00	Kebun Karet
2	Dinas Pertanian	Properti Investasi Tanah	Jorong Koto Padang Nagari Koto Padang	78.335,00	1.986.750.000,00	Kebun sawit
3	Sekretariat Daerah (Pengelola Aset)	PTanah Menara Telekomunikasi	Jorong Koto Agung Nagari Koto Tinggi Kec. Koto Besar	3.700,00	37.000.000,00	Tower Menara Telkomsel
4	Sekretariat Daerah	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Jl. Padang Pasir ujung gurun Kec Padang barat padang	714	1.327.612.000,00	Mess Pemda di Padang
5	BLUD UPT Puskesmas Sialang	Tanah Bangunan Puskesmas /Posyandu	Jorong Sialang ,Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung	43.850	200.000.000,00	Kebun Sawit
6	Dinas Kumperdag	Bangunan Tempat Kerja lain-lain	Nagari Gunung Medan , Kec. Sitiung	0,00	567.517.100,00	Ruko Gedung IKM
7	Dinas Kumperdag	Bangunan Los dan Kios	Kabupaten Dharmasraya	0,00	18.631.974.684,43	Kios pada 26 pasar
8	SDN 08 Koto Baru	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	Jorong Padang Bintungan, Nagari Sialang Gaung, Kec. Koto Baru	16.466	254.100.000,00	Kebun sawit

Namun aset tersebut masih dalam proses pengkajian lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi properti investasi.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.8. ASET LAINNYA	**37.483.112.861,46**	**45.895.268.049,66**

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap. Nilai aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp37.483.112.861,46 dan Rp45.895.268.049,66 terdiri dari :

Tabel. 5.2.42
Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	877.757.319,00	287.907.729,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	4.808.780.277,00	4.557.476.277,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.168.970.434,00)	(2.873.514.683,00)
Aset Tidak Berwujud Netto	1.639.809.843,00	1.683.961.594,00
Aset Lain-Lain	113.230.130.680,27	225.626.423.917,27
Akumulasi Penyusutan	(78.264.584.980,81)	(182.859.988.190,61)
Aset Lain-lain Netto	34.965.545.699,46	42.766.435.726,66
Dana Transfer – TDF	0,00	1.156.963.000,00
Jumlah	**37.483.112.861,46**	**45.895.268.049,66**

Tabel. 5.2.43
Komponen Penambahan Nilai Aset Lainnya

Uraian	Belanja Modal	Reklasifikasi Aset	Jumlah Penambahan
Aset Tidak Berwujud	251.304.000,00	0,00	251.304.000,00
Aset Lain-lain	0,00	21.244.121.019,00	21.244.121.019,00
Jumlah	**251.304.000,00**	**21.244.121.019,00**	**21.495.425.019,00**

Rincian Penambahan Nilai Aset Lainnya sebesar Rp21.495.425.019,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan aset tak berwujud sebesar Rp251.304.000,00 dengan rincian :
   a. Belanja modal aset tak berwujud pada Dinas Perhubungan sebesar Rp58.275.000,00
   b. Belanja modal aset tak berwujud pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp193.029.000,00

2. Penambahan aset lain-lain sebesar Rp21.244.121.019,00 berupa reklasifikasi dari aset tetap dan sesama aset lainnya dengan rincian sebagai berikut :
   a. Sekretariat DPRD sebesar Rp547.160.000,00
   b. Sekretariat Daerah sebesar Rp4.612.248.466,00
   c. Kecamatan Sembilan Koto sebesar Rp33.878.000,00
   d. Kecamartan Koto Besar Rp27.550.000,00
   e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp7.377.748.140,00
   f. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp56.174.800,00
   g. Dinas Perhubungan sebesar 121.411.328,00
   h. Dinas Kesehatan sebesar Rp5.093.853.555,00
   i. Dinas Pendidikan sebesar Rp9.697.666,00
   j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp3.360.000,00
   k. Dinas Pertanian sebesar Rp2.121.737.314,00
   l. Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp22.452.000,00
   m. Inspektorat sebesar Rp381.000.000,00
   n. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp202.588.603,00
   o. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp260.931.298,00
   p. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp11.935.000,00
   q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp196.616.849,00
   r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp43.990.000,00
   s. Komunikasi dan Informasi sebesar Rp119.788.000,00

Tabel. 5.2.44
Komponen Pengurangan Nilai Aset Lainnya

URAIAN	PENGHAPUSAN	REKLASIFIKASI ASET	JUMLAH PENGURANGAN
Aset Lain-lain	1.649.062.000,00	131.991.352.256,00	133.640.414.256,00
Jumlah	**1.649.062.000,00**	**131.991.352.256,00**	**133.640.414.256,00**

Rincian pengurangan nilai aset lainnya sebesar Rp133.640.414.256,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengurangan aset lainnya karena adanya proses penghapusan dengan nilai Rp1.649.062.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.101.902.000,00 berupa penjualan 1 unit kendaraan perorangan dinas (mantan bupati periode 2020-2025) dan 1 unit kendaraan perorangan dinas (mantan pimpinan DPRD periode 2014-2019)
   2) Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp547.160.000,00 berupa 1 unit kendaraan perorangan dinas (mantan pimpinan DPRD periode 2019-2024)

b. Reklasifikasi aset dengan nilai Rp131.991.352.256,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Sekretariat Daerah sebesar Rp899.639.000,0
   2) Kecamatan Koto Besar sebesar Rp36.750.000,00
   3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp117.288.523.124,00

4) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp80.607.000,00
5) Dinas Perhubungan sebesar Rp27.495.000,00
6) Dinas Kesehatan sebesar Rp10.650.000,00
7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp3.360.000,00
8) Dinas Pertanian sebesar Rp13.206.320.032,00
9) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp438.008.100,00

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.1	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	877.757.319,00	287.907.729,00

Saldo tagihan tuntutan ganti kerugian daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 sebesar Rp877.757.319,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp287.907.729,00.

Tabel. 5.2.45
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Nomor SKTJM	Nomor LHP	Nama/NIP/Unit Kerja	Uraian Temuan	Nilai (Rp)
1.	Surat Keputusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK Nomor 14.TP.04-2016/XII/2016.SKPc tentang pencatatan kerugian Negara tanggal 23 Januari 2017	LHP BPK RI No.212/S/XVII I.PDG/11/2009	Neneng Elis Herlina, S.Si NIP.13691026200604 2001	Ketekoran Kas pada kas di bendahara pengeluaran SKPD Badan Lingkungan Hidup Tahun 2008 yang sampai pada LKPD Tahun 2014 berada pada Akun Kas di Bendahara Pengeluaran	287.907.729,00
2.	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 900.1.11.4/01/SKTJM-2026 tanggal 17 April 2026	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Nomor : LAP/05/ATT/ Inspektorat-2025 tanggal 11 Agustus 2025	Budi Yono, S.E. NIP.1971103019940310 04 NIK.1310043010710002	Pencairan SP2D Ganda dengan Kegiatan yang sama pada Sekretariat DPRD dan Pencairan SP2D pada Dinas Pendidikan ke Rekening Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) a.n. Budi Yono Tahun Anggaran 2025.	589.849.590,00
Jumlah					877.757.319,00

Aset lainnya berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp877.757.319,00 terdiri dari :

1. Reklas dari kas di bendahara pengeluaran pada SKPD Badan Lingkungan Hidup yang dahulunya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Tahun 2008 yang sampai pada LKPD Tahun 2014 berada pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran dengan nilai sebesar Rp287.907.729,00. Reklas ini didasari Surat Keputusan Bupati Nomor 189.1/109/KPTS-BUP/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementera. Kasus ini telah diajukan ke Ketua Majelis Tuntutan Perbendaharaan cq. Kaditama Binbangkum BPK RI dengan surat Bupati Nomor 130/468/PEM-2016 tanggal 03 Maret 2016. BPK RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 14.TP.04-2016/XII/2016.SKPc tanggal 23 Januari 2017 tentang Pencatatan Kerugian Negara. Hasil keputusan Badan Pemeriksa Keuangan mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudari Neneng Elis Herlina, S.Si., Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp287.907.729,00.

2. Berkurangnya nilai kas di Kas Daerah sebesar Rp589.849.590,00. Hal ini terjadi berkaitan dengan Kasus an. Budi Yono yang merupakan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Nomor : LAP/05/ATT/Inspektorat-2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pencairan SP2D Ganda dengan Kegiatan yang Sama pada Sekretariat DPRD sebesar Rp132.570.540,00 dan Pencairan SP2D pada Dinas Pendidikan sebesar Rp457.279.050,00 ke Rekening Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) a.n. Budi Yono Tahun Anggaran 2025. Telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 900.1.11.4/01/SKTJM-2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh Budi Yono. Kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya, dan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg, tanggal surat 15 Desember 2025 dan Nomor Surat Pelimpahan B-3202/L.3.24/Ft.1/12/2025. Saat ini status perkara adalah

permohonan banding dari pihak penuntut umum/jaksa. Sehingga pada saat laporan ini disusun masih menunggu keputusan *inkracht* sidang di Pengadilan Negeri Padang.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan pemotongan gaji Budi Yono pada tanggal1 Mei 2026 sebesar Rp2.725.700,00, untuk selanjutnya akan dilakukan pemotongan gaji PNS sampai dengan keputusan pembayaran gaji Budi Yono dihentikan.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.2	**ASET TAK BERWUJUD**	**4.808.780.277,00**	**4.557.476.277,00**

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.808.780.277,00 dan Rp4.557.476.277,00. Penjelasan mengenai perhitungan mutasi aset tak berwujud, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.46
Perhitungan Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (RP)
Saldo Awal per 31 Desember 2025	4.557.476.277,00
Mutasi Tambah	
Belanja Modal	251.304.000,00
Jumlah	**4.808.780.277,00**

Penambahan aset tidak berwujud terdapat pada belanja modal sebesar Rp251.304.000,00 yang terdiri dari :

a. Belanja Modal Aset Tak Berwujud pada Dinas Perhubungan sebesar Rp58.275.000,00
b. Belanja Modal Aset Tak Berwujud pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp193.029.000,00

Rincian aset tak berwujud pada masing-masing OPD diuraikan pada tabel berikut:

Tabel. 5.2.47
Rincian Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025

No	Nama SKPD	JUMLAH (RP)
1	Sekretariat Daerah	145.750.000,00
2	Dinas Perhubungan	391.794.000,00
3	Dinas Kesehatan	367.984.000,00
4	Dinas Pendidikan	925.382.392,00
5	Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	117.746.541,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	142.679.569,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	52.675.000,00
8	Badan Keuangan Daerah	1.954.579.400,00
9	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.500.000,00
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	142.000.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74.870.000,00
12	Dinas Komukasi dan Informatika	485.819.375,00
	Jumlah	**4.808.780.277,00**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.3	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	3.168.970.434,00	2.873.514.683,00

Saldo amortisasi aset tak berwujud Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.168.970.434,00 dan Rp2.873.514.683,00.

Masa manfaat atau umur ekonomisnya ditetapkan selama 10 Tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Tabel. 5.2.48
Daftar Mutasi Amortisasi Per 31 Desember 2025

No	Nama SKPD	Saldo Awal 31 Januari 2024	Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
1	Sekretariat Daerah	88.664.583,00	14.575.000,00	103.239.583,00
2	Dinas Perhubungan	160.497.708,00	27.838.150,00	188.335.858,00
3	Dinas Kesehatan	319.288.508,00	22.333.400,00	341.621.908,00
4	Dinas Pendidikan	700.800.298,00	69.978.707,00	770.779.005,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80.125.259,00	14.267.957,00	94.393.216,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	40.823.125,00	5.267.500,00	46.090.625,00
7	Badan Keuangan Daerah	1.227.432.984,00	102.129.600,00	1.329.562.584,00
8	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	750.000,00	2.750.000,00
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	102.916.667,00	10.500.000,00	113.416.667,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.871.750,00	7.487.000,00	9.358.750,00
11	Dinas Komunikasi dan Informasi	149.093.801,00	20.328.437,00	169.422.238,00
	Jumlah	**2.873.514.683,00**	**295.455.751,00**	**3.168.970.434,00**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.4	ASET TAK BERWUJUD SETELAH AMORTISASI	1.639.809.843,00	1.683.961.594,00

Nilai aset tidak berwujud Tahun 2025 sebesar Rp4.808.780.277,00 dan amortisasi aset tidak berwujud Rp3.168.970.434,00. Dengan demikian nilai aset tidak berwujud netto Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.639.809.843,00 (Rp4.808.780.277,00 - Rp3.168.970.434,00).

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.5	ASET LAIN - LAIN	113.230.130.680,27	225.626.423.917,27

Saldo aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp113.230.130.680,27 dan Rp225.626.423.917,27. Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebesar Rp113.230.130.680,27 terdiri dari aset rusak berat sebesar Rp102.346.377.352,27 Aset yang digunakan pihak lain sebesar Rp8.808.989.328,00 dan aset yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp2.074.764.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Aset Rusak Berat

Aset rusak berat sebesar Rp102.346.377,27 disajikan sebesar nilai buku pada saat aset tersebut dipindahkan dari aset tetap menjadi aset lainnya. Penjelasan mengenai perhitungan mutasi aset rusak berat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.49
Perhitungan Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (RP)
Saldo Awal per 31 Desember 2025	84.342.259.219,27
MUTASI TAMBAH	
Reklasifikasi Aset	19.678.403.133,00
TOTAL PENAMBAHAN	**19.678.403.133,00**
MUTASI KURANG	
Penghapusan	1.649.062.000,00
Reklasifikasi Aset	25.223.000,00
TOTAL PENGURANGAN	**1.674.285.000,00**
JUMLAH ASET RUSAK BERAT PER 31 DESEMBER 2025	**102.346.377.352,27**

Berikut uraian perhitungan mutasi aset rusak berat Tahun Anggaran 2025:

a. Penambahan Aset Rusak Berat

Reklafikasi sebesar Rp19.678.403.133,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada Sekretariat DPRD dengan nilai sebesar Rp547.160.000,00
2) Pada Sekretariat Daerah dengan nilai sebesar Rp3.046.530.580,00
3) Pada Kecamatan Sembilan Koto dengan nilai sebesar Rp33.878.000,00
4) Pada Kecamatan Koto Besar dengan nilai sebesar Rp27.550.000,00
5) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai sebesar Rp7.377.748.140,00
6) Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan nilai sebesar Rp56.174.800,00
7) Pada Dinas Perhubungan dengan nilai sebesar 121.411.328,00
8) Pada Dinas Kesehatan dengan nilai sebesar Rp5.093.853.555,00
9) Pada Dinas Pendidikan dengan nilai sebesar Rp9.697.666,00
10) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp3.360.000,00
11) Pada Dinas Pertanian dengan nilai sebesar Rp2.121.737.314,00
12) Pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan dengan nilai sebesar Rp22.452.000,00
13) Pada Inpektorast Kabupaten dengan nilai sebesar Rp381.000.000,00
14) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan nilai sebesar Rp202.588.603,00
15) Pada Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai sebesar Rp260.931.298,00
16) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nilai sebesar Rp11.935.000,00
17) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan nilai sebesar Rp196.616.849,00
18) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan nilai sebesar Rp43.990.000,00
19) Pada Dinas Komunikasi dan Informasi dengan nilai sebesar Rp119.788.000,00

b. Pengurangan Aset Rusak Berat

1. Penghapusan sebesar Rp1.649.062.000,00 dilakukan dengan cara Penjualan dan Lelang dengan rincian sebagai berikut :
   a) Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp1.101.902.000,00.
   b) Sekretariat DPRD berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp547.160.000,00.

2. Reklasifikasi Aset sebesar Rp25.223.000,00, terdiri dari:
   a) Reklasifikasi aset pada Sekretariat Daerah sebesar Rp7.823.000,00
   b) Reklasifikasi aset pada Kecamatan Koto Besar sebesar Rp6.750.000,00
   c) Reklasifikasi aset pada Dinas Kesehatan sebesar Rp10.650.000,00

2. Aset yang digunakan Pihak Lain sebesar Rp8.808.989.328,00.

Tabel. 5.2.50
Barang Yang Digunakan Pihak Lain

No	Nama SKPD	31 Desember 2025
1.	Sekretariat Daerah	5.308.987.328,00
2.	Kecamatan Pulau Punjung	294.525.000,00
3.	Kecamatan Sitiung	201.870.000,00
4.	Kecamatan Koto Baru	216.973.000,00
5.	Kecamatan Sungai Rumbai	303.525.000,00
6.	Kecamatan Sembilan Koto	164.445.000,00
7.	Kecamatan Timpeh	114.435.000,00
8.	Kecamatan Padang Laweh	168.585.000,00
9.	Kecamatan Tiumang	212.708.000,00
10.	Kecamatan Koto Besar	317.835.000,00
11.	Kecamatan Koto Salak	343.440.000,00
12.	Kecamatan Asam Jujuhan	292.395.000,00
13.	Dinas Perhubungan	160.500.000,00
14.	Dinas Kesehatan	297.500.000,00
15.	Dinas Lingkungan Hidup	411.266.000,00
	JUMLAH	**8.808.989.328,00**

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi barang yang digunakan pihak lain disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.51
Perhitungan Barang Yang Digunakan Pihak Lain Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (RP)
Saldo Awal per 31 Desember 2024	8.603.095.542,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Aset	1.565.717.886,00
Total Penambahan	1.565.717.886,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Aset	1.359.824.100,00
Total Pengurangan	1.359.824.100,00
Jumlah Barang yang Digunakan Pihak Lain 31 Desember 2025	**8.808.989.328,00**

Berikut penjelasan Mutasi Barang yang digunakan pihak lain tahun 2025:

1. Penambahan Barang Yang Digunakan oleh Pihak Lain
   Reklasifikasi Aset Barang pada Sekretariat Daerah yang digunakan pihak lain tahun 2025 sebesar Rp1.565.717.886,00
2. Pengurangan Barang Yang Digunakan Pihak Lain
   Pengurangan Reklas pada aset Yang Digunakan Pihak Lainnya sebesar Rp1.359.824.100,00 terdiri dari :
   a. Reklasifikasi Barang yang digunakan pihak lain ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp891.816.000,00 pada Sekretariat Daerah.
   b. Reklasifikasi Barang yang digunakan pihak lain ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp30.000.000,00 pada Kecamatan Koto Besar.
   c. Reklasifikasi Barang yang digunakan pihak lain ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp438.008.100,00 pada Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya oleh Instansi Vertikal dan Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 5.2.52
Daftar Aset Pinjam Pakai

NO	SKPD	JENIS BMD	JUMLAH	MEREK/TYPE	NO POLISI
I	**Sekretariat Daerah**				
1	Polres Kabupaten Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Nissan X-Trail	BA 1517 V
		Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Mitsubishi / Pajero Sport 2.4L/JEEP	BA 1183 V
2	Kejaksaan Negeri Kabupaten Dharmasraya	Kendaraan Dinas roda 4	1 Unit	Toyota / Avanza 1.5 M/T/	BA 1048 V
		Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Mitsubishi / Pajero Sport Exceed	BA 1148 V
		Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit	Suzuki Thunder	BA 7930 V
		Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Avanza Vellos	BA 1129 V
3	Komando Distrik Militer 0310/SS	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Suzuki Katana	BA 3351 VG
		Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Mitsubishi / Pajero Sport Exceed	BA 1149 V
4	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Innova	BA 5 V
5	LKAAM Kabupaten Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Mitsubishi Kuda	BA 1891 VL
6	Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sumbar	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Hilux	BA 8013 V
7	KORPRI Kab. Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Honda Supra X	BA 6538 VB
8	MUI Kab. Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Suzuki Katana	BA 1854 VG
9	SAMSAT Kab. Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Innova	BA 50 V
10	Badan Pengawasan Pemilu	Meubelair	12 Unit		
		Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit	Honda Supra X	BA 6893 V
11	Kementerian Agama	Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	Kijang Innova	BA 1523 V
12	KAMPUS III UNAND Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Isuzu Panther	BA 1021 V
13	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Fortuner	BA1974 VG
14	Pengadilan Agama	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Innova	BA 5 V (BA 1011 V)
15	Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Innova/ 2.0 G M/T	BA 12 V
II	**Dinas Lingkungan Hidup**				
1	Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung	Kendaraan Roda Tiga (Becak Motor)	1 Unit	Kaisar / Triseda RX	
2	Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung	Kendaraan Roda Tiga (Becak Motor)	1 Unit		
3	Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Dharmasraya	Kendaraan Roda Tiga (Becak Motor)	1 Unit	Happy Motor Cycle Perkasa	
4	Nagari Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1 Unit	Dongfeng	
5	Nagari Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai	Alat Kantor Lainnya	1 Unit	ADK-1500	

NO	SKPD	JENIS BMD	JUMLAH	MEREK/TYPE	NO POLISI
6	Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1 Unit		
7	Blok A Piruko Sitiung,Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1 Unit		
8	Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1 Unit		
III	**Dinas Perhubungan**				
1	Nagari Padang Laweh	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Mitsubishi L300	BA 8903 VN

3. Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat
   Barang yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp132.681.069.156,00 merupakan aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang diserahkan ke masyarakat melalui OPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.2.53
Perhitungan Aset yang akan diserahkan ke masyarakat per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024 *(Audited)*	132.681.069.156,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Aset	130.606.305.156,00
Total Pengurangan	130.606.305.156,00
Jumlah Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025	2.074.764.000,00

Rincian pengurangan aset yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp130.606.305.156,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Reklasifikasi sesama aset lainnya dari aset yang diserahkan ke masyarakat ke aset rusak berat sebesar Rp1.319.140.973,00 dengan rincian sebagai berikut:
b. Reklasifikasi dari aset yang diserahkan ke masyarakat ke aset tetap sebesar Rp129.287.164.183,00

Tabel. 5.2.54
Daftar Aset Yang Diserahkan Kepada Masyarakat

No	OPD	31 Desember 2025
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.868.464.000,00
2	Dinas Perhubungan	206.300.000,00
	Jumlah	**2.074.764.000,00**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.6	**PENYUSUTAN ASET LAIN - LAIN**	**78.264.584.980,81**	**182.859.988.190,61**

Saldo penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp78.264.584.980,81 dan Rp182.859.988.190,61.

Penjelasan mengenai perhitungan penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel. 5.2.55
Perhitungan Penyusutan Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
			Berkurang			Bertambah				
			Penghapusan	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi		
1	Sekretariat DPRD	533.431.421,00	416.883.808,00	0,00	12.802.232,00	0,00	416.883.808,00	0,00	0,00	520.629.189,00
2	Sekretariat Daerah	7.216.274.336,00	1.101.902.000,00	518.527.096,00	499.684.345,00	0,00	4.170.310.252,00	0,00	285.747.780,00	9.552.218.927,00
3	Kecamatan Pulau Punjung	518.779.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.734.000,00
4	Kecamatan Sitiung	293.699.520,00	0,00	0,00	6.972.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.726.833,00
5	Kecamatan Koto Baru	309.040.099,00	0,00	0,00	8.129.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.911.041,00
6	Kecamatan Sungai Rumbai	499.448.311,00	0,00	0,00	7.915.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.532.902,00
7	Kecamatan Sembilan Koto	257.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.878.000,00	0,00	0,00	291.128.000,00
8	Kecamatan Timpeh	213.055.000,00	0,00	0,00	614.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.440.417,00
9	Kecamatan Padang Laweh	224.956.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.956.750,00
10	Kecamatan Tiumang	390.316.000,00	0,00	0,00	1.236.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.079.332,00
11	Kecamatan Koto Besar	484.956.334,00	0,00	36.750.000,00	2.650.000,00	0,00	27.550.000,00	0,00	0,00	473.106.334,00
12	Kecamatan Koto Salak	583.131.475,00	0,00	0,00	59.123.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.008.437,00
13	Kecamatan Asam Jujuhan	390.090.067,00	0,00	0,00	2.416.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.673.400,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111.652.795.357,00	0,00	101.443.726.804,00	751.541.892,04	0,00	6.045.793.650,00	1.137.990.891,04	0,00	16.641.311.202,00
15	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	51.638.652,00	0,00	11.688.015,00	17.753.481,00	0,00	54.013.550,00	0,00	0,00	76.260.706,00
16	Dinas Perhubungan	2.132.816.774,00	0,00	13.082.928,00	797.396.864,00	0,00	105.827.381,00	0,00	0,00	1.428.164.363,00

No	SKPD	Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
			Berkurang			Bertambah				
			Penghapusan	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalihan Status Penggunaan	Reklasifikasi	Koreksi		
17	Dinas Kesehatan	20.328.625.177,05	0,00	10.650.000,00	2.695.797.259,80	0,00	3.644.189.999,00	0,00	42.500.000,00	21.308.867.916,25
18	Dinas Pendidikan	11.391.397.789,56	0,00	0,00	1.809.823.820,00	0,00	9.697.666,00	0,00	0,00	9.591.271.635,56
19	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kepemudaan, dan Olahraga	272.353.520,00	0,00	0,00	6.104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.249.480,00
20	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	317.402.858,00	0,00	0,00	12.565.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.837.208,00
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	1.478.819.661,00	0,00	0,00	298.151.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.668.320,00
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	577.166.814,00	0,00	0,00	14.258.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.908.175,00
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	465.239.255,00	0,00	0,00	15.601.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.637.587,00
24	Dinas Pertanian	12.912.655.406,00	0,00	10.570.276.114,00	338.143.644,00	0,00	937.904.802,00	0,00	0,00	2.942.140.450,00
25	Dinas Pangan dan Perikanan	1.150.778.283,00	0,00	0,00	253.521.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.257.096,00
26	Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	151.415.915,00	0,00	0,00	4.295.353,00	0,00	22.452.000,00	0,00	0,00	169.572.562,00
27	Badan Keuangan Daerah	1.725.529.827,00	0,00	0,00	32.009.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.520.596,00
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	331.757.182,00	0,00	0,00	8.768.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.988.606,00

No	SKPD	Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
			Berkurang			Bertambah				
			Penghapusan	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi		
29	Inspektorat	170.777.000,00	0,00	0,00	516.668,00	0,00	99.785.715,00	0,00	0,00	270.046.047,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	706.772.252,00	0,00	0,00	34.595.278,00	0,00	199.566.089,00	0,00	0,00	871 743.063,00
31	Dinas Lingkungan Hidup	2.670.283.862,00	0,00	305.061.133,00	222.092.296,00	0,00	257.075.464,00	0,00	3.159.999,00	2.403.365.896,00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	154.349.000,00	0,00	0,00	458.333,00	0,00	6.216.146,00	0,00	0,00	160.106.813,00
33	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	310.212.098,00	0,00	0,00	45.269.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.942.819,00
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.160.286.349,00	0,00	0,00	54.345.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.941.075,00
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	395.575.808,00	0,00	0,00	3.322.083,00	0,00	196.616.849,00	0,00	0,00	588.870.574,00
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	136.402.038,00	0,00	0,00	2.756.809,00	0,00	43.990.000,00	0,00	0,00	177.635.229,00
37	Dinas Komunikasi dan Informasi	300.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.673.000,00	0,00	0,00	415.132.000,00
	JUMLAH	**182.859.988.190,61**	**1.518.785.808,00**	**112.909.762.090,00**	**8.022.678.352,84**	**0,00**	**16.386.424.371,00**	**1.137.990.891,04**	**331.407.779,00**	**78.264.584.930,81**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.7	ASET LAIN – LAIN SETELAH PENYUSUTAN	34.965.545.699,46	42.766.435.726,66

Saldo aset lain-lain netto per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp34.965.545.699 dan Rp42.766.435.726,66.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.8	*TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF)	0,00	1.156.963.000,00

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) / Dana Alokasi Umum (DAU) secara non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Nilai TDF per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.156.963.000,00.

V.C.2 KEWAJIBAN

Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.691.796.791,88 mengalami penurunan sebesar Rp1.040.469.186,51 atau -3,28 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.732.265.978,39. Jumlah tersebut terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.2.a Kewajiban Jangka Pendek	**30.691.796.791,88**	**31.732.265.978,39**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga maupun utang perhitungan Pihak ketiga (PFK).

Tabel 5.2.56
Rincian Kewajiban Jangka pendek Per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	140.789.551,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	114.887.626,67	3.032.855.895,36
3	Utang Belanja	25.685.706.465,21	23.667.417.832,03
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.891.202.700,00	4.891.202.700,00
	Jumlah	**30.691.796.791,88**	**31.732.265.978,39**

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.2.a.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	**0,00**	**140.789.551,00**

Utang PFK Tahun 2025

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2025 sebesar Rp0,00

Utang PFK Tahun 2024

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2024 sebesar Rp140.789.551,00 adalah iuran 1% dan 4% atas Jasa Pelayanan pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan berdasar surat BPJS Kesehatan Nomor: 326/II-06/0225 tanggal 14 Februari 2025 dan telah dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp99.403.014,06 sisa sebesar Rp41.386.536,94 dikoreksi sebesar Rp6.856.958,00 sehingga terdapat sisa utang tahun 2024 yang belum dibayarkan sebesar Rp34.529.578,00 pada Puskesmas Koto Baru yang direklas ke utang belanja pegawai untuk iuran BPJS Kesehatan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.2.a.2 Pendapatan Diterima Dimuka	**114.887.626,67**	**3.032.855.895,36**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp114.887.626,67 adalah merupakan pendapatan diterima dimuka atas kerja sama pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian sewa gedung ATM pada beberapa SKPD, sewa untuk tanah dan bangunan, sewa tanah menara telekomunikasi, sewa Rusunawa dan lebih salur klaim BPJS Kesehatan pada BLUD Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.57
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. Tahun 2025
1.	**Dinas Kesehatan**				
a.	ATM Bank Nagari Cabang Koto Baru	PKS/007/KB/12-2021 dan 010/ 2646/ Umum-Dinkes/XII/ 2021, 20 /6/2016 sd 20/6/2021	20/06/2021 s.d. 31/12/2025		13.596.059,12
		5 Tahun, 1827 hari	01/01/2026 s.d. 20/06/2026	1.403.940,88	
		Rp15.000.000,00			
b.	Pendapatan Diterima dimuka Rumah Dinas Sitiung II			18.000,00	
	Jumlah			**1.421.940,88**	**13.596.059,12**
2.	**RSUD Sungai Rumbai**				
	RSUD Sungai Rumbai			1.572.300,00	
	Jumlah			**1.572.300,00**	**0,00**
3.	**Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan**				
	Pendapatan Diterima dimuka dari Rusunawa			7.882.258,06	
	Jumlah			**7.882.258,06**	**0,00**
4.	**Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu**				
	Pendapatan Diterima dimuka IMB			18.300.000,00	
	Jumlah			**18.300.000,00**	**0,00**
5.	**Sekretariat Daerah**				
		PKS/129/PL/12-2022 01/12/2022 s.d 30/11//2027	01/12/2022 s.d. 31/12/2025		12.343.921,00
		5 Tahun, 1.826 Hari	01/01/2026 s.d. 31/12/2026	3.997.809,42	
		Rp20.000.000,00	01/01/2027 s.d. 30/11/2027	3.658.269,44	
	Jumlah			**7.656.078,86**	**12.343.921,14**
6.	**Badan Keuangan Daerah**				
a.	Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi	Nomor:0363/HK 810/J DMT-1063000/2024	17/06/2023 s.d. 31/12/2025		31.240.485,22
		5 Tahun	01/01/2026 s.d. 31/12/2026	12.274.248,77	
		1.827 hari	01/01/2027 s.d. 31/12/2027	12.274.248,77	
		Rp61.438.500,00	01/01/2028 s.d. 16/06/2028	5.649.517,24	
	Jumlah			**30.198.014,78**	**31.240.485,22**
b.	ATM Bank Nagari pada MPP di DPMPTSP	Nomor:100.3.7/10/BKD/VIII/2024	13/05/2024 s.d. 31/12/2025		5.891.625,62
		5 Tahun	01/01/2026 s.d. 31/12/2026	3.596.059,11	
		1.827 hari	01/01/2027 s.d. 31/12/2027	3.596.059,11	
		Rp18.000.000,00	01/01/2028 s.d. 31/12/2028	3.605.911,33	
			01/01/2029 s.d. 13/05/2029	1.310.344,83	
	Jumlah			**12.108.374,38**	**5.891.625,62**
c.	Perjanjian sewa untuk ATM Bank Nagari pada RSUD Sungai Dareh	PKS/ 1013/PL/11-2025	07/11/2025 s.d. 31/12/2025		1.109.580,30
		5 Tahun	01/01/2026 s.d. 31/12/2026	7.363.578,33	
			01/01/2027 s.d. 31/12/2027	7.363.578,33	

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. Tahun 2025
		1.827 hari	01/01/2028 s.d. 31/12/2028	7.383.752,51	
		Rp36.858.240,00	01/01/2029 s.d. 13/05/2029	7.363.578,33	
			01/01/2030 s.d. 07/11/2030	6.274.172,22	
	Jumlah			35.748.659,70	1.109.580,30
	Total (1+2+3+4+5+6)			114.887.626,67	64.181.671,39

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp114.887.626,67 terdapat pada beberapa SKPD, antara lain:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.421.940,88 terdiri dari:
   - Pendapatan Diterima dimuka sebesar Rp1.403.940,88 merupakan sewa ATM Bank Nagari Cabang Koto Baru yang berlokasi di komplek Puskesmas Koto Baru, dengan Kontrak Nomor PKS/007/KB/12-2021 dan 010/2646/Umum-Dinkes/XII/2021, jangka selama 5 tahun dari tanggal 20 Juni 2021 s.d 20 Juni 2026 dengan nilai Kontrak sebesar Rp15.000.000,00.
   - Pendapatan diterima dimuka atas sewa Rumah Dinas pada Puskesmas sitiung II sebesar Rp18.000,00.

2. BLUD RSUD Sungai Rumbai
   Pendapatan diterima dimuka pada RSUD Sungai Rumbai sebesar Rp1.572.300,00 merupakan lebih salur klaim BPJS Kesehatan bulan April s.d Juli 2023 yang akan dikompensasikan pada pembebanan November atau Desember 2023 sesuai dengan berita acara nomor 444/1545/RSUD-SR/XI/2023 tetapi belum dilakukan pemotongan oleh BPJS Kesehatan sampai akhir tahun 2025.
3. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
   Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp7.882.258,06 merupakan sewa Rusunawa Sitiung.
4. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
   Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp18.300.000,00 merupakan Pendapatan dari IMB tahun 2021.
5. Sekretariat Daerah
   Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp7.656.078,86 merupakan sewa ATM Bank Nagari yang berlokasi di Komplek Kantor Bupati dengan kontrak Nomor : PKS/129/PL/12-2022 tanggal 01 Desember 2022, jangka waktu selama 5 tahun, dari tanggal 01 Desember 2022 s.d 30 November 2027 dengan nilai kontrak sebesar Rp20.000.000,00.
6. Badan Keuangan Daerah
   Pendapatan Pendapatan Diterima dimuka sebesar Rp78.055.048,87 terdiri dari:
   a. Pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah untuk pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi TBK sebesar Rp30.198.014,78 yang berlokasi di Jorong Koto Agung Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar, kontrak Nomor : 0363/HK810/JDMT-1063000/2024, jangka waktu selama 5 Tahun, dari tanggal 17 Juni 2023 s.d 16 Juni 2028 dengan nilai kontrak sebesar Rp61.438.500,00.
   b. Pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM Bank Nagari yang terletak di Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu sebesar Rp12.108.374,38 dengan kontrak PKS Nomor : 100.3.7/10.BKD/VIII/2024, jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal 13 Mei 2024 s.d 13 Mei 2029 sebesar Rp18.000.000,00.

c. Pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM Bank Nagari yang terletak pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp35.748.659,70 dengan Nomor : PKS/1013 /PL/11-2025, jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal 07 November 2025 s.d 07 November 2030 sebesar Rp36.858.240,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.2.a.3 Utang Belanja	**25.685.706.465,21**	**23.667.417.832,03**

Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp25.685.706.465,21 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.2.58
Utang Belanja Tahun 2025

No	Utang Belanja	Uraian	Saldo Utang
a.	**Belanja Pegawai**		
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	Utang Honorarium Tenaga Teknis/P3K/ PHO	14.250.000,00
2	BLUD Puskesmas	Utang pegawai (Jaspel ASN)	807.340.915,64
		Jumlah I	**821.590.915,64**
b.	**Belanja Barang Jasa**		
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	Utang Barang dan Jasa	22.821.800.303,12
2	BLUD RSUD Sungai Rumbai	Utang Barang dan Jasa	1.691.957.936,32
3	BLUD Puskesmas	Utang Barang dan Jasa	312.124.810,13
		Jumlah II	**24.825.883.049,57**
c.	**Belanja Modal**		
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	Utang belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	3.300.000,00
2	Dinas PUPR	Utang Belanja Modal	34.932.500,00
		Jumlah III	**38.232.500,00**
		JUMLAH (I+II+III)	**25.685.706.465,21**

	Tahun 2025(Rp)	Tahun 2024(Rp)
a. Utang Belanja Pegawai	**821.590.915,64**	**9.024.225.800,10**

Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp821.590.915,64 terdiri dari :

1. BLUD RSUD Sungai Dareh
   Utang Belanja Pegawai pada BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2025 sebesar Rp14.250.000,00 merupakan utang Honorarium Tenaga Teknis/P3K/PHO.

2. BLUD Puskesmas
   Utang Belanja Pegawai BLUD Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp807.340.915,64 merupakan utang jasa pelayanan sebesar Rp772.811.337,64 dan iuran BPJS Kesehatan pada Puskesmas Koto Baru sebesar Rp34.529.578,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.59
Utang Belanja Pegawai BLUD Puskesmas Tahun 2025 dan 2024

No	Puskesmas	Utang Pegawai 2025	Utang Pegawai 2024
1	RSUD Sungai Dareh	0,00	0,00
2	RSUD Sungai Rumbai	50.128.940,00	0,00
3	Sungai Rumbai	60.672.502,00	36.020.740,00
4	Koto Besar	45.961.760,56	70.757.528,84
5	Sungai Limau	20.193.143,04	11.366.797,00
6	Koto Baru	195.547.107,34	79.271.045,20

No	Puskesmas	Utang Pegawai 2025	Utang Pegawai 2024
7	Tiumang	0,00	29.426.734,00
8	Padang Laweh	73.996.896,00	48.326.063,00
9	Sitiung I	95.304.943,00	38.865.601,00
10	Timpeh	0,00	0,00
11	Gunung Medan	44.155.725,00	2.887.638,00
12	Sitiung II	121.611.700,00	2.800.000,00
13	Beringin Sakti	30.809.632,00	110.521.098,00
14	Silago	37.907.718,70	99.044.333,06
15	Sungai Dareh	17.908.848,00	3.488.222,00
16	Sialang	9.952.000,00	43.866.520,00
17	Labkesda	3.190.000,00	0,00
Jumlah		807.340.915,64	576.642.320,10

Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp9.024.225.800,10 terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan
   Utang belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.503.526.200,00 adalah merupakan utang belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp884.776.200,00 dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp618.750.000,00 untuk Triwulan IV Tahun 2024 yang akan *Carry Over* pada Tahun 2025, karena adanya KMK Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian DAK Non Fisik Dana Tunjangan Guru ASND dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun 2024 yang telah dibayarkan pada tahun 2025 dengan Nomor SP2D 13.10/04.0/000049/LS/ 1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/6/2025 tanggal 28 Mei 2025 dan SP2D Nomor 13.10/04.0/000050/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/6/2025 tanggal 28 Mei 2025.
2. BLUD Puskesmas
   Utang belanja BLUD Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp576.642.320,10,00 merupakan utang jasa pelayanan dan telah dibayarkan pada tahun 2025.
3. Utang Belanja RSUD Sungai Dareh
   Utang pada BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2024 sebesar Rp6.944.057.280,00 telah dibayarkan pada tahun 2025.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
b.	**Utang Belanja Barang dan Jasa**	**24.825.883.049,57**	**14.112.668.693,93**

Utang belanja Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.825.883.049,57 terdiri dari :

1. BLUD RSUD Sungai Dareh
   Utang Belanja pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp22.821.800.303,12 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.60
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Sungai Dareh

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	15.392.441.646,00	1.260.972.499,00
2	Belanja Bahan Pakai Habis/ Kedokteran	0,00	3.438.317.983,00
3	Belanja Bahan Obat	2.768.883.200,12	5.361.883.708,00
4	Belanja Bahan Laboratorium	1.119.606.972,00	1.212.919.896,00
5	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	2.898.849.970,00	0,00

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
6	Belanja Rujukan Parsial	22.025.000,00	60.900.000,00
7	Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Limbah B3)	285.604.956,00	347.014.454,00
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	6.000.000,00
9	Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Berlangganan	0,00	39.406.850,00
10	Belanja ATK	0,00	86.349.000,00
11	Belanja Cetak	0,00	293.400.714,00
12	Belanja Alat Listrik	332.000,00	36.257.300,00
13	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	230.000,00	0,00
14	Belanja Alat/bahan Kegiatan Kantor lainnya	2.518.801,00	114.511.500,00
15	Belanja isi tabung gas - gas medis	226.488.500,00	201.789.800,00
16	Belanja Pemeliharaan AC	0,00	82.978.050,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Khusus	21.572.235,00	38.957.383,00
18	Belanja Pemeliharaan Rutin Faximile/Internet	881.000,00	58.498.100,00
19	Belanja Pemeliharaan Listrik Ruang Hemodialisa Lantai 1	0,00	133.178.500,00
20	Belanja Pemeliharaan *Lift*	12.432.000,00	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Tower dan Jaringan	1.990.000,00	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Alkes	8.093.232,00	0,00
23	Belanja Pemeliharaan rutin instalasi air	600.000,00	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Komputer	378.000,00	0,00
25	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	10.483.000,00	0,00
26	Belanja Kertas dan *Cover*	21.367.500,00	0,00
27	Belanja Bahan Komputer	3.077.000,00	0,00
28	Belanja Konsultan Konstruksi	23.945.291,00	0,00
	Jumlah	**22.821.800.303,12**	**12.773.335.737,00**

2. BLUD RSUD Sungai Rumbai

Utang BLUD RSUD Sungai Rumbai Tahun 2025 sebesar Rp1.691.957.936,32 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.61
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Sungai Rumbai

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Utang Jasa Tenaga Kesehatan	881.582.360,00	481.489.765,00
2	BHP (Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran)	310.072.370,00	223.882.758,47
3	Utang obat- obatan	473.892.766,00	412.016.444,67
4	Utang operasional Ambulance	16.060.800,00	15.229.200,00
5	Utang izin Operasional Rontgen	0,00	3.330.000,00
6	Pemeliharaan Alat Kesehatan	10.349.640,00	0,00
	Jumlah	**1.691.957.936,32**	**1.135.948.168,14**

3. BLUD Puskesmas

Utang BLUD Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp312.124.810,13 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.62
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas

No	Nama Puskesmas	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Puskesmas Sungai Rumbai	1.036.546,00	253.260,00
2	Puskesmas Koto Besar	10.772.882,26	41.203.270,56
3	Puskesmas Sungai Limau	8.654.204,16	4.871.484,00
4	Puskesmas Koto Baru	42.122.448,86	35.840.954,80
5	Puskesmas Tiumang	0,00	8.706.777,00
6	Puskesmas Padang Laweh	18.584.127,00	27.268.412,00
7	Puskesmas Sitiung I	20.588.907,00	18.927.556,00
8	Puskesmas Timpeh	109.880.821,00	41.680.860,00
9	Puskesmas Gunung Medan	3.049.969,00	525.522,00
10	Puskesmas Sitiung II	12.430.000,00	0,00
11	Puskesmas Beringin Sakti	73.615.000,00	0,00
12	Puskesmas Silago	8.199.904,85	16.163.212,43
13	Puskesmas Sungai Dareh	0,00	0,00
14	Puskesmas Sialang	0,00	7.943.460,00
15	Labkesda	3.190.000,00	0,00
	Jumlah	312.124.810,13	203.384.788,79

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.112.668.693,93 terdiri dari :

1. BLUD Puskesmas

   Utang belanja Barang dan jasa pada BLUD Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp1.339.332.956,93 telah dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp1.322.431.319,93 dan sisanya sebesar Rp16.901.637,00 merupakan utang belanja barang dan jasa pada RSUD Sungai Rumbai berupa belanja obat sebesar Rp12.582.507,00 dan Belanja Barang Habis Pakai (BHP) sebesar Rp4.319.130,00.

2. BLUD RSUD Sungai Dareh

   Utang belanja pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp12.773.335.737,00 telah dibayar pada tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
c. Utang Belanja Modal	**38.232.500,00**	**530.523.338,00**

Utang Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp 38.232.500,00 terdiri dari :

1. BLUD RSUD Sungai Dareh
   Utang Belanja Modal pada BLUD RSUD Sungai Dareh tahun 2025 sebesar Rp3.300.000,00 merupakan utang belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi berupa pengadaan Sumur gali (Polongan dan jasa Pemasangan).
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   Utang Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp34.932.500,00 merupakan sisa utang tahun 2021 yang belum dibayarkan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :
   a. Sisa pembayaran dari Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan (DAK Reguler) Paket IV Nomor Kontrak 620.04/PRC/PEMB-JLN/DAK/BM-DPUPR/IX-2020 oleh perusahaan konsultan CV. Diazka Konsultan sebesar Rp19.970.000,00.

b. Sisa pembayaran termin final 100% kegiatan pembangunan gedung kantor pekerjaan review perencanaan pembangunan Landscape Mesjid Agung Dharmasraya Nomor Kontrak 640/09/014-SL/PRC/PGK-APBD/CK-DPUPR/2020 oleh CV Gatra Consultant sebesar Rp14.962.500,00.

Utang Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp530.523.338,00 terdiri dari :

1. BLUD RSUD Sungai Dareh
   Utang Belanja Modal pada BLUD RSUD tahun 2024 sebesar Rp296.657.038,00 yang telah dibayarkan pada tahun 2025.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   Utang Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp34.932.500,00 merupakan sisa utang tahun 2021 yang belum dibayarkan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :
   a. Sisa pembayaran dari Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan (DAK Reguler) Paket IV Nomor Kontrak 620.04/PRC/PEMB-JLN/DAK/BM-DPUPR/IX-2020 oleh perusahaan konsultan CV. Diazka Konsultan sebesar Rp19.970.000,00.
   b. Sisa pembayaran termin final 100% kegiatan pembangunan gedung kantor pekerjaan review perencanaan pembangunan Landscape Mesjid Agung Dharmasraya Nomor Kontrak 640/09/014-SL/PRC/PGK-APBD/CK-DPUPR/2020 oleh CV Gatra Consultant sebesar Rp14.962.500,00.

3. Sekretariat Daerah
   Utang Belanja Modal tahun 2024 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp198.933.800,00 terdiri dari :
   a. Utang Belanja Modal sebesar Rp184.097.750,00 atas Pekerjaan Rehab Ringan Bangunan Gedung Kantor pada Sekretariat Daerah, berdasarkan Kontrak Adendum Nomor : 000.1.8.3/761/Add I/Umum/Setda/XII-2024 dengan nilai kotrak sebesar Rp1.798.790.900,00, fisik pekerjaan per 31 Desember 2024 baru selesai sebesar 94,49% sedangkan pembayaran per 31 Desember 2024 baru terealisasi sebesar 89,77%. Pekerjaan diselesaikan 100% setelah lewat tahun 2024, sehingga nilai utang yang timbul tercatat di Neraca menjadi sebesar Rp184.097.750,00 telah dibayarkan pada tahun 2025 dengan SP2D Nomor 13.10/04.0/000168/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 tanggal 18 November 2025
   b. Utang Perencanaan Rehab Ringan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp14.836.050,00 berdasarkan SPK Nomor : 027/02/SPK/SETDA- UMUM/V-2024 dengan nilai kotrak sebesar Rp98.907.000,00 tanggal 6 Mei 2024. Pada tanggal 31 Desember 2024 terealisasi pembayaran baru 85%, sisanya 15% tercatat sebagai utang tahun 2024 yang telah dibayarkan pada tahun 2025 dengan SP2D Nomor : 13.10/04.0/000167/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 tanggal 18 November 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.2.a.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	**4.891.202.700,00**	**4.891.202.700,00**

Utang jangka pendek lainnya Tahun 2025 berupa utang retensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kepada PT Nindya Karya atas Pembangunan Masjid Agung yang muncul karena adanya pekerjaan yang belum diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar Rp4.891.202.700,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dibayarkan sampai saat ini .

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.2.b Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.3 EKUITAS	**2.388.311.446.511,62**	**2.421.166.191.465,57**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Total Ekuitas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.388.311.446.511,62 diperoleh dari ekuitas awal sebesar Rp2.421.166.191.465,57 ditambah surplus/defisit laporan operasional sebesar Rp(31.222.873.330,10) ditambah dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp (1.631.871.623,85)

Ekuitas Awal	2.421.166.191.465,57
Surplus/Defisit LO	(31.222.873.330,10)
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	(1.631.871.623,85)
Ekuitas Akhir	**2.388.311.446.511,62**

V.D. LAPORAN OPERASIONAL

V.D.1. PENDAPATAN – LO

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
7.	PENDAPATAN	984.724.400.159,98	1.022.365.976.055,99	(37.641.575.896,01)

Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan LO Tahun 2025 sebesar Rp984.724.400.159,98 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.022.365.976.055,99, terdapat penurunan sebesar Rp37.641.575.896,01 atau -3,68% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
7.	PENDAPATAN	984.724.400.159,98	1.022.365.976.055,99	(37.641.575.896,01)
7.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	143.768.253.221,62	120.084.773.552,20	23.683.479.669,42
7.2.	Pendapatan Transfer	780.316.025.936,00	863.339.185.252,00	(83.023.159.316,00)
7.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	60.640.121.002,36	38.942.017.251,79	21.698.103.750,57

V.D.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.	Pendapatan Asli Daerah	143.768.253.221,62	120.084.773.552,20	23.683.479.669,42

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar Rp23.683.479.669,42 atau 19,72%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	143.768.253.221,62	120.084.773.552,20	23.683.479.669,42
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	56.677.138.430,00	27.218.922.589,78	29.458.215.840,22
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	77.511.074.989,69	70.063.061.076,91	7.448.013.912,78
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.058.604.307,00	10.863.659.575,00	(5.805.055.268,00)
7.1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	4.521.435.494,93	11.939.130.310,51	(7.417.694.815,58)

V.D.1.a.1 Pendapatan Pajak Daerah

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	56.677.138.430,00	27.218.922.589,78	29.458.215.840,22

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar Rp29.458.215.840,22 atau 108,23%.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.3
Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah antara LRA dan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Pajak Daerah	**54.317.593.473,00**	**56.677.138.430,00**	**2.359.544.957,00**
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	351.380.547,00	344.963.078,00	(6.417.469,00)
Pajak Air Tanah	126.709.052,00	126.709.052,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	596.315.895,00	596.315.895,00	0,00
PBBP2	3.314.830.211,00	5.617.651.972,00	2.302.821.761,00
BPHTB-Pemindahan Hak	4.089.558.785,00	4.089.558.785,00	0,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	593.121.670,00	593.121.670,00	0,00
PBJT-Restoran	1.530.491.037,00	1.530.491.037,00	0,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	13.914.942.804,00	13.978.083.469,00	63.140.665,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	624.182.239,00	624.182.239,00	0,00
PBJT-Hotel	382.299.133,00	382.299.133,00	0,00
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	21.825.900,00	21.825.900,00	0,00
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	22.207.900,00	22.207.900,00	0,00
Opsen PKB	16.776.873.700,00	16.776.873.700,00	0,00
Opsen BBNKB	11.967.654.600,00	11.967.654.600,00	0,00

Penjelasan perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO jumlah sebesar Rp2.359.544.957,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.4
Selisih Pendapatan Pajak Daerah antara LRA dan LO Tahun 2025

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Penambahan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	12.651.375,00	6.233.906,00	(6.417.469,00)
Penerimaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.314.830.211,00	0,00	(3.314.830.211,00)
Penambahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	5.317.967.018,00	5.317.967.018,00
Koreksi penambahan piutang PBB tahun 2025 disebabkan adanya perubahan Data Objek Pajak		309.137.069,00	309.137.069,00
Koreksi pengurangan piutang PBB tahun 2025 disebabkan lebih setor pajak PBB yang tidak terakomodir pada sistem PBB	9.452.115,00		(9.452.115,00)
Penerimaan piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	1.250.349.347,00	0,00	(1.250.349.347,00)
Penambahan piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	1.313.490.012,00	1.313.490.012,00
JUMLAH	**4.587.283.048,00**	**6.946.828.005,00**	**2.359.544.957,00**

Penjelasan selisih tabel diatas diuraikan sebagai berikut:

a. Penerimaan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Tahun 2024 sebesar Rp12.651.375,00 dan penambahan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp6.233.906,00.
b. Adanya penambahan Piutang PBB pada awal Tahun 2025 sesuai dengan SKP sebesar Rp5.317.967.018,00 dan penerimaan Piutang selama Tahun 2025 sebesar Rp3.314.830.211,00.
c. Adanya koreksi penambahan piutang PBB Tahun 2025 disebabkan adanya perubahan Data Objek Pajak sebesar Rp309.137.069,00.
d. Adanya koreksi pengurangan piutang PBB tahun 2025 disebabkan lebih setor pajak PBB yang tidak terakomodir pada sistem PBB sebesar Rp9.452.115,00
e. Penerimaan Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Tahun 2024 yang diterima Tahun 2025 sebesar Rp1.250.349.347,00 dan penambahan Piutang Tahun 2025 sebesar 1.313.490.012,00.

V.D.1.a.2 Pendapatan Retribusi Daerah

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**77.511.074.989,69**	**70.063.061.076,91**	**7.448.013.912,78**

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar Rp7.448.013.912,78 atau 10,63%.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.5
Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah antara LRA dan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	**73.178.734.847,00**	**77.511.074.989,69**	**4.332.340.142,69**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	4.188.313.600,00	4.237.601.300,00	49.287.700,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	64.839.085.207,00	68.855.238.831,00	4.016.153.624,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	370.049.100,00	376.445.000,00	6.395.900,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	361.220.000,00	405.236.000,00	44.016.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	97.825.000,00	97.825.000,00	0,00
Retribusi Los-LO	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	49.590.000,00	49.590.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO	72.938.100,00	269.874.800,00	196.936.700,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	7.000.000,00	8.800.000,00	1.800.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	43.140.000,00	43.140.000,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	1.358.919.440,00	1.376.669.658,69	17.750.218,69
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.717.524.400,00	1.717.524.400,00	0,00

Penjelasan perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO jumlah sebesar Rp4.332.340.142,69 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.6

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah antara LRA dan LO Tahun 2025

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas :	**497.764.000,00**	**547.051.700,00**	**49.287.700,00**
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	497.764.000,00	546.138.200,00	48.374.200,00
Biaya Pemotongan Adm Bank Transfer BPJS ke Rekening BLUD Puskesmas Tahun 2025	0,00	913.500,00	913.500,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah :	**5.201.544.518,00**	**9.217.698.142,00**	**4.016.153.624,00**
Piutang RSUD Sungai Dareh	4.588.216.749,00	5.839.586.462,00	1.251.369.713,00
Piutang RSUD Sungai Rumbai	601.244.869,00	665.009.704,00	63.764.835,00
RSUD Sungai Dareh - Pengurangan pembayaran utang atas klaim BPJS tahun 2024 pada RSUD Sungai Dareh	12.082.900,00	0,00	(12.082.900,00)
RSUD Sungai Rumbai - Pengurangan pendapatan diterima dimuka atas Pembayaran utang kelebihan klaim hasil audit	0,00	48.143.876,00	48.143.876,00
Biaya Pemotongan Adm Bank Transfer BPJS ke Rekening BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2025	0,00	710.700,00	710.700,00
Biaya Pemotongan Adm Bank Transfer BPJS ke Rekening BLUD RSUD Sungai Rumbai Tahun 2025	0,00	174.000,00	174.000,00
RSUD Sungai Dareh -Pengurangan pendapatan diterima dimuka dan Pembayaran utang kelebihan klaim hasil audit sesuai dengan Berita Acara Hasil Audit Administrasi Klaim atas Pembayaran Kelebihan Biaya Pelayanan Kesehatan Nomor 244/BA/II-06/1124, Nomor 800.1.13.1/01/RSUD SR-2025) yang telah dipotong pada klaim BPJS bulan Januari 2025	0,00	2.662.502.400,00	2.662.502.400,00
RSUD Sungai Rumbai - Pengurangan pendapatan diterima dimuka dan Pembayaran utang kelebihan klaim hasil audit sesuai dengan Berita Acara Hasil Audit Administrasi Klaim atas Pembayaran Kelebihan Biaya Pelayanan Kesehatan Nomor 244/BA/II-06/1124, Nomor 800.1.13.1/01/RSUD SR-2025) yang telah dipotong pada klaim BPJS bulan Januari 2025	0,00	1.571.000,00	1.571.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis :	**0,00**	**6.395.900,00**	**6.395.900,00**
Penambahan Piutang Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00
Biaya Pemotongan Adm Bank Transfer BPJS ke Rekening Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun 2025	0,00	15.900,00	15.900,00
Dinas Lingkungan Hidup - Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	**9.326.000,00**	**53.342.000,00**	**44.016.000,00**
Dinas PUPR - Piutang Air Minum UPT SPAM - Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	**20.939.500,00**	**217.876.200,00**	**196.936.700,00**
Dinas Kumperdag - Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah :	**52.162.098,06**	**69.912.316,75**	**17.750.218,69**
Dinas Kesehatan - Pendapatan retribusi daerah diterima dimuka ATM Bank Nagari dengan Nomor Kontrak PKS/007/KB/12-2021 dan 010/2646/Umum-Dinkes/XII/2021, jangka waktu 20 Juni 2021 s.d 20 Juni 2026	0,00	2.996.715,93	2.996.715,93
Dinas Kesehatan - Pendapatan retribusi daerah diterima dimuka atas kelebihan bayar rumah dinas Puskesmas Sitiung II	18.000,00	0,00	(18.000,00)
Dinas Pendidikan - Piutang retribusi pemanfaatan aset daerah (rumah dinas)	0,00	27.564.000,00	27.564.000,00
Dinas Kesehatan - Piutang retribusi pemanfaatan aset daerah (rumah dinas)	0,00	411.000,00	411.000,00
Dinas Perkimtan - Piutang retribusi pemanfaatan aset daerah (rusunawa)	7.403.600,00	11.250.000,00	3.846.400,00

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Perkimtan - Pendapatan Diterima dimuka dari Rusunawa	7.882.258,06	6.712.903,23	(1.169.354,83)
RSUD Sungai Dareh - Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa untuk Payment Poin pada RSUD Sungai Dareh kontrak nomor 445/29/RSUD-2021 jangka waktu 16 November 2021 s.d 16 November 2024	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa ATM Bank Nagari Pulau Punjung di kantor Bupati dgn kontrak nomor PKS/129/PL/12-2022 jangka waktu 1 Des 2022 s.d 30 Novembei 2027	0,00	3.997.809,42	3.997.809,42
BKD - Pendapatan diterima dimuka atas Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi dengan kontrak nomor 0363/HK 810/J DMT-1063000/2024 jangka waktu 17 Juni 2023 s.d 16 Juni 2028	0,00	12.274.248,77	12.274.248,77
BKD - Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa untuk ATM Bank Nagari' pada MPP di DPMPTSP dengan kontrak nomor 100.3.7/10/BKD/VIII/2024 jangka waktu 13 Mei 2024 s.d 13 Mei 2029	0,00	3.596.059,11	3.596.059,11
BKD - Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa untuk ATM Bank Nagari' pada RSUD Sungai Dareh dengan kontrak nomor 100.3.7/10/BKD/VIII/2024 jangka waktu 7 Nov 2025 s.d 7 Nov 2030	36.858.240,00	1.109.580,29	(35.748.659,71)
JUMLAH	**5.781.736.116,06**	**10.114.076.258,75**	**4.332.340.142,69**

V.D.1.a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**	**5.058.604.307,00**	**10.863.659.575,00**	**(5.805.055.268,00)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp5.805.055.268,00 atau -53,44%.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah-LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.7
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LRA dan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**5.529.319.459,00**	**5.058.604.307,00**	**(470.715.152,00)**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.529.319.459,00	5.058.604.307,00	(470.715.152,00)

Penjelasan perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO jumlah sebesar Rp470.715.152,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas Deviden PT.BPR Pulau Punjung Tahun 2024 sebesar Rp14.972.830,00.
2. Penambahan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas Deviden PT.BPR Pulau Punjung Tahun 2025 sebesar Rp16.636.220,00.
3. Penerimaan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden Bank Nagari Tahun 2024 sebesar Rp5.514.346.629,00.

4. Penambahan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden Bank Nagari Tahun 2024 sebesar Rp5.041.968.087,00.

V.D.1.a.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.4	**Pendapatan Asli Daerah Lainnya**	**4.521.435.494,93**	**11.939.130.310,51**	**(7.417.694.815,58)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp7.417.694.815,58 atau -62,13%.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang sah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya -LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.8
Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya antara LRA dan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	**4.436.214.917,65**	**4.521.435.494,93**	**85.220.577,28**
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	290.794.000,00	52.110.476,00	(238.683.524,00)
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	729.488.090,00	729.488.090,00	0,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	112.607.358,46	112.607.358,46	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	2.200.602.481,19	2.524.297.782,47	323.695.301,28
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	582.407.951,00	582.392.751,00	(15.200,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	32.086.600,00	32.086.600,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	315.405,00	315.405,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	236.151,00	236.151,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	331.063,00	331.063,00	0,00
Pendapatan Denda PBBP2-LO	82.801.414,00	82.801.414,00	0,00
Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO	1.846.050,00	1.846.050,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	2.717.236,00	2.717.236,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	2.185.700,00	2.185.700,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	74.227,00	74.227,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen PKB-LO	156.786.100,00	156.786.100,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan-LO	50.000,00	50.000,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -Pemanfaatan Aset Daerah-LO	2.538.480,00	2.762.480,00	224.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.748.952,00	2.748.952,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	201.952.826,00	201.952.826,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	5.798.400,00	5.798.400,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	27.846.433,00	27.846.433,00	0,00

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS-LO			

Penjelasan perbedaan Lain-lainPendapatan Asli Daerah yang sah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO jumlah sebesar Rp85.220.577,28 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.9
Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya antara LRA dan LO Tahun 2025

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Reklas pendapatan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang ke Surplus penjualan aset nonlancar	**238.683.524,00**	**0,00**	**(238.683.524,00)**
Penjualan kendaraan dinas operasional sebanyak 3 unit, dengan rincian sebagai berikut:			
Sedan merk/type Honda/Accord CR2 2.4 VTIL AT Tahun 2016, disetor ke kasda tanggal 23 April 2025 sebesar Rp60.216.400,00 dengan nilai buku Rp0,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp60.216.400,00.	60.216.400,00	0,00	(60.216.400,00)
Mini Bus merk/type Toyota/Fortuner 2.5 G A/T4 X 4 Tahun 2014, disetor ke kasda tanggal 15 April 2025 sebesar Rp58.072.800,00 dengan nilai buku Rp0,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp58.072.800,00.	58.072.800,00	0,00	(58.072.800,00)
Mini Bus merk/type Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L Dakar H, disetor ke kasda tanggal 22 April 2025 sebesar Rp159.354.800,00 dengan nilai buku Rp52.110.476,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp107.244.324,00.	107.244.324,00	0,00	(107.244.324,00)
Penjualan sisa bongkaran atap seng gedung SMP Negeri 1 Pulau Punjung disetor ke kasda tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)
Penjualan persediaan barang habis pakai pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang disetor ke kasda tanggal 27 Mei 2025 sebesar Rp1.000.000,00.	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 13 Januari 2025 sebesar Rp1.700.000,00 melalui Nagari Virtual Account (NVA).	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)
Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 21 Maret 2025 sebesar Rp3.000.000,00 melalui Nagari Virtual Account (NVA).	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 3 November 2025 sebesar Rp2.000.000,00 melalui Nagari Virtual Account (NVA).	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp950.000,00 melalui Nagari Virtual Account (NVA).	950.000,00	0,00	(950.000,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	**746.395.515,38**	**1.070.090.816,66**	**323.695.301,28**
Penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (TGR)	0,00	1.070.090.816,66	1.070.090 816,66
Penerimaan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (TGR) ditahun 2025, terdiri dari piutang tahun sebelumnya sebesar Rp163.134.954,99,- dan dari SKP2KS tahun 2025 sebesar Rp582.260.560,39	745.395.515,38	0,00	(745.395.515,38)
Pencatatan Pengurangan piutang lain-lain PAD disebabkan piutang telah dibayar per 7 Oktober 2025 atas piutang belanja bantuan kepada partai politik Tahun 2019 yang diangsur sebesar Rp1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Dinas Perkimtan - Piutang Lain-Lain PAD atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	**114.800,00**	**99.600,00**	**(15.200,00)**
Dinas Perkimtan - Piutang Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -Pemanfaatan Aset Daerah	**176.000,00**	**400.000,00**	**224.000,00**
JUMLAH	**985.369.839,38**	**1.070.590.416,66**	**85.220.577,28**

V.D.1.b. PENDAPATAN TRANSFER

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
7.2.	**Pendapatan Transfer**	**780.316.025.936,00**	**863.339.185.252,00**	**(83.023.159.316,00)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp83.023.159.316,00 atau -9,62%.

Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.10
Perbedaan Pendapatan Transfer antara LRA dan LO Tahun 2025

KODE REK	Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
		Rp	Rp	Rp
7.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**795.934.821.722,00**	**780.316.025.936,00**	**(15.618.795.786,00)**
7.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**687.331.418.220,00**	**679.677.376.220,00**	**(7.654.042.000,00)**
	Dana Bagi Hasil (DBH)	43.040.334.800,00	35.386.292.800,00	(7.654.042.000,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	496.572.481.339,00	496.572.481.339,00	0,00
	DAK Fisik	8.778.269.954,00	8.778.269.954,00	0,00
	DAK Non Fisik	138.940.332.127,00	138.940.332.127,00	0,00
7.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**63.387.406.000,00**	**63.387.406.000,00**	**0,00**
	Dana Desa	56.185.785.000,00	56.185.785.000,00	0,00
	Insentif Fiskal-LO	7.201.621.000,00	7.201.621.000,00	0,00
7.2.3	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**45.215.997.502,00**	**37.251.243.716,00**	**(7.964.753.786,00)**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	45.215.997.502,00	37.251.243.716,00	(7.964.753.786,00)

Penjelasan perbedaan Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO jumlah sebesar Rp15.618.795.786,00 berasal dari:

Tabel. 5.3.11
Penjelasan Pendapatan Transfer antara LRA dan LO Tahun 2025

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Badan Keuangan Daerah - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**7.654.042.000,00**	**0,00**	**(7.654.042.000,00)**
Penerimaan Piutang Pendapatan Transfer :			
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	826.662.000,00	0,00	(826.662.000,00)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.388.000,00	0,00	(1.388.000,00)
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.982.000,00	0,00	(1.982.000,00)
DBH SDA Minyak Bumi	570.551.000,00	0,00	(570.551.000,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	5.091.503.000,00	0,00	(5.091.503.000,00)
DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.993.000,00	0,00	(4.993.000,00)
Penerimaan Aset Lainnya - Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) :			
Pendapatan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	2.000,00	0,00	(2.000,00)
Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.153.400.000,00	0,00	(1.153.400.000,00)
Pendapatan Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	3.561.000,00	0,00	(3.561.000,00)
Koreksi Pencatatan kurang bayar Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak)	**21.749.014.918,00**	**13.784.261.132,00**	**(7.964.753.786,00)**

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.801.253.820,00	0,00	(3.801.253.820,00)
Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.528.623.806,00	0,00	(1.528.623.806,00)
Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	16.321.017.625,00	13.770.526.155,00	(2.550.491.470,00)
Pendaaptan Pajak Air Permukaan (PAP)	98.119.667,00	13.734.977,00	(84.384.690,00)
JUMLAH	**29.403.056.918,00**	**13.784.261.132,00**	**(15.618.795.786,00)**

V.D.1.b. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
7.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	60.640.121.002,36	38.942.017.251,79	21.698.103.750,57

Jumlah tersebut merupakan saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp21.698.103.750,57 atau 55,72%.

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini merupakan pendapatan hibah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.12
Perbedaan Lain-lain Pendapatan yang sah antara LRA dan LO Tahun 2025

KODE REK	Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
		Rp	Rp	Rp
7.3.	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	**18.640.091.435,60**	**60.640.121.002,36**	**42.000.029.566,76**
7.3.1	**Pendapatan Hibah**	82.698.940,00	41.815.422.649,76	41.732.723.709,76
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	41.703.872.709,76	41.703.872.709,76
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	82.698.940,00	111.549.940,00	28.851.000,00
7.3.2	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**18.557.392.495,60**	**18.824.698.352,60**	**267.305.857,00**
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	5.970.912.967,60	5.970.912.967,60	0,00
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	12.586.479.528,00	12.853.785.385,00	267.305.857,00

Penjelasan perbedaan Lain-lain Pendapatan yang Sah -LRA dengan Lain-lain Pendapatan yang sah - LO jumlah sebesar Rp42.000.029.566,76 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat berupa persediaan sebesar Rp5.242.280.002,76 terdiri dari:
   -Dinas Kesehatan sebesar Rp5.092.976.402,76.
   -Dinas Sosial sebesar Rp149.303.600,00.
2. Penambahan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Berupa Aset Tetap Tanah sebesar Rp5.319.400.000,00.
3. Penambahan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Berupa Aset Tetap Peralatan Dan Mesin sebesar Rp1.239.427.900,00 terdiri dari:
   -Dinas Pendidikan sebesar Rp641.427.900,00.
   -Dinas Perhubungan sebesar Rp598.000.000,00.
4. Penambahan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah program revitalisasi berupa Aset Tetap Gedung Dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp29.902.764.807,00.

5. Penambahan Pendapatan Hibah dari dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri (Universitas Andalas) berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.851.000,00.
6. Penerimaan piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2024 sebesar Rp459.480,00 dan penambahan piutang Tahun 2025 sebesar Rp1.126.650,00.
7. Pengembalian Kelebihan Kapitasi tahun 2021 atas Hasil Audit BPKP dan BPK RI berdasarkan BA Kompensasi Kapitasi antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok dengan Puskesmas se-Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp264.543.050,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Jumlah
1)	Puskesmas Sungai Limau	16.150.000,00
2)	Puskesmas Sitiung I	18.848.100,00
3)	Puskesmas Tiumang	5.845.500,00
4)	Puskesmas Silago	26.967.600,00
5)	Puskesmas Sialang	11.531.850,00
6)	Puskesmas Sitiung II	29.082.900,00
7)	Puskesmas Padang Laweh	4.051.000,00
8)	Puskesmas Koto Besar	32.140.800,00
9)	Puskesmas Koto Baru	38.245.200,00
10)	Puskesmas Sungai Rumbai	15.469.800,00
11)	Puskesmas Gunung Medan	21.103.200,00
12)	Puskesmas Sungai Dareh	31.271.700,00
13)	Puskesmas Timpeh	8.496.900,00
14)	Puskesmas Beringin Sakti	5.338.500,00
	Jumlah	**264.543.050,00**

8. Rekon Kepesertaan BPJS Meninggal yang Terlanjur Dibayarkan BPJS Tahun 2024 Yang Dipotong pada Penerimaan Kapitasi bulan September 2025 berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kapitasi Bulan September 2025 BPJS Kesehatan Cabang Solok dengan puskesmas se-Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp1.608.437,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Jumlah
1)	Puskesmas Sungai Limau	26.222,00
2)	Puskesmas Sitiung I	237.926,00
3)	Puskesmas Tiumang	133.946,00
4)	Puskesmas Silago	41.868,00
5)	Puskesmas Sialang	133.783,00
6)	Puskesmas Sitiung II	67.436,00
7)	Puskesmas Padang Laweh	32.237,00
8)	Puskesmas Koto Besar	207.129,00
9)	Puskesmas Koto Baru	135.705,00
10)	Puskesmas Sungai Rumbai	181.015,00
11)	Puskesmas Gunung Medan	133.286,00
12)	Puskesmas Sungai Dareh	220.929,00
13)	Puskesmas Timpeh	46.728,00
14)	Puskesmas Beringin Sakti	10.227,00
	Jumlah	**1.608.437,00**

9. Adanya penambahan pendapatan atas biaya pemotongan administrasi bank dari transfer BPJS ke rekening BLUD atas pendapatan kapitasi sebesar Rp487.200,00.

V.D.2. BEBAN

Beban pada Laporan Operasional sesuai dengan format Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.	BEBAN	1.015.989.467.964,08	1.098.972.178.944,35	(82.982.710.980,26)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024, yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Transfer. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp82.982.710.980,26 atau -7,55%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.13
Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.	**BEBAN**	**1.015.989.467.964,08**	**1.098.972.178.944,35**	**(82.982.710.980,26)**
8.1.01	Beban Pegawai	484.254.267.653,56	459.854.645.158,04	24.399.622.495,52
8.1.02	Beban Persediaan	96.092.973.602,81	100.041.670.605,50	(3.948.697.002,69)
8.1.02	Beban Jasa	152.582.828.721,36	122.893.828.449,15	29.689.000.272,21
8.1.02	Beban Sewa	2.647.796.083,00	5.782.869.796,00	(3.135.073.713,00)
8.1.02	Beban Pemeliharan	8.796.593.287,00	12.080.586.952,00	(3.283.993.665,00)
8.1.02	Beban Perjalanan Dinas	30.617.608.799,00	62.205.866.889,00	(31.588.258.090,00)
8.1.05	Beban Hibah	11.090.591.943,00	35.212.246.757,00	(24.121.654.814,00)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	2.788.037.315,40	2.619.299.693,24	168.737.622,16
8.1.08	Beban Penyusutan Aset tetap	112.288.475.820,96	175.434.790.213,81	(63.146.314.392,85)
8.1.08	Beban Penyusutan Aset lain-lain	331.407.778,99	7.339.656.186,61	(7.008.248.407,61)
8.1.08	Beban Amortisasi	295.455.751,00	306.710.400,00	(11.254.649,00)
8.3	Beban Transfer	114.203.431.208,00	115.200.007.844,00	(996.576.636,00)

V.D.2.a Beban Pegawai

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.1.	**Beban Pegawai**	**484.254.267.653,56**	**459.854.645.158,04**	**24.399.622.495,52**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar Rp24.399.622.495,52 atau 5,31%.

Beban Pegawai ini terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Beban Pegawai BLUD, Beban Pegawai Dana BOS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.01	**Beban Pegawai**	**484.254.267.653,56**	**459.854.645.158,04**	**24.399.622.495,52**
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	322.938.491.156,00	306.255.760.974,00	16.682.730.182,00
9.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	56.999.574.939,00	43.669.061.704,00	13.330.513.235,00
8.1.01.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	78.250.625.611,00	70.519.809.554,00	7.730.816.057,00
8.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.931.133.232,00	11.159.937.860,00	1.771.195.372,00
8.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	902.766.614,00	425.853.947,00	476.912.667,00
8.1.01.06.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.596.000,00	474.756.000,00	126.840.000,00
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	11.630.080.101,56	27.349.465.119,04	(15.719.385.017,48)

Saldo Beban Pegawai tersebut adalah jumlah *netto* setelah dikuranginya pengembalian Beban Pegawai selama Tahun 2025.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.15
Perbedaan Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA (Rp)	Belanja-LO (Rp)	Selisih +/- (Rp)
Beban Pegawai	**485.726.445.153,08**	**484.254.267.653,56**	**1.472.177.499,52**
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	322.938.491.156,00	322.938.491.156,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	56.999.574.939,00	56.999.574.939,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	79.754.151.811,00	78.250.625.611,00	1.503.526.200,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.931.133.232,00	12.931.133.232,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	902.766.614,00	902.766.614,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.596.000,00	601.596.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	11.598.731.401,08	11.630.080.101,56	(31.348.700,48)

Penjelasan perbedaan belanja pegawai-LRA dengan beban pegawai-LO jumlah sebesar Rp1.472.177.499,52 dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	99.403.014,06	99.403.014,06
Utang Belanja Pegawai	738.194.034,64	2.110.968.520,10	1.372.774.485,47
JUMLAH	**738.194.034,64**	**2.210.371.534,16**	**1.472.177.499,52**

Penjelasan Selisih:

a) Penyesuaian atas Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp99.403.014,06, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.16
Penjelasan Selisih Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) antara LRA dan LO Tahun 2025

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang PFK atas adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4 % pada iuran jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) atas Jasa Pelayanan Puskesmas	0,00	99.403.014,06	99.403.014,06
Jumlah	**0,00**	**99.403.014,06**	**99.403.014,06**

Penjelasan tabel terkait selisih Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagai berikut:

Pembayaran Utang Kepada Fihak Ketiga Tahun 2024 sebesar Rp99.403.014,06, merupakan utang atas Iuran Jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan BPJS Kesehatan. Utang tersebut dikarenakan adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4% kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Data Iuran Jasa Pelayanan PNS antara BPJS Cabang Solok dengan Puskesmas se-Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 sebesar Rp99.403.014,06.

b) Penyesuaian atas Utang Belanja Pegawai sebesar Rp1.372.774.485,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.17
Penjelasan Selisih Utang Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2025

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**0,00**	**1.503.526.200,00**	**1.503.526.200,00**

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan - Utang Belanja TKG PNSD	0,00	884.776.200,00	884.776.200,00
Dinas Pendidikan - Utang Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	618.750.000,00	618.750.000,00
Beban Pegawai BLUD	**738.194.034,64**	**607.442.320,10**	**(130.751.714,53)**
Utang Belanja Honorarium Tenaga Teknis/P3K/PHO pada RSUD Sungai Dareh	14.250.000,00	30.800.000,00	16.550.000,00
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	3.190.000,00	0,00	(3.190.000,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sungai Limau	20.133.143,04	11.366.797,00	(8.826.346,04)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sitiung I	95.906.580,00	38.865.601,00	(57.040.979,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Tiumang	0,00	29.426.734,00	29.426.734,00
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Silago	37.907.718,70	99.044.333,06	61.136.614,37
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sialang	9.952.000,00	43.866.520,00	33.914.520,00
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sitiung II	121.611.700,00	2.800.000,00	(118.811.700,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Padang Laweh	73.996.896,00	48.326.063,00	(25.670.833,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Koto Besar	45.961.760,56	70.757.528,84	24.795.768,28
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Koto Baru	161.017.529,34	79.271.045,20	(81.746.484,14)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	61.332.502,00	36.020.740,00	(25.311.762,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Gunung Medan	44.155.725,00	2.887.638,00	(41.268.087,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sungai Dareh	17.908.848,00	3.488.222,00	(14.420.626,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Beringin Sakti	30.809.632,00	110.521.098,00	79.711.466,00
Jumlah	**738.194.034,64**	**2.110.968.520,10**	**1.372.774.485,47**

Penjelasan selisih utang belanja pegawai sebagai berikut:

- Pembayaran Utang Belanja TKG PNSD sebesar Rp884.776.200,00 dan utang belanja Tamsil Guru PNSD sebesar Rp618.750.000,00 Triwulan IV Tahun 2024 Carry over pada Tahun 2024, karena adanya KMK Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian DAK Non Fisik Dana Tunjangan Guru ASND dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun 2024.
- Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD atas Belanja Honorarium Tenaga Teknis/P3K/PHO pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp14.250.000,00.
- Pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD atas Belanja Honorarium Tenaga Teknis/P3K/PHO pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp30.800.000,00.
- Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD atas Jasa Layanan pada Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp3.190.000,00.
- Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD atas Jasa Layanan pada Puskesmas sebesar Rp719.492.397,64, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Jumlah
1)	Puskesmas Sungai Limau	20.193.143,04
2)	Puskesmas Sitiung I	95.906.580,00
3)	Puskesmas Silago	37.907.718,70
4)	Puskesmas Sialang	9.952.000,00
5)	Puskesmas Sitiung II	121.611.700,00
6)	Puskesmas Padang Laweh	73.996.896,00
7)	Puskesmas Koto Besar	45.961.760,56
8)	Puskesmas Koto Baru	161.017.529,34

9)	Puskesmas Sungai Rumbai	61.332.502,00
10)	Puskesmas Gunung Medan	44.155.725,00
11)	Puskesmas Sungai Dareh	17.908.848,00
12)	Puskesmas Beringin Sakti	30.809.632,00
	Jumlah	**720.754.034,64**

- Pembayaran Utang Belanja Pegawai Jasa Layanan pada Puskesmas sebesar Rp576.642.320,10, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Jumlah
1)	Puskesmas Sungai Limau	11.366.797,00
2)	Puskesmas Sitiung I	38.865.601,00
3)	Puskesmas Tiumang	29.428.734,00
4)	Puskesmas Silago	99.044.333,06
5)	Puskesmas Sialang	43.866.520,00
6)	Puskesmas Sitiung II	2.800.000,00
7)	Puskesmas Padang Laweh	48.326.063,00
8)	Puskesmas Koto Besar	70.757.528,84
9)	Puskesmas Koto Baru	79.271.045,20
10)	Puskesmas Sungai Rumbai	36.020.740,00
11)	Puskesmas Gunung Medan	2.887.638,00
12)	Puskesmas Sungai Dareh	3.488.222,00
13)	Puskesmas Beringin Sakti	110.521.098,00
	Jumlah	**576.642.320,10**

V.D.2.b. Beban Persediaan

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.2.b	Beban Persediaan	96.092.973.602,81	100.041.670.605,50	(3.948.697.002,69)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Persediaan dalam Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp3.948.697.002,69 atau -3,95%.

Beban Persediaan ini terdiri dari Beban Pakai Habis, Beban Bahan Material, Beban Cetak dan Penggandaan serta Beban Persediaan BLUD dan Beban Persediaan BOS, yaitu:

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Persediaan)-LRA dengan Beban Persediaan-LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.18
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Persediaan) LRA dan Beban Persediaan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Persediaan	**70.884.680.082,00**	**96.092.973.602,81**	**(25.208.293.520,81)**
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.795.640,00	276.823.280,00	(268.027.640,00)
Beban Bahan-Bahan Kimia	87.453.675,00	36.181.500,00	51.272.175,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.823.249.911,00	2.891.253.787,21	(68.003.876,21)
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	21.060.000,00	57.140.000,00	(36.080.000,00)
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	6.473.000,00	6.473.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	299.750.000,00	388.275.000,00	(88.525.000,00)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	13.131.000,00	23.206.000,00	(10.075.000,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.722.113.749,00	883.535.610,53	2.838.578.138,47
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	20.081.400,00	20.081.400,00	0,00

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	246.002.369,00	237.957.369,00	8.045.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	279.176.517,00	282.902.347,00	(3.725.830,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	638.948.531,00	642.097.831,00	(3.149.300,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.595.299.294,00	1.645.734.294,00	(50.435.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	198.945.188,00	201.965.188,00	(3.020.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	606.630.154,00	612.411.100,00	(5.780.946,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.147.153,00	28.987.153,00	(2.840.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	306.283.752,00	327.397.560,00	(21.113.808,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	16.825.000,00	16.825.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	72.405.800,00	104.305.770,00	(31.899.970,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	33.369.036,00	33.369.036,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	467.999.024,00	471.702.524,00	(3.703.500,00)
Beban Obat-Obatan-Obat	2.276.533.552,00	743.587.298,23	1.532.946.253,77
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	226.161.390,00	494.669.084,16	(268.507.694,16)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.077.027.939,00	11.114.992.829,93	(6.037.964.890,93)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.799.482.560,00	18.791.797.042,30	(14.992.314.482,30)
Beban Natura dan Pakan-Natura	1.403.508.674,00	1.283.868.549,00	119.640.125,00
Beban Natura dan Pakan-Pakan	708.713.270,00	636.161.270,00	72.552.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.309.649.665,00	1.311.539.665,00	(1.890.000,00)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	720.630.541,00	720.630.541,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	752.003.453,00	752.003.453,00	0,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	245.801.335,00	245.801.335,00	0,00
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	399.685.000,00	399.685.000,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	233.277.810,00	233.277.810,00	0,00
Beban Pakaian Siaga	450.000,00	450.000,00	0,00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Adat Daerah	173.099.910,00	205.599.910,00	(32.500.000,00)
Beban Pakaian Olahraga	254.009.804,00	254.009.804,00	0,00
Beban Pakaian Paskibraka	203.539.764,00	203.539.764,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.181.881.896,00	1.192.274.146,00	(10.392.250,00)
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Pendingin			
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.564.440,00	77.334.973,00	(68.770.533,00)
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	1.776.000,00	(1.776.000,00)
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	2.719.500,00	2.719.500,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	1.865.300,00	1.865.300,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	13.755.000,00	13.755.000,00	0,00
Beban Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00
Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Dana BLUD - LO	28.655.446.486,00	36.870.862.468,45	(8.215.415.982,45)
Beban Persediaan Dana BOS - LO	11.717.792.600,00	11.323.208.110,00	394.584.490,00

Penjelasan perbedaan belanja persediaan-LRA dengan beban persediaan-LO sebesar Rp25.208.293.520,81 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.19
Selisih Belanja Persediaan LRA dan LO Tahun 2025

URAIAN	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Saldo persediaan awal tahun	46.962.340.588,12	0,00	(46.962.340.588,12)
Saldo persediaan akhir tahun	0,00	24.626.599.975,67	24.626.599.975,67
Utang belanja persediaan tahun 2024	0,00	11.411.867.662,14	11.411.867.662,14
utang belanja persediaan tahun 2025	7.822.090.442,44	0,00	(7.822.090.442,44)
Penyesuaian belanja Persediaan berasal dari belanja modal	1.045.429.125,30	0,00	(1.045.429.125,30)
Penyesuaian belanja Persediaan berasal dari hibah	5.242.280.002,76	0,00	(5.242.280.002,76)
Penyesuaian belanja Persediaan menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin	0,00	2.309.000,00	2.309.000,00
Penyesuaian belanja Persediaan menambah nilai aset tetap lainnya	0,00	16.070.000,00	16.070.000,00

URAIAN	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Koreksi kurang catat Persediaan	193.000.000,00	0,00	(193.000.000,00)
JUMLAH	**61.265.140.158,62**	**36.056.846.637,81**	**(25.208.293.520,81)**

Penjelasan selisih:

1) Penyesuaian Persediaan yang terpakai pada Tahun 2024 sebesar Rp46.962.340.588,12 dan yang masih menjadi Persediaan (*stock*) pada Tahun 2025 sebesar Rp24.626.599.975,67 berdasarkan *stock opname* Persediaan per 31 Desember 2025.
2) Penyesuaian Utang Belanja Persediaan Tahun 2024 yang mengurangi Beban Persediaan sebesar Rp11.411.867.662,14 dan penambahan Utang Belanja Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp7.822.090.442,44, dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel. 5.3.20
Penyesuaian Utang Belanja Persediaan Tahun 2025

SKPD/ Uraian	JUMLAH (Rp)
Pembayaran Utang Persediaan Tahun 2024 :	**11.411.867.662,14**
BLUD RSUD SUNGAI DAREH:	
Utang Belanja Bahan Pakai Habis/ Kedokteran	3.470.235.744,00
Utang Belanja Bahan Obat	5.377.226.154,00
Utang Belanja Bahan Laboratorium	1.213.099.884,00
Utang Belanja Cetak	293.400.714,00
Utang Belanja ATK	86.349.000,00
Utang Belanja Alat Listrik	36.257.300,00
Utang Belanja Alat/bahan Kegiatan Kantor lainnya	114.511.500,00
Utang Belanja isi tabung gas - gas medis	201.789.800,00
BLUD RSUD SUNGAI RUMBAI:	
Utang Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	220.370.600,76
Utang Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	398.626.965,38
Penambahan Utang Persediaan Tahun 2025 :	**7.822.090.442,44**
BLUD RSUD SUNGAI DAREH:	
Utang Belanja Bahan Obat	2.768.883.200,12
Utang Belanja Bahan Laboratorium	1.119.606.972,00
Utang Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	2.898.849.970,00
Utang Belanja Alat Listrik	332.000,00
Utang Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	230.000,00
Utang Belanja Alat/bahan Kegiatan Kantor lainnya	2.518.801,00
Utang Belanja isi tabung gas - gas medis	226.488.500,00
Utang Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	10.483.000,00
Utang Belanja Kertas dan Cover	21.367.500,00
Utang Belanja Bahan Komputer	3.077.000,00
BLUD RSUD SUNGAI RUMBAI	
Utang Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	308.943.240,33
Utang Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	461.310.258,99

3) Penambahan Persediaan Berasal Dari Belanja Modal sebesar Rp1.045.429.125,30, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.21
Penyesuaian Belanja Persediaan berasal dari Belanja Modal Tahun 2025

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Reklas dari aset peralatan dan mesin :			
Dinas Pendidikan - Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	431.062.500,00	0,00	(431.062.500,00)
RSUD Sungai Rumbai - Persediaan BLUD	6.205.500,00	0,00	(6.205.500,00)
Puskesmas Sialang - Persediaan BLUD	15.695.400,00	0,00	(15.695.400,00)

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Puskesmas Koto Baru - Persediaan BLUD	16.203.500,00	0,00	(16.203.500,00)
Dinas Sosial - persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.855.000,00	0,00	(5.855.000,00)
Dinas Sosial - Persediaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	1.840.000,00	0,00	(1.840.000,00)
Dinas Perhubungan - persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.838.808,00	0,00	(19.838.808,00)
Sekretariat Daerah - persediaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	66.930.533,00	0,00	(66.930.533,00)
Sekretariat Daerah - persediaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.776.000,00	0,00	(1.776.000,00)
BKD - persediaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.407.250,00	0,00	(9.407.250,00)
Inspektorat - persediaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	985.000,00	0,00	(985.000,00)
Reklas dari aset gedung dan bangunan :			
Dinas Pendidikan - persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	149.349.061,30	0,00	(149.349.061,30)
Puskesmas Sitiung I - Persediaan BLUD	19.258.781,00	0,00	(19.258.781,00)
Reklas dari aset jalan, jrigasi dan jaringan :			
Dinas PUPR - Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	199.996.000,00	0,00	(199.996.000,00)
Dinas PUPR - Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.442.192,00	0,00	(62.442.192,00)
Dinas PUPR - Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.593.630,00	0,00	(3.593.630,00)
Dinas PUPR - Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000.00	0,00	(1.200.000,00)
Dinas PUPR - Persediaan Makanan dan Minuman Rapat	1.890.000,00	0,00	(1.890.000,00)
Reklas dari aset tetap lainnya:			
Dinas Pendidikan - Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	31.899.970,00	0,00	(31.899.970,00)
Jumlah	**1.045.429.125,30**	**0,00**	**(1.045.429.125,30)**

4) Penambahan Persediaan non APBD sebesar Rp5.242.280.002,76, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.22
Penambahan Persediaan non APBD Tahun 2025

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Kesehatan	5.092.976.402,76	0,00	(5.092.976.402,76)
Dinas Sosial	149.303.600,00	0,00	(149.303.600,00)
Jumlah	**5.242.280.002,76**	**0,00**	**(5.242.280.002,76)**

5) Penyesuaian Beban Persediaan menambah nilai Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.309.000,00.
6) Penyesuaian Beban Persediaan menambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp16.070.000,00.
7) Adanya koreksi penambahan nilai Persedian pada Dinas Pangan dan Perikanan sebesar Rp193.000.000,00. karena kurang catat stock beras bulog pada tahun 2024

V.D.2.c Beban Jasa

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2.b	Beban Jasa	152.582.828.721,36	122.893.828.449,15	29.689.000.272,21

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar Rp29.689.000.272,21 atau 24,16%.

Beban Jasa ini terdiri dari Beban Jasa Kantor, Beban Premi Asuransi, Beban Jasa Konsultasi dan Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Beban Jasa BLUD dan Beban Jasa BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa-LRA dengan Beban Jasa-LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.23
Perbedaan Belanja Jasa LRA dan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA Rp	Beban-LO Rp	Selisih +/- Rp
Beban Jasa	**145.349.774.697,10**	**152.582.828.721,36**	**(7.233.054.024,26)**
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	587.150.000,00	587.150.000,00	0,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	404.737.500,00	404.737.500,00	0,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	193.350.000,00	193.350.000,00	0,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
Beban Honorarium Rohaniwan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	731.600.000,00	731.600.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.207.125.000,00	1.207.125.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	91.875.379,00	91.875.379,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum,	2.582.856.800,00	2.582.856.800,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan	868.590.000,00	868.590.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	493.935.000,00	493.935.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	67.090.000,00	67.090.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	1.572.090.000,00	1.572.090.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	435.060.000,00	435.060.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	143.510.000,00	143.510.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	709.864.000,00	709.864.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	7.044.500.000,00	7.044.500.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	53.240.000,00	53.240.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	935.300.000,00	935.300.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	414.820.000,00	414.820.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.248.345.000,00	4.248.345.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.820.240.000,00	2.820.240.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Supir	2.008.325.000,00	2.008.325.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	547.930.000,00	547.930.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	15.140.000,00	15.140.000,00	0,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	103.120.000,00	103.120.000,00	0,00
Beban Jasa Tata Rias	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	144.237.500,00	144.237.500,00	0,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	672.405.000,00	672.405.000,00	0,00

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	2.433.893.200,00	2.433.893.200,00	0,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	6.527.459,00	6.527.459,00	0,00
Beban Jasa Kalibrasi	184.437.000,00	184.437.000,00	0,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
Beban Jasa Pengukuran Tanah	39.984.950,00	39.984.950,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.057.890.000,00	1.057.890.000,00	0,00
Beban Tagihan Telepon	585.375.016,00	585.375.016,00	0,00
Beban Tagihan Air	31.652.300,00	31.652.300,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	3.461.975.755,00	3.461.975.755,00	0,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.714.542.036,00	1.714.542.086,00	0,00
Beban Paket/Pengiriman	1.759.548,00	1.759.548,00	0,00
Beban Penambahan Daya	186.056.800,00	186.056.800,00	0,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	380.608.300,00	380.608.300,00	0,00
Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	7.431.201.988,00	7.431.201.988,00	0,00
Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	0,00	0,00	0,00
Beban Lembur	903.350.000,00	903.350.000,00	0,00
Beban Medical Check Up	72.447.277,00	72.447.277,00	0,00
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	2.891.448.776,00	2.891.448.776,00	0,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	142.639.900,00	142.639.900,00	0,00
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.346.814.944,00	1.346.814.944,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	21.881.202.000,00	21.881.202.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	467.706.200,00	467.706.200,00	-
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	147.569.361,00	113.840.904,92	33.728.456,08
Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	453.597.015,00	453.597.015,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	58.746.827,00	58.746.827,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	473.409.646,00	473.409.646,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	648.901.970,00	648.901.970,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	352.040.000,00	352.040.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	2.193.620.030,72	2.193.620.030,72	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	399.548.000,00	399.548.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	788.141.861,00	788.141.861,00	0,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.285.231.050,00	1.285.231.050,00	0,00
Beban Sosialisasi	4.352.597.600,00	4.352.597.600,00	0,00
Beban Bimbingan Teknis	1.470.115.728,00	1.470.115.728,00	0,00
Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	125.990.500,00	125.990.500,00	0,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	226.560.000,00	226.560.000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	35.218.166.617,38	42.484.949.097,72	(7.266.782.480,34)
Beban Barang dan Jasa BOSP	9.398.828.528,00	9.398.828.528,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.967.920.285,00	12.967.920.285,00	0,00

Penjelasan perbedaan Belanja Jasa-LRA dengan Jasa-LO sebesar Rp7.233.054.024,26 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.24
Selisih Belanja Jasa LRA dan LO Tahun 2025

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang belanja jasa	16.979.462.166,13	9.434.939.476,79	(7.544.522.689,34)
Premi asuransi barang milik daerah	274.605.153,94	308.333.610,02	33.728.456,08
Penyesuaian belanja Persediaan menambah nilai aset tetap KDP	0,00	280.041.509,00	280.041.509,00
Penyesuaian Beban Jasa BLUD biaya transfer klaim BPJS dan Kapitasi	2.301.300,00	0,00	(2.301.300,00)
JUMLAH	**17.256.368.620,07**	**10.023.314.595,81**	**(7.233.054.024,26)**

Penjelasan selisih:

a.) Selisih penyesuaian Utang Belanja Jasa sebesar Rp7.544.522.689,34, yaitu:

Tabel. 5.3.25
Penyesuaian Utang Belanja Jasa Tahun 2025

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
BLUD RSUD SUNGAI DAREH	**15.724.016.893,00**	**8.731.505.723,00**	**(6.992.511.170,00)**
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	7.017.211.920,00	7.017.211.920,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	15.392.441.646,00	1.260.972.499,00	(14.131.469.147,00)
Belanja Rujukan Parsial	22.025.000,00	60.900.000,00	38.875.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Limbah B3)	285.604.956,00	347.014.454,00	61.409.498,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Berlanggganan	0,00	39.406.850,00	39.406.850,00
Belanja Konsultan Konstruksi	23.945.291,00	0,00	(23.945.291,00)
RSUD SUNGAI RUMBAI	**946.510.463,00**	**500.048.965,00**	**(446.461.498,00)**
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	930.449.663,00	481.489.765,00	(448.959.898,00)
Belanja Operasional Ambulan	16.060.800,00	15.229.200,00	(831.600,00)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00
BLUD PUSKESMAS	**308.934.810,13**	**203.384.788,79**	**(105.550.021,34)**
Pembayaran Utang 2024 Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS pada Puskesmas :	0,00	203.060.788,79	203.060.788,79
Sungai Limau	0,00	4.871.484,00	4.871.484,00
Sitiung I	0,00	18.927.556,00	18.927.556,00
Tiumang	0,00	8.382.777,00	8.382.777,00
Silago	0,00	16.163.212,43	16.163.212,43
Sialang	0,00	7.943.480,00	7.943.480,00
Padang Laweh	0,00	27.268.412,00	27.268.412,00
Koto Besar	0,00	41.203.270,56	41.203.270,56
Koto Baru	0,00	35.840.954,80	35.840.954,80
Sungai Rumbai	0,00	253.260,00	253.260,00
Gunung Medan	0,00	525.522,00	525.522,00
Timpeh	0,00	41.680.860,00	41.680.860,00
Penambahan Utang 2025 Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS pada Puskesmas :	308.934.810,13	0,00	(308.934.810,13)
Sungai Limau	8.654.204,16	0,00	(8.654.204,16)
Sitiung I	20.588.907,00	0,00	(20.588.907,00)
Silago	8.199.904,85	0,00	(8.199.904,85)
Sitiung II	12.430.000,00	0,00	(12.430.000,00)
Padang Laweh	18.584.127,00	0,00	(18.584.127,00)
Koto Besar	10.772.882,26	0,00	(10.772.882,26)
Koto Baru	42.122.448,86	0,00	(42.122.448,86)
Sungai Rumbai	1.036.546,00	0,00	(1.036.546,00)
Gunung Medan	3.049.969,00	0,00	(3.049.969,00)
Timpeh	109.880.821,00	0,00	(109.880.821,00)
Beringin Sakti	73.615.000,00	0,00	(73.615.000,00)
Pembayaran Utang 2024 operasional ambulan pada Puskesmas Tiumang	0,00	324.000,00	324.000,00
JUMLAH	**16.979.462.166,13**	**9.434.939.476,79**	**(7.544.522.689,34)**

b.) Penyesuaian Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp33.728.456,08, sebagai berikut:

Tabel. 5.3.26
Penyesuaian Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2025

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Premi Asuransi Kendaraan Dinas pada Sekretariat Daerah	140.232.331,75	156.873.977,64	16.641.645,89
Premi Asuransi Kendaraan Dinas pada Sekretariat DPRD	12.323.068,77	29.468.180,33	17.145.111,56
Premi Asuransi Gedung pada Sekretariat DPRD	122.049.753,42	121.991.452,05	(58.301,37)
JUMLAH	**274.605.153,94**	**308.333.610,02**	**33.728.456,08**

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian Premi Asuransi Dibayar Dimuka atas kendaraan dinas Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp140.232.331,75 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp12.323.068,77.
- Penyesuaian Premi Asuransi Dibayar Dimuka atas Gedung Kantor Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp122.049.753,42.
- Penyesuaian Premi Asuransi Dibayar Dimuka atas kendaraan dinas Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp156.873.977,64 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp29.468.180,33.
- Penyesuaian Premi Asuransi Dibayar Dimuka atas Gedung Kantor Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp121.991.452,05.

c.) Penyesuaian Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur menambah nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp280.041.509,00

d.) Penyesuaian Beban Jasa BLUD atas Pencatatan Pendapatan Klaim BPJS dan Kapitasi yang terpotong biaya transfer pada BLUD sebesar Rp2.301.300,00, terdiri dari:

Tabel. 5.3.27
Penyesuaian Beban Jasa BLUD Tahun 2025

No	BLUD	Klaim BPJS	Kapitasi	Jumlah
1)	RSUD Sungai Dareh	710.700,00	0,00	710.700,00
2)	Labkesda	15.900,00	0,00	15.900,00
3)	RSUD Sungai Rumbai	174.000,00	0,00	174.000,00
4)	Puskesmas Sungai Rumbai	101.500,00	34.800,00	136.300,00
5)	Puskesmas Koto Besar	63.800,00	34.800,00	98.600,00
6)	Puskesmas Sungai Limau	40.600,00	34.800,00	75.400,00
7)	Puskesmas Koto Baru	72.500,00	34.800,00	107.300,00
8)	Puskesmas Tiumang	72.500,00	34.800,00	107.300,00
9)	Puskesmas Padang Laweh	49.300,00	34.800,00	84.100,00
10)	Puskesmas Sitiung I	92.800,00	34.800,00	127.600,00
11)	Puskesmas Timpeh	69.600,00	34.800,00	104.400,00
12)	Puskesmas Gunung Medan	52.200,00	34.800,00	87.000,00
13)	Puskesmas Sitiung II	69.600,00	34.800,00	104.400,00
14)	Puskesmas Beringin Sakti	75.400,00	34.800,00	110.200,00
15)	Puskesmas Silago	43.500,00	34.800,00	78.300,00
15)	Puskesmas Sungai Dareh	49.300,00	34.800,00	84.100,00
15)	Puskesmas Sialang	60.900,00	34.800,00	95.700,00
	JUMLAH	**1.814.100,00**	**487.200,00**	**2.301.300,00**

V.D.2.d Beban Sewa

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2.c	**Beban Sewa**	**2.647.796.083,00**	**5.782.869.796,00**	**(3.135.073.713,00)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Sewa Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp3.135.073.713,00 atau -54,21%.

Beban Sewa ini terdiri dari Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Beban Sewa Sarana Mobilitas, Beban Sewa Alat Berat dan Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Serta Beban Sewa BLUD dan Beban Jasa BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Sewa-LRA dengan Beban Sewa-LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.28
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Sewa) LRA dan Beban Sewa LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Sewa	**2.647.796.083,00**	**2.647.796.083,00**	**0,00**
Beban Sewa Alat Pengangkat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00
Beban Sewa Electric Generating Set	70.205.000,00	70.205.000,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	194.134.183,00	194.134.183,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	409.889.459,00	409.889.459,00	0,00
Beban Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	187.861.040,00	187.861.040,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	190.189.918,00	190.189.918,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	184.140.502,00	184.140.502,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Terbuka	874.186.446,00	874.186.446,00	0,00
Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	42.379.000,00	42.379.000,00	0,00
Beban Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa dana BLUD - LO	7.967.800,00	7.967.800,00	0,00
Beban Sewa dana BOS - LO	420.842.735,00	420.842.735,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan belanja sewa-LRA dengan beban sewa-LO

V.D.2.e Beban Pemeliharaan

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
8.1.2.d	Beban Pemeliharaan	8.796.593.287,00	12.080.586.952,00	(3.283.993.665,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp3.283.993.665,00 atau -27,18%.

Beban Pemeliharaan ini terdiri dari Beban Perawatan Kendaraan Bermotor dan Beban Pemeliharaan serta Beban Pemeliharaan BLUD dan Beban Pemeliharaan BOS.

Perbedaan jumlah Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.29
Perbedaan Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan	**9.238.841.559,00**	**8.796.593.287,00**	**442.248.272,00**

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	147.834.500,00	147.834.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	91.568.671,00	91.568.671,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	54.792.250,00	54.792.250,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	465.429.886,00	465.429.886,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.826.397.315,00	1.826.397.315,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	127.952.262,00	127.952.262,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	368.843.117,00	368.843.117,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	20.828.500,00	20.828.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	99.982.000,00	99.982.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	9.990.000,00	9.990.000,00	0.00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	7.944.000,00	7.944.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	28.370.000,00	28.370.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	224.469.973,00	224.469.973,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39.919.000,00	39.919.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	67.370.000,00	67.370.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	192.359.016,00	192.359.016,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	55.610.500,00	55.610.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.013.534.070,00	828.601.724,00	184.932.346,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	374.695.958,00	374.695.958,00	0,00
Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.121.100.000,00	1.121.100.000,00	0,00

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	69.700.000,00	69.700.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	83.978.070,00	83.978.070,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan dana BLUD - LO	1.750.839.604,00	1.493.523.678,00	257.315.926,00
Beban Pemeliharaan dana BOS - LO	829.140.867,00	829.140.867,00	0,00

Penjelasan perbedaan belanja pemeliharaan-LRA dengan beban pemeliharaan-LO sebesar Rp442.248.272,00, yaitu:

Tabel 5.3.30
Penjelasan Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan Tahun 2025

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang Belanja Pemeliharaan BLUD RSUD Sungai Dareh	45.946.467,00	313.612.033,00	267.665.566,00
Utang Belanja Pemeliharaan BLUD RSUD Sungai Rumbai	10.349.640,00	0,00	(10.349.640,00)
Utang Belanja Pemeliharaan pada Sekretariat Daerah	0,00	198.933.800,00	198.933.800,00
Reklas aset gedung dan bangunan ke aset ekstrakomptabel (perbaikan pintu gedung kantor) pada Bapperida	14.001.454,00	0,00	(14.001.454,00)
JUMLAH	**70.297.561,00**	**512.545.833,00**	**442.248.272,00**

Penjelasan selisih:

- Penambahan utang pemeliharaan sebesar Rp45.946.467,00 pada BLUD RSUD Sungai Dareh, dengan rincian sebagai berikut:

1)	Utang Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Khusus	21.572.235,00
2)	Utang Pemeliharaan Rutin Faximile/Internet	881.000,00
3)	Utang Pemeliharaan LIFT	12.432.000,00
4)	Utang Pemeliharaan Tower dan Jaringan	1.990.000,00
5)	Utang Pemeliharaan Alkes	8.093.232,00
6)	Utang Pemeliharaan rutin instalasi air	600.000,00
7)	Utang Pemeliharaan Komputer	378.000,00
	Jumlah	**45.946.467,00**

- Pembayaran utang pemeliharaan sebesar Rp313.612.033,00 pada BLUD RSUD Sungai Dareh, dengan rincian sebagai berikut:

1)	Utang Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Khusus	38.957.383,00
2)	Utang Pemeliharaan Alat Pendingin	82.978.050,00
3)	Utang Pemeliharaan Rutin Faximile/Internet	58.498.100,00
4)	Utang Pemeliharaan Listrik Ruang Hemodialisa Lantai 1	133.178.500,00
	Jumlah	**313.612.033,00**

- Penambahan utang pemeliharaan Alat Kesehatan sebesar Rp10.349.640,00 pada BLUD RSUD Sungai Rumbai

-Pembayaran utang pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp198.933.800,00 pada Sekretariat Daerah

-Adanya reklas belanja modal aset gedung dan bangunan ke aset ekstrakomptabel (perbaikan pintu gedung kantor) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp14.001.454,00.

V.D.2.f Beban Perjalanan Dinas

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	30.617.608.799,00	62.205.866.869,00	(31.588.258.090,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp31.588.258.090,00 atau -50,78%.

Beban Perjalanan Dinas ini terdiri dari Beban Perjalanan Dinas Biasa, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, Beban Perjanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Beban Perjanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, Beban Perjalanan Dinas BLUD, dan Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Perjalanan dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas-LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.31
Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA Rp	Beban-LO Rp	Selisih +/- Rp
Beban Perjanan Dinas	**30.617.608.799,00**	**30.617.608.799,00**	**0,00**
Beban Perjalanan Dinas Biasa	24.423.028.073,00	24.423.028.073,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.640.646.550,00	3.640.646.550,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas dana BLUD - LO	1.134.085.464,00	1.134.085.464,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas dana BOS - LO	1.419.848.712,00	1.419.848.712,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas-LO.

V.D.2.g Beban Hibah

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.5	Beban Hibah	11.090.591.943,00	35.212.246.757,00	(24.121.654.814,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp24.121.654.814,00 atau -68,50%.

Beban hibah ini terdiri dari :

Tabel 5.3.32
Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Hibah	**11.090.591.943,00**	**35.212.246.757,00**	**(24.121.654.814,00)**
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	180.980.000,00	21.706.113.000,00	(21.525.133.000,00)
Beban Hibah Barang kepada BUMN	0,00	958.320.000,00	(958.320.000,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.057.079.615,00	1.229.825.159,00	(172.745.544,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	411.916.900,00	1.867.283.900,00	(1.455.367.000,00)
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	935.965.285,00	855.713.548,00	80.251.737,00

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	Kenaikan/Penurunan
	Rp	Rp	Rp
Beban Hibah Dana BOSP-BOS	4.351.332.000,00	4.344.257.150,00	7.074.350,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.380.002.143,00	3.576.834.000,00	(196.831.857,00)
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	773.316.000,00	628.900.000,00	144.416.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp24.121.654.814,00 atau 68,50%, hal ini karena di tahun 2024 adanya hibah yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk pelaksanaan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.33
Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Hibah	**11.090.591.943,00**	**11.090.591.943,00**	**0,00**
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	180.980.000,00	180.980.000,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada BUMN	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.057.079.615,00	1.057.079.615,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	411.916.900,00	411.916.900,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	935.965.285,00	935.965.285,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOS	4.351.332.000,00	4.351.332.000,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.380.002.143,00	3.380.002.143,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	773.316.000,00	773.316.000,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO.

V.D.2.h Beban Bantuan Sosial

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
8.1.6.	**Beban Bantuan Sosial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat saldo beban bantuan sosial Tahun 2025.

V.D.2.i Beban Penyusutan dan Amortisasi

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
8.1.7.	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**112.915.339.350,95**	**183.081.156.800,42**	**(70.165.817.449,47)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, maka terdapat penurunan sebesar Rp70.165.817.449,47 atau -38,32%.

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	Kenaikan/Penurunan
	Rp	Rp	Rp
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**112.915.339.350,95**	**183.081.156.800,42**	**(70.165.817.449,47)**
Beban Penyusutan Aset Tetap	112.288.475.820,96	175.434.790.213,81	(63.146.314.392,85)

URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	331.407.778,99	7.339.656.186,61	(7.008.248.407,62)
Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tak Berwujud	295.455.751,00	306.710.400,00	(11.254.649,00)

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok aset dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

V.D.2.j Beban Penyisihan Piutang

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.8	**Beban Penyisihan Piutang**	**2.788.037.315,40**	**2.619.299.693,24**	**168.737.622,16**

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar Rp168.737.622,16 atau 6,44%.

Beban Penyisihan Piutang ini terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak, Beban Penyisihan Piutang Retribusi, Beban Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Beban Penyisihan Piutang Transfer Dan Beban Penyisihan Piutang Lainnya.

Saldo Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel. 5.3.34
Saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Penyisihan Piutang	**2.788.037.315,40**	**2.619.299.693,24**	**168.737.622,16**
Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.452.813.392,80	2.097.119.145,14	(644.305.752,34)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	678.768.992,82	349.295.513,92	329.473.473,90
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	(27.646.597,30)	27.578.652,85	(55.225.250,15)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	684.098.191,23	145.307.034,27	538.791.156,96
Beban Penyisihan Piutang Transfer pemerintah pusat	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	3.335,85	(657,94)	3.993,79

Beban Penyisihan untuk Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Piutang Lain-Lain PAD dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

V.D.2.k Beban Transfer

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.2.	**Beban Transfer**	**114.203.431.208,00**	**115.200.007.844,00**	**(996.576.636,00)**

Jumlah tersebut merupakan Beban Transfer dalam Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp996.576.636,00 atau -0,87%.

Beban Transfer terdiri dari:

Tabel. 5.3.35
Saldo Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.3.	**Beban Transfer**	**114.203.431.208,00**	**115.200.007.844,00**	**(996.576.636,00)**
8.3.01.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.590.944.672,00	1.661.138.621,00	929.806.051,00
8.3.01.02.01.0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	209.924.400,00	208.096.583,00	1.827.817,00
8.3.02.05.01.0003	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	111.402.562.136,00	0,00	111.402.562.136,00
8.3.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	113.330.772.640,00	(113.330.772.640,00)

Untuk perbedaan jumlah Belanja Transfer-LRA dengan Beban Transfer-LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.36
Perbedaan Belanja Transfer antara LRA dan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA Rp	Beban-LO Rp	Selisih +/- Rp
Beban Transfer	**114.203.431.208,00**	**114.203.431.208,00**	**0,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.590.944.672,00	2.590.944.672,00	0,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	209.924.400,00	209.924.400,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	111.402.562.136,00	111.402.562.136,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan Belanja Transfer-LRA dengan Beban Transfer-LO.

V.D.2.1 Beban Lain-lain

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.2.	**Beban Lain-lain**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat saldo beban lain-lain tahun 2025.

V.D.3. Surplus/Defisit dari Operasi

URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penuruna Rp
Surplus/Defisit dari Operasi	**(31.265.067.804,10)**	**(76.606.202.888,36)**	**45.341.135.084,26**

Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2025 sebesar Rp31.265.067.804,10 mengalami penurunan sebesar Rp45.341.135.084,26 atau -59,19% bila dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp76.606.202.888,36.

Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2025 sebesar Rp31.265.067.804,10 merupakan selisih dari Pendapatan sebesar Rp984.724.400.159,98 dengan Beban Operasi sebesar Rp1.015.989.467.964,08.

V.D.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	238.683.524,00	380.744.000,00	(142.060.476,00)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp238.683.524,00 mengalami penurunan sebesar Rp142.060.476,00 atau -37,31% bila dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp380.744.000,00.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp238.683.524,00 merupakan reklasifikasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-Hasil Penjualan Aset Lain-Lain- Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang atas penjualan Aset Lain-lain pada Tahun 2025 ke Surplus Penjualan Aset Nonlancar. Terdiri dari penerimaan atas penjualan aset lain-lain (rusak berat), dengan rincian sebagai berikut:

1. Penjualan kendaraan dinas operasional sebanyak 3 unit, dengan rincian sebagai berikut:
   a) Sedan merk/type Honda/Accord CR2 2.4 VTIL AT Tahun 2016, disetor ke kasda tanggal 23 April 2025 sebesar Rp60.216.400,00 dengan nilai buku Rp0,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp60.216.400,00.
   b) Mini Bus merk/type Toyota/Fortuner 2.5 G A/T4 X 4 Tahun 2014, disetor ke kasda tanggal 15 April 2025 sebesar Rp58.072.800,00 dengan nilai buku Rp0,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp58.072.800,00.
   c) Mini Bus merk/type Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L Dakar H, disetor ke kasda tanggal 22 April 2025 sebesar Rp159.354.800,00 dengan nilai buku Rp52.110.476,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp107.244.324,00.
2. Penjualan sisa bongkaran atap seng gedung SMP Negeri 1 Pulau Punjung disetor ke kasda tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.500.000,00
3. Penjualan persediaan barang habis pakai pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang disetor ke kasda tanggal 27 Mei 2025 sebesar Rp1.000.000,00.
4. Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 13 Januari 2025 sebesar Rp1.700.000,00 melalui Nagari *Virtual Account* (NVA).
5. Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 21 Maret 2025 sebesar Rp3.000.000,00 melalui Nagari *Virtual Account* (NVA).
6. Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 3 November 2025 sebesar Rp2.000.000,00 melalui Nagari *Virtual Account* (NVA).
7. Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp950.000,00 melalui Nagari *Virtual Account* (NVA).

V.D.5. Pos Luar Biasa

URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Pos Luar Biasa	196.489.050,00	2.485.520.287,00	(2.289.031.237,00)

Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp196.489.050,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.289.031.237,00 atau -92,09% bila dibandingkan dengan Pos Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.485.520.287,00.

Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp196.489.050,00 merupakan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2025, belanja tidak terduga yang terealisasi untuk mendanai tanggap darurat penanggulangan bencana alam korban kebakaran dan korban bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang direklasifikasi ke beban luar biasa pada Laporan Operasional.

V.D.6. Surplus/ Defisit LO

URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penuruna Rp
Surplus/ Defisit LO	**(31.222.873.330,10)**	**(78.710.979.175,36)**	**47.488.105.845,26**

Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp31.222.873.330,10 mengalami penurunan sebesar Rp47.488.105.845,26 atau -60,33% bila dibandingkan dengan Laporan Operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp78.710.979.175,36.

Defisit Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp31.222.873.330,10 merupakan penjumlahan dari Defisit dari Operasi sebesar Rp31.265.067.804,10 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp238.683.524,00 setelah Pengurangan Beban Transfer atas reklas pengakuan Belanja Tak Terduga pada LO dari Beban Tak Terduga ke Beban Luar Biasa sebesar Rp196.489.050,00.

V.E PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang memberikan informasi arus kas masuk *(Cash In Flow)* dan arus kas keluar *(Cash Out Flow)* yang setara dalam Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.

Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris selama satu periode akuntansi. Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai berikut.

V.E.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Posisi selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.E.1.a Arus Masuk Kas	**951.745.981.854,25**	**970.441.713.488,79**

Arus Masuk Kas merupakan pendapatan operasi yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah lainnya, Pendapatan Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	54.317.593.473,00	25.092.743.485,78
2	Penerimaan Retribusi Daerah	73.178.734.847,00	65.941.537.340,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.529.319.459,00	5.347.929.006,00
4	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	4.145.420.917,65	11.607.295.741,01
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	16.769.613.800,00	14.676.153.000,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	26.270.721.000,00	22.402.073.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	496.572.481.339,00	512.944.707.932,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	147.718.602.081,00	166.360.138.484,00
9	Dana Insentif Daerah	7.201.621.000,00	20.745.042.000,00
10	Dana Desa	56.185.785.000,00	55.320.687.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.215.997.502,00	58.241.057.201,00
12	Penerimaan Hibah	82.698.940,00	71.350.441,00
13	Penerimaan Lainnya	18.557.392.495,60	11.690.998.858,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**951.745.981.854,25**	**970.441.713.488,79**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.E.1.b Arus Keluar Kas	**869.955.658.574,18**	**910.980.207.014,13**

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi mencakup seluruh pengeluaran kas untuk keperluan operasional pemerintahan. Berdasarkan SAP, pengeluaran ini mencakup belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak

terduga, dan belanja bagi hasil. Pada Tahun 2025 pengeluaran kas untuk aktivitas operasi sebagai berikut.

Tabel 5.5.2
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	485.726.445.153,08	454.911.665.442,94
2	Pembayaran Barang	258.738.701.220,10	304.013.952.063,19
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	11.090.591.943,00	34.253.926.757,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	0,00
7	Pembayaran Tak Terduga	196.489.050,00	2.485.520.287,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	2.590.944.672,00	1.762.449.469,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	209.924.400,00	221.920.355,00
10	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan	111.402.562.136,00	113.330.772.640,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**869.955.658.574,18**	**910.980.207.014,13**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**81.790.323.280,07**	**59.461.506.474,66**

Merupakan kenaikan/penurunan kas dari aktivitas operasi. Pada Tahun 2025 terjadi kenaikan kas (arus masuk kas - arus keluar kas) dari aktivitas operasi sebesar Rp81.790.323.280,07

Arus Masuk Kas	Rp951.745.981.854,25
Arus Keluar Kas	(Rp869.955.658.574,18)
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp 81.790.323.280,07

V.E.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.E.2.a Arus Masuk Kas	**290.794.000,00**	**380.741.100,00**

Pada Tahun 2025 terdapat penerimaan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp290.794.000,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penjualan BMD secara langsung mobil dinas Pejabat	277.644.000,00
2.	Penjualan atas gedung dan bangunan	13.150.000,00
	Jumlah	290.794.000,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.E.2.b Arus Keluar Kas	**45.656.214.008,30**	**102.187.717.063,16**

Pada Tahun 2025 terdapat pengeluaran kas dari aktivitas investasi sebesar Rp102.187.717.063,16. Pengeluaran kas dimaksud ditujukan untuk perolehan aset tetap sebagai berikut.

Tabel 5.5.3
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	12.620.746.293,00	24.237.257.450,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	17.140.691.453,30	28.954.072.575,16
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.025.674.732,00	45.054.989.838,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.617.797.530,00	3.810.397.200,00
6	Perolehan Aset Tak berwujud	251.304.000,00	131.000.000,00
	Jumlah	**45.656.214.008,30**	**102.187.717.063,16**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(45.365.420.008,30)**	**(101.806.975.963,16)**

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Pada Tahun 2025 arus kas bersih (arus masuk kas - arus keluar kas) dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(45.365.420.008,30).

Arus Masuk Kas	Rp	290.794.000,00
Arus Keluar Kas	Rp	45.656.214.008,30
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp	(45.365.420.008,30)

V.E.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Posisi selama Tahun 2024 arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan adalah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.E.3.a Arus Masuk Kas	**0,00**	**0,00**

Pada Tahun 2025 tidak terdapat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan yang diterima kembali.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.E.3.b Arus Keluar Kas	**1.500.000.000,00**	**0,00**

Pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan yang akan diterima kembali dan atau dibayar kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang dan utang jangka panjang. Pada Tahun 2025 arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.500.000.000,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(1.500.000.000,00)**	**0,00**

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp(1.500.000.000,00).

V.E.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.E.4.a Arus Masuk Kas	**54.487.435.652,00**	**56.445.682.997,00**

Arus masuk kas selama Tahun 2025 sebesar Rp54.487.435.652,00 yang berasal dari penerimaan PFK dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.5.4

Penerimaan PFK Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penerimaan IWP	3.191.521.036,00	2.590.096.479,00
2	Penerimaan TASPEN	14.929.303.726,00	14.584.219.458,00
3	Penerimaan BPJS 4%	13.857.785.463,00	10.382.099.348,00
4	Penerimaan JKK	502.473.969,00	471.900.283,00
5	Penerimaan JKM	1.501.736.251,00	1.415.695.004,00
6	Penerimaan PPN	9.897.375.276,00	15.877.958.425,00
7	Penerimaan PPh Psl 21	8.864.166.566,00	8.300.617.325,00
8	Penerimaan PPh Fsl 22	867.309.795,00	856.008.682,00
9	Penerimaan PPh Psl 23	184.721.771,00	270.969.525,00
10	Penerimaan PPh Psl 4	691.041.799,00	1.696.118.468,00
	Jumlah	**54.487.435.652,00**	**56.445.682.997,00**

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2025 merupakan penerimaan dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga.

	Tahun 2025 (Rp)	2024 Tahun (Rp)
V.E.4.b Arus Keluar Kas	**54.487.435.652,00**	**56.453.142.290,00**

Arus keluar kas selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp54.487.435.652,00 yang berasal dari penyetoran PFK, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.5

Penyetoran PFK Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penyetoran IWP	3.191.521.036,00	2.590.096.479,00
2	Penyetoran TASPEN	14.929.303.726,00	14.584.219.458,00
3	Penyetoran BPJS 4%	13.857.785.463,00	10.382.099.348,00
4	Penyetoran JKK	502.473.969,00	471.900.283,00
5	Penyetoran JKM	1.501.736.251,00	1.415.695.004,00
6	Penyetoran PPN	9.897.375.276,00	15.882.067.685,00
7	Penyetoran PPh Psl 21	8.864.166.566,00	8.300.617.325,00
8	Penyetoran PPh Psl 22	867.309.795,00	856.546.715,00
9	Penyetoran PPh Psl 23	184.721.771,00	270.969.525,00
10	Penyetoran PPh Psl 26	0,00	0,00
11	Penyetoran PPh Psl 4	691.041.799,00	1.698.930.468,00
	Jumlah	**54.487.435.652,00**	**56.453.142.290,00**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**0,00**	**(7.459.293,00)**

Pada Tahun 2025 arus kas bersih (arus masuk kas – arus keluar kas) dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kenaikan / Penurunan Kas	**34.924.903.271,77**	**(42.352.928.781,50)**

Merupakan total kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Pada Tahun 2025 terjadi kenaikan kas (arus masuk kas – arus keluar kas) sebesar Rp34.924.903.271,77. Namun karena adanya pengurangan saldo Kas Daerah sebesar Rp589.849.590,00 sehingga nilai kenaikan kas menjadi sebesar Rp34.335.053.681,77.

Tabel 5.5.6

Kenaikan / Penurunan Kas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	34.335.053.681,77	(42.352.928.781,50)	76.687.982.463,27
Saldo Awal Kas	4.085.069.988,55	46.437.998.770,05	(42.352.928.781,50)
Saldo Akhir Kas	38.420.123.670,32	4.085.069.988,55	34.335.053.681,77

Saldo akhir Kas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.420.123.670,32 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.7

Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	35.693.263.773,72	1.714.291.612,49	33.978.972.161,23
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	6.925.010,00	(6.925.010,00)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Saldo Akhir Kas di BLUD	2.450.038.357,60	1.272.541.885,06	1.177.496.512,54
Saldo Akhir pada Dana BOS	52.396.305,00	36.378.712,00	16.017.593,00
Saldo Akhir Kas lainnya	224.425.194,00	1.054.932.769,00	(830.507.575,00)
Jumlah	**38.420.123.670,32**	**4.085.069.988,55**	**34.335.053.681,77**

Saldo akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 seharusnya adalah sebesar Rp36.283.113.363,72, namun telah terjadi kekurangan kas sebesar Rp589.849.590,00, nilai saldo Kas di Kas Daerah menjadi sebesar Rp35.693.263.773,72. Hal ini terjadi berkaitan dengan Kasus an. Budi Yono yang merupakan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Nomor : LAP/05/ATT/Inspektorat-2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pencairan SP2D Ganda dengan Kegiatan yang sama pada Sekretariat DPRD dan Pencairan SP2D pada Dinas Pendidikan ke Rekening Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) a.n. Budi Yono Tahun Anggaran 2025. Telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 900.1.11.4/01/SKTJM-2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh Budi Yono. Kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya, dan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg, tanggal surat 15 Desember 2025 dan Nomor Surat Pelimpahan B-3202/L.3.24/Ft.1/12/2025. Saat ini status perkara adalah permohonan banding dari pihak penuntut umum/jaksa. Sehingga pada saat laporan ini disusun masih menunggu keputusan *inkracht* sidang di Pengadilan Negeri Padang.

VF. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.F.	**Ekuitas**	**2.388.311.446.511,62**	**2.421.166.191.465,57**

Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.388.311.446.511,62 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.421.166.191.465,57

Uraian dan rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut.

Saldo awal ekuitas	Rp	2.421.166.191.465,57
Surplus/Defisit LO	Rp	(31.222.873.330,10)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar		
a. Koreksi Persediaan	Rp	0,00
b. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
c. Lain-Lain	Rp	(1.631.871.623,85)
Saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas	**Rp**	**2.388.311.446.511,62**

BAB VI
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

VI.A Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Visi

Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, mempunyai visi yaitu.

"Dharmasraya Sejahtera Merata"

Definisi kalimat Visi RPJMD:

Sejahtera:

Menggambarkan kondisi masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang mengalami kondisi kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik serta mampu bersaing secara regional dan nasional.

Merata:

Kabupaten Dharmasraya diharapan adanya pemerataan pembangunan yang merata yang diukur dari indikator kinerja pembangunan kewilayahan berdasarkan kecamatan ataupun tingkat nagari.

Misi

Berdasarkan VISI di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempunyai enam Misi, yaitu.

1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.
2. Pemerintahan Yang Transparan, Profesional, Efektif Dan Efisien.
3. Mengembangkan Sistem, Kebijakan Dan Implementasi Pelestarian Lingkungan.
4. Membangun SDM untuk Menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata.
5. Transformasi ekonomi.
6. Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Letak dan Luas Wilayah

Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m - 1.500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Dharmasraya mempunyai luas wilayah ± 2.961,13 Km atau 296.113 Ha. Secara geografis Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi 0^0 47'07" Lintang Selatan dan 1^0 41' 56" Lintang Selatan dan,101^0 09' 21",BT-- 101^0 54' 27" Bujur Timur.

Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan, luas wilayah menurut per kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah
1	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	47,63
2	Koto Besar	Koto Besar	488,19
3	Asam Jujuhan	Sungai Limau	257,72
4	Koto Baru	Koto Baru	251,35
5	Koto Salak	Koto Salak	464,39
6	Tiumang	Tiumang	129,18
7	Padang Laweh	Padang Laweh	59,76
8	Sitiung	Sitiung	87,68
9	Timpeh	Tabek	237,93
10	Pulau Punjung	Sungai Dareh	482,50
11	Sembilan Koto	Sembilan Koto	454,80
	Luas Dharmasraya		2.961,13

Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka 2025

Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh jalur lalu lintas Sumatera dan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Dharmasraya, penduduk Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2025 berjumlah 244.110 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 83,79 jiwa/km². Jumlah Penduduk terbanyak di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 50.040 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit pada Kecamatan Padang Laweh dengan jumlah penduduk 7.020 jiwa, dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Distribusi Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km	Rasio Jenis Kelamin
1.	Sungai Rumbai	24,90	11,30	10,04	522,74	102,95
2.	Koto Besar	29,89	11,55	12,05	61,23	100,14
3.	Asam Jujuhan	9,47	0 ,20	3,82	36,75	110,79
4.	Koto Baru	34,27	5,96	13,81	136,36	98,98
5.	Koto Salak	18,85	7,67	7,60	40,58	101,34
6.	Tiumang	14,18	8,45	5,71	109,76	100,89
7.	Padang Laweh	7,02	9,27	2,83	117,54	98,31

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Distribusi Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km	Rasio Jenis Kelamin
8.	Sitiung	30,55	8,42	12,31	348,39	104,11
9.	Timpeh	18,76	11,52	7,56	78,86	104,76
10.	Pulau Punjung	50,04	10,94	20,17	103,70	103,88
11	Sembilan Koto	10,18	9,23	4,10	22037	104,71
Jumlah		**248,11**	**9,11**	**100**	**83,79**	**102,50**

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025.

Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 6.326 orang Aparatur Sipil Negara yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari:

Tabel 6.3

Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	882	2094	2976
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	401	1633	2034
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu	678	638	1316
	Total	**1.961**	**4.365**	**6.326**

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya

VI.B Susunan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, Jumlah entitas akuntansi pada tahun 2024 berkurang 1 dari jumlah 38 entitas pada tahun 2023, menjadi 37 entitas pada tahun 2024. RSUD Sungai Dareh pada Tahun 2024 bukan merupakan SKPD. Sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, mencabut Peraturan Bupati Dharmasraya

Nomor 89 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah. Ketentuan pasal 3 ayat (3) menjabarkan bahwa UPTD RSUD Sungai Dareh dipimpin oleh Direktur RSUD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Sehingga terhitung Tahun 2024, secara teknis RSUD Sungai Dareh merupakan UPTD dibawah Dinas Kesehatan dan bukan merupakan SKPD.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016, susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya dibagi dalam tiga tipe,yaitu.

1. Perangkat Daerah Tipe A, yaitu.
    1) Sekretariat Daerah
    2) Inspektorat
    3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
    4) Badan Keuangan Daerah
    5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    7) Dinas Pertanian
    8) Kecamatan Asam Jujuhan
    9) Kecamatan Koto Baru
    10) Kecamatan Koto Besar
    11) Kecamatan Koto Salak
    12) Kecamatan Pulau Punjung
    13) Kecamatan Sembilan Koto
    14) Kecamatan Sitiung
    15) Kecamatan Sungai Rumbai
    16) Kecamatan Timpeh
    17) Kecamatan Tiumang

2. Perangkat Daerah Tipe B, yaitu.
    1) Dinas Pendidikan
    2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga
    3) Dinas Kesehatan
    4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
    6) Dinas Komunikasi dan Informatika,
    7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    8) Dinas Lingkungan Hidup
    9) Kecamatan Padang Laweh
    10) Dinas Pangan dan Perikanan

3. Perangkat Daerah Tipe C, yaitu.
    1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    2) Sekretariat DPRD
    3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
    4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
    5) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
    6) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan,dan
    7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
    8) Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berjumlah 35 Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 3 Badan dan 11 Kecamatan. Selain 35

Perangkat Daerah tersebut, ada 1 SKPD yang tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 yakni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 1 SKPD mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berikut rincian Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan/urusan penunjang, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6.4
SKPD Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Urusan/Urusan Penunjang

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
1	Pendidikan	1.	Dinas Pendidikan
2	Kebudayaan	2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Kepemudaan dan Olahraga		
4	Pariwisata		
5	Kesehatan	3	Dinas Kesehatan
6	Sosial	4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
9	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Pol PP)		
13	Penanaman Modal	8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menegah dan Perdagangan
15	Perindustrian		
13	Perdagangan		
17	Energi dan Sumber Daya Mineral		-
18	Transmigrasi	10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
19	Tenaga Kerja		
20	Komunikasi dan Informatika	11	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Statistik		
22	Persandian		
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
25	Pertanahan		
26	Perhubungan	14	Dinas Perhubungan
27	Lingkungan Hidup	15	Dinas Lingkungan Hidup
28	Kehutanan		-
29	Pangan	16	Dinas Pangan dan Perikanan
30	Pertanian	17	Dinas Pertanian
31	Kelautan dan Perikanan		-
32	Perpustakaan	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
33	Kearsipan		
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
35	Perencanaan	20	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
36	Penelitian dan Pengembangan		
37	Keuangan	21	Badan Keuangan Daerah
38	Sekretariat Daerah	22	Sekretariat Daerah
39	Sekretariat Dewan	23	Sekretariat DPRD
40	Inspektorat	24	Inspektorat
41	Kecamatan Asam Jujuhan	25	Kecamatan Asam Jujuhan
42	Kecamatan Koto Baru	26	Kecamatan Koto Baru
43	Kecamatan Koto Besar	27	Kecamatan Koto Besar
44	Kecamatan Koto Salak	28	Kecamatan Koto Salak
45	Kecamatan Padang Laweh	29	Kecamatan Padang Laweh
46	Kecamatan Pulau Punjung	30	Kecamatan Pulau Punjung
47	Kecamatan IX Koto	31	Kecamatan IX Koto
48	Kecamatan Sitiung	32	Kecamatan Sitiung
49	Kecamatan Sungai Rumbai	33	Kecamatan Sungai Rumbai
50	Kecamatan Timpeh	34	Kecamatan Timpeh
51	Kecamatan Tiumang	35	Kecamatan Tiumang

Kabupaten Dharmasraya telah melakukan Pemilu Legislatif pada tanggal 14 Februari 2024 dan pelantikan terhadap 30 orang anggota DPRD terpilih untuk periode 2024 s.d. 2029 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024, sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya definif dilantik pada tanggal 27 Desember 2024.

Tahun 2024 Kabupaten Dharmasraya juga telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) pada tanggal 14 Februari 2024. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya terpilih untuk periode 2024 s.d. 2029 dilaksanakan tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia.

Secara umum Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, yaitu.

1) Bupati : Annisa Suci Ramadhani, S.H., LL.M
2) Ketua DPRD : Jemi Hendra, S.T.
3) Sekretaris Daerah : Adlisman, S.Sos., M.Si (2021 s.d. 14 Mei 2025)
4) Pj. Sekretaris Daerah : Drs. Jasman, M.M. (18 Mei 2025 s.d. 6 Mei 2026)

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya resmi memiliki Sekretaris Daerah definitif setelah Bupati Dharmasraya melantik Medison, S.Sos, M.Si pada tanggal 7 Mei 2026 yang lalu.

Berikut Nama Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya terpilih dari tahun 2005 s.d. sekarang.

Tabel 6.5
Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Terpilih

No	Bupati	Wakil Bupati	Masa Jabatan
1	H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, SE	Ir. Tugimin	2005-2010
2	Ir. H. Adi Gunawan, MM	Drs. H. Syafruddin R (almarhum)	2010-2015

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
35	Perencanaan	20	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
36	Penelitian dan Pengembangan		
37	Keuangan	21	Badan Keuangan Daerah
38	Sekretariat Daerah	22	Sekretariat Daerah
39	Sekretariat Dewan	23	Sekretariat DPRD
40	Inspektorat	24	Inspektorat
41	Kecamatan Asam Jujuhan	25	Kecamatan Asam Jujuhan
42	Kecamatan Koto Baru	26	Kecamatan Koto Baru
43	Kecamatan Koto Besar	27	Kecamatan Koto Besar
44	Kecamatan Koto Salak	28	Kecamatan Koto Salak
45	Kecamatan Padang Laweh	29	Kecamatan Padang Laweh
46	Kecamatan Pulau Punjung	30	Kecamatan Pulau Punjung
47	Kecamatan IX Koto	31	Kecamatan IX Koto
48	Kecamatan Sitiung	32	Kecamatan Sitiung
49	Kecamatan Sungai Rumbai	33	Kecamatan Sungai Rumbai
50	Kecamatan Timpeh	34	Kecamatan Timpeh
51	Kecamatan Tiumang	35	Kecamatan Tiumang

Kabupaten Dharmasraya telah melakukan Pemilu Legislatif pada tanggal 14 Februari 2024 dan pelantikan terhadap 30 orang anggota DPRD terpilih untuk periode 2024 s.d. 2029 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024, sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya definif dilantik pada tanggal 27 Desember 2024.

Tahun 2024 Kabupaten Dharmasraya juga telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) pada tanggal 14 Februari 2024. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya terpilih untuk periode 2024 s.d. 2029 dilaksanakan tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia.

Secara umum Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, yaitu.

1) Bupati : Annisa Suci Ramadhani, S.H., LL.M
2) Ketua DPRD : Jemi Hendra, S.T.
3) Sekretaris Daerah : Adlisman, S.Sos., M.Si (2021 s.d. 14 Mei 2025)
4) Pj. Sekretaris Daerah : Drs. Jasman, M.M. (18 Mei 2025 s.d. 6 Mei 2026)

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya resmi memiliki Sekretaris Daerah definitif setelah Bupati Dharmasraya melantik Medison, S.Sos, M.Si pada tanggal 7 Mei 2026 yang lalu.

Berikut Nama Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya terpilih dari tahun 2005 s.d. sekarang.

Tabel 6.5
Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Terpilih

No	Bupati	Wakil Bupati	Masa Jabatan
1	H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, SE	Ir. Tugimin	2005-2010
2	Ir. H. Adi Gunawan, MM	Drs. H. Syafruddin R (almarhum)	2010-2015

No	Bupati	Wakil Bupati	Masa Jabatan
3	Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE	Amrizal Dt. Rajo Medan, S.Sos	2015-2020
4	Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE, M.AP	Drs. Dasril Panin Dt. Labuan (almarhum)	2020-2025
5	Annisa Suci Ramadhani, S.H., LL.M	Leli Arni, S.Pd., M.Si.	2025-2030

VI.C Pelaksanaan KPBU

Kabupaten Dharmasraya melaksanakan Kegiatan Peningkatan Insfrastruktur Ketersediaan Jasa Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha *(Unsolicited)* Tahun 2023-2025. Sebagai Badan Usaha Pemrakarsa adalah PT. Maradon Berlian Sakti dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) adalah PT Dharmasraya Kilau Abadi.

KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan sebuah pembagian risiko antara para pihak. Kegiatan dimulai sejak Badan Usaha menyampaikan proposal sebagai berikut :

Tabel 6.6

Timeline KPBU Prakarsa Badan Usaha *(Unsolicited)* Dharmasraya

No.	Uraian	Tanggal	Keterangan
1.	Penyampaian proposal oleh Badan Usaha	5 April 2021	Disampaikan oleh PT Maradon Berlian Sakti
2.	Pra Studi Kelayakan	29 September 2021	Disampaikan oleh PT Maradon Berlian Sakti
3.	Studi Kelayakan	Tanpa tanggal	Disampaikan oleh PT Maradon Berlian Sakti
4.	Evaluasi FS	5 Januari 2022	PJKP dibantu oleh Pusat Studi Keuangan dan Pembangunan Universitas Andalas
5.	Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa	31 Maret 2022	SK Bupati Nomor 600/132/DPUPR/III/2022
6.	Reviu kelengkapan dokumen FS Pertama (persentase kelengkapan 34%)	4 Juli 2022	Surat Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas Nomor 08563/PP.01.04/Dt.8.6/T/06/2022
7.	Reviu kelengkapan dokumen FS Kedua (persentase kelengkapan 76%)	2 Maret 2023	Surat Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementrian PPN/ Bappenas Nomor B-03512/ Dt.8.5/PP.08.01/03/2023. Syarat menimal kelengkapan 70 %
8.	Market Sounding	13 Maret 2023	Melalui daring bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal
9.	Pemilihan Badan Usaha Pelaksana (BUP)	14 April 2023 s.d 25 Agustus 2023	Oleh Tim Pengadaan
10.	Revie kelengkapan dokumen FS Ketiga (persentase kelengkapan 96,9%)	11 Juli 2023	Surat Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementrian PPN/ Bappenas Nomor B-12997/ Dt.8.5/PP.08.01/07 /2023. Syarat menimal kelengkapan 70 %
11.	Penetapan BUP	25 Agustus 2023	Pengumuman Hasil Penunjukan Langsung Nomor 000.3.3/08/KPBU-PJU/VIII-2023
12.	Perjanjian Kerja Sma (PKS) KPBU	19 September 2023	Antara PJPK dengan PT Dharmasraya Kilau Abadi selaku BUP dengan masa konstruksi proyek selama 12 bulan sejak tanggal 18 September 2023 s.d 21 September 2024

No.	Uraian	Tanggal	Keterangan
13.	Amandemen I	28 Februari 2024	Perubahan pasal - pasal dalam PKS KPBU (tidak didukung justifikasi teknis)
14.	Amandemen II	25 Maret 2024	Perubahan lingkup pekerjaan yakni mengurangi item pekerjaan lama dan menambah item pekerjaan baru (tidak didukung justifikasi teknis)
15.	Amandemen III	25 November 2024	Mengubah waktu masa konstruksi menjadi 10 bulan sejak tanggal 3 Februari 2024 s.d 6 Desember 2024 dan penambahan item biaya komisioning (tidak didukung justifikasi teknis)

Pada Tahun 2025 pembayaran jasa berupa Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* pada Dinas Perhubungan belum terealisasi secara optimal. Dianggarkan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp9.300.000.000,00, dengan satu kali realisasi pembayaran tagihan pada bulan Januari 2025 sebesar Rp778.141.861,00. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan masih menunggu selesainya proses reviu dan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan perjanjian KPBU PJU Kabupaten Dharmasraya. Sehingga Pemerintah Daerah menunda realisasi belanja sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan kesesuaian perencanaan, skema pembiayaan. serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Audit dengan Nomor PE.04.03/LHP-337/PW03/5/2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Jasa Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha *(Unsolicited)* Tahun 2023-2025.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pendampingan dari BPKP untuk dapat mengukur nilai aset dan kewajiban yang muncul dari pelaksanaan perjanjian KPBU dan menyajikannya di Laporan Keuangan.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean goverment*).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, terutama dalam mengemban tugas, amanah, pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BUPATI DHARMASRAYA

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
1	BKD	Piutang Pajak	25.474.630.116,00	6.946.828.005,00	4.587.283.048,00	27.834.175.073,00
		- Pajak PBB-P2	24.014.340.394,00	5.627.104.087,00	3.324.282.326,00	26.317.162.155,00
		- Pajak Penerangan Jalan	1.250.349.347,00	1.313.490.012,00	1.250.349.347,00	1.313.490.012,00
		- Pajak Reklame	13.509.375,00	6.233.906,00	12.651.375,00	7.091.906,00
		- Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	196.431.000,00	0,00	0,00	196.431.000,00
2	Dinas Kesehatan	Piutang Retribusi	6.774.178.699,00	7.746.985.896,00	5.828.430.718,00	8.692.733.877,00
	DLH	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.431.394.188,00	7.322.998.696,00	5.687.225.618,00	7.067.167.266,00
	Diskumperdag	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	60.953.000,00	92.774.400,00	60.953.000,00	92.774.400,00
	DPMTSP	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	169.624.261,00	0,00	0,00	169.624.261,00
		- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8.618.000,00	61.550.000,00	9.326.000,00	60.842.000,00
		- Retribusi Los	6.380.000,00	8.180.000,00	6.380.000,00	8.180.000,00
		- Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah	1.097.209.250,00	261.482.800,00	64.546.100,00	1.294.145.950,00
3	BKD	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.529.319.459,00	5.058.604.307,00	5.529.319.459,00	5.058.604.307,00
4	BKD	Piutang Lain-lain PAD yang sah	6.818.492.334,53	1.070.590.416,66	752.781.315,38	7.136.301.435,81
		- Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	0,00	0,00	554.897.679,00
		- Piutang TGR	6.257.847.164,53	1.070.090.816,66	751.490.515,38	6.576.447.465,81
		- Piutang Pengembalian Belanja	5.129.991,00	0,00	1.000.000,00	4.129.991,00
		- Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain	146.000,00	99.600,00	114.800,00	130.800,00
		- Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	471.500,00	400.000,00	176.000,00	695.500,00
5	BKD	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	15.091.731.000,00	0,00	6.497.079.000,00	8.594.652.000,00
6		Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	21.749.014.918,00	13.784.261.132,00	21.749.014.918,00	13.784.261.132,00

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
	BKD	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.801.253.820,00	0,00	3.801.253.820	0,00
		- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.528.623.806,00	0,00	1.528.623.806,00	0,00
		- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	16.321.017.625,00	13.770.526.155,00	16.321.017.625,00	13.770.526.155,00
		- Pajak Air Permukaan (PAP)	98.119.667,00	13.734.977,00	98.119.667,00	13.734.977,00
7	BKD	Piutang Pendapatan Lainnya	459.480,00	1.126.650,00	459.480,00	1.126.650,00
		Jumlah	81.437.826.006,53	34.608.396.406,66	44.944.367.938,38	71.101.854.474,81

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	JUMLAH			

NIHIL

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya	554.897.679,00	554.897.679,00	0,00
	1. Kec. Pulau Punjung	122.349.281,00	0,00	0,00
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	0,00	122.349.281,00	0,00
				0,00
	2. Kec. Sitiung	42.186.005,00	0,00	0,00
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	0,00	42.186.005,00	0,00
				0,00
	3. Kec. Koto Baru	339.304.897,00	0,00	0,00
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	0,00	339.304.897,00	0,00
				0,00
	4. Kec. Sungai Rumbai	51.057.496,00	0,00	0,00
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	0,00	51.057.496,00	0,00
JUMLAH		554.897.679,00	554.897.679,00	0,00

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10	11	12	13 = 9-12
1.	2007	PT BPD Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari	Perda No. 2 Tahun 2009	1.000 lembar saham seri A,000013	1.000.000.000,00	27.352.000.000,00		28.852.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.852.000.000,00
	2009			322 lembar saham Seri A,000033	322.000.000,00							
	2010			9.678 lembar saham seri A,000052	9.678.000.000,00							
	2012			3.236 lembar saham seri A,000088	3.236.000.000,00							
	2013		Perda No.3 Tahun 2013	5.400 lembar saham seri A,000118	5.400.000.000,00							
	2017		Perda No.8 Tahun 2017	3.716 lembar saham seri A,1427724	3.716.000.000,00							
	2019			2.500 lembar saham seri A,000232	2.500.000.000,00							
	2023			1.500 lembar saham seri A,000276	1.500.000.000,00							
	2025			1.500 lembar saham seri A,000297			1.500.000.000,00					
2.	2007	PT. Balairung Citra Jaya Sumbar	Perda No. 2 Tahun 2013	900 lembar saham seri A,55.296-56.195	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
	2008			600 lembar saham seri A,36.864.299-37.464.298			0,00					
3.	2012	PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung	Perda No. 2 Tahun 2009	10.000 lembar saham seri B 0542	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
JUMLAH					**28.952.000.000,00**	**28.952.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**30.452.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.452.000.000,00**

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XII
RPERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	OPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat DPRD	64.432.003.445,00	1.762.369.969,00	1.761.160.000,00	64.433.213.414,00
2	Sekretariat Daerah	489.396.082.757,06	3.362.979.404,00	4.331.738.999,00	488.427.323.162,06
3	Kec. Pulau Punjung	2.441.437.545,00	-	0,00	2.441.437.545,00
4	Kec. Sitiung	2.045.752.865,00	-	0,00	2.045.752.865,00
5	Kec. Koto Baru	3.476.016.386,00	-	0,00	3.476.016.386,00
6	Kec. Sungai Rumbai	2.932.911.053,00	-	0,00	2.932.911.053,00
7	Kec. IX Koto	771.855.379,00	-	33.878.000,00	737.977.379,00
8	Kec. Timpeh	3.462.390.939,00	-	0,00	3.462.390.939,00
9	Kec. Padang Laweh	1.862.972.433,00	-	0,00	1.862.972.433,00
10	Kec Tiumang	2.889.787.284,00	-	0,00	2.889.787.284,00
11	Kec Koto Besar	3.184.799.052,00	21.750.000,00	12.550.000,00	3.193.999.052,00
12	Kec Koto Salak	2.604.556.224,00	-	0,00	2.604.556.224,00
13	Kec. Asam Jujuhan	3.281.446.225,00	-	0,00	3.281.446.225,00
14	Dinas PUPR	1.744.083.206.042,98	126.934.483.739,00	7.770.845.964,00	1.863.246.843.817,98
15	Dinas PERKIMTAN	73.273.465.064,00	5.414.307.000,00	56.174.800,00	78.631.597.264,00
16	Dinas Perhubungan	23.772.937.066,00	2.464.107.611,00	121.655.136,00	26.115.389.541,00
17	Dinas Kesehatan	502.755.164.821,08	11.725.864.945,83	13.500.140.744,00	500.980.889.022,91
18	Dinas Pendidikan	510.714.707.648,42	48.281.312.148,64	1.487.831.185,30	557.508.188.611,76
19	Dinas BUDPARPORA	105.578.285.880,85	1.093.791.020,00	0,00	106.672.076.900,85
20	Dinas TRANSNAKER	7.092.745.581,00	214.639.657,00	330.845.000,00	6.976.540.238,00
21	DINSOSP3APPKB	9.875.325.704,19	1.672.726.423,24	68.239.088,00	11.479.813.039,43
22	DISDUKCAPIL	5.307.675.730,00	1.774.400,00	3.960.000,00	5.305.490.130,00
23	Dinas PMD	2.180.882.000,00	600.980.645,00	0,00	2.781.862.645,00
24	Dinas Pertanian	39.137.394.227,35	12.408.463.657,00	1.054.280.939,00	50.491.576.945,35
25	Dinas Pangan dan Perikanan	21.141.605.951,50	293.472.486,59	0,00	21.435.078.438,09

NO	OPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
26	Dinas KUMPERDAG	81.208.867.956,80	255.803.440,00	22.452.000,00	81.442.219.396,80
27	BKD	11.599.287.335,00	160.159.950,00	167.357.250,00	11.592.090.035,00
28	DPMPTSP	2.723.014.529,00	164.114.250,00	0,00	2.887.128.779,00
29	Inspektorat Kabupaten	4.788.577.735,00	985.000,00	510.235.000,00	4.279.327.735,00
30	BAPPPEDA	1.696.107.762,00	17.121.454,00	222.890.057,00	1.490.339.159,00
31	DLH	17.696.095.085,39	1.168.920.595,00	222.011.298,00	18.643.004.382,39
32	Badan KESBANGPOL	480.139.500,00	471.830.407,00	11.935.000,00	940.034.907,00
33	Dinas SATPOL PP dan DAMKAR	6.526.600.596,00	849.633.590,00	0,00	7.376.234.186,00
34	BPBD	15.015.870.044,00	1.329.562.994,00	0,00	16.345.433.038,00
35	BKPSDM	2.100.096.395,00	-	196.616.849,00	1.903.479.546,00
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.925.693.047,00	632.736.564,00	43.990.000,00	17.514.439.611,00
37	Dinas KOMINFO	5.068.278.146,00	2.115.220.167,00	329.458.352,00	6.854.039.961,00
	JUMLAH	**3.793.524.035.435,62**	**223.419.111.517,30**	**32.260.245.661,30**	**3.984.682.901.291,62**

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	OPD	NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024	MUTASI		NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2025
			TAMBAH	KURANG	
1	Sekretariat DPRD	64.432.003.445,00	1.762.369.969,00	1.761.160.000,00	64.433.213.414,00
2	Sekretariat Daerah	489.396.082.757,06	3.362.979.404,00	4.331.738.999,00	488.427.323.162,06
3	Kec. Pulau Punjung	2.441.437.545,00	-	-	2.441.437.545,00
4	Kec. Sitiung	2.045.752.865,00	-	-	2.045.752.865,00
5	Kec. Koto Baru	3.476.016.386,00	-	0,00	3.476.016.386,00
6	Kec. Sungai Rumbai	2.932.911.053,00	-	0,00	2.932.911.053,00
7	Kec. IX Koto	771.855.379,00	-	33.878.000,00	737.977.379,00
8	Kec. Timpeh	3.462.390.939,00	-	0,00	3.462.390.939,00
9	Kec. Padang Laweh	1.862.972.433,00	-	0,00	1.862.972.433,00
10	Kec Tiumang	2.889.787.284,00	-	0,00	2.889.787.284,00
11	Kec Koto Besar	3.184.799.052,00	21.750.000,00	12.550.000,00	3.193.999.052,00
12	Kec Koto Salak	2.604.556.224,00	-	0,00	2.604.556.224,00
13	Kec. Asam Jujuhan	3.281.446.225,00	-	0,00	3.281.446.225,00
14	Dinas PUPR	1.744.083.206.042,98	126.934.483.739,00	7.770.845.964,00	1.863.246.843.817,98
15	Dinas PERKIMTAN	73.273.465.064,00	5.414.307.000,00	56.174.800,00	78.631.597.264,00
16	Dinas Perhubungan	23.772.937.066,00	2.464.107.611,00	121.655.136,00	26.115.389.541,00
17	Dinas Kesehatan	502.755.164.821,08	11.725.864.945,83	13.500.140.744,00	500.980.889.022,91
19	Dinas Pendidikan	510.714.707.648,42	48.281.312.148,64	1.487.831.185,30	557.508.188.611,76
20	Dinas BUDPARPORA	105.578.285.880,85	1.093.791.020,00	0,00	106.672.076.900,85
21	Dinas TRANSNAKER	7.092.745.581,00	214.639.657,00	330.845.000,00	6.976.540.238,00
22	DINSOSP3APPKB	9.875.325.704,19	1.672.726.423,24	68.239.088,00	11.479.813.039,43
23	DISDUKCAPIL	5.307.675.730,00	1.774.400,00	3.960.000,00	5.305.490.130,00
24	Dinas PMD	2.180.882.000,00	600.980.645,00	0,00	2.781.862.645,00
25	Dinas Pertanian	39.137.394.227,35	12.408.463.657,00	1.054.280.939,00	50.491.576.945,35
26	Dinas Pangan dan Perikanan	21.141.605.951,50	293.472.486,59	0,00	21.435.078.438,09
27	Dinas KUMPERDAG	81.208.867.956,80	255.803.440,00	22.452.000,00	81.442.219.396,80
28	BKD	11.599.287.335,00	160.159.950,00	167.357.250,00	11.592.090.035,00

NO	OPD	NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024	MUTASI		NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2025
			TAMBAH	KURANG	
29	DPMPTSP	2.723.014.529,00	164.114.250,00	0,00	2.887.128.779,00
30	Inspektorat Kabupaten	4.788.577.735,00	985.000,00	510.235.000,00	4.279.327.735,00
31	BAPPPEDA	1.696.107.762,00	17.121.454,00	222.890.057,00	1.490.339.159,00
32	DLH	17.696.095.085,39	1.168.920.595,00	222.011.298,00	18.643.004.382,39
33	Kantor KESBANGPOL	480.139.500,00	471.830.407,00	11.935.000,00	940.034.907,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	6.526.600.596,00	849.633.590,00	0,00	7.376.234.186,00
35	BPBD	15.015.870.044,00	1.329.562.994,00	0,00	16.345.433.038,00
36	BKPSDM	2.100.096.395,00	-	196.616.849,00	1.903.479.546,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.925.693.047,00	632.736.564,00	43.990.000,00	17.514.439.611,00
38	Dinas KOMINFO	5.068.278.146,00	2.115.220.167,00	329.458.352,00	6.854.039.961,00
	JUMLAH	**3.793.524.035.435,62**	**223.419.111.517,30**	**32.260.245.661,30**	**3.984.682.901.291,62**

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	OPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	MUTASI									REKLASIFIKASI / PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			BERKURANG				BERTAMBAH						
			ASET LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	PERALATAN DAN MESIN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	Dinas PUPR	2.632.024.000,00			99.921.000,00					195.940.582,00			2.728.043.582,00
2	Dinas PERKIMTAN	199.620.000,00											199.620.000,00
3	Dinas Pendidikan	78.563.589,00						10.820.000,00					89.383.589,00
4	Dinas Kesehatan							3.009.045.011,00					3.009.045.011,00
5	DISKUMPERDAG												0,00
6	DINSOSP3APPKB	60.544.088,00		60.544.088,00									0,00
	JUMLAH	**2.970.751.677,00**	**0,00**	**60.544.088,00**	**99.921.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.019.865.011,00**	**0,00**	**195.940.582,00**	**0,00**	**0,00**	**6.026.092.182,00**

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	**Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**	**287.907.729,00**	**589.849.590,00**	**0,00**	**877.757.319,00**
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	287.907.729,00	589.849.590,00		877.757.319,00
2	**Aset lain-lain**	225.626.423.917,27	21.244.121.019,00	133.640.414.256,00	113.230.130.680,27
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	84.342.259.219,27	19.678.403.133,00	1.674.285.000,00	102.346.377.352,27
	Aset Yang Dipinjampakaikan	8.603.095.542,00	1.565.717.886,00	1.359.824.100,00	8.808.989.328,00
	Aset Yang Akan Diserahkan Kemasyarakat	132.681.069.156,00		130.606.305.156,00	2.074.764.000,00
3	**Aset Tidak Berwujud**	4.557.476.277,00	251.304.000,00	0,00	4.808.780.277,00
	Aset Tidak Berwujud	4.557.476.277,00	251.304.000,00	0,00	4.808.780.277,00
4	Dana Transfer – TDF	1.156.963.000,00	0,00	1.156.963.000,00	0,00
	Dana Transfer – TDF	1.156.963.000,00		1.156.963.000,00	0,00
	JUMLAH	**231.628.770.923,27**	**22.085.274.609,00**	**134.797.377.256,00**	**118.916.668.276,27**

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER DARI KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH							

NIHIL

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	140.789.551,00	0,00	140.789.551,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	3.032.855.895,36	114.887.626,67	3.032.855.895,36	114.887.626,67
3	Utang Belanja	23.667.417.832,03	25.685.706.465,21	23.667.417.832,03	25.685.706.465,21
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.891.202.700,00	0,00	0,00	4.891.202.700,00
	JUMLAH	31.732.265.978,39	25.800.594.091,88	26.841.063.278,39	30.691.796.791,88

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			
	JUMLAH	-	-	-	-

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA

DAFTAR SUB KEGIATAN-SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN DIANGGARAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA OPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN**)	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONSTRUKS DALAM PEKERJAAN			8.565.798.748,11	6.026.092.182,00	2.539.706.566,11		3.171.893.872,11	
1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**3.045.821.582,00**	**2.728.043.582,00**	**317.778.000,00**		**2.569.550.000,00**	
		Perencanaan Pembangunan Command Center	100.000.000,00	79.696.000,00	20.304.000,00	80%	Anggaran belum tersedia	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya	130.000.000,00	127.020.000,00	2.980.000,00	98%	Anggaran belum tersedia	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya	130.000.000,00	125.059.000,00	4.941.000,00	96%	Anggaran belum tersedia	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Dharmasraya	130.000.000,00	127.899.000,00	2.101.000,00	98%	Anggaran belum tersedia	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	130.000.000,00	123.920.000,00	6.080.000,00	95%	Anggaran belum tersedia	
		Perencanaan pembangunan Sarana olah raga nagari Sungai Duo	50.000.000,00	49.960.000,00	40.000,00	100%	Anggaran belum tersedia	
		DED Pembangunan Rumah Dinas Camat Padang Laweh	29.000.000,00	29.275.000,00	(275.000,00)	101%	Anggaran belum tersedia	
		DED Rumah Dinas Wakil Bupati	100.000.000,00	79.680.000,00	20.320.000,00	80%	Anggaran belum tersedia	
		DED Kawasan Kumuh Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung	50.000.000,00	49.920.000,00	80.000,00	100%	Anggaran belum tersedia	
		Perencanaan RTH Batas Kabupaten Dharmasraya Sijunjung	46.500.000,00	46.453.000,00	47.000,00	100%	Anggaran belum tersedia	
		Perencanaan paket V Jembatan	100.000.000,00	79.900.000,00	20.100.000,00	80%	Menunggu Hibah Dari Balai Jalan Nasional	
		Perencanaan Rehab Kantor DPRD Kab. Dharmasraya	99.806.500,00	79.675.200,00	20.131.300,00	80%	Anggaran belum tersedia	
		DED Kawasan Rawan Bencana Kec.Pulau Punjung	50.000.000,00	49.910.000,00	90.000,00	100%	Anggaran belum tersedia	
		Perencanaan Rumah Gadang - Gunung Medan	759.958.500,00	609.640.800,00	150.317.700,00	80%	Usulan Fisik Hibah Balai BPPW Propinsi Sumbar	
		Perencanaan Paket VI 2024 Jalan	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	100%	Efisiensi Anggaran	
		Perencanaan Paket VII 2024 Jalan	100.000.000,00	99.905.000,00	95.000,00	100%	Efisiensi Anggaran	
		Perencanaan Paket VIII 2024 Jalan	100.000.000,00	99.906.000,00	94.000,00	100%	Efisiensi Anggaran	
		Perencanaan Paket XIII 2024 Jalan	100.000.000,00	99.911.000,00	89.000,00	100%	Efisiensi Anggaran	
		Perencanaan Paket XIV 2024 Jalan	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	100%	Efisiensi Anggaran	

NO	NAMA OPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN**)	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		[-] Perencaan Paket IV (APBD) Pembangunan Jalan Spesifikasi : Perencanaan Teknis Usulan Propinsi	100.000.000,00	99.850.000,00	150.000,00	100%	Fisik di BPJN	
		[-] Perencaan Paket VIII (APBD) Pembangunan Jalan Spesifikasi : Perencanaan Teknis Jalan" Usulan Propinsi	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	100%	Fisik di BPJN	
		[-] Pembuatan Dokumen UKP/UPL Jalan Inpres Sungai Rumbai -Batas Solok Selatan	75.000.000,00	74.930.000,00	70.000,00	100%	Fisik di BPJN	
		Jasa Konsultansi DED Embung Koto Padang 2022	100.000.000,00	99.893.000,00	107.000,00	100%	Usulan Fisik Hibah Balai BPPW Propinsi Sumbar	
		Bangunan Pelengkap Jalan Kecamatan Sembilan Koto	215.556.582,00	146.006.582,00	69.550.000,00	68%	69.550.000,00	
		Perencanaan Rehab Jalan Paket I Pelebaran Jalan Samping RSUD Sungai Dareh Lama Perbaikan Jalan Padang Hilalang - Lubuk Labu	50.000.000,00	49.934.000,00	66.000,00	100%	2.500.000.000,00	
2	**Dinas Pendidikan**		**1.708.968.283,00**	**89.383.589,00**	**1.619.584.694,00**		-	
		- Rehab sedang bangunan gedung tenpat pendidikan spesifikasi Rehab sedang bangunan gedung tempat pendidikan SDN 01 Koto Besar	1.400.000.000,00	78.563.589,00	1.321.436.411,00	6%	Anggaran belum tersedia	
		Perencanaan Pembangunan Rumah Negara Tipe C SDN 10 IX Koto	308.968.283,00	10.820.000,00	298.148.283,00	4%	Anggaran silpa karena letak pekerjaan sulit di akses karena kondisi cuaca (musim hujan) sehingga pendistribusian material terkendala. Pelaksanaan kegiatan swakelola tipe 3 (POKMAS)	
3	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**		**199.620.000,00**	**199.620.000,00**	-		-	
		Master Plan dan DED PSU Nagari IV Koto Pulau Punjung dan Sungai Kambut	99.913.000,00	99.913.000,00	-	100%	Anggaran belum tersedia	
		DED KAWASAN KUMUH	49.950.000,00	49.950.000,00	-	100%	Anggaran belum tersedia	
		DED PENINGKTAN KUALITAS PEMUKIMAN KUMUH	49.757.000,00	49.757.000,00	-	100%	Anggaran belum tersedia	
4	**Dinas Kesehatan**		**3.611.388.883,11**	**3.009.045.011,00**	**602.343.872,11**		**602.343.872,11**	
		Pembangunan Gedung Cathlab, Perencanaan dan Pengawasan	1.438.096.584,81	1.198.596.517,00	239.500.067,81	83%	239.500.067,81	
		Pembangunan Gedung Rawat Inap Paru, Perencanaan dan Pengawasan	2.173.292.298,30	1.810.448.494,00	362.843.804,30	83%	362.843.804,30	

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XX.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	SUMBER	STATUS	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAINNYA	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 x18
						NIHIL												

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XX.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN DHARMASRAYA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/ RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN	BEBAN	LABA (RUGI) KOTOR	PENDAPATAN DI LUAR USAHA	BEBAN DI LUAR USAHA	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				NIHIL					

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI